Bacharuddin Jusuf Habibie
Detik-Detik yang Menentukan
Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi

Bacharuddin Jusuf Habibie

Detik-Detik yang Menentukan

Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi

THC Mandiri

Dipersembahkan
Kepada
Rakyat Indonesia

B. J. Habibie

Daftar Isi

Pengantar

Sejumlah buku sudah terbit dan mengungkapkan sejarah politik kontemporer Indonesia, khusus masa lahirnya reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari gelanggang politik di Indonesia. Buku-buku tersebut —beberapa di antaranya ditulis oleh pelaku sejarah— telah membantu kita menelaah sejarah perpolitikan di Indonesia, dalam sebuah kurun waktu tertentu. Tetapi, sejujurnya, buku yang ditulis secara deskriptif dengan berbagai sumber-sumber utama dan sekunder itu, belum lengkap mengungkapkan apa yang sebetulnya telah terjadi.

Dengan kehadiran buku ***Detik-Detik Yang Menentukan***, ***Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi***, ditulis oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 RI, semakin melengkapi khazanah sejarah politik kontemporer Indonesia. Bacharuddin Jusuf Habibie, salah seorang pelaku utama sejarah pada masa lahirnya reformasi di Indonesia. Fakta yang dihadirkan dalam buku ini otentik, berdasarkan catatan dan pengalaman pribadi pelaku sejarah yang belum pernah diungkapkan. Fakta yang ada, tidak diberi "hiasan" dan "warna", tetapi disampaikan seperti apa adanya.

Selain memberikan fakta-fakta sejarah, penulis pun melakukan analisis apa yang telah terjadi. Penulis memberikan penilaian dan penjelasan tentang langkah-langkah serta gagasan maupun keputusan penting yang

telah diambilnya dalam gaya penulisan *inner dialog*. Sebuah percakapan dengan diri dan hati nuraninya dalam menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian yang dihadapinya. Tidak hanya itu, beberapa bagian tulisan, disuguhkan berupa "dramatisasi" beberapa peristiwa, selain suspensi, dengan gaya khas penulisnya membuat pembaca buku ini seperti membaca sebuah novel.

Dengan latar belakang profesi penulis sebagai insinyur, ditambah pengalaman sebagai salah seorang tokoh sentral dalam pemerintahan lebih dari dua dekade, Bacharuddin Jusuf Habibie, mendemonstrasikan secara unik, bahwa pemikiran dan analisis yang menghasilkan kebijakan penting pada masa-masa pemerintahannya, berlandaskan sejumlah "model" yang dikembangkannya sendiri. Model-model itulah yang menuntun dan menjadi pegangannya dalam membuat analisis sebelum menentukan sebuah tindakan dan kebijakan. Kerena itu, pelaku sejarah ini yakin, tidak satu pun kebijakan yang diambilnya dilakukan secara acak atau *random*. Itulah sebabnya, Bacharuddin Jusuf Habibie melaksanakan tugas-tugasnya secara konsisten dan konsekuen. Tindakan tersebut terbentuk oleh motivasi yang dilandasi nilai agama dan budaya yang telah melekat pada dirinya. Nilai itu pula telah menjadi prinsip hidup dan menjadi karakter pribadinya.

Dalam episode sejarah pemerintahannya, pelaku sejarah selamat mentransformasi sistem kekuasaan otoriter ke sistem demokrasi. Menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman —seperti yang ditulis dalam buku ini— proses "Balkanisasi" dan "perang saudara", sebagaimana yang terjadi pada beberapa negara dan bangsa lain, yang harus membayar reformasi dan demokratisasi dengan amat mahal, pecah berkeping-keping oleh perang saudara. Karena itu, tidak berlebihan untuk

mengatakan bahwa dalam sejarah politik di Indonesia reformasi telah terjadi, tetapi akan menjadi lain hasilnya tanpa kehadiran Bacharuddin Jusuf Habibie.

Bacharuddin Jusuf Habibie baru mengungkapkan sebagian kecil dalam buku ini. Sebagai pelaku utama sejarah pada masa kelahiran reformasi, ribuan halamanan lainnya —yang masih dalam bentuk tulisan tangan— masih disimpannya dan hanya akan dikeluarkan pada suatu masa kelak.

Fakta dan ungkapan yang ada dalam buku ini, hanyalah "detik-detik" yang dianggap penting dan bisa dipublikasikan, tanpa dampak politik yang akan memengaruhi jalannya reformasi di Indonesia. Buku ini ditulis berdasarkan catatan harian yang menjadi kebiasaannya sejak kecil, serta laporan yang diterimanya.

Mengenai judul buku "*Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Menuju Demokrasi*", menurut penulis dipilih berdasar pertimbangan bahwa semasa menjabat sebagai presiden, penulis menyadari bahwa Indonesia sedang berada pada "persimpangan jalan", suatu keadaan yang kritis, yang kalau ia mengambil kebijakan (jalan) yang salah, akan dapat berakibat perang saudara atau balkanisasi. Ia memilih suatu proses evolusi yang dipercepat dengan perencanaan yang matang, sebagai upaya penyelamatan bangsa dari situasi kritis tersebut.

Penulis banyak mengambil keputusan yang tidak popular, baik yang bersifat *irreversible* —seperti masalah Timor Timur, kemandirian Bank Indonesia, dsb.— maupun yang bersifat *reversible*. Keputusan tersebut diambil dengan cepat dangan memperhitungkan sekecil mungkin risiko yang mungkin terjadi. Itulah mengapa Penulis memilih istilah "*Detik-detik yang Menentukan*".

Sementara "*Jalan Panjang Menuju Demokrasi*" dipilih

karena apa yang dilakukannya tersebut merupakan bagian yang menentukan dari suatu proses demokratisasi Indonesia, yang masih dan akan terus berlangsung sampai tata-kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia terapai.

Isi buku ini —sebagai bagian dari catatan pribadi pelaku sejarah— akan menjadi sebuah unit sejarah yang penting, bagian dari "mosaik" episode sejarah bangsa Indonesia yang panjang dan berkelanjutan.

Struktur buku ini terdiri dari dua bagian utama. Tulisan inti terdapat pada Bab I sampai dengan Bab IV, selebihnya Prolog dan Epilog. Bab I sampai Bab IV dibuat oleh penulisnya sebagai pelaku sejarah, sementara Prolog dan Epilog, ditulis oleh sebuah tim, berdasarkan fakta dari berbagai sumber tertulis, serta pendapat dan analisis dari sejumlah pelaku sejarah lain yang terlibat langsung dalam reformasi.

Mengapa baru enam tahun lebih setelah masa kepresidenannya Penulis mempublikasikan catatannya?

Dari penjelasan penulis, diketahui ada dua alasan mengapa buku ini baru diterbitkan.

Pertama, Penulis ingin agar buku ini dapat ikut membantu terciptanya situasi kondusif bagi proses tranformasi bangsa menuju kehidupan demokrasi. Mengingat sebagian isinya dapat "mengganggu" apabila diterbitkan terlalu dini, maka penulis memilih waktu yang tepat untuk menerbitkannya, yaitu tatkala proses konsolidasi demokrasi bangsa telah semakin mantap, yang antara lain ditandai dengan terlaksananya pemilihan pimpinan (nasional dan daerah) secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan yang jujur dan adil.

Kedua, sebagaimana diketahui, kurang dari sebulan setelah menyelesaikan tugas sebagai presiden, penulis

bersama keluarga mendirikan *The Habibie Center* (THC), suatu lembaga kajian yang mandiri dan non-politik sebagai wahana untuk —bersama-sama dengan para koleganya— ikut mengawal proses transformasi bangsa menuntaskan reformasi. Itulah sebabnya THC memfokuskan kegiatannya pada kajian dan advokasi bagi tegaknya kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Begitu besarnya harapan penulis pada lembaga yang didirikannya ini, sampai-sampai penulis menunda beberapa bulan untuk mengantar istrinya berobat ke Jerman, guna meyakinkan lembaga yang didirikannya itu telah benar-benar berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan THC inilah —melalui salah satu sayap kegiatannya, PT THC Mandiri— yang dipercaya penulis untuk menerbitkan buku ini.

Melalui penerbit, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini. Terutama kepada tim editor: Andi Makmur Makka dan Ahmad Watik Pratiknya, serta kepada tim "reader" yang juga memberi masukan untuk penulisan Prolog dan Epilog, yaitu: Satrio B. Joedono, Muladi, Dewi Fortuna Anwar, Abdul Malik Fadjar, Sofian Effendi, Haryanto Dhanutirto, Wardiman Djojonegoro, Umar Juoro. Terima kasih penulis juga disampaikan kepada Ryaas Rasyid, Quraish Shihab, Hermawan K. Dipojono, Hidayat Nurwahid, Robert Elson, dan Bilveer Singh.Begitu pula kepada segenap staf The Habibie Center yang telah turut berpartisipasi mempersiapkan penerbitan buku ini

Buku ini disumbangkan kepada khazanah sejarah Indonesia. Namun, penulis berkeinginan pula mengetahui, bagaimana reaksi orang lain mengenai apa yang telah diungkapkannya. Dengan harapan, buku ini akan memberi motivasi dan stimulus bagi siapa pun untuk menuliskan pula apa yang mereka ketahui dan alami pada masa-masa

bersejarah tersebut. Dengan demikian, terbukalah lebih banyak prespektif yang akan memperkaya penulisan sejarah Indonesia khususnya masa reformasi.

Kami menyadari, buku ini belumlah sempurna, karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk lebih menyempurnakannya pada edisi-edisi mendatang.

Terima kasih.

Penerbit

Prolog

Prahara kembali menghantam bangsa Indonesia dalam siklus 30 tahunan. Kemelut politik pada pertengahan dekade 1960-an kembali berulang menjadi krisis multidimensional yang diawali dengan adanya krisis moneter pada pertengahan 1997.

Salah urus kenegaraan memasuki tahun 1960-an, telah membawa Indonesia dalam kesulitan ekonomi yang sangat berat. Inflasi mencapai 650 persen. Korupsi merajalela. Barang kebutuhan pokok sehari-hari mengalami kelangkaan di mana-mana. Kondisi buruk tersebut diperparah oleh krisis politik yang akhirnya memuncak pada tragedi nasional dengan korban jiwa banyak orang pada tanggal 30 September 1965.

Melalui usaha keras disertai bantuan negara-negara donor, Indonesia akhirnya berhasil bangkit kembali. Selama tiga dasawarsa berikutnya, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, bahkan disebut sebagai Negara Asia Berkinerja Tinggi oleh Bank Dunia.

Memasuki dasawarsa 1990-an, pemerintahan Orde Baru mulai menampakkan kekurangan-kekurangannya yang mendapat kritik tajam, karena pemerintahan yang terlalu sentralistis, serta munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara signifikan. Tetapi, semua kritik tersebut tidak

mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan saat itu. Sementara dalam pembangunan perekonomian di Indonesia, tampak pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan dalam laporan tahunan 1997, Bank Dunia masih meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tingkat rata-rata 7,8 persen.

Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, pada pertengahan 1997, timbullah krisis moneter di mana situasi semakin tidak terkontrol dan berkembang menjadi krisis multidimensional berkepanjangan di berbagai bidang. Efeknya sangat menyengsarakan rakyat.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia adalah efek domino dari krisis serupa yang dimulai dengan menurunnya nilai mata uang Thailand baht terhadap dolar AS pada 2 Juli 1997, dari 24,7 baht per dolar AS menjadi 29,1 baht per dolar AS. Puncak krisis moneter di Thailand tersebut adalah penutupan 56 dari 58 lembaga keuangan utama pada 8 Desember 1997.

Krisis penurunan nilai mata uang bath diikuti negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan. Negara-negara ini diperkirakan memiliki struktur perekonomian tidak jauh berbeda dengan Thailand. Krisis memicu pelarian modal asing dari negara-negara tersebut, membuat sistem perbankan di negara-negara tersebut ambruk satu demi satu.

Di Indonesia, tanda-tanda adanya krisis terjadi pada minggu kedua Juli 1997, ketika kurs rupiah merosot dari Rp2.432 per dolar AS menjadi sekitar Rp3.000 per dolar AS. Bank Indonesia berusaha membuat sejumlah kebijakan dengan melebarkan rentang kendali rupiah, namun krisis moneter, yang diikuti dengan semakin menipisnya tingkat kepercayaan, membuat nilai rupiah semakin sulit dikontrol.

Langkah Presiden Soeharto mengundang Dana Moneter

Internasional (IMF), untuk membantu krisis pada 8 Oktober, tidak banyak membantu. Kebijakan pemerintah menutup 16 bank membuat pelaku usaha semakin hilang arah. Nilai rupiah semakin terperosok pada level Rp5.097 per dolar AS. Pada 8 Januari 1998, rupiah semakin lemah menjadi Rp9.800 per dolar AS dan mencapai Rp11.050 pada akhir Januari 1998.

Dampak krisis moneter mengakibatkan sistem perbankan di Indonesia tidak berfungsi dengan baik dalam waktu cukup lama, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha. Kegiatan bisnis mengalami stagnasi. Persediaan barang, khususnya kebutuhan bahan pokok, mengalami hambatan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Krisis pangan dan penyediaan sembako (sembilan bahan pokok) pun tidak dapat dihindari.

Macetnya dunia usaha mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, semakin memperbanyak jumlah pengangguran yang meningkat sejak 1995. Di samping itu, Indonesia juga dihadapkan pada pertambahan 3,2 juta jiwa angkatan kerja baru tiap tahun. Mereka yang tidak tertampung dalam dunia formal akhirnya bergerak di sektor informal dengan produktivitas yang rendah.

Krisis moneter itu menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka, dari 4,68 juta orang pada 1997, menjadi 5,46 juta orang pada 1998. Demikian pula jumlah setengah pengangguran, meningkat dari 28,2 juta jiwa pada 1997 menjadi 32,1 juta jiwa pada 1998. Pertambahan jumlah penganggur dan setengah penganggur tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, selanjutnya berimplikasi pada krisis sosial di berbagai bidang dan memengaruhi keamanan masyarakat.

Ekses lebih jauh, masyarakat mulai resah dan takut akan

kenyataan-kenyataan yang telah menimpa mereka. Ternyata pemerintah bukan saja tidak berhasil memberantas korupsi, justru sebaliknya malah menyuburkannya. Ini terjadi dalam lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, dari lapis jabatan tertinggi sampai yang paling bawah. Kolusi yang menyuburkan monopoli telah melebarkan jurang antara kaya–miskin, karena hanya sekelompok orang saja yang menikmati kesempatan dan fasilitas-fasilitas khusus di bidang ekonomi, sementara bagian terbesar rakyat tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Konsentrasi pembangunan pun masih banyak di Jawa, sementara daerah-daerah luar Jawa tetap saja tertinggal.

Globalisasi dan perkembangan masyarakat dunia yang transparan dan sarat informasi, mendorong berlangsungnya perubahan-perubahan pesat, telah memicu banyak perubahan di dunia. Rakyat Indonesia menanggapinya dengan menuntut kebebasan, transparansi, keadilan, demokrasi, dilandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia, tanggung jawab asasi, serta keamanan umat manusia (*human security*) dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Rakyat sudah memiliki lebih banyak kebebasan, transparansi lebih besar, lebih berani, tetapi sekaligus juga makin kebingungan, lebih pesimistis tentang masa depan mereka, bahkan lebih abai.

Ketidakpastian adalah akibat dari perubahan-perubahan cepat seperti itu dan ketidakpastian pulalah yang mengubah kredibilitas politik maupun ekonomi.

Kecemasan masyarakat itu akhirnya terefleksikan dalam aksi-aksi unjuk rasa, terutama dimotori kalangan mahasiswa. Pada mulanya, belum terdengar tuntutan agar Presiden mengundurkan diri. Namun selanjutnya, semakin tampak dukungan rakyat kepada pemerintah mulai surut. Akhirnya, unjuk rasa bukan lagi menuntut perubahan politik dan

ekonomi, melainkan menuntut perubahan kepemimpinan nasional. Sejak itu, dari hari ke hari, tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin nyaring.

Pada malam resepsi HUT Golkar ke-33 20 Oktober 1997, Presiden Soeharto tidak serta-merta menerima pencalonan kembali dirinya oleh Golkar menjadi Presiden (periode 1998-2003). Pencalonan Golongan Karya ini sangat penting, mengingat Golkar memiliki 567 kursi dari 1000 kursi di MPR. Pemilihan Umum tahun 1997 menempatkan Golkar sebagai pemenang dengan 74,51 persen, sehingga memperoleh 325 kursi di DPR. Sesuai ketentuan perundangan yang ada, maka Fraksi Golkar di MPR kemudian mendapat tambahan 242 kursi, sehingga menjadi 567 kursi atau 56,7 persen.

Seperti diketahui, sistem politik yang berlaku saat itu menjadikan Presiden mempunyai kekuasaan yang amat besar. Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan sebagai Presiden, Presiden Soeharto mengendalikan Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI di DPR maupun Fraksi Golkar, Fraksi ABRI, dan Utusan Daerah di MPR, melalui seorang Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar dan beberapa orang koordinator harian pengganti.

Dengan demikian, di DPR Presiden dapat mengendalikan 400 kursi (325 kursi Fraksi Golkar dan 75 kursi Fraksi ABRI) atau sebesar 80 persen; dan di MPR mengendalikan 829 kursi (576 kursi Fraksi Golkar, 113 kursi Fraksi ABRI dan 149 kursi Utusan Daerah) atau sebesar 83 persen. Dengan konsep Keluarga Besar Golkar tersebut, memang presiden mempunyai pengaruh yang amat besar dan amat menentukan tiap keputusan yang dibuat oleh DPR maupun MPR.

Meskipun demikian, Presiden Soeharto meminta agar proses pencalonannya kembali dicek lagi, apakah benar semua jajaran Keluarga Besar Golkar menghendaki dirinya

kembali menjadi presiden. Dalam sambutan tanpa teks, Presiden Soeharto menanggapi pencalonan itu dengan cerita perwayangan tentang seorang prabu (raja) yang akan turun dari singgasana dan siap menjadi *pandito.*

Rakyat membaca siratan kisah tersebut sebagai isyarat bahwa Presiden Soeharto tidak mau dicalonkan kembali sebagai presiden pada periode berikutnya. Karena itu, setelah terpilih kembali dalam Sidang Umum MPR 11 Maret 1998, dalam setiap demonstrasi mahasiswa di kota-kota besar di Jawa, seruan pengunduran diri Presiden mulai terdengar.

Kegalauan masyarakat juga terungkap dalam pemberitaan media massa. Jika media massa sebelumnya dibatasi oleh berbagai ketentuan dalam pemberitaan, sekonyong-konyong menampakkan keberanian dan independensinya. Media massa mulai bebas menurunkan pemberitaan dan opini yang menyuarakan aspirasi rakyat. Euforia pers nasional tersebut kian mendapat tempat, dengan adanya kebijakan lunak dari pemerintah, seiring dengan tuntutan reformasi.

Rangkaian aksi kerusuhan mencapai puncaknya ditandai dengan meletusnya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Pada waktu itu, mahasiswa Universitas Trisakti sedang melancarkan aksi unjuk rasa, namun mereka dihadang oleh aparat keamanan, dan terjadilah bentrokan yang menewaskan empat orang mahasiswa akibat tembakan peluru tajam. Tragedi ini menjadi bagian pemicu bagi rangkaian kerusuhan yang lebih besar pada tanggal 13-15 Mei.

Kerusuhan juga berlangsung di beberapa daerah, telah menimbulkan korban ratusan jiwa dan harta benda. Aksi-aksi kekerasan massa, perusakan, pembakaran, penjarahan, hingga tindakan asusila, menimbulkan kesedihan dan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Aksi kekerasan itu

adalah perbuatan di luar dugaan, karena dilakukan sesama rakyat Indonesia yang sebelumnya terkenal dengan keramahan dan kesantunannya.

Ketika puncak peristiwa kerusuhan ini terjadi, Presiden Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir, untuk mengadakan pertemuan G-15 pada tanggal 13-14 Mei l998. Melihat semua peristiwa yang memilukan ini, Wakil Presiden menyampaikan pernyataan keprihatinan pemerintah yang amat mendalam dan seruan kepada masyarakat agar menahan diri. Pernyataan dan seruan ini dibacakan di Istana Wakil Presiden pukul 23.00 pada hari Rabu malam.

Di Jakarta, korban-korban akibat kerusuhan telah berjatuhan. Pemerintah Daerah Tangerang mencatat lebih seratus jenazah hangus terbakar di sebuah kompleks pertokoan. Pemda Bekasi juga menemukan puluhan mayat korban kerusuhan. Pusat Penerangan ABRI melaporkan jumlah korban jiwa mencapai 500 orang. Belum lagi korban kerusuhan yang terjadi di Surakarta Jawa Tengah dan beberapa daerah lain, diperkirakan korban melebihi jumlah tersebut.

Gubernur DKI Jaya, Sutiyoso, kepada pers mengumumkan, sedikitnya 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil pribadi hangus, angkutan umum 66 buah, dan 821 sepeda motor hangus terbakar. Rumah penduduk yang terbakar mencapai 1.026 buah. Jumlah bank yang dirusak sebanyak 64, terdiri 313 kantor cabang, 179 kantor cabang pembantu, dan 26 kantor kas. Total kerugian fisik bangunan ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah lebih, belum termasuk isinya.

Kerugian akibat kerusuhan Mei 1998 jauh lebih buruk dibandingkan kerusuhan Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) di Jakarta yang telah merusak 144 bangunan atau dibandingkan Kasus 27 Juli 1996, yang menghancurkan

puluhan bangunan dan kendaraan senilai 100 miliar rupiah, belum termasuk korban jiwa.

Tersangka kerusuhan tersebut mencapai sekitar 1.000 orang yang sempat ditangkap aparatur. Mereka adalah para pelaku kerusuhan dan pejarahan di Jakarta dan sekitarnya.

Setelah Presiden Soeharto selesai mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelompok G-15 di Kairo Mesir, 13–14 Mei 1998, Presiden Soeharto mengadakan acara silaturahmi dengan masyarakat Indonesia di Kairo. Sebagaimana dikutip beberapa media, Presiden Soeharto mengatakan, bila rakyat tidak lagi memberi kepercayaan dirinya sebagai presiden, maka ia siap mundur dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Ia selanjutnya akan mengundurkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan keluarga, anak-anak, dan cucu-cucu.

Namun, Presiden Soeharto menekankan bahwa semua itu harus dilakukan secara konstitusional, sebab jika dilakukan secara inkonstitusional, berarti mengkhianati Pancasila dan UUD '45. Soeharto mengungkapkan keputusannya tersebut dalam bahasa Jawa yang terkenal dengan istilah *lengser keprabon mandeg pandito.* Istilah ini bermakna, berhenti dari jabatan yang diemban dan kemudian beralih menjadi *pandito.*

Selesai KTT G-15 di Kairo Mesir, pada tanggal 15 Mei l998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dini hari.

Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Presiden Soeharto meminta laporan perkembangan terakhir mengenai keadaan tanah air, dan menjelaskan pemberitaan mengenai keinginannya untuk mundur.

Sabtu, 16 Mei l998, pukul 09.00, Presiden Soeharto menerima delegasi guru besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Rektor UI Asman Budisantoso di Jalan Cendana Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa menjadi presiden bukanlah keinginannya, tetapi sebagai wujud rasa tanggung jawab sebagai mandataris MPR.

Tujuan pertemuan dengan sejumlah guru besar Universitas Indonesia tersebut adalah penyampaian hasil simposium *"Kepedulian UI terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia".* Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Presiden B.J. Habibie, para menteri koordinator, dan Sekretaris Negara.

Pertemuan selesai pukul 10.45. Presiden Soeharto selanjutnya menerima pimpinan DPR yang sebelumnya sudah berada di Jalan Cendana untuk mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden.

Pertemuan dengan pimpinan DPR, yang terdiri atas Harmoko (ketua), Ismail Hasan Metareum, Fatimah Ahmad, Syarwan Hamid, Abdul Gafur (wakil) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Afif Maroef dimulai pukul 11.00.

Presiden Soeharto mengawali pertemuan ini dengan menanggapi pemberitaan pers, yang menjelaskan bahwa ia siap mundur dari jabatan presiden, adalah tidak benar. Apa yang telah menjadi berita utama media ternyata tidak sesuai dengan maksudnya. Bantahan serupa sebelumnya memang telah dikemukakan oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan.

Menurut Alwi, Presiden Soeharto tidak pernah mengatakan "akan mundur". Menpen selanjutnya mengulangi kata demi kata apa yang telah diucapkan Presiden Soeharto di Kairo tersebut. Presiden, jelas Alwi, mengatakan, "Kalau masyarakat tidak lagi memberikan kepercayaan, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau tidak percaya *ya* sudah. Saya tidak akan mempertahankan dengan kekuatan senjata."

Alwi melanjutkan pernyataan Presiden Soeharto, "Saya barangkali tidak dipercaya oleh rakyat, saya akan menjadi *pandito,* akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Membimbing anak-anak supaya menjadi orang yang baik, kepada masyarakat bisa memberikan nasihat, bagi negara *tut wuri handayani*."

Pada awalnya, Pimpinan DPR bermaksud mengadakan klarifikasi atas pernyataan Presiden Soeharto di Kairo, tentang keinginannya siap mundur sebagai Presiden. Tetapi, materi konsultasi itu berubah dan Pimpinan DPR menyampaikan dua hal. *Pertama*, Dewan akan menyampaikan Agenda Reformasi. *Kedua*, Dewan menyampaikan aspirasi masyarakat yang datang ke DPR.

Dalam pertemuan antara Presiden Soeharto dan Pimpinan DPR tersebut, Presiden mengenakan safari coklat, tampak ceria dan tidak terlihat adanya tanda-tanda kelelahan walau ia baru saja tiba di Jakarta dari Kairo.

Harmoko, yang berbicara atas nama Pimpinan DPR/ MPR, menyampaikan sejumlah tuntutan reformasi yang semakin mengalir deras. Tuntutan reformasi itu pada intinya dapat disimpulkan menjadi tiga hal. *Pertama,* perlunya melaksanakan reformasi total. *Kedua,* menyampaikan keinginan rakyat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. *Ketiga,* mendesak dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR.

Dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR yang berlangsung 1 jam 30 menit tersebut, Presiden Soeharto selanjutnya meminta penilaian DPR. Ia juga bertanya, apakah DPR dengan fraksi-fraksinya juga menilai dirinya akan mengundurkan diri.

Presiden Soeharto menambahkan, ia mengerti adanya kegelisahan rakyat dan adanya kerusakan. Karena itu, ia menegaskan akan melindungi harta benda rakyat, aset

nasional, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Pancasila dan UUD '45.

Untuk melaksanakan janji-janjinya tersebut, Presiden Soeharto menegaskan tiga hal. *Pertama,* mempersilakan kelanjutan jalannya reformasi. *Kedua*, memperbaiki kinerja pemerintahan dengan melakukan *reshuffle* kabinet. Dan *terakhir,* Presiden akan menggunakan wewenang untuk melindungi keamanan rakyat dengan Tap MPR No. 5/1998.

Menanggapi penjelasan Presiden Soeharto tersebut, Ketua DPR Harmoko menanyakan tentang aspirasi rakyat yang menghendaki pengunduran diri Presiden.

Presiden Soeharto pun menjawab, "Ya, itu terserah DPR. Kalau Pimpinan DPR/MPR menghendaki, ya saya mundur, namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini."

Harmoko pun langsung merespons, apakah hal tersebut tidak sebaiknya dilakukan oleh Fraksi MPR, sebab Fraksi MPR lah yang mengangkat Presiden.

Menanggapi usulan Ketua DPR tersebut, Presiden Soeharto menjawab, "Tidak perlu, karena anggota DPR yang beranggotakan 500 orang, sudah mencerminkan anggota MPR."

Pernyataan Presiden Soeharto kepada rombongan Pimpinan DPR, kurang lebih sama dengan yang sudah disampaikan kepada delegasi pimpinan Universitas Indonesia, di tempat yang sama.

Presiden Soeharto sudah mengatakan, jika rakyat memang menginginkan dia diganti, ia mempersilakan, asal dilakukan secara konstitusional, dan hal itu sepenuhnya berada di tangan DPR/MPR. Jabatan yang diembannya sekarang, tegas Soeharto, tidak atas kemauan sendiri, tetapi atas kehendak rakyat yang disalurkan melalui DPR/MPR, sehingga semuanya terserah kepada DPR.

Seusai pertemuan, Harmoko mendapat berbagai

pertanyaan dari pers. Namun, di depan pers Harmoko hanya menjelaskan tanggapan Presiden bahwa reformasi akan jalan terus, akan ada *reshuffle* kabinet, dan akan digunakan Tap MPR No. 5/1998 untuk melindungi rakyat.

Adapun tentang pernyataan pengunduran diri Presiden, tidak dikemukakan Harmoko, karena hal tersebut belum dibahas dengan fraksi-fraksi. Namun, media khususnya surat kabar yang terbit sore, telah memberitakan bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri jika ada permintaan dari rakyat dan permintaan itu harus disalurkan melalui DPR. Berita media tersebut dikutip dari pernyataan delegasi UI.

Ahad, 17 Mei l998

Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, sebelum menemui Presiden Soeharto di Jalan Cendana, memaparkan kepada pers, bahwa di DKI Jakarta sedikitnya terdapat lima ratus satuan usaha yang mengalami gangguan. Jika satu usaha menyerap 10 pekerja, maka akan terdapat 50.000 orang yang mengalami gangguan, belum termasuk keluarganya.

Ketika bertemu Presiden Soeharto, Menko Ekuin datang bersama Menhankam/Pangab, Wiranto; Mentamben, Kuntoro Mangkusubroto; Menteri Perhubungan, Giri Suseno; Menperindag, Muhammad Hasan; Gubernur BI, Sjahril Sabirin; Kepala Bulog, Beddu Amang; Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso; dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

Ginandjar menambahkan, kerugian material kerusuhan itu, juga menyebabkan terganggunya sistem perekonomian, terutama dalam jangka panjang. Kerusuhan tidak hanya mengganggu pusat perdagangan besar, tapi juga kegiatan hulu hingga hilir.

Sebelum terjadi kerusuhan selama beberapa hari terakhir itu, dunia perbankan sedang mengalami kesulitan besar, akibat sejumlah bank ditutup. Pemerintah telah menempatkan sejumlah bank di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Menurut Gubernur BI, Sjahril Sabirin, ada 501 kantor bank dan 220 ATM mengalami kerusakan akibat pembakaran, perusakan, dan penjarahan. Pada 14 dan 15 Mei, sejumlah bank tidak bisa beroperasi, sehingga BI meniadakan kliring. Tetapi Bank Indonesia kondisinya sudah normal dan mulai beroperasi secara penuh sejak Senin, 18 Mei 1998.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kekhawatiran akan kelangkaan bahan pokok kebutuhan sehari-hari, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak membeli barang secara berlebihan, setelah pada beberapa hari terakhir muncul kelangkaan bahan pokok, akibat tertutupnya sejumlah besar toko-toko. Isu kelangkaan bahan kebutuhan pokok sehari-hari ini semakin menggelisahkan rakyat.

Untuk menghilangkan kegelisahan tersebut, Menperindag Bob Hasan mengumumkan bahwa pemerintah akan menjamin persediaan barang, dan mengimbau masyarakat untuk tidak memborong berbagai kebutuhan sehari-hari. Tetapi, masyarakat sudah terlanjur panik. Mereka tetap membeli bahan kebutuhan pokok secara berlebihan. Susu bubuk untuk bayi dan beberapa barang kebutuhan pokok keseharian menghilang dari toko dan pusat-pusat perbelanjaan.

Sementara itu, Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan kerugian yang diderita Pertamina akibat rusaknya sejumlah pompa bensin di Jakarta. Kendati demikian, papar Kuntoro, Pertamina dan PLN tetap menjamin penyediaan BBM serta listrik bagi masyarakat.

Akibat berbagai kerusuhan yang terjadi, roda perekonomian mengalami kemacetan. Warga negara asing menjadi takut tinggal di Indonesia, terutama Jakarta. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan agar 8.000 warganya di Jakarta segera meninggalkan Indonesia pada Jumat, 15 Mei 1998. Juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengumumkan, bila warga negara mereka tidak memperoleh kursi di penerbangan komersial, akan dibantu dicarikan alternatif transportasi.

Pemerintah Jerman juga telah melarang warganya yang hendak berwisata ke Bali dan wilayah Indonesia. Larangan serupa, juga dikeluarkan pemerintah Taiwan, China, Australia, dan Filipina.

Sebuah peristiwa langka selama pemerintahan Presiden Soeharto terjadi keesokan harinya. Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkan pada Ahad, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.

Rapat Menteri bidang Polkam juga digelar menanggapi meluasnya gejolak aksi unjuk rasa pada 17 Mei 1998. Gelombang aksi unjuk rasa tersebut menuntut penurunan harga BBM, penurunan harga kebutuhan pokok, dan penurunan Presiden Soeharto. Rapat merekomendasikan penurunan harga BBM dan komoditas lainnya kepada Presiden, dan tidak menyarankan perombakan kabinet. Namun, rapat menko akhirnya juga meminta petunjuk Presiden untuk mengatasi perkembangan yang cenderung semakin memburuk.

Senin, 18 Mei 1998

Sejak pagi, Gedung DPR/MPR mulai dipadati

mahasiswa dan berbagai unsur masyarakat. Jumlah mereka semakin banyak di siang hari. Tuntutan reformasi total termasuk pengunduran diri Presiden Soeharto semakin mengeras disuarakan mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air.

Pimpinan DPR yang telah berkumpul di dalam gedung mengadakan rapat untuk menyampaikan sebuah Keterangan Pers. Keputusan ini diambil setelah mencermati keadaan semakin panas dan sangat membahayakan kesatuan bangsa.

Setelah berjam-jam merundingkan konsep redaksional dan mengonsultasikannya dengan pimpinan fraksi, "Keterangan Pers" tersebut akhirnya dibacakan oleh Ketua DPR RI Harmoko. Ia didampingi Wakil Ketua Syarwan Hamid (FABRI), Abdul Gafur (FKP), Ismail Hasan Metareum (FPP) dan Fatimah Achmad (FPDI).

Keterangan Pers Ketua DPR/MPR tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Keterangan Pers Ketua DPR/MPR

Pimpinan dewan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat tentang reformasi, termasuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden.

Untuk membahas masalah tersebut, direncanakan esok harinya, tanggal 19 Mei 1998, pimpinan dewan akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi, dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden Soeharto. Mekanisme tersebut ditempuh sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPR karena dalam mengambil keputusan pimpinan dewan harus bersama-sama pimpinan fraksi-fraksinya.

> Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.
>
> Pimpinan dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban supaya segala sesuatu dapat berjalan secara konstitusional.

Keterangan pers Pimpinan DPR/MPR disambut gemuruh hadirin yang terdiri atas wartawan dan mahasiswa. Kejadian ini kemudian ditayangkan melalui siaran televisi, sehingga langsung mendapatkan tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) Hamzah Haz mengatakan bahwa soal permintaan Presiden Soeharto mundur juga merupakan aspirasi FPP. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), menurut Ketua Fraksi FPDI Budi Hardjono, telah menerima masukan dari berbagai pihak. Budi menjelaskan FPDI sepakat meminta Presiden Soeharto mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, dengan penuh hormat dan dilaksanakan secara konstitusional demi kepentingan bangsa dan negara.

Pukul 19.50, sebagai reaksi atas keterangan pers pimpinan DPR/MPR, pimpinan ABRI, melalui Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto menyampaikan pernyataan pers sebagai tanggapan pernyataan pers pimpinan DPR/MPR. Ia mengadakan jumpa pers di Jakarta pada malam harinya, dihadiri wartawan asing dan dalam negeri.

Hadir antara lain para Kepala Staf ABRI: KSAD Jenderal TNI Subagyo; KSAL, Laksamana TNI Arief Kusharyadi; KSAU, Marsekal TNI Sutria Tubagus; Kapolri, Jenderal Pol.

Dibyo Widodo; Pangkostrad, Letjen TNI Prabowo Subianto; dan Danjen Kopassus, Mayjen TNI Muchdi PR. Hadir juga Sekjen Dephankam, Kapuspen, Kadispenad, Kadispenau, Kadispenal, dan Kadispenpolri.

Isi lengkap pernyataan pers ABRI yang dibacakan Jenderal Wiranto di Jalan Merdeka Barat adalah sebagai berikut:

> Saudara-saudara sekalian,
>
> Masih hangat dalam ingatan kita peristiwa pembakaran dan penjarahan massal yang dilakukan secara kalap oleh masyarakat yang lupa diri, termakan ajakan, hasutan, dan dorongan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibat dari kejadian itu, kita saksikan sungguh sangat menyedihkan, di samping korban jiwa ditambah angka kerugian material yang sangat tinggi, kita juga masih merasakan akibat berantai dari kejadian tersebut dalam waktu yang cukup lama.
>
> Betapa berat dan mahal risiko dari sebuah komunitas yang sudah kehilangan kontrol sesaat atas dirinya, mengingkari agama, mengingkari hukum dan etika. Belum dingin bara api yang melalap bangunan pemerintah, toko-toko, dan rumah penduduk, belum selesai para keluarga meratapi para familinya yang menjadi korban kerusuhan massa.
>
> Mereka terdorong oleh arus kebebasan yang berlebihan sehingga mengganggu kebebasan orang lain, bahkan mengancam keselamatan jiwa, harta masyarakat, dan fasilitas umum. Oleh karena itu, ABRI sebagai bhayangkari negara yang tetap konsisten akan peranannya sebagai stabilisator yang berarti membela dan menjaga konstitusi serta stabilitas nasional, mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan dalam rambu-rambu hukum dan peraturan yang berlaku.
>
> Dengan tidak terpengaruh dan terhasut untuk

melakukan berbagai tindakan yang nyata-nyata hanya akan mengeruhkan suasana, bahkan tergiring untuk berhadapan dengan aparat keamanan, ABRI mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menghormati dan mengingkari konstitusinya, niscaya tidak akan pernah tenang. Bahkan akan sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kehancuran. Maka bagi pihak yang ingin menghasut, mendorong rakyat untuk bertindak anarkis, saya serukan agar memikirkan dan menghentikan kegiatannya itu.

Saudara-saudara sekalian,

Terhadap pernyataan pimpinan DPR RI yang baru saja kita dengarkan bersama, maka ABRI berpendapat dan memahami bahwa pernyataan pimpinan DPR RI agar Presiden Soeharto mengundurkan diri adalah sikap dan pendapat individual, meskipun disampaikan secara kolektif.

Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota dewan melalui Sidang Paripurna DPR. ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tangung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini.

Agar reformasi yang hendak dilakukan dapat berjalan dengan baik, ABRI menyarankan agar dibentuk Dewan Reformasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat, terutama kampus dan tokoh-tokoh kritis. Dewan ini akan berdampingan dengan DPR dan bekerja sama secara intensif.

Selasa, 19 Mei l998

Mengantisipasi semakin maraknya aksi demonstrasi, baik di gedung DPR/MPR maupun di berbagai penjuru tanah

air, pimpinan DPR mengadakan Pertemuan Konsultasi dengan pimpinan fraksi sekitar pukul 09.00. Rapat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPR, karena seluruh keputusan pimpinan dewan harus bersama-sama dengan pimpinan fraksi. Dari jajaran pimpinan DPR hadir Harmoko, Abdul Gafur, Ismail Hasan Metareum, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid. Hasil rapat memutuskan mendesak Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional.

Pada saat yang sama, pada tanggal 19 Mei 1998, dari pukul 09.00 hingga pukul 11.32, di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Presiden Soeharto mengundang sejumlah tokoh. Pertemuan tersebut disiarkan langsung melalui jaringan televisi.

Pertemuan konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi terpaksa ditunda sebentar untuk mendengarkan penjelasan Presiden Soeharto melalui siaran televisi.

Para tokoh masyarakat yang diundang hadir berasal dari kalangan cendekiawan dan ulama. Mereka adalah: Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (PB NU), K.H. Abdurrahman Wahid; budayawan, Emha Ainun Najib; Direktur Yayasan Paramadina, Nurcholish Madjid; Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Ali Yafie; H. Abdul Malik Fajar dan H. Sutrisno Muhdam (Muhammadiyah); K.H. Cholil Baidlowi (DDII); K.H. Ma'ruf Amin dan H. Ahmad Bagja (NU); serta Pembantu Asisten Khusus Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Pertemuan ini juga dihadiri beberapa pejabat ABRI.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa jabatan presiden bukanlah hal yang mutlak. Karena itu, menurut Presiden Soeharto, tidak masalah jika ia harus mundur. Hanya saja, ia mengingatkan apakah dengan kemundurannya sebagai presiden akan membuat keadaan genting akan segera bisa diatasi.

Presiden masih sangsi apakah pengganti —yang sesuai dengan konstitusi yaitu Wakil Presiden— dapat melanjutkan tugas-tugasnya. Bahkan, papar Presiden Soeharto, tidak tertutup kemungkinan penggantinya kelak bakal didemo oleh para demonstran. Karena itu, ia tetap memutuskan untuk meneruskan tugasnya sampai selesai.

Nurcholish Madjid mengatakan, bahwa Presiden Soeharto sempat berkelakar, "Saya ini *kapok* jadi presiden."

Hal itu, ungkap Cak Nur, dikatakan Pak Harto sampai tiga kali. Pernyataan Pak Harto tersebut, menurut Cak Nur, dalam bahasa orang Jombang, bukannya *kapok* tapi *tuwuk* (kekenyangan).

Presiden Soeharto juga mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepat-cepatnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru. Ia juga menegaskan, tidak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto mengemukakan akan segera membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti-Monopoli, dan UU Anti-Korupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Anggota komite terdiri atas unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar. Presiden mengambil keputusan ini setelah mendengar saran-saran dan pendapat dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai organisasi kemasyarakatan, dan ABRI.

Keputusan membentuk Komite Reformasi, menurut Presiden Soeharto, demi untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan tersebut, lanjut Presiden, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh MPR. Sebagai Presiden Mandataris

MPR, Soeharto lebih lanjut berjanji akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.

Presiden Soeharto juga mengatakan akan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Adapun tentang Sidang Umum MPR, Presiden menjelaskan akan melaksanakan pada tahun 2000 dengan agenda memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Selanjutnya Presiden Soeharto menegaskan bahwa dirinya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan menjadi Presiden.

Seusai pertemuan dengan para tokoh masyarakat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan sebagai berikut:

> Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh ulama dan tokoh masyarakat dan juga pimpinan ABRI. Antara lain, saya minta beberapa pandangan dan nasihat untuk menghadapi keadaan negara yang sama-sama telah kita alami dan kita bersama telah mengetahui sekarang.
>
> Tentu semua ini adalah keprihatinan bagi kita yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keselamatan negara dan bangsa ini. Antara lain, ada keinginan-keinginan agar saya mundur dari kedudukan sebagai Presiden. Bagi saya, sebetulnya mundur tidaknya itu tidak jadi masalah. Yang perlu kita perhatikan apakah dengan kemunduran saya kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi.
>
> Sebab, bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan hal yang mutlak. Saudara-saudara tentu juga ingat proses pemilihan dan pelantikan presiden pada waktu saya akan dicalonkan menjadi Presiden untuk 1998-2003 oleh kekuatan sosial politik dan disampaikan kepada fraksi-fraksi dalam MPR. Sebelumnya saya sudah mengatakan apakah benar rakyat Indonesia masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun.
>
> Saya minta supaya dicek benar-benar semuanya itu. Dan ternyata semua kekuatan sosial politik: PPP, PDI, Golkar maupun ABRI mengatakan memang benar sebagian besar

rakyat masih menghendaki saya sebagai Presiden untuk masa bakti 1998–2003.

Baiklah, kalau demikian, tentu saya berterima kasih dengan rasa tanggung jawab. Jadi, saya terima bukan karena kedudukan, tetapi karena tanggung jawab, lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, *tinggal gelanggang colong playu*. Artinya meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab.

Karena itu, pada waktu itu, sekali lagi saya terima dengan rasa tanggung jawab semata-mata terhadap negara dan bangsa Indonesia. Sekarang, ternyata baru saja timbul suara yang tidak seluruhnya mendukung dan percaya. Mereka telah melakukan unjuk rasa bahwa mereka sudah tidak percaya lagi kepada saya, sehingga lantas mengajukan tuntutan supaya saya mundur.

Bagi saya, mundur itu sekali lagi tidak masalah, karena saya sudah punya pendirian untuk tidak menjadi Presiden dan saya bertekad *ngamandito*. Dalam arti, saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya *tut wuri handayani*, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu negara.

Sekarang, kalau tuntutan pengunduran diri itu saya penuhi secara konstitusional, maka harus saya serahkan kepada Wakil Presiden. Kemudian timbul apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian masalah dan tidak akan timbul lagi masalah baru. Nanti jangan-jangan Wakil Presiden juga lantas harus mundur lagi. Kalau begitu terus-menerus dan itu menjadi preseden atau menjadi kejadian buruk dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa kita akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalam

menjamin kehidupan kita dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Sedangkan kita memiliki dasar Pancasila dan UUD '45, berarti kita memiliki konstitusi. Kalau konstitusi itu oleh setiap warga negara dan kita tidak dipegang teguh, tentu negara dan bangsa akhirnya akan menjadi tidak langgeng berdirinya. Bahkan mungkin ganti-berganti yang kemungkinan juga berakibat ada yang setuju dan ada yang tidak, yang berarti pula akan mengakibatkan pertentangan yang lebih tajam, mungkin sampai pada perang saudara, dan lain sebagainya.

Kalau ini terjadi, siapa yang rugi, tentu juga bangsa kita sendiri. Sedangkan negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, kemudian dengan diiringi lahirnya Pancasila dan UUD '45 sehari sesudahnya, merupakan warisan dari pejuang-pejuang kita yang telah gugur, untuk dijadikan landasan yang baik bagi bangsa kita yang sangat majemuk dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, sehingga negara Republik Indonesia benar-benar akan terus-menerus dapat dipertahankan, dan kita bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan juga diakui oleh bangsa-bangsa yang lain.

Sekali lagi bahwa soal mundur bagi saya tidak masalah. Hanya masalahnya, rasa tanggung jawab saya. Perlu dipikirkan bagaimana negara dan bangsa kita. Jadi, saya andai kata belum mengambil keputusan mundur, tidak, tapi bagaimana agar dengan kemunduran saya ini negara dan bangsa benar-benar tetap terjaga. Konstitusi kita tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berarti bahwa Pancasila dan UUD '45 pun juga akan tetap dilaksanakan.

Karena itulah, saya harus mengambil langkah yang tidak meninggalkan konstitusi, tapi yang bisa digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan, mengatasi berbagai krisis kepercayaan. Perusakan-perusakan yang terjadi akhir-akhir ini dengan sendirinya menambah kemampuan bangsa dan negara menjadi lebih

kecil. Sehingga, untuk mengadakan rehabilitasi apalagi kelanjutan pembangunan, membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesiapan untuk perencanaan maupun juga pelaksanaannya.

Untuk itulah, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kita harus memikirkan betul-betul agar ada satu fase yang bisa menjamin kelangsungan negara dan bangsa, di mana tidak menimbulkan kerusuhan, tapi apa yang diinginkan, ialah reformasi dan sebagainya itu, bisa berjalan dengan baik.

Sekali lagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hendaknya kita benar-benar meresapkan, pikirlah nasib negara dan bangsa Indonesia, pikirlah keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia.

Jangan sampai karena emosi tidak terkendali, kemudian bangsa kita akan menjadi lebih miskin dan lebih menderita. Sedangkan, cita-cita perjuangan kita untuk memproklamasikan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45 adalah untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dan membangun agar masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu benar-benar akan bisa terwujud.

Sekali lagi, maksud saya dalam mengambil jalan yang saya kemukakan tadi, semata-mata untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Segala sesuatu harus kita laksanakan berdasarkan konstitusi kita. Saya harapkan, semuanya itu dapat dimengerti dan tidak perlu lagi khawatir, saya tidak akan mempertahankan untuk menjadi Presiden, sama sekali tidak.

Ada yang mengatakan, apabila saya tidak menjadi presiden, kembali menjadi anggota masyarakat biasa, saya masih bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa, dan masih banyak pengabdian yang bisa saya berikan. Jadi demikianlah ada juga yang mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden tidak akan *patheken*. Kembali menjadi warga negara biasa tidak kurang terhormat

daripada presiden asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa.

Jadi jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya untuk membuat keselamatan bangsa dan negara, kita harus mengambil langkah-langkah yang konstitusional, tetapi juga diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan menempuh jalan yang benar.

Saya mengharap semua pernyataan saya bisa dimengerti oleh rakyat seluruhnya, sehingga lantas hentikanlah segala kegiatan yang akhirnya membawa akibat penderitaan rakyat kita. Hentikanlah menghasut, dan lantas mendorong rakyat untuk berbuat salah. Sebenarnya, rakyat tidak mempunyai jiwa untuk berbuat salah, tapi jika sampai rakyat berbuat salah, itu karena dihasut, didorong sampai lantas lupa. Dan memang ini harus kita akhiri, karena bisa memengaruhi nama dan martabat pada bangsa kita.

Sekali lagi, terima kasih atas perhatian para wartawan dan juga saudara-saudara ulama.

Setelah mendengar saran-saran dan pendapat dari para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan pendapat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), maka untuk menyelamatkan negara dan bangsa, pembangunan nasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta persatuan dan kesatuan bangsa, saya mengambil keputusan, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai Presiden mandataris MPR, saya akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.

Untuk itu, saya akan membentuk Komite Reformasi, yang anggota-anggotanya terdiri atas tokoh masyarakat dan para pakar dari dunia perguruan tinggi.

Tugas komite ini segera menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-Undang Anti-Monopoli, Undang-Undang

Anti-Korupsi, dan lainnya sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pemilihan Umum akan dilaksanakan secepat-cepatnya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang baru.

Melaksanakan Sidang Umum MPR hasil pemilihan tersebut, antara lain untuk menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, dan ketetapan-ketetapan lainnya.

Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai Presiden.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis, di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera melaksanakan *reshuffle* kabinet, sehingga Kabinet Pembangunan VII berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi.

Saya minta ABRI menjaga kewaspadaan dan keselamatan nasional, menciptakan keamanan dan ketertiban, bersama-sama dan bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat.

Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban peristiwa Trisakti dan keluarga korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada sanak keluarga korban kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan masyarakat dalam melaksanakan reformasi nasional yang sedang kita laksanakan. Semoga Allah melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan Presiden Soeharto yang disiarkan melalui televisi.

Sementara itu, di Gedung DPR/MPR, setelah peserta pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dan pimpinan

fraksi menyaksikan pernyataan tertulis Presiden Soeharto melalui televisi, pertemuan itu dilanjutkan.

Hasil pertemuan konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi akan disampaikan langsung kepada Presiden Soeharto. Keputusan ini dilakukan karena DPR menginginkan adanya kesetaraan fungsi dan peranan dengan lembaga tinggi negara, yaitu Presiden. Kepekaan DPR sangat dibutuhkan saat itu untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan konsultasi itu adalah sebagai berikut:

Mengenai Reformasi. Bahwa aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat mengenai reformasi dilakukan secara menyeluruh, sebagaimana diserap oleh dewan dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk itu dewan mempercepat pelaksanaan agenda reformasi itu. Kesimpulan awal menambahkan reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum yang akan diimplementasikan dalam masa sidang ini.

Mengenai Pengunduran diri Presiden. Berkenaan dengan adanya aspirasi dari masyarakat yang menghendaki Presiden mengundurkan diri, sebagaimana yang telah disampaikan pimpinan dewan kepada Presiden, fraksi-fraksi sepenuhnya dapat memahami dan sepakat untuk dilaksanakan secara konstitusional.

Hasil konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tersebut pada tanggal 19 Mei l998, hari itu juga disampaikan pimpinan DPR kepada masyarakat melalui konperensi pers. Hasil konsultasi tersebut, membenarkan dan mengukuhkan keterangan pers pimpinan dewan yang disampaikan pada tanggal l8 Mei, sehari sebelumnya.

Sekitar pukul 10.00, di Istana Wakil Presiden, beberapa staf Wakil Presiden juga menyaksikan pertemuan Presiden Soeharto dengan para tokoh masyarakat di layar televisi.

Sementara itu, Wakil Presiden B.J. Habibie sedang menerima tamu didampingi Sekretaris Wakil Presiden, para Asisten Wakil Presiden, Akbar Tandjung dan Abdul Latief.

Tiba-tiba salah seorang asisten Wakil Presiden memberitahu B.J. Habibie tentang pertemuan di Istana Merdeka tersebut. Pertemuan segera dihentikan. Wakil Presiden bersama para tamu, asisten, serta Akbar Tandjung langsung melihat dan mendengarkan keterangan Presiden tersebut.

Penjelasan Presiden Soeharto di depan pers disambut kekecewaan oleh para pejabat dan staf Wakil Presiden, bahkan Asisten Wakil Presiden Ahmad Watik Pratiknya mengatakan Pak Harto telah "mengkhianati" B.J. Habibie sekaligus mengabaikan berlakunya Pasal 8 UUD 1945, karena tidak memercayai Wakil Presiden, dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa Presiden sangsi apakah Wakil Presiden dapat melanjutkan tugas-tugasnya, apakah tidak akan menjadi sasaran demonstrasi, apakah nanti juga harus mengundurkan diri.

Malam harinya, B.J. Habibie yang sekaligus menjabat sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, menghadap Presiden Soeharto di Jalan Cendana pada pukul 20.30 untuk membahas berbagai keadaan yang telah berkembang.

Sebelumnya, sekitar pukul 18.00, B.J. Habibie telah menerima telepon dari Ketua DPR/MPR Harmoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Harmoko menjelaskan hasil pertemuan antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi lainnya. Intinya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, secara arif dan bijaksana, Presiden Soeharto sebaiknya mengundurkan diri.

Wakil Presiden B.J. Habibie pun bertanya kepada Harmoko, apakah keputusan tersebut sudah pernah

dibicarakan dengan Presiden Soeharto. Ternyata hal tersebut belum dilakukan Harmoko, karena pernyataan tersebut bersifat pribadi dan sulit untuk melakukan hubungan dengan Presiden Soeharto.

Karena itulah, Harmoko mengaku perlu menelepon Wakil Presiden B.J. Habibie, agar hal tersebut disampaikan kepada Presiden Soeharto. Selain itu, melalui Wakil Presiden, Harmoko mengharapkan kesediaan Presiden meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan langsung darinya.

Menanggapi permintaan Harmoko tersebut, B.J. Habibie menyarankan agar Harmoko dan Abdul Gafur selaku pimpinan Golkar dan pimpinan DPR memberikan laporan tertulis kepada Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina Golkar. Usulan B.J. Habibie itu pun disetujui Harmoko.

Hr. Republika

Mahasiswa dan masyarakat di Ibukota
di halaman Gedung DPR/MPR 18 Mei 1998

Hr. Republika

Massa yang memenuhi jalanan Ibukota pasca Soeharto lengser

Sekneg.

Upacara Pelantikan Presiden B.J. Habibie, 21 Mei 1998 di Istana Negara

Hr. Republika

Pengambilan Sumpah Presiden B.J. Habibie, 21 Mei 1998 di Istana Negara

Sekneg.

Mantan Presiden Soeharto meninggalkan Istana Negara, 21 Mei 1998

Sekneg.

Pelantikan Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, 23 Mei 1998

Sekneg.

Bersama para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan
di depan Istana Negara

Sekneg.

Meninjau daerah kerusuhan di Jakarta

bab 1 Menjelang Pengunduran Diri Pak Harto

Kekuasaan adalah amanah dan titipan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bagi mereka yang percaya atas eksistensi-Nya. Bagi mereka yang tidak percaya atas eksistensi-Nya, kekuasaan adalah amanah dan titipan rakyat. Pemilik Kekuasaan tersebut, tiap saat dapat mengambil kembali milik Nya dengan cara apa saja.

Rabu, 20 Mei l998

Saya sedang mempersiapkan materi untuk dilaporkan kepada Presiden sesuai rencana di rumah pribadi Cendana, pukul 19.30 pada tanggal 20 Mei 1998. Bahan masukan saya peroleh dari Sekretariat Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar.

Perlu saya sampaikan bahwa Keluarga Besar Golkar terdiri dari Golkar, ABRI, dan Utusan Daerah. Masing-masing diwakili oleh Ketua Golkar, Panglima ABRI (Pangab), dan Menteri Dalam Negeri. Jabatan sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, saya emban untuk kedua kalinya yakni pada tahun 1993 dan 1998.

Dalam mekanisme politik saat itu, peran Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar amat menentukan. Tugas Koordinator Harian bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan rencana Sidang MPR pada awal Maret 1998,

Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada bulan September 1998 yang didahului oleh Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di tiap provinsi dan dimulai bulan April 1998 sampai September 1998. Biasanya Koordinator Harian bekerja sama dengan seorang atau beberapa orang Koordinator Harian Pengganti. Keputusan untuk mengangkat saya sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar tahun 1998 tanpa pengganti, saya terima pada tanggal 31 Desember 1997 malam hari.

Keadaan yang tidak menentu dan kritis sebagai akibat krisis ekonomi moneter di Thailand, di Indonesia sudah mulai terasa sejak bulan Agustus 1997. Dalam keadaan yang tidak menentu dan kritis itu, timbul pertanyaan pada diri saya, mengapa justru saya yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi Koordinator Harian tanpa Pengganti? Saya tidak pernah berhasil mendapat jawaban atas pertanyaan ini, begitu pula alasan dan maksud tujuannya.

Presiden serta Presiden yang baru terpilih, sebelum dan setelah Sidang Umum MPR berhasil diselesaikan, bersama Koordinator Harian, mengambil kebijakan politik setelah mempelajari masukan dan pandangan tiga jalur Keluarga Besar Golkar. Demikian pula penyusunan Kabinet Pembangunan yang dibentuk setelah Sidang Umum (SU) MPR, adalah hasil penilaian dan analisis Presiden terpilih bersama Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Seperti yang telah saya alami pada tahun 1993, bukan Wakil Presiden terpilih yang diajak Presiden terpilih untuk bersama menyusun Kabinet Pembangunan, melainkan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar.

Kunjungan saya ke kediaman Presiden Soeharto di Cendana, adalah dalam posisi sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar dan bukan sebagai Wakil Presiden.

Kunjungan itu bersifat rutin dan biasanya dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama.

Sewaktu saya sedang mempelajari laporan masukan dari tiga jalur, sekitar pukul 17.00 pada tanggal 20 Mei l998, ADC Kolonel (AL) Djuhana, datang ke ruang kerja saya melaporkan bahwa Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita minta berbicara melalui telepon.

Ginandjar juga menjabat sebagai salah satu Sekretaris Koordinator Harian Golkar di samping Akbar Tandjung, Rahardi Ramelan, Giri Suseno, Letnan Jenderal Gatot dan ibu Sulasikin Murpratomo.

Karena saya sedang menilai keadaan di lapangan dan mengecek data masukan Keluarga Besar Golkar (ABRI, Utusan Daerah dan Golkar), keinginan Ginandjar Kartasasmita berbicara dengan saya, saya kaitkan dengan kemungkinan adanya koreksi data yang sudah saya miliki.

Ternyata laporan yang saya peroleh, adalah pernyataan bahwa Menko Ekuin bersama 13 menteri yang berada dalam koordinasinya, tidak bersedia lagi untuk duduk di dalam Kabinet Reformasi yang anggotanya sedang disusun. Tetapi, sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII, mereka akan tetap melaksanakan tugas masing-masing, sampai Kabinet Reformasi terbentuk.

Pertanyaan saya singkat, "Apakah Anda sudah bicarakan dengan Bapak Presiden?"

Jawaban Ginandjar, "Belum, tetapi keputusan itu sudah ditandatangani bersama sebagai hasil rapat kami di Bappenas dan sudah dilaporkan secara tertulis, kepada Bapak Presiden, melalui Tutut, putri tertua Pak Harto."

Demikian Ginandjar Kartasasmita.

Saya bertanya, "Mengapa harus begini?"

Empat belas menteri tersebut adalah: Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno,

Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Saya juga bertanya kepada Ginandjar, siapa saja menteri yang tidak hadir? Ginandjar kemudian menyebut satu per satu nama menteri tersebut. Saya katakan, supaya hasil rapat disampaikan juga kepada mereka, agar pendapat mereka bisa didengar.

Setelah menerima laporan Ginandjar, saya sampaikan kepada ADC bahwa sementara saya tidak mau diganggu lagi.

Sekitar pukul 17.45, ADC melaporkan, bahwa Menteri Keuangan Fuad Bawazier terus mendesak untuk melaporkan sesuatu yang penting.

Melalui telepon Fuad Bawazier bertanya, "Apakah isu yang berkembang, bahwa Pak Habibie bermaksud mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, benar?"

Saya jawab, "Isu tersebut tidak benar. Presiden yang sedang menghadapi permasalahan multikompleks, tidak mungkin saya tinggalkan. Saya bukan pengecut!"

Fuad Bawazier menjawab bahwa ia sendiri tidak yakin berita itu benar, karena itu, ia ingin langsung mendengar penjelasan dari saya. Kemudian saya balik bertanya kepada Fuad Bawazier mengenai rapat yang diadakan oleh Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita di Bappenas. Jika belum tahu, saya minta ia menghubungi Menko Ekuin untuk mendengar hasil rapat tersebut.

Saya kemudian berangkat ke kediaman Presiden di Jalan Cendana. Sekitar pukul 19.30, saya tiba di Cendana, dan dipersilakan menunggu sebentar. Pak Harto sedang menerima mantan Wakil Presiden Sudharmono.

Siti Hediyati Prabowo, putri kedua Pak Harto, istri

Prabowo Subianto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menemani saya. Pada kesempatan itu saya bertanya, "Mengapa Prabowo yang sejak tiga hari saya cari tidak datang ke Kuningan? Apakah dia sedang berada di luar negeri?"

Siti Hediyati Prabowo menyampaikan bahwa suaminya berada di dalam negeri dan pesan saya akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan.

Setelah pertemuan Pak Sudharmono dengan Pak Harto selesai, saya dipersilakan masuk ke ruang kerja presiden. Sambil membuka sehelai kertas besar yang berisi nama-nama anggota Kabinet Reformasi, Pak Harto menyatakan agar saya bersama beliau mengecek ulang nama-nama tersebut.

Kesempatan itu saya manfaatkan untuk mengusulkan beberapa perubahan. Karena ada perbedaan pandangan menyangkut beberapa nama, maka terjadilah perdebatan yang cukup hangat. Saya menyadari bahwa Pak Harto mempunyai alasan tersendiri yang sudah dia pertimbangkan. Sebaliknya saya juga mempunyai alasan yang rasional dan sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang. Akhirnya, karena tidak ada titik temu, maka saya persilakan Pak Harto memutuskan apa yang terbaik, karena penyusunan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden. Akhirnya Kabinet Reformasi terbentuk.

Tidak beberapa lama kemudian, Pak Harto memanggil Menteri Sekretaris Negara, Saadilah Mursyid, untuk segera membuat Keputusan Presiden mengenai Susunan Kabinet Reformasi yang baru saja dibentuk.

Menurut rencana, esok harinya, hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden akan mengumumkan susunan Kabinet Reformasi. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 22 Mei l998, para anggota Kabinet Reformasi akan dilantik Presiden Soeharto

yang didampingi pula oleh Wakil Presiden. Semuanya agar dipersiapkan sesuai prosedur yang berlaku, demikian instruksi Presiden.

Saadilah Mursyid meninggalkan ruang kerja itu, sementara saya dan Pak Harto masih berada di ruangan tersebut meneruskan pembicaraan.

Setelah mempersilakan saya meminum teh, Pak Harto menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1998, ia bermaksud mengundang Pimpinan DPR/MPR untuk datang ke Istana Merdeka. Pernyataan Pak Harto tersebut saya sambut dengan menyampaikan bahwa pertemuan itu sudah lama mereka nantikan. Pimpinan DPR/MPR ingin langsung dapat memberi pendapat dan penilaian mengenai kehendak rakyat. Begitu pula mengenai keadaan di lapangan yang sedang berkembang dan berubah tiap detik.

Pak Harto tampaknya sama sekali tidak memerhatikan ucapan saya dan mengatakan, bahwa ia bermaksud menyampaikan kepada Pimpinan DPR/MPR untuk mengundurkan diri sebagai Presiden setelah Kabinet Reformasi dilantik.

Namun yang menjadi pertanyaan saya saat itu adalah, Pak Harto sama sekali tidak menyampaikan alasan mengapa beliau mundur, padahal baru saja disusun Kabinet Reformasi, bahkan setelah melalui dialog yang cukup seru. Demikian pula Pak Harto sama sekali tidak menyinggung mengenai kedudukan Wakil Presiden selanjutnya.

Menyadari cara berfikir Pak Harto yang telah saya kenal puluhan tahun, tidak disebutnya kedudukan Wakil Presiden tersebut jelas mempunyai alasan tertentu. Apa yang sebenarnya dikehendaki Pak Harto tentang saya? Apakah saya juga diminta ikut mundur? Pertanyaan ini muncul karena pernyataan Pak Harto sehari sebelumnya di hadapan sejumlah tokoh masyarakat seolah "meragukan"

kemampuan saya. Demikian sejumlah pertanyaan berkecamuk di benak saya.

Saya tahu persis Pak Harto sangat menyadari, bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih sebagai satu paket. Sebagaimana UUD '45 menyatakan bahwa jikalau Presiden berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Wakil Presiden berkewajiban untuk melanjutkan.

Keinginan Pak Harto, untuk *lengser* dan *mandito* atau mundur sebagai Presiden, menjadi seorang negarawan sangat saya pahami dan hormati. Namun, apakah dengan cara demikian pelaksanaanya?

Beberapa saat saya diam, dengan harapan mendapat penjelasan mengenai alasan beliau mundur, serta beberapa pertanyaan yang mengganggu pikiran tersebut. Namun ternyata tidak diberikan. Walaupun saya sangat memahami Ketetapan MPR mengenai kedudukan dan kewajiban presiden dan wakil presiden, saya terpaksa bertanya, "Pak Harto, kedudukan saya sebagai Wakil Presiden bagaimana?"

Pak Harto spontan menjawab, "Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden."

Jawaban Pak Harto sungguh di luar dugaan saya. Segera muncul dalam pikiran saya, bukankah kevakuman dalam pimpinan negara dan bangsa tidak boleh terjadi? Jikalau demikian yang dikehendaki Pak Harto, tidakkah hal itu tidak sesuai dengan UUD '45 dan Ketetapan MPR?

Bagaimana kedudukan saya, sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar tanpa pengganti? Begitulah, dalam suasana pertemuan yang "tidak lazim", serta suasana di lapangan yang tidak menentu dan cukup mengkhawatirkan, muncul berbagai pertanyaan yang amat mengganggu pikiran saya.

Untuk mengakhiri suasana pembicaraan yang tidak

mengenakkan tersebut, maka saya mengalihkan pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan, "Apakah Pak Harto sudah menerima surat pernyataan dari Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan empat belas menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin?"

Pak Harto menyampaikan bahwa ia sudah dengar dari Tutut, tetapi belum membaca suratnya. Kemudian Pak Harto mengulurkan tangannya untuk saya jabat, sebagai isyarat bahwa ia menghendaki diakhirinya pertemuan tersebut.

Pak Harto memeluk saya, dan mengatakan agar saya sabar dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Pak Harto juga meminta agar saya menyelesaikan masalah Ginandjar dan kawan-kawan dengan baik.

Saya mengatakan, "Akan saya usahakan, dan semuanya ini tidak tepat dan tidak perlu terjadi."

Pak Harto mengatakan, "Laksanakan tugasmu dan waktu tidak banyak lagi."

Saya segera meninggalkan ruang kerja Pak Harto, dengan perasaan yang tidak menentu dan pikiran yang dipenuhi tanda tanya. Bukan sekali ini saya berbeda pendapat dengan orang yang amat saya hormati ini. Bahkan mungkin perbedaan pendapat yang terjadi sebelumnya, jauh lebih "seru". Namun, keadaan yang saya alami malam itu sungguh berbeda! *Pertama*, karena Pak Harto seolah meninggalkan "misteri" pertanyaan menyangkut masalah bangsa yang tidak sederhana; dan *kedua,* karena hal itu terjadi pada saat bangsa ini sedang mengalami keadaan yang amat kritis.

Di dalam mobil, dalam perjalanan ke Kuningan, saya tugaskan ADC Kolonel (AL) Djuhana segera berhubungan dengan empat Menko dan semua menteri di bawah koordinasi Menko Ekuin, dan meminta agar mereka hadir

pada Sidang *Ad Hoc* Kabinet Terbatas di kediaman saya di Kuningan mulai pukul 22.00.

Dalam perjalanan dari Cendana ke Kuningan, saya panjatkan doa dengan bahasa yang tulus, dengan getaran hati dan jiwa, ikhlas datang dari hati sanubari saya sebagai berikut:

> "Tuhan, berilah Pak Harto kekuatan dan petunjuk mengambil jalan yang benar dalam memimpin bangsa Indonesia sesuai kehendak-Mu. Berilah Pak Harto, kesabaran dan kesehatan yang beliau butuhkan. Ampunilah segala dosa Pak Harto, yang sengaja ataupun tidak sengaja."

Saya lanjutkan dengan doa untuk diri saya dalam bahasa yang tulus, ikhlas pula sebagai berikut:

> "Oh Tuhan, saya tidak bertanya mengapa, kenapa, dan bagaimana, semua ini dapat terjadi. Karena saya berkeyakinan bahwa semua ada artinya, yang sekarang saya belum memahami tetapi kelak saya ketahui. Jikalau saya diperkenankan memohonkan sesuatu, maka berilah saya kekuatan, kesabaran untuk menghadapi semuanya dengan tenang dan menyelesaikan semua persoalan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia dengan baik. Berilah saya petunjuk untuk mengambil jalan yang benar, sesuai kehendakmu. Ampunilah dosa saya."

Sambil memanjatkan doa tersebut, saya dalam keadaan seperti dihipnotis tiba di Kuningan dan disambut oleh salah seorang Asisten Wakil Presiden, Jimly Asshiddiqie, yang mengantar saya ke pendopo. Di pendopo, saya tergeletak duduk beberapa menit dan seolah-olah dalam keadaan *trance*.

Kemudian saya masuk melalui ruang makan, di mana istri saya sedang membaca kitab suci Alquran. Di kamar tidur, setelah mengambil wudhu dan melaksanakan shalat, saya mengucapkan doa yang sama seperti di dalam mobil.

Doa tersebut berulang kali saya ucapkan dan berselingan dengan membaca Al-Faatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Naas.

Sekitar pukul 21.45, istri saya datang ke kamar tidur untuk menyampaikan bahwa di pendopo semua Menko dan banyak menteri hadir. Istri saya bertanya, "Ada apa?"

Saya jawab, "Saya panggil mereka."

Dihadapan 4 menko dan 14 menteri yang hadir di pendopo, saya jelaskan bahwa Kabinet Reformasi telah dibentuk oleh Pak Harto dengan memerhatikan masukan dari Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar.

Esok harinya, tanggal 21 Mei 1998 Kabinet Reformasi akan diumumkan oleh Presiden. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998, anggota kabinet akan dilantik oleh Pak Harto di Istana Negara. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 1998, Pak Harto akan menerima Pimpinan DPR/MPR di Istana Merdeka dan akan menyatakan mundur sebagai Presiden.

Oleh karena beberapa Menteri dari Kabinet Pembangunan VII masih dibutuhkan untuk duduk dalam Kabinet Reformasi, maka atas nama Pak Harto, saya mohon agar para menteri yang telah menandatangani pernyataan bersama tersebut dapat mempertimbangkan untuk menarik kembali pernyataan mereka dan ikut memperkuat Kabinet Reformasi.

Penjelasan saya menimbulkan diskusi yang hangat dan sekitar pukul 22.45, hasilnya dapat disepakati sebagai berikut:

- Susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan.
- Menyetujui Keputusan Presiden ditandatangani oleh Pak Harto.
- Pelantikan dilaksanakan oleh Pak Habibie.

Untuk melaporkan hasil Sidang *Ad Hoc* terbatas Kabinet

Pembangunan VII, saya menugaskan ADC untuk segera menghubungkan saya dengan Presiden Soeharto.

Namun, sangat saya sayangkan bahwa Pak Harto ketika itu tidak berkenan berbicara dengan saya. Ia hanya menugaskan Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid untuk menyampaikan keputusan bahwa esok harinya pukul 10.00 pagi, Pak Harto akan mundur sebagai Presiden. Sesuai UUD '45, Pak Harto menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Wakil Presiden RI di Istana Merdeka. Pengambilan sumpah Wakil Presiden menjadi Presiden akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan para Anggota Mahkamah Agung lainnya.

Saya sangat terkejut dan meminta agar segera dapat berbicara dengan Pak Harto. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan, dan ajudan Presiden menyatakan akan diusahakan pertemuan empat mata dengan Pak Harto di Cendana besok pagi sebelum ke Istana Merdeka.

Setelah pembicaraan melalui telepon dengan Saadilah Mursyid selesai, saya kembali ke pendopo untuk menjelaskan informasi yang baru saja saya peroleh.

Semua terkejut mendengar berita tersebut. Kemudian saya meminta agar para menteri yang hadir, dan juga para Asisten Wakil Presiden yang berada di ruang sebelah pendopo, untuk memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. Saya minta Jimly Asshiddiqie untuk memimpin doa. Istri saya juga diminta untuk hadir.

Setelah para menko dan menteri Kabinet Pembangunan bidang Ekuin meninggalkan Kuningan, saya langsung pergi ke ruang kerja. Dengan melalui internet, saya memantau perkembangan gerakan masyarakat di Indonesia pada umumnya, khususnya di Jakarta, dan reaksi luar negeri terhadap situasi di Indonesia yang terus memanas.

Sementara itu, saya menerima telepon dari Ketua DPR/

MPR Harmoko yang menyampaikan bahwa ia dan para pimpinan DPR/MPR, bersama para Ketua Fraksi, diminta datang ke Istana Merdeka besok pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10.00 pagi. Ia menanyakan alasan undangan tersebut.

Saya menjelaskan informasi dari Mensesneg dan memohon agar pimpinan DPR/MPR mengecek kembali, apakah keputusan Pak Harto untuk mengundurkan diri sebagai Presiden memiliki dasar hukum.

ADC yang bertugas, Kol. (AL) Djuhana, melaporkan bahwa Panglima ABRI Jenderal Wiranto mohon waktu untuk bertemu. Saya belum bersedia menerima siapa pun, karena harus merenungkan keadaan tanah air yang sangat memprihatinkan dan sudah di ambang pintu revolusi.

Mencermati keadaan yang berkembang, saya teringat pesan Pak Harto pada hari Senin tanggal 28 Januari 1974, pukul 19.30 di ruang kerja Presiden di Cendana:

- Saya sudah menentukan, Habibie membantu saya untuk mempersiapkan kerangka tinggal landas bangsa Indonesia memasuki abad yang akan datang
- Saudara Habibie dapat berbuat apa saja dan insya Allah dalam batas kemampuan saya, akan saya selalu berusaha mengamankan kebijakan saudara
- Kepentingan rakyat harus saudara utamakan di atas kepentingan golongan, partai, kawan, keluarga, dan kepentingan saudara sendiri
- Tidak boleh terjadi suatu revolusi lagi di bumi Indonesia karena rakyat tidak dapat mengatasinya
- Yang dikehendaki rakyat adalah ketenteraman, masa depan, dan hari depan yang cerah bagi anak cucu mereka
- Yang susah diatur adalah pimpinan pada umumnya khususnya partai politik, karena itu, Habibie harus bekerja keras agar pada suatu hari dapat menjadi

panutan dan idola anak bangsa sebagai seorang profesional

Mendengar penjelasan dan ucapan Pak Harto tersebut, saya memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa saya? Banyak orang yang lebih senior, lebih pintar, lebih pandai dan lebih berpengalaman dari diri saya. Mengapa harus saya?"

Pak Harto meletakkan setumpuk surat dan dokumen di atas meja sambil berkata, "Ini semua informasi mengenai Dr. Habibie!"

Pertemuan pertama dengan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia malam itu berlangsung dua jam dan melahirkan beberapa gagasan nasional antara lain:

- Gagasan mengenai pembentukan Industri Pesawat Terbang sebagai ujung tombak Industri Strategis
- Gagasan mengenai pembentukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek)
- Gagasan mengenai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Setelah merenungkan kejadian 24 tahun sebelumnya tersebut, kemudian saya kembali pada persoalan yang sedang saya hadapi. Pesan Pak Harto tersebut terus-menerus memengaruhi dan mendominasi proses pemikiran saya dalam mencari jawaban yang tepat atas beberapa pertanyaan yang terus timbul dalam diri saya.

- Mengapa Pak Harto memutuskan untuk segera meletakkan jabatan sebagai Presiden RI?
- Mengenal Pak Harto sebagai seorang pemimpin yang berpengalaman dan telah teruji dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, maka timbul pertanyaan,

"Mau ke mana Pak Harto? Dan bagaimana nasib bangsa?"

- Dinamika gerakan protes dan demo yang tidak menentu sangat tinggi dan memprihatinkan, tentunya berdampak negatif terhadap laju inflasi. Akibatnya *free fall* nilai rupiah sulit dihentikan, sehingga dapat terjadi, hiperinflasi yang mempersulit kehidupan pada umumnya dan khususnya meningkatkan penderitaan rakyat
- Hiperinflasi dapat pula mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, pengangguran secara besar-besaran terjadi dan modal asing yang lari ke luar negeri bertambah. Akhirnya keadaan berkembang menjadi suatu khaos yang bersifat anarkis yang dapat bergulir menjadi revolusi
- Aliran ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperjuangkan terlaksananya program politik mereka masing-masing dan mengganti UUD '45, Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan konstitusi yang baru. Perang saudara dapat terjadi
- Negara Kesatuan Republik Indonesia terancam eksistensinya. "Balkanisasi" Indonesia di ambang pintu
- Langkah kebijakan yang salah berakibat fatal, dan dapat memulai proses yang tidak kita ingini, berlangsung dengan kecepatan tinggi dan sulit dikendalikan lagi
- Perubahan tiap detik dengan permasalahan yang multidimensi dan multikompleks, terus terjadi dan terus berkembang
- Informasi dari Pak Harto mengenai inti permasalahan tidak saya miliki sedikit pun. Apa yang harus saya laksanakan, selain yang sudah diatur dalam UUD '45 dan Ketetapan MPR?

Penjelasan Pak Harto mengenai pengunduran dirinya sebagai Presiden RI, mungkin dapat saya peroleh pada pertemuan empat mata yang sedang diatur oleh protokol dan ADC Presiden.

Begitu pula, penjelasan dasar hukum pengunduran diri Pak Harto, mungkin dapat saya peroleh dari hasil sidang Pimpinan DPR/MPR dan Mahkamah Agung, besok pagi di Istana Merdeka, sebelum penyerahan resmi kekuasaan dari Presiden ke Wakil Presiden.

Keadaan yang tidak menentu, ketidakstabilan politik dan turunnya kredibilitas pemerintah adalah penyebab utama "krisis moneter", "krisis-ekonomi", dan "krisis politik".

Mengapa semuanya ini terjadi? Apa penyebabnya?

Apa benar keadaan tidak menentu yang terjadi tersebut karena "krisis moneter", "krisis ekonomi", dan "krisis politik" adalah penyebab utama?

Pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sekitar 53 tahun yang lalu, yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia adalah sejarah yang sama, yakni "dijajah selama 350 tahun oleh penjajah yang sama".

Bukan budaya, bukan agama, bukan ras, dan bukan kelompok etnik yang mempersatukan kita, tetapi nasib dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Perasaan senasib akibat penjajahan Belanda tersebut adalah pemersatu dan perekat bangsa.

Karena itu, yang diproklamasikan sebagai wilayah Republik Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda, wilayah Hindia Belanda.

Kualitas kehidupan dan tingkat keterampilan rakyat, pada waktu itu, sangat rendah karena pengaruh dan dampak negatif kolonalisme yang hanya menitikberatkan pada pembangunan prasarana ekonomi. Begitu pula pembangunan sumber daya manusia hanya diperuntukkan

untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan.

Politik aparat pemerintah yang dikendalikan oleh kekuasaan penjajah mengutamakan ketertiban dan pengamanan, demi untuk menekan biaya dalam pengambilan kekayaan bangsa Indonesia, bagi pembangunan di Belanda.

Lembaga-lembaga kebudayaan dan tradisional secara sistematis digerogoti demi kepentingan eksploatasi ekonomi. Lembaga-lembaga perekonomian dirancang untuk menjamin aturan-aturan perdagangan yang dipaksakan oleh kaum penjajah. Oleh karena itu, keadaan masyarakat Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan, tidak memiliki aparatur ataupun lembaga administrasi dan birokrat yang dapat diandalkan.

Untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, maka terpaksa pimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan kepemimpinan yang sifatnya otoriter.

Walaupun pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Mukadimah UUD '45, menyebutkan nilai-nilai yang berakar pada hak asasi manusia, kebebasan, dan kemerdekaan, namun dalam kenyataannya belum dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Hal itu terjadi karena lebih dari 95 persen penduduk Indonesia pada waktu itu, masih buta huruf, dibanding sekarang yang kurang dari 15 persen. Selain pendidikan, kebutuhan dasar manusia seperti makanan bergizi, air minum, perawatan kesehatan, dan lapangan pekerjaan menjadi perhatian utama.

Dengan bantuan organisasi multilateral dan negara-negara maju, Indonesia untuk pertama kalinya sejak 1968, selama lebih dari tiga dasawarsa, mampu menciptakan dan menerapkan program pembangunan yang berkelanjutan.

Didukung oleh pengembangan sumber daya manusia, prasarana ilmu pengetahuan dan perekonomian, secara sistematis, transformasi Indonesia menjadi sebuah negara industri dimulai.

Menjelang akhir abad milenium pertama, pengaruh industri media massa dan proses globalisasi semuanya berdampak positif pada proses pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Proses keterbukaan dan demokratisasi, yang dikembangkan oleh pemerintah dan Pimpinan Nasional, terlalu lambat dibandingkan dengan tuntutan masyarakat Indonesia.

Simbiosis antara pimpinan yang otoriter dengan lingkungan yang sudah berjalan dan membudaya sejak 53 tahun, mengakibatkan distorsi informasi politik yang menurunkan kualitas kebijakan Presiden sebagai pusat kekuasaan. Sistem otoriter yang selama ini diterapkan, tidak mampu lagi mencegah dan mengatasi krisis demi krisis.

Di sisi lain, keberhasilan sistem pendidikan ditambah dengan tersedianya sistem informasi yang terus berkembang, telah berhasil meningkatkan kualitas SDM.

Kesadaran hak asasi manusia (HAM) dalam suatu sistem informasi yang makin sempurna, walaupun belum dapat diimbangi oleh kewajiban asasi manusia (KAM) baik global maupun regional, meningkatkan tuntutan masyarakat untuk memperoleh kebebasan total di atas kemerdekaan.

Saya sangat menyadari bahwa tuntutan rakyat tersebut adalah wajar, karena kebebasan dan kemerdekaan tak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Derivatif dari kebebasan dan kemerdekaan adalah antara lain hak asasi manusia dan demokrasi. Bagaimana dengan 'kewajiban asasi manusia' yang harus mengimbangi hak asasi manusia?

Sejarah telah membuktikan bahwa para *entrepreneur* paling banyak lahir dan dapat berkembang menjadi unggul dan andal dalam suatu masyarakat yang bebas total (bebas dari dogma), merdeka, dan demokratis.

Para *entrepreneur* adalah salah satu penggerak utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu masyarakat. Oleh karena itu, adalah sangat wajar jikalau dalam era globalisasi dan informasi ini, tuntutan rakyat dipenuhi.

Permasalahannya, bagaimana memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut tanpa mengakibatkan suatu revolusi atau perang saudara yang jelas merugikan rakyat?

Ini harus disadari oleh semua pimpinan nasional, bahwa hanya melalui suatu masa peralihan dengan pengorbanan yang minimal dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, kebebasan yang diimbangi oleh tanggung jawab harus diberikan kepada rakyat.

Namun, gerakan dan tuntutan masyarakat sudah tidak sabar menantikan kebebasan secara total. Presiden dan pemerintah tidak mendapat kepercayaan yang diperlukan. Presiden Soeharto tidak memiliki kredibilitas lagi, dan demikian pula saya yang telah mendampingi Pak Harto selama seperempat abad.

Bukankah kredibilitas dan prediktabilitas, erat kaitannya dengan transparansi? Bukankah transparansi itu mempermudah pengawasan? Bukankah pengawasan oleh masyarakat, erat kaitannya dengan kebebasan pers?

Namun, apakah kebebasan pers dapat juga disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk lebih mengeruhkan dan mempersulit penyelesaian masalah multidimensi dan multikompleks?

Pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, terus memengaruhi proses kebijakan saya. Saya menyadari,

kebijakan apa pun yang saya ambil mengandung risiko. Oleh karenanya, risiko itu harus diperhitungkan.

Setelah mempertimbangkan dan memerhatikan pemikiran tersebut, maka saya memutuskan untuk membenarkan setiap orang mengeluarkan pendapatnya, terlepas dari rasa takut. Saya berkeyakinan bahwa orang-orang dalam suatu masyarakat yang bebas bergerak dan bebas mengeluarkan pendapat tanpa rasa takut, akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas masyarakatnya. Kita harus pandai-pandai belajar dari pengalaman dan kesalahan masyarakat lain, yang melalui proses reformasi dan proses demokratisasi yang panjang, sudah dapat menikmati produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi.

Oleh karena itu, saya memutuskan, agar supaya pers segera diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan segala konsekuensinya. Kelak rakyat akan menilai kualitas pemberitaan itu. Mereka yang membuat pemberitaan tidak bermutu, jelas tidak laku dan tidak mungkin dapat mempertahankan keberadaannya. Semua pemberitaan, harus sesuai UUD dan UU yang berlaku.

Sejak Presiden RI Pertama dan dilanjutkan oleh Presiden RI Kedua, dari tahun 1945 sampai sekarang, selama 53 tahun, beberapa kekuatan atau institusi yang sangat berpengaruh "dikendalikan" oleh Presiden. Kebiasaan yang sudah menjadi budaya kepemimpinan ini, jelas merugikan objektivitas dan kualitas kebijakan.

Institusi dan kekuatan yang dimaksud adalah: Bank Indonesia, dunia pers, lembaga yudikatif (seperti Mahkamah Agung, Hakim Agung, Kejaksaan Agung dan Jaksa Agung), lembaga legislatif (DPR, MPR), dan ABRI.

Selama saya menjadi Anggota Kabinet Pembangunan III, IV, V, VI dan VII, lebih dua puluh tahun lamanya,

Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung selalu menjadi anggota kabinet dan hadir pada semua sidang baik Paripurna maupun Terbatas.

Tradisi pelaksanaan sidang Kabinet Pembangunan, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto hanya berlangsung sebulan sekali. Para menteri dalam bidang ekonomi, keuangan dan industri, melaporkan mengenai inflasi, masalah lapangan kerja, pangan, impor/ekspor dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan petunjuk Presiden. Petunjuk tersebut sebelumnya, telah dipersiapkan Presiden bersama para menko dan menteri bersangkutan sebelum sidang dimulai.

Tindak lanjutnya di bidang Ekuin, dipersiapkan oleh para menko dan menteri dalam sidang koordinasi bidang ekonomi yang dipimpim oleh Menko Ekuin.

Diskusi secara terbuka, dengan Presiden selama sidang berlangsung, tidak pernah terjadi. Apalagi dengan para menteri yang bukan anggota Kabinet Bidang Ekuin. Selama 20 tahun lamanya, saya selalu harus hadir pada hari Rabu pertama tiap bulan mengikuti Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin.

Sebelum dan sesudah sidang Kabinet Terbatas, tiap saat para menteri dapat bertemu untuk melaporkan dan membicarakan suatu masalah dengan Presiden. Demikian pula saya, pembahasan dengan Presiden tersebut, terbatas dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang langsung atau tidak langsung terkait dengan bidang ekonomi dan pembangunan. Tujuannya adalah agar kualitas kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan menjadi tinggi dan profesional, sehingga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dapat terjamin berkesinambungan.

Akibat sistem dan mekanisme tersebut, kedudukan Presiden semakin kuat, menentukan, dan cenderung otoriter. Feodalisme dalam bentuk baru lahir dan terus berkembang.

Bagaimana dengan pembangunan dalam bidang politik, bidang sosial, bidang budaya dan bidang-bidang yang bukan ekonomi lainnya?

Apakah masalah yang timbul dapat diselesaikan secara pragmatis dengan menghadap dan meminta arahan dari Presiden atau melalui suatu sidang paripurna yang hanya satu kali setahun dilaksanakan tanpa diskusi? Bagaimana kualitas dan objektivitas kebijakan? Dapatkah sistem otoriter diterima masyarakat yang lebih berpendidikan dan dapat menerima informasi melalui TV internasional dalam proses globalisasi yang terus berkembang?

Pendekatan demikian, memang dalam keadaan normal berjalan lancar, meyakinkan dan menjadikan kedudukan Presiden sebagai pusat kekuasaan semakin kuat dan menentukan.

Tradisi demikian, pada awal kemerdekaan dapat dipahami, karena memang diperlukan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang multietnik, multiagama, dan multibudaya.

Bhinneka Tunggal Ika atau "satu dalam kebinekaan" bukanlah secara kebetulan menjadi dasar kehidupan bangsa, tetapi benar mencerminkan kehidupan nyata masyarakat.

Kenyataan bahwa 90 persen rakyat Indonesia belum dapat menikmati pendidikan minimum yang wajar ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah menjadi pertimbangan utama untuk menunda pemberian kebebasan total.

Untuk mencegah perpecahan akibat siasat adu domba kaum penjajah, maka budaya gotong-royong di bumi Indonesia diterjemahkan seperti skenario di atas, yaitu skenario yang menghasilkan suatu sistem yang otoriter.

Selama 53 tahun di bawah dua Presiden yang otoriter, menyebabkan institusi kepresidenan semakin menjadi pusat

keunggulan kekuasaan, walaupun Mukadimah UUD l945 tidak menghendaki demikian. Dalam suatu masyarakat yang berbudaya feodal, maka institusi Presiden menjadi sangat berkuasa dan sakral.

Apakah sistem dan budaya feodal, dengan institusi Presiden yang sakral masih dapat dipertahankan?

Globalisasi dan pengaruh teknologi pada umumnya dan khususnya teknologi informasi dan teknologi pemberitaan terus berkembang. Ketergantungan antarmasyarakat dan antarnegara terus berkembang pula. Dunia menjadi lebih transparan.

Saya berkeyakinan bahwa institusi Presiden itu tidak boleh menjadi sakral dan tidak boleh menjadi sangat berkuasa. Bukankah cita-cita bangsa Indonesia adalah memberikan kekuasaan itu pada rakyat? Bukankah arti Kedaulatan Rakyat dalam UUD '45 mencerminkan cita-cita tersebut?

Institusi presiden dan presiden itu harus menjadi bagian terpadu dari masyarakat. Presiden tidak boleh ditakuti karena kekuasaannya, namun patut dihormati dan disayangi karena kebijakannya.

Presiden dipilih untuk memimpin dan dalam kepemimpinannya dia datang untuk memberi dan tidak untuk mengambil. Perilakunya harus transparan.

Sikap rendah hati, sederhana dan berbudaya tidak ada artinya, jikalau tidak diikuti dengan transparansi dan keyakinan bahwa presiden itu datang untuk memberi dan tidak untuk mengambil.

Saya sangat sadari bahwa reformasi itu tidak saja terbatas pada proses kebebasan, namun pula harus antara lain dapat melaksanakan proses desakralisasi presiden. Mengembalikan kekuasaan yang selama 53 tahun berada di tangan presiden dan institusi presiden kepada pemiliknya, yaitu bangsa dan rakyat Indonesia.

Bagaimana sikap mereka yang berada di sekitar presiden dan yang sudah memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk bersinergi positif dengan presiden, sehingga dapat menikmati kedudukan istimewa dalam memanfaatkan kekuasaan?

Apakah mereka rela mengorbankan keistimewaan tersebut? Siapakah mereka ini?

Jelas, mereka dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu, "kelompok kultural" dan "kelompok struktural". Bukankah saya ini termasuk dalam golongan struktural yang telah dianggap sebagai kroni Soeharto?

Memang sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 20 tahun lamanya, saya bertanggung jawab untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan bangsa. Saya telah berusaha melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan kelak, sejarah sendiri akan menilai.

Adalah wajar jikalau kaum intelektual pada umumnya dan para elit politik khususnya, tidak memberi kepercayaan dan memiliki prasangka negatif terhadap kepemimpinan saya. Saya mungkin dianggap sebagai kroni dan "kaki tangan Soeharto" yang tidak memiliki wawasan dan kemampuan sendiri, kecuali kemampuan mengikuti perintah dan petunjuk Pak Harto.

Memang saya telah banyak belajar dari Pak Harto mengenai budaya kepemimpinan Indonesia, khususnya budaya dan falsafah kepemimpinan Jawa.

Saya berkeyakinan bahwa sulit memimpin bangsa Indonesia jikalau tidak memahami budaya kepemimpinan Jawa. Ini tidak berarti bahwa tiap orang Jawa mengerti dan memahami budaya kepemimpinan Jawa. Saya banyak mengenal orang keturunan bukan Jawa yang sangat mengerti dan berperilaku kepemimpinan budaya Jawa. Sementara di lain pihak, saya mengenal pula keturunan asli

Jawa yang sama sekali tidak memahami dan berperilaku kepemimpinan budaya Jawa.

Walaupun ibu yang melahirkan dan mendidik saya dan istri yang mendampingi selama 36 tahun adalah orang Jawa, namun oleh karena proses pendidikan, proses pembudayaan, pekerjaan, dan kehidupan saya cukup lama berlangsung di dunia peradaban Barat, maka tambahan pengetahuan selama 24 tahun dari Pak Harto mengenai kepemimpinan, telah memengaruhi proses pengambilan kebijakan saya.

Ayah dan ibu, yang melahirkan saya atau orang tua saya, membentuk perilaku dan sifat saya. Para guru telah memberi keterampilan yang saya miliki. Pak Harto adalah salah satu guru dalam kehidupan saya. Tidak ada "bekas orang tua" dan tidak pula ada "bekas guru". Orang tua tetap orang tua dan demikian pula guru tetap guru sepanjang masa. Maka, sebagai anak dan murid yang berbakti, saya akan selalu menjunjung tinggi kehormatan, nama dan selalu berusaha menjadi kebanggaan mereka.

Namun, sangat saya sadari bahwa guru yang paling kuat memengaruhi proses kebijakan saya adalah "otak sehat" saya sendiri. Akhirnya, untuk mengatasi kendala dan batasan dalam melaksanakan implementasi segala kebijakan, tolok ukur moral dan etika yang berakar pada ajaran agama sangat menentukan pula. Kemampuan ini harus saya pelihara, andalkan, dan taati dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang begitu kompleks dan bersifat multidimensi.

Prasangka dan praduga negatif mengenai saya adalah wajar saja. Rakyat akan menilai dan sejarah mencatat. Oleh karena itu, saya harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan untuk dapat memenuhi keinginan rakyat yang beraneka ragam, namun semuanya bermuara pada keinginan untuk mendapat kebebasan di atas kemerdekaan yang telah mereka miliki.

Adalah suatu kenyataan bahwa pada awal kemerdekaan, rakyat belum dapat diberi kebebasan karena kualitas pendidikan yang dapat dinikmati sangat minimum dan belum merata. Tetapi sekarang setelah 53 tahun merdeka dan 85 persen sumber daya manusia Indonesia sudah dapat membaca dan berbahasa Indonesia, adalah wajar jikalau tuntutan kebebasan dalam segala bentuknya terus meningkat.

Dalam sejarah yang singkat setelah proklamasi kemerdekaan 53 tahun yang lalu, dapat dicatat bahwa segala gerakan "ekstrem" baik kiri maupun kanan, "ekstrem nasionalis" dan "ekstrem liberal" telah merugikan dan mempersulit pelaksanaan persatuan dan kesatuan bangsa demi suksesnya pembangunan.

Segala usaha gerakan massa ke arah ekstrem harus dicegah. Yang paling baik adalah masyarakat Indonesia sendiri yang harus mengawasi dan mencegahnya. Pemberian kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat adalah salah satu cara yang tepat.

Syukur alhamdullillah, dalam pemantauan saya yang menyangkut pernyataan yang diucapkan ataupun tertulis, tidak ada yang mengandung ucapan ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Semuanya tuntutan menfokuskan kepada terlaksananya proses demokratisasi, proses transparansi, dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme yang merupakan tuntutan yang wajar dan sehat.

Bagaimana sikap ABRI, khususnya TNI? Dapatkah TNI menerima tuntutan kebebasan, sebagai awal berakhirnya kedudukan eksklusivitas TNI dalam masyarakat?

Mungkinkah pengambilan kekuasaan oleh ABRI? Bagaimana peran Pak Harto dan pengaruh Pak Nasution dalam proses reformasi?

Dari tiga Jenderal berbintang lima dalam sejarah

Indonesia, yang masih hidup, adalah mereka berdua. Tentunya pengaruh Pak Harto dan Pak Nasution harus diperhitungkan.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul pada proses pengambilan kebijakan, saya harus segera bertemu dan berkonsultasi dengan Pak Harto, yang menurut rencana dijadwalkan dapat berlangsung esok paginya sebelum ke Istana Merdeka.

Sudah larut malam sekitar pukul 01.00, tanggal 21 Mei 1998, ketika saya masih mengikuti perkembangan gerakan massa melalui internet dan TV di ruang kerja saya, tiba-tiba istri saya, Ainun, muncul dan mengingatkan, agar saya segera tidur.

Saya mengikuti saran istri dan segera mengganti baju dengan pakaian tidur. Ketika berbaring di tempat tidur, masih terdengar obrolan beberapa anggota pasukan pengamanan yang duduk di bawah jendela kamar tidur saya menghadap pendopo.

Walaupun hampir 20 jam saya belum beristirahat, ternyata pertanyaan dan pemikiran mengenai keadaan di tanah air terus berkembang, sehingga saya berdiri perlahan, untuk tidak mengganggu istri saya yang sedang tidur. Saya menutup bantal dan guling dengan selimut untuk memberi kesan seakan-akan saya berbaring di bawah selimut tersebut. Saya keluar ke tempat saya semula untuk menyusun catatan mengenai langkah-langkah awal dan dasar ataupun prinsip, sikap, dan kebijakan yang harus saya ambil.

Kesimpulan yang saya ambil adalah:

- Saya harus banyak mendengar dan tidak boleh terbuka menceritakan kepada siapa saja apa yang akan saya rencanakan dan lakukan. Termasuk kepada istri, anak, adik, keluarga, kawan dekat, dan sebagainya saya harus tertutup. Ini adalah keputusan yang harus saya ambil

dan yang paling berat dilaksanakan karena bertentangan dengan perilaku, karakter, dan sifat saya yang sangat bebas, terbuka, dan transparan;

- Saya mewarisi bentuk institusi kepresidenan yang sangat berkuasa dalam lingkungan dan budaya feodal. Hal ini harus segera saya akhiri, tanpa memberi kesan yang dapat disimpulkan sebagai "penguasa" yang lemah dan takut;
- Tahanan politik harus segera saya lepaskan dan tidak boleh lagi terjadi bahwa orang yang bertentangan dengan pendapat atau rencana Presiden, harus dimasukkan ke dalam penjara, kecuali mereka yang terbukti telah melaksanakan tindakan kriminal;
- Kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan unjuk rasa harus segera dilaksanakan;
- Saya menyadari dan dapat mengerti, jikalau yang pernah dirugikan dalam masa Orde Baru menilai negatif, bahkan bersikap anti kepada saya karena kedudukan dan kedekatan saya dengan kekuasaan selama hampir 25 tahun lamanya, serta menganggap saya ikut bertanggung jawab atas terjadinya multikrisis yang kita hadapi. Oleh karena itu, sikap saya dalam menghadapi semua persoalan harus arif dan toleran demi persatuan dan kesatuan dua ratus juta lebih penduduk Indonesia;
- DPR dan MPR harus diberi legitimasi yang kuat berdasarkan pemilu yang demokratis. Dan kesempatan terbuka untuk mendirikan partai politik apa saja, diperbolehkan asal tidak melanggar UUD '45 dan Ketetapan MPR. Untuk itu saya harus berkonsultasi dengan MPR;
- Sidang Istimewa MPR harus diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memberi dasar

hukum bagi reformasi dan pemilu yang dibutuhkan. Hanya dengan demikian, suatu revolusi dan khaos, yang bisa memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dicegah;

- Saya harus segera mengikutsertakan para teknokrat yang berpengalaman, bersama secara proporsional wakil semua fraksi di MPR bekerja sebagai satu tim dalam kabinet, yang dalam waktu sesingkat-singkatnya harus dibentuk;
- Semua kebijakan dan tindakan yang tepat dan berkualitas harus berlangsung rapi, transparan, dan konsisten dengan iktikad dan niat lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seiring dengan perubahan yang terus berkembang tiap detik;
- Kemungkinan terjadinya pengambil alih kekuasaan oleh anggota ABRI minimal, karena tidak ada anggota pimpinan ABRI yang memiliki kharisma yang dapat diterima oleh semua angkatan, darat, udara, laut, dan polisi, untuk memimpin bangsa;
- Semua dasar pemikiran, iktikad dan niat saya ini tidak boleh saya sampaikan kepada siapa pun juga, walaupun ditanya atau dipancing secara langsung atau tidak langsung.

Tiba-tiba terdengar suara dari ruangan yang gelap, "Pak Habibie, sudah hampir pukul 04.00 pagi dan Bapak belum tidur dan belum beristirahat, sementara acara Bapak sudah mulai pukul 07.00 pagi. Mohon Bapak beristirahat sejenak."

Ruangannya sangat gelap, karena tidak ada lampu yang menyala kecuali sinar monitor komputer yang menerangi wajah saya. Lalu saya bertanya, "Siapa yang berbicara?"

"Siap, Kolonel Hasanuddin, ADC Bapak," sambil menyinari wajahnya dengan lampu senter.

Saya bertanya, "Mengapa Kolonel belum tidur?"

"Siap, lagi dinas dan mohon Bapak istirahat sejenak," jawabnya.

Saya segera beristirahat, demikian ucapan saya sambil mengakhiri catatan, dan berdiri untuk meninggalkan ruang kerja.

Pertama kalinya dalam kehidupan saya, saya merasa seorang diri di dunia ini, dengan lingkungan yang ramah dan baik terhadap saya pribadi.

Pergaulan yang baik dalam suatu sistem feodal, yang bertentangan dengan kepribadian saya yang biasanya bebas berpikir, bebas bergaul, bebas berbicara, menghormati pendapat orang lain walaupun berbeda dan "berseberangan" prinsip dalam arena politik. Tetapi, tetap saling menghormati dan bekerja dalam mencari apa yang paling menguntungkan bagi rakyat banyak tanpa meninggalkan nilai moral dan nilai etika yang berakar pada ajaran agama masing-masing.

Setelah satu jam tidur, saya bangun untuk shalat Subuh bersama istri, kemudian saya mandi. Saya hanya dapat tidur sekitar satu jam lamanya, namun tidur saya cukup nyenyak. Setelah berpakaian, saya langsung ke ruang kerja untuk memantau melalui internet dan TV, perkembangan gerakan dan demo massa yang tiada henti.

Gerakan-gerakan demonstrasi para mahasiswa bersama rakyat terus meningkat, mengakibatkan keadaan di Indonesia menjadi makin tidak menentu. Hal itu memengaruhi jatuhnya nilai rupiah secara cepat dan larinya modal ke luar negeri.

Sekitar pukul 06.45, ADC Kolonel (Udara) Iwan Sidi masuk ke ruangan dan melaporkan bahwa Pangab Jenderal Wiranto sudah siap menunggu di ruang tamu. Saya minta agar mempersilakan Jenderal Wiranto menuju ke pendopo, karena saya menerimanya di sana.

Di pendopo, pukul 06.50 sampai 07.25 Jenderal Wiranto melaporkan keadaan di lapangan yang tidak menentu dan gerakan-gerakan demo yang terus meningkat. Saya membaca dan menafsirkan keadaan demikian, sebagai tuntutan rakyat untuk memperoleh "kebebasan total".

Memang, tiap manusia membutuhkan kebebasan di atas kemerdekaan atau kemerdekaan di atas kebebasan.

Namun, bukankah kebebasan harus dibarengi dengan tanggung jawab? Dan tanggung jawab harus diimbangi oleh kewajiban?

Dengan segala respek terhadap mereka yang berdemo untuk membawa aspirasi rakyat, saya tidak benarkan nasib dan masa depan bangsa ini ditentukan oleh gerakan atau demo di jalan, berapa juta pun mereka yang berdemonstrasi di jalan.

Memang, demo itu adalah bagian dari demokrasi, namun bukankah ada wakil rakyat di DPR atau MPR. Jikalau para anggota DPR dan MPR dianggap tidak memiliki legitimasi yang kuat, maka silakan melaksanakan pemilu yang baru sesuai dengan UU dan Ketetapan MPR yang berlaku.

Yang benar adalah, kita patut dan wajar mendengar dan memerhatikan keinginan dan aspirasi pendemo, dan mencari jalan untuk memenuhi keinginan rakyat, sesuai dengan UU yang berlaku. Jikalau undang-undang dan peraturan pemerintah tidak menunjang, maka peraturan perundangan tersebut harus disempurnakan.

Semua ada caranya dan membutuhkan waktu. Saya setuju, waktu yang dibutuhkan harus sesingkat-singkatnya dan mengandung risiko yang harus dapat diperhitungkan, diperkecil dan dikendalikan, tanpa mengorbankan sistem yang sudah dikembangkan selama 53 tahun.

Setelah melaporkan hasil analisis keadaan di lapangan,

Pangab meminta pengarahan dan petunjuk. Petunjuk saya sebagai berikut:

- Rakyat diberikan kebebasan untuk berdemo, tetapi tidak dibenarkan merusak dan atau membakar;
- Fasilitas pengamanan Pak Harto sekeluarga yang sekarang diberikan agar tetap berfungsi seperti semula dan pelaksana pengamanan bertanggung jawab langsung pada Pangab;
- Saya tidak benarkan Presiden menerima perwira tinggi ABRI, termasuk Kepala Staf Angkatan, kecuali bersama atau atas permintaan Pangab.

Jenderal Wiranto melaporkan bahwa ia telah menerima inpres yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto untuk bertindak demi keamanan dan stabilitas negara jikalau keadaan berkembang menjadi khaos dan tidak terkendali. inpres ini mungkin semacam "Supersemar" (Surat Perintah Sebelas Maret), seperti halnya pada tahun 1966, di mana Jenderal Soeharto diberi kewenangan oleh Presiden Soekarno untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan negara. Ia menanyakan apa yang ia harus perbuat dengan inpres ini?

Saya teringat sekitar tujuh tahun yang lalu, sewaktu saya bersama anggota Kabinet Pembangunan dan Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara, duduk di lantai Masjid Istiqlal, sambil menantikan kedatangan Presiden dan Wakil Presiden untuk bersama melaksanakan shalat Id. Seorang muda berpakaian kemeja batik dengan sopan menyapa saya dari belakang sambil berbisik, agar diperkenankan kelak membantu saya dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Saya bertanya, "Siapa Anda dan di mana Anda sekarang?"

"Saya Wiranto, Pak."

"Wiranto siapa?"

"Saya Wiranto, dulu ADC Presiden dan sekarang ditugaskan sebagai Kepala Staf Pangdam Jaya membantu Pak Hendropriyono."

Saya lalu menjawab, "Insya Allah, iktikad dan niat Anda akan dikabulkan Allah SWT." Pada waktu itu, saya sangat terkesan dengan kejadian ini.

Mengenang pengalaman saya tersebut dan setelah mendengar laporan Pangab, saya mengambil kesimpulan bahwa Jenderal yang saya hadapi ini "jujur", "bermoral", "beretika", dan setia pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Bukankah moral dan etika berakar pada agama?

Oleh karena itu, saya menjawab pertanyaan Pangab dengan singkat, "Simpanlah Inpres tersebut, mungkin Jenderal akan butuhkan."

Selanjutnya saya bersama dengan Pangab mempersiapkan pernyataan sikap ABRI yang akan dibacakan oleh Jenderal Wiranto setelah pengambilan Sumpah Presiden ke-3 RI oleh Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka selesai.

Saya tugaskan Pangab untuk langsung ke Istana Merdeka, sambil saya mempersiapkan diri untuk pergi ke kediaman Pak Harto, dengan harapan mendapatkan penjelasan dan jawaban mengenai mengapa dan kenapa semua ini terjadi.

Tetapi, kemudian saya mendapat berita bahwa Pak Harto ternyata belum bersedia menerima saya, dan saya dipersilakan langsung saja berangkat ke Istana Merdeka.

Protokol dan ADC Presiden berharap agar pertemuan empat mata dapat dilaksanakan di Istana Merdeka. Pada pertemuan ini, saya berharap dapat memperoleh masukan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan nasional,

berdasarkan informasi dan masukan yang diperoleh Pak Harto saat beliau belum mengundurkan diri sebagai Presiden. Pertemuan tersebut, adalah wajar dan normal.

Didampingi Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Fuadi Rasyid, Jimly Asshiddiqie, dan perangkat pengamanan Wakil Presiden, sekitar pukul 08.30, saya berangkat ke Istana Merdeka untuk menghadiri acara pernyataan pengunduran diri Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Presiden oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan para anggota Mahkamah Agung lainnya.

Ketika saya sampai di Istana Merdeka, ternyata belum ada orang yang hadir dan saya dipersilakan duduk di kamar tamu yang berhadapan dengan ruangan yang dikenal sebagai Ruangan Jepara. Saya duduk, sambil membaca laporan-laporan multikrisis yang masuk.

Beberapa saat kemudian, Ketua Mahkamah Agung, Sarwata SH, dan para anggota Mahkamah Agung yang menyertainya datang. Kepada Ketua Mahkamah Agung, saya bertanya apakah alasan dan cara pengambilan sumpah sah berdasarkan UUD dan Ketetapan MPR. Ketua Mahkamah Agung menyatakan pengambilan sumpah itu sah, karena hari ini adalah hari libur sehingga dapat dilaksanakan di hadapan para anggota Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung di Istana Merdeka dan langsung dapat disiarkan ke seluruh tanah air.

Baru saja Ketua Mahkamah Agung selesai menjelaskan, para pimpinan DPR/MPR masuk ke dalam ruangan. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Ketua DPR/MPR dan saya memperoleh jawaban yang sama. Ketua DPR/MPR menyampaikan bahwa pimpinan DPR/MPR telah membicarakan dalam rapat malam sebelumnya, dan

menyimpulkan bahwa semua ini sah. Dengan demikian, dipandang dari segi hukum, penyerahan kekuasaan dari Presiden ke Wakil Presiden yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi pada tanggal 21 Mei 1998, menurut UUD '45 dan Ketetapan MPR adalah sah.

Tiba-tiba, Protokol dan ADC Presiden mempersilakan Ketua dan para anggota Mahkamah Agung masuk ke Ruang Jepara. Saya langsung berdiri dan menyampaikan bahwa saya dijanjikan untuk dapat bertemu dengan Presiden Soeharto. Langsung ADC Presiden kembali ke Ruang Jepara dan hanya sekejap kemudian, ADC kembali hanya mempersilakan Ketua bersama para anggota Mahkamah Agung masuk ke Ruang Jepara di mana Pak Harto berada.

Saya merasakan diperlakukan "tidak wajar" dan menahan diri untuk tetap sabar dan tenang. Saya membaca beberapa ayat Alquran yang saya hafal. Setelah beberapa waktu berlalu, Ketua dan anggota Mahkamah Agung keluar dari Ruang Jepara, dan ADC dan Protokol mempersilakan pimpinan DPR/MPR memasuki Ruangan Jepara untuk bertemu dengan Pak Harto.

Perasaan saya makin penuh dengan kekecewaan, ketidakadilan, dan "penghinaan", sehingga kemudian saya memberanikan diri untuk berdiri dan melangkah ke Ruang Jepara ingin bertemu langsung dengan Presiden Soeharto. Namun, baru saja saya berada di depan pintu Ruang Jepara, tiba-tiba pintu terbuka dan protokol mengumumkan bahwa Presiden Republik Indonesia memasuki ruang upacara. Saya tercengang melihat Pak Harto, melewati saya terus melangkah ke ruang upacara dan "melecehkan" keberadaan saya di depan semua yang hadir.

Betapa sedih dan perih perasaan saya ketika itu. Saya melangkah ke ruang upacara mendampingi Presiden Soeharto, manusia yang saya sangat hormati, cintai, dan

kagumi yang ternyata menganggap saya seperti tidak ada. Saya melangkah sambil memanjatkan doa dan memohon agar Allah SWT memberi kekuatan, kesabaran, dan petunjuk untuk mengambil jalan yang benar.

Dalam ruang upacara yang sudah penuh dengan wartawan dalam dan luar negeri, saya dipersilakan berdiri di tempat yang sudah diberi tanda. Pak Harto langsung di tempat yang telah diatur, menempatkan dirinya, dan membaca pertimbangan pengunduran dirinya sebagai presiden sebagai berikut:

> Saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
>
> Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
>
> Sejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi itu perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.
>
> Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
>
> Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
>
> Dengan memerhatikan keadaan di atas saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan

tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memerhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memerhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak dibacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahim.

Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ir. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.

Untuk pertama kalinya saya mendengar, alasan Pak Harto mengundurkan diri sebagai Presiden RI.

Setelah Pak Harto selesai memberi keterangan dan penjelasan kepada bangsa Indonesia, protokol menyerahkan kepada saya sebuah map dan saya dimohon membaca sehelai kertas yang berisi sumpah kewajiban Presiden RI yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bismillahirrahmanirrahim,

Berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Semuanya berlangsung cepat dan lancar. Pak Harto memberi salam kepada semua yang hadir termasuk saya. Tanpa senyum maupun sepatah kata, ia meninggalkan ruang upacara.

Menerima warisan institusi presiden sebagai pusat keunggulan kekuasaan dan pusat perhatian masyarakat dalam suatu sistem yang feodal dengan segala permasalahan dan tantangan, menyebabkan saya menjadi manusia yang "paling kesepian" dan "paling sendirian" di dalam suatu lingkungan yang serba sibuk menghadapi multikompleks permasalahan.

Ketika itu saya sadari pula, bahwa institusi presiden, institusi wakil presiden dan institusi legislatif DPR & MPR, melalui koordinasi Keluarga Besar Golkar (menguasai hampir 80 persen & 83 persen kursi) diwariskan untuk saya kuasai seorang diri.

Kenyataan ini, memberikan kepada saya "kekuasaan absolut" sebagai presiden dan merangkap koordinator harian Keluarga Besar Golkar dalam suatu sistem yang "otoriter" dan lingkungan "feodal".

Kenyataan ini sangat membahayakan objektivitas dan

kualitas proses demokratisasi. Karena Keluarga Besar Golkar (KBG) memiliki hampir 83 persen kursi di MPR dan presiden merangkap sebagai koordinator harian KBG, maka untuk menghindari kolusi antara pemerintah dan DPR/MPR, presiden tidak dibenarkan merangkap sebagai koordinator harian KBG.

Sekneg.

Memimpin Sidang Kabinet Terbatas bidang Polkam

Sekneg.

Konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR RI, 28 Mei 1998 di Gedung DPR/MPR

Sekneg.

Menghadiri Pertemuan Pimpinan Ekonomi Asia (AELM VI)
di Malaysia, 18 November 1998

Sekneg.

Konferensi Tingkat Tinggi ke-6 ASEAN di Hanoi, 15-16 Desember 1998

bab 2 100 Hari Pertama Menghadapi Masalah Multikompleks dan Multidimensi

Seorang pemimpin di mana saja ia berada, harus berperilaku seperti "mata air" yang mengalirkan air bersih dan bergizi, sehingga semua kehidupan di sekitarnya dapat mekar dan berkembang. Perilaku seperti "mata air" yang mengalirkan racun akan mematikan kehidupan sekitarnya.

Setelah upacara pengambilan sumpah selesai, saya segera kembali ke kediaman saya di Kuningan untuk melanjutkan pemantauan perkembangan gerakan demo yang terus meningkat dan menyusun pesan Presiden Republik Indonesia yang akan saya sampaikan melalui TVRI pada malam hari. Pesan yang saya bacakan itu sebagai berikut:

> Pertama-tama saya mengajak seluruh rakyat Indonesia di manapun berada untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan iman dan kesabaran sehingga kita tabah menghadapi cobaan yang menimpa bangsa kita. Berbagai cobaan yang kita alami sekarang ini, merupakan ujian yang menuntut kesabaran dan kerja keras seluruh rakyat, sehingga bangsa kita dapat segera keluar dari krisis ekonomi dan politik yang dihadapi.
>
> Dengan pernyataan berhenti Bapak Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan

Pasal 8 UUD 1945, saya secara konstitusional telah menggantikan kedudukan sebagai Presiden dan telah mengucapkan Sumpah Presiden pada hari ini pukul 09.10, tanggal 21 Mei 1998.

Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir dan usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun Pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kaidah kepemerintahan yang kita kehendaki bersama. Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari tugas ini sangat berat. Oleh karena itu, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, maka dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dapat keluar dari krisis yang sedang kita hadapi, yang hampir melumpuhkan berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa.

Perjuangan mahasiswa dalam mempercepat proses reformasi merupakan angin segar yang menghembus memasuki abad ke-21. Saya memerhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika aspirasi yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh, baik yang disampaikan oleh mahasiswa dan kaum cendekiawan, maupun yang berkembang dalam masyarakat serta di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peningkatan kehidupan politik yang sesuai dengan tuntutan zaman dan generasinya, kepemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kehidupan ekonomi yang lebih memberi peluang berusaha secara adil, telah saya tangkap sebagai aspirasi rakyat.

Untuk itu saya ingin menyampaikan komitmen saya pada aspirasi rakyat tersebut untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, meningkatkan kehidupan politik demokratis, mengikuti

tuntutan zaman dan generasinya, dan menegakkan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD '45.

Berdasarkan hal itu, saya akan segera menyusun Kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman, aspirasi dan kehendak rakyat, yaitu Kabinet yang profesional dan memiliki dedikasi serta integritas yang tinggi.

Tugas pokok Kabinet tersebut adalah menyiapkan proses reformasi:

1. Di bidang politik antara lain dengan memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Subversi;
3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian Undang-Undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.

Di samping itu, dalam bidang ekonomi, pemerintah juga akan memberikan perhatian khusus terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), revitalisasi Lembaga Perbankan dan Keuangan Nasional, serta program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Di samping itu, pemerintah akan tetap melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati dengan pihak Luar Negeri, khususnya dengan melaksanakan program reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF. Pemerintah, akan tetap menjunjung tinggi kerja sama regional dan internasional, seperti yang telah dilaksanakan selama ini dan akan berusaha dalam waktu sesingkat-singkatnya mengembalikan dinamika pembangunan bangsa Indonesia yang dilandasi atas kepercayaan nasional dan internasional yang tinggi.

Menyadari tugas-tugas berat dan mulia tersebut, saya dengan segala kerendahan hati membuka diri terhadap

semua masukan dan kritik dari masyarakat untuk mempercepat proses reformasi, menuju kesejahteraan Bangsa dan Negara yang kita cita-citakan bersama. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, saya sekali lagi mengharapkan dukungan sepenuhnya dari semua pihak.

Kepada segenap potensi bangsa, marilah kita mengakhiri pertentangan-pertentangan yang ada di antara kita agar waktu yang sangat terbatas ini dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka penyelesaian krisis yang sedang dihadapi.

Akhirnya, izinkanlah saya menyampaikan satu dua patah kata terhadap Bapak Soeharto yang baru saja menyatakan berhenti sebagai presiden. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur, kita tidak akan melupakan jasa serta pengabdian beliau yang bukan saja telah memimpin dengan selamat Republik Indonesia pada masa-masa sulit antara tahun 1965-1968, tetapi juga telah menyukseskan pembangunan nasional sampai tahap tinggal landas, yang mengantarkan sebagian besar kita ke taraf hidup yang lebih tinggi dibandingkan tiga dasawarsa yang telah lalu, sebelum kita diterpa oleh krisis yang melanda kawasan Asia.

Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Haji Muhammad Soeharto, atas segala jasa dan pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Saya percaya, bahwa rakyat Indonesia juga menghargai jasa dan pengabdian beliau.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan lindungan serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh bangsa Indonesia.

Agar dapat mendahului segala polemik yang merugikan stabilitas politik dan prediktabilitas pemerintah, maka saya bermaksud dalam waktu sesingkat-singkatnya membentuk kabinet untuk dapat segera menyelesaikan masalah politik dan ekonomi yang begitu kompleks.

Warisan prasarana presiden, wakil presiden dan pemerintah selama 53 tahun, yang telah berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan yang feodal dan otoriter, dalam waktu sesingkat-singkatnya harus diubah, agar bangsa secara demokratis dan transparan dapat dipimpin.

Kenyataan bahwa sebagai Presiden merangkap Wakil Presiden dan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, yang memiliki mayoritas suara di DPR dan MPR, adalah tidak sehat dan jelas tidak menguntungkan objektivitas pimpinan nasional dan kualitas reformasi.

Karena itu, saya memutuskan untuk segera memulai proses reformasi Golkar menjadi suatu partai politik dan sekaligus membubarkan Keluarga Besar Golkar. Dengan demikian, Presiden dapat bertindak lebih objektif, bermoral, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, partai, kawan, dan sebagainya, kecuali kepentingan rakyat.

Langkah yang harus segera saya ambil adalah sebagai berikut:

1. Kabinet yang dibentuk harus terdiri dari wakil fraksi yang ada di DPR dan MPR, secara proporsional dan diusulkan oleh fraksi masing-masing. Mereka harus dapat bekerja sama sebagai satu tim yang profesional dan berjiwa patriotis;
2. Lembaga tinggi dan tertinggi negara harus dijadikan institusi profesional, objektif, kuat, dan mandiri;
3. Walaupun para anggota DPR dan MPR baru saja dipilih tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah harus dilaksanakan pemilu untuk memberi legitimasi yang lebih kuat kepada DPR dan MPR. Untuk itu kesempatan harus diberikan kepada siapa saja untuk dapat mendirikan partai politik, asal tidak melanggar UUD '45 dan memenuhi kriteria yang

nanti disusun, ikut dalam pemilu yang akan datang;

4. Saya harus segera berkonsultasi dengan pimpinan MPR dan DPR untuk dapat menentukan jadwal Sidang Istimewa MPR dan pemilu yang akan datang;
5. Pada Sidang Istimewa MPR, ketetapan MPR harus disempurnakan menjadi dasar hukum reformasi dan pemilu dengan peserta partai politik yang tidak terbatas pada Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar saja. Presiden, gubernur, dan bupati hanya dapat dipilih langsung untuk dua periode saja, sesuai kriteria yang masih harus ditetapkan. Undang-undang ekonomi pasar seperti antimonopoli dan sebagainya, harus segera disusun;
6. Demi objektivitas kebijakan dalam memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan, saya tidak dapat menjabat sebagai koordinator harian Keluarga Besar Golkar. Pertanggungjawaban harus diberikan kepada rakyat dan tidak kepada Keluarga Besar Golkar. Oleh karena itu, saya memutuskan, dalam waktu sesingkat-singkatnya melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Jakarta untuk mereformasi Golkar menjadi partai politik dan membubarkan Keluarga Besar Golkar.

Setelah menyampaikan pesan kepada bangsa Indonesia melalui TVRI, saya mengundang enam tokoh terbaik bangsa, yang dikenal sebagai profesional, berdedikasi, dan setia pada perjuangan bangsa, ikut hadir pada pertemuan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pertemuan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, dimulai pukul 20.00 di kediaman saya, di Kuningan. Tokoh-tokoh nasional tersebut adalah: Widjojo Nitisastro, Hartarto Sastrosoenarto, Haryono Suyono, Feisal Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, Akbar Tandjung (sebagai

sekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar).

Dalam pembukaan Sidang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, saya mohon agar tokoh-tokoh tersebut berkenan membantu dan menerima jabatan dalam pemerintah sebagai Menko dan Akbar Tandjung sebagai Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Widjojo Nitisastro sebagai Penasihat Presiden.

Saya sampaikan pula agar fraksi yang ada di DPR dan MPR secara proporsional terwakili dalam kabinet. Para anggota kabinet pada umumnya harus profesional dan dapat bekerja dalam satu tim yang harmonis dan dinamis khususnya dengan para menko yang bersangkutan. Untuk jabatan di mana harus ditempatkan seorang profesional yang berpengalaman dan teruji, maka yang bersangkutan tidak harus mewakili fraksi.

Sementara sidang berlangsung, saya menerima beberapa tamu di Kuningan, antara lain, Ketua Muhammadiyah, Amien Rais; Pangab, Jenderal Wiranto; dan Pangkostrad, Letnan Jenderal Prabowo semuanya memberi masukan.

Dalam penyusunan anggota kabinet itu, nama KSAD, Jenderal Soebagio; Letnan Jenderal A.M. Hendropriyono; dan Letnan Jenderal Junus Yosfiah diusulkan untuk menjadi Pangab.

Begitu pula harapan dan imbauan agar Menhankam bersama para anggota kabinet lainnya segera dapat ditentukan. Karena peran ABRI sangat menentukan, maka dalam keadaan negara yang sangat labil, pilihan Pangab dan Menhankam jikalau tidak tepat, dapat mengganggu stabilitas politik. Saya tidak boleh mengambil risiko sedikit pun.

Kebijakan yang salah, akan mengakibatkan suatu rentetan permasalahan yang berdampak negatif dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya juga menerima banyak surat ucapan selamat, saran

dan usulan nama-nama anggota Kabinet Reformasi Pembangunan. Surat yang patut saya sebutkan adalah surat dari Bapak Anwar Haryono, tokoh nasional dan tokoh umat Islam. Beliau menyampaikan selamat dan doa agar dalam menghadapi tantangan yang multikompleks dan tiap detik berubah, saya tetap diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah SWT untuk mengambil jalan yang benar.

Setelah tiap anggota yang dicalonkan, kecuali Menhankam, melalui telepon menyatakan kesanggupan mereka untuk duduk dalam kabinet, akhirnya pada pukul 01.30 Kabinet Reformasi Pembangunan terbentuk.

Sebelum sidang pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan ditutup, saya memohon agar para tokoh memberi masukan kepada tim khusus yang menyusun pidato pengantar Kabinet Reformasi Pembangunan.

Anggota tim khusus adalah:

- Ahmad Watik Pratiknya
- Fuadi Rasyid
- Gunawan Hadisusilo
- Harjono Djojodihardjo
- Jimly Asshiddiqie
- Sofian Effendi.

Khusus kepada Pak Widjojo Nitisastro, saya mohon untuk mengecek pidato pengantar Presiden yang paling akhir sebelum saya cek dan baca. Pukul 01.45, pertemuan dalam rangka pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan saya tutup.

Setelah itu, saya masuk ke ruang kerja, melalui internet dan televisi, saya kembali memantau dan mendengar komentar dalam dan luar negeri mengenai perkembangan di Indonesia.

Sementara itu, terus berkembang berita di dalam dan

luar negeri bahwa saya tidak mampu bertahan lebih dari 100 jam. Yang sedikit optimistis meramalkan bahwa saya tidak akan bertahan lebih dari 100 hari.

Ada pula yang mempertanyakan, apakah kabinet dapat terbentuk? Apa konsep Habibie dalam menghadapi semua masalah yang serba kompleks dalam keadaan yang tidak stabil dan tidak menentu?

Saya dijadikan manusia yang tidak memiliki "kredibilitas", karena berbagai pernyataan yang bernada menghina dan mengolok, menyinggung perasaan siapa saja yang mengenal dan berkawan dengan saya.

Hanya beberapa tokoh intelektual khususnya dari kalangan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dari desa, pesantren mulai mengimbangi gerakan-gerakan yang penuh dengan kebencian terhadap diri saya dan Orde Baru. Yang paling menyedihkan ialah bahwa para mahasiswa dan sebagian besar tokoh intelektual di dalam dan luar kampus berprasangka buruk terhadap saya.

Karena berita-berita tidak konstruktif terus berkembang, saya mengambil kesimpulan bahwa saya tetap tidak boleh terbuka pada siapa pun juga termasuk istri, anak, keluarga, dan kawan dekat, bahkan kepada para anggota kabinet yang akan datang.

Pada masa peralihan yang dinamis berkembang dengan multi permasalahan yang kompleks, reformasi menjadi kontraproduktif jikalau keterbukaan dan transparansi segera diterapkan.

Hanya informasi seperlunya dan pada waktunya yang berkaitan dengan tugas masing-masing dapat saya berikan kepada yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

Sebenarnya saya bermaksud memisahkan kedudukan Pangab dan Menhankam. Pangab harus seorang jenderal dan

sebaiknya jabatan itu diberikan bergiliran kepada Angkatan Darat, Laut, dan Udara sedangkan Menhankam tidak perlu anggota ABRI.

Angkatan Darat, Laut, dan Udara harus mengamankan dan memelihara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang masa dan mencegah terjadinya perang yang mengancam kedaulatan. Jikalau perang tersebut tidak dapat dihindarkan, maka perang harus dimenangkan.

Polisi harus sepanjang masa memerangi kejahatan dan kriminalitas serta bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Karena itu polisi harus dipisahkan dari ABRI dan ditempatkan di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.

Kedudukan Menhankam dapat diberikan kepada seorang tokoh sipil dan tidak perlu dari kalangan militer.

Untuk mencegah kebijakan yang berisiko tinggi dengan memerhatikan keadaan yang sangat kritis, tidak transparan, dan tidak menentu, maka saya berpendapat sebaiknya jabatan Menhankam dan Pangab sementara tetap dirangkap. Yang bertanggung jawab kepada Presiden hanya seorang saja.

Jikalau tokoh militer menjadi Menhankam/Pangab yang nama-namanya sudah disebut di atas, maka jelas kebijakan tersebut akan melahirkan polemik baru. Kesan saya, Jenderal Wiranto itu jujur dan sebagai tokoh yang beragama memiliki nilai moral yang tinggi. Selain itu, jabatan Menhankam/ Pangab sudah dipangkunya sejak bulan Maret yang lalu. Dengan demikian polemik baru tidak akan terjadi.

Esok paginya, satu jam sebelum saya berangkat ke Istana Merdeka untuk mengumumkan nama para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, nama Menhankam/Pangab akan saya berikan kepada tim khusus yang mendapat tugas menyusun Pidato Pengantar Pengumuman para Anggota Kabinet Reformasi.

Pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 1998 pukul 06.10, saya menelepon Jenderal Wiranto dan menyampaikan bahwa saya telah memutuskan untuk memintanya tetap menjadi Menhankam/Pangab dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan memohon petunjuk. Saya sampaikan agar ia melaksanakan tugas sesuai pengarahan yang kemarin telah saya berikan dan nanti bertemu di Istana Merdeka.

Dengan demikian, tidak benar bahwa saya reaktif dan seenaknya dalam menentukan sebuah keputusan apalagi keputusan sangat penting seperti penentuan posisi Menhankam/Pangab. Namun, saya membiarkan para pengkritik yang tidak menyukai saya tetap bereaksi demikian. Yang pasti, saya memiliki program jelas. Hanya saja, sampai detik-detik terakhir saya tidak mau berbicara, siapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab. Tetapi, di dalam hati saya, keputusan siapa yang pantas menjadi Menhankam/Pangab telah saya tetapkan.

Tentang pemberian Instruksi Presiden (Inpres) kepada Menhankam/Pangab dari Pak Harto, saya tetap berpikir positif. Mungkin, keputusan Presiden Soeharto memang benar. Kebijakan ini tetap dilandasi iktikad baik. Bisa saja saya salah langkah, sehingga meledak revolusi di Indonesia. Dia dan saya bisa saja termasuk orang yang dapat menjadi korban seperti para jenderal yang menjadi korban dan dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. Kalau itu terjadi, bisa saja Menhankam/Pangab terpaksa bertindak untuk menyelamatkan bangsa Indonesia.

Karena pemanfaatan inpres tersebut tidak dipersiapkan bersama saya, maka sebagai presiden, saya bisa saja mengatakan inpres itu sudah tidak berlaku. Saya dapat membuat inpres yang lain. Tetapi sekarang, buat apa saya

mengubah inpres itu dalam keadaan yang gawat. ''Silakan Pak Wiranto simpan saja," begitu jawaban saya ketika Menhankam/Pangab melaporkan adanya inpres itu.

Kenapa saya bereaksi demikian?

Karena, saya yakin, kalau Menhankam/Pangab memang karakternya jelek, maka dia akan tidak menyampaikan hal itu kepada saya. Faktanya, ia sampaikan juga hal itu kepada saya. Itu yang saya pegang bahwa orang yang saya hadapi ini jujur. Sampai hari ini, saya berpendapat bahwa dia adalah orang yang bermoral, beretika, dan jujur. Itu yang jadi pegangan saya.

Setelah saya membaca pidato hasil masukan para menko, serta pengecekan oleh Pak Widjojo Nitisastro, maka saya menyampaikan nama Menhankam/Pangab kepada tim khusus.

Saya kemudian berpikir mengenai Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1968 mengenai Bank Indonesia, BI adalah lembaga negara yang membantu tugas Presiden di dalam melaksanakan kebijakan moneter, maka Gubernur Bank Indonesia dapat diartikan menjadi *ex-officio* anggota kabinet. Demikian pula dengan Jaksa Agung.

Saya berpendapat justru untuk lebih produktif membantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan, maka baik Gubernur Bank Indonesia maupun Jaksa Agung tidak boleh menjadi anggota kabinet. Dengan demikian, segala kebijakan yang bersangkutan tidak dipengaruhi presiden dan menjadi lebih objektif dan profesional.

Oleh karena itu, kepada tim khusus, saya sampaikan agar Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung tidak masuk dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pada pidato pengantar saya pada pelantikan Kabinet Reformasi Pembangunan, saya tambahkan bahwa ekonomi

yang akan kita anut adalah ekonomi kerakyatan yang tentunya diatur oleh mekanisme pasar. Arti kerakyatan di sini adalah sama seperti ekonomi pasar yang memerhatikan dan berorientasi pada keadilan sosial.

Perubahan tersebut mengambil waktu yang cukup panjang sehingga hampir satu jam saya terlambat berangkat dari Kuningan menuju ke Istana Merdeka.

Sekitar pukul 07.30, Sintong Panjaitan masuk ke ruangan kerja untuk memohon agar saya menerima Danjen Kopassus Mayor Jenderal Muchdi P.R. bersama Mayor Jenderal Kivlan Zein yang membawa surat dari Pangkostrad dan dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution.

Saya bertanya apakah perlu saya terima sendiri? Saya banyak pekerjaan dan bahan masukan yang harus saya baca dan nilai menumpuk. Saya meminta Jenderal Sintong menerima surat-surat tersebut atas nama saya.

Namun, hanya beberapa menit kemudian, Sintong Panjaitan kembali ke ruang kerja saya dan menyarankan untuk menerima surat tersebut, namun saya tidak boleh melewati tanda yang sudah diberikan di pintu masuk.

Saya beranjak dari depan komputer berjalan didampingi Sintong Panjaitan ke pintu yang sudah ditentukan. Di depan pintu tersebut, saya menerima kedua jenderal yang menyampaikan surat-surat yang segera saya baca. Setelah saya selesai membaca, kedua jenderal mengucapkan, "Mohon petunjuk."

Saya menyampaikan singkat, "Sudah saya baca."

Pertanyaan tersebut diulangi lagi, "Mohon petunjuk," dan jawaban saya singkat seperti semula, "Sudah saya baca," dan saya kembali ke ruang kerja.

Yang menarik adalah surat dari Bapak Jenderal Besar Nasution yang menyarankan agar KSAD Jenderal Subagio Hadi Siswoyo diangkat menjadi Pangab dan Pangkostrad

Letjen Prabowo Subianto menjadi KSAD.

Sekitar pukul 09.00, saya meninggalkan Kuningan menuju Istana Merdeka didampingi oleh perangkat keamanan Presiden, ADC, Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Jimly Asshiddiqie, Gunawan Hadisusilo, dan Fuadi Rasyid. Saya memasuki Istana Merdeka dari pintu gerbang depan sebelah barat. Di depan tangga, Pangab Wiranto menantikan kedatangan saya dan memohon untuk diperkenankan melaporkan keadaan di lapangan, tetapi hanya empat mata. Saya katakan bahwa saya tidak memiliki banyak waktu, karena sudah terlambat satu jam dan ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa saya tidak berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Saya persilakan Wiranto mengikuti saya ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka.

Di ruang kerja Presiden, Pangab melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman saya di Kuningan, demikian pula Istana Merdeka. Jenderal Wiranto mohon petunjuk. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Pangab.

Bukankah ini bertentangan dengan petunjuk saya kemarin pada Pangab?

Apakah mungkin ada skenario tersendiri mengenai laporan yang baru saja disampaikan oleh Pangab?

Apakah tidak sebaiknya saya mengecek dahulu maksud dan tujuan laporan tersebut?

Sikap saya selalu adalah percaya pada orang, namun cek lebih baik. Namun kendala waktu tidak memungkinkan saya untuk mengecek. Penilaian saya mengenai Pangab berdasarkan sikap dan perilaku Pangab adalah positif. Di lain pihak, saya harus tegas dan skenario seperti yang dilaporkan Pangab tidak boleh saya tolerir.

Sambil melihat ke jam tangan, saya tegaskan kepada

Pangab, "Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrad harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing."

Jenderal Wiranto bertanya, "Sebelum matahari terbenam?"

Saya ulangi, "Sebelum matahari terbenam!"

Jenderal Wiranto bertanya lagi, "Siapa yang akan mengganti?"

Saya menjawab ringkas, "Terserah Pangab."

Sebelum Pangab meninggalkan ruang kerja Presiden, ia menyampaikan bahwa untuk mengamankan saya sekeluarga, ia sudah menginstruksikan untuk mendatangkan istri saya Ainun, dari kediaman saya di Kuningan menuju ke Wisma Negara. Demikian pula Insana, istri Ilham, dengan cucu saya Nadia dan Pasha, diterbangkan dengan helikopter dari Bandung ke Jakarta untuk bergabung. Ilham yang sebentar lagi mendarat di Bandara Sukarno Hatta akan dibawa ke Wisma Negara. Sedangkan Thareq dan Widia istrinya sedang dalam perjalanan. Semua keluarga saya sementara akan bergabung di Wisma Negara.

Saya bertanya, "Untuk berapa lama kami harus tinggal di Wisma Negara?"

"Tergantung perkembangan keadaan," jawab Pangab.

Lalu saya minta Pangab meninggalkan saya, karena saya harus mengecek sekali lagi Pidato Pengantar Susunan Kabinet Reformasi Pembangunan.

Setelah Pangab meninggalkan ruang kerja Presiden, saya merenungkan sejenak mengenai keadaan sekitar keluarga saya.

Saya bertanya kepada diri saya, "Mengapa keluarga saya harus dikumpulkan di satu tempat? Apakah tidak lebih aman jikalau anak-anak dan cucu-cucu saya tinggal di

tempatnya masing-masing dan dilindungi oleh Pasukan Keamanan Presiden? Mengapa harus dikumpulkan di satu tempat?"

Pertanyaan ini terus timbul di hati saya.

Protokol mengingatkan saya sekali lagi bahwa para wartawan dalam dan luar negeri sudah menanti penjelasan mengenai Kabinet Reformasi Pembangunan yang sudah dibentuk. Isu telah beredar bahwa saya telah gagal membentuk kabinet, seperti yang telah dialami oleh Pak Harto.

Ini semua tidak membantu menjadikan keadaan lebih tenang. Dampak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi lebih merugikan mata uang RI.

Saya menyampaikan kepada protokol bahwa saya belum selesai mengecek kembali susunan kabinet dan kata pengantar saya. Saya minta mereka agar bersabar sebentar.

Setelah selesai dengan proses pengecekan, saya memasuki ruang depan Istana Merdeka yang sudah penuh dengan wartawan dalam dan luar negeri.

Pidato pengantar untuk memperkenalkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan saya sampaikan sebagai berikut:

> Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, seraya memohon kepada-Nya kekuatan dan iman serta kesabaran, sehingga bangsa Indonesia dapat segera keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan melanjutkan pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
>
> Sesuai dengan kewajiban konstitusional yang saya emban sebagai Presiden, maka setelah saya mengucapkan sumpah kemarin, saya akan mengumumkan susunan kabinet. Kabinet ini dalam menjalankan tugasnya akan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 serta GBHN

1998, yang dalam pelaksanaannya terus disesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat yang senantiasa berkembang. Hal ini sejalan dengan semangat dan tekad bangsa Indonesia, sebagaimana tecermin dalam tuntutan reformasi konstitusional yang menyeluruh yang dipelopori oleh mahasiswa dan generasi muda, maka kabinet yang akan saya umumkan ini saya beri nama KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN.

Kabinet Reformasi Pembangunan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah proaktif untuk mengembalikan roda pembangunan, yang dalam beberapa bidang telah mengalami hambatan yang merugikan rakyat, khususnya rakyat kecil. Oleh karena itu, pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi, yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam menghadapi krisis.

Selain mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ada beberapa pijakan yang saya gunakan untuk menyusun personalia kabinet. Kabinet Reformasi Pembangunan ini disusun untuk dapat melaksanakan tugas pokok reformasi menyeluruh terhadap kehidupan ekonomi, politik, dan hukum guna menghadapi era globalisasi. Untuk itu, pertimbangan profesionalitas dan kepakaran amat diperhatikan di samping pertimbangan pengalaman, dedikasi, integritas dan kekompakan kerja.

Sebagai pembantu Presiden, para menteri juga mencerminkan berbagai unsur kekuatan sosial politik dan masyarakat, sehingga merupakan sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa. Dengan demikian, kabinet ini terdiri atas unsur-unsur kekuatan bangsa, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual dan perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat.

Sebagaimana yang saya kemukakan kemarin, kita akan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi karena praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan itu, saya juga menekankan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan arahan dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, dalam rangka meningkatkan objektivitas dan menjamin kemandirian Bank Indonesia, maka dengan sengaja jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak saya masukkan dalam kabinet, karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga, berdasarkan undang-undang.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan memohon rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wata'ala, serta dukungan seluruh rakyat dan komponen bangsa, dengan ini saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air susunan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai berikut:

KABINET REFORMASI PEMBANGUNAN

Menteri Koordinator

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Jenderal TNI Feisal Tanjung
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri : Ginandjar Kartasasmita
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara : Hartarto Sastrosoenarto
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan : Haryono Suyono

Menteri-menteri yang Memimpin Departemen

5.	Menteri Dalam Negeri	:	Letjen TNI Syarwan Hamid
6.	Menteri Luar Negeri	:	Ali Alatas
7.	Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI	:	Jenderal TNI Wiranto
8.	Menteri Kehakiman	:	Muladi
9.	Menteri Penerangan	:	Letjen TNI M. Yunus Yosfiah
10.	Menteri Keuangan	:	Bambang Subianto
11.	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	:	Rahardi Ramelan
12.	Menteri Pertanian	:	Soleh Solahuddin
13.	Menteri Pertambangan dan Energi	:	Kuntoro Mangkusubroto
14.	Menteri Kehutanan dan Perkebunan	:	Muslimin Nasution
15.	Menteri Pekerjaan Umum	:	Rachmadi Bambang Sumadhijo
16.	Menteri Perhubungan	:	Giri Suseno Hadihardjono
17.	Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya	:	Marzuki Usman
18.	Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah	:	Adi Sasono
19.	Menteri Tenaga Kerja	:	Fahmi Idris
20.	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	:	AM Hendropriyono
21.	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	:	Juwono Sudarsono
22.	Menteri Kesehatan	:	Farid Anfasa Moeloek
23.	Menteri Agama	:	Malik Fajar
24.	Menteri Sosial	:	Justika Syarifudin Baharsjah

Menteri Negara yang Mempunyai Tugas Tertentu

25.	Menteri Negara Sekretaris Negara	:	Akbar Tandjung
26.	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT	:	M. Zuhal

27.	Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM	: Hamzah Haz
28.	Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN	: Hasan Basri Durin
29.	Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman	: Theo Sambuaga
30.	Menteri Negara Lingkungan Hidup	: Panangian Siregar
31.	Menteri Negara Pendayagunaan BUMN	: Tanri Abeng
32.	Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas	: Boediono
33.	Menteri Negara Peranan Wanita	: Tuty Alawiyah
34.	Menteri Negara Pemuda dan Olahraga	: HR Agung Laksono
35.	Menteri Negara Pangan dan Hortikultura	: AM Saefuddin
36.	Menteri Negara Kependu-dukan/Kepala BKKBN	: Ida Bagus Oka

Demikian susunan Kabinet Reformasi Pembangunan yang diharapkan segera melaksanakan tugas dalam melanjutkan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh rakyat.

Setelah selesai memperkenalkan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan, saya kembali menuju Ruang Jepara untuk menerima Jaksa Agung bersama wakilnya.

Akbar Tandjung mendampingi saya, sebagai salah satu Sekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar dan Mensesneg yang baru saja saya umumkan.

Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung Soedjono C. Atmanegara bertanya, mengapa Jaksa Agung tidak disebut

dalam daftar nama para anggota kabinet yang baru?

Saya jawab, "Nanti pada waktunya akan saya jelaskan."

Sebenarnya saya bermaksud untuk menjadikan Jaksa Agung mandiri seperti Gubernur Bank Indonesia agar tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja termasuk presiden dan kedudukan, wewenang dan tugasnya diatur melalui undang-undang. Namun setelah saya sampaikan iktikad niat saya kepada pakar hukum ketatanegaraan, Jimly Asshiddiqie, ia menyarankan agar saya menunda dahulu.

Dalam keadaan labil seperti sekarang ini, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang Jaksa Agung oleh mereka yang sudah memiliki jaringan harus dicegah. Jaksa Agung yang kuat dan mandiri kelak dapat dilaksanakan setelah keadaan politik menjadi lebih stabil dan lebih transparan.

Saya sangat menyadari bahwa kedudukan sebagai koordinator harian Keluarga Besar Golkar dapat memengaruhi DPR & MPR untuk menyusun undang-undang seperlunya karena memiliki mayoritas suara di legislatif. Mungkin kelak tidak semudah seperti sekarang untuk membuat undang-undang mengenai Jaksa Agung yang mandiri.

Kemudian saya melanjutkan pembicaraan dengan Jaksa Agung dan menginstruksikan kepadanya agar semua tahanan politik segera dilepaskan.

Ia menanyakan, "Bagaimana dengan Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan?"

"Termasuk Sri Bintang dan Muchtar Pakpahan!" jawab saya.

"Pada hari Senin tanggal 25 Mei 1998, sebelum Sidang Paripurna Pertama Kabinet Reformasi Pembangunan di Bina Graha dimulai, saya akan adakan rapat khusus dengan Menko Polkam, Mendagri, Menhankam/Pangab, Menteri

Kehakiman, Mensesneg, dan Jaksa Agung untuk membicarakan lebih rinci." Saya mohon maaf, karena saya harus melanjutkan pekerjaan di ruang kerja Presiden di sebelah Ruang Jepara.

Di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka, saya kembali memantau perkembangan pendapat dalam dan luar Negeri. Khususnya berita yang beredar mengenai *free fall* atau jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar AS yang sejak akhir tahun 1997 saya dengar disebarluaskan oleh mantan PM Singapura Lee Kuan Yew. Katanya, jikalau saya menjadi Wakil Presiden, maka nilai rupiah akan terus jatuh melampaui 1 dolar AS = Rp16.000, bahkan akan melampaui 1 dolar AS = Rp20.000. Berita tersebut berdampak sangat negatif terhadap stabilitas ekonomi dan politik di bumi Indonesia.

Saya berpendapat bahwa berpolemik dengan mereka yang sehaluan dengan *Senior Minister* Lee Kuan Yew akan lebih merugikan bangsa dan negara. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan karya nyata yang membuktikan bahwa mereka keliru.

Menyimak seriusnya perkembangan persoalan ekonomi saat itu, saya teringat pada suatu diskusi empat mata dengan Pak Harto mengenai Ekonomi Pancasila yang pada waktu itu sedang dianalisis dan didiskusikan oleh banyak orang. Pak Harto menanyakan pendapat saya.

Saya sangat sadari keunggulan Pak Harto sebagai tokoh yang sangat rasional, *intelligent*, pragmatis, selalu ingin tahu dan pada saya pribadi sangat terbuka. Karena itu, saya menyampaikan bahwa pertanyaan Pak Harto akan saya jawab dengan permohonan agar ia tidak boleh marah atau tersinggung, jikalau kata-kata yang akan saya sampaikan tidak enak didengar.

Setelah Pak Harto menganggukkan kepala tanda setuju,

maka saya sampaikan bahwa beberapa pelaku ekonomi menyalahartikan dan menyalahgunakan "Ekonomi Pancasila" sebagai praktik *early primitive capitalistic dirty economy* yang sangat merugikan rakyat.

Mendengar komentar saya, Pak Harto tidak marah namun secara serius berkata, "Memang dalam sejarah pembangunan tiap bangsa yang mau maju, sebelumnya harus melalui tahap seperti ini."

"Mungkin benar Pak, tetapi jangan terlalu lama kita berada dalam tahap ini. Kita harus dapat belajar dari kesalahan orang lain."

Pak Harto tidak tersinggung sama sekali, namun hanya terdiam. Mengenal Pak Harto sejak ia berusia 28 tahun, saya yakin bahwa ucapan saya telah merangsangnya berpikir.

Dalam ruang kerja Presiden, di mana pembicaraan tersebut pernah terjadi, percakapan itu "mengilhami" saya untuk segera memanfaatkan kesempatan agar dapat mengakhiri penyalahgunaan dan penyalahartian "Ekonomi Pancasila" oleh beberapa pelaku ekonomi dengan praktik *early primitive capitalistic dirty economy* tanpa revolusi. Namun, melalui suatu evolusi yang dipercepat dengan risiko dan biaya yang minimal serta dalam waktu sesingkat-singkatnya, melalui suatu proses pelaksanaan yang dapat diperhitungkan dan dikendalikan.

Persoalan yang saya hadapi begitu banyak serta kompleks, sementara masyarakat terus berdemo dan berprasangka buruk. Mereka yang terus berdemo sebenarnya memiliki wawasan dan kepentingan yang sangat berbeda bahkan berlawanan. Berbagai aliran politik ataupun nonpolitik telah menyatu menjadi suatu gerakan massa melawan pusat kekuasaan yang saya warisi.

Bukankah yang kita hadapi sekarang dengan menurunnya nilai mata uang Asia yang diawali di Thailand

dan merambat ke Indonesia adalah krisis moneter? Bukankah krisis moneter yang kita hadapi sudah mengakibatkan inflasi sekitar 70 persen yang dapat berkembang menjadi hiperinflasi? Bukankah ini terjadi karena banyak bank harus ditutup dan masyarakat panik segera mengambil simpanannya di bank masing-masing untuk ditukar menjadi valuta asing, dolar AS khususnya? Bukankah ini semuanya menyebabkan permintaan dolar AS naik atau nilai dolar AS terhadap rupiah naik atau nilai rupiah terus menurun atau anjlok?

Bukankah ini semua berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat dan dapat men-*trigger* terjadinya perpecahan atau "Balkanisasi" Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 1945? Bukankah perang saudara dapat terjadi? Bukankah ini semuanya akibat interpretasi dan implementasi "Ekonomi dan Demokrasi Pancasila" yang salah bahkan disalahgunakan menjadi praktik *early primitive capitalistic dirty economy* yang berkepanjangan?

Semua langkah dan kebijakan harus profesional, rasional, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan masalah multikompleks yang sedang kita hadapi. Sejak minggu yang lalu, saya secara intensif mengikuti dan mempelajari perkembangan moneter di Asia pada umumnya dan khususnya di Indonesia.

Kesimpulan saya, kunci untuk menyelesaikan permasalahan terletak pada kedudukan dan peran Bank Indonesia. Bank Indonesia harus menjadi mandiri, bebas, kuat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa saja termasuk oleh Presiden Republik Indonesia.

Bagaimana dengan undang-undang yang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang membantu tugas presiden di dalam melaksanakan

pembangunan? Undang-undang tersebut adalah alasan yang menjadikan Gubernur Bank Indonesia salah satu anggota kabinet yang dipimpin oleh dan bertanggung jawab kepada presiden.

Bukankah undang-undang tersebut dapat pula diartikan bahwa hanya Bank Indonesia yang mandiri dan objektif dapat membantu presiden dalam melaksanakan pembangunan? Dengan interpretasi tersebut, Gubernur Bank Indonesia justru tidak boleh menjadi anggota kabinet?

Untuk mencegah penyalahgunaan Bank Indonesia oleh siapa saja, termasuk presiden, perlu undang-undang mengenai Bank Indonesia ditinjau kembali. Undang-undang khusus untuk Bank Indonesia yang mandiri, kuat, dan transparan harus segera disusun.

Dasar hukum untuk memperkuat Undang-Undang Bank Indonesia harus diberikan oleh Sidang Istimewa MPR sebagai amandemen UUD atau ketetapan MPR. Semua ini, harus dipersiapkan secara profesional oleh para pakar yang berpengalaman dalam bidang perbankan pada umumnya dan khususnya bank sentral.

Keberhasilan pembangunan Jerman Barat dibangun di atas keberhasilan Bank Sentral Jerman atau Deutsche Bundesbank dalam menjadikan Deutsche Mark (DM) mata uang yang stabil dan berkualitas tinggi. Keberhasilan Deutsche Bundesbank tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh perbankan Prof. Dr. Helmut Schlesinger. Ia telah 20 tahun menjadi anggota pimpinan Deutsche Bundesbank.

Melalui Kanselir Dr. Helmut Kohl, saya minta agar Prof. Dr. Schlessinger dapat membantu para pakar moneter Indonesia khususnya dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk mempersiapkan Undang-Undang Bank Indonesia yang mandiri, independen, transparan, dan kuat.

Pengaruh Presiden yang saya warisi sangat besar dan

menguntungkan untuk mengubah undang-undang yang diperlukan dan keadaan demikian belum tentu akan terjadi lagi dalam sistem demokrasi yang makin transparan dan terbuka.

Pada Pidato Pengantar Kabinet Reformasi Pembangunan, saya telah menjelaskan peran Bank Indonesia yang mandiri, independen, transparan, dan kuat dengan gubernurnya yang tidak menjadi anggota kabinet.

Oleh karena itu saya panggil Gubernur Bank Indonesia untuk menjelaskan tugas dan peran Bank Indonesia. Ginandjar Kartasasmita mendampingi saya pada pertemuan di Wisma Negara. Saya sampaikan kepada Gubernur BI sebagai berikut:

- Segera diberlakukan Gubernur Bank Indonesia, tidak menjadi anggota kabinet lagi dan tidak bertanggung jawab kepada presiden;
- Gubernur Bank Indonesia harus mandiri dan profesional;
- Khusus untuk Bank Indonesia, akan dipersiapkan dan dirancang undang-undang dan jikalau perlu diperkuat oleh amandemen UUD atau ketetapan MPR;
- Harap segera diambil tindakan untuk meningkatkan kualitas mata uang rupiah dengan menjadikan Bank Indonesia lebih transparan;
- Jikalau pemerintah membutuhkan rupiah untuk pelaksanaan proyek apa saja, maka harus dicari pinjaman dari pasar modal. Dalam hal ini, pemerintah hanya dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

Sementara itu, saya menerima telepon dari Pangab Jenderal Wiranto, yang melaporkan bahwa Pangab mengusulkan Panglima Divisi Siliwangi dari Jawa Barat sebagai Pangkostrad.

Memerhatikan Instruksi Presiden agar pergantian

Pangkostrad harus dilaksanakan sebelum matahari terbenam dan karena masalah teknis pelantikan Panglima Divisi Siliwangi baru hanya dapat dilaksanakan keesokan harinya, maka Pangkostrad sementara akan dijabat oleh Asisten Operasi Pangab Letjen Johny Lumintang.

Kepada Letjen Johny Lumintang akan diperintahkan untuk segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing sebelum matahari terbenam.

Saya menyetujui usul Pangab untuk melantik Panglima Divisi Siliwangi, Mayjen Djamari Chaniago sebagai Pangkostrad esok harinya pada tanggal 23 Mei 1998. Usul untuk menugaskan Letjen Johny Lumintang agar menjadi Pangkostrad sementara juga dapat saya terima.

Setelah pembicaraan dengan Pangab selesai, ADC melaporkan bahwa Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto minta waktu bertemu.

Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Letjen Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. Pak Harto baru 24 jam meletakkan jabatannya. Pak Harto yang telah memimpin negara dan bangsa selama 32 tahun, tentunya memiliki pengaruh dan prasarana yang besar dan kuat.

Bagaimana sikap dan tanggapan Pak Harto mengenai kebijakan saya menghentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrad? Apakah beliau tersinggung dan menugaskan menantunya untuk bertemu dengan saya?

Menurut peraturan yang berlaku, siapa saja yang menghadap presiden tidak diperkenankan membawa senjata. Mereka sebelumnya diperiksa dengan alat-alat yang canggih. Tentunya itu berlaku pula untuk Panglima Kostrad. Namun, bagaimana halnya dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakah pengawal itu berani?

Apa akibatnya jikalau saya tidak menerima Pangkostrad? Bukankah Pangkostrad memiliki hak untuk didengar pendapatnya? Dialog adalah dasar untuk lebih saling mengerti dan pengertian adalah hasil dari dialog. Pengertian adalah awal dari toleransi. Toleransi adalah salah satu elemen dari perdamaian dan ketenteraman. Bukankah ini maksud tujuan reformasi? Perdamaian dan ketenteraman di bumi Indonesia?

Oleh karena itu, pertemuan saya dengan Pangkostrad Letjen Prabowo, saya persilakan diatur, setelah saya santap siang bersama keluarga dan sebelum pertemuan dengan Gubernur Bank Indonesia di Wisma Negara.

Tidak berapa lama kemudian, protokol Presiden memasuki ruangan dan melaporkan bahwa seluruh keluarga saya sudah sampai di Wisma Negara dan menanti untuk makan siang bersama. Saya diharapkan ikut bergabung.

Berulang kembali pertanyaan pada diri saya, mengapa untuk kepentingan pengamanan, seluruh keluarga saya harus berkumpul di satu tempat?

Apakah tidak lebih aman jikalau keluarga saya masih tetap di tempatnya masing-masing? Saya teringat nasib keluarga Tsar Romanov dari Rusia yang semuanya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum Bolshevik. Pemikiran yang mengerikan timbul.

Membayangkan hal tersebut, lalu saya kembalikan pada pegangan agama saya. Saya bersyukur telah menikmati proses pembudayaan yang mengakar pada agama Islam yang sangat kuat. Almarhum ayah saya meninggal sewaktu beliau sedang menjadi Imam memimpin shalat Isya bersama keluarga. Waktu itu, saya berusia 13 tahun. Skenario 48 tahun yang lalu, tiba-tiba terbayang kembali. Saya masih dapat merasakan dan melihat sewaktu beliau sujud sambil mengucapkan: Allahu Akbar. Ayah meninggalkan kami

untuk selama-lamanya menghadap Allah SWT, di hadapan kami sekeluarga yang sedang shalat.

Apakah nasib saya akan seperti almarhum ayah kandung saya, berpisah dengan keluarga untuk selama-lamanya di hadapan istri, anak, dan cucu? Ataukah nasib kami sekeluarga akan berakhir seperti keluarga Tsar Romanov dari Rusia?

Mengapa harus demikian? Apa yang harus saya laksanakan?

Tiap orang yang beragama dan percaya pada eksistensi Tuhan YME percaya bahwa hidup dan mati seseorang ditentukan oleh Allah SWT Yang dikehendaki Tuhan YME adalah yang terbaik dan pasti akan terjadi.

Saya pasrah terima apa adanya dan dengan tenang menghadapi semuanya tanpa bertanya: *Kenapa? Mengapa? Bagaimana?* Karena semua saya laksanakan dengan iktikad dan niat membantu memperbaiki nasib dan masa depan bangsa Indonesia yang saya sangat cintai.

Sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya meninggalkan ruang kerja Presiden didampingi beberapa perwira tinggi dan perangkat pengamanan militer lengkap dengan senjata mereka. Para perwira pengamanan itu, kecuali Letjen Sintong Panjaitan, baru saya lihat wajahnya, sebagian besar tidak saya kenal.

Mengenai Sintong Panjaitan, saya perlu menceritakan sekelumit informasi. Jenderal Sintong sudah sekitar enam tahun menjabat sebagai asisten saya untuk bidang Sistem Senjata baik di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), maupun di Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Sebelumnya, selama beberapa tahun lamanya, Jenderal Sintong tidak diberi jabatan dalam militer, karena ia dianggap bertanggung jawab atas kejadian tragis di Timor Timur

sewaktu menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana. Ketika itu, Provinsi Timor Timur termasuk wilayah Kodam Udayana.

Saya teringat, saat kunjungan saya sebagai Menristek ke Fhilipina untuk bertemu Presiden Corry Aquino, saya bertemu Dubes David Napitupulu dari Generasi 66 (yang kebetulan ipar Sintong Panjaitan). David menceritakan "nasib" iparnya, dan meminta tolong saya untuk dapat membantu ikut menyelesaikan masalah Sintong Panjaitan. Menurut David, semua tokoh senior ABRI waktu itu, termasuk Jenderal Panggabean, Benny Murdani, Try Sutrisno, Edie Sudradjat, Feisal Tanjung tidak berhasil meyakinkan Presiden Soeharto untuk menyelesaikan "masalah Sintong Panjaitan". Sehingga, sampai saat itu Sintong Panjaitan yang berpangkat Mayor Jenderal tidak diberi jabatan.

"Kami tidak memiliki jalan lain lagi untuk meyakinkan Presiden Soeharto kecuali melalui Pak Habibie," demikian ucapan David Napitupulu yang mengatasnamakan keluarga dan marga mereka.

Syukur alhamdulillah, saya dapat meyakinkan Presiden Soeharto dan hasilnya, Mayjen Sintong Panjaitan ditempatkan sebagai Asisten Sistem Senjata pada salah satu institusi yang saya pimpin dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Sejak itu, Letjen Sintong Panjaitan saya kenal sebagai seorang perwira tinggi yang profesional, jujur, berdedikasi, berdisiplin, sangat taat beragama. Ia memeluk agama Kristen Protestan dan menjadi kawan dekat saya. Kerja sama saya dengan Letjen Sintong Panjaitan selanjutnya menjadi semakin akrab dan demikian pula dengan keluarga dan marga beliau.

Diiringi oleh para perwira tinggi militer termasuk Sintong Panjaitan, Ahmad Watik Pratiknya, Fuadi Rasyid, dan perangkat pengamanan, saya menuju ke Wisma Negara.

Di Wisma Negara, saya menemui istri saya, Ainun, bersama anak dan cucu. Kecuali cucu saya yang sedang bermain, di wajah mereka semua tecermin kebingungan dan keprihatinan.

"Mengapa kita harus berada di sini? Berapa lama kita harus tinggal di sini?" demikian pertanyaan mereka semua.

Ainun menceriterakan bahwa sewaktu sedang menerima istri Duta Besar Republik Rakyat China, ADC, dan beberapa anggota pasukan pengamanan masuk ruangan tamu di Kuningan dan memintanya dengan hormat untuk segera bergabung dengan saya di Wisma Negara. Kepada tamu dan istri saya ketika itu, dipersilakan segera mengakhiri pertemuan. Permintaan itu disampaikan tanpa penjelasan, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan bagi istri saya.

Dalam perjalanan ke Wisma Negara, istri saya sempat melihat gerakan-gerakan massa yang berdemo. Demikian penjelasan istri saya, Ainun.

Saya dan keluarga tidak banyak berbicara, karena semuanya berpikir dan beranalisis, mengambil kesimpulan masing-masing.

Kami makan siang bersama, namun semuanya dalam keadaan tegang, sehingga nafsu makan pun tidak ada. Hampir tiga hari lamanya saya tidur paling banyak dua jam sehari, namun tidak pernah sedikit pun merasakan badan saya lelah.

Tiba-tiba seorang petugas masuk melaporkan bahwa para ADC Presiden mohon waktu. Selanjutnya protokol mempersilakan saya masuk ke ruang tamu Wisma Negara di mana keempat ADC Presiden: Kolonel (AD) Tubagus Hasanuddin, Kolonel (AL) Djuhana, Kolonel (AU) Iwan Sidi, dan Kolonel (Pol) Firman Gani, telah menempatkan diri di tiap sudut kamar.

Thareq putra saya ikut masuk ke ruang tamu dan duduk

di salah satu kursi yang tersedia. Dari wajah Thareq tecermin keprihatinan dan kebingungan melihat keadaan yang tidak menentu itu. Sintong Panjaitan masuk dan melaporkan bahwa Pangkostrad sudah siap untuk saya terima, sambil mempersilakan yang bersangkutan masuk ke ruangan tamu.

Kedatangan Prabowo untuk bertemu Presiden ini perlu saya ungkapkan, karena baru pukul 06.10 pagi, saya menelepon Jenderal Wiranto dan meminta untuk menempati jabatan Menhankam/Pangab dalam kabinet yang baru saja dibentuk. Hanya sekitar tiga jam kemudian, saya menerima laporan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Oleh karena itu, kepada Pangab saya beri perintah untuk segera mengganti Pangkostrad, dan kepada Pangkostrad baru diperintahkan untuk mengembalikan pasukan Kostrad ke basis masing-masing pada hari ini juga sebelum matahari terbenam.

Kebijakan ini berlaku pula bagi tiap gerakan pasukan tanpa sepengetahuan dan koordinasi Pangab. Komandan yang bertanggung jawab akan segera saya ganti.

Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakkan pasukan Kostrad?

Sebagai seorang militer profesional, Pangkostrad sudah harus memahami "Saptamarga" dan "Sumpah Prajurit". Dengan mengambil kebijakan tanpa koordinasi dan tanpa sepengetahuan Pangab, Pangkostrad telah melanggar "Sumpah Prajurit". Mengapa? Mau ke mana?

Sebelum saya menerima Prabowo, saya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.

Prabowo lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sangat intelektual dan rasional. Disiplin intelektual memungkinkan untuk menganalisis, mempertanyakan, memperdebatkan tiap jejak seorang diri atau dengan lingkungannya, termasuk dengan atasannya.

Berbeda halnya dengan disiplin militer. Setiap langkah

harus dilaksanakan sesuai perintah atasan walaupun bertentangan dengan pendapat pribadi pelaksana perintah tersebut.

Pembawaan Prabowo Subianto masih bernapaskan disiplin intelektual, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu menguntungkan. Sebagai seorang militer profesional, ia harus tunduk pada disiplin militer.

Karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto di mana budaya feodal masih subur, maka dalam gerakan dan tindakannya sering terjadi konflik antara disiplin militer dan disiplin sipil. Apa pun yang dilakukan akan ditolerir dan tidak pernah mendapat teguran dari atasannya. Kebiasaan pemberian "eksklusivitas" kepada Prabowo adalah mungkin salah satu penyebab gerakan pasukan Kostrad tanpa konsultasi, koordinasi, dan sepengetahuan Pangab terjadi.

Kebiasaan tersebut mungkin terjadi bukan karena kehendak Presiden Soeharto, tetapi lingkungan feodallah yang memperlakukannya demikian.

Walaupun saya sangat akrab dan dekat dengan Prabowo —ia menganggap saya sebagai salah satu idolanya— kebiasaan tersebut tidak boleh saya tolerir dan biarkan. Ini suatu pelajaran bagi semua bahwa dalam melaksanakan tugas, pemberian "eksklusivitas" kepada siapa saja, termasuk kepada keluarga dan teman, tidak dapat dibenarkan.

Kemudian ketika Prabowo masuk ke ruang saya, melihat bahwa Prabowo tidak membawa senjata apa pun, saya merasa puas. Hal ini berarti pemberian "eksklusivitas" kepada Prabowo tidak dilaksanakan lagi.

Terjadi suatu dialog antara saya dan Pangkostrad, dan sebagaimana biasa jika kami bertemu, ia berbicara dalam bahasa Inggris. "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad."

Saya menjawab, "Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti."

"Mengapa?" tanya Prabowo.

Saya menyampaikan bahwa saya mendapat laporan dari Pangab bahwa gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka.

"Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," kata Prabowo.

"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," jawab saya.

"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo dengan nada marah.

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab saya.

"Atas nama ayah saya Prof. Soemitro Djojohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya tiga bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad," mohon Prabowo.

Saya jawab dengan nada tegas, "Tidak! Sampai matahari terbenam Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrad yang baru!"

"Berikan saya tiga minggu atau tiga hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya!"

Saya langsung menjawab, "Tidak! Sebelum matahari terbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrad baru! Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja."

"Yang saya kehendaki adalah pasukan saya!" jawab Prabowo.

"Ini tidak mungkin, Prabowo!"

Sementara itu pintu terbuka dan Sintong Panjaitan masuk dan mengatakan, "Jenderal, Bapak Presiden tidak

punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan."

Saya mengatakan, "Sebentar," dan Sintong Panjaitan meninggalkan ruangan lagi.

Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk meminta agar ia dapat berbicara melalui telepon dengan Pangab. Saya tugaskan kepada salah satu ADC Presiden yang berada di ruangan untuk segera menghubungi Pangab. Setelah menelepon ke Markas Besar ABRI, ADC Presiden menyampaikan bahwa Pangab tidak dapat dihubungi.

Untuk kedua kalinya pintu terbuka dan Sintong Panjaitan mempersilakan Prabowo meninggalkan ruangan karena tamu saya Gubernur Bank Indonesia sudah tiba dengan staf, bersama Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita.

Saya masih sempat memeluk Prabowo dan menyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo. Kemudian, saya didampingi anak saya, Thareq, meninggalkan ruang tamu untuk menengok istri, anak, dan cucu.

Prabowo Subianto adalah putra tertua dari keluarga yang sangat terhormat, sangat intelektual, dan sangat kritis. Bahkan, ayah kandungnya adalah salah satu idola saya sejak masih di SMA. Dedikasi Prabowo, begitu pula orang tua dan saudara-saudaranya terhadap bangsa dan negara, tidak perlu diragukan. Saya percaya bahwa iktikad dan niat Prabowo untuk melindugi saya adalah tulus, jujur, dan tepat.

Masalahnya iktikad dan niat yang baik dan tepat itu dilaksanakannya tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan Pangab. Kesimpulan ini saya ambil ketika tadi pagi Pangab melaporkan mengenai gerakan pasukan Kostrad. Dari laporan tersebut secara implisit dinyatakan bahwa tindakan Pangkostrad, tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan dengan Pangab.

Ini tidak dapat saya tolerir, karena akan memengaruhi para komandan lainnya untuk bertindak sendiri-sendiri dengan alasan apa pun tanpa koordinasi. Sikap demikian dapat mengakibatkan kekacauan bahkan perang saudara yang memungkinkan proses "Balkanisasi" Republik Indonesia. Bukankah kemarin pagi tanggal 20 Mei 1998 saya telah sampaikan kepada Pangab bahwa saya tidak akan menerima kepala staf angkatan termasuk Pangkostrad sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atau permohonan Pangab? Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrad tanpa sepengetahuan Pangab tidak boleh saya tolerir.

Mengapa saya beri batas waktu sebelum matahari terbenam dan pada hari ini juga, pasukan harus kembali ke basis masing-masing, ketika pasukan Kostrad sedang bergerak?

Peralatan dan teknologi kita masih belum memungkinkan untuk memantau gerakan pasukan pada malam hari. Alasan ini pula saya manfaatkan ketika saya harus memutuskan siapa yang akan menjadi Menhankam/Pangab dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.

Setelah bersama istri dan anak saya melaksanakan shalat Ashar, saya kembali ke ruang tamu untuk menerima Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin, dengan timnya. Saya didampingi oleh Ginandjar Kartasasmita.

Gubernur Bank Indonesia melaporkan, keadaan ekonomi berkembang ke arah hiperinflasi. Suku bunga sudah berkisar antara 60 persen dan 90 persen. Nilai rupiah berada antara Rp14.000 dan Rp17.000 untuk tiap dolar AS, dan menuju ke Rp20.000 per dolar AS seperti ramalan Perdana Menteri Lee Kuan Yew.

Karena ketidakpastian, krisis moneter dan krisis politik, modal mulai lari ke luar negeri dan pengangguran terus meningkat. Akibatnya, yang hidup di bawah garis kemiskinan

terus bertambah. Keadaan sangat memprihatinkan.

Cadangan devisa sudah menciut menjadi sekitar 56 persen dari cadangan semula. Setelah melaporkan keadaan ekonomi nasional, Gubernur Bank Indonesia memohon pengarahan dan petunjuk Presiden.

Saya memberi pengarahan sebagai berikut:

1. Undang-undang menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang membantu Presiden untuk melaksanakan pembangunan nasional. Yang dapat diartikan bahwa Gubernur Bank Indonesia sebagai pembantu presiden dalam pembangunan, harus menjadi anggota kabinet. Sedangkan tadi pagi saya umumkan bahwa Gubernur Bank Indonesia tidak menjadi anggota Kabinet Reformasi Pembangunan dan mulai segera Bank Indonesia harus mandiri dan independen. Dengan demikian, kebijakan saya itu seolah-olah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan berkeyakinan bahwa Bank Indonesia dapat bekerja lebih produktif dan efisien membantu presiden dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka kebijakan seperti telah diumumkan tadi pagi itu, jelas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;
2. Saya melarang pemerintah dalam hal ini Menko Ekuin, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan & Industri dan Menteri Negara Ketua Bappenas, memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kebijakan Gubernur Bank Indonesia;
3. Kebijakan saya ini harus dipertanggungjawabkan dalam sidang MPR pada akhir masa jabatan saya. Undang-Undang yang berlaku (UU No. 13 Tahun 1968 mengenai Bank Indonesia) sebelumnya harus sudah diperbaharui dan disempurnakan dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru ini harus menjadikan Bank

Indonesia lebih kuat, lebih independen, lebih mandiri dan lebih transparan;

4. Saya melarang pemerintah meminjam uang dari Bank Indonesia. Jikalau membutuhkan uang, maka saya persilakan meminjam dari pasar modal. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Kerja sama terbatas hanya pada konsultasi saja;
5. Saya harapkan dengan kebijakan ini Bank Indonesia dapat meningkatkan kualitas mata uang rupiah yang berarti:
   a. Nilai rupiah harus stabil;
   b. Suku bunga harus satu angka berarti di bawah 10 persen;
   c. Inflasi harus harus satu angka berarti di bawah 10 persen.

Jikalau Bank Indonesia berkonsentrasi pada bidang moneter saja dan pemerintah berkonsentrasi pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka dengan sinergi positif antara pemerintah dan Bank Indonesia, insya Allah satu tahun lagi keadaan kita sudah lebih cerah. Kita harus konsisten melaksanakan kebijakan tersebut.

Setelah Gubernur Bank Indonesia dengan tim bersama Ginandjar Kartasasmita meninggalkan ruang tamu, saya mempelajari reaksi masyarakat dan pasar dalam dan luar negeri terhadap pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, begitu pula reaksi terhadap pergantian Pangkostrad.

Reaksi masyarakat dan pasar dalam dan luar negeri sangat emosional. Euforia kebebasan terasa dan berkelebihan. Prasangka negatif atau buruk mengenai presiden mulai secara sistematik disebarluaskan.

Jikalau kualitas iman dan takwa sesuai ajaran agama

Islam yang saya anut tidak memadai, mungkin reaksi yang emosional dan tidak terkendali dapat memengaruhi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden.

Justru reaksi demikian yang diharapkan para agitator yang mengarang isu-isu yang tidak benar. Reaksi Presiden yang dapat mengakibatkan meledaknya emosi destruktif dan mulainya proses "Balkanisasi" di Indonesia, menjadi puluhan negara kecil di Asia Tenggara sesuai sasaran para agitator, dapat menjadi kenyataan.

Jikalau ini terjadi, maka dunia akan memiliki "wilayah krisis baru" seperti di Timur Tengah dan Asia Selatan.

Sekitar pukul 22.00, saya mendapat laporan dari Komandan Pasukan Keamanan Presiden bahwa keadaan sudah kembali tenang dan terkendali, sehingga kami sekeluarga diperkenankan kembali ke Kuningan dengan pengamanan yang lebih ketat.

Setibanya di kediaman Kuningan, saya bersama istri segera mengambil wudhu lalu bersama melaksanakan shalat Isya. Kami bersama memanjatkan doa. Hari yang panjang dan penuh dengan kegelisahaan serta ketidaktahuan mengenai perkembangan di sekitar kami sekeluarga, telah berakhir berkat lindungan Allah SWT.

Sekitar pukul 01.00 tengah malam, saya baru dapat tidur dengan tenang dan nyenyak, sampai pukul 05.00 pagi. Saya bangun shalat Subuh, mandi, dan langsung ke ruang kerja. Saya kembali memantau perkembangan politik, ekonomi, dan gerakan massa. Ternyata informasi dari jaringan media nasional dan internasional serta laporan dari jaringan intelijen saling bertentangan dan membingungkan.

Ucapan selamat dari negara-negara sahabat dan tetangga mulai berdatangan dengan penyampaian harapan, simpati. Hal semacam ini sudah menjadi standar kesopanan dan budaya hubungan antarmanusia dan negara.

Apa sebenarnya yang dimaksud dan diharapkan oleh pimpinan negara sahabat dan tetangga, susah saya simpulkan. Apa pun yang terjadi, saya tetap harus konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala perubahan harus sesuai dengan konstitusi, ditentukan oleh wakil-wakil rakyat di DPR/MPR dan tidak oleh kelompok-kelompok yang sedang berdemo. Walaupun legitimasi DPR/MPR dipertanyakan, itu tidak berarti legitimasi para demonstran di jalan lebih tinggi.

Memang pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tahun 1997 relatif berlangsung baik dan aman, namun peserta partai politik dalam pemilu dibatasi pada tiga organisasi yaitu 2 partai politik: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), bersama Golongan Karya (Golkar) yang bergerak dan berfungsi seperti partai politik. Akibatnya, legitimasi pemilu dipertanyakan sehingga terjadi kerusuhan dalam masyarakat, yang terus dikembangkan dan disponsori oleh mereka yang merasa dirugikan oleh Orde Baru.

Kenyataan ini menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas keabsahan hasil Pemilu 1997, walaupun sudah dilaksanakan sejak tahun 1971 atau tiap lima tahun dengan hasil kualitas pemilu yang terus meningkat.

Apa yang harus dilaksanakan, agar dalam waktu sesingkat-singkatnya, legitimasi DPR/MPR diperbaiki dan ditingkatkan sehingga stabilitas tidak terganggu?

Saya mengambil kesimpulan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya sudah harus dilaksanakan pemilihan umum yang baru, untuk meningkatkan legitimasi DPR/MPR dan memberi kesempatan kepada partai politik apa saja yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh DPR dan tidak melanggar UUD 1945 dan Ketetapan MPR yang berlaku.

Karena jadwal dan peserta pemilihan umum tahun 2002

telah ditentukan oleh Sidang MPR, yang baru saja berlangsung dua bulan yang lalu, maka untuk mengubah jadwal pemilu diperlukan Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR tersebut, sekaligus dapat memberi dasar hukum untuk melaksanakan "reformasi nasional" dalam proses "globalisasi dunia".

Dari pemikiran tersebut, saya berkesimpulan untuk segera berkonsultasi dengan Ketua DPR/MPR.

Saya menugasi ADC Presiden untuk menghubungi Ketua DPR/MPR, Harmoko, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

Beberapa menit kemudian, saya dapat menjelaskan kepada Ketua DPR/MPR maksud dan tujuan untuk datang ke DPR/MPR.

Sebenarnya pimpinan DPR/MPR, tiap saat siap untuk dipanggil dan berkonsultasi dengan Presiden baik di kantor Bina Graha, Istana Merdeka, maupun di kediaman Presiden di Kuningan.

Tetapi saya memutuskan untuk datang berkonsultasi dengan pimpinan DPR/MPR ke Gedung DPR/MPR, tempat para wakil-wakil rakyat berkantor.

Kebijakan ini, saya anggap wajar dan tepat, walaupun sejak Presiden Soekarno, sampai sekarang, selama 53 tahun lamanya, para pimpinan wakil rakyat di DPR/MPR-lah yang selalu datang ke tempat di mana presiden sedang berada, kata Ketua DPR/MPR Harmoko.

Setelah berdiskusi cukup panjang, saya dan Ketua DPR/MPR menyepakati bahwa pertemuan konsultasi pertama, agar dapat dilaksanakan di gedung DPR/MPR Senayan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei yang akan datang. Tempat pertemuan konsultasi kedua nanti dapat dilaksanakan di Bina Graha atau di Istana Merdeka. Selanjutnya tempat pertemuan presiden dengan Pimpinan DPR/MPR terus bergantian.

Dengan demikian, tanpa disadari proses desakralisasi presiden dan institusi presiden dimulai.

Pukul 09.00 pagi, di Istana Negara, pelantikan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan lancar. Prediksi bahwa saya tidak akan dapat menyusun kabinet sehingga harus mengakhiri tugas sebagai presiden setelah 100 jam, diubah menjadi 100 hari.

Menurut isu yang berkembang, prediksi 100 hari terjadi karena Kabinet Reformasi Pembangunan, tidak mampu mengatasi permasalahan yang multikompleks.

Apa legitimasi dan dasar hukum Habibie untuk melanjutkan tugas Presiden Soeharto? Bukankah Habibie kroni dan pilihan Soeharto? Dapatkah Habibie sebagai "tukang" buat pesawat terbang melaksanakan tugas sesuai harapan? Apakah Habibie hanya merupakan presiden masa transisi saja? Berapa lama masa transisi itu? Dan sebagainya, demikian banyak pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat.

Ada yang pro-Habibie dan ada pula yang anti-Habibie. Pro dan anti-Habibie di jalanan, sudah mulai berhadapan dan mengakibatkan terjadinya ketegangan yang semakin tinggi.

Salah langkah, dapat mengakibatkan gerakan-gerakan dalam sekejap mata beralih menjadi suatu revolusi. Jikalau ini terjadi, maka rakyat kecil yang menjadi korban utama.

Untuk mengecilkan atau menggembosi ketegangan antara pro dan kontra yang terus meningkat, maka saya memutuskan untuk melegalisasi kebebasan berdemonstrasi, begitu pula kebebasan berbicara, berorganisasi, mengeluarkan pendapat, dan sebagainya, asal tidak merusak dan melakukan tindakan kriminal.

Membunuh dan merusak adalah suatu tindakan kriminal dan tidak dapat saya tolerir. Aparatur pengamanan,

TNI dan polisi, harus bertindak melakukan "pencegahan proaktif" agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan ketenteraman.

Protokol Presiden melaporkan bahwa beberapa tokoh nasional mengharapkan untuk dapat berdialog dengan Presiden mengenai keadaan nasional. Tokoh-tokoh tersebut adalah Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan John Sapi'ie.

Mereka saya terima pukul 20.00 hari ini juga di kediaman saya di Kuningan.

Pada pertemuan itu, terjadi diskusi dan saran yang konstruktif mengenai penyelesaian masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Permintaan untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tidak lebih dari tiga bulan, tidak dapat saya terima. Karena untuk mempersiapkan pemilihan umum tersebut dibutuhkan waktu satu tahun.

Pemilu yang akan datang sudah diatur dalam Ketetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara. Pemilihan umum memang harus dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya, namun harus sesuai undang-undang yang berlaku.

Suatu ketetapan MPR mengenai jumlah partai dan kehidupan politik dalam suasana globalisasi, kebebasan, keterbukaan, dan demokrasi juga harus dihasilkan sebagai produk hukum Sidang Istimewa MPR yang akan datang.

Karena itu, Ketetapan MPR yang sekarang berlaku harus diubah, dan itu hanya mungkin melalui suatu Sidang Istimewa MPR.

Saya bermaksud untuk berkonsultasi dengan pimpinan MPR pada tanggal 28 Mei, hari Kamis minggu depan, mengenai pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dan jadwal pemilu yang akan datang.

Saran dan permintaan para tokoh nasional untuk melaksanakan pemilu dalam waktu tiga bulan atau sebelum bulan September, tidak dapat saya terima mengingat kendala tersebut di atas.

Tidak "adil" jikalau rakyat tidak diberi kesempatan untuk membentuk partai politiknya dengan membawa aspirasi dan wawasan yang baru, tetapi tetap sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, partai politik yang baru dibentuk itu pun masih membutuhkan waktu untuk memasyarakatkan aspirasi dan wawasan mereka.

Andaikata saya menerima usul para tokoh nasional tersebut, dan segera memaksakan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR, maka kemungkinan besar berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan ekonomi dan jelas akan merugikan proses reformasi.

Saran bahkan tuntutan dan desakan enam "tokoh reformasi" itu, saya anggap tetap konstruktif dan bermaksud baik. Saya tetap menolak pelaksanaan pemilu dalam waktu tiga bulan.

"Insya Allah tahun depan akan saya laksanakan pemilu, dan untuk itu saya butuhkan persiapan-persiapan seperti dasar hukum dan prasarana pelaksanaan pemilu," demikian saya sampaikan kepada keenam 'tokoh reformasi' tersebut.

Setelah pukul 21.30, para tokoh tersebut meninggalkan pendopo kediaman saya dan saya kembali bekerja untuk membaca, mempelajari, dan menganalisis semua masukan serta laporan yang saya peroleh.

Sekitar pukul 01.00, saya meninggalkan ruang kerja untuk beristirahat dan mengakhiri hari yang penuh tantangan itu dengan melaksanakan shalat Tahajud serta memanjatkan doa.

Minggu, 24 Mei 1998

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan politik, ekonomi, dan penegakan hukum yang saling memengaruhi dan berkaitan, maka transparansi antaranggota kabinet harus terjamin dan terus dipelihara. Pada sidang yang dilaksanakan secara rutin tiap minggu sekali, tanpa dibatasi oleh waktu, semua anggota kabinet harus hadir. Setelah mendengarkan laporan dari para menteri terkait mengenai subjek permasalahan, Presiden dapat proaktif segera mengambil kebijakan yang tegas dan pragmatis, mendahului permasalahan yang berkembang.

Besok pagi sebelum sidang kabinet dimulai, saya bermaksud melaksanakan rapat khusus dengan Menko Polkam, Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, dan Kapolri khusus mengenai pembebasan tahanan politik sebagai akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi dan pemantauan keadaan di lapangan.

Saya sangat menyadari bahwa Undang-Undang No. 11 PNPS Tahun 1963, tentang pemberantasan kegiatan subversi untuk menjaga stabilitas politik dari ancaman subversi baik dari dalam maupun dari luar negeri, sangat penting untuk memelihara momentum pembangunan berjalan lancar dan berkesinambungan. Namun, saya menyadari pula bahwa dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah mengalami distorsi selama 35 tahun dan berdampak negatif terhadap kehidupan berpolitik. Karena itu adalah wajar jikalau undang-undang tersebut harus ditinjau kembali.

Setelah mempelajari, mengecek, dan melaksanakan beberapa perubahan seperlunya pada materi pengarahan Presiden yang akan saya ucapkan dalam sidang pertama

Kabinet Reformasi Pembangunan, maka saya berkonsultasi dengan Harmoko, ketua Golkar, mengenai pentingnya diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar secepatnya. Akhirnya kami sepakat agar pada rapat pengurus harian yang akan diselenggarakan, dibicarakan, dan ditentukan jadwal munaslub. Jikalau mungkin, munaslub sudah dapat dilaksanakan dalam bulan Juli 1998.

Munaslub tersebut akan dapat membicarakan pelaksanaan reformasi di dalam tubuh Golkar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Saya menyadari, agar munaslub tersebut dapat berhasil, diperlukan informasi yang tepat tentang situasi dan aspirasi yang berkembang di kalangan kader-kader Golkar sendiri. Untuk ini saya meminta masukan dari beberapa kader Golkar, terutama dari Haryanto Dhanutirto, yang memang sudah lama bekerja sama dengan saya sebagai Deputi Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Untuk mengetahui perkembangan politik dan gerakan di lapangan, saya juga memanfaatkan sumber-sumber informasi "nonformal" dari beberapa tokoh, termasuk adik kandung saya J.E. Habibie (Fanny) bersama Hariman Siregar. Fanny mempunyai jaringan yang cukup luas, lintas golongan dan lintas partai. Sementara Hariman Siregar —yang sejak almarhumah ibu saya masih ada sudah kami anggap sebagai 'adik' dalam keluarga Habibie— adalah salah seorang tokoh gerakan mahasiswa sejak zaman Malari. Masukan dari Fanny dan Hariman penting saya perhatikan karena dapat saya manfaatkan untuk mengecek kembali objektivitas masukan dari lapangan yang saya peroleh melalui sumber-sumber resmi.

Seperti telah dikemukakan di depan, saya memutuskan untuk memberikan kebebasan pers sebagai wahana untuk menyalurkan kebebasan menyampaikan pendapat. Saya meyakini sepenuhnya bahwa kemerdekaan pers yang sehat

dan profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Oleh karena itu, saya juga memantau situasi dan perkembangan dunia pers —baik media elektronik maupun media cetak, termasuk persepsi dan aspirasi para tokohnya— berkenaan dengan proses reformasi. Untuk ini saya amat terbantu oleh dua orang insan pers, Andi Makmur Makka dan Parni Hadi, orang yang amat dekat dan yang telah lama bekerja sama membantu saya. Dari Parni dan Makka, saya banyak mendapat informasi dan masukan dalam rangka mendorong terciptanya pers yang bebas dan sehat.

Secara khusus saya juga memantau perkembangan yang terjadi di kalangan umat Islam. Saya beruntung karena semenjak berdirinya ICMI, sudah terbentuk *networking* yang bersifat lintas kelompok dalam tubuh umat Islam. Sejumlah tokoh yang memberi masukan, antara lain, K.H. Ali Yafie, Anwar Haryono, Achmad Tirtosudiro, Wardiman Djojonegoro, Marwah Daud Ibrahim, dan Trulyanti Sutrasno. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang ikut membidani kelahiran ICMI di tahun 1990, dan selama delapan tahun ikut membesarkannya. Informasi dari mereka amat membantu saya dalam memahami situasi dan aspirasi yang berkembang di kalangan umat Islam.

Situasi yang berkembang di kalangan umat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga saya perhatikan. Saya beruntung karena mempunyai banyak kawan yang menjadi tokoh dari komunitas umat agama tersebut. Di samping itu, saya juga memperoleh masukan dari para cendekiawan agama mereka, yang telah lama menjalin kerja sama dengan ICMI. Organisasi cendekiawan agama tersebut adalah Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Persatuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), dan Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI).

Dalam rangka mengamati perkembangan ekonomi, saya

memantau berbagai informasi dan indikator ekonomi serta dunia bisnis. Masukan informasi ekonomi —baik nasional maupun global— yang saya peroleh dari sumber resmi saya *cross-check* dan lengkapi dengan sumber-sumber tidak resmi, baik dari jaringan global yang saya miliki maupun dari beberapa tokoh yang dekat dengan saya. Salah satunya adalah dari Satrio B. Joedono (Billy), yang memang sudah lama bekerja sama dengan saya sebagai asisten saya sewaktu menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Sementara itu, untuk mengetahui informasi lapangan dari dunia bisnis, saya minta informasi pada Suyatim A. Habibie (Timmy), adik bungsu saya. Masukan dari Timmy ini saya perlukan untuk mengecek laporan yang saya peroleh dari saluran resmi, pemberitaan koran/TV maupun internet. Ini saya perlukan untuk menghindari salah interpretasi yang dapat mengakibatkan salah kebijakan dan merugikan stabilitas. Di samping dari Timmy, informasi lapangan dari dunia usaha juga saya peroleh dari Adrie Soebono, kemenakan saya yang pernah ikut saya sewaktu masih tinggal di Jerman. Dari Adrie juga saya memperoleh informasi masalah keamanan, karena ia memiliki jaringan cukup luas dengan aparat keamanan.

Kegiatan saya hari ini berakhir pukul 01.00 setelah mempelajari masukan melalui internet, TV, jaringan resmi maupun tidak resmi. Semuanya membingungkan tetapi tetap terkendali.

Senin, 25 Mei 1998

Menko Polkam, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan,

Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, bersama Kapolri saya terima tepat pukul 09.00 pagi di ruang kerja saya di Bina Graha. Setelah mendengar laporan singkat mengenai keadaan di lapangan, maka saya memberi pengarahan sebagai berikut:

- Untuk kebebasan berbicara, bebas berdemonstrasi, bebas mengeluarkan pendapat tanpa melakukan tindakan kriminal diberi dasar hukum;
- Tahanan politik segera dibebaskan selama tidak bertentangan dengan ketetapan MPR;
- Memerhatikan aspirasi rakyat yang menghendaki reformasi di segala bidang;
- Untuk narapidana politik, dilakukan langkah pemberian amnesti, rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;
- Undang-undang tentang pemberantasan kegiatan subversi yang sejak tahun 1963 sampai sekarang telah mengalami distorsi dalam pelaksanaannya, perlu segera ditinjau kembali dan kalau perlu dicabut. Harap segera dipelajari secara sistematis materi dan jadwal Sidang Istimewa MPR untuk saya konsultasikan dengan Pimpinan DPR/MPR hari Kamis tanggal 28 Mei l998;
- Pengarahan lainnya akan saya berikan pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan yang segera akan saya pimpin.

Demikian petunjuk saya, dan saya persilakan para menteri untuk memasuki ruang sidang kabinet di sebelah ruang kerja Presiden di Bina Graha.

Setelah memasuki ruang sidang kabinet, saya segera menyampaikan pengarahan saya yang isinya sebagai berikut:

> Dalam melaksanakan reformasi dan mengatasi krisis secara kreatif dan dinamis, saya meminta para Menteri untuk

selalu berpegang teguh pada Pancasila dan UUD '45, GBHN '98, dan Ketetapan MPR lain, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan aspirasi rakyat yang sedang berkembang.

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku harus tetap menjadi pegangan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan reformasi, mengingat Indonesia adalah negara hukum, dan penegakan hukum merupakan salah satu prioritas dalam Kabinet Reformasi Pembangunan.

Para Menteri dan Kepala Daerah agar segera memperbaiki citra dengan langkah-langkah nyata sesuai dengan aspirasi reformasi, khususnya yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam sidang kabinet tersebut saya juga menyampaikan kebijakan pokok, yang meliputi:

Pertama, untuk merespons aspirasi reformasi, akan dibentuk Kelompok Kerja Reformasi yang anggotanya dari masyarakat. Saya menugaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehakiman, untuk memfasilitasi Kelompok Kerja, sekaligus sebagai narasumber bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum.

Kedua, prioritas utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan dua sasaran pokok, yaitu: (a) Ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok; dan (b) Berputarnya kembali roda perekonomian nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada tiga hal yang saya gariskan, yaitu:

1. Penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau;
2. Stabilitas nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar dan pengendalian laju inflasi;
3. Mengembalikan kepercayaan dunia usaha, khususnya

investor luar negeri, antara lain dengan melaksanakan kesepakatan dengan IMF.

Ketiga, saya menekankan perlunya pelaksanaan reformasi konstitusional menyeluruh, yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya yang menyangkut reformasi politik, reformasi ekonomi dan reformasi hukum.

Di bidang politik, agar diperbaharui berbagai perangkat perundang-undangan untuk penyelenggaraan pemilu yang benar-benar demokratis. Perangkat perundangan yang perlu segera diperbaharui adalah: UU Pemilu, UU tentang Partai Politik, UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, serta UU Pemerintahan Daerah.

Di bidang ekonomi, agar dipercepat penyelesaian perangkat perundang-undangan yang: (a) menghilangkan praktik-praktik monopoli dan oligopoli, serta mendorong persaingan sehat; dan (b) mendorong kehidupan ekonomi yang memungkinkan peluang berusaha yang adil, dengan cara pemerataan kesempatan. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peran pada usaha kecil, menengah, dan koperasi. Agar segera dilanjutkan peninjauan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan semangat reformasi seraya menyiapkan peraturan perundangan yang diperlukan.

Di bidang hukum, agar segera dilakukan peninjauan kembali UU Anti-Subversi serta ratifikasi instrumen HAM PBB dan penyiapan perundang-undangan tentang HAM sebagaimana diamanatkan oleh GBHN'98.

Di samping itu, agar semua menteri: (a) merumuskan program reformasi dalam bidang tugas masing-masing; (b) berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari inefisiensi dan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; sehingga terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Mengembalikan dan meningkatkan citra Indonesia di

dunia internasional dengan melakukan pembenahan dinamika pembangunan dan stabilitas nasional, serta upaya-upaya diplomasi dalam rangka kerja sama regional dan internasional.

Dalam sidang kabinet tersebut saya menyampaikan sasaran kerja bidang, yaitu:

1. Bidang Politik dan Keamanan

   Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, perlu dilakukan:

   a. Menyusun agenda reformasi nasional, baik substansi maupun strukturnya dalam rangka melaksanakan reformasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum;
   b. Untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, perlu dibuat suatu konsensus tentang masa jabatan Presiden maksimum, dua kali masa jabatan saja.

   Reformasi bidang politik dan hukum, menyangkut upaya memperbaharui perundang-undangan yang memungkinkan peningkatan pemberdayaan peran serta partai politik dalam kehidupan politik, seperti pembentukan partai politik baru, penyelenggaraan pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, menimbulkan idealisme, rasa kebangsaan, dan bela negara yang tinggi.

   Pembaharuan bidang politik dan hukum yang tertuang dalam Paket Lima UU bidang politik serta beberapa UU lainnya bertujuan untuk membuka jalan bagi terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, guna memungkinkan terbentuknya DPR/MPR RI, memilih presiden baru dan wakilnya, serta menyusun GBHN yang akomodatif dan

aspiratif terhadap tuntutan reformasi.

Guna memperoleh hasil reformasi yang terintegrasi antara bidang politik, ekonomi, dan hukum, para menteri agar melakukan inventarisasi seluruh produk perundang-undangan di lingkungan masing-masing. Bagi produk perundang-undangan, yang tidak sejalan dengan aspirasi reformasi, supaya diambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

2. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, saya menetapkan dua sasaran utama, yaitu:

a. Mengatasi masalah-masalah mendesak yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi;
b. Melanjutkan dan mempercepat langkah-langkah reformasi ekonomi.

Masalah-masalah mendesak yang menjadi perhatian dan perlu segera ditangani adalah:

- Memulihkan kepercayaan kepada rupiah dan mengendalikan laju inflasi;
- Menggerakkan kembali roda produksi dan arus perdagangan, yang akhir-akhir ini mengalami berbagai hambatan;
- Mendorong bidang-bidang kegiatan ekonomi yang dapat bangkit kembali dalam waktu singkat, termasuk sektor pertanian dan agrobisnis, industri ekspor, industri yang memanfaatkan sumber daya alam, dan sektor pariwisata;
- Mengamankan pelaksanaan APBN;
- Memberikan perhatian khusus kepada golongan masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi dengan memprioritaskan program-program padat karya, penyediaan kebutuhan pokok (khususnya

bahan makanan dan obat-obatan) serta mendukung usaha kecil, koperasi, dan kegiatan ekonomi rakyat, serta mengembangkan dan meningkatkan peranan bank-bank perkreditan rakyat;

- Mempercepat penyelesaian bank-bank yang berada di bawah pengawasan BPPN dalam rangka pembenahan sektor perbankan;
- Mempercepat upaya mengatasi masalah utang luar negeri swasta;
- Meningkatkan upaya untuk memperkuat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat internasional, terutama negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga keuangan internasional;
- Melengkapi dan memperbaharui perangkat perundang-undangan yang diperlukan untuk menunjang proses reformasi ekonomi.

Dalam melanjutkan dan mempercepat reformasi ekonomi, agenda dan sasaran reformasi ekonomi yang telah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai jadwal atau dipercepat penyelesaiannya. Saya menekankan beberapa hal yang mendapat perhatian khusus, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan untuk:

a. Menghapus fasilitas dan perlakuan istimewa;
b. Meniadakan pungutan yang tidak berdasarkan peraturan, atau yang peraturannya tidak sah;
c. Mempertegas independensi Bank Indonesia di bidang kebijakan moneter, termasuk mengenai tingkat bunga dan pengelolaan devisa.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan

Saya menekankan agar para Menteri Bidang Kesra dan Taskin memberikan fokus pada pembangunan

sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, serta penanggulangan musibah dan bencana.

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia

- Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, hendaknya diusahakan agar seluruh rakyat dapat bekerja untuk pembangunan sesuai dengan kondisi dan kesempatan yang ada. Upaya menuntaskan Wajib Belajar sembilan tahun harus kita tingkatkan dengan mencari terobosan-terobosan untuk membantu keluarga miskin agar bisa menyekolahkan anak-anaknya;
- Memberi kesempatan kepada keluarga tertinggal untuk mengikuti latihan untuk ikut bekerja dengan kegiatan kewirausahaan;
- Memberi perhatian pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan, antara lain dengan beasiswa, dan kemudahan-kemudahan lainnya.

B. Pengentasan Kemiskinan

- Pengentasan kemiskinan dikembangkan menjadi gerakan pembangunan dengan mengikutsertakan seluruh kekuatan masyarakat secara terpadu, dengan merangsang pemberdayaan penduduk dan keluarga secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek, seperti bidang: mental spiritual keagamaan, kesehatan, pendidikan, kemauan untuk bekerja, latihan kewirausahaan melalui antara lain latihan menabung, dan kegiatan ekonomi lainnya;
- Upaya membangun usaha kecil, menengah, dan koperasi yang diikuti dengan langkah-langkah yang merangsang setiap keluarga untuk ikut terjun

langsung secara aktif dalam bidang usaha tersebut. Setiap usaha kecil, menengah, dan koperasi hendaknya mendidik para anggota atau konsumennya untuk ikut mengembangkan budaya belajar, budaya bekerja dan membangun, yang mendorong para konsumen mencintai produk dalam negeri karena mereka merasa ikut mengerjakan seluruh proses produksi itu;

- Usaha kecil, menengah, dan koperasi yang mendapat kredit murah hendaknya dapat mengikutsertakan keluarga dan penduduk miskin dalam kegiatannya, sehingga keterpaduan itu sekaligus mengentaskan kemiskinan.

C. Penanganan Musibah dan Bencana

Mempersiapkan dan mengoordinasikan kegiatan darurat karena musibah seperti kebakaran hutan, banjir, longsor, dan sebagainya.

4. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Kebijakan dan langkah-langkah dalam Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara ditujukan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara yang diiringi dengan upaya mengefektifkan pengawasan, sehingga dapat diwujudkan aparatur yang bersih yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Perlu dirumuskan kebijakan yang transparan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi penuh dalam pembangunan, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Untuk mencapai upaya tersebut, saya minta Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- Mengefisienkan tata kerja fungsi-fungsi pelaksana, litbang, dan pengawasan serta secara bertahap menyempurnakan penyusunan kompetensi jabatan dan pekerjaan di setiap instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan menghapus segala macam pungutan yang menghambat pembangunan;
- Mengoordinasikan penetapan akuntabilitas kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat maupun dunia usaha dan pembangunan, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kinerja aparatur negara dan mengefektifkan pengawasan;
- Melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan, organisasi, klasifikasi kompetensi jabatan dan pekerjaan serta perencanaan kebutuhan
- Mengoordinasikan instansi pemerintah pusat terkait untuk mendesain otonomi daerah, berikut dukungan peraturan, kewenangan dan aparatur serta kerangka waktu dan pelaksanaannya dalam waktu yang secepat-cepatnya;
- Secara bertahap mendorong modernisasi sarana aparatur negara, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, termasuk menjawab tantangan globalisasi, antara lain, dengan pemanfaatan dukungan telematika;
- Mengefektifkan koordinasi dan mekanisme pengawasan pemerintahan dan pembangunan, baik melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat, dan secara konsisten melaksanakan tindak lanjut hasil temuan

pengawasan yang diperoleh melalui BPKP, Inspektorat Jenderal dan masukan oleh masyarakat untuk diproses melalui prosedur hukum yang berlaku

- Mengambil langkah-langkah nyata dan mengoordinasikan upaya untuk membebaskan aparatur negara dari praktik-praktik inefisiensi dan pengaruh-pengaruh nepotisme, korupsi, dan kolusi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan aspirasi masyarakat;
- Mengoordinasikan aparat pemerintah agar dapat melakukan tindakan-tindakan nyata yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas dalam menerapkan prinsip hidup sederhana, sekaligus untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat akan kesungguhan pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta sikap tanggap segenap aparat pemerintah terhadap beban hidup dan penderitaan seluruh rakyat.

Saya menetapkan Tata Kerja Kabinet sebagai berikut:

1. Masing-masing Menko mengoordinasikan:
   a. Penyusunan kebijakan dan strategi sektoral dan pelaksanaannya di bidang masing-masing;
   b. Penanganan terhadap masalah-masalah yang timbul maupun masalah-masalah rutin yang dihadapi departemen dan instansi secara fungsional;
2. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan, saya akan memimpin langsung sidang-sidang kabinet, yaitu:
   a. Bidang Ekonomi pada minggu pertama;
   b. Bidang Kesra dan Taskin pada minggu kedua;

c. Bidang Polkam pada minggu keempat.

Sedangkan pada minggu ketiga, saya akan memimpin sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Demikian, pengarahan yang saya sampaikan pada sidang paripurna Kabinet Reformasi Pembangunan.

Sementara demonstrasi berjalan terus dan persiapan pengamanan kunjungan Presiden ke gedung DPR/MPR dilakukan, isu dan pertanyaan yang stereotip terus berkembang sebagai berikut:

"Apa dasar hukum Habibie menjadi presiden? Apa yang akan dibicarakan Habibie dengan Pimpinan DPR/MPR? Kapan Sidang Istimewa (SI) MPR dilaksanakan? Apakah SI-MPR yang akan dilaksanakan itu hanya untuk memberi legitimasi kepada Habibie sebagai Presiden dan memilih seorang wakil presiden? Apa konsep dan rencana Habibie?" ... dan sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya eskalasi permasalahan yang jelas akan merugikan NKRI dan reformasi, saya tetap harus menghindari polemik dengan siapa pun.

Banyak gerakan masyarakat, tanpa disadari, telah ditunggangi oleh aliran politik dalam dan luar negeri, dengan program dan rencana masing-masing yang bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa apa saja yang saya laksanakan dan rencanakan, harus tetap berdasarkan UUD '45, ketetapan MPR, dan undang-undang DPR yang berlaku dan untuk memberi dasar hukum kepada reformasi maka SI MPR sudah harus dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Polemik dan diskusi yang tidak menguntungkan proses

reformasi total, pengembalian stabilitas politik dan ekonomi harus dicegah.

SI MPR yang akan datang harus memberikan perhatian penuh kepada penyusunan ketetapan MPR sebagai dasar hukum reformasi dan tidak kepada pemilihan seorang wakil presiden. Saya berpendapat bahwa dengan adanya seorang wakil presiden, tugas untuk mentransformasikan sistem otoriter yang sudah berlangsung selama 53 tahun ke suatu sistem demokrasi secara damai akan membatasi kebebasan Presiden untuk mengambil langkah kebijakan yang tepat dan cepat. Di lain pihak semua tanggung jawab dibebankan kepada Presiden seorang diri. Oleh karena itu, transformasi tersebut harus dilaksanakan cepat, tepat, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Ketetapan MPR nanti, harus memungkinkan pemilihan wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD secara langsung. Jumlah peserta partai politik dalam pemilihan umum, harus diatur oleh ketetapan MPR dan undang-undang.

Legitimasi MPR dan DPR dapat ditingkatkan. Pemilihan langsung seorang presiden dan wakil presiden, para gubernur dan para bupati dapat dipertimbangkan pelaksanaannya setelah periode presiden yang akan datang selesai. Semua pertimbangan tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya pelaksanaan SI MPR yang akan datang bagi masa depan bangsa Indonesia.

Tokoh-tokoh nasional dan daerah kelak harus diberikan kesempatan, untuk berprestasi dan lebih dikenal oleh rakyat, sehingga pemilihan seorang presiden dan wakil presiden secara langsung dapat dilaksanakan, demikian pula pemilihan langsung para gubernur dan para bupati.

Jikalau bersamaan dengan pemilihan langsung para wakil rakyat di MPR, DPR, dan DPRD tahun depan, pemilihan langsung presiden, wakil presiden, para gubernur,

dan para bupati pula dilaksanakan, maka para tokoh generasi peralihan dan generasi penerus yang potensial belum cukup mendapatkan kesempatan berprestasi dan memperkenalkan kemampuannya kepada masyarakat.

Dengan demikian, pembaruan kepemimpinan baik nasional maupun daerah tidak akan dapat berlangsung sesuai harapan.

Kemungkinan besar, tokoh-tokoh muda tersebut akan terdesak oleh tokoh-tokoh yang sudah lama berada di dalam sistem, sehingga pembaruan tidak sempurna.

Presiden dan wakil presiden keempat yang akan datang sementara belum dapat dipilih secara langsung dan masih harus dipilih oleh SU MPR yang telah memiliki legitimasi lebih tinggi. Baru presiden dan wakil presiden kelima, keenam, dan seterusnya dapat dipilih langsung.

Demikian pula pemilihan para gubernur dan para bupati, sementara harus melalui mekanisme yang ada dengan legitimasi SU MPR yang lebih tinggi pula.

Di tengah suasana pengamanan yang ketat, tepat hari Kamis, tanggal 28 Mei, seminggu setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, dengan didampingi empat Menko, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab, dan Menteri Sekretaris Negara, saya bertemu dengan pimpinan MPR dan DPR di gedung DPR/MPR, Senayan.

Pertemuan konsultasi yang berlangsung selama 90 menit yang bersifat tertutup, bersama pimpinan DPR, MPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR dapat berlangsung lancar, rasional, dan tenang. Pertemuan menghasilkan kesepakatan yang dibacakan Ketua DPR/MPR, Harmoko, didampingi Presiden di hadapan puluhan wartawan sebagai berikut:

> Dalam rangka menindaklanjuti semangat reformasi, maka pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan

pimpinan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi DPR, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Keinginan pemerintah mengenai agenda percepatan pemilu memiliki semangat yang sama dengan dewan, dan dewan telah membentuk Tim Prolegnas (Program Legitimasi Nasional) dalam menghadapi percepatan pemilu khususnya penyempurnaan, perubahan, dan pembuatan perangkat perundang-undangan: UU tentang Pemilu, UU tentang Kepartaian, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
- Pihak pemerintah juga menyiapkan tim undang-undang tersebut, termasuk reformasi dalam bidang ekonomi dan hukum. Sehingga antara tim dari pemerintah dan tim dari dewan dapat saling mengisi kemudian untuk dibahas dan diwujudkan dalam undang-undang produk dewan yang mengambil waktu diperkirakan 6 (enam) bulan;
- Untuk menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, diperlukan Sidang Istimewa MPR dengan agenda mencabut, mengubah, dan membuat ketetapan-ketetapan MPR yang berkaitan bagi penyelenggaraan pemilu. Sidang Istimewa MPR tersebut diperkirakan akhir tahun 1998 atau permulaan tahun 1999;
- Setelah MPR menetapkan waktu diselenggarakannya pemilu, diperlukan waktu untuk menyosialisasikan persiapan pemilu termasuk peserta, sistem dan pelaksanaannya sesuai perangkat perundang-undangan yang baru, diharapkan selesai tahun 1999
- Dengan demikian, jadwal program percepatan pemilu sesuai dengan penataan perangkat perundang-undangan dan sesuai dengan konstitusi.

Demikianlah, hasil konsultasi Presiden dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Harian *Bisnis Indonesia* tertanggal 4 Juni 1998, memuat hasil kajian *Econit Advisory Group* yang disampaikan oleh

Dr. Rizal Ramly dan kawan-kawan. Hasil kajian menyatakan bahwa mereka yang duduk sebagai tim ekonomi Kabinet Reformasi Pembangunan adalah tidak lain dari tim ekonomi era Soeharto.

Tim ekonomi ini sudah terbiasa dengan kebijakan dan sistem ekonomi konvensional, sehingga dari mereka tidak dapat diharapkan suatu kebijakan dan arah kebijakan yang inovatif. Karena itu, Econit mengkhawatirkan ekonomi Indonesia semakin merosot karena keterbatasan kemampuan keuangan serta tiada dukungan modal dari luar negeri.

Karena itu, menurut hasil kajian tersebut, pemerintahan Habibie maksimum hanya dapat bertahan tiga bulan. Econit khawatir, semakin lama pemerintah mencoba bertahan, kondisi ekonomi dan rakyat Indonesia semakin merosot. Karena, pemerintah Habibie adalah *part of the problem* dan bukan *part of the solution.*

Membaca pendapat tersebut, saya tidak khawatir, malah mendorong saya untuk bekerja lebih keras, dan membuktikan bahwa hasil analisis Econit menarik, tetapi tidak tepat.

Bukankah penyebab utama dari kekacauan di Indonesia, adalah bahwa keadaan makin hari menjadi makin tidak menentu?

Bukankah keadaan yang tidak menentu tersebut terjadi karena semua kekuasaan dikendalikan oleh presiden yang otoriter?

Bukankah sebab utama Presiden Soeharto mengundurkan diri, adalah karena keadaan semakin tidak menentu?

Oleh karena itu, "kunci penyelesaian" krisis multikompleks dan multidimensi di Indonesia adalah dalam waktu sesingkat-singkatnya mengubah keadaan dari tidak menentu menjadi menentu.

Alasan tersebut di atas menjadi sebab kebijakan yang telah saya ambil dan laksanakan untuk:

- Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dalam waktu 24 jam setelah Presiden mengundurkan diri;
- Menjadikan Gubernur Bank Indonesia mandiri dan tidak dipengaruhi oleh presiden;
- Tetap memperbolehkan mata uang rupiah bebas gerak sesuai ekonomi pasar;
- Melepaskan semua tahanan politik yang tidak melanggar UUD dan Ketetapan MPR;
- Memberi kebebasan pers, berbicara, dan berdemonstrasi;
- Berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi mengenai jadwal pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dan pemilu.

Semua kebijakan tersebut insya Allah dapat mengakibatkan bergulirnya proses perubahan dari keadaan yang tidak menentu menjadi keadaan menentu.

Proses ini saya namakan *relaxation process* yang insya Allah berdampak positif terhadap proses perubahan keadaan dari *unpredictable* atau tidak menentu menjadi *predictable* atau menentu.

Dengan bergulirnya *relaxation process*, diharapkan masalah-masalah multidimensi dan multikompleks dapat dengan cepat dan tepat waktu teratasi.

Suatu tim, yang terdiri atas profesional yang pragmatis dan berpengalaman, sangat dibutuhkan. Pengalaman, tidak dapat dipelajari dari buku, namun harus dilalui. Saya harus lebih cepat mengambil keputusan dibandingkan dengan kecepatan masalah yang berkembang, dan tidak dibenarkan mengambil risiko.

Masalah yang dihadapi harus sudah diselesaikan, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih kompleks. Saya tetap harus menahan diri dan tidak terpancing oleh polemik.

Kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab,

saya sampaikan untuk segera mempersiapkan pertemuan dengan mantan Presiden Soeharto. Beberapa hari kemudian, Jenderal Wiranto melaporkan bahwa Presiden Soeharto berkenan menerima telepon sehari setelah hari ulang tahunnya yang ke-77, hari Selasa tanggal 9 Juni 1998.

Pada hari Selasa, saya menelepon Pak Harto dan menyampaikan Selamat Hari Ulang Tahun ke-77. Saya meminta agar dapat diterima oleh Pak Harto untuk memperoleh masukan dan saran yang harus saya perhatikan. Pak Harto menyampaikan, bahwa tidak menguntungkan untuk penyelesaian permasalahan jikalau saya bertemu dengannya.

> "Pak Harto, saya mohon Bapak berkenan menerima saya. Saya mohon penjelasan dan saran Bapak mengenai semua yang telah terjadi," demikian ucapan saya.
>
> "Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua," demikian jawaban Pak Harto.
>
> "Pak Harto, untuk dapat melanjutkan tugas dengan baik dan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai keadaan sebelum Bapak mengundurkan diri sebagai Presiden, penting sekali pertemuan dengan Bapak," demikian ucapan saya.
>
> "Laksanakan tugasmu dengan baik, saya doakan agar Habibie selalu dilindungi Allah SWT dalam melaksanakan tugas. Kita nanti bertemu secara batin saja," lanjut Pak Harto.

Saya sangat menyadari bahwa saya harus lebih berhati-hati dan lebih teliti menganalisis semua masukan dalam

menghadapi tiap permasalahan, karena saya tidak memiliki masukan rinci sedikit pun dari mantan presiden yang telah melaksanakan tugas selama 32 tahun. Alasan pengunduran diri yang telah diberikan 19 hari yang lalu adalah alasan politis, dan tidak mencukupi untuk menilai alasan teknis sebenarnya.

Untuk dapat melaksanakan reformasi secara murni dan konstitusional, maka perhatian penuh harus diberikan pada kepentingan nasional. Ada tiga masalah atau isu nasional yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, serta dapat menghambat pelaksanaan reformasi. Masalah tersebut adalah:

1. Status Timor Timur (Timtim) sebagai provinsi masih dipermasalahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB);
2. Perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melepaskan Daerah Istimewa Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mendapat dukungan PBB, karena melanggar konstitusi dan kedaulatan wilayah NKRI, kecuali daerah Timor Timur, yang diakui oleh PBB;
3. Perjuangan kelompok separatis Irian Jaya untuk melepaskan Provinsi Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mendapat dukungan PBB karena melanggar konstitusi.

Oleh karena itu, saya berpendapat dan berkeyakinan untuk:

- Sebelum presiden dan wakil presiden dipilih oleh para anggota Sidang Umum MPR hasil pemilu yang akan datang, masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan. Penyelesaian Timor Timur harus tuntas dan dapat diterima oleh masyarakat Timor Timur, Indonesia, dan

internasional. Dengan demikian, siapa pun menjadi presiden dan wakil presiden nanti, dapat memberi perhatian penuh kepada reformasi, penyelesaian masalah politik, dan masalah ekonomi nasional;

- Masalah Aceh dan masalah Irian Jaya dapat diselesaikan melalui proses demokrasi, proses pemberian otonomi daerah dalam rangka reformasi yang tetap sesuai UUD, ketetapan MPR, UU (DPR), dan peraturan daerah (DPRD) yang terus berkembang;
- Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan perjuangan dari generasi ke generasi mencakup seluruh wilayah jajahan Belanda yang dinamakan Hindia Belanda atau *Nederlands Indië* sejak awal diakui oleh dunia internasional, demikian pula oleh PBB. Kenyataan ini harus pandai-pandai kita manfaatkan dalam menyelesaikan masalah Aceh dan Irian Jaya. Oleh karena itu, segala kebijakan Presiden dalam "transformasi dan reformasi" harus menghindari tejadinya suatu kekacauan dan destabilisasi politik dan ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadinya perang saudara yang berakhir pada "Balkanisasi" NKRI.

Sejarah perjuangan bangsa telah membuktikan bahwa implementasi tiap perubahan membutuhkan waktu dan pengorbanan, dan tidak dapat segera diselesaikan. Untuk merealisasi kemerdekaan NKRI yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dibutuhkan kurang lebih 15 tahun sampai NKRI dari Sabang sampai Merauke mendapat pengakuan dunia dan PBB.

Bukankah dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei, hari Kamis yang lalu, pintu kebebasan bangsa dan masyarakat Indonesia telah dibuka, sehingga manusia di bumi Indonesia dapat menikmati kemerdekaan dan

kebebasan yang harus berbudaya dan bertanggung jawab?

Dengan demikian, persyaratan dasar bagi suatu masyarakat modern sudah dapat diproses dan harus disadari bahwa implementasi kehidupan "merdeka dan bebas" yang "berbudaya dan bertanggung jawab" membutuhkan waktu lama, bertahap, dan berkesinambungan dengan perubahan-perubahan yang tidak ada hentinya.

Saya memutuskan untuk bertemu dan bersilaturahim secara terbuka, dengan tokoh-tokoh yang mewakili kepentingan masyarakat di daerah yang bermasalah, untuk bersama memikirkan penyelesaian yang paling menguntungkan bangsa Indonesia.

Melalui Menteri Agama Malik Fajar, saya mengundang Uskup Dili, Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Uskup Baucau, Basilio do Nascimento, untuk bertemu di Bina Graha, Kantor Presiden.

Hari Rabu tanggal 24 Juni, saya menerima Uskup Dili, Carlos Filipe Ximenes Belo, di Bina Graha. Saya didampingi oleh Menlu Ali Alatas, Menhankam Jenderal Wiranto, Mendagri Syarwan Hamid, dan Mensesneg Akbar Tandjung. Uskup Belo menyampaikan bahwa Uskup Nascimento berhalangan hadir.

Pada pertemuan silaturahim tersebut, Uskup Belo menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya ia diterima oleh Presiden Republik Indonesia. Selama ini, Uskup Belo hanya dapat bertemu sekitar 10 menit dengan Presiden Soeharto, dalam rangka kunjungan Presiden ke Timtim untuk meninjau pelaksanaan pembangunan. Pada kesempatan itu, Uskup Belo diajak oleh Presiden Soeharto naik helikopter meninjau pembangunan pada umumnya, dan "Patung Kristus Raja" khususnya dari udara. Pada pertemuan tersebut, keduanya tidak banyak berbicara.

Saya baru pertama kalinya bertemu dengan Uskup Belo

dan terkesan atas sikapnya yang ramah, baik, berbudaya, dan sopan. Saya menyampaikan maksud tujuan saya untuk memulai dialog, suatu hal yang kita butuhkan bersama agar terdapat saling pengertian yang sangat penting dalam penyelesaian masalah Timtim. Saya berusaha menjelaskan bahwa milenium dan abad yang akan datang adalah "abad globalisasi" dan "abad informasi". Dalam abad milenium tersebut, semua bangsa dan masyarakat di dunia akan berkelompok seperti Eropa, Amerika Utara, ASEAN, dan sebagainya. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas ratusan masyarakat etnik dengan budaya dan bahasa tersendiri.

Oleh karena itu, *Bhinneka Tunggal Ika* atau "satu dalam kebinekaan" adalah semboyan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dalam bentuk NKRI seperti sekarang ini, bangsa Indonesia dapat memiliki produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi, berperan dalam menentukan nasibnya sendiri. Negara bagian California di Amerika Serikat adalah suatu bukti bahwa justru kebinekaan itu dapat menghasilkan produktivitas dan kualitas hidup yang tinggi.

Dengan kata pengantar demikian, saya berusaha menyampaikan wawasan bagi Timtim bersama saudara-saudara yang hidup di bumi NKRI.

Saya kemudian melanjutkan dengan pertanyaan, "Apa yang dapat saya laksanakan untuk memenuhi keinginan rakyat Timtim?"

Saya yakin, Uskup Belo dalam segala tindakan dan pemikiran berunsur pada ajaran agama. Dan agama itu adalah akar dari nilai moral dan nilai etik yang tinggi. Oleh karena itu, saya percaya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Uskup Belo, mencerminkan keinginan rakyat Timor Timur.

Menjawab pertanyaan saya, Uskup Belo mengeluarkan

dua helai kertas yang berisi catatan mengenai Timor Timur. Secara sistematis ia membaca catatan tersebut, dan satu demi satu saya langsung menjawab, “Akan dilaksanakan atau akan dipelajari untuk dilaksanakan.”

Hampir semua (90 persen) keinginan Uskup Belo dapat segera dipenuhi karena merupakan standar norma yang pelaksanaannya wajar dibantu.

Misalnya, keinginan Uskup untuk mendapat jaminan hak kebebasan penduduk asli untuk bepergian ke mana saja dan menetap di mana saja, tanpa membatasi ruang gerak mereka, atau memaksa menetap di permukiman yang dibangun di sepanjang jalan-jalan umum demi mempermudah pengontrolan oleh pihak aparat keamanan.

Keinginan ini segera saya penuhi dengan ucapan, “Mengapa rakyat tidak dapat bergerak di rumahnya sendiri?”

Alasan keamanan tidak cukup untuk melarang. Bahkan rakyat Indonesia dapat bebas bergerak di seluruh wilyah NKRI, atas tanggung jawab sendiri.

Dialog berlangsung sekitar satu setengah jam dalam suasana akrab dan ramah, diakhiri dengan permintaan saya sebagai berikut, “Saya mendapat laporan dari banyak pihak mengenai Timor Timur, misalnya dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hankam/Pangab, Gubernur Timor Timur, Badan Intelijen, tokoh Timor Timur, dan sebagainya. Alangkah baiknya jikalau saya dapat masukan dan tanggapan Uskup mengenai Anggaran Pembangunan Nasional 1999/2000 dalam bulan November yang akan datang, sebelum Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pembangunan Nasional 1999/2000 dalam bulan Januari 1999 dibicarakan di DPR untuk menjadi undang-undang sebelum tanggal 31 Maret 1999, karena tahun fiskal dimulai tanggal 1 April.”

Semua laporan menarik dan merupakan elemen-elemen yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena itu, saya mengharapkan kerja sama yang baik dengan Uskup Belo, untuk mendapatkan lebih banyak informasi, mengadakan pengecekan guna mencegah terjadinya kebijakan yang dapat merugikan rakyat Timor Timur.

Kesan saya mengenai pertemuan dengan Uskup Belo positif, dan dapat dilanjutkan untuk menghasilkan penyelesaian masalah Timor Timur oleh Sidang Umum MPR hasil pemilu yang akan datang secara damai, sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung.

Dari pertemuan dengan Uskup Belo, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah Timor Timur harus segera diselesaikan dan tidak boleh membebani proses reformasi.

Pimpinan nasional harus memberi perhatian penuh pada kepentingan reformasi secara nasional, yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Kekuatan luar negeri tidak boleh diberi kesempatan untuk memanfaatkan masalah Timor Timur sebagai alasan untuk turut campur dalam proses reformasi.

Untuk memerdekakan seluruh bangsa Indonesia, 15 tahun perjuangan fisik dan politik harus dilalui. Proses ini kita namakan "Revolusi Bangsa".

Setelah seluruh NKRI merdeka, maka perhatian penuh diberikan kepada pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, pengembangan jaringan informasi, dan pengembangan prasarana ekonomi mendapat perhatian utama. Dengan demikian, tahap demi tahap, ketahanan nasional dapat ditingkatkan.

Melalui suatu sistem pendidikan dan peningkatan kesehatan yang andal dan berkesinambungan, Presiden

Soekarno dan Presiden Soeharto dengan kepimpinan otoriter, dalam 53 tahun telah berhasil meningkatkan kesadaran nasional dan kualitas hidup manusia Indonesia yang terus berkembang.

Pada awal proses kemerdekaan bangsa, hanya 15 persen masyarakat Indonesia yang sudah dapat membaca dan berkomunikasi. Sekarang, pada awal proses reformasi, 85 persen masyarakat Indonesia sudah dapat membaca dan berkomunikasi. Prasarana pendidikan, kesehatan, iptek, ekonomi, serta informasi nasional dan internasional telah berkembang dengan pesat.

Suatu bangsa dapat mengandalkan pembangunannya pada sumber daya manusia yang terbarukan, hanya jikalau manusia dari bangsa tersebut diberi kebebasan dan kemerdekaan yang berbudaya dan bertanggung jawab. Merdeka dan bebas bergerak, berpikir, berwawasan, berkarya, dan bertindak, berlandaskan pada budaya dan agama. Kemerdekaan dan kebebasan, yang diimbangi dengan tanggung jawab dan berpegangan pada nilai-nilai moral dan etika, adalah dasar bagi suatu masyarakat modern.

Produktivitas hanya mungkin dapat ditingkatkan jikalau manusia dapat memanfaatkan, mengembangkan, serta mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi, bebas dari segala dogma.

Dengan lengsernya Presiden Soeharto, berakhirlah era kepemimpinan otoriter, maka proses pemberian kebebasan di atas kemerdekaan harus dimanfaatkan, diterapkan, dan dikembangkan sebaik-baiknya, sebagai dasar kehidupan "Indonesia modern".

Rakyat selalu memerhatikan perilaku pimpinannya sebagai panutan, seperti halnya budaya negara berkembang lainnya berlaku pula di Indonesia. Lurah, wali kota, tokoh

daerah, tokoh nasional, sampai presiden, harus memberi contoh dalam kehidupan bermasyarakat dan berperilaku yang patut menjadi panutan.

Hal itu berarti bahwa dalam reformasi atau pembaruan yang sedang berjalan itu, bukan saja presiden, wakil presiden, ketua MPR, para anggota kabinet, pimpinan partai politik, tetapi semua elite politik dan elite intelektual di manapun mereka sedang berada harus menjadi contoh dan panutan bagi lingkungannya.

Perilaku mereka harus seperti "mata air" yang mengalirkan air bersih dan segar, sehingga semua kehidupan di sekitarnya dapat mekar dan tumbuh. Perilaku pimpinan tidak boleh seperti "mata air" yang mengalirkan air kotor dan beracun, sehingga kehidupan di sekitarnya sulit berkembang, bahkan akan mati.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar) yang sudah berpengalaman selama lebih dari 30 tahun harus menjadi panutan dalam proses reformasi.

Itulah sebabnya, saya mengambil inisiatif untuk mempercepat Musyawarah Nasional Golkar dan melaksanakannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada musyawarah nasional tersebut, saya harapkan para elite intelektual dan elite politik Golkar mengambil prakarsa untuk mengadakan reformasi di dalam struktur dan sistem Golkar, untuk menjadi suatu partai politik yang berperan utama di dalam proses reformasi, tanpa meninggalkan wawasan dan cita-cita pendiri NKRI dan pendiri Golkar.

Peran saya di dalam Golkar, harus saya akhiri dengan mengundurkan diri dari segala jabatan. Namun, sebagai kader Golkar yang baik, saya tetap harus bersikap *tut wuri handayani*, siap untuk memberi nasihat tiap saat jika dibutuhkan.

Dengan demikian, saya dapat lebih memberikan perhatian penuh pada masalah nasional yang multikompleks dan multidimensi, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan NKRI. Penilaian saya pun akan menjadi lebih objektif. Kepentingan bangsa lebih murni dapat diutamakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai, golongan, ataupun perorangan.

Munas Golkar juga untuk menjaga agar jangan sampai peran Golkar dapat dipengaruhi oleh kepentingan luar partai, yang dapat menjadi kontraproduktif terhadap jalannya reformasi. Golkar jangan memberi kesempatan kepada kekuatan-kekuatan luar dan dalam negeri untuk bekerja sama dan bersinergi merongrong dan merugikan stabilitas NKRI.

Dengan segala usaha dan kekuatan politik yang ada, harus dicegah perang saudara yang dapat menghancurkan hasil pembangunan yang dengan susah payah telah dicapai. Pertumpahan darah, perpecahan yang dapat mengakibatkan "Balkanisasi" di bumi Indonesia, harus dihindari. Untuk itu, Golkar harus proaktif berperan di ujung tombak proses reformasi.

Adalah wajar jikalau ada kekuatan atau aliran kubu politik di dalam Golkar, yang selama 30 tahun telah mengembangkan dan menerapkan suatu sistem yang berfungsi untuk berusaha mempertahankan *status quo*. Berarti, secara langsung atau tidak langsung, kerja sama dengan kekuatan di luar Golkar untuk menghalangi perubahan yang merugikan reformasi dapat terjadi.

Akibatnya, gerakan dan demo massa untuk reformasi dan kebebasan menjadi tidak menentu serta dapat berkembang menjadi anarki. Suatu revolusi dengan segala dampaknya dimungkinkan dan tidak dapat dihindari lagi. Dalam suatu revolusi yang selalu menjadi korban adalah

rakyat kecil. Elite politik dan elite intelektual harus berperan proaktif dalam proses reformasi. Partai politik PDI, PPP, dan Golkar harus membuktikan untuk dapat menjadi panutan bagi puluhan partai politik yang akan lahir. Oleh karena itu, segala polemik menjelang terlaksananya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar, harus dihindari.

Sebagai Koordinator Keluarga Besar Golkar, saya mengundang para anggota DPP Golkar dan para anggota pembina tiga jalur Keluarga Besar Golkar untuk dapat menghadiri rapat tertutup di kantor sekretariat Dewan Pembina Golkar, Jalan Tengku Umar 29, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni, pukul 20.30.

Pada rapat tersebut, Ketua DPP Golkar Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan Bendahara Golkar Bambang Trihatmodjo tidak hadir.

Ketiga jalur Keluarga Besar Golkar hadir. Mereka adalah Ketua Umum DPP Golkar, H. Harmoko (Jalur G); Menteri Dalam Negeri, Syarwan Hamid (Jalur B); dan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto (Jalur A); yang didampingi Kepala Sosial Politik ABRI, Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudoyono.

Dari 45 orang anggota Dewan Pembina, hanya 33 yang hadir antara lain Ketua Penyelenggara Munaslub, Ketua Golkar, Waskito Reksosoedirdjo; Wakil Ketua, HR Agung Laksono; Sekjen, Ary Mardjono selaku Ketua Panitia Pengarah; Aulia Rahman selaku Ketua Pelaksana; Wakil Sekjen Theo Sambuaga; dan Wakil Bendahara Pontjo Sutowo.

Pada kesempatan ini, saya memberi enam butir pegangan menjelang terlaksananya munaslub yang sebelumnya sudah ditentukan pada rapat harian DPP Golkar tanggal 4 Juni 1998.

Pegangan tersebut adalah:

1. Keluarga Besar Golkar senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan tetap memerhatikan aspirasi dan dinamika masyarakat di dalam era reformasi, antara lain menghilangkan pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Dalam menghadapi segala tantangan di masa depan, kader Golkar harus memperkuat percaya diri melalui iklim politik yang menimbulkan sikap optimisme;
3. Mengamankan, memelihara, dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang dikembangkan dan dimiliki selama 34 tahun. Sejak berdiri, Golkar telah memiliki sarana dan prasarana, serta aset baik itu berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini harus betul-betul diamankan, dipelihara, bahkan disempurnakan dalam rangka menghadapi tantangan dan mengantisipasi perkembangan di masa depan;
4. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru, yang mencerminkan aspirasi rakyat dan bernafaskan semangat reformasi. Munaslub dapat mempertimbangkan untuk menghapuskan lembaga Dewan Pembina;
5. Menyusun program Golkar untuk lima tahun ke depan dengan memerhatikan aspirasi anggota yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat;
6. Membentuk susunan pengurus baru masa bakti lima tahun yang mampu melaksanakan butir-butir di atas.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum Golkar memberi laporan mengenai persiapan Munaslub yang direncanakan dilaksanakan di Hotel Indonesia pada tanggal 9, 10, dan 11 Juli.

Tim yang menyiapkan Munaslub terdiri atas Abdul Gafur, Agung Laksono, Waskito, Ary Mardjono, Moestahid Astari, Bambang Trihatmodjo, dan Aulia Rahman. Untuk meningkatkan kredibilitas dan objektivitas Kabinet Reformasi Pembangunan, beberapa tindakan harus diambil:

1. Seluruh pegawai negeri yang saat ini merangkap jabatan struktural di Golkar, baik di DPP, DPD Tingkat I, dan DPD Tingkat II, segera ditarik. Kebijakan ini sejalan dengan usaha untuk melepaskan birokrasi dari salah satu kekuatan politik;
2. Di Golkar nanti tidak ada lagi Keluarga Besar Golkar yang terdiri atas jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi), dan jalur G (Golkar);
3. Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tidak boleh memihak Golkar atau partai politik lain, dan harus memerhatikan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
4. Semua partai politik, termasuk partai Golkar, harus menjadi lebih mandiri dan kredibel.

Pada pembukaan Munaslub Golkar, saya menyampaikan agar:

- Golkar menyesuaikan diri dengan suasana reformasi sekarang, serta mampu secara dinamis menangkap dan melaksanakan aspirasi masyarakat;
- Golkar perlu mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya;
- Lembaga-lembaga yang ada, seperti Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasihat, perlu ditinjau status, dan kewenangannya;
- Pimpinan Golkar hendaknya tumbuh berjenjang dari bawah ke atas, dan tidak sebaliknya, ditentukan dari atas
- Semangat Golkar seperti saat dibentuk, harus tetap

berada dalam kekuatan demokratis, dengan daya saing yang tinggi untuk mempertahankan dukungan pemilihnya di masa lalu dan pemilih baru;

- Golkar juga dapat mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam jajarannya sendiri, karena dalam pemilu yang akan datang, bukan saja menghadapi persaingan dari partai-partai yang sudah ada tetapi juga dari partai-partai baru yang masih terus bertambah jumlahnya. Adalah wajar bahwa setiap partai akan berjuang keras memperoleh dukungan dari segmen pemilih tertentu, termasuk dari pemilih yang selama ini memberikan suaranya kepada Golkar. Karena itu perlu dilaksanakan kajian ulang terhadap peranan Golkar sejak berdirinya di tahun 1964;
- Golkar harus mengembangkan wawasan dan kebijakan baru tentang peranannya di masa depan, dalam dunia baru yang bagian awalnya sedang kita masuki. Apabila kita tidak dapat mengikuti gerak dinamika zaman, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang terbelakang dan ditinggalkan oleh kemajuan zaman;

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar membacakan laporan Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto, yang intinya adalah sebagai berikut:

> *"Golkar secara tepat dan sistematis, harus memelopori langkah reformasi yang dimulai dari tubuh organisasinya sendiri hingga ke sistem pemerintahan negara menuju terwujudnya tatanan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang sehat.*
>
> *Berkenaan dengan pencalonan Presiden oleh DPP Golkar, saya selaku Ketua Dewan Pembina berkali-kali meminta agar diteliti secara mendalam aspirasi yang*

berkembang di masyarakat. Pada waktu itu saya ingin mendapat jawaban, apakah benar rakyat masih menghendaki saya untuk menjadi Presiden periode lima tahun mendatang. Ternyata, sampai Sidang Umum MPR berlangsung, dikatakan bahwa rakyat Indonesia masih menginginkan saya untuk memimpin Negara ini.

Berkaitan dengan pencalonan Wakil Presiden, saya juga telah menyampaikan agar proses tersebut ditempuh berdasarkan konstitusi dan mekanisme yang berlaku di MPR."

Musyawarah Luar Biasa Golkar, dapat diakhiri dengan tertib, tenteram, dinamis, dalam semangat reformasi yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Akbar Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar masa bakti 1998-2003 melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia, mengalahkan saingannya Edie Sudradjat dan Sri Sultan Hamengkubuwono X;
- Dibentuk formatur yang diketuai oleh Ketua Umum terpilih dengan empat anggota Ketua DPD I Riau, Kalteng, Maluku, dan NTT, untuk menyusun pengurus lengkap DPP Golkar;
- Golkar memperjuangkan agar segera dilaksanakan pemenuhan sembilan bahan pokok rakyat sebagai prioritas utama agenda nasional;
- Golkar siap menyukseskan Sidang Istimewa MPR 1998
- Golkar siap menyukseskan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, demokratis, dan adil dalam sistem multipartai yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD '45;
- Golkar siap menyukseskan pelaksanaan Sidang Umum MPR dalam waktu secepatnya;

- Golkar akan memberdayakan rakyat terutama dalam hal kehidupan ekonominya;
- DPP Golkar tidak akan me-*recall* Harmoko sebagai Ketua MPR dan Gafur sebagai Wakil Ketua MPR.

Hasil Musyawarah Luar Biasa Golkar dapat berlangsung sesuai rencana dan jadwal. Tanggung jawab dan peran saya dalam partai politik dapat diakhiri dengan baik dan lancar sesuai AD dan ART Golkar. Dengan demikian, dalam keadaan yang begitu rumit dan kritis, saya dapat lebih bebas memberi perhatian kepada penyelesaian masalah kompleks dan multidimensi yang segera harus diselesaikan tanpa berkolusi dengan Partai Golkar.

Saya amat menyadari bahwa masalah pemulihan krisis ekonomi dan reformasi menuju kehidupan demokrasi amat dipengaruhi oleh faktor-faktor global. Oleh karena itu, saya mengambil kebijakan untuk mengangkat sejumlah tokoh bisnis profesional sebagai Duta Besar Keliling dengan tugas khusus di bidang ekonomi. Mereka akan saya tugasi untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri serta memberikan pengertian tentang proses reformasi dan demokratisasi yang sedang berlangsung.

Sehubungan dengan itu, pada tanggal 25 Juni 1998, melalui Keputusan Presiden Nomor 170/M tahun 1998, saya mengangkat tokoh-tokoh berikut sebagai Duta Besar Keliling dengan tugas khusus di bidang ekonomi:

- Iman Taufik, untuk wilayah kerja negara-negara ASEAN;
- James Tjahaya Riady, untuk wilayah kerja negara-negara: RRC, Hong Kong, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara Oseania;
- Kusumo Martorejo, untuk wilayah kerja negara-negara Jepang dan Korea Selatan;

- Muchrim Hakim, untuk wilayah kerja negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara;
- Suryo Bambang Sulistio, untuk wilayah kerja negara-negara Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan;
- Hashim Sujono Djojohadikusumo, untuk wilayah kerja negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur;
- Marimutu Sinivasan, untuk wilayah kerja negara-negara Asia Selatan: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan negara-negara di Afrika Selatan dan Afrika Timur.

Dengan pengangkatan para Duta Besar Keliling ini, saya mengharapkan timbulnya pengertian dari calon investor luar negeri sehingga dapat mengembalikan laju *foreign direct investment* (FDI).

Sementara itu, monitor saya pada perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa prediksi saya tidak dapat bertahan lebih dari 100 jam sudah beralih menjadi 100 hari, dengan berbagai alasan baik yang rasional maupun yang irrasional. Euforia kebebasan mendominasi ucapan dan gerakan kaum politisi pada umumnya, khususnya elite politik. "Pahlawan-pahlawan Reformasi" timbul berjamuran dengan melemparkan ucapan dan prasangka yang sudah tidak objektif lagi.

Mau ke mana? Siapa sebenarnya yang dapat menamakan dirinya bukan bagian dari "Orde Baru"? Apakah mereka yang sekarang berbicara, termasuk yang berdemo, tidak pernah menikmati "hasil pembangunan Orde Baru" selama 30 tahun? Pernahkah mereka yang berbicara atas nama rakyat mengenal dan mengetahui penderitaan, permasalahan, dan keinginan rakyat?

"Tepat pada tanggal 29 Agustus 1998 yang akan datang, pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan harus sudah

berakhir," demikian prediksi para pakar politik dan pakar ekonomi. Bagaimana jikalau prediksi tersebut tidak terjadi? Alasan dan prediksi apalagi yang akan keluar?

"Barisan Nasional" atau Barnas, sebuah forum gerakan moral, resmi didirikan oleh sejumlah tokoh purnawirawan ABRI dan tokoh masyarakat di Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 1998. Barnas dimotori dan diketuai oleh mantan Pangkostrad Letjen TNI (purn) A. Kemal Idris. Sekjen forum tersebut dipercayakan kepada Rachmat Witoelar, mantan Sekjen DPP Golkar 1983-1988.

Forum tersebut bersikap sangat negatif terhadap pemerintah, dan tidak bersahabat. Kepada diri saya, mereka penuh dengan prasangka serta praduga, secara sistematis melaksanakan *character assassination* yang tidak memiliki kebenaran. Ucapan dan kesimpulan gerakan forum tersebut mengenai Presiden jauh dari nilai "moral" dan "etika" yang diharapkan dari sebuah gerakan yang menamakan dirinya justru suatu gerakan moral.

Deklarasi Barnas dikeluarkan penuh dengan prasangka dan praduga negatif terhadap saya dan pemerintah Reformasi Pembangunan. Mereka mengajak seluruh rakyat bersama Barnas menjadi kekuatan oposan terbuka terhadap pemerintah yang saya pimpin.

Sebagian dari masyarakat yang dipengaruhinya berpendapat bahwa, "B.J. Habibie dengan pemerintahannya adalah kelanjutan dari sistem rezim Soeharto, sehingga sulit dapat dipercayakan untuk menjalankan reformasi yang dikehendaki rakyat."

Problem ekonomi saat ini tidak terlepas dari problem politik yang belum terpecahkan. Dalam hal ini, dikotomi antara persoalan politik dan persoalan ekonomi harus ditolak. Demikianlah pemikiran dan alasan tokoh-tokoh pendiri Barnas.

Alasan apa para tokoh pendiri Barnas dapat berbicara atas nama rakyat? Bagaimana dan kapan Barnas memperoleh legitimasi dari rakyat? Satu-satunya cara, para tokoh Barnas harus diberi kesempatan untuk membentuk suatu partai politik yang tidak melanggar UUD '45 dan memenuhi kriteria untuk mengikuti pemilu yang akan datang. Partai politik inilah kelak akan mendapat legitimasi langsung oleh rakyat.

Yang menarik adalah sejumlah tokoh militer dan nonmiliter yang bergabung dalam wadah Barnas. Dari kalangan militer yang bergabung dengan Barnas adalah: Mantan Menhankam Jenderal (purn) Edie Sudrajat, mantan Kapolri Jenderal Pol (purn) Hugeng Iman Santoso, mantan KSAU Marsekal (purn) Ashadi Tjahjadi, mantan KSAL Laksamana (purn) Waluyo Sugito, sejumlah Letjen TNI (purn) yakni M. Kharis Suhud dan Wahono (keduanya mantan Ketua DPR/MPR), A. Hasnan Habib, Saiful Sulun (mantan Wakil Ketua DPR/MPR), Solihin GP, Harsudiono Hartas, Surjadi (mantan Wakil KSAD), Arie Sudewo, Theo Syafei, Bambang Triantoro (mantan Kassospol), Mayjen (purn) Syamsir Siregar (mantan Ka. BIA).

Dari nonmiliter adalah: Megawati Soekarnoputri, Dr. Roeslan Abdulgani, Ny. SK Trimurti, Ny. Supeni, Des Alwi, Sarwono Kusumaatmadja, Marsilam Simanjuntak, Agus Tagor, Djoko Sudjatmiko, Hayono Isman, Moestahid Astari, Bambang Indra Oetoyo, Rizal Ramli, Hadidjojo Nitimihardjo (Ketua Umum Partai Murba), Julius Usman, Dimyati Hartono, Tjahyo Kumolo dan Didiet Haryadi (keduanya mantan Ketua Umum DPP KNPI), Krissantono, Kristiya Kartika (Sekjen MKGR), dan Roch Basuki Mangunpurojo.

Figur Pak Harto tidak dapat dilepaskan dengan sistem Orde Baru, sedangkan Pemerintah Reformasi Pembangunan adalah akibat lengsernya Pak Harto sebagai presiden. Berarti saya dan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan,

bahkan seluruh aparatur pemerintah adalah bagian dari Orde Baru.

Sistem Pak Harto adalah identik dengan sistem Orde Baru. Karena itu, sadarkah tokoh-tokoh pendiri Barnas bahwa mereka adalah tokoh-tokoh Orde Baru juga? Sebagian besar dari mereka saya kenal sebagai tokoh dan ujung tombak dari sistem yang mereka jelekkan dan gambarkan sebagai "Sistem Soeharto."

Saya beberapa kali berusaha menelepon Jenderal Kemal Idris yang saya kenal pribadi sejak saya kecil dan selalu menganggap beliau sebagai abang. Namun, saya tetap tidak berhasil berbicara dengannya.

Dari kawan dekat Jenderal Kemal Idris, saya mendengar bahwa ia tidak mau menerima telepon dari saya, untuk menghindari ucapan yang terlalu emosional sehingga dapat merugikan tali persaudaraan dan kekeluargaan yang sudah ada selama lebih dari 50 tahun.

Saya dapat mengerti sikap beliau yang memang mencerminkan karakter yang terbuka, lurus, dan jujur.

Di lain pihak saya harus berkomunikasi dengan para tokoh elite intelektual militer dan nonmiliter. Namun, rupanya dengan alasan yang sama seperti halnya Kemal Idris, dialog atau silaturahim tidak terbuka dan memungkinkan. Bahkan, praduga negatif mengenai diri saya terus berkembang.

Saya mengenal Pak Harto sebagai pemimpin yang sabar mendengar usul dan saran dari sekitarnya. Ia pun selalu berusaha mengambil kesimpulan yang terbaik untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya berkesimpulan bahwa justru yang berbicara keras dan mengkritik pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan itu, pernah selama puluhan tahun dekat dengan Pak Harto. Mereka pernah ikut aktif memberikan masukan kepada Pak

Harto. Saya yakin mereka ikut proaktif menyumbangkan pemikiran sistem yang mereka kritik sekarang.

Sementara itu, Siswono Yudhohusodo dan Sarwono Kusumaatmadja, bersama David Napitupulu, Toto S. Pradjamanggala, Udju S. Dinata, Hariadi Darmawan, dan Joko Sujatmiko pada tanggal 14 Agustus 1998 mendirikan suatu kelompok penekan baru yang diberi nama "Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa" (GKPB).

Kelompok ini menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan negatif, khususnya yang telah terjadi selama Orde Baru, dan munculnya pemikiran separatisme di berbagai daerah sebagai awal dari proses "Balkanisasi" NKRI.

Menurut Siswono, GKPB ingin mempererat persatuan bangsa, mengembalikan kedaulatan rakyat, dan menjadi partner yang kritis bagi semua pihak, baik Pemerintah Reformasi Pembangunan, partai politik, atau lembaga lainnya. "Yang baik kita dukung dan yang jelek kita betulkan,"demikian ucapan Siswono.

Kelompok GKPB tidak memberi sikap praduga negatif kepada siapa saja, termasuk saya. Mereka adalah kekuatan masyarakat yang dapat mengimbangi kekuatan Barnas.

Sekelompok tokoh nasional lainnya tergabung dalam Liga Penegak Kebenaran dan Keadilan (LPKK). Liga ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh perorangan, yang berasal dari berbagai organisasi. Penandatangannya antara lain berasal dari Dewan Masjid Indonesia, PB Jamaah Al Huda, PB Mathla'ul Anwar, KISDI, BKSPTIS, PPMI, HMI, Pemuda Persis, GPI, dan BKPRMI.

LPKK mengecam keras pernyataan Barnas yang mereka nilai penuh kecongkakan dan memaksakan kehendak. "Seolah-olah hanya mereka yang benar, mengabaikan pendapat kelompok lain, dan menganggap pemerintah Habibie harus dijatuhkan."

Menurut LPKK, Barnas juga punya andil dalam segala krisis yang terjadi di Indonesia, karena orang-orang yang duduk di Barnas adalah mereka yang mendukung Soeharto selama Orde Baru. Mereka telah menikmati keuntungan material dan moral, namun tidak merasa bertanggung jawab dalam mengekalkan Orde Baru yang ternyata merupakan suatu pemerintahan penuh tirani, korupsi, kolusi, dan nepotisme menyalahgunakan ketaatan ABRI dan birokrasi bagi ambisi Pak Harto, demikian pendapat dan ucapan LPKK tentang Barnas.

LPKK menyerukan kepada seluruh masyarakat agar bersikap waspada dan secara fisik tanpa kekerasan, bangkit bersama-sama mencegah Barnas memaksakan keinginan mereka mengganti pemerintahan Habibie oleh pemerintahan yang mereka inginkan pada Sidang Istimewa MPR 1998.

"Kami bukan mencintai seseorang, bukan mendukung pribadi, tapi Habibie menjadi presiden melalui jalan yang sah," tegas Sekjen Dewan Masjid.

Usep Fathudin, salah seorang deklarator lembaga ini, mengatakan LPKK sama sekali tidak berkeberatan terhadap eksistensi Barnas. Tetapi, lembaga yang digelutinya hanya tidak suka pada sikap kelompok itu yang dinilai inkonstitusional. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Presidensial, presiden punya masa jabatan tertentu. Presiden bisa diganti bila berhalangan. Jikalau Sidang Istimewa digunakan untuk menjatuhkan presiden, itu tidak konstitusional.

Baik Andang maupun Usep tidak menutupi diri bahwa Habibie punya kekurangan selama memimpin hampir tiga bulan, misalnya memberi bintang jasa kepada beberapa orang yang di dalamnya terkandung unsur *koncoisme* dan nepotisme, termasuk menghibahkan rumah kepada Soeharto. Kendati demikian, mereka mengakui agenda

pemerintah sudah tepat dalam mengatasi krisis. "Tentu harus ada prioritas. Tak mungkin Habibie menyelesaikan kasus korupsi dalam waktu singkat," kata Usep.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bidang politik, Letjen TNI (purn) Achmad Tirtosudiro menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Ketua Barnas, Letjen (purn) Kemal Idris, yang meminta agar Presiden B.J. Habibie mengundurkan diri saat diadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, November mendatang.

"Saya sudah berulang kali mengatakan, bagaimanapun juga secara konstitusional B.J. Habibie itu sah menjadi Presiden RI. Kalau meminta mundur saat SI MPR, saya tidak sependapat. Tetapi kalau dalam pemilu nanti, siapa pun menjadi presiden harus diangkat dan didukung," kata Achmad Tirtosudiro.

Ia meminta agar masyarakat memberi kesempatan kepada Kabinet Reformasi Pembangunan untuk menjalankan programnya. "Program Presiden Habibie ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan dunia internasional. Soal ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju, itu urusan mereka."

Memerhatikan perkembangan politik selama kurang dari 100 hari setelah Kabinet Reformasi Pembangunan terbentuk dan *relaxation process* dimulai, tampak sekali dinamika politik berkembang ke arah yang sehat. Euforia kebebasan di kalangan cendekiawan tidak berdampak negatif dan destruktif, melainkan konstruktif. Tampak sekali pada tuntutan Barnas, GKPB, LPKK, DPA, dan yang lain, semuanya masih bergerak di atas jalur Konstitusi NKRI. Syukur alhamdulillah, pengaruh dan usaha menunggangi dan memanfaatkan kesempatan untuk menyosialisasikan wawasan yang tidak dijiwai oleh Proklamasi NKRI 17 Agustus 1945, ternyata tidak diberi kesempatan oleh kekuatan-kekuatan nasional.

Kenyataan tersebut adalah akibat dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, SDM yang lebih berkualitas, prasarana budaya dan ekonomi yang lebih sempurna, serta jiwa nasionalisme dan patriot yang tinggi.

Dalam pengembangan SDM tersebut, peran organisasi cendekiawan umat Islam, umat Kristiani Katolik, umat Kristiani Protestan, umat Buddha, umat Hindu, dan umat lain sangat menentukan. Mereka berhasil melalui dialog antarcendekiawan memupuk saling pengertian dan mengembangkan toleransi yang memungkinkan memelihara ketenteraman.

Sejak tahun 1993, saya sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), telah melaksanakan dialog secara teratur dengan pimpinan Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Persatuan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI), Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), dan Forum Cendekiawan Hindu Indonesia (FCHI). Pengalaman saya tersebut sangat bermanfaat untuk mencegah salah pengertian yang berakibat negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Perkembangan keadaan politik seperti dijelaskan di atas, adalah berkat hasil kerja keras dan pengorbanan yang tinggi dari seluruh bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan dua presiden yang otoriter, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Sejarah mencatat bahwa jatuhnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto adalah akibat keberhasilan mereka dalam menciptakan nasionalisme, patriotisme, sumber daya manusia yang lebih berkualitas, prasarana ekonomi, dan prasarana budaya yang lebih baik di bumi Indonesia.

Mengapa? Kenapa? Bagaimana selanjutnya?

Jikalau kita mempelajari sejarah, khususnya kepemimpinan dan kehidupan di sekitar Presiden Soekarno

dan Presiden Soeharto, maka dapat dicatat bahwa pada awal kepemimpinan kedua presiden tersebut, semua dapat berjalan lancar dan transparan sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Kekuatan politik, kekuatan birokrat, kekuatan keluarga, dan kekuatan kerabat dengan segala jaringan dan prasarananya belum berhasil membentuk "lingkaran" di sekitar kekuasaan.

Namun setelah "lingkaran" tersebut, terbentuk dan terjadi keseimbangan dan kerja sama antara beberapa elemen kekuatan dalam "lingkaran", maka mulailah distorsi dan manipulasi informasi. Akibatnya, kualitas kebijakan presiden menurun, terjadi tindakan dan kebijakan yang tanpa disadari merugikan kepentingan rakyat.

Kesimpulannya adalah masa jabatan presiden harus dibatasi. Sebaiknya, masa jabatan presiden dibatasi saja dua kali melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Demikian pula harus berlaku untuk semua jabatan pimpinan eksekutif dalam pemerintahan seperti gubernur, bupati, dan lurah, hanya dapat dilaksanakan untuk dua kali masa jabatan mereka. Lain halnya dengan para pembantu pimpinan eksekutif yang lama masa jabatannya tergantung dari prestasi masing-masing, dan setiap saat dapat dihentikan atau dilanjutkan tanpa batas kecuali kendala usia dan kesehatan.

Adalah para pemuda dan pemudi yang memaksakan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan NKRI, dan mereka pula yang menjadikan kedua Proklamator tersebut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama NKRI.

Dua puluh tahun kemudian adalah pemuda dan pemudi pula yang menjatuhkan Presiden Soekarno dan membuka jalan untuk Jenderal TNI Soeharto dipilih menjadi Presiden ke-2 NKRI.

Tanggal 21 Mei 1998, setelah berbulan-bulan pemuda dan pemudi Indonesia berdemonstrasi, mereka berhasil mendesak Pak Harto mundur sebagai Presiden ke-2 NKRI.

Bukankah semuanya ini adalah suatu ironi sejarah?

Saya mendapat amanat rakyat melalui konstitusi untuk menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia dan dalam waktu sesingkat-singkatnya membawa keluar seluruh bangsa dari krisis multidimensi dan multikompleks yang kita hadapi. Semua dijalani tanpa pertumpahan darah, tanpa perang saudara, tanpa perpecahan, tanpa mengorbankan cita-cita rakyat yang diamanatkan melalui UUD dan ketetapan MPR, dan tanpa mengorbankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya berjanji untuk berperan aktif membantu mengembangkan suatu sistem demokrasi di bumi Indonesia, yang mengamankan agar presiden dan wakil presiden memulai dan mengakhiri jabatannya dengan cara konstitusional, dan tidak karena dipaksa oleh gerakan apa pun juga.

■

Sekneg.

Memeriksa barisan kehormatan
pada upacara Hari Angkatan Bersenjata RI, 5 Oktober 1998

Sekneg.

Bersama pimpinan Angkatan Bersenjata pada upacara Hari ABRI, 5 Oktober 1998

Sekneg.

Bertemu dengan masyarakat di Pulau Bali, 27 Juni 1998

bab 3 Antara 100 Hari Pertama dan 100 Hari Terakhir, Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI

Akhirnya, sistem yang memiliki kredibilitas dan prediktabilitas tinggi akan menentukan kualitas dan keunggulan suatu produk pemikiran, kebijakan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dapat diandalkan.

Sebelum memulai menjelaskan kebijakan yang harus saya ambil dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi, maka perlu saya mengutarakan dasar pemikiran dan sistem proses penyelesaian permasalahan tersebut sebagai berikut:

a. Dalam kehidupan, tidak ada masalah yang dapat diselesaikan secara sempurna;
b. Semua penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan melalui pendekatan atau aproksimasi (*approximation*). Dimulai dengan "pendekatan nol" (A_0) yang mengandung pemikiran dan sistem dasar penyelesaian permasalahan tersebut, dilanjutkan dengan pendekatan kesatu (A_1), kedua (A_2), ketiga (A_3), dan seterusnya sampai pendekatan ke-"m" (A_m);
c. Tergantung pada pendidikan, keterampilan, budaya, pengalaman, dan keunggulan seseorang, maka pada A_0,

masalah yang dihadapi sudah dapat diselesaikan 50 persen atau 60 persen, bahkan mungkin 80 persen, tetapi jelas tidak mungkin 100 persen atau secara "sempurna". Jelas baru pada pendekatan mungkin A_{20} atau A_{30} atau A_m di mana m = 55 atau pendekatan ke 55 (A_{55}), masalah tersebut dapat diselesaikan 98 persen mendekati penyelesaian yang sempurna. Dengan perkataan lain, penyelesaian masalah apa saja membutuhkan waktu dan biaya;

d. Jikalau katakanlah pada A_{100} (m=100), kita sudah mencapai lebih dari 90 persen penyelesaian permasalahan mendekati kesempurnaan, maka biasanya tiap peningkatan, katakanlah dari 90 persen menjadi 91 persen atau A_{100} menjadi A_{101}, hanya dapat diselesaikan dengan pengorbanan yang besar atau biaya yang tinggi;
e. Pada titik inilah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, atau si pemberi tugas, apakah kita bersama menyanggupi mengambil langkah yang mengandung banyak risiko dan pengorbanan untuk meningkatkan penyempurnaan hasil penyelesaian yang sedang kita hadapi?
f. Jikalau jawabannya jelas "dilanjutkan" atau "tidak dilanjutkan", maka kebijakan yang harus diambil adalah kebijakan yang mengandung risiko dan pengorbanan serendah-rendahnya;
g. Jikalau tidak jelas jawabannya, dan kendala waktu serta kondisi tidak memungkinkan untuk mendapatkan jawaban dari si pemberi tugas, maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil langkah kebijakan, dengan risiko dan biaya yang diperhitungkan;
h. Adakalanya, keadaan dan kondisi memungkinkan untuk memperbaiki proses penyelesaian permasalahan tanpa mengorbankan prinsip dan sistem dasar. Dalam hal ini,

lebih menguntungkan memulai tahap baru dengan pendekatan penyelesaian B_0, B_1, ... sampai B_m sesuai sistem pemikiran tersebut di atas.

A. Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pemilihan Umum

Penerapan dan implementasi hak asasi manusia hanya dapat berfungsi dengan baik jika diimbangi dengan kewajiban asasi manusia.

Demokratisasi pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin terbuka untuk menyebarluaskan dan mempraktikkan gagasan demokrasi.

Rapat Konsultasi dengan DPR/MPR

Memerhatikan informasi baik resmi maupun tidak, melalui media nasional dan internasional, dapat disimpulkan bahwa keadaan tetap belum stabil dan belum menentu, walaupun berdasarkan tindakan yang tegas, sistematis, jelas, dan pragmatis, keadaan politik dan ekonomi sudah lebih membaik. Namun, prasangka termasuk praduga mengenai Orde Baru dan Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan, apa pun yang telah dicapai, tetap terus dinyatakan sebagai suatu hal yang negatif. Organisasi, gerakan, dan partai politik yang sebenarnya tidak mungkin bersatu karena sifatnya seperti air dan minyak, menyatu. Mereka tidak dapat dilebur atau dipersatukan secara

homogen, namun karena menghadapi sasaran yang sama, mereka menjadi satu gerakan yang kompak.

Dalam situasi seperti ini, jikalau Presiden mengambil langkah yang salah, dapat menyebabkan suatu revolusi yang bisa berkembang menjadi proses "Balkanisasi" NKRI dan perang saudara. Karena itu, satu-satunya jalan adalah melaksanakan suatu pemilu yang transparan, demokratis, dan terbuka bagi semua partai yang mengakui UUD '45.

Apa gunanya menjadi Presiden, jikalau tidak dapat mencegah proses "Balkanisasi" NKRI, perang saudara, pertumpahan darah?

Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu NKRI yang tetap dijiwai oleh UUD '45 dan Pancasila adalah tugas utama presiden dalam membuka pintu kebebasan dan demokrasi. Bagi saya, menjadi Presiden bukan segalanya dalam kehidupan. Yang penting, bagaimana rakyat Indonesia yang sudah lama berjuang dan rela menderita, bisa mencapai masa depan yang cerah, tenteram, dan sejahtera bagi anak cucu kita semua.

Peralihan dari suatu sistem otoriter ke suatu sistem demokrasi yang bertanggung jawab dan berbudaya, secara damai dalam waktu sesingkat-singkatnya, adalah satu-satunya jalan yang meyakinkan untuk menyelesaikan masalah multikompleks dan implementasi program reformasi yang sedang kita hadapi dan harus lalui. Syukur Alhamdullillah, dalam 53 tahun di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kita tahap demi tahap telah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, saya memutuskan memulai proses pembangunan demokrasi di Indonesia, dan segera mengadakan pemilihan umum, meskipun sebenarnya saya memiliki kesempatan untuk meneruskan memimpin Pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan sampai akhir

masa jabatan pada tahun 2003, sesuai amanat UUD 1945.

Pemilu tetap menjadi agenda politik terpenting, untuk menciptakan pemerintahan yang legitimasinya tinggi. Rapat Konsultasi Presiden dengan DPR/MPR pada tahun 1998 memiliki arti cukup penting. Sebab, melalui forum itulah, jadwal pemilu disepakati akan diserahkan melalui mekanisme Sidang Istimewa (SI) MPR yang akhirnya menetapkan pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1999.

Kenapa dibutuhkan SI MPR?

Karena, melalui SI MPR itulah antara lain akan dikeluarkan ketetapan MPR yang mengubah ketetapan-ketetapan MPR sebelumnya, terutama mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah menetapkan jalannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sampai tahun 2003 dan jadwal pemilu yang akan datang. Keduanya perlu disesuaikan dengan jadwal kurang dari lima tahun. Di samping itu, tentunya Dasar Hukum Reformasi perlu ditetapkan dalam bentuk ketetapan MPR yang baru.

Apa pun hasil pemilu nanti, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Berarti, pemerintahan baru yang terbentuk telah mencerminkan aspirasi rakyat, sehingga diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah multikompleks dan mengakhiri krisis, setelah pemilu multipartai yang pertama (1999) dapat dilaksanakan dengan sukses. Insya Allah lima tahun kemudian, yakni tahun 2003, kita dapat memasuki tahap pembangunan pasca reformasi.

Sebab, pemilu adalah cara terpenting untuk menyelamatkan dan merehabilitasi bangsa akibat persoalan-persoalan berat. Karena itu, saya benar-benar berharap agar pemilu dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan demokratis mengingat begitu sentralnya peran pemilu.

Kunjungan saya ke MPR itu, untuk bersama dengan pimpinan DPR/MPR dan fraksi menentukan jadwal SI MPR,

pelaksanaannya harus dalam waktu sesingkat-singkatnya, paling lambat pada akhir tahun 1998.

Setelah mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan dengan masalah persiapan teknis, akhirnya ditentukan jadwal SI MPR pada awal November 1998.

Pada saat SI MPR awal November 1998 itulah, muncul spekulasi seolah-olah saya akan mengukuhkan diri dengan mengangkat seorang Wakil Presiden. Dan setelah Wakil Presiden dipilih, maka ada masa pertanggungjawaban selama lima tahun mulai bulan November 1998 sampai 2003 ketika mandat baru diserahkan.

Begitu mungkin logikanya?

Dengan demikian, pemilu tidak dilaksanakan pada 1999, tetapi akan dilaksanakan 2002. Selama periode 1998-2003 itulah saya harus bekerja memperbaiki keadaan akibat krisis. Ada sebagian kalangan yang menghendaki mekanisme demikian.

Tetapi, saya tidak buta dan tidak tuli. Di sekitar saya, banyak yang tidak sabar. Mereka yang ada di sekitar saya, banyak yang berambisi menjadi presiden. Tiba-tiba mereka memperoleh kepercayaan diri yang tinggi, bahasa populernya, mereka tiba-tiba punya "pede" (percaya diri) yang tinggi.

Ada orang yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam kabinet, tiba-tiba mau jadi presiden. Ambisi serupa mungkin juga ada pada siapa saja di sekitar saya. Ini adalah salah satu akibat dari kebebasan dan demokrasi. Apa salahnya? Belum lagi sosok-sosok yang berseberangan dengan saya. Apakah mereka berasal dari PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya. Belum lagi dari kalangan ABRI. Semua tiba-tiba "pede"-nya tinggi. Dalam keadaan seperti ini, saya berpikir, saya tidak mau berbicara dengan siapa pun. Kalau saya bicara, langsung bisa mengundang polemik. Saya harus

menahan diri. Hal ini bukan karena saya tidak memiliki "pede", tetapi saya sangat menyadari bahwa keadaan di tanah air sangat-sangat sensitif. Karena itu saya sangat hati-hati.

Karena pengalaman saya dalam Kabinet Pembangunan selama lebih dari 20 tahun berkesinambungan, di mana saya pernah mengoordinasikan Keluarga Besar Golkar (Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi Golkar) di MPR pada tahun 1993 dan 1998, maka saya memiliki suatu jaringan informasi yang dapat saya manfaatkan untuk memberi informasi yang tepat kepada para anggota DPR dan MPR.

Hal ini mempermudah dan memperlancar proses pembuatan undang-undang dan ketetapan-ketetapan yang dihasilkan sebagai produk hukum DPR dan MPR. Dalam rentang waktu 16 bulan, Kabinet Reformasi Pembangunan menghasilkan 69 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Selain UU, masih ada tiga unsur lagi yang masih perlu direformasi, yakni: (1) *Law enforcement* (penegakan hukum); (b) Peningkatan kualitas aparatur; dan (c) Budaya hukum masyarakat. Jangan artikan banyaknya kelahiran UU sama dengan terlaksananya pembaruan hukum.

Kalau berhenti sebatas undang-undang, maka perubahan yang saya rencanakan tidak akan bertahan lama. Siapa bisa menjamin, jika terjadi pergantian Presiden, undang-undang tersebut tetap berlaku? Bisa jadi undang-undang tersebut akan berubah lagi. Oleh karena itu, saya harus melaksanakan SI MPR untuk menghasilkan produk hukum, Tap-tap MPR atau Amandemen UUD 1945, tanpa mengubah Mukadimahnya. Secara langsung atau tidak langsung, ini akan membuat dasar hukum reformasi itu menjadi lebih kuat dan lebih lama bertahan.

Orang memperkirakan bahwa Sidang Istimewa MPR

khusus direncanakan hanya untuk mengukuhkan kembali saya sebagai presiden. Lalu, saya akan memilih seorang wakil presiden sehingga saya bisa langsung merencanakan menjabat sebagai presiden untuk lima tahun lagi.

Saya sadari bahwa reformasi membutuhkan dasar hukum, sebagai produk hukum MPR, yang mengandung banyak perubahan. Maka, semuanya itu harus dipersiapkan secara rasional, sistematis, dan profesional.

Misalnya, Ketetapan MPR yang membatasi bahwa Presiden hanya boleh menjabat selama dua periode. Lalu, mengenai kebebasan, monopoli, dan otonomi daerah. Banyak harus diubah atau disempurnakan. Bukan UUD 1945, tetapi ketetapan MPR, harus diubah dan disempurnakan.

Tuntutan sebagian besar anggota MPR, menghendaki Presiden Soeharto secara eksplisit disebut dalam Ketetapan MPR, mengenai pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara yang bersih, di samping pejabat negara, mantan pejabat negara, dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat.

Saya sudah sering kali menyampaikan pengalaman saya bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kabinet Pembangunan, saya tidak pernah mendapatkan instruksi atau imbauan dari Pak Harto, yang melanggar UU atau berbau KKN. Presiden Soeharto selalu menggarisbawahi bahwa kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kawan atau golongan.

Ketika Sidang Istimewa berlangsung, Golkar sudah menjadi Partai Politik, dan Keluarga Besar Golkar (KBG) yang terdiri dari Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah, dan Fraksi Golkar tidak dikoordinasikan oleh seorang koordinator lagi karena sudah dibubarkan. Karena itu, pengaruh saya selama SI berlangsung, terbatas pada pemberian penjelasan saja.

Menjelang dan saat berlangsungnya Sidang Istimewa

MPR, demonstrasi yang menantang dan menolak saya tidak juga berkurang.

Ada tiga anggota MPR yang datang menyampaikan informasi kepada saya, yaitu Andi Mattalatta, Marwah Daud Ibrahim dan Laksamana Muda Darmansyah. Sementara Mayor Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Asisten Sosial Politik Kasospol ABRI, tidak dapat hadir, karena ia sebelumnya harus mendapat tugas dari Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto.

Mereka menyampaikan kepada saya, "Pak, apa tidak sebaiknya Presiden dan DPD dipilih langsung?"

Pada Sidang Istimewa tersebut, memang ada masukan dari beberapa anggota MPR tentang pemilihan Presiden dan pemilihan DPD, supaya dilaksanakan secara langsung. Kalau saya setuju dengan gagasan ini, maka saya merasa tidak adil. Banyak tokoh nasional dan tokoh daerah yang saya nilai memiliki potensi, belum pernah diberikan kesempatan untuk berprestasi sehingga dapat dinilai langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, tokoh-tokoh seperti ini harus diberi kesempatan satu periode lamanya atau lima tahun untuk berprestasi.

Karena apa?

Karena, selama tiga puluh dua tahun lamanya, misalnya penentuan para anggota Utusan Daerah atau pimpinan daerah, itu dilaksanakan secara *top down*. Mana mungkin, dalam beberapa bulan saja, pelaksanaan *bottom up* dapat berlangsung tanpa mengakibatkan kekacauan.

Untuk itu, saya akan melaksanakan pemilu setelah satu tahun, dengan mengubah dasar hukumnya, agar pada pemilu yang akan datang, tidak dibatasi lagi pesertanya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, oleh para anggota MPR, yang jelas memiliki legitimasi yang lebih tinggi.

Lima tahun kemudian, pada tahun 2004, insya Allah

sudah dapat diadakan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, para anggota DPD langsung, bupati dan wali kota langsung. Semuanya akan baru, tokoh-tokoh baru dan aliran baru akan muncul.

Setelah masa peralihan dilaksanakan, di mana partai-partai baru tidak didominasi lagi oleh Golkar dan partai lama, dapat berkembang suasana alam demokrasi dan kebebasan yang berbudaya dan bertanggung jawab. Kemudian setelah lima tahun, pada tahun 2004, maka bolehlah Presiden, Wakil Presiden, anggota DPD, gubernur, bupati atau wali kota dapat dipilih langsung. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, saya telah memberikan dasar hukum bagi lahirnya partai-partai yang lain. Berapa pun banyaknya, asal memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Tap MPR dan dirinci oleh undang-undang.

Di bidang ekonomi, saya hanya dapat melaksanakan perubahan atau reformasi dengan antara lain membuat Rancangan UU (RUU) Anti-Monopoli, RUU Anti-*Trust*, RUU Bank Indonesia, dan sebagainya.

Agar pemilu dapat menjadi pintu awal proses demokratisasi, saya senantiasa mengingatkan agar pemilu benar-benar dapat berlangsung secara jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, dan demokratis. Saya sangat berkepentingan, agar budaya demokrasi pada pemilu dapat berkembang. Untuk itu, saya mengajak masyarakat ikut serta proaktif menjadikan pemilu luber dan jurdil.

Jumlah partai politik tidak dibatasi. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bersama-sama pemerintah menjadi penyelenggara negara. TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memihak salah seorang kontestan pemilu. Lembaga pengawasan masyarakat dan pemantau pemilu tidak lagi dilarang. Bahkan, pihak asing diundang untuk membantu menyukseskan proses pemilu.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, saya memberikan beberapa persyaratan:

1. Partai harus mengakui Pancasila dan UUD 1945;
2. Partai itu tidak dinyatakan oleh Tap MPR sebagai partai yang terlarang;
3. Walaupun SI MPR baru dapat dilaksanakan dalam bulan November 1998, pada bulan Juni 1998 saya sudah menolerir masyarakat untuk memulai menjajaki pendirian partai baru dengan memenuhi syarat satu dan dua di atas. Silakan masyarakat mendirikan partai-partai, walaupun belum ada dasar hukumnya, agar mereka tidak kehilangan waktu untuk melakukan sosialisasi wawasan partai politik mereka.

Pada berbagai kesempatan, saya berulangkali mengajak masyarakat untuk beramai-ramai menyukseskan pemilu. Termasuk mendorong siapa saja, agar membentuk partai-partai baru. Mereka inilah yang nantinya dapat mewakili rakyat di dalam MPR dan DPR yang akan datang. Jika mereka telah menerima Pancasila dan UUD 1945 dan tidak dilarang oleh Tap MPR, maka itu tidak akan jadi masalah.

Nanti, kalau Undang-Undang tentang Partai Politik sudah disusun, maka partai-partai yang memenuhi undang-undang tersebut baru dapat didaftarkan sebagai peserta pemilu yang akan datang.

Dengan upaya-upaya yang sistematis, komitmen saya atas demokratisasi sangat jelas. Tidak ada sedikit pun niat dari pemerintah untuk menunda-nunda pemilu. Tidak ada sedikit pun niat pemerintah untuk melakukan rekayasa mendukung partai politik dan kekuatan tertentu. Sebab, bagi saya, pemilu merupakan wahana penting untuk memberdayakan kedaulatan rakyat, wahana untuk rekrutmen politik secara terbuka dan instrumen awal untuk

menghasilkan sebuah pemerintahan yang memiliki legitimasi yang tinggi.

Langkah penting untuk menghasilkan sebuah pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis, membutuhkan dasar legalitas atau perundang-undangan yang kuat dan diterima oleh segala lapisan masyarakat. Karena itu, saya dorong seluruh komponen bangsa untuk menghasilkan undang-undang yang dapat menciptakan nilai kesetaraan dan kemajemukan bangsa.

Walaupun konsep undang-undang dari Departemen Dalam Negeri yang diusulkan ke DPR, tidak tertutup kemungkinan adanya masukan dan usulan lain dari masyarakat selama pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Masukan dari berbagai kalangan masyarakat memengaruhi hasil akhir perundang-undangan yang menjadi landasan pemilu, termasuk Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, maupun Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD.

Jika sebelum era reformasi hanya ada dua partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia serta Golongan Karya, maka setelah Undang-Undang tentang Parpol berlaku, tercatat sebanyak 48 partai politik yang dapat memenuhi kriteria dan diperbolehkan menjadi peserta pemilu yang akan datang.

Pemilu insya Allah akan berjalan demokratis dan lancar jika penyelenggara pemilu benar-benar netral. Jika sebelum era reformasi, pemerintah berperan vital dalam pengelolaan pemilu, maka untuk penyelenggaraan Pemilu 1999, pemerintah tidak boleh mengendalikan proses pemilu.

Karena itu, pelaksanaannya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas 48 anggota yang

mewakili masing-masing peserta partai politik dalam pemilu dan empat orang wakil pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, yang dulunya sangat aktif dan berperan, kini tidak diberikan lagi peran. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas 48 orang mewakili partai politik peserta Pemilu dan empat orang mewakili pemerintah. KPU dipimpin oleh Rudini (Ketua), Adnan Buyung Nasution (Wakil Ketua), dan Harun Alrasyid (Wakil Ketua). Secara lengkap susunan KPU dapat dilihat pada lampiran.

Untuk menjamin netralitas pengelolaan pemilu, jika pegawai negeri sipil atau PNS sebelumnya "diwajibkan" untuk mendukung Golkar, maka melalui Keputusan Presiden, secara tegas dinyatakan PNS dilarang aktif dalam partai politik tertentu. Jika aktif mencalonkan diri, maka mereka harus keluar dari status PNS. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan suaranya dalam pemilu, sesuai aspirasi mereka masing-masing.

Mereka juga tidak lagi mencoblos di kantor, tetapi dapat melaksanakan pencoblosan di sekitar rumah mereka masing-masing, karena selama Pemilu dinyatakan sebagai hari libur. Para menteri dilarang kampanye. Jika mereka berkampanye, maka mereka harus mengambil cuti. Seluruh komponen masyarakat diundang untuk memantau jalannya proses pencoblosan, termasuk dari luar negeri. Saya juga mengundang sahabat saya, mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, untuk melakukan proses pemantauan di Indonesia.

Lalu, tentang utusan daerah, yang tadinya disusun secara *top-down*, saya minta selanjutnya dapat langsung dipilih oleh rakyat di daerah masing-masing. Mereka harus benar-benar tokoh daerah dan tidak boleh menjadi anggota partai politik.

Syukur alhamdullillah, pemilu dengan 48 peserta partai politik dapat berlangsung secara demokratis, tenteram, dan

aman sesuai rencana dan jadwal, berkat kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya 52 anggota KPU. Pelaksanaan pemilu, mendapat perhatian besar dari rakyat Indonesia dan dunia internasional.

Polemik mengenai hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 sah mulai berkembang, meskipun 27 dari 52 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) wakil partai politik peserta pemilu menolak menandatangani berita acara dan sertifikat tabulasi hasil penghitungan suara, saya mengambil kebijakan untuk mengumumkan hasil pemilu melalui TV dan radio yang intinya sebagai berikut:

> Saudara-saudara sebangsa dan setanah air;
> Assalamu'alaikum Wr. Wb.
>
> Pertama-tama saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat melaksanakan salah satu tahap penting di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu tahap pemungutan, dan penghitungan, serta pengesahan suara.
>
> Walaupun hingga batas waktu yang disepakati oleh KPU, masih terdapat sejumlah wakil parpol di KPU yang belum berkenan menandatangani hasil akhir tersebut, hal ini tidak mengurangi keabsahan penyelenggaraan Pemilu 1999.
>
> Karena, secara statistik, parpol yang telah membubuhkan tanda tangan untuk menerima hasil perhitungan tersebut sesungguhnya telah mewakili 93,03 persen atau 98.348.208 dari seluruh pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999.
>
> Dengan kenyataan tersebut, saya percaya bahwa sebagai patriot bangsa, mereka yang belum membubuhkan tanda tangan pada hasil pemilu tersebut pada hari ini, insya Allah, akan mempertimbangkan kembali posisinya sejalan dengan

semangat demokrasi dan kehendak masyarakat luas.

Berkenaan dengan masih adanya anggota KPU yang belum menandatangani hasil perhitungan tersebut, Panwaslu Pusat akan melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui PP No. 33 tahun 1999, khususnya pasal 33, yaitu melakukan penyelidikan atas alasan-alasan yang diajukan oleh Partai Politik yang belum menandatangani berita acara hasil Pemilu 1999.

Saya telah meminta kepada Panwaslu Pusat untuk melaksanakan tugas itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya —paling lama 7 hari—, agar masyarakat dapat segera mendapatkan kepastian, dan tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan ...

... Inilah pemilihan umum pertama sejak 1955 yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil. Kenyataan tentang tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu kali ini —yang sebelumnya diduga oleh sejumlah pengamat sebagai sesuatu yang sulit— merupakan bukti tingginya kepercayaan rakyat pada sistem yang sedang kita bangun.

Rakyat menaruh harapan besar kepada wakil-wakil mereka yang kelak akan menentukan perjalanan nasibnya. Nasib anak-cucu kita akan sangat tergantung pada apa yang kita perbuat sekarang.

Sehubungan dengan itu, terlepas dari komposisi perolehan suara oleh partai-partai, harus kita akui bahwa pihak yang mutlak menang dalam Pemilu 1999 ini adalah rakyat Indonesia seluruhnya.

Mereka menang melawan semua kekhawatiran: bahwa Pemilu 1999 akan berdarah, bahwa tingkat partisipasi akan rendah, dan bahwa pemilu jurdil adalah sebuah ilusi.

Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan dan kemenangan tersebut.

... Secara khusus ucapan selamat itu saya sampaikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan —sebagai peraih suara terbanyak—, demikian juga kepada Partai

Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, sebagai partai yang berhasil meraih enam besar Pemilu 1999.

Kepada partai-partai lain yang berhasil meraih kursi di DPR, namun tidak termasuk dalam kategori enam besar, saya juga mengucapkan selamat.

Dengan selesainya perhitungan dan pengumuman hasil pemungutan suara ini, saya ingin mengajak segenap lapisan masyarakat untuk meninggalkan di belakang kita semua ekses-ekses yang terjadi dari dinamika perbedaan yang ada selama masa kampanye maupun masa pascapemilu yang lalu.

Setelah itu saya juga ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengayunkan langkah menatap masa depan secara bersama-sama.

Persatuan dan kebersamaan ini sangat kita perlukan untuk dapat keluar dan pulih dari berbagai krisis yang kita hadapi, dan untuk menempuh masa depan dengan penuh optimisme.

... Demikianlah indahnya kehidupan demokrasi. Demokrasi memang merupakan tahap dewasa dari sebuah kehidupan masyarakat beradab. Dalam kedewasaan itu, keputusan diambil secara bebas, sehingga kebenaran lahir sebagai hasil dari proses wacana yang menjadikan kesetaraan sebagai landasannya. Demokrasi memang memiliki nilai etika dan normanya sendiri, yang membedakannya dari tatanan otoritarianisme —yang menempatkan pemerintah dan negara sebagai patron terhadap rakyatnya— dan karena itu cenderung mendefinisikan kebenaran secara sepihak.

Bertolak dari pemikiran tersebut, kiranya semakin jelas bahwa jalan demokratisasi yang kita tempuh saat ini sudah benar. Kita telah sepakat untuk memberi makna reformasi politik sebagai demokratisasi. Proses ini harus terus digulirkan. Demokratisasi harus menjadi arus besar yang

akan mampu menerjang dan menjebol benteng-benteng otoritarianisme yang mungkin di sana sini masih tersisa. Benteng-benteng itu tidak terbatas pada tingkah laku kekuasaan, tetapi juga pada sikap mental sebagian tertentu warga masyarakat yang masih cenderung menggunakan cara-cara lama, dalam bentuk pemaksaan kehendak dan intimidasi dengan mengatasnamakan rakyat. Secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya mereka telah melecehkan aspirasi rakyat, yang tecermin dalam hasil pemilihan umum yang transparan, jujur dan adil.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita.

Hasil pemilu adalah sebagai berikut:

No	Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA*	Kursi dengan SA*
1	PDIP	35.689.073	153	154
2	Golkar	23.741.749	120	120
3	PPP	11.329.905	58	59
4	PKB	13.336.982	51	51
5	PAN	7.528.956	34	35
6	PBB	2.049.708	13	13

**SA-Stembus Accord*

B. Bank Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Makro

Transparansi dan pengawasan yang efektif dibantu oleh kebebasan pers yang berbudaya dan bertanggung jawab dapat membantu sinergi antara pemerintah dan Bank Sentral dalam mengamankan pembangunan yang berkesinambungan.

Satu hari setelah pengambilan sumpah sebagai Presiden di Istana Merdeka, saya memisahkan Bank Indonesia, dari Kabinet Reformasi Pembangunan yang saya bentuk kurang dari 24 jam. Sebagaimana telah saya sampaikan, saya tidak memperoleh kesempatan untuk membaca atau mempelajari sesuatu yang berbentuk laporan, baik yang terkait dengan masalah ekonomi ataupun masalah lain, kecuali pidato pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden, tidak ada laporan timbang terima dalam bentuk apa pun. Pertemuan empat mata dengan Pak Harto, yang saya minta dan harapkan, juga tidak pernah dikabulkan. Oleh karena itu, saya tidak memiliki bahan masukan kecuali yang pernah ditulis dalam surat kabar mengenai bantuan dan persyaratan IMF serta beberapa hal lainnya.

Seperti telah saya jelaskan sebelumnya, keadaan di Indonesia begitu ruwet, begitu kompleks, tidak menentu dan cepat berkembang, sehingga saya harus berhati-hati sekali dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat. Saya harus menghadapi perubahan yang tidak menentu dan terus berkembang ke arah destabilisasi politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, peran BI akan lebih pasti dan harus dikelola oleh tim yang profesional serta berdedikasi tinggi. Tim tersebut harus dapat berkarya tanpa menghadapi

kendala politik, bebas berpikir dan beranalisis murni secara profesional.

Tim tersebut tidak boleh diatur dan diarahkan oleh presiden yang kedudukannya sangat politis dan kepentingannya mungkin dapat bertentangan dengan hasil analisis dan kebijakan profesional. Dengan kata lain, tim pimpinan Bank Indonesia (BI) harus memberi perhatian penuh pada tugas yang diharapkan oleh rakyat, yaitu menghasilkan mata uang rupiah yang kuat, nilai tukar yang stabil dan berkualitas tinggi.

Tim pimpinan BI harus berperan aktif dalam memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, bersifat merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional tersebut, dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, maka sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi perlu dikembangkan. Kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.

Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem tersebut perlu didukung oleh mekanisme pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

Untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara

stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti. Alhamdulillah, Undang-Undang baru tentang Bank Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dapat saya tandatangani pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini, merupakan hasil kerja keras para pakar perbankan dan keuangan dan komisi bersangkutan di DPR.

Pengalaman negara lain, seperti Jerman, dapat dimanfaatkan dengan memerhatikan masukan dan nasihat pakar Jerman Prof. Dr. Schessinger, mantan Presiden Deutsche Bundesbank, dan para Pakar dari IMF.

Dalam undang-undang ini, tim pimpinan Bank Indonesia BI diberi nama Dewan Gubernur (DG) yang dipimpin oleh Gubernur BI merangkap anggota DG dan wakil gubernur BI adalah Deputi Gubernur Senior merangkap Anggota DG.

Sistem pembayaran, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*, adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ini.

Peraturan BI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sedangkan Peraturan DG hanya berlaku intern di BI.

Kebijakan Moneter BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.

Untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, maka dibutuhkan cadangan umum yang berasal dari sebagian surplus BI.

Cadangan tersebut dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang BI serta untuk penyertaan.

Dengan demikian diharapkan kualitas nilai rupiah terjamin tinggi dan stabil. Namun ini belum berarti bahwa dengan sendirinya sistem perbankan di Indonesia langsung menjadi sehat.

Jikalau dipelajari masalah perbankan di Indonesia yang sedang kita hadapi, maka perkembangan krisis perbankan tahun antara 1997-1999 dapat kita bagi dalam tiga fase yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya:

Fase pertama dimulai sejak krisis berlangsung pada bulan Juli 1997 hingga akhir Januari 1998, yaitu pada saat pemerintah mengambil kebijakan untuk meredakan krisis melalui program jaminan pemerintah terhadap kewajiban membayar bank umum serta pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Fase kedua berlangsung sejak awal Februari 1998 hingga meredanya gelombang *bank rush* pada akhir Oktober 1998.

Fase ketiga merupakan periode pemulihan kembali perbankan sejak bulan Oktober 1998 hingga selesai.

Saya memutuskan untuk melanjutkan kebijakan yang telah diambil oleh Pak Harto dengan memanfaatkan "Tim Ekonomi" yang disempurnakan dengan pelaksanaan yang lebih transparan, cepat dan tegas, untuk mendahului permasalahan yang cepat berkembang.

Oleh karena itu, *fase kedua* harus saya selesaikan secara

tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selanjutnya meletakkan dasar pemikiran, prinsip dan sistem untuk memasuki *fase ketiga,* yaitu fase pemulihan kembali perbankan yang harus dilanjutkan oleh siapa saja yang menjadi Presiden keempat nanti.

Untuk itu, dalam rangka meredam krisis perbankan perlu dilaksanakan program jaminan pemerintah terhadap kewajiban bank umum. Di samping itu, perlu lebih difungsikannya BPPN untuk menerima penyerahan sejumlah bank yang tidak sehat dari Bank Indonesia, untuk disertakan dalam program penyehatan.

Di samping itu BPPN harus menyusun mekanisme program jaminan pemerintah. Pada awal pelaksanaan tugasnya BPPN belum memiliki pegawai dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sistem dan prosedur kerja. Sementara itu BPPN telah dihadapkan kepada berbagai tugas yang harus segera dilaksanakan.

Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan BPPN untuk sementara dilakukan oleh personalia yang diperbantukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Departemen Keuangan.

Selain itu, BPPN juga belum memiliki dana atau anggaran sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan kerja para karyawan BPPN masih mengandalkan bantuan sepenuhnya dari Bank Indonesia, antara lain gedung kantor, inventaris, perlengkapan kantor, dan lain-lain.

Organisasi dan susunan pengurus mulai terbentuk serta karyawan mulai direkrut setelah pada bulan Maret 1998. BPPN menempati ruang kerja di gedung Bank Indonesia. Sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 25 Juni 1998, BPPN mengalami dua kali pergantian pimpinan, sehingga selama kurun waktu kurang dari enam bulan BPPN secara bergantian dipimpin oleh tiga orang ketua.

Program jaminan pemerintah ternyata tidak segera meredakan penarikan dana masyarakat dari perbankan. Sementara itu, terjadi berbagai peristiwa seperti kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Semanggi yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga *bank rush* masih terus terjadi sampai akhir Agustus 1998.

Keadaan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda sejak bulan September 1998. Perkembangan ini disebabkan oleh membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap kestabilan harga dan nilai tukar serta setelah masyarakat melihat pelaksanaan pembayaran jaminan pemerintah sejak bulan Juli 1998 dalam rangka penutupan bank beku operasi yang tidak merugikan nasabah penyimpan.

Dengan meredanya kesulitan likuiditas perbankan dan berkurangnya gelombang penarikan dana, Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian menyiapkan Program Restrukturisasi Perbankan.

Pada awal Maret 1998, BPPN mulai menggariskan rencana kerjanya. Pada saat itu jabatan ketua BPPN telah dialihkan dari Bambang Subianto kepada Iwan Prawiranata yang juga memegang jabatan sebagai direktur (anggota direksi) Bank Indonesia. Sejak awal Maret 1998 badan tersebut telah dilengkapi dengan tiga orang Deputi Ketua dan sejumlah pegawai serta telah menempati ruang kerja di gedung Bank Indonesia.

Langkah pertama yang diprioritaskan adalah menangani 54 bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Februari 1998, untuk dimasukkan dalam program penyehatan oleh BPPN.

Bank-bank yang diserahkan pengawasannya kepada BPPN terdiri atas empat bank persero, 37 bank umum Swasta nasional, dua bank campuran dan 11 bank pembangunan daerah (BPD).

Penyerahan tersebut didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Februari 1998 yaitu:

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digunakan oleh bank telah mencapai lebih dari 200 persen modal disetor;
2. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequate Ratio/CAR)*, lebih kecil atau sama dengan 5 persen;
3. Bank gagal melunasi fasilitas diskonto lebih dari 21 hari setelah jatuh tempo.

Dalam rangka pelaksanaan tugas penyehatan bank, dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 1998 tanggal 5 Maret 1998, ditetapkan tugas dan kewenangan BPPN. Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Presiden tersebut antara lain adalah:

(1) Meminta pernyataan bank dalam penyehatan BPD untuk menaati persyaratan-persyaratan praktik perbankan yang sehat dan meningkatkan kinerja bank termasuk, peningkatan yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional dan manajemen;

(2) Meminta direksi, komisaris dan pemegang saham BPD untuk menandatangani dokumen-dokumen yang bersifat mengikat. Dokumen tersebut diperlukan guna penyehatan bank dimaksud, dan untuk memastikan pengembalian jaminan baik yang akan, sedang, atau telah dicairkan;

(3) Meminta BPD untuk mengajukan rencana perbaikan dengan mengikuti persyaratan, ketentuan dan peraturan BPPN, termasuk penetapan jadwal, tindakan yang akan dilakukan serta hal-hal lain yang perlu dilakukan;

(4) Melaksanakan penelitian dan penyelidikan, memperoleh dokumen atau informasi, meminta penyiapan dan

penyampaian laporan evaluasi perkembangan BPD (Bank Pembangunan Daerah), serta bukti-bukti dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPPN;

(5) Memantau, mengamankan dan merestrukturisasi kekayaan BPD serta menghitung dan membebankan kerugian yang dialami BPD;

(6) Melakukan atau mewajibkan tindakan hapus buku atas kekayaan bermasalah milik BPD;

(7) Menetapkan kewajiban menambah modal disetor kepada pemegang saham;

(8) Menerima pendelegasian kewenangan Bank Indonesia kepada BPPN untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk penyelesaian utang yang pernah diberikan Bank Indonesia dalam rangka bantuan likuiditas kepada BPD.

Untuk menjaga efektivitas program penyehatan tersebut, rencana kerja penyehatan bank dievaluasi secara terus-menerus oleh BPPN. Apabila menurut penilaian BPPN kondisi suatu BPD sudah keluar dan kriteria sebagai BPD, maka pengawasannya diserahkan kembali kepada Bank Indonesia.

Sebaliknya, apabila suatu BPD ternyata tidak dapat disehatkan, BPPN akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengambil alih pengoperasian bank yang bersangkutan, menentukan tingkat kompensasi yang dapat diberikan kepada direksi, komisaris, dan karyawan bank. BPPN mengambil alih pengelolaan bank, termasuk penilaian kembali (revaluasi) atas kekayaan yang dimiliki bank, melakukan penggabungan, peleburan, dan atau akuisisi bank. BPPN menguasai, menjual, mengalihkan, dan atau melakukan tindakan lain

dalam arti yang seluas-luasnya atas suatu hak kekayaan milik bank yang berada pada pihak ketiga.

Kepada pemegang saham yang terbukti ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan timbulnya kerugian bank, juga diminta untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam rangka menangani 54 bank yang diserahkan kepada BPPN, badan tersebut menyeleksi bank-bank untuk dikelompokkan dalam dua kategori yaitu:

1. Bank yang dapat disertakan dalam program penyehatan bank dengan pengambilalihan pengelolaan bank atau yang dikenal sebagai Bank *Take-Over* (BTO)
2. Bank yang dimasukkan dalam kategori Bank Beku Operasi (BBO)

Kriteria yang ditetapkan BPPN untuk kedua kelompok bank tersebut adalah sebagai berikut:

Bank *Take-Over*

Bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BLBI) telah melebihi Rp2 triliun, atau BLBI yang diterima telah melebihi atau sama dengan 500 persen dari modal bank.

Bank Beku Operasi

Capital Adequacy Ratio (CAR) kurang atau sama dengan 2 persen, atau memperoleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar atau sama dengan 500 persen dari modal bank dan melampaui 75 persen dari total asset, atau total BLBI melampaui Rp2 triliun. Bank tidak mempunyai prospek untuk diselamatkan yaitu setelah tidak dapat memenuhi tahapan-tahapan:

1. Penyetoran tambahan modal oleh pemegang saham yang diperlukan dalam rangka penyehatan;

2. Mendapatkan investor baru yang dapat melakukan setoran tambahan modal
3. Mengusahakan dilakukannya merger dengan bank lain yang sehat

Dengan ditetapkannya suatu bank sebagai Bank BBO, bank tersebut sudah tidak boleh lagi melakukan kegiatan usaha dan transaksi perbankan dalam bentuk apa pun, termasuk tidak boleh lagi mengikuti kliring. Demikian juga dewan komisaris dan direksi bank sudah tidak boleh lagi melakukan fungsinya.

Dana simpanan nasabah serta kewajiban lainnya dari Bank BBO dibayar melalui program jaminan pemerintah. Demikian juga, karena bank sudah tidak beroperasi lagi, sebagian besar karyawannya diputuskan hubungan kerjanya. Keadaan Bank BBO hampir sama dengan bank yang dilikuidasi, kecuali statusnya sebagai bank masih dipertahankan.

Hal ini ditempuh untuk memudahkan BPPN melakukan penjualan dan pencairan aset Bank BBO tersebut. Untuk itu, BPPN menunjuk “Tim Pemberesan” yang akan melakukan upaya penyelesaian berkaitan dengan konsekuensi dari pembekuan operasi bank-bank tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada tanggal 3 April 1998 Menteri Keuangan dan pimpinan BPPN mengumumkan bahwa enam bank dari bank-bank yang berada dalam pengawasan BPPN diambil alih manajemennya atau dikenal dengan istilah Bank *Take-Over* (BTO) dan tujuh bank lainnya dibekukan operasinya atau dikenal dengan istilah Bank Beku Operasi (BBO). Penetapan nama-nama bank yang termasuk Bank BTO dan Bank BBO secara resmi dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua BPPN tanggal 4 April 1998.

Keenam bank yang ditetapkan statusnya sebagai Bank BTO adalah: (1) Bank Danamon, (2) Bank Dagang Nasional Indonesia, (3) Bank Umum Nasional, (4) Bank PDFCI, (5) Bank Tiara Asia, dan (6) Bank Modern.

Tujuh bank yang dibekukan operasinya (BBO) adalah: (1) Bank Surya, (2) Bank Pelita, (3) Bank Subentra, (4) Bank Hokindo, (5) Bank Istimarat, (6) Bank Deka, dan (7) Bank Centris.

Dengan terjadinya kerusuhan massal pada bulan Mei 1998, Bank Central Asia (BCA) diserbu oleh para nasabahnya yang melakukan penarikan dana secara besar-besaran. Bahkan antrian panjang terjadi pada mesin-mesin anjungan tunai mandiri (ATM) milik BCA.

Sebelum peristiwa ini BCA pernah menggunakan BLBI untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat *bank rush* yang terjadi beberapa minggu setelah penutupan 16 bank pada awal November 1997, tetapi bantuan likuiditas tersebut dapat dikembalikan kepada Bank Indonesia setelah arus penarikan simpanan mereda dan nasabah mulai menempatkan dananya kembali.

Penarikan simpanan yang terjadi pada BCA di bulan Mei 1998 jauh lebih besar dari kejadian sebelumnya, menyebabkan kesulitan keuangan yang parah. BCA terpaksa meminta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia lagi. Untuk itu, Bank Indonesia menyediakan fasilitas diskonto kepada BCA yang hingga akhir Mei 1998 jumlahnya mencapai Rp21,29 triliun.

Sebagai konsekuensi penggunaan dana yang demikian besar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia pada bulan Mei 1998 mengalihkan pengawasan BCA kepada BPPN. Kemudian BPPN melakukan pengambilalihan manajemen BCA dan menetapkan status BCA sebagai Bank BTO, sehingga jumlah Bank BTO menjadi tujuh.

Sementara itu, tanggal 10 Juli 1998 BPPN menyerahkan kembali tugas pembinaan dan pengawasan 55 bank dalam penyehatan yang semula diserahkan ke BPPN, serta pelaksanaan jaminan pemerintah yang semula dilakukan oleh BPPN, kepada Bank Indonesia.

Penyerahan tersebut dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Pemerintah tentang Pokok-pokok Penyempurnaan Kelembagaan dan ketentuan tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) serta langkah-langkah dalam penyehatan perbankan. Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat keputusan tentang kewenangan Bank Indonesia atas tugas pembinaan dan pengawasan bank, serta pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum oleh Bank Indonesia. Penyerahan tersebut berlaku sejak tanggal 10 Juli 1998.

Karena kondisi beberapa Bank BTO makin memburuk, maka pada awal Agustus 1998 tiga Bank BTO dibekukan kegiatan operasinya, yaitu: (1) Bank Dagang Nasional Indonesia, (2) Bank Umum Nasional, dan (3) Bank Modern.

Dengan demikian, jumlah Bank BTO pada awal Agustus 1998 turun menjadi empat bank, sedangkan Bank BBO menjadi berjumlah 10 bank.

Menjelang memasuki Fase Ketiga yang merupakan periode pemulihan kembali perbankan, maka sejak bulan Oktober tiap minggu saya meminta Laporan mengenai perkembangan RKM (Rasio Kecukupan Modal) atau CAR (*Capital Adequate Ratio*) dari bank yang bermasalah. Sebulan sekali saya minta laporan yang lebih rinci.

Pengelompokan berdasarkan besaran angka RKM atau CAR pada posisi akhir bulan Desember 1998 dari hasil *due diligence* menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Umum memiliki RKM atau CAR yang rendah. Oleh karena itu perlu

dibagi dalam tiga kategori:

- Bank yang memiliki RKM atau CAR 4 persen ke atas
- Bank yang memiliki RKM atau CAR antara 4 persen dan negatif 25 persen
- Bank yang memiliki RKM atau CAR lebih rendah dari negatif 25 persen

Dari pengelompokan menurut Kategori A, B dan C pada akhir Desember 1998 dari 208 bank setelah dilaksanakan *due dilligence,* adalah sebagai berikut:

Kelompok Bank	**Kat. A**	**Kat. B**	**Kat. C.**	**Jumlah**
1. Bank Persero	-	-	7	7
2. BUSN Devisa	13	31	14	69
3. BUSN Non-Devisa	19	26	14	59
4. Bank BTO	-	-	4	4
5. BPD	12	10	5	27
6. Bank Campuran	12	16	4	32
7. Bank Asing	10	-	-	10
J U M L A H	66	83	59	208

Sasaran pendekatan penyelesaian tersebut setelah pendekatan A_0 (kebijakan pertama menghadapi krisis moneter perbankan), A_1 (pendekatan penyelesaian krisis moneter perbankan pada tahun 1997), A_2 (pendekatan penyelesaian krisis moneter perbankan pada tahun 1998), A_3 (pendekatan penyelesaian krisis moneter perbankan pada tahun 1999) adalah pendekatan pertama dari Fase Ketiga atau Fase Pemulihan. Kita masih akan menghadapi pendekatan penyelesaian selanjutnya sampai pendekatan penyelesaian ke A_m pada tahun "m".

Saya menceritakan masalah perbankan ini secara lebih mendalam untuk menunjukkan bahwa kunci pemecahan permasalahan adalah harus rinci, *the devil is in the detail.* Sebenarnya masih banyak persoalan dan cara penyelesaiannya yang saya perlu sebut, namun dengan ilustrasi penanganan masalah perbankan di atas saya maksudkan untuk memberi sedikit masukan informasi apa yang kita hadapi waktu itu.

Saya hanya dapat memberi beberapa pertanyaan dan permasalahan yang untuk menjawabnya, saya serahkan kepada para pakar dan para menteri yang ikut berperan aktif mendampingi saya, baik sebagai anggota Kabinet Reformasi Pembangunan maupun sebagai anggota BI, anggota Komisi yang bersangkutan di DPR/MPR dan para pegawai negeri baik eselon satu maupun eselon dua yang namanya tidak mungkin saya sebut satu demi satu, namun sangat berjasa dalam melaksanakan pendekatan dan penyelesaian tersebut.

Bagaimana mekanisme pengalihan tagihan bantuan likuiditas terhadap perbankan dari Bank Indonesia kepada BPPN berjalan? Bagaimana mekanisme pelaksanaan program petunjuk pelaksanaan jaminan pemerintah? Apa kewajiban bank yang tidak dijamin? Apa sanksinya? Bagaimana program jaminan terhadap kreditur luar negeri? Bagaimana tata cara pelaksanaan jaminan BI atas pembiayaan perdagangan internasional? Ini adalah beberapa pertanyaan dan permasalahan yang harus dijawab oleh para pakar yang telah saya sebut di atas.

Hanya untuk memperlihatkan sedikit kompleksitas krisis moneter yang berdampak pada krisis politik dan krisis multidimensi di Indonesia, yang harus diselesaikan dengan pelaksanaan pendekatan-pendekatan yang simultan, tanpa terjadinya pertumpahan darah dengan segala konsekuensinya demi tetap berdirinya NKRI yang diproklamasikan tahun 1945.

Bank Indonesia yang sehat dan kuat harus didampingi oleh perbankan komersial yang sehat dan kuat pula. Sebagai masyarakat yang terbesar di Asia Tenggara adalah wajar jikalau pada ujung tombak dunia bisnis perbankan di wilayah Asia Tenggara salah satu bank komersial yang unggul dan besar adalah bank komersial milik Indonesia yang dapat berkembang dan bergerak secara mandiri.

Sejarah perbankan di NKRI sebenarnya sudah lebih dari satu abad usianya, namun asalnya semua berakar di Eropa pada umumnya dan khususnya dari Belanda. Bank-bank Komersial ini, dalam dua dasawarsa pertama setelah proklamasi dinasionalisasi dan ditugaskan melanjutkan pekerjaan dan usaha seperti semula. Namun sekarang yang membawa persoalan adalah perbankan komersial pada umumnya khususnya Badan Usaha Milik Swasta yang sebagaian besar lahir akibat deregulasi perbankan dalam tahun 80-an.

Dengan wawasan tersebut di atas, saya memutuskan dalam rangka reformasi dan penyelesaian masalah perbankan, baik di sekitar Bank Sentral atau Bank Indonesia dan sekitar bank milik pemerintah atau BUMN, bank milik swasta atau BUMS, menyelesaikannya dengan mengambil kebijakan sesuai pemikiran saya melalui pendekatan aproksimasi.

Kebetulan dari beberapa bank milik pemerintah ada empat BUMN yang cocok dan tepat dijadikan satu bank. Baiklah saya jelaskan latar belakang Bank BUMN tersebut sebagai berikut:

1. *Bank Dagang Negara* merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949, namanya berubah menjadi Escomptobank

NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan

2. *Bank Bumi Daya* didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya
3. *Bank Ekspor Impor Indonesia* (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda *N.V.Nederlansche Handels Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit II, dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Ekspor–Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor
4. *Bank Pembangunan Indonesia* (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sektor–sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan

pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata

Untuk implementasi pemikiran dan strategi penyelesaian masalah keempat bank milik pemerintah dan sekaligus menyatukan keempat BUMN tersebut, saya memanggil Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng.

Kepada Tanri Abeng, saya menyampaikan pemikiran dan strategi kebijakan saya, dan meminta masukan yang lebih rinci dan usulan nama seorang putra Indonesia yang berpengalaman dalam usaha perbankan. Yang bersangkutan harus berwawasan jauh ke depan, pragmatis, "tahan banting" dan dapat bekerja cepat, tepat, dan konsisten setia pada sasaran tugas yang diberikan untuk dapat melaksanakan integrasi keempat aset pemerintah menjadi satu BUMN dalam bidang perbankan komersial dan mandiri. Bank hasil penggabungan ini akan saya namakan *Bank Mandiri*.

Secara spontan dan tegas Tanri Abeng menjawab Robby Djohan, yang saat itu sedang menjabat sebagai direktur utama Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. Robby Djohan merupakan pribadi yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang saya sampaikan.

Pertanyaan saya hanya singkat, "Ada orang yang dapat mengganti jabatan Robby Djohan sebagai direktur utama Garuda Indonesia dan siapa orangnya?"

Jawaban Tanri Abeng jelas dan tegas pula ialah Abdul Gani! Pembicaraan tersebut hanya singkat dan terjadi di

pendopo kediaman saya Jalan Patra Kuningan. Saya meminta kepada Menneg BUMN Tanri Abeng untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya mengajak Robby Djohan ke kediaman saya di Kuningan.

Setelah Tanri Abeng meninggalkan kediaman saya, dari tempat yang sama saya menelepon Kantor Pusat *Deutsche Bank* di Frankfurt untuk dapat berbicara dengan pakar dan tokoh muda bidang perbankan, salah satu direkturnya bernama Dr. Josef Ackermann. Ternyata yang bersangkutan tidak berada di kantornya karena sedang berada di London.

Setelah mendapat telepon genggam Dr. Ackermann, saya berhasil berbicara singkat dengannya dan bertanya, "Apakah Anda dapat bertemu dengan saya?"

"Kapan Pak?" tanya Dr. Ackermann.

Sambil bercanda dalam bahasa Jerman saya katakan:"Kalau bisa kemarin!"

Dr. Ackermann menjawab, "Sekarang sudah jam lima sore hari Jumat di London namun saya akan berada di Jakarta hari Senin jam 10 pagi untuk bertemu dengan Bapak."

Saya kenal Dr. Josef Ackermann melalui salah satu anggota pimpinan *Deutsche Bank* Dr. Cartelieri yang sudah lama saya kenal. Dr. Ackermann memberi kesan seorang profesional dalam perbankan dan memiliki wawasan yang meyakinkan dan sikap seorang wiraswasta atau *entrepreneur*.

Nasihat dan bantuan Dr. Ackermann saya butuhkan untuk mempersiapkan lahirnya "Bank Mandiri" menjadi salah satu bank komersial Indonesia yang besar, unggul dan berperan di Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 2 Oktober 1998, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998, Bank Mandiri berdiri. Kemudian, pada bulan Juli 1999, empat bank milik pemerintah yaitu,

Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung dalam Bank Mandiri menjadi kenyataan.

Sejarah keempat bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat bank tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia.

Di lain pihak, pemerintah harus berkonsentrasi pada penyelesaian masalah pengangguran yang terus meningkat jumlahnya, larinya modal ke luar negeri, masalah sosial, masalah sembako, dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Begitu pula inflasi yang menjurus ke hiperinflasi. Semua itu semakin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap keadaan yang tidak menentu dan berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.

Karena itu, saya membagi tugas para pakar dan teknokrat di pemerintah dan di BI, agar saling berkonsultasi dalam menghadapi permasalahan masing-masing. Walaupun saya juga menekankan bahwa hal itu terbatas hanya dalam bentuk konsultasi saja. Para anggota atau pakar dalam kabinet bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Para anggota atau pakar dalam pimpinan Bank Indonesia hanya bertanggung jawab kepada Gubernur Bank Indonesia. Sementara Presiden RI dan Gubernur BI secara berkala dan kalau perlu tiap saat dapat berkonsultasi. Hal ini saya laksanakan tiap minggu.

Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintah murni datang dari keyakinan saya dengan pertimbangan bahwa subjektivitas BI tidak mungkin sempurna dan profesional, jika bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kedudukan dan kepentingan politik. Ini bisa mengakibatkan kebijakan profesional Gubernur BI menjadi tidak tepat karena kendala

politik. Sedangkan, BI harus menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi. Artinya, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dalam hal ini dolar AS, harus menentu dan stabil. Ini hanya mungkin terjadi, jikalau BI dapat bekerja dan berkarya secara objektif dan profesional, serta pertanggungjawabannya diatur oleh Tap MPR dan Undang-Undang.

BI harus berkonsentrasi pada peningkatan dan pemeliharaan kualitas mata uang rupiah, sedangkan pemerintah harus menepati janjinya untuk melaksanakan pemerataan hasil pembangunan secara adil, menciptakan lapangan kerja, mengurangi inflasi, memperbaiki sistem pendidikan, sistem riset dan teknologi dan sistem kesehatan.

Selain itu, masih menjadi tugas pemerintah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional, memacu peningkatan pendapatan negara, melaksanakan pemberantasan KKN, menyempurnakan pembangunan prasarana ekonomi, sistem pertahanan, melaksanakan penegakan hukum, serta sejumlah tugas lainnya.

Keputusan saya untuk memisahkan BI dari pemerintah bukan karena ada tekanan dari IMF atau dari para pakar Penasihat Presiden Soeharto dalam bidang ekonomi. Keputusan itu saya ambil murni berlandaskan pemikiran dan analisis yang sangat rasional objektif.

Untuk diketahui, sebagai Menneg Ristek maupun sebagai Wakil Presiden, saya tidak pernah diajak atau diberi informasi mengenai jalannya dan hasil perundingan maupun adanya permasalahan antara pemerintah dengan IMF.

Kebijakan dan keputusan saya itu semuanya berdasarkan keyakinan bahwa jikalau Gubernur BI duduk di dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, maka objektivitas BI akan menurun dan dapat menjadi salah satu sumber KKN. Hal ini terjadi karena kepentingan dan pengaruh politik tidak selalu sejalan dan menguntungkan kepentingan ekonomi.

Biasanya, pelaksanaan rencana pemerintah harus ditunjang oleh UU dan Peraturan Pemerintah (PP) dan adakalanya, baik UU maupun PP, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Untuk itu, perlu segera dipersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dalam waktu sesingkat-singkatnya harus diproses menjadi UU dan PP. Sejumlah RUU mengenai berbagai hal harus segera diproses menjadi UU.

Dengan kerja keras para anggota fraksi di DPR dan pemerintah, maka menurut perhitungan para pakar, rata-rata 1,3 produk hukum, berupa Tap MPR, UU, PP dan Keppres, tiap hari dapat diselesaikan.

Ini mencerminkan komitmen dan iktikad para wakil rakyat dari anggota fraksi manapun di DPR, untuk bersama dengan pemerintah merealisasikan kehendak rakyat, dalam melaksanakan reformasi secara total melalui jalur hukum. Prinsipnya asal tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu UUD 1945.

Sebagai Presiden, bisa saja interpretasi saya mengenai UU yang sedang berlaku berbeda, namun tetap sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar UUD 1945 dan Tap MPR. Hal ini misalnya, menyangkut gagasan saya mengenai Gubernur BI yang tidak menjadi anggota Kabinet Reformasi Pembangunan.

UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dalam melaksanakan pembangunan dibantu oleh Bank Indonesia. Kemungkinan interpretasi presiden Soekarno dan Presiden Soeharto mengenai ketentuan ini, karena Bank Indonesia berperan membantu presiden, maka gubernur Bank Indonesia menjadi salah satu pembantu presiden. Karena para anggota kabinet dalam pemerintahan adalah pembantu Presiden, maka Gubernur BI menjadi anggota kabinet.

Sedangkan interpretasi saya, karena BI harus membantu presiden dalam melaksanakan pembangunan, maka gubernur BI yang memimpin BI, harus dapat bertindak objektif dan profesional. Berdasarkan alasan seperti telah saya uraikan, maka gubernur BI tidak boleh menjadi anggota kabinet. Landasan hukumnya tetap UUD 1945.

Kebijakan saya ini dikritik habis-habisan dan dinyatakan melanggar UUD 1945. Saya ditakuti-takuti dan dianggap melanggar UUD. Namun saya tidak takut dan tetap berkeyakinan bahwa Bank Indonesia harus dipisahkan. Jika ada yang mau menuntut, silakan saya dituntut dalam Sidang Istimewa MPR nanti.

Jika memang akibat kebijakan itu dibutuhkan Undang-Undang, maka akan saya tugasi para pakar untuk segera menyempurnakan UU yang berlaku dengan menyusun RUU lalu memprosesnya di DPR menjadi UU baru.

Karena itu, saya menelepon Kanselir Jerman, Dr. Helmut Kohl untuk meminta bantuan agar menugasi seorang tokoh dan pakar dari Jerman yang berpengalaman dalam urusan Bank Sentral. Pakar ini saya harapkan akan memberikan nasihat dan konsultasi kepada para pakar di Indonesia dalam bidang yang sama. Tokoh yang paling berpengalaman menangani Bank Sentral di Jerman adalah Prof. Dr. Helmut Schlesinger, mantan Gubernur *Deutsche Bundesbank*. Dialah yang ditugasi oleh Kanselir Helmut Kohl untuk segera menemui saya di Indonesia. Saya juga perlu memberikan penghargaan kepada Prof. Dr. Wolfgang Kartte, mantan Presiden Badan Anti-Monopoli Jerman yang banyak memberikan masukan kepada saya dalam hal Ekonomi Kerakyatan Berorientasi Pasar.

Selama lima bulan RUU tentang BI dibahas di DPR dan Prof. Dr. Schlessinger bersama seorang pakar yang didatangkan oleh IMF dan pernah aktif mengikuti proses

tanya jawab di DPR. Akhirnya tanggal 17 Mei 1999, RUU tentang BI dapat diterima dan disahkan oleh para wakil rakyat di DPR menjadi UU.

Berkenaan dengan masalah ekonomi dan perbankan, ada dua hal yang sangat saya pahami, yaitu prinsip dasar kredibilitas dan prediktabilitas seseorang atau masyarakat.

Prediktabilitas mungkin dalam bahasa Indonesia diartikan dapat diperhitungkan atau dapat ditentukan. Misalnya *unpredictable* itu artinya tidak dapat diperhitungkan atau tidak dapat ditentukan atau tidak menentu. Predictable atau menentu, diartikan bisa diperhitungkan. Kalau dia tidak menentu, berarti dia tidak mungkin dapat diperhitungkan.

Orang bisa kredibel, tetapi tidak menentu. Misalnya, orang itu perilakunya baik, kualitas iman dan takwanya baik. Apa yang dia katakan benar. Apa yang dilaksanakan selalu baik dan jujur, sehingga dalam pergaulan menyenangkan, sopan dan pintar, pokoknya sangat kredibel.

Namun, dalam pekerjaan, orang itu tidak konsisten sesuai dengan harapan, prestasinya tidak konstan dan susah diramalkan, bahkan sering mengecewakan. Berarti yang bersangkutan dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak menentu atau tidak prediktibel. Dia tidak mempunyai prediktabilitas.

Dapat dipahami jikalau dengan orang yang kredibel, tetapi tidak prediktibel, orang senang berkawan tetapi menghindarinya untuk bekerja sama.

Sedangkan, orang yang tidak kredibel tetapi mempunyai prediktabilitas, orang tidak mau berkawan, tetapi masih mungkin jika bekerja sama, bisa bekerja saling menguntungkan.

Yang paling baik adalah berkawan dan bekerja sama dengan orang yang kredibel dan prediktibel.

Pemimpin harus dapat mengambil keputusan dengan

cepat dan tepat waktu. Ia harus dapat memanfaatkan dan melaksanakan momentum yang diberikan. Kalau kesempatan itu hilang, itu dapat diibaratkan dengan rangkaian kereta api yang telah lewat.

Memang, tiap orang memiliki sifat dan karakter sendiri-sendiri sehingga dapat selalu gagal atau selalu berhasil memanfaatkan momentum. Menguasai teknologi, memiliki *knowledge* dan mengetahui *knowhow* adalah prasyarat minimum yang harus dipenuhi namun tidak mencukupi. Selain prasyarat tersebut, orang harus berani mengambil risiko yang dapat diperhitungkan, mengambil keputusan cepat, jelas, dan tepat waktu secara profesional, dapat memanfaatkan kesempatan dan momentum yang diberikan. Akumulasi pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks secara serentak, sangat menguntungkan.

Adakalanya, orang itu sama sekali tidak kredibel. Perilaku, penampilannya, atau latar belakang keluarganya pun tidak menunjang kredibilitasnya. Tetapi, kalau dia sudah mengatakan sesuatu, maka dia akan melaksanakannya. Janji yang telah dia buat, dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan jadwal. Kualitas kerjanya pun tinggi, karena dia mempunyai mampu mengelola, mengendalikan dan mengimplementasi janji-janji yang telah dibuat.

Itu semua dapat terjadi karena dia ditempa oleh keadaan sehingga telah memiliki akumulasi pengalaman banyak. Karena itu, dia mampu mengerti dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan. Semua yang dia katakan, dilaksanakan sesuai dengan jadwal walaupun dia tidak kredibel.

Dengan tipe pemimpin seperti ini, orang mau melakukan bisnis dengannya, sebab kalau dia menandatangani suatu perjanjian dia akan melaksanakannya.

Orang masih dapat melakukan perhitungan dengan

jenis pemimpin tipe seperti ini. Kalau menguntungkan, orang membuat kesepakatan. Jikalau tidak, orang tidak mau. Orang masih mau melakukan negosiasi. Pemimpin tersebut biasanya keras, susah, tetapi prediktibel. Dibandingkan dengan tipe pemimpin yang kredibel, tetapi setelah membuat perjanjian, tidak mampu melaksanakan kontraknya.

Saddam Hussein, misalnya, sama sekali tidak kredibel, tetapi ia masih prediktibel. Orang masih mau membuat kesepakatan dengan dia. Kesimpulannya, jikalau mau memanfaatkan peluang dalam melakukan sebuah bisnis, seseorang haruslah memerhatikan kredibilitas dan prediktabilitas sesuai definisi dan penjelasan di atas.

Sangat saya sadari bahwa kredibilitas yang dimiliki Pak Harto dulunya sangat tinggi, namun menjelang krisis moneter, merosot tajam. Hal ini tidak lepas dari perubahan pertarungan kekuatan geopolitik global. Namun prediktabilitas Pak Harto tetap tinggi.

Sebelum perang dunia kedua, kekuatan global yang mengendalikan tata kelola dunia dikuasai beberapa negara, sehingga sifatnya multipolar. Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika Serikat adalah negara adikuasa pada waktu itu.

Setelah Perang Dunia Kedua usai, menyusul kekalahan poros Jerman–Italia dan Jepang oleh kekuatan Sekutu, maka tata kelola dunia yang dulunya bersifat multipolar menjadi bipolar, yaitu kekuatan di sekitar Amerika Serikat dan kekuatan di sekitar Rusia atau Uni Soviet.

Kondisi inilah yang memungkinkan sejumlah negara seperti Indonesia, Yugoslavia, Mesir dan sebagainya mampu bergerak di antara kedua kekuatan ini. Akhirnya, didirikanlah kelompok Negara Non-Blok atau *Non-Aligned Countries*.

Kekuatan-kekuatan bipolar tersebut saling berlomba dalam pengembangan dan pembangunan sistem

persenjataan paling canggih. Karena membutuhkan biaya yang sangat tinggi, dan produktivitas Uni Soviet lebih rendah dibandingkan produktivitas Amerika Serikat, maka yang bangkrut pertama adalah Uni Soviet. Uni Soviet memiliki sistem persenjataan yang canggih dan dapat mengimbangi sistem persenjataan Amerika dan sekutunya, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Uni Soviet bangkrut, dan dalam waktu yang cepat mengalami perubahan besar. Uni Soviet terpecah-pecah menjadi belasan negara. Geopolitik global pun berubah, dari sistem bipolar menjadi sistem unipolar.

Akibat perubahan geopolitik inilah, maka upaya yang sebelumnya dilakukan negara-negara yang tergabung dalam kelompok Non-Blok pun menjadi tidak efektif dan tidak ada artinya. Sekarang, yang penting adalah siapa yang berhasil duduk di Capitol Hill dan menjadi penghuni White House di Amerika Serikat, sebab Amerika Serikatlah yang saat ini memegang satu-satunya kekuasaan di dunia. Yang duduk di Capitol Hill ada dua, yaitu para senator dan para representatif, membentuk Kongres. Sedangkan, yang duduk di White House adalah siapa saja yang dipilih langsung menjadi presiden dan wakil presiden oleh rakyat Amerika Serikat.

Demokrasi dan masyarakat madani atau *civil society* sulit dipisahkan satu sama lain, dan manusialah yang berperan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi dan *civil society* sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan dan kehidupan manusia dalam masyarakat. Penguasaan Iptek, masalah kesehatan, pangan, air, pendidikan, prasarana ekonomi, informasi dan komunikasi, pemerataan, sosial, msalah keadilan, dan sebagainya, yang dimiliki suatu masyarakat atau bangsa menentukan kualitas demokrasi dan kualitas masyarakat madani atau *civil society*. Dampak nilai budaya dan nilai

agama pada proses penyelesaian masalah–masalah masyarakat tersebut juga sangat menentukan.

Masyarakat dunia telah memasuki proses globalisasi dan proses penyempurnaan sistem komunikasi melalui internet. Proses penggunaan sistem transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dan terjangkau tersebut, telah menjadikan saling ketergantungan antarmasyarakat dan negara, tidak ditentukan oleh jarak yang memisahkannya.

Kenyataan ini sangat memengaruhi kehidupan di mana saja, termasuk di Indonesia yang sedang menghadapi perubahan dan reformasi kehidupan dengan segala akibatnya. Terasa sekali kebinekaan budaya dan agama yang berperan, namun kelihatan pula bahwa kehidupan dan budaya di Indonesia sudah terbiasa dengan pluralisme.

Semua bergandengan tangan dengan tuntutan yang sama yakni memperoleh kebebasan di samping kemerdekaan yang telah dimiliki: kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan menggerakkan masa untuk memperjuangkan suatu wawasan, kebebasaan pers, kebebasan membeli dan menjual jasa dan barang, dan sebagainya.

Pokoknya bebas dan merdeka. Tuntutan ini wajar, sudah menjadi kenyataan serta dasar proses globalisasi yang memanfaatkan prasarana ekonomi yang mendunia dan semakin canggih.

Persoalannya adalah, berapa biaya yang harus kita bayar untuk melaksanakan reformasi dan transformasi tersebut?

Dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan di kepulauan Nusantara, yang merupakan satu-satunya benua maritim di dunia, hidup ribuan tahun lamanya suatu masyarakat yang memiliki budaya, agama dan kebiasaan yang berbeda. Bhinneka Tunggal Ika, atau

persatuan dalam kebinekaan atau kehidupan dalam toleransi koeksistensi, atau kehidupan dalam suatu sistem yang plural sudah menjadi kebiasan dan budaya masyarakat Indonesia. Ini adalah kenyataan.

Karena itu, saya harus pandai-pandai menyesuaikan kenyataan tersebut untuk melaksanakan reformasi dan transformasi menuju masyarakat madani atau *civil society* yang bermoral, beretika, berbudaya, dan bertanggung jawab, damai, tanpa perang saudara, tanpa pertumpahan darah, dan tanpa perpecahan.

Dalam waktu sesingkat-singkatnya, masyarakat yang tidak punya kredibilitas dan tidak punya prediktabilitas, harus kita kembalikan menjadi masyarakat yang kredibel dan memiliki prediktabilitas dalam kehidupan politik dan ekonomi. Dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangan krisis tersebut di atas, pengembalian kepercayaan adalah kunci utamanya. Langkah awal diarahkan pada pengembalian kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan makin nyatanya tanda-tanda pulihnya kepercayaan pelaku-pelaku dalam negeri, kepercayaan para pelaku luar negeri juga mulai ikut kembali pulih.

Untuk mengembalikan kepercayaan para pelaku ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri, pelaksanaan reformasi kelembagaan di berbagai sektor digulirkan. Dalam kaitan itu, diupayakan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan. Di samping meningkatkan kepercayaan, transparansi kebijakan juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan.

Dengan pulihnya kepercayaan secara bertahap, maka nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil, secara bertahap membaik, dan akhirnya mencapai tingkat wajar. Karena melemahnya nilai tukar rupiah adalah salah satu penyebab

terpenting inflasi saat ini, maka menguatnya dan menjadi stabilnya nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar, akan meredam tekanan inflasi, sehingga laju inflasi terus menurun. Harga barang-barang pokok serta subsidi yang harus disediakan juga menurun secara bertahap.

Menurunnya inflasi diikuti dengan menurunnya tingkat suku bunga. Bersama-sama dengan mulai berhasilnya pembenahan perbankan dan makin banyaknya para pelaku ekonomi yang mulai merasa aman, tenteram dalam melakukan kegiatan sehari-hari, penurunan tingkat suku bunga akan mendorong bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri.

Untuk itu, penegakan hukum dan penyesuaian Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan semua produk hukum yang menunjang reformasi harus segera dihasilkan.

Di sini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Government Organisation (NGO)* harus berperan aktif di samping peranan partai politik yang ada dan akan lahir.

Harapan saya berikan kepada lahir dan berkembangnya LSM, yang secara objektif dan proaktif akan menyukseskan reformasi dan transformasi masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani yang kita cita-citakan.

Kenyataannya, dalam proses reformasi dan transformasi di Indonesia, sejak awal LSM sudah dan semakin berperan. Tokohnya pun sudah lahir dan sudah biasa bergerak dalam masyarakat yang plural. Ini semua menguntungkan reformasi yang sedang kita alami. Bisa saja suatu ketika tokoh-tokoh LSM tersebut dipilih langsung oleh rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memimpin masyarakat madani Indonesia, bukan harus tokoh politik. Mengapa tidak?

Ternyata, di dunia Barat setelah perang Dunia II dan Perang Dingin berakhir, peran LSM terus berkembang dan menentukan. Khususnya dalam perubahan sistem multipolar menjadi bipolar dan sekarang tampaknya menjadi unipolar. Mungkin akan kembali ke multipolar lagi dalam suatu masyarakat yang plural?

Masalah yang saya hadapi adalah dua: *Pertama,* perbedaan antara miskin dan kaya atau kesenjangan sosial atau *social gap* yang bertambah besar. *Kedua,* perbedaan budaya yang memengaruhi interpretasi nilai moral, nilai etika, nilai kebebasan, nilai kemerdekaan, bahkan nilai tanggung jawab. Sebagai contoh, seorang yang beragama Katolik di Brasil berbeda perilakunya dengan orang yang beragama Katolik di Italia atau di Irlandia. Demikian pula perilaku seorang beragama Islam di Indonesia, berbeda dengan perilaku orang Afghanistan atau China yang beragama Islam. Pengaruh lingkungan dan budaya ternyata sangat menentukan dalam interpretasi dan implementasi nilai-nilai agama dalam masyarakat.

Masalah yang saya hadapi adalah masalah dasar, yakni masalah interpretasi hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban asasi manusia (KAM) yang menurut keyakinan saya sangat tergantung dari budaya dan kualitas hidup masyarakat, termasuk GNP per kapita. Tentunya, suatu masyarakat seperti Indonesia yang memiliki GNP per kapita hanya sekitar 3 persen dari GNP per kapita masyarakat Barat yang budaya dan agamanya mayoritas Kristen, sedangkan di Indonesia budaya dan agamanya mayoritas Islam, menghadapi masalah tersendiri dalam penilaian dan interpretasi kebebasan, demokrasi, HAM dan KAM dalam melaksanakan reformasi.

Piagam PBB tahun 1945 diawali dengan penegasan kembali kepercayaan pada HAM, penghormatan hak

manusia secara personal, pada hak-hak yang sama antara pria dan wanita, dan pada negara.

Yang paling penting di antaranya adalah Deklarasi Universal HAM (1948), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Sipil bersama dengan Protokol Opsional (1976), serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1976).

Semua itu dikenal dengan Pernyataan HAM Internasional, dan ketiga instrumen tersebut merupakan penguji dalam menafsirkan pasal-pasal tentang HAM dalam Piagam PBB.

Kita tahu bahwa anggapan HAM itu universal adalah sangat kontroversial. Apa yang dianggap sebagai HAM bagi sebuah masyarakat, mungkin dianggap sebagai antisosial oleh masyarakat lain, karena standar dan nilai relatif tergantung kebudayaan yang menjadi sumbernya. Asumsi ini didasarkan pada logika "relativisme budaya" sebagai berikut:

- HAM berkaitan dengan keyakinan moral
- Keyakinan moral ditentukan oleh komitmen budaya
- Komitmen budaya pada tingkat yang sangat penting dipengaruhi oleh agama
- Komitmen-komitmen tersebut berbeda secara fundamental antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain
- Oleh karena itu interpretasi HAM pasti berbeda secara mendasar pada berbagai kebudayaan

Ternyata dalam menginterpretasikan nilai-nilai HAM untuk reformasi, masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh logika "relativisme budaya" dalam mengidentifikasi norma dan rekomendasi HAM. Sangat disayangkan bahwa KAM secara resmi belum diakui sebagai

pengimbang HAM oleh PBB. Semua kenyataan tersebut di atas jelas harus diperhitungkan dalam melaksanakan reformasi di Indonesia.

Berbeda dengan masyarakat Barat, masyarakat di negara-negara berkembang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan secara khusus tergantung pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ini telah memperkuat kohesi sosial untuk bersama-sama mengatasi tantangan-tantangan sulit secara kolektif.

Apakah perilaku komunal ini merupakan khas perilaku masyarakat negara berkembang? Apakah perilaku individualisme merupakan khas Barat?

Reaksi dan interpretasi masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai tersebut banyak persamaannya, namun lebih banyak lagi perbedaannya.

Untuk menutup perbedaan nilai-nilai tersebut dibutuhkan banyak diskusi, banyak pengertian yang dapat menghasilkan toleransi antara eksponen dan tokoh LSM serta eksponen dan tokoh politik. Oleh karena itu, kebebasan pers adalah hal yang pertama saya berikan.

Peran dan pengaruh LSM, khususnya di pusat-pusat kekuasaan di Washington, Paris, London, Berlin, Tokio, Beijing dan Mesir, meningkat dan harus saya perhatikan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan reformasi. Globalisasi dan terciptanya masyarakat madani yang memiliki lebih banyak informasi membuahkan saling ketergantungan antarnegara dan bangsa. Pusat-pusat kekuasaan tersebut saya beri perhatian khusus, karena pengaruh pada kehidupan sosial dan budaya-agama dalam masyarakat Indonesia cukup besar.

Posisi, kedudukan, dan peran LSM di pusat-pusat kekuasaan tersebut makin menjadi penting, sedangkan LSM

tersebut pun berada dalam arus globalisasi. Distorsi atau salah pengertian yang dapat disebabkan oleh kedua faktor, *social gap* dan *cultural gap* tersebut, dapat secara tidak sadar dan tidak sengaja bisa terjadi.

LSM di Indonesia bisa saja berbicara dengan LSM mancanegara dan memanfaatkan istilah yang sama, namun dengan pengertian yang berbeda, dan dapat pula bertentangan. Bahkan, pengertian masyarakat luas mengenai istilah yang dimanfaatkan oleh LSM nasional, dapat sama sekali berbeda dan kontra produkif bagi reformasi politik dan ekonomi di Indonesia.

Jika awalnya negara-negara yang tergabung dalam kelompok Non-Blok bisa memainkan posisi penyeimbang, maka sekarang posisinya digantikan oleh kelompok LSM. Tanpa disadari, perubahan sudah terjadi.

Segala aktivitas harus dibiayai, demikian pula aktivitas LSM. Siapa yang membiayainya?

Untuk partai politik, sudah cukup jelas. Yang membiayainya adalah mereka yang bersimpati kepada wawasan politik partai.

Bagaimana dengan LSM? Bisa dibiayai oleh pemerintah, organisasi multilateral, perusahaan swasta nasional atau perusahaan swasta multinasional.

Oleh karena itu, segala kekuatan yang ada di dunia akan selalu berusaha memanfaatkan atau bekerja sama dengan LSM untuk kepentingan bersama. Saya tidak berkeberatan atas usaha tersebut, dan justru saya anjurkan, asal pelaksanaannya transparan, menguntungkan masyarakat banyak dan tidak bertentangan dengan UUD atau UU dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Inilah yang dimanfaatkan semua pelaku LSM, baik dari golongan kultural maupun dari golongan struktural, untuk melaksanakan program dan rencana masing-masing dalam

memasuki abad pertama milenium ketiga. Di antara mereka ada yang berkeyakinan Indonesia sebaiknya dapat dipecah belah dalam beberapa negara kecil. Ada yang memiliki wawasan untuk memperjuangkan Indonesia menjadi negara sosialis, atau menjadi negara Islam yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagainya.

Melalui LSM, mereka semua mengadakan gerakan di sekitar pusat-pusat kekuasaan di dunia untuk dapat memengaruhi kekuasaan di sekitar Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Pertanyaan yang terus timbul pada diri saya ialah, bagaimana LSM Indonesia, khususnya yang bergerak di Jakarta, dapat mengatasi *social and cultural gap* yang tentunya ada antara LSM mancanegara yang proaktif di Jakarta?

Semua masukan mengenai gerakan dan pemikiran LSM saya perhatikan, ternyata lebih dari 90 persen beriktikad murni membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan wawasan yang pragmatis dan menguntungkan reformasi. Sisanya, kurang lebih 10 persen dari LSM tersebut, kurang jelas wawasannya. Misalnya, mereka menuntut tindakan anti-KKN tetapi gerakannya sangat KKN, dan sebagainya.

Dalam dunia yang cepat berubah dan proses globalisasi, keluar "pelaku-pelaku baru" atau *new players* yang memahami bahwa di masa pasca Perang Dingin, sistem unipolar mengganti "pelaku-pelaku tua" atau *old players* yang secara alamiah menghilang atau *naturally fading away.*

Berdasarkan analisis perubahan geopolitik global itulah, mengapa tiba-tiba Pak Harto kehilangan kredibilitas di mata Pusat Kekuasaan Dunia. Padahal, beliau mempunyai andil dalam menjaga stabilitas dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Pak Harto sesungguhnya sudah sangat memihak pada

kepentingan Amerika Serikat dan Dunia Barat daripada kepentingan Rusia atau Dunia Timur semasa situasi geopolitik global berbentuk bipolar, khususnya ketika beliau menghadapi gerakan komunis di Indonesia.

Tidak ada protes dari mana-mana terhadap reaksi yang diakibatkan oleh tragedi nasional, terhadap golongan komunis dan termasuk dilakukannya penahanan di Pulau Buru kepada anggota dan simpatisan kelompok tersebut.

Begitu juga ketika Indonesia masuk ke Timor Timur, tidak ada reaksi dari dunia internasional, khususnya kekuatan Barat, karena itu menguntungkan kepentingan mereka. Kejadian itu bersamaan dengan revolusi bunga atau *flower revolution* di Portugal yang sangat kiri, dan kejatuhan Vietnam ke tangan komunis.

Jika Timor Timur jatuh ke tangan kelompok Blok Timur di tengah-tengah Benua Maritim NKRI yang anti-Komunis, baik Australia maupun Amerika Serikat tidak akan membiarkan.

Timor Timur bisa dijadikan Pangkalan Kapal Perang dan Kapal Selam Rusia atau RRC, tepat di depan hidung Australia. Tidak heran jika Australia dan Amerika Serikat membiarkan Indonesia masuk ke Timor Timur.

Ketika geopolitik global bergeser dari pola bipolar menjadi unipolar, maka tidak lagi diperlukan kekuatan pengimbang. Yang bisa memainkan dan mengambil alih peran tersebut adalah LSM. Mereka mulai menentukan, sekaligus ikut bermain di tempat-tempat pusat kekuasaan seperti PBB, Capitol Hill, dan White House. *New Left* dan *New Right* mulai mewarnai LSM.

Oleh karena itu, kita pun harus membina berkembangnya LSM yang lebih mengerti budaya dan persoalan negara berkembang, khususnya Indonesia. LSM penting bagi pembangunan nasional dan perkembangan

penerapan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang mengerti dan memerhatikan budaya kita. LSM Indonesia wajar mencari mitra internasional serta bergerak international dan global pula untuk memberi perhatian dan pengertian kepada mereka yang berada di pusat keunggulan dan pusat kekuasaan dunia.

Bahkan ada juga yang memperjuangkan globalisasi yang tampaknya adalah baju baru dari sistem kolonialisme yang pernah merajalela di dunia. Sejak dulu kala, sudah ada globalisasi. Sekarang, dibuatnya lebih sistematis dengan rambu-rambu yang lebih canggih. Di sini LSM harus berperan.

Usia tokoh-tokoh yang berperan dalam sistem bipolar sudah lanjut, bahkan sudah mulai pada menghilang. Adalah hukum alam jika pemain-pemain baru atau *new player* dengan isu-isu baru bermunculan. Banyak pemain baru muncul melalui LSM-LSM.

Perubahan yang berlangsung cepat seperti dijelaskan di atas dapat merugikan bangsa Indonesia yang sedang siap tinggal landas melalui industrialisasi yang berkesinambungan, menciptakan masyarakat Madani yang mengandalkan SDM yang berbudaya, beragama, hidup tenteram, damai, dan sejahtera di Asia Tenggara.

Dalam keadaan demikian, saya sangat menyadari bahwa keadaan ekonomi nasional sangat berperan dan menentukan. Apabila kita mau memperbaiki ekonomi Indonesia, maka satu-satunya jalan adalah melakukan koreksi radikal yang mempunyai dampak positif langsung terhadap prediktabilitas dan kredibilitas kita semua.

Banyak pakar ekonomi nasional dan internasional menyarankan kepada saya untuk membatasi kebebasan tukar dan masuk keluarnya mata uang rupiah dengan alasan yang masuk akal dan rasional. Namun setelah saya pertimbangkan

dan melihat dari segala sudut, maka saya berkeyakinan bahwa setelah lebih dari 30 tahun mata uang rupiah bebas, justru akan mengurangi kredibilitas dan prediktabilitas ekonomi dan nilai rupiah akan menurun dan demikian pula inflasi.

Saya menyadari bahwa lebih dari 60 persen yang memengaruhi pasar adalah biaya sembilan bahan pokok (sembako), biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pengangkutan, dan energi.

Oleh karena itu, saya arahkan perhatian penuh pada usaha mengatasi semua komoditas dan jasa yang saya sebut di atas secara rinci dan sistematis, agar permintaan seimbang dengan penawaran. Akibatnya, harga menjadi stabil dan dapat memengaruhi tahap demi tahap mengubah arah inflasi ke deflasi.

Saya juga sadari bahwa selama Gubernur Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap presiden, maka sering dapat terjadi distorsi karena ikut campurnya presiden dalam menentukan kebijakan Gubernur Bank Indonesia yang tidak selalu menguntungkan ekonomi nasional. Presiden adalah figur politik dan memiliki kepentingan politik, sedangkan Gubernur BI seorang tokoh ekonomi bidang moneter yang perhatiannya harus diberikan untuk menciptakan dan memelihara nilai rupiah yang tinggi dan stabil.

Komitmen kita dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), ILO, dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, harus kita taati. Jikalau ada permasalahan yang timbul, maka perlu segera diselesaikan melalui perundingan kembali dan sebagainya.

Kesadaran tersebut sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Indonesia dan dengan demikian dapat menghentikan *free fall* nilai rupiah terhadap mata uang

dolar AS dan mengembalikan inflasi menjadi satu digit di bawah 5 persen melalui mekanisme ekonomi pasar.

Sementara itu, gejolak moneter yang sedang terjadi telah memberi pengaruh yang semakin berat terhadap kehidupan perekonomian nasional, menurunkan kemampuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan pada umumnya memperlemah ketahanan nasional.

Untuk mengatasi akibat dan pengaruh gejolak moneter tersebut, segera diperlukan program reformasi dan restrukturisasi di bidang ekonomi dan keuangan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya yang ketat, sistematis, dan transparan, bebas dari segala intervensi yang subjektiv.

Untuk hal itu, sebagaimana sebagian telah saya sebutkan, tindakan-tindakan yang saya ambil adalah:

- Dalam waktu 24 jam membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan membuat rencana yang konkret dan pragmatis untuk penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi;
- Memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah dan memberi kedudukan khusus kepada Gubernur BI yang diatur dengan UU dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden;
- Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara dan Perbankan
- Pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) harus dibarengi dengan transparansi, debirokratisasi, dan deregulasi;
- Pemberian kebebasan pers;
- Pemberian otonomi daerah;
- Desakralisasi institusi kepresidenan dan memberi kedudukan dan peran DPR dan MPR sesuai norma demokrasi, dengan berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi;

- Melaksanakan Sidang Istimewa MPR dan menghasilkan Tap MPR sebagai Dasar Hukum Reformasi;
- Menghasilkan Produk Hukum Tap MPR/UU DPR/PP/ Kepres, sebanyak rata-rata 1,3 UU tiap hari, untuk menunjang reformasi;
- Melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dengan organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, IDB, dan ILO;
- Menyelesaikan masalah Timor Timur untuk mencegah kekuatan luar negeri ikut campur, yang dapat mempersulit dan mengeruhkan proses reformasi;
- Masalah Aceh, Irian Jaya, dan Maluku adalah masalah nasional dalam negeri dan harus diselesaikan sendiri dan oleh karena itu tidak dipermasalahkan oleh PBB.

Untungnya, sejak tahun l968, Indonesia telah melaksanakan lebih dari tiga dekade lamanya Rencana Pembagunan Lima Tahunan (Repelita), yang berkelanjutan atas bantuan organisasi multilateral seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Kanada, Jepang, Jerman, Kerajaan Inggris, Prancis, serta yang lain-lain. Bantuan ini dapat memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik.

Industrialisasi yang berorientasi pada pasar, mengacu pada "keunggulan komparatif" dan "keunggulan kompetitif", dapat serentak diterapkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Ini khususnya dilakukan pada agroindustri tradisional yang sudah ada ratusan tahun, serta industri perminyakan dan pertambangan.

Transformasi bangsa secara sistematis menjadi

masyarakat industri yang didukung oleh sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan prasarana ekonomi yang memadai dapat dimulai. Begitu pula agroindustri, kedokteran, serta industri pertambangan dan perminyakan dapat memanfaatkan teknologi yang mutakhir dan teruji.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan program pembangunan, saya pandang perlu meneruskan fungsi dan tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang telah dibentuk oleh Pak Harto pada tanggal 21 Januari 1998 berdasarkan Keppres Nomor 17/1998, dengan melaksanakan beberapa perubahan struktural dan prinsip seperlunya.

Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunan segera berupaya mengatasi krisis, terutama menghentikan kenaikan harga-harga, memulihkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, melaksanakan program jaring pengaman sosial, mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukan restrukturisasi perbankan dan utang swasta.

Untuk hal itu, pada tanggal 28 Mei 1998, saya mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998 mengenai penyempurnaan "Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK)" yang para anggotanya adalah sebagai berikut:

Ketua : Presiden Republik Indonesia.
Wakil Ketua : Penasihat Ekonomi, Prof.Dr.Widjojo Nitisastro.

Anggota:
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
2. Menteri Keuangan

3. Menteri Negara Sekretaris Negara
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara /Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara
6. Menteri Luar Negeri
7. Gubernur Bank Indonesia
8. Ketua Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia
9. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
10. Sebagai Sekretaris Jenderal merangkap anggota: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan adalah melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi dan Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan dibantu oleh pejabat tinggi Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai Penasihat.

Pelaksana harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah koordinasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pengumpulan pendapat dan informasi serta perumusan rencana kebijakan yang perlu ditetapkan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Demi kelancaran tugas DPKEK tersebut di atas, maka pada tanggal 28 Mei 1998, dengan Keppres yang sama, saya bentuk "Pelaksana Harian Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan", untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai *policy* Dewan.

Pelaksana Harian DPKEK terdiri dari:
Ketua :
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Anggota:
- Menteri Keuangan
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas
- Gubernur Bank Indonesia

Ketua Pelaksana Harian DPKEK melaporkan kegiatannya kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Rapat Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan tiap hari Jumat sore, setelah santap siang bersama, saya pimpin sampai selesai.

Setelah sepuluh minggu saya memimpin Rapat DPKEK tiap hari Jumat di Wisma Negara, dan bersama para anggota dewan mendengarkan, menganalisis laporan dan kajian Ketua Pelaksana Harian DPKEK, Ginandjar Kartasasmita, maka saya menyadari bahwa Pelaksana Harian DPKEK harus diperkuat dengan suatu Tim Ahli. Oleh karena itu, saya mengeluarkan Keputusan Presiden No. 128 Tahun 1998 pada tanggal 15 Agustus 1998 tentang pembentukan Tim Ahli yang diperbantukan pada DPKEK melalui Pelaksana Harian DPKEK.

Tim Ahli tersebut, dipimpin oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Prof. Dr. Boediono dengan para anggotanya sebagai berikut:

- Moh. Aryad Anwar, staf ahli bidang pengkajian ekonomi dan keuangan Menko Ekuin
- Soekarno Wirokartono, Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas
- Bambang Kesowo, Wakil Sekretaris Kabinet
- Dono Iskandar Djojosubroto, Direktur Bank Indonesia
- Achjar Iljas, Direktur Bank Indonesia
- Effendi Soedarsono, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Susijati B. Hirawan, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan

Seluruh anggota kabinet, aparatur pemerintah dan organisasi di bawah naungan saya, telah bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya menyelesaikan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Dalam memimpin mereka semua secara langsung atau tidak langsung, tanpa yang dipimpin menyadari atau mengetahui, saya selalu membuat waktu untuk mendengar, membaca, dan mengerti laporan, usul, dan saran penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Saya berpendapat bahwa mereka telah bekerja secara profesional, dan semua hasil yang menguntungkan rakyat adalah karya mereka secara individu atau sebagai satu tim.

Namun jikalau terjadi kesalahan, maka semuanya adalah tanggung jawab dan kesalahan saya. Dengan demikian, tidak perlu ada yang merasa takut atau ragu untuk mengusulkan sesuatu, dan tidak perlu pula merasa bimbang atau kecewa jikalau usul atau saran yang disampaikan tidak saya terima ataupun tanggapi.

Pusat penelitian minyak di beberapa provinsi telah

dipermodern, untuk mendukung meningkatnya kebutuhan pasar dalam negeri.

Untuk substitusi impor dan ekspor, telah dibangun beberapa kawasan industri, antara lain di dekat Jakarta, Surabaya, dan Batam. Tahap awal industrialisasi ini menunjukkan peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dengan segala kompleksitasnya seperti tuntutan kenaikan pendapatan, tuntutan kebebasan, pokoknya tuntutan reformasi total. Tuntutan ini semua, tanpa disadari telah dimanfaatkan oleh beberapa tokoh LSM untuk meningkatkan popularitas dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Industri keunggulan komparatif seperti halnya industri tekstil, pakaian jadi, kayu lapis, sepatu, barang elektronik konsumsi, dan lain-lain mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kita.

Saya sangat menyadari bahwa berbeda dengan keunggulan kompetitif, industri berdasarkan keunggulan komparatif tidak memiliki atau tidak mengandalkan teknologi yang mendalam, serta hanya mengandalkan stabilitas politik dan ekonomi di samping rendahnya upah dan rendahnya biaya operasi perusahaan. Jikalau andalan ini tidak dipenuhi lagi, maka para investor akan memindahkan investasinya ke negara lain tempat persyaratan minimal untuk menjalankan perusahaan dipenuhi dan risiko rendah.

Stabilitas politik dan ekonomi sangat memprihatinkan, sedangkan tuntutan untuk menaikkan upah berlebihan dan tidak proporsional lagi. Ditambah pula beberapa tokoh LSM memanfaatkan momentum, hanya untuk kepentingan jangka pendek dan tidak memikirkan akibat bahwa para investor dapat mengambil alternatif lain, ialah keluar dari Indonesia, karena perusahaan mereka tidak menguntungkan lagi, bahkan mendekati kebangkrutan.

Jikalau ini terjadi, maka pengangguran akan meningkat, pendapatan pun, baik untuk perorangan maupun untuk negara hilang, dan akhirnya kesenjangan sosial atau *social gap* membesar. Semuanya jelas merugikan reformasi.

Perusahaan-perusahaan yang 100 persen milik pemerintah, khususnya dalam bidang produksi, seperti industri dirgantara, industri kapal, industri senjata, dan industri mesin yang semuanya bergabung dalam industri BPIS, memang dengan sengaja diarahkan untuk mengembangkan industri kompetitif yang berbeda dengan industri komparatif, sangat tergantung dari penguasaan teknologi, ditunjang oleh adanya prasarana pengembangan teknologi. Industri semacam ini, termasuk yang dimiliki swasta seperti industri otomotif, telah mengakar, sejingga tidak cepat dan mudah pindah tempat ke negara lain, kecuali memang dengan sengaja direkayasa dan dikehendaki oleh wakil rakyat di DPR/MPR dan Presiden.

Melalui Repelita yang berkesinambungan, dari GNP per kapita hanya 62 dolar AS, kita telah memiliki GNP per kapita 1135 dolar AS pada tahun 1996. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun dari GNP per kapita antara 11 persen dan 12 persen, dicapai dalam 28 tahun sejak l968.

Dampak krisis keuangan Asia, bersamaan dengan globalisasi, transparansi, cepat berkembangnya sistem informasi dan pemberitaan yang canggih, telah mendorong banyak perubahan di dunia pada umumnya, dan khususnya di Asia.

Indonesia menyambutnya dengan tuntutan kebebasan, keterbukaan, keadilan, kesejahteraan, ketenteraman hidup, demokrasi, pokoknya semua nilai dasar hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Untuk dapat menikmati kemerdekaan di dalam waktu sesingkat-singkatnya, adalah tuntutan yang wajar dan manusiawi.

Pertanyaannya adalah pengorbanan yang harus kita berikan untuk perubahan tersebut, berapa besarnya dan berapa lamanya? Yang jelas, NKRI harus dipertahankan dan perang saudara harus dihindari. Sejarah telah membuktikan, pengorbanan yang harus diberikan oleh rakyat Amerika Serikat adalah antara lain perang saudara dan kemunduran ekonominya, dengan hasil tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan negara serta membuka pintu proses demokrasi. Di lain pihak, Uni Soviet tidak dapat menghindari perang saudara dan kemunduran ekonomi dengan hasil yang tidak menggembirakan, yakni terpecahnya negara Uni Soviet menjadi beberapa negara sendiri-sendiri, demikian pula nasib negara Yugoslavia.

Saya berjanji dan bersumpah, dengan segala usaha dan doa atas kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah tetap bersama rakyat, termasuk mereka yang berdemo dan menuntut, dan bahkan yang tidak berkawan dengan saya. Saya akan memimpin bangsa Indonesia melaksanakan reformasi yang dapat mencegah perang saudara dan pertumpahan darah, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI, untuk membuka pintu kebebasan dan demokrasi, guna menjadi masyarakat madani yang berbudaya, hidup sejahtera dan tenteram di bumi pertiwi.

Dampak perubahan yang tidak terduga atas perilaku *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah, kalau sebelumnya mengalir masuk, kemudian menjadi stagnan, akhirnya mereka keluar.

Program "Reformasi Pembangunan" pemerintah berhasil menghentikan *free fall* atau jatuh bebas nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat pada Rp15.000 per dolar AS (Juni 1998) menjadi Rp6.700 per dolar AS (Juni 1999). Demikian pula hiperinflasi dari sekitar 78

persen dapat dikembalikan menjadi sekitar 2 persen.

GNP per kapita 1135 dolar AS yang telah dicapai, semula nilainya mundur seperti 12 tahun yang lalu, dapat ditingkatkan nilainya menjadi seperti tujuh tahun yang lalu.

Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan GNP per kapita pertahun sekitar 11-12 persen, maka GNP per kapita sebesar 1135 dolar AS yang pernah dicapai pada tahun l996, insya Allah dengan pengorbanan dan kerja keras seluruh bangsa setelah tujuh tahun, pada tahun 2006, akan kembali.

Lari keluarnya *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat dihentikan dan diubah dari stagnasi menjadi masuk kembali ke dalam negeri. Kemunduran yang terjadi akan menciptakan lebih banyak pengangguran di dalam masyarakat, dan dengan laju pertambahan penduduk yang lebih tinggi, sebagai akibat merosotnya GNP per kapita, akan meningkatlah jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan demikian kesenjangan sosial akan membesar dan mengakibatkan ketegangan serta kecemburuan sosial yang memprihatinkan. Ini semua mempersulit proses peningkatan produktivitas dan berdampak tidak menguntungkan pada daya saing ekonomi nasional. Akibatnya, para investor menjadi ragu, bahkan belum tertarik memasukkan modalnya kembali untuk menciptakan lapangan kerja yang sangat kita butuhkan.

Apakah ini biaya reformasi yang minimal harus dibayar oleh sekitar 220 juta rakyat Indonesia? Sejarah akan membuktikan!

C. Masalah Timor Timur

"Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus, maka Indonesia sebagai bangsa dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu."

"Pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, dan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan damai, dapat dilaksanakan oleh karena Timor Timur tidak masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi 1945."

Untuk menyelesaikan masalah Timor Timur, saya mulai dengan bertanya kepada kita semua: Indonesia itu siapa? *Who is Indonesia?*

Ada yang mengatakan Indonesia adalah yang dahulu namanya Hindia Belanda. Mengapa Hindia Belanda?

Sebelum warga Belanda, warga Portugal, Spanyol, dan Inggris pernah datang dan menguasai wilayah Nusantara. Mengapa bukan wilayah yang pernah dikuasai para pendatang atau para penjajah inilah yang dijadikan tolok ukur penentuan wilayah Indonesia? Apa ada alasan lain?

Alasan Bahasa? Lalu, bagaimana dengan Malaysia dan Brunei, mereka juga bahasanya tidak berbeda jauh dengan Bahasa Indonesia berakar pada Bahasa Melayu. Mengapa bukan wilayah kehidupan "Rumpun Melayu" yang menjadi dasar penentuan wilayah Indonesia? Apa definisi "Rumpun Melayu?" Apakah "Rumpun Melayu" suatu ras atau suatu golongan etnik saja?

Banyak sekali pertanyaan dan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan wilayah Indonesia!

Lalu, ada yang mengatakan, karena Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang hidup di Wilayah *Nederlands Indië* atau Hindia Belanda yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta? Apa perekat rakyat yang begitu heterogen dan begitu beraneka budaya, bahasa, adat istiadat, perilaku dan penampilan?

Apa hubungannya dengan Timor Timur?

Nama Indonesia baru 155 tahun usianya. Pada tahun 1850 seorang tokoh Inggris bernama *George Windsor Earl* berpendapat, bahwa sebaiknya, *ras yang kulitnya sawo matang* diberi nama.

Beberapa pakar Inggris berpendapat, paling baik diberikan nama *Melayunesia* karena bahasanya berasal dari *Bahasa Melayu.* Usul tersebut menimbulkan perhatian dan perdebatan antara para pakar di dunia yang mendalami bidang sosial budaya, sejarah dan sebagainya. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dengan nama *Melayunesia.*

Sekelompok pakar berpendapat bahwa sebaiknya *budaya* dan tidak saja *bahasa* masyarakat yang diperhatikan. *Kerajaan Hindu* seperti *Kerajaan Majapahit* dan *Kerajaan Sriwijaya* yang pernah berkuasa dan mendominasi kehidupan di wilayah Nusantara patut diperhatikan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa lebih tepat diberi nama *Hindunesia.*

Masalah pemberian nama dibahas dalam beberapa makalah ilmiah oleh sekurang kurangnya 12 ilmuwan seperti, Bastian, Snouck Hurgronje dan sebagainya, dan akhirnya nama *Hindunesia* terus berkembang menjadi nama *Indonesia*.

Sejak itulah nama Indonesia lahir.

Lalu, muncul pertanyaan, Indonesia itu yang mana

wilayahnya? *Who and where is Indonesia?* Apakah hanya terbatas pada kawasan bekas koloni Hindia Belanda saja, atau bekas kerajaan-kerajaan Hindu, atau wilayah yang berbahasa Melayu? Apa itu Indonesia?

Untuk dapat menjawab secara objektif pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dikembangkan pendekatan analisis ilmiah sebagai berikut:

Analisis mengenai suatu masyarakat yang dapat berkembang menjadi suatu masyarakat dan negara yang mandiri dan modern mendapat perhatian utama.

Marilah kita perhatikan kehidupan masyarakat di bekas jajahan Belanda, dari sudut HAM dan KAM. Ternyata masyarakat tersebut, tanpa disadari, telah dibagi dalam lima "kasta":

- Kasta pertama adalah masyarakat penjajah pada umumnya warga Eropa dan khususnya warga Belanda
- Kasta kedua diberi kepada peranakan orang-orang Eropa dan keturunannya
- Kasta ketiga, diperlakukan sebagai kelompok menengah dan merupakan kelompok masyarakat bisnis, diberi kepada warga keturunan Tionghoa yang memiliki dan mengembangkan jaringan perdagangan untuk pembangunan wilayah. Ada yang berpendapat di mana ada orang Tionghoa maka tempat tersebut akan makmur. Tetapi, ada yang membantah dan berpendapat bahwa justru karena tempat itu makmur, maka orang Tionghoa datang. Itu suatu polemik yang tidak perlu di kembangkan
- Kasta keempat diisi oleh orang pendatang Asia lainnya yang berasal dari Arab, India dan siapa saja yang datang ke kawasan ini untuk mencari penghidupan
- Kasta kelima dan terendah diberi kepada warga

penduduk asli atau pribumi yang disebut *inlander*

Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian masyarakat mayoritas, maka yang digolongkan sebagai *pribumi* atau *inlander*, dipecah belah lagi oleh penjajah.

Kaum feodal pribumi dipersilakan mengatur dirinya sendiri dan diberi fasilitas untuk mencegah pemberontakan yang dapat diawali oleh gerakan golongan feodal pribumi yang tidak puas.

Kelompok masyarakat yang memeluk agama Islam, didorong untuk terus membaca Alquran agar paham masalah keislaman dan dapat memasyarakatkannya untuk memelihara moral dan etik yang berkualitas demi kehidupan yang tenteram dan damai.

Jikalau pemerintah penjajah melaksanakan "kristenisasi", maka masyarakat terpaksa harus diberi pelajaran membaca dan berbahasa Belanda untuk mampu membaca "kitab Injil".

Akibatnya masyarakat kasta kelima atau pribumi yang pada dasarnya adalah masyarakat multi etnik dengan bahasa, budaya dan adat istiadat yang heterogen dapat dipersatukan oleh bahasa Belanda melawan penjajah. Karena itu, politik pecah belah dan adu domba antara pribumi yang diterapkan oleh penjajah sulit dipertahankan.

Di samping itu, melalui bahasa Belanda, pemikiran–pemikiran intelektual mengenai keadilan, kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan, begitu pula Sosialisme, Marxisme, dan sebagainya, yang sedang berkembang di Eropa, dapat diikuti dan dipahami oleh masyarakat kasta kelima atau pribumi.

Oleh karena itu, proses "kristenisasi" di Indonesia tidak didukung oleh pemerintah penjajah Belanda. Melalui arus informasi dari masyarakat intelektual Eropa ke masyarakat

intelektual pribumi di Benua Maritim karena penguasaan bahasa Belanda, akan membangkitkan rakyat untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme.

Para pendatang hanya memberi perhatian pada pengambilan SDA terbarukan dan tidak terbarukan dengan biaya serendah-rendahnya.

Oleh pemerintah penjajah Belanda, skenario tersebut terus dipelihara, sampai suatu ketika secara evolusi bahasa Indonesia, yang berakar pada *bahasa Melayu*, berkembang dan menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia telah berperan sebagai pemersatu masyarakat di Benua Maritim.

Ketika jumlah orang Eropa dan Belanda asli yang datang ke Benua Maritim melampaui jumlah keturunan peranakan atau "warga indo", maka peran eksklusif kasta pertama mulai menonjol. Hal ini mengakibatkan kecemburuan sosial dari kasta kedua, yang sebelumnya telah menikmati eksklusivitas tersebut. Mereka merasa terpojok karena *previlege* yang mereka nikmati berkurang, sehingga mereka melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini tanpa disadari telah melahirkan dasar pemikiran-pemikiran yang menjurus tentang ke-Indonesiaan.

Salah seorang tokoh Indo yang berada di garis depan gerakan tersebut dan berpikiran maju adalah Douwes Dekker, yang bekerja bahu-membahu dengan dokter Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryoningrat yang berasal dari kelompok feodal di Jawa.

Dari sinilah lahir pemikiran Indonesia yang sekuler. Jadi, pemikiran tentang apa itu Indonesia tidak berkaitan dengan adanya ras Indonesia. Tidak ada ras Indonesia.

Lalu apa yang mengikat mereka? Ikatan mereka adalah kepentingan bersama dan rasa kebersamaan, yaitu sama-

sama merasa dirugikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lahirlah NKRI yang sekuler, namun belum merakyat.

Benih gerakan ke-Indonesiaan mulai merakyat setelah 20 Mei 1908, bertepatan dengan kelahiran Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo, pada mulanya hanya memikirkan kepentingan orang Jawa, telah berkembang meluas. Setelah Jawa, kemudian diikutkan Madura, dan setelah itu diikutsertakan Bali. Setelah itu berhenti, belum terpikir nasib penduduk yang tinggal di pulau-pulau di luar Jawa.

Dalam organisasi Budi Utomo pemikiran-pemikiran yang dirintis oleh Douwes Dekker, Dokter Cipto Mangunkusumo dan Suwardi tersebut terus berkembang. Kemudian pemikiran tersebut dilanjutkan lagi oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo. Pemikiran-pemikiran ini tidak dapat berkembang di tanah air, tetapi justru di Belanda, tempat didirikan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Dari Belanda, nasionalisme Indonesia berkembang dan mendapat reaksi yang positif di Indonesia.

Kajian dan kenyataan tersebut, meyakinkan saya bahwa integrasi Timor Timur masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sukar dipertahankan. Mungkin, Timor Timur semula dibiarkan masuk ke dalam NKRI akibat perubahan sekitar dua kekuatan global.

Pertama, the Fall of Vietnam dan *the Flower Revolution* di Portugal yang dikuasai kelompok kiri.

Kedua, kekhawatiran Timor Timur dapat menjadi pangkalan kapal perang dan kapal udara Blok Komunis di tengah NKRI yang anti-Komunisme dan di depan Australia.

Ketiga, terjadinya vakum dalam kepemimpinan pemerintah Portugal di Timor Timur, yang dapat mengakibatkan destabilisasi daerah jajahan Portugal, sehingga memberi peluang kepada gerakan dan kekuatan

kiri untuk merealisasi terjadinya pangkalan komunis dan Komunisme di Timor Timur.

Namun, sekarang setelah runtuhnya Blok Komunis dan wajah dunia berubah menjadi wajah kekuasaan yang unipolar dan isu utamanya adalah HAM, demokrasi, dan globalisasi, maka keadaan berubah. Peran LSM menjadi lebih proaktif memanfaatkan jaringan informasi yang semakin canggih, menggantikan peran Non-Blok dalam sistem bipolar. Wajarlah jikalau timbul beberapa pertanyaan di benak saya, "Mengapa 'Masalah Timor Timur' yang sudah tidak relevan lagi, dibiarkan berkembang menjadi masalah nasional Indonesia?"

Bukankah proses penyelesaian "Masalah Timor Timur" melalui LSM dapat ditunggangi dan dimanfaatkan oleh gerakan nasional dan internasional dengan program merugikan pembangunan, stabilitas, serta persatuan dan kesatuan NKRI?

Jikalau para anggota MPR dan Presiden Soeharto telah mengambil kebijakan untuk menerima keinginan rakyat Timor Timur, untuk bersama rakyat NKRI melaksanakan pembangunan, karena alasan kebersamaan pernah dijajah oleh masyarakat pendatang, maka alasan tersebut masuk akal dan sesuai jiwa UUD 1945.

Baiklah kita mengikuti secara kronologis perkembangan "Masalah Timor Timur" di dunia internasional sebagai berikut:

Sejak dinyatakan secara legal formal bahwa wilayah Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, melalui UU No. 7/1976 tanggal 17 Juli 1976, status integrasi Timor Timur dengan Indonesia terus saja dipersoalkan masyarakat internasional.

Tanggal 19 November 1976, Sidang Umum PBB menyatakan menolak aneksasi Indonesia terhadap Timor

Timur. Upaya masyarakat Indonesia meningkatkan status hukum, dengan mengukuhkan integrasi Timor Timur ke Indonesia melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978, ternyata tak mengubah pandangan internasional.

Keluarnya resolusi-resolusi PBB yang menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Timur adalah gambaran bahwa integrasi Timor Timur dengan Indonesia masih dipersoalkan masyarakat internasional. Terlepas dari latar belakang sosio-politik situasi perang dingin ketika itu, di mata masyarakat internasional keputusan Presiden Soeharto mengirimkan pasukan ke Timor Timur adalah menyalahi aturan internasional.

Penyelesaian status Timor Timur melalui jalan Referendum sesungguhnya sudah bertahun-tahun diajukan berbagai pihak dalam forum internasional kepada Indonesia, dan juga tokoh rakyat Timor Timur seperti Xanana Gusmao, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo, dan Jose Ramos Horta. Alasan mendasar yang disampaikan adalah karena setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri (*right to self-determination*), yang juga diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Usulan referendum itu pulalah yang didesakkan PBB dan Portugal, dalam perundingan Tripartit dengan Indonesia. Tawaran otonomi diperluas kepada Timor Timur dari Pemerintah Indonesia, ditambah oleh PBB dan Portugal dengan syarat membuka kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk tetap menentukan nasibnya sendiri melalui jalan referendum di kemudian hari.

Hasil sidang Kabinet Bidang Polkam tanggal 27 Januari 1999, menyatakan bahwa jika tawaran otonomi diperluas ditolak rakyat Timor Timur, maka Indonesia akan meminta para wakil rakyat di MPR yang terpilih melalui pemilihan umum mendatang untuk mempertimbangkan kemungkinan

melepaskan Provinsi Timor Timur dari Negara Kesatuan RI melalui Ketetapan Sidang Umum MPR mendatang.

Setelah 22 tahun kita mengalami sejarah kebersamaan dengan rakyat di Timor Timur, ternyata tetap tidak mencukupi bagi rakyat Timor Timur untuk menyatu dengan kita, maka kiranya adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, bila wakil-wakil rakyat yang kelak akan terpilih di MPR, diusulkan untuk mempertimbangkan, agar dapat kiranya Timor Timur secara terhormat, secara baik-baik berpisah dengan Negara Kesatuan RI.

Dari sisi konstitusional, integrasi Timor Timur menjadi bagian Republik Indonesia ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978, tanggal 22 Maret 1978, setelah sebelumnya diatur dengan UU No. 7/1976 tanggal 17 Juli 1976.

Atas dasar itulah, "opsi kedua" harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada wakil-wakil rakyat di SU MPR 1999.

Namun, jikalau ternyata iktikad dan niat kita selama 22 tahun tidak dapat diterima oleh rakyat Timor Timur, maka adalah wajar pula jikalau secara demokratis rakyat Timor Timur diberikan kesempatan untuk menentukan kehendaknya sendiri memilih apakah mau "*terus bergabung bersama Rakyat Indonesia melaksanakan pembangunan atau berpisah secara damai menjadi negara tetangga yang bersahabat*".

Berlainan dengan status masyarakat di wilayah NKRI lainnya, yang karena kebersamaan selama 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda dan berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian diakui oleh seluruh dunia dan PBB.

Saya terkenang lagi pertemuan dengan Uskup Dili, Carlos Filipe Ximenes Belo, di Bina Graha, Kantor Presiden, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 1998. Pada waktu itu saya didampingi oleh Menlu, Ali Alatas; Menhankam, Jenderal

Wiranto; Mendagri, Syarwan Hamid; dan Mensesneg, Akbar Tandjung.

Pada waktu itu, saya berusaha menjelaskan bahwa milenium dan abad yang akan datang adalah abad globalisasi dan abad informasi. Dalam abad milenium tersebut, bangsa dan masyarakat di dunia cenderung untuk berkelompok seperti Eropa, Amerika Utara, ASEAN dan sebagainya.

Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang terdiri atas ratusan masyarakat etnik dengan budaya dan bahasa tersendiri. Oleh karena itu, *Bhinneka Tunggal Ika* atau "satu dalam kebinekaan" adalah semboyan lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya dalam bentuk NKRI seperti sekarang ini, bangsa Indonesia dapat berperan dan menentukan nasibnya sendiri.

Sebagai contoh saya sebut Amerika Serikat yang justru karena kebinekaannya, kebebasan dan demokrasi di atas nilai HAM dapat berkembang menghasilkan produktivitas tertinggi di dunia, sehingga masyarakat Amerika menikmati kualitas hidup yang tinggi.

Seperti telah saya sampaikan, hampir semua (90 persen) keinginan Uskup Belo dapat saya terima dan segera saya penuhi karena merupakan permintaan yang wajar dipenuhi.

Jaminan hak kebebasan penduduk asli untuk bepergian ke mana saja dan menetap di mana saja, tanpa membatasi ruang gerak mereka saya berikan. Memaksa menetap di permukiman yang dibangun di sepanjang jalan-jalan umum tidak saya benarkan.

Mengapa rakyat tidak dapat bergerak di rumahnya sendiri? Alasan keamanan, tidak cukup untuk melarang. Bahkan, rakyat Indonesia dapat bebas bergerak, di seluruh wilyah NKRI atas tanggung jawab sendiri kecuali di daerah pribadi atau daerah militer.

Sebelum Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pembangunan Nasional 1999/2000 dalam bulan Januari 1999 mulai dibahas dan diproses, saya harapkan dapat bertemu dengan Uskup Bello lagi. Keinginan pertemuan pada awal bulan Desember 1998 saya sampaikan pada kesempatan tersebut.

Setelah SI MPR 1998 berhasil dilaksanakan, maka melalui Menteri Dalam Negeri saya mengingatkan Uskup Bello untuk memenuhi janjinya bertemu dengan saya. Satu-satunya alasan yang masuk akal ialah Uskup Bello mungkin kecewa atau sudah putus asa? Mengapa?

Beberapa hari kemudian saya menerima surat dari Perdana Menteri Australia, John Howard, yang mengusulkan agar penyelesaian masalah Timor Timur dilaksanakan seperti penyelesaian bekas koloni Perancis, New Caledonia, yaitu: *New Caledonia dipersiapkan selama lima sampai sepuluh tahun oleh negara penjajah Perancis, untuk memperoleh kemerdekaannya melalui suatu Referendum*. Menurut saya, surat PM Australia John Howard jelas keliru karena mempersamakan kasus New Caledonia dengan kasus Timor Timur. Dan Indonesia dianggap seperti Perancis sebagai penjajah.

Sebagaimana dituangkan dalam Tap MPR No.VI/MPR/1978 oleh SU MPR 1978, permohonan gerakan aspirasi rakyat Timor Timur yang dicetuskan pada tanggal 30 November 1975 melalui Deklarasi Balibo untuk dapat ikut serta melaksanakan pembangunan nasional bergabung dengan NKRI, dapat dipenuhi.

Bisikan hati nurani mayoritas rakyat Timor Timur tersebut, yang akhirnya berhasil memperoleh hak menentukan nasibnya sendiri, dapat diterima rakyat Indonesia.

Konstitusi atau UUD 1945 tidak membenarkan adanya

penjajahan di muka bumi ini. Bangsa Indonesia selalu memberi simpati dan pengertian besar terhadap perjuangan bangsa di manapun, untuk membebaskan diri dari penjajah.

Karena itu, integrasi Timor Timur ke dalam NKRI adalah murni untuk memenuhi permohonan rakyat di Timor Timur ikut serta dalam proses pembangunan yang sedang berjalan di Indonesia. Dengan demikian tidak ada rencana untuk menjajah masyarakat di Timor Timur.

Kalau referendum dilaksanakan, berarti rakyat Timor Timur dipersilakan memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau berpisah sebagai kawan.

Presiden tidak memiliki wewenang untuk menentukan pelaksanaan referendum. Yang berwenang adalah MPR, dengan mengeluarkan TAP MPR khusus untuk pelaksanaan referendum di Timor Timur. Oleh karena itu, saya menolak usul untuk melaksanakan referendum.

Apa yang dilakukan di Timor Timur adalah "jajak pendapat" yang berbeda dengan referendum. Perbedaannya ialah, jika referendum langsung menentukan tetap bersama atau berpisah. Sedangkan jajak pendapat tidak demikian. Referendum memerlukan izin MPR, sementara jajak pendapat tidak, tetapi MPR dapat menolak hasil jajak pendapat tersebut.

Menteri Luar Negeri Ali Alatas, saya tugaskan untuk menemui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan menjelaskan maksud jajak pendapat tersebut. Ternyata kebijakan saya melaksanakan jajak pendapat di Timor Timur dapat dipahami dan dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, sehingga disepakati penandatanganan Perjanjian Tripartit pada tanggal 5 Mei 1999 di New York antara Pemerintah RI, Pemerintah Portugal dan PBB yang diwakili oleh para Menteri Luar Negeri masing-masing dan Sekretaris Jenderal PBB.

Segera akan direalisasikan pula pembentukan Unamet (*United Nations Mission in East Timor)*, yang dibentuk pada tanggal 11 Juni 1999 berdasarkan Resolusi Nomor 1246 Dewan Keamanan PBB sebagai tindak lanjut perjanjian Tripartit.

Unamet bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyukseskan jajak pendapat di Timor Timur secara rahasia, langsung, dan bebas sesuai perjanjian Tripartit. Tugas Unamet berakhir dengan diratifikasinya hasil jajak pendapat oleh SU MPR.

Sekretaris Jenderal Unamet adalah Dubes Jamsheed Marker dari Pakistan dan para anggotanya dari negara-negara Inggris, Spanyol, Australia, Bangladesh, Irlandia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Singapura, dan Kanada.

Memang, beberapa tokoh Timor Timur di Indonesia, di Portugal, dan di luar negeri mengusulkan agar kepada Provinsi Timor Timur diberi Otonomi Khusus dan setelah lima sampai sepuluh tahun, baru referendum dilaksanakan.

Usul tersebut tidak dapat saya setujui. Jikalau saya menerima usul para tokoh dari Timor Timur tersebut, maka pemerintah harus mempersiapkan pelepasan Provinsi Timor Timur. Ini tidak dapat saya pertanggungjawabkan dan saya yakin tidak mungkin dibenarkan oleh SU MPR. Oleh karena itu, saya tidak menindaklanjuti usul tersebut.

Sidang Umum MPR yang akan datang itulah yang berwenang untuk memisahkan Provinsi Timor Timur dari NKRI, tanpa harus didahului oleh suatu referendum. Bukankah integrasi Timor Timur menjadi suatu Provinsi NKRI juga dilaksanakan dengan memanfaatkan TAP MPR No.VI/MPR/1978 sebagai produk hukum SU MPR 1978?

Memerhatikan proses reformasi yang sedang berjalan, Presiden harus menjadi panutan bagi rakyat. Perilaku

Presiden harus mengandung nilai budaya dan nilai agama yang berkualitas tinggi, berarti bermoral dan beretika tinggi. Presiden tidak dibenarkan berperilaku *double standard* atau "tolok ukur ganda" dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan kebijakan. Demikian pula dalam kehidupan berdemokrasi.

Yang menjadi perhatian saya adalah kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk rakyat Timor Timur.

Berkaitan dengan prinsip untuk menegakkan HAM, bangsa Indonesia tidak boleh berlaku *double standard*, tetapi harus menerapkan standar tunggal.

Keputusan saya untuk menyelesaikan persoalan agar rakyat Timor Timur benar-benar dapat menikmati nilai-nilai HAM bersama seluruh rakyat Indonesia, tanpa menerapkan "tolok ukur ganda", dalam menentukan nasib dan masa depan demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia termasuk rakyat Timor Timur.

Bangsa Indonesia yang sangat prihatin kehidupannya tidak dapat dibebani lagi untuk membiayai persiapan pelepasan Provinsi Timor Timur dari NKRI menjadi mandiri. Sejak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah bersama rakyat telah memberikan segala yang terbaik bagi saudara-saudaranya di bumi Loro Sae. Tidak kurang dari 93 persen Anggaran Pembangunan Timor Timur berasal dari APBN, sedangkan sisanya yang 7 persen berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Anggaran tahunan per kapita Timor Timur beberapa kali lipat dibanding anggaran per kapita provinsi lain di tanah air.

Integrasi Timor Timur dengan NKRI didasarkan atas aspirasi rakyat Timor Timur yang dicetuskan melalui Deklarasi Balibo. Rakyat Indonesia menerima keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi, sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/1978. Hal

ini berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang memang sudah menjadi bagian dari NKRI sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dengan pemberian subsidi tiap tahun seperti tersebut di atas, ternyata belum dapat mencukupi untuk membiayai Provinsi Timor Timur menjadi mandiri.

Lima sampai sepuluh tahun mendatang, Indonesia harus menitikberatkan perhatiannya kepada penyelesaian masalah nasional pada umumnya, khususnya masalah reformasi dan pada pengembalian kepercayaan untuk menjadikan momentum pembangunan lebih baik, lebih stabil dan lebih berkualitas dibandingkan dengan proses pembangunan sebelum reformasi. Jikalau penyelesaian Masalah Timor Timur dilaksanakan sesuai usul para tokoh putra daerah Timor Timur dan PM Australia John Howard, maka ketidakpastian atau "*uncertainty*" akan berlangsung terlalu lama dan dapat memberatkan jalannya reformasi.

Memerhatikan masukan melalui telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Presiden Nelson Mandela dari Afrika Selatan, dan pertemuan saya dengan PM Australia John Howard di Bali, maka saya mengambil kesimpulan dan kebijakan sebagai berikut:

- Timor Timur bukan koloni Indonesia dan alasan MPR pada tahun 1978 untuk menerima Timor Timur sebagai Provinsi NKRI adalah karena kebersamaan nasib
- Penyelesaian masalah di PBB mengenai Timor Timur yang berkepanjangan dapat menghambat jalannya Reformasi
- Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden ke-4 RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi

Oleh karena itu, di atas Surat PM John Howard dari

Australia, saya beri disposisi kepada Menko Polkam, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Sekretaris Negara dan menugaskan mereka agar mempersiapkan pelaksaanaan jajak pendapat rakyat Timor Timur. Jajak pendapat tersebut dipersiapkan untuk mengetahui apakah rakyat Timor Timur menerima Otonomi Khusus yang Luas dan tetap bersatu dengan NKRI atau berpisah menjadi rakyat negara tetangga yang bersahabat.

Apa pun hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur nanti, akan saya laporkan kepada Sidang Umum (SU) MPR hasil Pemilu Multi Partai 1999. SU MPR akan menentukan apakah hasil jajak pendapat tersebut dapat diterima atau tidak.

Untuk mencegah terjadinya huru hara dengan korban jiwa dan material di Timor Timur, maka saya memutuskan untuk memberi kepada seluruh wilayah Provinsi Timor Timur status Keadaan Darurat yang berlaku sebelum dan setelah pelaksanaan jajak pendapat dan berlaku sampai keadaan di Timor Timur kembali tenang.

Pilihannya adalah Darurat Militer atau Darurat Sipil. Jikalau dijadikan Darurat Sipil, maka yang bertanggung jawab adalah Gubernur Timor Timur, sedangkan Darurat Militer adalah Panglima Daerah Militer Udayana.

Saya sangat sadari bahwa menjadikan Provinsi Daerah Timor Timur dalam status Darurat Militer tentunya akan memberi kesan yang tidak menguntungkan. Oleh karenanya, saya memutuskan untuk segera mengadakan konsultasi dengan Dewan Keamanan PBB melalui Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.

Di lain pihak, jikalau diberi status Darurat Sipil, maka objektivitas hasil jajak pendapat akan dipersoalkan, karena Gubernur Provinsi Timor Timur adalah putra daerah asli Timor Timur yang tentunya memiliki pandangan dan sikap sendiri yang belum tentu mencerminkan pandangan dan

sikap rakyat asli Timor Timur lainnya.

Saya berpendapat yang paling aman, objektif dan layak dilaksanakan adalah pemberian status Keadaan Darurat Militer dengan Panglima Daerah Militer Udayana sebagai penanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangdam Udayana akan didukung oleh satuan satuan militer yang tidak pernah bertugas di daerah Timor Timur, bahkan pernah bekerja untuk PBB di Afrika atau di mana saja.

Setelah saya memberi penjelasan melalui telepon kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, dan ia meneruskan kepada para Anggaota Dewan Keamanan PBB, maka sehari kemudian, saya menerima telepon dari Sekretaris PBB Kofi Annan yang menyatakan bahwa Status Keadaan Darurat Militer untuk Daerah Provinsi Timor Timur dapat diterima.

Pada kesempatan itu, kami sepakat untuk tidak segera mengumumkan hasil jajak pendapat, namun dirahasiakan dahulu selama 72 jam, untuk dapat mengadakan persiapan pengamanan seperlunya. Dapat dibayangkan, bagaimana reaksi rakyat Timor Timur yang menang maupun yang kalah emosinya akan meluap. Ini jelas akan merugikan stabilitas daerah Timor Timur yang bisa mengakibatkan pengorbanan jiwa dan material.

Saya selalu kembali ke prinsip bahwa konstitusi atau UUD 1945 tidak membenarkan adanya penjajahan di muka bumi ini. Bangsa Indonesia selalu memberi simpati dan pengertian besar terhadap perjuangan bangsa di manapun, untuk membebaskan diri dari penjajahan. Karena itu, sekali lagi, integrasi Timor Timur ke dalam NKRI adalah murni memenuhi permohonan gerakan aspirasi rakyat Timor Timur melalui Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 untuk bergabung dengan rakyat NKRI ikut serta dalam melaksanakan

pembangunan nasional. Dengan demikian tidak ada rencana pemerintah Indonesia untuk menjajah Timor Timur.

Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah Timor Timur. Tidak kurang dari delapan resolusi Majelis Umum PBB dan tujuh resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Timor Timur telah dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa masyarakat internasional tidak mengakui sepenuhnya Timor Timur sebagai bagian dari NKRI. Argumen Indonesia bahwa integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia sebenarnya merupakan wujud kemerdekaan wilayah tersebut dari jajahan Portugal, tidak mendapatkan pengakuan internasional, malah Indonesia dituduh telah melakukan sebaliknya.

Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun keamanan dan ketertiban di Timor Timur memang sering bergolak. Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahap telah mengembangkan kesadaran kebangsaannya bersama bangsa Indonesia. Namun sebagian lagi tidak bersedia melakukan hal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota, yang dibantu oleh organisasi berskala internasional. Secara sistematis telah dilancarkan operasi pembentukan pendapat umum yang memutarbalikkan fakta, dengan mengeksploitasi segala kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan.

Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah Timor Timur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa membuahkan hasil. Sejak tahun 1983, pembicaraan tentang Timor Timur dibahas dalam forum Tripartit antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB. Perundingan Tripartit akhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras

Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke Timor Timur (1986 dan 1991), sebagai bagian dari proses perundingan.

Sementara itu, besarnya perhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan hak asasi manusia telah mengangkat masalah Timor Timur menjadi salah satu agenda internasional yang semakin menonjol, dan klaim Indonesia bahwa masalah Timor Timur sudah selesai tidak dapat dipertahankan lagi. Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Maka perundingan Tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan baru, yaitu konsep Otonomi Luas dengan status khusus bagi rakyat Timor Timur. Gagasan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998, usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

Pemerintah Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timor Timur, namun sebagai solusi antara (transisi), di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak Australia.

Pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status

khusus tersebut masih dirundingkan dalam forum Tripartit di New York, pihak-pihak antiintegrasi —di Timor Timur maupun di luar negeri— melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5-10 tahun dan sesudahnya diadakan referendum apakah rakyat Timor Timur menghendaki otonomi atau memilih kemerdekaan.

Indonesia berpendapat apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai langkah awal menuju referendum, justru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaian secara tuntas. Perbedaan visi yang mendasar antara kelompok prointegrasi dan antiintegrasi akan sangat menyulitkan terbentuknya suatu pemerintahan daerah Otonomi Khusus Timor Timur yang efektif dan akan sangat sulit diharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karena masing-masing pihak akan terus memperkuat barisannya untuk memenangkan referendum. Dalam masa transisi tersebut, masalah Timor Timur juga tetap menimbulkan persoalan bagi Indonesia —baik di dalam maupun luar negeri— tanpa adanya kepastian mengenai suatu penyelesaian yang komprehensif dan damai.

Menghadapi kenyataan tersebut timbul kesadaran bahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatif penyelesaian andaikata tawaran otonomi luas tersebut akhirnya ditolak. Adalah lebih baik apabila masalah Timor Timur dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama, daripada membiarkannya semakin berlarut-larut. Pemikiran-pemikiran itulah yang melatarbelakangi pemberian dua macam opsi oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas.

Hal lain yang mendorong ditawarkannya dua opsi dalam jajak pendapat tersebut adalah karena hal itu sejalan dengan

semangat reformasi, di mana nilai-nilai HAM dan demokrasi sangat dijunjung tinggi. Reformasi adalah bagian terpadu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karenanya, harus dilaksanakan secara konsekuen, murni dan berkesinambungan demi kepentingan rakyat yang merdeka dan bebas. Kita tidak boleh dan tidak mengenal standar ganda dalam menerapkan esensi reformasi tersebut.

Semua pertimbangan tersebut saya pelajari secara cermat dan seksama. Demikian pula, saya minta semua anggota Kabinet Reformasi Pembangunan ikut memikirkannya. Karena itulah, pada tanggal 27 Januari 1999, saya memerintahkan untuk diselenggarakan Sidang Kabinet bidang Polkam yang secara khusus acaranya hanya tunggal, yaitu membicarakan masalah Timor Timur.

Beberapa hari sebelum sidang tersebut, atas dasar disposisi saya pada surat Perdana Menteri Howard, saya tugaskan kepada Menko Polkam, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan/Keamanan, untuk masing-masing melakukan kajian terhadap disposisi tersebut. Kemudian, pada awal sidang kabinet tersebut, ketiga menteri menyampaikan hasil kajian masing-masing secara tertulis dan dijelaskan secara lisan.

Ketiganya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan secara tuntas masalah Timor Timur, memang perlu dilaksanakan jajak pendapat. Mereka juga menyampaikan beberapa catatan, antara lain perlu dipersiapkan dengan baik agar dapat terlaksana dengan jurdil, dan juga agar diperhatikan para prajurit ABRI yang telah berkorban bertugas di Timor Timur.

Kemudian sidang dilanjutkan dengan diskusi oleh semua anggota kabinet yang cukup intensif, sehingga sidang berlangsung sampai 4 jam lebih. Atas dasar keputusan dari sidang kabinet tanggal 27 Januari 1999 tersebut, kemudian

pemerintah mengumumkan dua tawaran opsi bagi penyelesaian masalah Timor Timur, yaitu: melalui jajak pendapat rakyat Timor Timur diberi kesempatan untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran Otonomi Luas atau menolak.

Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-fraksi DPR. Kemudian, diformulasikan dalam perjanjian Tripartit yang ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999.

Pemberian dua opsi tersebut dan juga rancangan naskah perjanjian Tripartit oleh Menteri Luar Negeri telah disampaikan, kemudian dapat dipahami dan diterima oleh DPR (Komisi I). Demikian juga setelah penandatanganan perjanjian di New York, DPR (Komisi I) dapat memahami dan menerima perjanjian tersebut.

Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas — setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam NKRI, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama Indonesia — maka adalah wajar dan bijaksana, jika kemudian Pemerintah RI mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, kiranya dapat mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari NKRI secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan Pemerintah RI ini dikenal sebagai opsi kedua.

Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertama milenium ketiga. Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyat Timor Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.

Walaupun demikian, sangat dirasakan adanya usaha untuk terus mendiskreditkan dan merongrong kredibilitas dan prediktabilitas pemerintah Indonesia, melalui penyebarluasan berita dan isu yang merugikan stabilitas politik dan ekonomi.

Jika dahulu isu internasional yang ditonjolkan terhadap masalah Timor Timur adalah pencaplokan negara kecil oleh negara besar, maka sekarang telah bergeser menjadi pelanggaran HAM. Pokoknya sasarannya jelas destabilisasi Indonesia dengan harapan terjadinya "Balkanisasi" Indonesia melalui suatu revolusi atau perang saudara.

Pada waktu itu, saya tidak pernah menerima laporan dari dalam maupun luar negeri bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Timor Timur. Jika memang ada bukti-bukti pelanggaran HAM secara sistematis yang direncanakan oleh aparatur pemerintah atau ABRI, maka tentu sudah saya bertindak atau memecat para pelanggar HAM tersebut.

Tidak mungkin Dewan Keamanan PBB mau bekerja sama dan bersinergi dengan saya, jika memang pelanggaran HAM dilaksanakan dengan sistematik dan terencana. Tidak mungkin Perjanjian Tripartit ditandatangani. Tidak mungkin Dewan Keamanan PBB memercayai TNI untuk melaksanakan Darurat Militer.

Akhirnya, setelah melaksanakan persiapan secara sistematis, konsisten dengan iktikad yang jujur, jajak pendapat secara demokratis, tertib dan adil siap dilaksanakan. Berbagai pihak terlibat dan menyaksikan jajak pendapat tersebut, yaitu: aparatur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ABRI, Polri, Unamet, Organisasi Multilateral, LSM nasional maupun internasional, termasuk Carter Center bersama kawan pribadi saya Presiden Jimmy Carter dan istri, semua media massa nasional dan internasional. Maka tibalah hari yang dinanti nantikan, yaitu

hari yang akan menentukan nasib rakyat Timor Timur.

Sehari sebelum pelaksanaan jajak pendapat, pada tanggal 29 Agustus 1999, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa Indonesia pada umumnya khususnya rakyat di Timor Timur yang disiarkan melalui Radio dan TV sebagai berikut:

> Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air di manapun berada, khususnya di Timor Timur yang saya cintai.
>
> Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 1999 esok hari, seluruh warga Timor Timur akan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, yakni menerima atau menolak otonomi luas dengan status khusus bagi Timor Timur. Esok merupakan hari yang bersejarah, tidak hanya bagi warga Timor Timur, tetapi juga bagi segenap bangsa Indonesia karena pilihan tersebut berdampak jauh ke masa depan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anak cucu kita.
>
> Mengingat pentingnya peristiwa itu, saya merasa perlu untuk menyampaikan sambutan singkat menjelang pelaksanaan penentuan pendapat tersebut. Kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk mengemukakan serangkaian fakta dan perkembangan sejarah yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia, dan khususnya saudara-saudara kita warga Timor Timur.
>
> Menurut catatan sejarah, seluruh rumpun bangsa di nusantara ini telah dijalin oleh persamaan sejarah, rumpun bahasa dan budaya. Masa itu merupakan masa kejayaan dan keemasan di bawah pemerintahan sendiri. Bukti-bukti otentik mengenai hal ini telah ditulis secara indah oleh sejumlah pengeliling dunia yang singgah di kepulauan nusantara. Menurut mereka, rumpun bangsa —yang mendiami hamparan pulau-pulau di khatulistiwa ini— memiliki sifat ramah terhadap kehadiran bangsa lain, mudah menerima serta memperkaya budayanya dengan nilai-nilai yang datang dari luar.
>
> Namun demikian, zaman kejayaan itu sirna ketika

kekuatan asing datang dan menjajah nenek moyang bangsa kita. Struktur pemerintahan yang ada dihancurkan dengan cara memecah-belah dan mengadu domba sesama warga bangsa. Sendi-sendi perekonomian bangsa roboh, dan penjajah mendirikan mesin perekonomian di atas puing-puing kehancuran ekonomi bangsa. Itulah gambaran suatu masa yang kelam di bumi nusantara pada waktu itu.

Didorong oleh semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian, saudara-saudara kita warga Timor Timur masih harus menanggung beratnya beban penjajahan itu untuk waktu yang lebih lama lagi. Perlawanan demi perlawanan rakyat Timor Timur untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan asing telah ditumpas oleh penjajah.

Banyak di antara kita mungkin tidak tahu atau lupa, betapa besar pengorbanan para pejuang patriot bangsa dari Timor Timur untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sejarah mencatat tidak kurang dari 500 peristiwa perjuangan heroik saudara-saudara kita telah berlangsung di Timor Timur. Perjuangan yang terbesar adalah Perang Manufahi —yang berlangsung tahun 1894 sampai 1914— yang mengakibatkan gugurnya lebih dari 90.000 pejuang Timor Timur. Masih segar dalam ingatan kita, pada tahun 1959 saudara-saudara kita di Timor Timur mengangkat senjata untuk mengusir penguasa kolonial, namun perlawanan itu sekali lagi telah kandas menghadapi kekuasaan kolonial.

Gelombang kemerdekaan bagi rakyat-rakyat terjajah pada dasawarsa tujuh puluhan akhirnya sempat pula menghembus wilayah Timor Timur. Namun demikian, proses dekolonisasi ternyata berlangsung tidak secara sempurna, karena pihak penguasa kolonial meninggalkan Timor Timur begitu saja secara tidak bertanggung jawab, dan membiarkan nasib saudara-saudara kita jatuh ke dalam perpecahan. Akibatnya, perang saudara tidak terelakkan. Dalam keadaan

kekacauan yang memuncak itulah Indonesia memutuskan untuk membantu proses dekolonisasi dengan ikut menjamin hasrat mayoritas masyarakat di Timor Timur — yang timbul atas prakarsa sendiri dan disalurkan secara demokratis — untuk bergabung kembali dengan saudara kandungnya setanah air dan setumpah darah Indonesia.

Sesuai dengan bisikan hati nuraninya, mayoritas Saudara-saudara kita di Timor Timur akhirnya berhasil memperoleh hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975 seraya menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat dan pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan bersejarah itu — tidak hanya atas dasar pertimbangan persamaan sejarah, rumpun bangsa, bahasa dan budaya — tetapi juga atas keyakinan bahwa hal itu merupakan pilihan yang terbaik bagi mayoritas masyarakat Timor Timur. Dalam kaitan ini saya ingin menegaskan kembali sikap dasar pemerintah, yakni bahwa Indonesia tidak pernah mempunyai niat, ambisi, atau kebijakan untuk menduduki wilayah manapun, di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak penggabungan bangsa serumpun yang telah dipisahkan oleh penjajah selama berabad-abad itu, rakyat dan pemerintah Indonesia dengan tulus telah mewujudkan dengan penuh kesungguhan untuk mempercepat laju pembangunan wilayah Timor Timur yang tertinggal dibanding saudara-saudaranya di daerah lain.

Sejak merdeka dan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah bersama rakyat telah memberikan segala yang terbaik bagi saudara-saudaranya di bumi Loro Sae. Tidak kurang dari 93 persen anggaran pembangunan Timor Timur berasal dari APBN, sedangkan sisanya yang 7 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggaran tahunan per kapita Timor Timur beberapa kali lipat dibanding anggaran per kapita provinsi lain di tanah air. Walaupun demikian, niat baik dan upaya yang

ikhlas itu oleh sebagian kelompok masyarakat disambut dengan berbagai upaya pelecehan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan rakyat Timor Timur yang sedang membangun.

Hasrat mayoritas rakyat Timor Timur untuk mengenyam kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bersama-sama dengan saudara-saudaranya dari seluruh tanah air harus tetap kita lanjutkan —dan bahkan kita beri perhatian utama— demi masa depan anak-cucu kita.

Atas dasar kesadaran tersebut, pemerintah Indonesia secara proaktif senantiasa mengusahakan suatu penyelesaian masalah Timor Timur melalui perundingan. Mengingat bahwa permasalahannya terletak di PBB, maka sejak tahun 1983 Indonesia bersedia melakukan perundingan di bawah naungan PBB. Indonesia telah dua kali mencoba menembus kemacetan perundingan dalam upaya penyelesaian masalah Timor Timur, yakni dengan menerima baik usul Sekretaris Jenderal PBB tentang pengiriman suatu misi pencari fakta PBB pada tahun 1991 ke Timor Timur.

Sementara Indonesia telah menyatakan bersedia menerima apa pun hasil laporan dari misi pencari fakta tersebut, pihak Portugal menolak rencana dimaksud pada saat-saat terakhir. Namun demikian, Indonesia tetap memegang keteguhan hati yang kuat terhadap upaya penyelesaian melalui perundingan secara damai dan berbudaya.

Sesuai dengan komitmen itu pula dan didorong oleh semangat serta cita-cita reformasi, maka pada bulan Juni 1998 Pemerintah Reformasi Pembangunan mengusulkan pemberian suatu otonomi luas dengan status khusus, sebagai suatu cara penyelesaian masalah Timor Timur yang adil, menyeluruh dan dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Sesuai dengan kesepakatan yang dicapai, perundingan segitiga di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB

dilaksanakan untuk membahas usulan tersebut. Perundingan tersebut akhirnya berhasil merampungkan dan menyetujui naskah Persetujuan New York mengenai masalah Timor Timur, pada tanggal 5 Mei 1999. Dalam kaitan ini, saya ingin menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia — sesuai isi persetujuan New York tersebut— siap memikul tanggung jawab untuk memelihara dan menjamin ketenteraman, keamanan, perdamaian, dan ketertiban umum yang diperlukan bagi pelaksanaan penentuan pendapat di Timor Timur. Sementara itu, pemerintah Indonesia menaruh kepercayaan penuh kepada PBB untuk melaksanakan tanggung jawabnya, yakni menyelenggarakan penentuan pendapat tersebut secara imparsial, adil, dan jujur.

Bersama ini, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada PBB atas berbagai upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan penyelenggaraan jajak pendapat tersebut. Terima kasih juga saya sampaikan kepada negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat —dalam maupun luar negeri— yang telah membantu persiapan penyelenggaraan dan pemantauan jajak pendapat.

Pemerintah Reformasi Pembangunan sudah bertekad bulat untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia baru yaitu suatu masyarakat yang ditegakkan di atas sendi-sendi hukum, demokrasi, keterbukaan dan hak asasi manusia di bawah suatu bangunan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Di dalam masyarakat baru —atau masyarakat madani— itulah pemerintah juga bersikap teguh untuk memberi hak penuh kepada warga Timor Timur untuk mengatur dirinya sendiri dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di atas benua maritim Nusantara. Seluruh bangsa Indonesia akan bergandengan dengan saudara-saudaranya di Timor Timur untuk mencapai cita-cita bersama, yakni terwujudnya masyarakat madani yang kita cita-citakan.

> Kepada saudara-saudara kita di Timor Timur, saya ingin mengajak untuk tetap bersatu, membangun masa depan yang lebih cerah bersama saudara-saudara serumpun di daerah lainnya. Sampaikan kepada sanak saudara, karib kerabat dan kepada mereka yang saat ini masih berbeda sikap untuk tidak menyia-nyiakan peluang tawaran otonomi luas yang telah disepakati.
>
> Akhirnya, saya mengajak saudara-saudara kita di Timor Timur menjelang hari yang bersejarah bagi masa depan dan nasib kita bersama, untuk sejenak merenungkan kembali secara jernih perjalanan dan pengalaman sejarah kita bersama, seperti yang telah saya coba uraikan secara singkat. Bersamaan dengan itu saya mengimbau kepada saudara-saudara warga Timor Timur — yang saya cintai dan hormati — untuk menjatuhkan pilihan yang tepat dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran serta bijaksana, sesuai dengan hati nurani masing-masing.
>
> Segenap bangsa Indonesia memanjatkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar saudara-saudaranya warga Timor Timur diberi petunjuk dan bimbingan untuk mengambil jalan yang benar, agar — bersama-sama saudara-saudaranya di provinsi yang lain — dapat terus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih berkualitas bagi anak cucu kita di masa depan.
>
> Demikianlah sambutan saya menjelang penentuan pendapat tentang masa depan Timor Timur. Sekali lagi saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa simpati saya kepada segenap saudara-saudara warga Timor Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati perjuangan kita.

Pada hari Sabtu tanggal 4 September 1999 pagi hari WIB, saya menerima telepon dari Sekjen PBB Kofi Annan yang melaporkan hasil jajak pendapat. Ia menyampaikan bahwa Sekjen PBB akan segera memberi konperensi pers untuk

mengumumkan hasil jajak pendapat di Timor Timur yang telah berlangsung secara tertib dan damai sesuai rencana.

Hasilnya mengecewakan bagi pihak yang ingin tetap bergabung dengan NKRI. Namun kita harus tunduk pada keinginan rakyat, yang dinyatakan melalui hasil jajak pendapat.

Sebagai pelaksanaan Persetujuan New York, rakyat Timor Timur telah melaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Pihak PBB telah mengumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 4 September 1999, yakni 78,5 persen menolak dan 21,5 persen menerima, dan dengan demikian mayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas.

Saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencernakan kenyataan bahwa rakyat Timor Timur telah memutuskan untuk berpisah dengan rakyat Indonesia. Namun saya harus terima kehendak rakyat Timor Timur dan demikian pula rakyat Indonesia. Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, saya menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya rakyat di Timor Timur, yang disiarkan melalui Radio dan TV, sebagai berikut:

> Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air di manapun berada, khususnya di Timor Timur yang saya cintai;
>
> Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pelaksanaan jajak pendapat tentang masa depan Timor Timur yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dapat berlangsung secara bebas, aman, tertib, demokratis dan lancar.
>
> Kelancaran pelaksanaan jajak pendapat tersebut didukung oleh partisipasi yang tinggi warga Timor Timur baik yang berada di Timor Timur maupun yang berada di luar wilayah Timor Timur. Walaupun demikian berapa penyimpangan yang terjadi selama jajak pendapat berlangsung telah dicatat dan diajukan untuk selanjutnya diperiksa oleh Komisi Pemilihan PBB di Dili.

Atas kelancaran pelaksanaan jajak pendapat itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh lapisan masyarakat Timor Timur — yang bersama petugas keamanan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa — telah berhasil menciptakan suasana yang tertib sehingga pelaksanaan jajak pendapat dapat berjalan lancar.

Kita baru saja mendengarkan hasil jajak pendapat yang diumumkan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersamaan di New York dan di Dili Timor Timur. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas saudara-saudara kita di Timor Timur ternyata menjatuhkan pilihannya untuk tidak menerima usulan otonomi luas dengan status khusus bagi Timor Timur yang telah ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, karena sudah merupakan pilihan yang demokratis yang datang dari hati nurani mayoritas saudara-saudara kita di Timor Timur — serta telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam naskah Persetujuan New York pada tanggal 5 Mei 1999 — maka pada kesempatan ini saya nyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia menghormati dan menerima pilihan rakyat Timor Timur tersebut. Walaupun demikian, saya juga sangat memaklumi betapa pahitnya hal itu dirasakan oleh lapisan luas masyarakat Timor Timur maupun rakyat Indonesia. Oleh karena itu saya ingin mengajak masyarakat di Timor Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar dan hati yang lapang.

Berdasarkan hasil jajak pendapat tersebut, maka pada tahap selanjutnya pemerintah Republik Indonesia akan melaporkan hasilnya kepada pemegang kedaulatan tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Umum yang akan datang. Sambil menunggu keputusan Sidang Umum MPR tersebut, saya menyerukan kepada seluruh rakyat Timor Timur untuk tetap tenang dan ikut menciptakan ketertiban umum dan menjamin keamanan serta menumbuhkan suasana yang damai agar tahap dan proses

selanjutnya dari jajak pendapat tersebut dapat berlangsung baik, tertib, dan damai.

Sesuai dengan hasil kesepakatan New York pada tanggal 5 Mei 1999, kepada pemerintah Indonesia telah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan isi persetujuan New York tersebut — khususnya dalam memikul tanggung jawab untuk memelihara dan menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan perdamaian — yang diperlukan selama dan sesudah berlangsungnya jajak pendapat sampai masa peralihan pemerintahan berlangsung.

Untuk itu dengan ini saya selaku Panglima Tertinggi menginstruksikan — kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia — untuk menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, serta mengambil segala langkah yang diperlukan sesuai kewenangannya untuk memelihara dan menjamin ketenteraman dan ketertiban umum agar tahap selanjutnya dapat kita lalui dengan baik. Dalam hal ini saya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang mencoba menodai kehormatan bangsa, merongrong kewibawaan pemerintah dan sendi-sendi keamanan dan ketertiban umum di Timor Timur sampai dengan pengalihan kekuasaan — sesuai perjanjian dengan Perserikatan Bangsa Bangsa — atas dasar Ketetapan MPR pada Sidang Umum yang akan datang.

Selanjutnya saya menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri untuk melanjutkan perembukan-perembukan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka perundingan segitiga mengenai hal-hal tindak lanjut seperti yang tercantum dalam Persetujuan New York. Sementara itu pemerintah Indonesia akan tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat sebelum mengalihkan kewenangan pemerintahan atas Timor Timur kepada pihak PBB.

Pemerintah Indonesia dengan tekad yang bulat senantiasa berupaya menegakkan hukum dan ketertiban di Timor Timor. Hal ini telah dibuktikan dengan berhasilnya pemerintah Indonesia dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum sehingga jajak pendapat dapat berlangsung secara tertib dan aman. Namun demikian ketertiban dan keamanan di Timor Timur juga sangat tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat Timor Timur sendiri.

Oleh karena itu untuk mewujudkan suasana damai, aman dan tertib di Timor Timur maka pada kesempatan ini saya mengimbau kepada masyarakat Timor Timur untuk segera melakukan rekonsiliasi dan menempuh cara-cara penyelesaian secara damai yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini saya kemukakan agar kita secara bersama-sama dapat menjaga keamanan dan ketertiban di Timor Timur, dan yang lebih penting lagi adalah agar kita dapat menghindari jatuhnya korban sia-sia dari sebagian besar rakyat yang sebetulnya tidak bersalah.

Jika kita secara bersama-sama dapat menahan diri, mencegah terjadinya perpecahan, pertentangan dan pertikaian yang mengakibatkan pertumpahan darah serta secara bersama menciptakan suasana yang aman dan tertib, maka pilihan yang diinginkan oleh masyarakat Timor Timur insya Allah akan dapat terwujud secara seksama, secara baik-baik, dan tertib serta bermartabat.

Jika semua proses pengalihan pemerintahan dapat kita lalui dengan baik, maka selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemimpin dan rakyat Timor Timur untuk dapat bersama pemimpin dan rakyat Indonesia menciptakan suasana hidup berdampingan secara damai menuju masa depan yang lebih cerah.

Demikianlah sambutan singkat saya sehubungan dengan telah diumumkannya hasil jajak pendapat tentang Timor Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua.

Sebenarnya, sesuai kesepakatan antara saya dan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, konperensi pers baru diberikan pada tanggal 7 September, tiga hari setelah hasil jajak pendapat diketahui, sehingga Pemerintah RI dapat mengambil tindakan preventif dengan menjadikan Provinsi Timor Timur daerah dalam Keadaan Darurat Militer dan memperkuat pasukan TNI dengan pasukan yang belum pernah beroperasi di Timor Timur, tetapi pernah beroperasi di negara lain untuk PBB.

Namun entah mengapa, konperensi pers dipercepat oleh Sekjen PBB, sehingga pemerintah kewalahan menghadapi euforia reaksi pro dan kontra hasil jajak pendapat.

Tanggal 5 September hari Minggu pagi, saya tugaskan Menko Polkam bersama dengan Menhankam/Pangab, Kapolri, Menlu, Mendagri, Mensesneg, dan Ka. Bakin dengan pesawat khusus Hercules berkunjung ke daerah Timor Timur untuk melihat keadaan di lapangan. Setelah mendengar laporan rinci mengenai keadaan di lapangan sebenarnya, maka segera saya tanda tangani Keputusan Presiden yang menjadikan daerah provinsi Timor Timur dalam Keadaan Darurat Militer terhitung mulai hari Senin pukul 00.00 tanggal 6 September 1999.

Kita tidak dapat melakukan antisipasi sebelumnya, karena sesuai kesepakatan dengan Unamet, memobilisasi pasukan sebelum dilaksanakan jajak pendapat, dapat disalahartikan seakan-akan mengintimidasi dan memengaruhi rakyat.

Kerusuhan terjadi karena tidak diberikannya waktu kepada pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya peristiwa yang kita tidak kehendaki.

Betapa pun pahitnya kenyataan ini, namun sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan New

York, Pemerintah dengan rasa berat telah menyatakan menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut.

Pemerintah menyadari dan menekankan bahwa baik Opsi I maupun Opsi II sesuai perundingan Tripartit masih memerlukan persetujuan ataupun ratifikasinya dari SU MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999.

Hal ini tecermin pula dengan jelas dalam teks Persetujuan New York dan dipahami sepenuhnya oleh Sekjen PBB, Portugal maupun masyarakat internasional pada umumnya.

Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yang menolak tawaran otonomi luas, telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timor Timur yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional.

Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan, akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur.

Enam hari setelah Provinsi Timor Timur dijadikan daerah dalam Keadaan Darurat Militer, pada hari Minggu tanggal 12 September 1999, saya memberi pesan melalui Radio dan TV sebagai berikut:

> Dengan memanjatkan puji syukur dan permohonan kekuatan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya sampaikan penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil jajak pendapat Timor Timur.
>
> Seperti kita ketahui, kemarin saya telah mengirim Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI ke Timor Timur untuk memantau dan menilai perkembangan terakhir setelah diberlakukannya Keadaan Darurat Militer, sekaligus mendampingi delegasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
>
> Laporan yang antara lain saya terima dari Panglima TNI, Menko Polkam, Menko Kesra, Menteri Luar Negeri, serta

Menteri Dalam Negeri, dan setelah saya kaji bersama dengan Tim Krisis Timor Timur, maka saya telah mengambil keputusan untuk memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengenai kesediaan dan persetujuan Indonesia untuk mengundang Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, untuk bersama-sama Tentara Nasional Indonesia melakukan kerja sama keamanan *(security cooperation)* di Timor Timur, guna menciptakan kedamaian di Timor Timur, melindungi rakyat yang terkena musibah, dan melaksanakan hasil-hasil jajak pendapat 30 Agustus yang lalu.

Sebelum pemberitahuan tersebut saya telah menelepon Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perkembangan yang terjadi di Timor Timur tersebut. Besok pagi tanggal 13 September 1999, pukul 11.00, di Istana Merdeka insya Allah saya akan mengadakan konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menjelaskan lebih rinci permasalahan tersebut.

Sejak terjadinya gangguan keamanan dan kerusuhan di Timor Timur, telah banyak jatuh korban dan kerugian karena kehilangan tempat tinggal, yang apabila dibiarkan lebih lama, akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu, penderitaan dan kesedihan rakyat Timor Timur harus segera dihentikan. Untuk itu maka saya memutuskan untuk segera memanfaatkan tawaran bantuan Pasukan Pemelihara Perdamaian dari negara-negara sahabat kita melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejak menerima jabatan, saya senantiasa berusaha untuk melaksanakan demokratisasi, menegakkan supremasi hukum, menstabilkan perekonomian, dan promosi serta penghormatan hak-hak asasi manusia. Sikap kita mengenai Timor Timur juga didasarkan atas pendirian tersebut. Karena itulah, dengan penuh rasa tanggung jawab, kita telah memberikan dua opsi kepada rakyat Timor Timur yang mendapat tanggapan positif dari seluruh dunia dan juga dari para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat serta komponen-komponen bangsa yang proreformasi. Saya

mengerti bahwa teman-teman kita di seluruh dunia telah memberikan dukungan terhadap sikap kita tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah dukungan dari mayoritas bangsa Indonesia sendiri.

Sejak diberlakukannya Keadaan Darurat Militer tanggal 7 September, TNI telah melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan keadaan di Timor Timur. Namun demikian, harus diakui bahwa mereka menghadapi kendala yang lebih bersifat psikologis daripada bersifat militer. TNI telah berbuat semaksimal mungkin menghadapi suatu keadaan yang kompleks dan rumit, serta kendala-kendala psikologis yang sangat berat, tanpa mengorbankan tanggung jawab mereka terhadap keamanan serta persatuan dan kesatuan bangsa diseluruh tanah air.

Karena itu, kerja sama dengan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas upaya bersama kita untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur secepat mungkin.

Sehubungan dengan itu, saya telah meminta Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk segera terbang ke New York, guna menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan kepada para anggota Dewan Keamanan PBB mengenai posisi kita serta untuk mempersiapkan rincian pelaksanaan pengiriman Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, saya mengharapkan agar seluruh komponen bangsa —terutama para tokoh nasional dan para wakil rakyat— dapat memahami langkah yang saya lakukan tersebut, demi terciptanya kedamaian dan ketenangan warga Timor Timur pada khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Demikian, penjelasan saya dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi perlindungan dan kekuatan untuk membina kehidupan baru di masa mendatang.

Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur —sesuai

dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus— maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, maka pada Sidang Umum MPR 1999 saya akan melaporkan kepada majelis, untuk berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam TAP MPR yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur.

Selanjutnya melalui TAP MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Jajak Pendapat di Timor Timur, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengakui pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 adalah sebagai berikut:

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR V/MPR/1999
TENTANG
PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan arah penyelenggaraan

negara dalam waktu lima tahun mendatang, untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945;

bahwa krisis multi dimensi yang melanda bangsa Indonesia saat ini, perlu segera diatasi melalui reformasi di segala bidang, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia bangkit kembali dan memperkukuh kepercayaan diri atas kemampuannya;

bahwa berhubung dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menetapkan Ketetapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, selama lima tahun ke depan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang.

Mengingat :

Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 3 Undang Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Memerhatikan :

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR Republik Indonesia, telah membahas Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 memutuskan pada Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum MPR tahun 1999 sbagai berikut:

M E M U T U S K A N
Menetapkan:
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS GARIS BESAR HALUAN NEGARA TAHUN 1999-2004

Pasal 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur;

Pasal 2

Menyatakan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak berlaku lagi

Pasal 3

Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/

MPR/1978 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah selama kurun waktu bersatunya wilayah Provinsi Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia.

Pasal 4

Pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional.

Pasal 5

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk:

bersama-sama dengan Badan-badan Internasional yang terkait mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur atas akibat yang timbul dari pelaksanaan jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;

mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.

Pasal 6

Segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

Wakil Ketua,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,
Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua
H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,
Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,
Hari Sabarno, S.I.P., M.B.A., M.M.

Wakil Ketua,
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,
Drs. H.A. Nazri Adlani

D. Otonomi Daerah

Karena lebih dari 90 persen rakyat Indonesia hidup di daerah, menjunjung tinggi nilai dan arti kedaulatan rakyat dan demokrasi, pemberian otonomi kepada daerah tidak identik dengan membuka pintu pelaksanaan federalisme. Yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas SDM sebagai andalan pembangunan daerah dan wilayah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Jikalau kita benar mau melaksanakan apa yang tersirat di dalam UUD 1945, mengenai kedaulatan rakyat maka berarti kita harus lebih memerhatikan masalah dan kepentingan daerah. Karena di sanalah sebagian besar hidup rakyat Indonesia. Tidak dibenarkan lebih cenderung ke kepentingan pusat atau DKI yang hanya mencerminkan sekitar 10 persen jumlah rakyat Indonesia.

Memang dalam perencanaan, kita selalu merencanakan untuk seluruh NKRI. Namun pada kenyataannya tanpa disadari kita lebih mengetahui mengenai kebutuhan dan permasalahan sekitar Jakarta tempat di mana para pimpinan nasional tinggal dan bekerja, dibandingkan dengan permasalahan di daerah.

Walaupun demikian sebagian besar dari pimpinan, tokoh, teknokrat, teknolog dan pakar nasional tidak berasal dari Jakarta. Bahkan mereka berasal dari daerah. Masukan yang mereka peroleh sebagian besar melalui laporan tertulis ataupun kunjungan ke daerah.

Wajar kita bertanya apakah kita benar dapat menghayati dan menjiwai kehidupan di daerah pada umumnya khususnya kehidupan di desa bahkan kehidupan dan permasalahan yang dihadapi sebagian besar rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan?

Saya harus mengakui, bahwa dengan banyak fantasi dapat saya mengerti dan merasakan persoalan mereka. Namun sejauh mana perkiraan dan hasil analisis saya mendekati keadaan sebenarnya?

Bisa saja terjadi bahwa pada suatu ketika presiden RI yang dipilih adalah para tokoh yang pernah sukses memimpin daerah, misalnya gubernur dari salah satu provinsi. Ini sudah terjadi di Amerika Serikat, seperti Presiden Reagan, Presiden Clinton, Presiden Bush, dan seperti di Jerman Kanselir Helmut Kohl dan Kanselir Schroeder. Mengapa tidak?

Kita harus pandai belajar dari kesalahan dan pengalaman masyarakat lain. Bukankah di mana saja sasaran perjuangan adalah sama semua, meningkatkan kesejahteraan dan ketenteraman kehidupan yang bermoral, beretik dan berbudaya? Kita semua manusia dengan panca indera, keunggulan dan kelemahan yang sama?

Ini mungkin salah satu penyebab mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Tentunya *foreign direct investment* (FDI) lebih tertarik melaksanakan investasinya di daerah yang memiliki prasarana ekonomi, prasarana pendidikan, prasarana iptek dan prasarana media informasi dan sebagainya yang paling sempurna, untuk dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya investasi mereka. Makin jauh letak provinsi dari Jakarta, makin rendah PAD-nya.

Ironinya provinsi yang menghasilkan sumber daya alam yang banyak, seperti Provinsi Riau, Kalimantan dan Irian Jaya memiliki lebih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dibandingkan dengan mereka yang hidup di DKI Jakarta.

Kenyataan ini meyakinkan saya untuk melaksanakan proses desentralisasi yang berarti memberi otonomi kepada

provinsi, namun tetap dalam konteks NKRI, jadi bukan menciptakan Negara Federal Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan agenda reformasi, saya juga memiliki komitmen untuk memberikan kebebasan kepada seluruh bangsa Indonesia dan tidak hanya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Yogyakarta dan sebagainya, melainkan seluruh pelosok tanah air.

Di setiap pelosok desa di manapun letaknya harus diberikan hak dan kewajiban yang sama, yakni kemerdekaan dan kebebasan yang berbudaya dan bermoral. Praktik tolok ukur ganda, tidak dibenarkan.

Walaupun terdiri dari ratusan kelompok etnik yang tersebar dalam ribuan kepulauan kecil maupun besar, penduduk Indonesia tetap memiliki kepentingan dan nasib yang sama ialah melepaskan diri dari tekanan dan penderitaan akibat penjajah Belanda selama 350 tahun.

Pemerintahan Orde Baru memang memiliki dasar pemikiran Pembangunan Nasional bernama "Trilogi Pembangunan". Artinya, proses pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus dinikmati merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga stabilitas politik dan ekonomi terjamin pula.

Pembangunan harus tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu tetapi sekaligus menyebar merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Namun, sangat disayangkan, kenyataan di lapangan dasar Pemikiran tersebut tidak terjadi:

- Kesenjangan antara pusat dengan daerah
- Kesenjangan antara golongan masyarakat
- Kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa

Jakarta masih menjadi pusat segala-galanya. Sebagai

ibukota negara, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan, pusat lembaga keuangan dan pusat bisnis, pembangunan daerah berlangsung di bawah pengaruh DKI Jakarta.

Seorang pengusaha harus dapat membangun hubungan baik dengan pengambil keputusan di Jakarta, terutama bisnis berskala menengah dan besar.

Pada umumnya pengusaha besar berdomisili di Jakarta. Begitu pula dalam hal kenaikan karier pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif berdomisil di Jakarta. Jalannya akan mulus jika didukung "orang kuat" di DKI Jakarta. Jadi, kondisi yang terjadi bukannya pembangunan daerah tetapi pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya.

Krisis moneter mengakibatkan krisis kepemimpinan dan krisis ekonomi yang memprihatinkan. Mulai timbul kesadaran untuk merevisi kebijakan pembangunan yang sangat Jakarta sentris.

Ketika sumber daya yang dimiliki pemerintah pusat kian berkurang dan tuntutan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan semakin meningkat, mau tidak mau pemerintah pusat harus bersedia melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan.

Apalagi terungkap bahwa sejumlah daerah yang menjadi pemasok sumber daya pembangunan di Indonesia ternyata masyarakatnya tetap dalam kondisi kekurangan. Gugatan ke pemerintah pusat pun semakin kuat. Pembagian porsi kue pembangunan dinilai tidak adil.

Untuk memperbaiki ketimpangan pemerataan hasil-hasil pembangunan, saya selalu mendukung adanya perbaikan sejumlah peraturan yang dapat lebih memberdayakan pembangunan di daerah sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah terhadap proses perubahan yang diusulkan oleh para pemimpinnya.

Ini salah satu alasan, mengapa sebelum ini saya mendapat kepercayaan memimpin pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan merencanakan pembangunan beberapa Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet) di bagian Timur Indonesia, termasuk Kalimantan.

Pembangunan beberapa Kapet di Barat Indonesia sudah dimulai dengan pembangunan pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya antara lain pulau Rempang, Galang (*Barelang*). Kecuali pulau Bintan, pulau-pulau lainnya sekitar Batam sudah dihubungi satu sama lain oleh enam jembatan hasil rekayasa putra-putri bangsa.

Jembatan yang ketujuh akan menghubungi *Barelang* dengan Pulau Bintan, direncanakan, direkayasa dan dibuat oleh putra-putri Indonesia seperti enam jembatan sebelumnya, sehingga terjadi salah satu pusat keunggulan di daerah strategis selat Malaka dan laut China Selatan yang bernama *Barelangbin*.

Berdasarkan rencana Pertamina, Nisho Iwai (Jepang) dan Bechtel (USA) (1972-1977) dilanjutkan oleh Crux (USA), Otorita Batam bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Dep. PU (1977-1981) rencana induk 25 tahun direkayasa agar sekitar tahun 2006 *Barelangbin* terwujud selesai menjadi pusat keunggulan industri perdagangan, industri perkapalan dan *transhipment*, industri elektronik, industri pelayanan dan industri pariwisata dengan status sebagai provinsi daerah Kota Istimewa, seperti DKI Jakarta. Jika ini tercapai, tugas Otorita Batam selesai dan diambil alih oleh pemerintah daerah.

Rekayasa dan pembangunan lima jembatan di Barelang semuanya berbeda konstruksi dan bentuknya. Ini sengaja saya tentukan agar melalui pembangunan jembatan yang menghubungkan enam pulau tersebut, pengalaman para ahli putra-putra Indonesia sudah berakumulasi.

Tentunya pada pemberian order untuk merekayasa dan membangun semua jembatan dilaksanakan melalui tender dan terbuka hanya untuk perusahaan nasional saja. Mereka dapat bekerja sama dengan perusahaan luar negeri yang berpengalaman. Saya sama sekali tidak akan dan tidak punya waktu untuk turut campur. Yang penting nanti pemenang tender mendapat kesempatan untuk menjelaskan teknis secara rinci kepada saya mengenai jembatan tersebut.

Sementara itu Tim BPPT bersama para pakar dari ITB dan perguruan tinggi lain mempersiapkan penelitian kondisi lahan, lingkungan dan sebagainya, untuk kelak dapat merekayasa jembatan yang menghubungi Surabaya dan Pulau Madura, jembatan yang menghubungi Jawa dan Bali dan akhirnya jembatan yang menghubungi Jawa dan Sumatra.

Jembatan yang menghubungi Madura erat kaitannya dengan pengembangan Pulau Madura. Di Pulau Madura tersebut akan dikembangkan Kapet dan pelabuhan lebih besar dari pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan tersebut direncanakan dibangun di pantai utara Pulau Madura, yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa.

Air tawar yang mengalir dari Kali Brantas atau Bengawan Solo pada hilir sungai tersebut tidak langsung dilepaskan ke laut namun setelah disaring, melalui pipa-pipa air yang besar, disalurkan ke daerah gersang di Pulau Madura.

Pembangunan Pulau Natuna, Pulau Sabang dan Pulau Selayar sebagai pusat keunggulan industri dan perdagangan minyak dan gas (migas), sudah mulai direncanakan berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam bidang perencanaan dan pembangunan Pulau Batam, menjadi *Barelangbin* sebagai Kapet yang dapat kita andalkan.

Khusus pembangunan kepulauan sekitar Maluku dan

Irian Jaya mendapat perhatian untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat keunggulan dalam bidang agroindustri, industri energi terbarukan dan tidak terbarukan dan industri pertambangan yang canggih dan unggul.

Kekayaan dan keindahan alam di satu-satunya Benua Maritim di dunia, dan beranekaragamnya budaya dari ratusan kelompok etnik yang hidup di dalamnya, harus dapat dinikmati pula oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, wajar jikalau industri pariwisata harus kita kembangkan dan diberi prioritas utama. Industri pariwisata merupakan salah satu jaminan terjadinya pemerataan pembangunan, sekaligus terpenuhinya strategi Trilogi Pembangunan. Untuk itu prasarana ekonomi pada umumnya, khususnya prasarana perhubungan udara, laut, darat dan informasi harus diperhatikan dan dikembangkan.

Terkait dengan pentingnya sistem transportasi tersebut, maka Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) di Bandung dan Pabrik Kapal (PAL) di Surabaya dikembangkan. Kedua industri tersebut masing-masing Iptek dan pendidikannya ditunjang oleh ITB di Bandung dan ITS di Surabaya sebagai pusat keunggulan pendidikan dan ristek bidang dirgantara dan perkapalan. Pengembangan industri transportasi tersebut bertujuan agar kita dapat mandiri, sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa kemampuan teknologi yang canggih bukan merupakan monopoli negara-negara maju saja, tetapi bangsa Indonesia juga mampu melaksanakannya.

Produk N250 pesawat udara turboprop bermesin dua untuk 50 penumpang dengan memanfaatkan tenaga SDM sendiri dari seluruh nusantara. Demikian pula kapal *container, semi container, bulk carier* dan tanker jenis Carakajaya (3000-5000 ton) dan jenis Palwobuono (20.000–40.000 ton) sudah mulai dirancang bangun.

Saya tidak dapat mengerti, karena sama sekali tidak beralasan rasional, mengapa IMF pada akhir tahun 1997 menuntut agar pemerintah segera tidak membantu IPTN untuk penyelesaian pesawat *turboprop* N250 yang canggih dan terbang perdananya pada tanggal 10 Agustus 1995 berhasil.

Pesawat N250 sedang dalam proses akhir uji terbang untuk mendapatkan sertifikasi layak terbang nasional dan internasional dari FAA (*Federal Aviation Agency*, USA) dan sertifikasi layak terbang dari JAA (*Joint Airworthness Agency*, Eropa). N250 direncanakan untuk berperan dan menjadi unggul jikalau harga minyak meningkat di atas 35 dolar AS per barrel dan akan menjadi produk unggul yang dapat kita andalkan.

Peran N250 tidak hanya terbatas untuk perhubungan udara domestik saja, namun untuk menunjang industri parawisata di Benua Maritim Indonesia.

Industri strategis di bawah naungan Badan Pengelola Industri Strategis atau dengan singkat BPIS bersama Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) lainnya menjadikan Indonesia mandiri dan kuat, dengan mempersiapkan dan membangun segala prasarana perhubungan darat, laut, udara serta industri persenjataan, logam dan mesin. Tidak mungkin saya menjelaskan semuanya secara rinci dalam beberapa kata atau halaman saja. Saya membutuhkan ribuan halaman untuk menjelaskannya.

Saya sangat sadari bahwa wawasan dan kebijakan yang telah diambil oleh Pak Harto untuk menugaskan saya mempersiapkan apa yang telah saya sebut di atas jauh dari iktikad niat KKN atau kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan atau partai. Yang menjadi dasar, motor dan motivasi semuanya itu adalah aspirasi rakyat yang tersirat langsung dan tidak langsung dalam UUD 1945 pada umumnya dan khususnya Mukadimahnya.

Oleh karena itu, saya harus memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan yang saya warisi dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja tanpa mengenal waktu dan lelah dengan para anggota Kabinet Reformasi Pembangunan dan para wakil rakyat di DPR dan MPR.

Sementara bagi mereka yang sangat anti dan berprasangka buruk mengenai saya dan Orde Baru, dapat saya mengerti dan maafkan. Penghinaan secara pribadi langsung maupun tidak langsung saya maafkan pula.

Bukankah semuanya berkeinginan membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak cucu kita?

Bukankah dalam UUD 1945 jelas dinyatakan kedaulatan rakyat?

Mungkin beberapa tokoh masyarakat tanpa disadari secara sengaja maupun tidak sengaja, telah dirugikan ruang geraknya dan tidak pernah diajak berpartsipasi dalam pembangunan?

Mungkin juga mereka lebih terampil dan berbakat dibandingkan dengan tokoh Orde Baru, namun tidak pernah diberi kesempatan untuk berkembang?

Banyak pertanyaan yang wajar dan manusiawi perlu kita jawab dan renungkan mendalam dan tidak hanya berhenti melihat permukaan persoalan saja.

Karena itu dalam proses reformasi saya berkeyakinan untuk memanfaatkan kesempatan melaksanakan secara sistematik transparan dan langsung inplementasi arti "kedaulatan rakyat" dengan sebaik baiknya melalui pemberian otonomi kepada daerah bebas dari distorsi, prasangka negatif dan tanpa menolerir terjadinya tolok ukur ganda, belajar dari pengalaman dan kesalahan masyarakat lainnya di muka bumi ini.

Komitmen saya untuk melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah secara sistematis diwujudkan dalam bentuk

serangkaian undang-undang seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu, saya undang beberapa pakar dalam bidang administrasi dan kepemerintahan daerah untuk memberikan masukan dan saran mengenai otonomi daerah.

Sebelum saya berikan pengarahan, saya mendengarkan pemikiran serta analisis para pakar yang tergabung dalam tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri di bawah pimpinan Profesor Dr. Ryaas Rasyid. Mereka mengadakan presentasi di Bina Graha.

Pada dasarnya mereka membawa pandangan baru tentang otonomi daerah yang sangat berbeda dengan apa yang telah dikenal pada masa sebelumnya.

Visi dan misi dari semua kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia harus tecermin pada proses demokratisasi dan demokrasi itu sendiri, melalui penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ternyata melalui DPRD masing-masing proses rekrutmen gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/ wakil wali kota, yang sudah dimulai sejak beberapa waktu sebelumnya terjadi tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dan diserahkan sepenuhnya kepada DPRD.

Pemilihan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat di daerah. Sebagai ilustrasi misalnya, Gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah, mengemban fungsi dekonsentrasi, namun presiden tidak lagi menginterevensi, meskipun oleh UU masih dibolehkan.

Ilustrasi lain misalnya, semua peraturan dapat diberlakukan secepatnya begitu gubernur, bupati, wali kota menyetujui draf peraturan daerah dengan DPRD masing-masing. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, karena semua

Peraturan Daerah harus disahkan dulu oleh Menteri Dalam Negeri sebelum di implementasikan.

Lembaga DPRD memainkan peranan sangat menentukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas wewenang dan hak DPRD dirumuskan dengan jelas dalam UU NO.22 tahun 1999, dengan otonomi luas dan nyata.

UU No. 22 tahun 1999 memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah otonom. Pemerintah Daerah dapat meyelenggarakan semua kewenangan pemerintahan kecuali lima hal, yaitu:

1. Bidang Politik Luar Negeri
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Kebijakan Moneter
4. Sistem Peradilan
5. Kebijakan Masalah Keagamaan

Mengenai bidang lain seperti pendidikan, ristek, industri, perdagangan, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perhubungan, pertambangan dan energi dan sebagainya, harus dilaksanakan melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah pusat di mana tingkat pelaksanaan oleh daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh daerah yang harus memberi masukan, menunjang dan memanfaatkan pengalaman perencanaan pembangunan nasional dengan memerhatikan pendapatan asli daerah dan kemampuan SDM di daerah.

Akan tetapi tidak dengan sendirinya daerah dapat melaksanakan semua kewenangan, karena sewajarnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan dukungan SDM dari daerah.

Dalam memilih besaran kewenangan maka daerah seharusnya memerhatikan:

- Azas kebutuhan
- Azas manfaat dan kapasitas, artinya apakah sebuah kewenangan dilakukan benar-benar dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan
- Seberapa jauh bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat di daerah
- Apakah tersedia sarana dan prasarana serta SDM yang mendukungnya

Oleh karena itu dalam masa peralihan, pelaksanaan otonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya mungkin akan berbeda. Karena memang di dalam pelaksanaannya daerah-daerah itulah sesungguhnya yang mempunyai hak untuk menentukan kewenangan mana yang siap dilakukan, jadi bukan pusat menentukan.

Apabila ada kewenangan yang seharusnya sudah diturunkan ke daerah tapi daerah belum mampu, hal itu bisa dilakukan di provinsi atau mungkin masih diatur oleh pusat, tapi pada dasarnya kewenangan itu di daerah.

UU NO. 22 tahun 1999 juga tidak mengenal sistem otonomi yang bertingkat. Sehingga diberlakukannya UU ini kita tidak lagi mengenal Daerah Otonom Tingkat I, dan Daerah Otonom Tingkat II, di mana kewenangan sebuah Daerah Otonom yang lebih rendah merupakan residu atau sisa dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan daerah otonomi yang lebih tinggi. Dengan demikian, hakekat otonomi antarprovinsi dengan kabupaten/kota pada dasarnya sama. Ini sesuai dengan dasar falsafah dan keyakinan saya untuk tidak mengambil kebijakan yang "bertolok ukur ganda" atau *double standard*.

Di kabupaten dan kota tidak ada lagi lembaga

pemerintah pusat, semuanya merupakan instansi otonom memberikan titik berat otonomi kepada daerah kabupaten/kota. Mengapa ini perlu dilakukan?

- *Pertama,* untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada segenap warga masyarakat di daerah. Semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan di kabupaten/kota warga masyarakat tidak harus ke provinsi, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai
- *Kedua*, dengan meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten/kota maka akan mendekatkan pemerintah dengan rakyat ketimbang titik berat otonom diletakkan di provinsi
- *Ketiga*, adalah dengan titik berat otonomi pada kabupaten maka akan menghilangkan elemen semangat *micronationalism*. Mikro nasionalisme di Indonesia akan merupakan bibit bagi disintegrasi negara kesatuan yang sudah kita bina lebih dari 50 tahun

Dari mana anggaran untuk melaksanakan pembangunan?

Bisa saja dalam hal ini, misalnya, Indonesia kalau dinilai secara indikator makro, rata-rata sehat; tetapi di daerah tertentu kondisinya tidak sehat karena tidak adanya pemerataan pendapatan di antara rakyat, produktivitasnya rendah, pengelola pemerintahannya korup, biaya ekonomi yang tinggi *(high cost),* sekaligus tidak adanya sumber daya manusia yang memadai. Kondisi yang buruk demikian, jelas tidak akan banyak menarik investor baik asing atau lokal untuk datang ke daerah tersebut. Itu akan susah.

Atau, kondisi sebaliknya bisa saja terjadi. Indonesia secara makro tidak sehat, tetapi di daerah-daerah tertentu justru sehat sekali. Pemerintah daerah tidak memiliki utang.

Mereka memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tinggi kualitasnya. Sistem pemerintahannya tidak korup. Jika itu yang terjadi, maka kemungkinan *foreign* atau *local investment* langsung ke daerah yang paling memenuhi syarat.

Tetapi, untuk itu, investor membutuhkan mitra yang transparan, yang punya kredibilitas dan prediktabilitas yang jelas. Memiliki keterampilan, kemampuan, profesionalisme dan *enterpreneurship* dengan prestasi yang nyata.

Peran perbankan sangat menentukan, oleh karena itu saya sering menggarisbawahi betapa pentingnya didirikan Bank Pembangunan Daerah atau lebih tepat lagi disebut Bank Pembangunan Wilayah. Jadi bukan Bank Pembangunan Daerah yang sudah ada dan berperan hanya terbatas pada daerah provinsi saja. Yang saya maksudkan adalah gabungan beberapa provinsi yang berdekatan seperti Bank Pembangunan Sumatra, Bank Pembangunan Jawa, Bank Pembangunan Kalimantan, Bank Pembangunan Sulawesi, Bank Pembangunan Bali, NTB dan NTT, dan Bank Pembangunan Maluku dan Irja.

Semuanya itu, untuk mencegah modal yang dikumpulkan di daerah, dimanfaatkan untuk pembangunan daerah lain pada umumnya dan khususnya ke pusat (DKI Jakarta), sehingga kesenjangan kualitas kehidupan menjadi lebih besar. Di lain pihak, arus modal investasi atau *foreign direct investment* dapat lebih lancar mengalir ke daerah dan akan dapat mengurangi distorsi dan menekan biaya ekonomi menjadi lebih rendah.

Dengan demikian saya dapat tingkatkan apa yang namanya *redundancy*. Konsep *redundance* itu dapat saya jelaskan sebagai berikut. Kalau saya mempunyai meja, kakinya tiga maka dia tidak *redundance*. Sebab, jika salah satu kaki dari meja itu saya potong, maka meja itu akan jatuh. Lalu,

kalau saya mempuyai meja dengan empat kaki, saya potong satu kakinya, maka meja itu tidak akan jatuh. Itulah yang dinamakan *redundance.* Baru ketika saya potong dua kaki, maka meja dengan empat kaki itu baru jatuh. Benar kan?

Redundance adalah dalam hal ini satu sistem yang terdiri yang memiliki N minus tiga *redundancy*. *Redundancy* ini dapat disebut sebagai *fail-safe redundancy* atau hilang satu kaki *meja* tersebut masih dalam keadaan *stabil atau aman* dengan biaya yang rendah.

Jikalau N sama dengan 4, berarti meja tersebut memiliki 4 kaki dan *redundancy*-nya satu (4 dikurangi 3). Namun jika meja tersebut memiliki 10 kaki maka *redundancy*-nya menjadi sangat tinggi berarti 6. Meskipun 6 kaki dimakan rayap dan hancur, meja tersebut belum jatuh dan tetap stabil.

Kita dapat segera mengambil kesimpulan bahwa semakin banyak kaki meja itu semakin aman dan stabil. Atau semakin tinggi *redundancy*-nya semakin stabil sistem tersebut. Namun harga meja tersebut tentunya akan menjadi lebih mahal pula. Akibatnya jumlah *redundancy* untuk meja tersebut harus kita perhitungkan dengan cermat dan rinci untuk menghasilkan satu meja yang selalu stabil dan murah.

Adakalanya kita hanya mampu atau diperkenankan memanfaatkan meja yang memiliki satu kaki saja. Meja ini harus stabil berarti dalam keadaan apa pun dan dibebani dengan apa pun meja itu harus tetap stabil. Berarti satu-satunya kaki meja tersebut tidak boleh dalam keadaan apa pun dengan beban apa pun jadi patah. Tidak boleh pula dimakan rayap. Berarti kaki meja tersebut harus direkayasa dan diamankan secara *safe-life.*

Sebagai contoh di sini adalah NKRI dan UUD '45 harus dipertahankan *at all cost* sepanjang masa dan tidak ada kompromi. Yang ada hanyalah penyempurnaan atau dikenal sebagai Amandemen untuk penyesuaian implementasi UUD

‘45 dengan kondisi dan keadaan dunia, perkembangan teknologi dan sebagainya, yang terus berubah dan berkembang. Penyempurnaan ini tidak boleh mengubah jiwa UUD ‘45, yang menentukan keberadaan NKRI.

Dengan contoh di atas, kita mengenal dua jenis *redundancy* ialah *safe-life* dan *fail-safe redundancy*.

Karena itu saya harus memimpin bangsa Indonesia untuk kelak dapat memiliki suatu sistem pemerintahan yang merdeka, bebas, berbudaya, demokratis, dan tenteram dengan memiliki *redundancy* yang paling menguntungkan.

UUD ‘45 dan NKRI dapat dibayangkan sebagai “meja” yang hanya *berkaki satu* atau memiliki *safe-life redundancy* dan tidak boleh diubah namun dapat pada implementasinya disempurnakan sesuai dengan keadaan dunia, teknologi dan sebagainya, tanpa mengubah atau distorsi jiwa UUD 1945 yang tecermin pada Mukadimahnya.

Oleh karena itu, otonomi daerah tidak berarti membuka pintu untuk berkembangnya sistem federalisme, namun untuk melaksanakan pembangunan yang merata, baik dengan pemerintahan eksekutif maupun legislatif yang demokratis, transparan dan berbudaya, demi tercapainya masyarakat yang lebih makmur dan tenteram. Untuk melaksanakannya dibutuhkan waktu. Semua Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah harus mengenal *redundancy* yang berunsur pada satu sistem yang memiliki *safe-life redundancy*, ialah jiwa UUD 1945 dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita pelihara dan pertahankan sepanjang masa.

Dengan demikian, dapat dikembangkan suatu sistem *redundancy* yang memanfaatkan penyelesaian suatu masalah pemikiran dengan pendekatan A_0, A_1, A_2…..dan sebagainya, sampai A_m (di mana m = 0 direkayasa *safe-life*, sedangkan m = 1,2,3…..sampai tak terhingga dapat direkayasa *fail-safe*).

Kita bersyukur bahwa kita masih tetap dapat berbicara mengenai penahapan, karena kita masih berada pada dasar sistem yang sama ialah memanfaatkan UUD 1945 yang disempurnakan melalui Amandemen atau Ketetapan MPR tanpa mengorbankan jiwa UUD, jiwa Pancasila, dan wilayah NKRI.

Mulai Sidang Istimewa November 1998 kita memasuki sejarah pembangunan bangsa Indonesia tahap ketiga, setelah Proklamasi Kemerdekaan NKRI.

Tahap Pertama

Pada awal *Tahap Pertama,* berbagai peristiwa mewarnai transisi Indonesia menuju ke kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan mulai dirancang dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sidang paling penting BPUPKI adalah tanggal 1 Juni 1945 di mana Bung Karno memaparkan dasar filosofis Negara Indonesia Merdeka. Ia menyebut lima dasar utama, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau Ketuhanan Yang Maha Esa

Tanggal 22 Juni 1945, perumusan Pancasila berdasarkan Pidato 1 Juni tersebut selesai. Rumusan baru ini berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Salah satu anggota panitia kecil di bawah pimpinan Mr. Mohammad Yamin, kemudian menamakan rumusan baru itu sebagai "Piagam Djakarta".

Dalam sidang kedua, 10-17 Juli 1945, BPUPKI menerima rumusan Piagam Djakarta dan membentuk tiga panitia, yaitu:

- Panitia Hukum Dasar dengan ketua Dr. Soepomo
- Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Dr. Mohammad Hatta
- Panitia Pembelaan Tanah Air dengan ketua Dr. Abikusno Tjokrosoejoso

Khusus mengenai hukum dasar, sesudah melalui sidang dan pembahasan, akhirnya tanggal 16 Juni 1945, BPUPKI menerima rancangan hukum dasar tersebut.

Sehari setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, Jepang kemudian menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Berbeda dengan BPUPKI yang masih menyertakan anggota dari Jepang, PPKI sepenuhnya terdiri atas rakyat Indonesia. Panitia inilah yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam sidang sehari kemudian, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan menghapus tujuh kata dalam Piagam Djakarta. Dengan kata lain, PPKI mengganti rumusan "dengan berdasarkan pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" menjadi "dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pada sidang itu pula, PPKI sekaligus mengesahkan UUD 1945 yang pembukaannya memuat rumusan resmi Pancasila yang telah diperbarui oleh PPKI tersebut.

Dari kronologi peristiwa sejarah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa P_0 adalah identik dengan 17 Agustus 1945 dan memiliki seorang Proklamator merangkap Presiden RI pertama Ir. Soekarno dan seorang Proklamator merangkap Wakil Presiden pertama Dr. Mohammad Hatta.

Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan bangsa Indonesia sejak sebagai Presiden selama 23 tahun berturut.

Jikalau A_0 adalah sekitar 17 Agustus 1945, maka A_1, A_2, A_3....sampai dengan A_{23}, selama 23 tahun berturut-turut Presiden Soekarno memimpin perjuangan bangsa Indonesia, maka dapat kita sebut sebagai Tahap Pertama perjuangan bangsa. Apa yang telah dicapai selama 23 tahun ini? Sejarah mencatat:

- Merealisasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memberi kesadaran nasional sebagai suatu bangsa
- Mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berbahasa Indonesia

Tahap Kedua

Transisi dari masa pemerintahan orde lama ke orde baru diawali dengan peristiwa tuntutan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) pada tanggal 10 Januari 1966 oleh para mahasiswa dengan dukungan ABRI. Tiga Tuntutan Rakyat tersebut terdiri atas:

- Bubarkan Partai Komunis Indonesia.
- *Retool* kabinet.
- Turunkan harga.

Para mahasiswa menganggap Soekarno telah melakukan penyelewengan ideologis, antara lain dengan dicetuskannya *Nasakom* dan *Manipol-Usdek* yang dianggap melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, berbagai kebijakan ekonomi Soekarno dianggap menyengsarakan rakyat, dengan akibat penurunan drastis keadaan sosial ekonomi.

Selain itu, situasi politik pasca G30-S/PKI masih menyisakan ketidakpastian. Peristiwa G30-S/PKI melahirkan "surat sakti" (Surat Perintah 11 Maret, Supersemar) yang memerintahkan Letjen Soeharto (sebagai Pangkostrad) untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan.

Supersemar dikeluarkan Presiden Soekarno tanggal 11 April 1966. Pasca pemberian Supersemar, kekuasaan Soekarno makin menurun. Salah satunya adalah dirombaknya Kabinet Dwikora, yang sebenarnya tidak disetujui oleh Soekarno sendiri.

Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno membacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang Umum MPRS. Karena dinilai tidak memuaskan, maka pimpinan MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Sidang MPRS juga menetapkan penegasan tentang kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar.

Selepas sidang MPRS tersebut, Presiden Soekarno dalam memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan menyampaikan pidato yang dikenal *Jas Merah* (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Pidato tersebut dipandang oleh masyarakat, mahasiswa dan MPRS sendiri sebagai cermin sikap Soekarno, yang tidak bersedia untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan MPRS.

Reaksi dari masyarakat adalah demonstrasi yang digalang KAMI dan KAPPI di depan Istana Merdeka tanggal 1-3 Oktober 1966. MPRS sendiri merespons

perkembangan tersebut dengan dikeluarkannya Nota pimpinan MPRS yang meminta dan mengingatkan kembali kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi laporan pertanggungjawabannya.

Menanggapi permintaan MPRS, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato Pelengkap Nawaksara tanggal 10 Januari 1967. MPRS merespons pelengkapan Pidato Nawaksara ini dengan mengeluarkan Catatan Sementara tentang Pelengkap Pidato Nawaksara yang diumumkan pada hari yang sama. Lewat catatan sementara ini, MPRS memperlihatkan ketidakpuasan mereka terhadap sikap Presiden Soekarno.

Pada tanggal 21 Januari 1968, MPRS mengeluarkan Hasil Musyawarah pimpinan MPRS Lengkap, yang salah satu di antaranya menegaskan bahwa bahwa Presiden telah gagal memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional yang disepakati bersama.

Pada tanggal 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengeluarkan resolusi, yang meminta kepada MPRS untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS serta meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa G-30-S/PKI.

DPR-GR juga mengeluarkan Penjelasan Atas Usul Resolusi DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS dan memorandum mengenai Pertanggungjawaban dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS.

Selanjutnya, empat Panglima Angkatan ABRI bertemu Presiden Soekarno di Bogor tanggal 11 Februari 1967 untuk meminta Presiden menghormati konstitusi dan Ketetapan MPRS pada Sidang Umum ke-IV.

Pada tanggal 16 Februari 1967, pimpinan MPRS

mengeluarkan Keputusan tentang Tanggapan Terhadap Pelengkapan Pidato Nawaksara, secara tegas menolak Pelengkapan Pidato Nawaksara. Menanggapi keputusan MPRS ini, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967 mengumumkan bahwa dirinya menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto.

Pada tanggal 7 Maret 1967 MPRS menggelar Sidang Istimewa dengan menghasilkan 26 Ketetapan. Di antara ketetapan-ketetapan itu adalah mencabut kekuasaan perintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu.

Pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS dilakukan tanggal 21 Maret 1967. Setahun kemudian, tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto resmi dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia kedua oleh MPR.

Pada bulan Maret 1973, SU MPR kembali memilih Soeharto sebagai Presiden untuk periode lima tahun mendatang. Ia pun terpilih jadi Presiden pada 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998.

Jikalau B_0 adalah tanggal 27 Maret 1968, maka B_1, B_2, B_3….sampai B_{30}, selama 30 tahun berturut-turut Presiden Soeharto memimpin perjuangan bangsa Indonesia, maka dapat kita sebut sebagai Tahap Kedua perjuangan bangsa. Apa yang telah dicapai selama 30 tahun ini? Sejarah mencatat:

- Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertahankan Pancasila dan jiwa UUD 1945
- Membudayakan Pemilu tiap lima tahun
- Membudayakan SU MPR tiap lima tahun
- Membudayakan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan pembangunan di SU MPR tiap lima tahun
- Membudayakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tiap lima tahun

- Membudayakan melaksanakan Repelita tiap lima tahun sebagai produk hukum SU MPR
- Membudayakan penyusunan APBN melalui UU tiap tahun
- Melanjutkan pengembangan sumber daya manusia

Tahap Ketiga

Jikalau C_0 adalah tanggal 21 Mei 1998, maka C_1 dan C_2 adalah *Tahap Ketiga* yang berlangsung selama 1 tahun dan 5 bulan saya memimpin perjuangan bangsa Indonesia memasuki reformasi. Apa yang telah dicapai selama 1 tahun dan 5 bulan? Saya tidak mampu menilainya dan serahkan sepenuhnya kepada rakyat Indonesia yang pernah saya pimpin untuk menilainya.

E. Presiden Soeharto

Masa lampau tidak boleh dilupakan, namun masa lampau jangan dijadikan kendala untuk masa depan. Dari kesalahan masa lampau dan bersikap lebih toleran, dapat dikembangkan masa depan yang lebih baik dan cerah. Pengertian sebagai hasil dialog adalah dasar dari toleransi.

Allah SWT dzat yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu tentang hamba-Nya dan sejarah jualah nanti yang akan mengungkap "teka-teki" kemisteriusan.

Sulit bagi saya untuk menulis mengenai Presiden Soeharto tanpa orang meragukan objektivitasnya. Kenyataan ini saya terima, karena memang saya mengenal Pak Harto sebagai seorang perwira berusia 28 tahun yang gagah, rendah hati, bahkan pemalu, sejak saya berusia 13 tahun pada tahun 1950.

Seperti tiap orang, saya juga memiliki idola, selain orang tua yang melahirkan dan membesarkan saya. Mereka adalah:

- Presiden Soekarno yang memberi nasionalisme dan patriotisme;
- Presiden Soeharto yang menjadi panutan sebagai pemimpin pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan budaya kepemimpinan Jawa;
- Profesor Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai seorang intelektual yang berani mempertahankan pendapatnya dan tetap setia pada prinsip dan keyakinannya;
- Profesor Dr. Widjojo Nitisastro sebagai seorang intelektual yang berwawasan jauh ke depan, pragmatis, setia pada prinsip dan keyakinannya, serta rendah hati.

Sejak tanggal 28 Januari 1974, saya secara tahap demi

tahap dalam banyak hal bekerja sama dengan para tokoh nasional lainnya dan khususnya dengan para idola saya.

Pada pertemuan pertama saya dengan Pak Harto sebagai presiden di kediaman di jalan Cendana, pada hari Senin pukul 19.30, Pak Harto menjelaskan dasar-dasar pemikirannya. Banyak pertanyaan yang saya ajukan, antara lain, "Mengapa Presiden Soekarno diperlakukan demikian? Bukankah beliau bersama Bapak Dr. Mohammad Hatta Proklamator NKRI? Mengapa harus demikian?"

Jawaban Pak Harto singkat, "Nanti pada suatu hari mereka akan lebih mengerti peran dan arti Presiden Soekarno."

Jawaban tersebut terus saya cernakan dan mengambil kesimpulan bahwa memang dasar toleransi adalah pengertian dan pengertian antara manusia hanya dapat diperoleh melalui suatu dialog antara manusia secara jernih, rasional, berbudaya, dan objektif. Ini semuanya membutuhkan waktu dan proses penyembuhan dalam arti yang luas.

Bukankah yang sedang kita alami dalam reformasi adalah pengertian dan objektivitas menilai suatu permasalahan?

Kita harus bedakan antara orang yang berbicara emosional dan rasional. Ada yang berbicara secara rasional namun penuh dengan prasangka dan praduga yang tidak beralasan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap penilaian sesuatu dan menghasilkan pengertian yang tidak dapat memberi ruang pada toleransi.

Ada pula yang berbicara emosional lepas dari prasangka dan praduga dan dapat menghasilkan pengertian yang memberi ruang berkembangnya toleransi.

Memang pengertian dan toleransi adalah dasar dalam mencari penyelesaian yang bijaksana dan tepat. Masalah

demikian kita hadapi di mana saja. Apakah dalam penyelesaian masalah internasional seperti masalah Israel dan Palestina, masalah semi international seperti masalah Timor Timur di PBB dengan Indonesia dan Portugal, atau masalah nasional seperti masalah reformasi, masalah Aceh, masalah Papua, masalah Maluku, dan masalah lain.

Jelas, yang menciptakan masalah itu adalah manusia sendiri dan yang harus menyelesaikan masalah tersebut adalah manusia pula. Manusia, manusia, dan sekali lagi manusia dengan segala ego dan keinginannya, adalah penyebab dan masalah utama.

Dengan kesadaran demikian, dan keyakinan bahwa manusia itu harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat menemui "kebenaran" atau *the truth* dari permasalahan yang sedang dihadapi, maka kepadanya harus diberi kebebasan berpikir, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan tidak boleh ditekan atau ditakut-takuti.

Pemikiran-pemikiran harus dapat diberi wahana untuk dapat disalurkan tepat pada waktunya dan pada tempatnya, berarti keterbukaan harus diberikan dan dasarnya adalah HAM yang diimbangi oleh KAM.

Wahana itu adalah sistem informasi dalam proses keterbukaan dan proses globalisasi yang harus dikembangkan, dipelihara, dan terus disempunakan. Ini berarti demokrasi, kebebasan pers, pemberian otonomi daerah di mana sebagian besar manusia berada, dan tidak saja di pusat yang harus mendapatkan perhatian utama dalam proses reformasi.

Saya harus bertitik tolak pada masukan informasi yang tepat, jelas, dan objektif. Demikian pula penilaian mengenai Pak Harto.

Baiklah saya memanfaatkan apa adanya dan memulai dengan membaca pernyataan Pak Harto ketika menyatakan

pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

> Sejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi itu perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.
>
> Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
>
> Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
>
> Dengan memerhatikan keadaan di atas saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memerhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memerhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak dibacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.

Dengan perkataan lain Pak Harto menilai bahwa kepercayaan dari rakyat, yang beliau pimpin selama 32 tahun, tidak dimiliki lagi. Alasan apa pun juga dipakai itulah kenyataannya dan Pak Harto telah menerimanya dan

memiliki kemampuan untuk berpisah dengan kekuasaan secara damai dan konstitusional.

Pada hari Selasa tanggal 9 Juni, sehari setelah HUT ke-77 Pak Harto, saya dapat berbicara melalui telepon dengan Pak Harto sebagai berikut:

> *"Pak Harto, saya mohon Bapak berkenan menerima saya. Saya mohon penjelasan dan saran Bapak mengenai semua yang telah terjadi,"* demikian ucapan saya.
>
> *"Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja". "Saya sudah tua"*, demikian jawaban Pak Harto.
>
> *"Pak Harto, untuk dapat melanjutkan tugas dengan baik dan untuk menjawab beberapa pertanyaan, penting sekali pertemuan dengan Bapak"*, demikian ucapan saya.
>
> *"Laksanakan saja tugasmu dengan baik, saya doakan agar Habibie selalu dilindungi Allah SWT dalam melaksanakan tugas. Kita nanti bertemu secara bathin saja"*, lanjut Pak Harto.

Ribuan jam telah saya alami berdiskusi dengan Pak Harto secara terbuka tanpa ada kendala. Dalam pembicaraan dan diskusi tersebut saya banyak belajar padanya, demikian pula Pak Harto belajar banyak dari saya. Memang demikianlah hasil dan akibat silaturahim antarmanusia dan tidak terkecuali antara Pak Harto dengan saya.

Berdasarkan akumulasi pengalaman, beberapa saran masukan yang berkali-kali Pak Harto sampaikan dan garis bawahi pada pertemuan selama seperempat abad sebagai berikut:

- Kepentingan rakyat harus diutamakan di atas

kepentingan golongan, partai, kawan, keluarga, dan kepentingan sendiri

- Tidak boleh terjadi suatu revolusi lagi di bumi Indonesia karena rakyat tidak dapat mengatasinya
- Yang dikehendaki rakyat adalah ketenteraman, masa depan dan hari depan yang cerah bagi anak cucunya

Saran-saran tersebut sesuai dengan keyakinan saya pribadi, sangat mendalam artinya. Memang sejak saya memimpin gerakan mahasiswa di Jerman pada tahun 1957 dan bekerja di sana. Sampai saat ini, terus saya kembangkan pengertian dan cara mencapainya, dengan memerhatikan lingkungan dan perilaku masyarakat sekitar saya. Peran dunia cendekiawan pada umumnya dan khususnya lingkungan para cendekiawan muslim Indonesia sangat memengaruhi saya.

Saya berusaha menilai keadaan sekitar Pak Harto dan rakyat Indonesia dengan selalu berusaha secara objektif mencari penyelesaian yang bijaksana.

Tuntutan sebagian besar anggota MPR pada Sidang Istimewa 1998, menghendaki Pak Harto secara eksplisit disebut dalam Ketetapan MPR, mengenai pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara yang bersih, di samping pejabat negara, mantan pejabat negara, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat.

Seperti saya sampaikan di depan, dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kabinet Pembangunan, saya tidak pernah mendapatkan instruksi atau imbauan dari Pak Harto yang melanggar UU atau berbau KKN. Di sini kelihatan konsistensinya sikap dan pesan Pak Harto pada saya agar kepentingan rakyat harus diutamakan di atas kepentingan golongan, partai, kawan, keluarga, dan kepentingan pribadi.

Ketika Sidang Istimewa berlangsung, Golkar sudah menjadi partai politik dan Keluarga Besar Golkar (KBG) yang terdiri dari Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah dan Fraksi Golkar tidak dikoordinasikan oleh seorang koordinator lagi dan sudah dibubarkan. Karena itu, pengaruh saya selama SI berlangsung, terbatas pada pemberian penjelasan saja.

Menjelang dan saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR, demonstrasi yang menentang dan menolak saya tidak juga berkurang.

Dengan masukan tersebut di atas, kembali lagi, saya berusaha menilai keadaan sekitar Pak Harto dan rakyat Indonesia dengan secara objektif mencari penyelesaian yang bijaksana. Jangan kita hanya melihat pohon dari hutan yang sedang mengalami kebakaran, dan melupakan bahkan tidak memerhatikan hutan, yang seharusnya diselamatkan dari kebakaran.

Saya mengandalkan kepada akumulasi pengalaman selama kehidupan saya, khusunya di Indonesia. Guru yang setia, konsisten mendampingi, dan memengaruhi, adalah otak saya sendiri. Oleh karena itu, saya berusaha terus memelihara kondisi kesehatan dengan berenang secara teratur tiap hari.

Pada suatu hari dalam bulan September 1999, saya mendapat laporan bahwa Pak Harto harus dirawat di RS Pertamina karena mengalami stroke. Reaksi saya segera menugaskan ADC untuk mempersiapkan kunjungan ke RS Pertamina menilik Pak Harto.

Namun sewaktu saya mau keluar Istana Merdeka, Tim Dokter Kepresidenan menyampaikan agar saya membatalkan niat tersebut, karena keadaan kesehatan Pak Harto tidak mengizinkan. Pendarahan di otak Pak Harto dapat bertambah.

Menurut mereka ada dua kemungkinan jikalau saya

berkunjung untuk menjenguknya, yaitu: Pak Harto senang atau marah, dan keduanya akan mengakibatkan gejolak emosi yang dapat meningkatkan pendarahan otak yang berakibat fatal. Oleh karena itu, mereka sarankan agar saya tidak berkunjung ke Pak Harto, cukup memanjatkan doa untuk Pak Harto saja.

Hal lain yang ingin saya sampaikan adalah, dalam rangka penyelesaian masalah Pak Harto, sesuai rencana, saya akan berkonsultasi dengan para pakar ilmu hukum dari sejumlah universitas. Ini terjadi setelah Pemilu 1999 dan jajak pendapat mengenai masa depan Timor Timur selesai.

Kebijakan tersebut saya ambil untuk mencegah penyalahgunaan permasalahan sekitar Pak Harto menjadi isu politik yang dapat mengganggu. Saya berpendapat pula agar sebelum Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999 dimulai, dasar hukum penyelesaian masalah Pak Harto secara objektif, bijaksana dan profesional selesai.

Untuk itu, melalui Menteri Kehakiman/Sekretaris Negara dan Pjs Jaksa Agung, saya minta agar mengundang pakar di bidang hukum, untuk memperoleh masukan dan saran penyelesaian masalah Pak Harto. Pertemuan para pakar tersebut terjadi pada bulan September 1999, yang dihadiri oleh: Prof. Dr. Lobby Loqman, SH. MH (Universitas Indonesia, Jakarta), Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH (Universitas Diponegoro, Semarang), Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (Universitas Trisakti, Jakarta), serta Prof. Dr. Muladi, SH (Menteri Kehakiman/Sekretaris Negara), Ismujoko, SH (Pjs. Jaksa Agung), dan Ramelan, SH (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). Pertemuan tersebut dilaksanakan di pendopo kediaman saya di Kuningan.

Langkah yang saya ambil termasuk tindak lanjut untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan tetap menjunjung

tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia. Kita secara sungguh-sungguh harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Demi tegaknya hukum dan keadilan, siapa pun yang bersalah harus dikatakan bersalah, dan siapa pun yang benar harus dikatakan benar.

Dalam negara hukum, yang memegang teguh prinsip supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, benar dan salah ditentukan sepenuhnya oleh serangkaian proses hukum yang harus ditempuh, sampai pembuktiannya di pengadilan.

Siapa pun yang secara hukum terbukti bersalah, hendaklah menerima kenyataan tersebut betapa pun pahitnya, sedangkan bagi mereka yang benar dan dibenarkan menurut hukum, diminta tegar menghadapi segala cobaan dan hujatan.

Walaupun langit akan runtuh, yang salah tetap salah dan benar tetaplah harus diterima sebagai kebenaran.

Perintah untuk mengusut mantan Presiden Soeharto ditetapkan dalam Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dihasilkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November 1998.

Dalam pasal 4 Tap No. XI/ MPR/1998 disebutkan: "*Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan dengan tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memerhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia*".

Mantan Presiden Soeharto baru satu kali dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejumlah saksi juga telah diperiksa. Pemeriksaan sudah berlangsung sekitar delapan bulan, namun hasil penyelidikannya belum

rampung juga. Sementara berkembang pemikiran dan saran untuk menyelesaikan kasus Pak Harto: (a) secara politik, (b) secara kombinasi yuridis-politis, atau (c) secara yuridis murni.

Pada kesempatan itu, saya persilakan Jaksa Agung memberi laporan lengkap. Di samping berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek hukum, dilaporkan juga oleh Jaksa Agung hasil pemeriksaan Tim Kesehatan, yang antara lain menyatakan bahwa:

> *"Pak Harto mengalami gangguan neurologis pada fungsi otak (fungsi luhur dan memori) yang kompleks, serta hambatan pada fungsi aktivitas mental. Pak Harto juga mengalami gangguan psikiatris, sehingga hanya mampu berkomunikasi untuk masalah sederhana, sedang untuk hal-hal yang kompleks kualitas pembicaraannya tidak bisa dijamin."*

Saya persilakan pula agar para pakar hukum dan Menteri Kehakiman menanggapi isi laporan Jaksa Agung.

Setelah mendengar laporan dan tanggapan para peserta rapat tersebut, saya mengajukan pendapat agar penyelesaian masalah Pak Harto *dideponir* atau dengan kata lain diselesaikan secara tuntas dan tidak dapat dibuka lagi. Berarti ditutup dan tidak mengganggu jalannya reformasi.

Bukan karena saya memihak Pak Harto, namun saya memihak yang benar dan sebagaimana telah saya ceritakan, saya berkeyakinan bahwa sesuai pengalaman pribadi saya sebagai anggota Kabinet Pembangunan di bawah pimpinan Pak Harto, saya tidak pernah diimbau ataupun diperintahkan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas yang bertentangan dengan UU yang berlaku, bertentangan dengan Nilai HAM dan Nilai KAM serta berbau KKN. Pendapat tersebut juga saya ajukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Pak Harto, yang

secaya objektif memang sulit untuk menjalani proses hukum sebagaimana orang yang sehat.

Permintaan saya didiskusikan secara luas, profesional dan mendalam. Hasilnya adalah semua berkesimpulan agar paling bijaksana masalah Pak Harto diselesaikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh Jaksa Agung.

Oleh karena itu, saya memerintahkan Pejabat Sementara (Pjs) Jaksa Agung Ismudjoko agar dalam waktu sesingkat-singkatnya segera mengumumkan hasil penyelidikan dan status hukum mantan Presiden Soeharto kepada masyarakat luas.

Mengakhiri bab ini, saya perlu mengungkapkan sekali lagi bahwa sampai saat berakhirnya tugas saya sebagai Presiden, walaupun saya selalu berusaha lewat berbagai "jalur", saya tetap tidak pernah berhasil bersilaturahim dengan Pak Harto, baik lewat telepon, apalagi bertemu langsung.

Pertemuan secara fisik terakhir saya dengan Pak Harto adalah pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, pada saat Pak Harto menyatakan pengunduran diri sebagai Presiden ke-2 dan saya mengangkat sumpah sebagai Presiden ke-3. Kemudian hubungan berikutnya adalah lewat telepon pada saat saya menyampaikan selamat Ulang Tahun pada bulan Juni 1998, sebagaimana saya telah ceritakan di depan.

Kedua pertemuan terakhir —secara fisik dan telepon— tersebut juga tidak mengungkap jawaban sejumlah pertanyaan dan harapan yang berada di benak saya, antara lain tentang apa sesungguhnya alasan Pak Harto mengundurkan diri dari kepresidenan, mengapa Pak Harto tidak memberikan informasi dan masukan sedikit pun tentang berbagai hal yang terjadi menjelang keputusan

pengunduran diri tersebut, sehingga seolah-olah saya harus memulai semuanya dari “nol”.

Kemudian, pertanyaan yang tetap tak terjawabkan sampai saat ini adalah, “Mengapa Pak Harto tidak bersedia bertemu atau berkomunikasi dengan saya sampai saat ini?”

Manghadapi kenyataan sikap Pak Harto yang seolah “misterius” tersebut, saya yakin bahwa Pak Harto mempunyai alasan tersendiri, dan mungkin beranggapan bahwa sebaiknya biarlah saya tidak mengetahuinya. Dan saya ikhlas kalau memang begitu kehendak Pak Harto. Karena saya percaya sepenuhnya bahwa Allah SWT jualah *dzat* yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu tentang hamba-Nya. Dan sejarah jualah nanti yang akan mangungkap “teka-teki” kemisteriusan ini.

Sekneg.

Menyerahkan Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan
Hari Kemerdekaan RI ke-53, 17 Agustus 1999

Sekneg.

Memberi penghormatan kepada Sangsaka Merah Putih
pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-53, 17 Agustus 1999

Sekneg.

Menerima kunjungan Uskup, Carlos Filipe Ximenes Belo, 24 Juni 1998

Sekneg.

Bertemu Perdana Menteri Australia, John Howard, 27 April 1999 di Bali

Hr. Republika

Menyampaikan Pidato pada Sidang Istimewa MPR, 13 November 1998

Sekneg.

Bersama Ketua DPR/MPR, Harmoko,
pada Penutupan Sidang Istimewa MPR, 13 November 1998

Sekneg.

Menghadiri Sidang Istimewa MPR, 13 November 1998

Sekneg.

Menabuh beduk pada acara Takbir Akbar menyambut Hari Raya Id, di Masjid Istiqlal, 1999

bab 4 Seratus Hari Sebelum Pemilihan Presiden ke-4 RI

Masalah yang dihadapi manusia adalah akibat dari tindakan manusia itu sendiri dan manusia pula yang harus menyelesaikannya. Inti permasalahan adalah, bahwa manusia susah berpisah dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Sebelum SU MPR 1999 dimulai, saya harus memanfaatkan tiap kesempatan untuk memberi wawasan masa depan Indonesia sebagai suatu negara masyarakat madani (*civil society*) yang modern dan berbudaya.

Kesempatan pertama, pada pembukaan Rapat Gubernur seluruh Indonesia di Bina Graha pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1999. Pada kesempatan itu saya sampaikan wawasan mengenai pembagian tugas antara Polisi dan ABRI.

Pada saatnya nanti Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) nantinya akan bertanggung jawab kepada Presiden RI dan anggaran Polri dimasukkan ke dalam anggaran Departemen Dalam Negeri.

DPRD bersama Menteri Dalam Negeri dan Kapolri akan berperan dalam menentukan kriteria yang harus dipenuhi

dalam pemilihan Kapolda. Seragam Polisi Daerah akan dapat berbeda antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Yang menentukan seragam polisi nantinya adalah pemerintah daerah bersama DPRD setempat.

Tugas Polri adalah menegakkan hukum. Siapa yang melanggar rambu-rambu dalam hal ini, UUD 1945, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah, akan menghadapi Polri. Sedangkan TNI, akan bertugas menjaga kedaulatan teritorial wilayah Indonesia. Seragam seluruh Angkatan Darat sama, begitu pula Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal itu seiring dengan telah diundangkannya UU nomor 22 Tahun 1999 (tentang Pemerintah Daerah) dan UU nomor 25 Tahun 1999 (tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) serta dimulainya era baru pemerintah daerah dengan otonomi lebih luas.

Pemilihan gubenur harus demokratis. Pada saat itu, biasanya tiga nama calon gubernur diberikan kepada Presiden lewat Mendagri. Presiden dipersilakan memilih. Jika dari tiga calon Presiden tidak ada yang dapat diterima, maka semuanya dikembalikan dan dipersilakan untuk mengajukan tiga lagi sampai ada yang dapat diterima. Apakah ini namanya demokrasi?

Lebih demokratis jikalau Presiden menerima katakanlah 20 calon. Lalu bersama satu tim yang misalnya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Pangab, Ka. Bakin, dan Kapolri, Presiden mempelajari masukan tersebut. Setelah itu calon yang sudah diteliti, katakanlah tinggal 15 calon, diteruskan kepada DPR untuk dipilih satu yang menjadi gubernur. Bukankah demikian lebih demokratis? Apalagi kalau gubernur dan bupati dipilih langsung oleh rakyat, dan pelaksanaannya transparan tidak dipengaruhi oleh uang.

Jangan semuanya diserahkan kepada Presiden. Presiden

harus dekat pada rakyat dan Presiden bukan segala-galanya. Demikian pula, gubernur, bupati atau lurah juga bukan segala-galanya.

Pada kesempatan berikutnya, saya manfaatkan untuk menyampaikan wawasan saya pada peringatan Hari Koperasi ke-52 di Stadion Utama Senayan, hari Senin tanggal 12 Juli 1999. Saya mengajak segenap lapisan masyarakat untuk mulai memikirkan bagaimana membangun lembaga legislatif yang kuat dan efektif, serta mengatur kekuasaan presiden secara proporsional. Dengan pengaturan demikian, akan terjadi keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Tegaknya kedaulatan rakyat akan tecermin pada lembaga legislatif yang kuat dan efektif, yang dapat menghayati dan memperjuangkan keinginan rakyat. Oleh karena itu, wajar jikalau anggota DPR dan MPR, yang dipilih langsung oleh rakyat, secara teratur sering berkunjung ke daerah yang memilihnya, sering berada di tengah warga yang memilihnya dan menjadi akrab dan dekat dengan mereka.

Di tengah-tengah euforia politik pascapemilu ini, hendaknya energi jangan hanya terkuras pada pemikiran tentang pemilihan Presiden, yang sementara mekanismenya sudah cukup dijelaskan dalam konstitusi.

Terfokusnya perhatian pada pemilihan Presiden memang dapat dipahami, karena selama ini jabatan presiden sangat sarat dengan kekuasaan dan potensi terhadap pengkultusindividuan, walaupun hal itu mungkin tidak dikehendaki oleh Presiden terpilih. Pengkultusan itu terjadi karena selama ini kita lebih mementingkan figur seseorang, ketimbang institusi sebagai suatu sistem yang dilembagakan.

Karena demokrasi Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan, setelah penyelenggaraan pemilu adalah wajar

jikalau masyarakat sepenuhnya memercayakan aspirasi dan harapan kepada wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR dan MPR mendatang.

Kepada MPR diberikan kepercayaan untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menyusun Ketetapan-Ketetapan (Tap-tap) lain sesuai dengan aspirasi yang berkembang, termasuk kemungkinan untuk menyempurnakan beberapa hal dalam UUD 1945, sesuai perkembangan dunia yang semakin dinamis.

Upaya penyempurnaan terhadap beberapa hal dalam konstitusi itu hendaknya dipandang sebagai suatu hal yang positif, dalam rangka mewujudkan kehidupan politik dan ekonomi yang lebih demokratis, begitu pula untuk menyiapkan negara Indonesia meraih peluang serta menjawab tantangan di masa depan.

Dengan demikian, kita juga mendorong terciptanya sistem politik yang sehat dan stabil, yang sangat diperlukan dalam membangun masa depan bangsa.

Untuk dapat menilai keadaan 100 hari sebelum pemilihan Presiden ke-4, sebaiknya kita perhatikan pandangan pakar luar negeri dalam bidang politik mengenai Indonesia.

Yang menarik adalah pandangan pakar politik Amerika Serikat, Prof Daniel S. Lev. Lev berpendapat bahwa sistem pemilihan presiden di Indonesia yang tidak langsung, mempunyai banyak keuntungan bagi Presiden yang kini berkuasa untuk terpilih kembali. Sehingga, peluang B.J. Habibie jauh lebih besar dari Megawati. Lain halnya jikalau Presiden dipilih langsung.

Menurut pengamat masalah Indonesia dari Universitas Washington, Seattle, itu, hitung-hitungan kursi di Sidang Umum MPR nanti juga menunjukkan peluang dukungan

yang cukup untuk Habibie, terutama dari Utusan Daerah dan Golongan serta dari fraksi-fraksi Islam. "Fraksi-fraksi Islam jelas mendukung Habibie karena faktor Habibie di ICMI," ungkapnya.

Lev mengatakan bahwa gagasan pembentukan fraksi Islam itu belum tentu untuk menjegal Megawati yang partainya memenangkan pemilu.

Namun, katanya, partai-partai Islam sangat mengharapkan suatu saat Islam akan memegang peranan penting dalam politik dan pemerintahan. "Selama 150 tahun, Islam yang mayoritas di Indonesia diperlakukan seperti minoritas," ungkapnya. Ia menambahkan, fraksi-fraksi partai Islam itu tentu lebih dekat ke Habibie daripada Megawati, yang dianggap calon-calon legislatifnya lebih banyak nonmuslim.

Meski peluang Habibie lebih besar, bukan berarti kesempatan Megawati untuk terpilih menjadi presiden tidak ada, kuncinya adalah tergantung pada suara ABRI. "Kalau pimpinan militer bekerja sama dengan Megawati, tentu peluang Megawati terbuka lebar," ungkapnya.

Apalagi, lanjutnya, kalau Megawati bisa menjalin koalisi dengan Gus Dur (PKB) dan Amien Rais (PAN).

Pandangan pakar Amerika mengenai Indonesia yang tecermin dalam pandangan Daniel Lev tersebut cukup menarik. Ia juga berpendapat bahwa calon Presiden Indonesia yang dijagokan Amerika Serikat, adalah siapa saja yang bisa mengamankan *duit* Amerika di Indonesia.

Kepentingan Amerika, menurut Lev, adalah bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang aman, stabil, demokratis dan membuka pasar lebar-lebar buat Amerika dan bisa membayar utang-utangnya kembali ke Amerika.

Oleh karena itu, lanjutnya, ada kalangan di AS yang mendukung Habibie karena ia sudah jelas-jelas bisa dipegang

IMF di mana AS menjadi pemegang saham terbesar. Mereka juga menilai Habibie jauh lebih punya kemampuan.

Ada juga yang mendukung Megawati karena dialah yang memenangkan pemilu, namun faktor kebungkaman dan kediaman Megawati bisa merupakan hambatan, karena orang akan menilai putri Bung Karno itu tidak memiliki kemampuan yang cukup. Kemungkinan lain adalah munculnya tokoh lain di luar Habibie dan Megawati, "Itu bisa Amien Rais atau Wiranto," ungkapnya.

Berdasarkan pengalamannya bergaul dengan tokoh-tokoh dan orang Indonesia, Lev mengatakan ada kalangan di Indonesia yang percaya hanya pihak militer yang bisa mengamankan situasi di Indonesia.

Mengenai Amien Rais, Lev mengatakan, Ketua Umum PAN itu merupakan tokoh yang paling jujur. Misalnya, karena perolehan suaranya kecil, dia tidak lagi berambisi untuk jadi presiden. Amien dianggapnya reformis yang tahu posisi. "Kalau Amien diberi kesempatan oleh MPR pada Sidang Umum mendatang, dia bisa menjadi presiden yang baik," ungkap Lev.

Dalam rangka memberi masukan kepada rakyat Indonesia mengenai peran dan harapan yang harus diberikan kepada siapa saja yang mendapat kehormatan memimpin bangsa, maka saya berusaha menjelaskan sebaik-baiknya pandangan saya mengenai seorang Presiden R.I.

Saya kembali menegaskan bahwa jabatan sebagai Kepala Negara bukanlah merupakan hal yang paling utama bagi saya, karena yang paling utama adalah hubungan dengan sesama manusia. "Bagi Bacharuddin Jusuf Habibie, jabatan Presiden adalah bukan segala-galanya. Yang penting bagi saya adalah hubungan saya dengan sesama manusia," demikian saya sampaikan ketika mengadakan ramah tamah dengan pimpinan dan santri Pondok Pesantren Anwar al-

Maliki dari Pasuruan, Jawa Timur. Jabatan presiden hanya merupakan sebuah tugas yang mulia dan terhormat guna memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat.

Seorang pemimpin haruslah bagaikan sebuah mata air yang bersih dan jernih yang memengaruhi lingkungannya. Setiap pemimpin - apakah besar atau kecil, termasuk Presiden - harus berperilaku sebagai sumber air yang bersih dan jernih, yang dapat memberi kehidupan di sekitarnya agar dapat mekar dan subur, sehat berkembang. Janganlah berperilaku sebagai sumber air yang kotor dan beracun, sehingga lingkungan sekitarnya tidak dapat tumbuh bahkan mati.

Setiap pemimpin, harus jadi panutan dan mampu memberikan ilmu, serta cara-cara untuk mengambil jalan yang benar yang nilainya abadi bagi orang-orang di sekitarnya. Pada zaman yang penuh tantangan ini, yang diperlukan adalah orang-orang yang mampu menyerasikan keimanan dan ketakwaan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Yang menarik adalah pandangan negarawan Singapura Lee Kuan Yew yang secara tidak langsung mengingatkan para pemimpin Indonesia agar tidak mengubah sistem politik secara radikal. Langkah itu dapat membahayakan negara.

Apa yang harus kita hindari adalah perubahan secara besar-besaran dan gencar tentang cara kita mengerjakan sesuatu. Kita perlu lebih mengedepankan metode dialog dan pergaulan. “Perubahan radikal ini akan membuat sistem runtuh,” jelas Lee Kuan Yew dalam satu forum yang diorganisasikan oleh Dewan Pembangunan Komunitas Tanjong Pagar, di sekolah Anglo-China, Sabtu 18 September 1999.

Menurut Lee, pemerintah akan lebih mudah secara berangsur-angsur mengubah sistem yang secara politik bisa diterima, seiring dengan perkembangan masyarakat.

“Jikalau pemerintahan runtuh, Anda belum tentu bisa menemukan kelompok orang dan Perdana Menteri yang bisa membangun kembali pemerintahan ke posisi semula, dan itu artinya Anda dalam bahaya,” jelas Lee.

Selanjutnya Lee menegaskan, “Belajarlah dari pengalaman Indonesia, di mana perubahan radikal yang dilakukan menyebabkan runtuhnya pemerintahan dan penghormatan pada Presiden. Hasilnya, seluruh sistem runtuh.”

Lee menilai, tugas Habibie menjalankan roda pemerintahan menjadi tidak mudah karena pemberitaan media massa mengenai skandal yang mengelilingi Habibie.

Lee juga ragu, bila Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Presiden apakah dia mampu memimpin negara seperti yang pernah dilakukan Presiden Soeharto atau mendiang ayahnya, Presiden Soekarno?

Saya teringat, surat dari Lee Kuan Yew, yang disampaikan kepada saya melalui Menneg BUMN Tanri Abeng, yang mengucapkan selamat atas keberhasilan saya menghentikan *free fall* dari nilai mata uang rupiah terhadap US dolar dan keberhasilan menekan inflasi. Walaupun sebelumnya Lee Kuan Yew sangat mempertanyakan kemampuan saya dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang sangat memprihatinkan, dengan surat tersebut ia memperlihatkan jiwa besar dan sikap seorang negarawan.

Seperti yang diramalkan dan diprihatinkan oleh Lee Kuan Yew, pemberitaan mengenai saya dan ucapan para tokoh politik yang berseberangan sangat menyakiti perasaan. Saya harus sadari, adalah wajar bahwa sikap dan reaksi seperti itu akan muncul dari mereka yang selama ini merasa dirugikan oleh Orde Baru dan Pak Harto. Saya juga harus menyadari bahwa saya adalah salah satu tokoh Orde Baru yang mereka anggap sebagai penerus Pak Harto,

tanpa melihat apa yang saya perbuat untuk bangsa ini.

Secara sepintas mungkin demikian kesannya. Jikalau kita perhatikan perjalanan bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan, baik Presiden Soekarno, Presiden Soeharto maupun saya sendiri, memang semuanya meneruskan perjuangan mempertahankan jiwa UUD 1945, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk menjadi dasar membangun suatu masyarakat agar memiliki kualitas kehidupan dan budaya yang tinggi.

Kesinambungan perjuangan tersebut memberi kesan bahwa Presiden Soeharto adalah penerus Presiden Soekarno dan saya penerus Presiden Soeharto. Namun "tugas" dan "cara memimpin", baik Presiden Soekarno, Presiden Soeharto maupun saya berbeda, bahkan dalam beberapa hal bertentangan. Perbedaan ini dapat dimengerti, karena keadaan dan kondisi berbeda, serta generasi rakyat dan pemimpinnya pun berbeda.

Oleh karena itu, lebih tepat jikalau kita berbicara mengenai penahapan. Tahap pertama dipimpin oleh presiden pertama, tahap kedua dipimpin oleh presiden kedua, tahap ketiga oleh presiden ketiga dan seterusnya sampai ….. ke tahap "n" yang dipimpin oleh presiden ke "n". Aspek kesinambungannya adalah mempertahankan Konstitusi Negara (UUD 1945 dan Pancasila) dan wilayah NKRI sepanjang masa.

Jikalau Presiden Soekarno memusatkan perhatiannya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan nasionalisme yang sehat, patriotisme, dan sebagainya. Presiden Soeharto memusatkan pada pendidikan, pembangunan prasarana ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan sebagainya, maka saya memusatkan perhatian pada peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pemberian kebebasan, transparansi, demokrasi dan sebagainya.

Dapat diartikan pula bahwa tiap presiden memiliki tugas dan rencana tersendiri. Presiden pertama memimpin tahap "proses kemerdekaan", Presiden kedua memimpin tahap "proses pembangunan" dan Presiden ketiga memimpin tahap "proses kebebasan dan demokrasi".

Dengan kata lain, perjuangan bangsa terus berjalan secara bertahap dengan menyesuaikan pada keadaan dan kondisi –nasional, regional dan internasional— yang berubah.

Jumat tanggal 24 September 1999 antara pukul 13.30 hingga pukul 14.45 saya bersilaturahim dengan para pimpinan serta anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum 1997. Presiden dan DPR telah hidup berdampingan selama 16 bulan melaksanakan tugas untuk membuka pintu reformasi dan demokrasi.

Ketua DPR/MPR Harmoko serta para wakil, seperti Fatimah Achmad, Abdul Gafur, Hari Sabarno dan Ismail Hasan Metareum berkumpul bersama beberapa para menteri Kabinet Reformasi Pembangunan, seperti Menpora Agung Laksono, Mensesneg/Menkeh Muladi, Menhankam/ Panglima ABRI Jenderal Wiranto serta para menteri dan pejabat lainnya.

Dalam forum silaturahmi dan ramah tamah tersebut saya menyampaikan sambutan yang isinya antara lain menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR. Para pimpinan dan anggota DPR, telah bekerja keras sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan berbagai agenda reformasi, sebagaimana diamanatkan Sidang Istimewa MPR November 1998.

Sampai saat silaturahim itu, berlangsung aksi mahasiswa dan masyarakat yang menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB). Di sekitar jembatan Semanggi protes

keras dilakukan oleh para mahasiswa dan beberapa kelompok masyarakat.

Terhadap unjuk rasa tersebut, saya tidak mengeluarkan pendapat untuk mencegah terjadinya polemik yang saya harus hindari agar tidak mengganggu stabilitas yang begitu peka. Namun karena aksi demonstrasi masih terus marak, maka para wartawan mempertanyakan hal itu kepada Mensesneg/Menkeh Muladi, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Menpora Agung Laksono dan anggota DPR Komisi I Yasril A. Baharuddin, yang saya ikuti pula melalui pemberitaan.

Seperti dapat dibaca pada beberapa surat kabar, pada hari Sabtu tanggal 25 September 1999, Menhankam/ Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengatakan agar rangkaian aksi unjuk rasa menuntut pencabutan RUU PKB harus disikapi secara tertib dan arif. Sebab kalau tidak, yang akan terjadi adalah mengganggu kebebasan orang lain dan membuat masyarakat khawatir. Apakah kalau sudah begitu aparat keamanan harus diam saja?

Sementara itu saya mendapat imbauan, dan bahkan desakan dan kalau perlu melalui jalur hukum, yang menuntut agar saya mengundurkan diri sebagai Presiden, dengan alasan yang berbeda-beda.

Saya nyatakan bahwa saya tidak akan mundur dari jabatan sebagai Presiden sebelum tugas saya selesai, dan saya hanya akan mundur secara konstitusional. Saya siap untuk bertanggung jawab di depan Sidang Umum MPR mendatang dan setelah itu terserah kepada rakyat.

Adapula yang bertanya apakah saya merasa disaingi oleh Abdurrahman Wahid, calon presiden Poros Tengah? Saya tidak merasa tersaingi dengan munculnya calon presiden dari Poros Tengah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saya berpendapat bahwa apa yang dilakukan Gus Dur

adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal itu saya kemukakan pada acara silaturahmi dengan para peserta dialog dan pelatihan kepemimpinan nasional Gerakan Pemuda Ansor di Istana Negara. Saya juga memberi penjelasan dan imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mensukseskan SU MPR yang akan datang.

Siang harinya, di tempat yang sama, saya juga berbicara di depan para alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tentang tugas sebagai Presiden. Saya menegaskan, "Kalau tugas sebagai Presiden sudah selesai, *ya* selesai, selanjutnya terserah kepada rakyat."

Dalam forum tersebut saya juga menceritakan bahwa dari beberapa kalangan masyarakat sempat diajukan pertanyaan, apakah saya akan memanfaatkan kekuasaan Presiden untuk memengaruhi jalannya SU MPR? Dan apakah reaksi saya jika saya tidak dipilih lagi?

Dalam demokrasi kita harus tunduk pada keinginan rakyat melalui para wakilnya di MPR yang sudah diatur oleh undang-undang. Saya tidak akan mengganggu, apalagi membuat ribut-ribut, kalau tidak terpilih. Atau, kalau saya dipilih, saya juga tidak akan merasa hebat. Jadi satu-satunya yang benar, serahkan sama rakyat melalui para wakilnya yang baru saja dipilih langsung dalam Pemilu. Mengenai mekanismenya, sudah ditentukan oleh Tap MPR.

Siapa pun kalau terpilih sebagai presiden harus menerimanya. Saya tidak akan melakukan rekayasa apa pun supaya dipilih kembali. Presiden itu bukan pengecut. Kalau memang rakyat menghendaki, *ya* laksanakan, jangan jadi pengecut.

Di depan para alumni PMII tersebut, saya juga berbicara soal Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) yang dikaitkan dengan aksi penolakan dari masyarakat dan mahasiswa. Saya menyampaikan bahwa

RUU PKB jauh lebih baik ketimbang UU Nomor 23 Tahun 1959, karena RUU PKB memang dibuat untuk menggantikan UU Nomor 23/1959 yang dinilai menekan kebebasan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Seharusnya disadari, bahwa apabila RUU PKB ini ditolak, maka UU Nomor 23/1959 tersebut jadi tetap berlaku. Saya tidak mengerti apa yang diprotes.

Kita amat prihatin mengapa harus sampai terjadi korban tujuh orang akibat demonstrasi menolak RUU itu. Yang kasihan keluarganya, orang tuanya, dan kita sendiri. Jadi, sebenarnya saya tidak mengerti mengapa demikian jadinya. Kita harus bersyukur bahwa pemilu berlangsung lancar dan jurdil, sebagai suksesnya proses demokratisasi bangsa. Kita harus memasuki Sidang Umum MPR dengan tenang dan menghasilkan produk hukum MPR sesuai kehendak dan aspirasi rakyat.

Di depan alumni PMII, saya juga menyinggung masalah Bank Bali dan masalah Timor Timur secara sekilas. Kepada mereka saya jelaskan bahwa sudah ada hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur, sehingga sekarang terserah kepada para anggota MPR untuk memenuhi kehendak rakyat Timor Timur tersebut atau tidak.

Menyangkut masalah Bank Bali, saya mengingatkan bahwa jangan kaget, kasus Bank Bali itu mungkin yang pertama. Mungkin masih ada lagi masalah seperti Bank Bali yang akan timbul. Bukan bulan ini, bukan tahun ini, mungkin tahun depan. Akan dapat timbul terus. Saya tegaskan bahwa kita harus menyelesaikannya secara tuntas, melalui jalur hukum.

Pada kesempatan itu saya sempat melontarkan gagasan agar di masa mendatang nanti Presiden dan Wakil Presiden serta DPR dan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka benar-

benar Presiden itu mendapat legitimasi langsung dari rakyat. Jikalau nanti Presiden mau diturunkan, serahkan pada rakyat.

Dengan pemilihan langsung itu, maka MPR diberi tugas lain selain yang diatur sesuai UUD 1945 yang jelas akan disempurnakan melalui Ketetapan MPR atau Amandemen. Saya mengatakan juga bahwa pemilihan langsung saat ini dimungkinkan, karena 95 persen rakyat Indonesia sudah bisa membaca dan menulis, serta bisa menangkap informasi dari media cetak dan elektronik.

Saya jelaskan pula mengapa setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemilihan diadakan tidak langsung. Karena saat itu baru lima persen rakyat Indonesia yang bisa baca dan tulis dan prasarana informasi sangat terbatas.

Orang mungkin bertanya, kenapa Habibie itu keras kepala, disuruh mundur tidak mau, ditakut-takuti dia tidak peduli. Jawabnya *very clear*, saya akan memberi contoh apa itu demokrasi. Kalau saya mundur karena saya takut dan tidak melalui mekanisme demokrasi, berarti saya memberi contoh jelek dalam berdemokrasi. Saya memberi kesan yang salah kepada bangsa Indonesia, bahwa Presiden baru ditakut-takuti beberapa orang saja, sudah mundur.

Saya mengatakan hal tersebut kepada para tokoh pers Indonesia di Istana Merdeka, hari Jumat tanggal 1 Oktober 1999. Pertemuan yang diawali dengan shalat Jumat dan makan siang itu juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat lain, serta kedua anak saya Ilham dan Thareq Habibie.

Saya memang tidak ingin jadi seorang politisi yang tak berbudaya, yang menghalalkan apa saja untuk mencapai sasaran. Saya adalah diri saya sendiri. *Nah*, ini *kan* tinggal beberapa hari lagi tugas saya selesai sebagai Presiden. Insya Allah tanggal 22 Oktober. Ada pula yang bilang tanggal 13 Oktober, *but I didn't believe it*, karena MPR memerlukan waktu

dalam proses perumusan ketetapan-ketetapan yang diputuskan. Tetapi saya kemukakan bagi saya lebih cepat lebih baik.

Saya merasa *plong*, karena sejak 21 Mei tahun lalu, alhamdulillah, banyak hal yang sudah kita capai bersama. Pada waktu itu, kita tidak pernah membayangkan semua ini akan bisa dicapai, bahkan hanya 10 persennya pun tidak terbayang. Anak saya Ilham dan Thareq bertanya, "Bapak punya beban apa?"

Saya menjawab, "Saya tidak punya beban."

Wartawan bertanya pula, "Bagaimana Bapak memilih Pak Wiranto nanti sebagai wapres dalam pencalonan itu, latar belakangnya apa?"

Jawaban saya, "Saya tidak memilih siapa pun juga. Karena presiden belum terpilih. Dan saya adalah memang presiden sekarang sampai Sidang Umum MPR mengeluarkan ketetapan, dan saya adalah satu dari mungkin sepuluh calon presiden....Dan kita lihat saja bagaimana nanti!"

Berbagai hal dipertanyakan dalam pertemuan ini, antara lain masalah Bank Bali, Timor Timur, hubungannya dengan mantan Presiden Soeharto, serta soal peranan pers.

Keesokan harinya saya baca berita di surat kabar tentang pendapat Mensesneg/Menkeh Muladi tentang siapa yang akan keluar menjadi presiden pada SU MPR ini. Ia mengemukakan, "Saya tidak bisa menyatakan Pak Habibie menang atau tidak, tetapi masih memiliki kans... Megawati juga punya kans. Kansnya *fifty-fifty*," ujarnya sambil bersikap ragu ketika ditanya tentang kemungkinan KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden.

Mengenai upaya pemberantasan KKN, harian *Kompas*, Minggu 3 Oktober 1999, memuat wawancara melalui telepon dengan seorang pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr. Mahfud MD. Ia mengemukakan bahwa:

"Selama 16 bulan berkuasa, Presiden B.J. Habibie telah mengganti lima Jaksa Agung. Langkah itu ditempuh bukan untuk meningkatkan kinerjanya memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melainkan justru untuk melindungi pejabat pemerintah Orde Baru, termasuk mantan Presiden Soeharto."

Selengkapnya, pendapat Dr. Mahfud mengenai kinerja Habibie mengemban Tap MPR No XI/MPR/1998:

Dalam catatan saya, pemerintahan Habibie belum menyelesaikan satu pun kasus KKN. Dari kasus yang diperiksa dan orang-orang yang dimintai keterangan, belum ada satu pun yang final dan yang dapat menghasilkan putusan pengadilan yang benar-benar memuaskan masyarakat. Ketika Habibie pidato, penyidikan korupsi meningkat dibandingkan tahun lalu, saya kira itu hanya kasus kelas teri.

Rapor Habibie dalam bidang pemberantasan KKN nol. Saya kira, seperti dikatakan banyak orang, saya sangat percaya dengan teori yang mengatakan, sebenarnya pemerintahan ini sama korupnya dan bagian dari korupsi pemerintahan masa lalu. Pemerintah yang mempunyai tugas menegakkan hukum dan membersihkan kasus KKN takut pada akibat dari setiap tindakan yang diambil. Mereka takut terkena juga.

Penyelidikan atas diri Soeharto sudah sembilan bulan, namun siapa tersangkanya belum ada. Bagaimana Anda menjelaskan masalah ini? Sekarang ini alasan formal yuridis sering dijadikan alasan untuk menyelamatkan atau mencelakakan orang, tidak berbicara pada hati nurani. Sebenarnya kalau kita melihat kasus Soeharto, alasannya selalu saja bahwa seluruh kebijakan dan tindakan Soeharto yang dinilai masyarakat korup,

sudah dilindungi Keppres yang sah. Kalau berlindung pada SK, itu berarti aparat hukum dalam kasus ini selalu mendasarkan diri pada kebenaran formal, bukan pada upaya menegakkan keadilan. Apa yang ada di balik yang formal dan bagaimana terjadinya formalitas itu tidak dipermasalahkan.

Apakah kegagalan kejaksaan menentukan siapa tersangka dalam kasus KKN Soeharto akibat tekanan politik terhadap kejaksaan?

Menurut saya, kejaksaan bagian dari pemerintah. Semua yang bertugas menegakkan hukum merupakan bagian dari mosaik korupsi. Ibarat sebuah gambar, semua penegak hukum ada dalam gambar itu, baik kejaksaan, kepolisian, maupun pejabat.

Jadi, bukan karena tekanan politik?

Saya tidak katakan ada tekanan politik. Yang saya katakan mereka tidak berani.

Selama Habibie menjadi Presiden, ia sudah mengganti tiga Jaksa Agung, Soedjono, Ghalib, dan kemudian Ismudjoko. Apa yang Anda baca dari pergantian itu?

Anda keliru. Habibie sudah mengganti lima kali jaksa agung. Soedjono, Ghalib, Feisal Tanjung, Muladi, dan Ismudjoko.

Saya melihat ada kebohongan. Presiden Habibie ingin menyembunyikan sesuatu sehingga tidak berani melepas seorang Jaksa Agung kepada orang-orang yang mempunyai iktikad baik. Jadi, konteksnya penyelamatan Soeharto, termasuk pejabat.

Secara hukum, bagaimana penyelesaian elegan terhadap kasus Soeharto?

Saya melihat, kalau mau sungguh-sungguh berdasarkan hukum, Soeharto diadili dan mempunyai posisi hukum dan tingkat kesalahan yang jelas. Kalau mau diberi grasi, silakan. Namun, posisi hukum harus jelas. Kalau Anda menanyakan prospeknya, kemungkinan kalau diselesaikan pemerintah yang lama, akan terjadi pemutihan dengan alasan apa pun. Artinya, kasus ditutup. Tidak ada kesalahan, bukti, dan tidak akan ke pengadilan. Kalau ingin tuntas, harus ganti pemerintahan.

Kalau Habibie jadi presiden lagi?

Kalau itu, saya katakan harapan menyelesaikan KKN tidak ada. Sedang kalau presiden baru, ada harapan karena ada tokoh partai yang sekarang sepakat menyelesaikan kasus Soeharto secara hukum.

Sangat menarik pendapat tersebut. Saya tidak ingin memberikan komentar apa pun. Saya hanya ingin agar rakyat sendirilah yang memberikan penilaian, setelah mempelajari dengan seksama dan objektif masalah tersebut. Dan sejarahlah nanti yang akan mencatat kebenarannya. (Hanya sedikit koreksi, bukan lima kali penggantian Jaksa Agung, yang benar adalah dua kali, yaitu penggantian Soedjono C. Atmanegara dan Andi M Ghalib).

Seperti telah saya ungkapkan, menjelang SU MPR masalah yang cukup ramai adalah tentang hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur.

Salah satu pendapat yang berkembang adalah dengan adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978, dan sebelumnya UU Nomor 7/1976, sudah seharusnya Presiden

sebagai mandataris MPR melaksanakan ketentuan dalam Ketetapan MPR itu dan mengamankannya.

Atas dasar itulah, "opsi kedua" harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada wakil-wakil rakyat di SU MPR 1999. Demikian pendapat beberapa tokoh politik.

Menurut mereka, pemahaman masyarakat Indonesia dan juga rakyat Timtim terhadap "opsi kedua" itu bukan lagi sekadar opsi menolak otonomi dan menyerahkan masa depan Timtim kepada MPR.

Bergesernya "opsi diserahkan kepada MPR" menjadi "opsi kemerdekaan" itu jelas memunculkan persoalan yuridis, sehingga Harun Alrasyid berpendapat, dengan membuka peluang penentuan pendapat yang arahnya adalah kemerdekaan Timor Timur, maka Habibie selaku presiden telah menyalahi Tap No. VI/MPR/1978 yang menegaskan bahwa Timor Timur adalah wilayah RI.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR, KH Yusuf Muhammad, yang menjelaskan, proses pengambilan kebijakan yang memberi opsi penentuan pendapat dan berimplikasi pada kemerdekaan Timor Timur, diambil tanpa menghormati dan menghargai keberadaan lembaga yang seharusnya ikut dalam merumuskan kebijakan itu, yaitu DPR/MPR.

Jauh sebelum penentuan pendapat dilaksanakan, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdurrahman Wahid dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, juga menyatakan menolak gagasan untuk melepaskan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia, dan meminta agar Kabinet Pemerintahan transisi Habibie tidak mengambil keputusan besar seperti soal Timor Timur.

Menurut mereka, akibat lebih jauh dari langkah Habibie itu seperti diramalkan banyak orang, Timor Timur mengalami keadaan tidak menentu, dan lebih dari 100.000

pengungsi mengalir ke NTT. Entah berapa orang yang harus tewas akibat opsi tersebut. Akibatnya, Presiden harus memberlakukan keadaan darurat militer di Timtim melalui Keppres No 107/1999.

Menurut Prof Soewoto, sebelum MPR bersidang untuk menentukan nasib Timor Timur, Timor Timur seakan sudah "beralih" ke tangan PBB. TNI yang semula bersikeras akan terus menjaga wilayah itu sampai keluarnya ketetapan MPR, akhirnya "menyerah". Pasukan multinasional di bawah komando Australia pun mendarat di Timtim, dan TNI pun akhirnya angkat kaki dari bumi Loro Sae. Peristiwa ini, menurut Soewoto, merupakan kesalahan pemerintahan Habibie yang tidak mampu melaksanakan dan mengamankan Tap No. VI/MPR/1978.

Itulah berbagai pendapat mengenai masalah Timor Timur yang mengemuka saat itu, baik sebagai berita maupun "pemanasan" para politisi menjelang SU MPR. Sebagaimana masalah KKN, saya tidak akan memberi komentar apa pun, sejarahlah nanti yang akan mencatat kebenarannya.

Hal yang menarik adalah hasil kajian dan analisis beberapa pakar dalam bidang politik dan ekonomi yang dimuat di surat kabar *Republika* hari Senin tanggal 4 Oktober 1999, menjelang pelaksanaan SU MPR 1999 sebagai berikut:

> "*Berbagai kebijakan reformis yang digulirkan di awal pemerintahannya, membuat Habibie mendapat banyak simpati dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tapi, lawan-lawan politiknya berhasil memanfaatkan "kelemahan" yang dimiliki mantan ketua umum ICMI itu. Sehingga, Habibie sempat membuat* blunder, *dan menyebabkan dirinya jadi bulan-bulanan opini negatif media massa yang dikuasai kelompok anti Habibie.*
>
> *Tapi masyarakat Indonesia yang kian kritis, mestinya*

tak mudah terpancing argumentasi-argumentasi konyol yang cenderung memaksakan kehendak tadi.

Sebagai bahan pertimbangan, pemaparan sisi positif dan negatif Habibie berikut ini mungkin perlu dicermati.

Sentimen Positif untuk Habibie:

Dalam banyak hal, jauh lebih demokratis ketimbang Soeharto. Ia, misalnya, telah membuka keran kebebasan pers selebar-lebarnya — suatu yang justru disumbat sangat rapat pada masa pemerintahan Orde Baru. Kebijakan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Habibie untuk menyerang, dengan memuat opini dan komentar tendensius — termasuk informasi-informasi sampah — tentang dirinya, melalui media massa yang mereka "kuasai".

Pintu kebebasan berorganisasi juga dibuka lebar oleh Habibie. Sehingga, siapa pun kini boleh mendirikan partai politik, dan mereka dipersilakan bersaing secara fair *untuk menggalang dukungan massa. Bandingkan dengan skenario Orde Baru yang justru memaksa partai-partai yang ada kala itu untuk meleburkan diri (berfusi) menjadi hanya dua parpol dan satu Golkar.*

Pada pemerintahan Habibie pula lah, pemilu yang jurdil kembali bisa terlaksana, setelah berpuluh tahun selalu dilakukan dengan penuh manipulasi.

Masih dalam konteks kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat, Habibie juga telah membuka koridor yang sangat luas untuk berdialog dengan tokoh-tokoh yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi.

Gus Dur, sesepuh NU sekaligus deklarator Partai Kabangkitan Bangsa (PKB), salah satu "musuh" Soeharto, adalah orang yang secara cerdik memanfaatkan peluang itu. Sedangkan Megawati Soekarnoputri, Ketua

Umum PDI-P, tampaknya masih terlalu arogan untuk menerima tawaran dialog tersebut.

Walau belum benar-benar terealisasi, Habibie juga telah membuka wacana bagi peninjauan kembali konsep dwi fungsi ABRI —sesuatu yang diindoktrinasikan secara sewenang-wenang oleh pimpinan Orde Baru. Dalam kadar tertentu, wajah militerisme Indonesia kini sebenarnya sudah tampak lebih ramah dan sejuk, ketimbang saat pucuk pimpinan ABRI dipegang oleh Benny Moerdani dan kawan-kawannya, yang sangat anti Islam— agama mayoritas bangsa Indonesia.

Keputusan Habibie memberi kebebasan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri, merdeka atau memperoleh otonomi seluas-luasnya, sebenarnya juga harus diacungi jempol. Pasalnya, selama ini provinsi termuda Indonesia itu lebih banyak menjadi beban, baik beban moral maupun finansial. Namun, kebijakan itu kemudian juga "diplintir" oleh lawan-lawan politiknya, dengan mengatakan, "Habibie telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa", bahkan ada yang memberi gelar Habibie sebagai 'Bapak Disintegrasi Bangsa'. Padahal, pada masa pemerintahan Orde Baru, justru orang-orang yang kini berteriak soal persatuan dan kesatuan itulah yang selalu mendesak Soeharto agar memberi kemerdekaan pada masyarakat Timor Leste.

Meski belum mampu melepaskan diri dari karakternya sebagai "Mr. Big Spender" *(pemboros) tapi, secara signifikan Habibie telah mengentaskan bangsa ini dari ancaman kehancuran ekonomi. Kurs rupiah yang sempat meroket hingga hampir mencapai Rp17.000 per dolar AS, kini berhasil dikendalikan hingga pada kisaran Rp7.000--Rp8.000 per dolar AS (itu memang bukan kurs ideal rupiah, tapi cukup aman untuk kondisi ekonomi Indonesia*

yang seperti sekarang). Gaya kepemimpinannya yang santai, cerdas, dan pro globalisasi, menyebabkan investor internasional melihat Indonesia sebagai lahan yang sangat layak untuk berinvestasi. Sehingga, aktivitas perdagangan saham di bursa efek Jakarta yang sempat terkapar berangsur menggeliat kembali. Indeks pun melonjak, dari posisi 200 ke kisaran 500-600-an. Bahkan, level psikologis 700 pun pernah disentuh.

Kekhawatiran bakal terjadinya hiperinflasi pun berhasil diredam. Harga semua jenis barang, khususnya sembilan kebutuhan pokok, mulai normal. Pasokannya juga relatif mencukupi. Sehingga, tak ada lagi antrian panjang masyarakat miskin untuk sekadar mendapatkan sekantong minyak goreng atau seliter beras.Bahkan kini, kali pertama dalam sejarah, Indonesia mengalami inflasi negatif selama tujuh bulan berturut-turut. Meskipun, kecenderungan itu juga mulai perlu diwaspadai, karena jangan-jangan inflasi negatif yang berkepanjangan itu merupakan cermin merosotnya daya beli masyarakat. Kalau itu benar terjadi, maka proses produksi bisa tak berjalan.

Dalam mengekang kenaikan suku bunga, Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Habibie juga boleh dibilang jagoan. Mereka, berhasil memangkas tingkat bunga dari 70-an persen, menjadi hanya belasan persen. Dalam posisi seperti ini, mestinya bank sudah dapat menyalurkan kreditnya kembali, dan dunia usaha juga mulai bergerak. Tapi sayang, industri perbankan masih perlu mendapat suntikan dana segar, setelah selama berpuluh tahun menjadi lahan jarahan para konglomerat Orde Baru.

Sentimen Negatif untuk Habibie:

Secara personal, Habibie bukan politikus sejati, yang dapat melakukan tindakan apa pun atas nama kepentingan abadi sesuai dengan doktrin politik, yang mengatakan tak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Karena itu, hampir dipastikan, Habibie tak bakal ''menghabisi'' Soeharto. Apalagi, mantan presiden kedua Indonesia itu sudah telanjur dianggap sebagai salah satu guru oleh Habibie.

Bukan otoriter, tapi Habibie kerap terlalu percaya pada sejumlah orang tertentu. Akibatnya, ia agak susah menerima masukan 'berbeda' dari orang-orang yang berada di luar 'lingkarannya'. Ini bisa merugikan, karena bukan tak mungkin, opini yang disodorkan orang-orang kepercayaannya tadi, justru telah mengalami distorsi.

Kelemahan mendasar itulah yang menyebabkannya tak mampu secara tuntas membersihkan berbagai kasus korupsi, yang melibatkan keluarga mantan presiden Soeharto beserta kroninya. Habibie juga seperti kewenangan ketika terungkap adanya skandal keuangan yang dilakukan para menteri dan pendukungnya. Dalam kasus Bank Bali, misalnya, Habibie mestinya bisa melokalisasi persoalan dengan melakukan ''politik amputasi'' yakni menonaktifkan para pejabat yang terlibat, dan menyerahkan mereka pada pengusutan pihak kepolisian dan kejaksaan, serta memutuskan nasib mereka melalui lembaga peradilan.

Apa yang dilakukannya pada mantan Jaksa Agung AM Ghalib sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi sayang, penon-aktifan Ghalib, tak segera ditindaklanjuti dengan pengusutan yang lebih transparan dan tegas. Sehingga, kasus ini juga nyaris ''hilang'' tak ketahuan apa dan bagaimana kelanjutannya.

Habibie juga kurang tanggap terhadap aspirasi umat Islam mayoritas terbesar bangsa ini. Ia, misalnya, alpa dan tak segera membebaskan narapidana Islam, yang dijebloskan ke penjara oleh para penguasa abangan dan militer katolik Orde Baru, dengan tuduhan makar dan subversi, tanpa proses pengadilan. Di sini, visi pemerintahan Habibie, yang mencoba bersikap nasionalis bukan cuma berjuang untuk kepentingan Islam yang notabene telah membesarkannya agaknya perlu sedikit direvisi. Sebab, justru ''kegamangan visi'' itulah yang bisa jadi bumerang karena Habibie tak akan dapat diterima sepenuhnya oleh kalangan Islam, tapi juga dimusuhi oleh kelompok non muslim.

Terlepas dari dikotomi sisi positif dan negatif yang dimilikinya, apa yang telah dilakukan Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunannya boleh dikatakan sebagai sebuah prestasi. Tak heran, kalau seorang analis senior sebuah perusahaan sekuritas asing pernah memuji Habibie dengan kata-kata yang sederhana, tapi terasa sangat pas. ''Ia telah membangun Indonesia dari titik nol''.

Pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 1999, saya memimpin Sidang Paripurna Kabinet Reformasi Pembangunan, selama tujuh jam di Bina Graha, bertema pembahasan persiapan penyusunan pidato pertanggungjawaban Presiden yang akan dibacakan di depan Sidang Umum MPR tanggal 14 Oktober 1999.

Setelah mendengarkan laporan para Menteri Koordinator sebagai acuan awal dalam bidangnya masing-masing dan masih akan dirinci, saya sampaikan bahwa laporan Pertanggungjawaban Presiden, tidak hanya mencakup berbagai hal setelah dikeluarkannya Ketetapan

SI MPR pada tahun 1998, tetapi sejak Maret 1998 sampai 14 Oktober 1999.

Saya tugaskan kepada Menteri Negara/Ketua Bappenas untuk mengoordinasikan masukan dan bersama satu tim khusus penyusun pidato pertanggungjawaban Presiden yang telah mendapat pengarahan dari saya.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Bambang Subianto antara lain melaporkan tentang inflasi bulan September 1999 sebesar 0,68 persen. Sedangkan inflasi Januari sampai September 1999 sekitar 2 persen.

Sementara itu, berkaitan dengan undang-undang yang berlaku, enam menteri harus mengundurkan diri dari Kabinet Reformasi Pembangunan, karena kedudukan dan aktivitas yang bersangkutan di dalam partai politik masing dibutuhkan untuk menyukseskan SU MPR 1999. Jabatan yang ditinggalkan telah dirangkap oleh menteri lain.

Hal yang menarik sebelum pidato pertanggungjawaban saya sebagai Presiden yang akan saya bacakan pada hari pertama SU MPR hari Kamis tanggal 14 Oktober 1999, para pakar dalam berbagai bidang sudah mulai memberi komentar, seperti dimuat pada harian *Media Indonesia* pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 1999, berjudul *"MPR Harus Jujur Nilai Pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie."* Saya kutip selengkapnya sebagai berikut:

> *Penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J.Habibie tidak mungkin dilakukan secara jujur dan objektif karena MPR menggunakan logika politik, kata pakar politik dan hukum tata negara.*
>
> *Pakar politik dari Universitas Airlangga, Surabaya Muh. Asfar mengatakan ditolak tidaknya pertanggungjawaban presiden memang tidak bisa* fair *karena selalu menggunakan logika politik.*

"Saya kira ada tiga hal yang bisa menyebabkan pdato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak yakni Timor Timur, kasus Bank Bali, dan masalah KKN mantan Presiden Soeharto. Tapi kalau mau fair *sebenarnya keberhasilan Presiden Habibie juga banyak," katanya di Surabaya, kemarin.*

Ia mengatakan keberhasilan Presiden Habibie antara lain pembuatan UU Pemilihan Umum, terbukanya peluang amandemen UUD 1945, kebebasan pers dan berpendapat, desakralisasi Lembaga Kepresidenan, membatasi diri untuk menggunakan Kekuasaan Kepresidenan, dan sebagainya.

"Jadi, kalau mau fair *sebenarnya harus disikapi secara objektif, tapi karena disikapi politis maka justru akan mungkin adanya konspirasi sejumlah parpol untuk menolak pertanggungjawaban tersebut, terutama dalam masalah Timor Timur, Bank Bali, dan KKN mantan Presiden Soeharto. Bahkan, Golkar mungkin saja terlibat dalam konspirasi itu karena orang-orang Golkar yang memberi peluang masalah itu juga tampak."*

Mengenai implikasi politis berupa pemberhentian Presiden terhadap penolakan itu, ia mengatakan hal itu sebenarnya tidak otomatis harus membuat seorang Presiden berhenti jika pertanggungjawabannya ditolak, namun dalam dunia politik juga mengenal etika dan moral politik yang berkaitan dengan rendahnya legitimasi dan kredibilitas.

Pakar hukum tata negara Prof. Abdoel Gani berpendapat penolakan pertanggungjawaban Presiden tidak mungkin dilakukan secara jujur dan objektif karena hal itu memang bersifat politis sehingga penolakannya tak bisa berimplikasi yuridis, melainkan politis.

"Tapi, di Amerika juga begitu. Kalau pidato

pertanggungjawaban presiden ditolak tidak disikapi yuridis, tapi politis yakni presiden langsung berhenti. Masalahnya, penyikapan di Indonesia berbeda dengan di negara lain, karena meski ditolak tetap saja masih bisa dicalonkan lagi," katanya.

Ia mengatakan aturan yuridis untuk ditolak tidaknya pertanggungjawaban presiden tidak diperlukan seperti halnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur seorang kepala daerah (bupati/wali kota) harus berhenti jika pertanggungjawabannya di hadapan DPRD setempat ditolak.

"Kalau presiden, saya kira tak perlu diatur seperti kepala daerah, karena kepala negara itu berbeda dengan bupati atau wali kota. Jabatan presiden merupakan jabatan publik yang menampung pertanggungjawaban banyak orang, karena itu penyikapan secara politis atas pertanggungjawaban presiden sudah memadai," katanya.

Pakar hukum tata negara Prof. Soewoto juga mengatakan penolakan pertanggungjawaban presiden di Indonesia memang tak bisa dilakukan secara fair, *karena aturan tentang hal itu tidak ada sehingga ukuran objektivitasnya pun tak ada.*

"Tapi, kalau di Indonesia, jika ada penolakan pun, maka hal itu tidak berarti Presiden harus berhenti karena parpol pendukung akan tetap bersikeras memperjuangkannya," katanya.

Kemudian, tiga hari sebelum saya bacakan pidato pertanggungjawaban di hadapan para peserta SU MPR, pada hari Senin 11 Oktober 1999, surat kabar *Media Indonesia* kembali memuat suatu pandangan yang menarik untuk dapat menghayati keadaan dan kondisi di sekitar SU MPR 1999 dimulai. Selengkapnya saya kutipkan sebagai berikut:

'Kartu Truf' Habibie di MPR: Mengincar Posisi Dengan Prestasi

Habibie merasa sudah menyiapkan sejumlah 'kartu truf' dalam laporan pertanggungjawabannya. Di antaranya inflasi yang rendah, rupiah kuat, dan IHSG yang gagah. Tapi, kenapa tetap dianggap gagal di ekonomi?

Derai canda dan tawa mewarnai sidang lengkap Kabinet Reformasi Pembangunan di lantai II Bina Graha pekan lalu. Di beberapa sudut, beberapa menteri tampak asyik bergurau, sambil sesekali mengeluarkan tawanya yang lepas. Sama sekali tidak ada kesan tegang di forum yang penting itu.

Suasana seperti ini memang tidak persis menggambarkan materi rapat yang dibicarakan. Kalau dilihat dari materi, layaknya rapat itu diwarnai pembicaraan serius dan jauh dari suasana santai. Maklum saja, masalah yang dibicarakan adalah materi pertanggungjawaban presiden B.J. Habibie yang akan disampaikan 14 Oktober mendatang. Bagi Habibie, materi pertanggungjawabannya tentu saja sangat penting.

Sebab ini menyangkut kesempatannya untuk menduduki kursi presiden lagi. Karenanya, tidak heran bila banyak kalangan yang menganggap hari penyampaian pertanggungjawaban itu sebagai The Judgement Day *bagi Habibie. Hari Pengadilan bagi Habibie. Pada hari itulah semua kebijakannya akan dipertanggungjawabkan di depan MPR.*

"Kartu Truf"

Menyangkut pertanggunggjawaban di bidang

ekonomi, Habibie sudah menyiapkan beberapa kartu truf. Antara lain, indikator perkembangan moneter berupa menurunnya tingkat inflasi, membaiknya posisi nilai tukar, dan menguatnya indeks harga saham. Dia mencoba melamar posisi Presiden dengan prestasi ekonomi. Untuk inflasi, misalnya, pemerintah Habibie mengklaim mampu menurunkan hingga 0,68 persen pada bulan lalu. Sedangkan masa Januari-September inflasi tercatat sebesar 2 persen. Dibandingkan pada hari-hari menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto, angka ini tentu saja sangat kecil.

Sebab pada periode yang sama ketika itu, inflasi mencapai 75,74 persen. Perkembangan kurs juga sangat menggembirakan. Nilai tukar rupiah mampu mencapai kisaran 7.000/US$. Padahal ketika masa Soeharto, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.000/US$.

Masih ada lagi. Dari indikator pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sudah mampu mencapai kisaran 580 poin. Sementara, ketika krisis melanda, IHSG terpuruk hingga ke titik 200-an poin. Beralasan memang menjadikan indeks bursa saham sebagai salah satu indikator ekonomi. Sebab, maju mundurnya perdagangan di pasar modal secara langsung menunjukkan apa yang terjadi di dalam suatu negara secara keseluruhan. Tidak hanya kondisi ekonomi atau politik, melainkan juga implikasi sosial termuat dalam indeks saham tersebut.

Di atas kertas, beberapa indikator tersebut tentu saja merupakan prestasi yang sangat gemilang. Apalagi hal itu hanya dicapai dalam 17 bulan. Singkatnya, Habibie memang punya kartu truf.

"Kendati kabinet hanya relatif dan sebentar mewarisi begitu banyak penyakit, alhamdulillah prestasinya cukup

membanggakan. KKN yang sudah membudaya secara bertahap juga dihilangkan, dinetralisir. Tentunya semua itu tidak bisa seperti membalik tangan. Kerja kabinet ini hanya sekitar 17 bulan,'' papar Menteri Penerangan, Muhammad Yunus, usai rapat paripurna terakhir Kabinet Reformasi.

Habibie sendiri menyatakan kondisi perekonomian saat ini merupakan prestasi yang bagus. ''September tahun lalu, perekonomian kita ibarat pesawat terbang yang jatuh. Saya berkewajiban mengangkatnya kembali. September tahun ini pesawat itu sudah naik lagi,'' ujar Habibie dalam acara talk show *dengan sejumlah pimpinan media masa pekan lalu.*

Makro Bukan Acuan

Sayangnya, prestasi Habibie yang indah itu belum tentu akan menjadi rapor yang bagus bila di mata kalangan ekonom. Ekonom Sri Mulyani Indrawati, misalnya, mengakui kalau Habibie bisa menciptakan stabilitas makro. Namun stabilitas itu malah menimbulkan kepincangan pada sektor ekonomi lainnya. Bahkan biaya yang harus dikeluarkan pun sangat mahal. ''Stabilitas moneter dalam bentuk inflasi dan nilai tukar dicapai dengan ketatnya kebijakan moneter yang sempat melonjakkan suku bunga. Suku bunga tinggi inilah yang menyebabkan terpuruknya industri perbankan nasional,'' ujar Ani, panggilan akrabnya.

Pengamat ekonomi-politik dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, juga mengatakan hal senada. Menurut dia, indikator ekonomi makro seperti itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai patokan keberhasilan secara ekonomis. Alasannya, sebelum krisis terjadi Indonesia

selalu mengklaim mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Bahkan dengan pertumbuhan 7 persen, Indonesia disebut sebagai salah satu Asian Miracle*. Tapi ketika angin krisis baru saja berhembus, fundamental ekonomi yang dibangga-banggakan itu ternyata tidak mampu menahan. Bahkan, perekonomian malah menjadi hancur.*

''Jadi, indikator ekonomi makro seperti tingkat inflasi, menguatnya nilai tukar atau tingginya indeks saham tidak bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Dalam hal ini bisa dikatakan Habibie masih belum berhasil secara ekonomi,'' ujar Revrisond.

Lalu, bagian mana yang bisa dibilang sebagai prestasi? Lihat saja agenda reformasi yang telah disepakati dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Bila agenda reformasi itu sudah bisa diselesaikan, maka itulah prestasi yang layak dihargai.

''Berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi ini bisa dilihat dari agenda reformasi tersebut. Apakah agenda itu sudah diselesaikan atau belum. Kalau sudah, maka itulah salah satu prestasi yang dicapai pemerintah.''

Namun, menurut Revrisond, yang terjadi justru sebaliknya. Empat bidang reformasi yang disepakati dengan IMF, yaitu reformasi moneter, fiskal, perbankan dan sektor riil, belum bisa diselesaikan. Bahkan sekarang cenderung dikatakan gagal. ''Di sektor perbankan, misalnya, rekapitalisasi belum diselesaikan. Malah muncul skandal Bank Bali yang tak kunjung usai. Selain itu, BPPN yang bertugas menyehatkan perbankan justru terlibat dalam skandal tersebut.''

Ani dalam salah satu tulisannya juga menyebutkan biaya pemulihan ekonomi semakin mahal karena tidak adanya fokus prioritas pemulihan.

Akibatnya, sampai hari ini kebijakan moneter masih ketat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan jumlah uang beredar yang stagnan. Dalam ekspansi kredit, pertumbuhan negatif masih terus berlangsung.

Agaknya, masalah perbankan akan menjadi hambatan utama bagi MPR untuk menerima pertanggungjawaban Habibie secara ekonomi. Tingginya biaya restrukturisasi perbankan yang harus dikeluarkan belum juga memperlihatkan hasil yang diharapkan. Kredit perbankan kepada sektor riil belum juga mengucur. Akibatnya, sektor riil juga sulit bergerak.

Kendati begitu, Habibie sendiri agaknya sudah siap bila pertanggungjawabannya tidak diterima MPR dan siap mengeluarkan "kartu truf" lainnya. Pemerintah Habibie bahkan mengaku sudah kebal dengan sanggahan atau pertanyaan seperti itu. ''Apa pun yang ditempuh pemerintah selalu salah. Misalnya, soal angka inflasi. Kalau terjadi inflasi dibilang salah, terjadi deflasi juga tetap dibilang salah. Jadi, maunya apa,'' kata Menpen mengomentari banyaknya cercaan kepada pemerintah.

Pemberitaan lain yang juga menarik adalah Tajuk Rencana Harian *Kompas* pada hari Kamis 7 Oktober 1999, yang berjudul *"Terpilihnya Akbar Tandjung Mengungkap Hitung Hitungan Suara Menarik".* Selengkapnya saya kutip sebagai berikut:

Melalui 411 suara yang diperoleh dari pemungutan suara, Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar, terpilih sebagai Ketua DPR. Marilah kita cermati hitung-hitungan suara yang menarik.

Akbar Tandjung memperoleh 411 suara, Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI-P 54 suara, Khofifah Indar Parawansa dari PKB 13 suara, Hamzah Haz dari PPP 6

suara, AM Fatwa dari Fraksi Reformasi 2 suara.

Dari mana asal suara 411 yang diberikan kepada Akbar Tandjung? Dari Golkar 120 suara. Dari mana lagi? Setelah dikurangi suara yang diberikan kepada masing-masing calonnya, sisa suara Poros Tengah termasuk PKB masih tersisa 132 suara. Jika suara itu diberikan kepada Akbar Tandjung, total suara barulah 120 Golkar plus 132 suara Poros Tengah, jumlah 252 suara.

Karena Akbar Tandjung memperoleh 411 suara, masih ada kelebihan suara 189. Dari mana suara itu? Jika misalnya 38 suara dari TNI/Polri, juga 17 suara FKKI, dan lima suara dari PDKB, masih sisa 99 suara. Padahal Akbar Tandjung memperoleh 411 suara. Dari mana sisa suara 99? Tidak bisa lain kecuali dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Perbandingan angka di atas belum tentu 100 persen tepat. Ada lima suara abstain. Logis pula jika timbul pertanyaan, Fraksi PBB yang melakukan interupsi dan memiliki 13 suara, ke mana suara itu diberikan.

Jika perhitungan dibuat post factum*, setelah terjadi, tanpa dukungan PDI-P dengan 300 suara atau 300 minus pun, Akbar Tandjung sudah memperoleh mayoritas dan terpilih sebagai Ketua DPR.*

Jika perhitungan dibuat sebelum kejadiannya, yakni sebelum pemungutan suara, pertanyaan pun muncul, "Kenapa PDI-P memberikan mayoritas suaranya kepada Akbar Tandjung?"

Atas dasar hitung-hitungan dan logika politik, kuatlah argumen orang yang memperkirakan ada deal politik, ada saling pengertian politik antara Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Ke mana arah saling pengertian politik antara Golkar dan PDI Perjuangan itu? Tidak sulit untuk menebaknya.

Sebab, setelah Ketua MPR terpilih dan Ketua DPR juga terpilih, tinggal dua jabatan sentral yang belum dipilih yakni presiden dan wakil presiden.

Benarkah akan ke sana muara deal politik itu sekiranya saling pengertian itu memang ada? Sekali lagi, masuk akal bahkan logis. Tetapi, dalam politik tidak senantiasa logika berlaku. Politik bisa menjadi fulitik dan fulitik mengandung liku-liku lebih banyak.

Munculnya perkiraan atau interpretasi perihal kemungkinan deal politik antara Golkar dan PDI-P disuburkan oleh beredarnya faktor-faktor lain.

Misalnya, jika Poros Tengah sudah memperoleh kursi Ketua MPR, Golkar mendapatkan kursi Ketua DPR, bagaimana mungkin PDI-P yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum 7 Juni, tidak kebagian apa-apa.

Setelah Ketua MPR dan DPR, tinggallah kursi kepresidenan yang paling sentral. Sementara itu, bukan rahasia lagi, ke sanalah Megawati Soekarnoputri melangkahkan kakinya. Ia dicalonkan secara resmi sebagai calon presiden oleh partainya sama halnya dengan calon-calon presiden dari partai-partai lain.

Dia, Megawati menurut faktanya, calon presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Andaikata sudah berlaku sistem pemilihan presiden langsung seperti yang ingin diamandemenkan pada UUD, dengan sendirinya, secara langsung Megawati terpilih sebagai presiden.

Namun, sistem yang masih berlaku, masih membuka kesempatan lain. Presiden dipilih oleh 700 anggota MPR. Sebagian anggota MPR 238 diangkat, bukan dipilih langsung.

Meskipun orang tahu, suara terbanyak yang diperoleh

capres PDI-P tidak dengan sendirinya membawanya ke kursi presiden, mengapa pencalonannya menurut kenyataannya menjadi begitu sentral? Ada beberapa faktor, termasuk yang paling kuat adalah hubungan kharismatik dan emosionalnya dengan rakyat, karena kecuali putri Bung Karno, ia menjadi simbol penderitaan dan percobaan politik.

Ada faktor lain, misalnya, calon-calon lain, tidak memperoleh suara yang memadai. Presiden Habibie yang dicalonkan oleh Partai Golkar meraih suara nomor 2; PDI-P 153 suara, Golkar 120 suara.

Namun, menurut kenyataannya, sejak semula posisi Presiden Habibie sebutlah kontroversial. Kontroversi itu kemudian bahkan juga berlaku bagi kalangan Golkar sendiri. Akhirnya menjadi rahasia umum, bahwa dalam Golkar terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan cara berpolitik, termasuk perbedaan tentang pencalonan kembali Presiden Habibie.

Pemilihan Presiden akan berlangsung 20 Oktober, 14 hari lagi. Dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi dinamika politik dan permainan fulitik. Yang dapat kita pastikan, 14 hari itu akan menjadi hari-hari yang terasa panjang dan barangkali juga menegangkan.

Masuk akal, jika jangka waktu 14 hari itu akan dicermati secara saksama oleh kaum politisi, media massa, para pengamat, masyarakat politik dan rakyat.

Tujuan pencermatan terutama agar proses politik menuju dan sampai ke pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden itu, tetap berjalan secara demokratis, jujur, tanpa tekanan, termasuk godaan politik uang.

Terlepas dari bagaimana proses dan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, sepekan Sidang Umum MPR berhasil menggelar proses politik demokratis di atas

panggung nasional dan internasional. Tampak dan terasa benar, gairah dan semangat demokratis!

Sidang Umum MPR berhasil menampilkan pimpinan lembaga tinggi negara, MPR dan DPR yang menjanjikan wajah baru, jika bukan wajah baru seperti Akbar Tandjung, semangat dan komitmennya baru. Muda untuk ukuran Indonesia. Pimpinan baru serentak berhasil membuat langkah-langkah pertama yang menyegarkan dan memberikan harapan.

Apakah tampilnya kepemimpinan baru merupakan dambaan sejarah dan tantangan zaman yang juga akan terpenuhi dan dilengkapkan dengan sosok Presiden dan Wakil Presiden mendatang? Sepanjang kita dapat menangkap perasaan dan harapan yang hidup dalam masyarakat, barangkali ke sana pula, harapan dan dambaan itu.

Ada Habibie, ada KH Abdurrahman Wahid, ada Megawati Soekarnoputri. Siapa tahu masih ada lagi. Siapa tahu, konfigurasi figur-figur masih berubah. Kita menantinya dengan berdebar-debar penuh harapan. Yakni, harapan yang terbaik bagi keselamatan, kemajuan dan kesejahteraan kita, bangsa Indonesia seluruhnya.

Sementara itu, media massa di Jakarta melaporkan adanya beberapa unjuk rasa, terkait dengan menjelang dilaksanakannya SU MPR. Unjuk rasa tersebut antara lain dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ka'bah (PPP) DKI Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1999.

Mereka menyerukan agar *"Semua komponen bangsa agar tidak menghalang-halangi B.J. Habibie menjadi calon presiden. Berikanlah kepercayaan kepada 700 anggota DPR/MPR sebagai wakil rakyat untuk memilih presiden mendatang."*

"Apabila dalam SU MPR Pak Habibie terpilih, hendaknya diterima secara lapang dada. Apabila ada yang menghalang-halangi, lalu membuat keadaan menjadi ruwet, Pemuda Kabah akan menghadapinya," kata Ketua GPK DKI Jakarta Ahmad Murda.

"GPK siap mengamankan Jakarta, jika ada pihak yang turun ke jalan mengatasnamakan rakyat tetapi bertindak anarkis. Sebaliknya, GPK juga tak akan menghalangi jika Megawati atau Gus Dur terpilih menjadi presiden."

"Jangan macam-macam. Kita harus fair *bahwa yang menentukan presiden adalah anggota MPR. Jangan karena tak terpilih, lalu turun ke jalan melakukan protes dan tindakan anarki. Ini yang tak kita inginkan,"* tegasnya.

Secara bersamaan, unjuk rasa juga dilakukan puluhan anggota Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Jakarta Selatan. Mereka menolak tindakan kekerasan selama berlangsungnya SU MPR dan menuntut agar MPR memilih presiden reformis yang bisa meneruskan cita-cita reformasi.

Meski jumlahnya tidak terlalu banyak, unjuk rasa BM PAN menarik perhatian orang, karena mereka berkeliling membawa satu patung topeng reformasi dan jenazah yang dibalut kain putih sebagai pertanda matinya rezim Orde Baru.

"Kami tak mempermasalahkan orangnya, sepanjang pemilihannya demokratis dan sesuai kehendak rakyat. BM PAN menolak jika presiden terpilih tak mampu melaksanakan visi reformasi yang disuarakan mahasiswa," tegas Koordinator Lapangan BM PAN, Agung Surya.

Sementara itu, harian *Kompas* pada hari Senin 11 Oktober 1999, melaporkan hasil kesimpulan jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang *Kompas* (melalui telepon pada tanggal 5-8 Oktober sebelumnya) terhadap 1.158 responden di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Ujungpandang.

Dari belasan tokoh yang muncul sebagai calon pemimpin bangsa adalah: KH Abdurrahman Wahid, Bacharuddin Jusuf Habibie, dan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan tokoh yang dinilai paling populer.

Namun, dari sisi kelayakan untuk menjadi pemimpin bangsa, hanya Megawati dan Abdurrahman Wahid dengan segenap kelebihan dan kekurangannya yang dianggap paling pantas untuk menyandang tanggung jawab tersebut.

Jajak pendapat itu memang memunculkan beberapa nama lain, seperti Wiranto, Akbar Tandjung, dan Marzuki Darusman. Para responden menilai masing-masing tokoh itu mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa, seperti memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mengatasi krisis ekonomi, menjamin keamanan negara, dan menjaga keutuhan bangsa. Para responden juga berpendapat, setiap tokoh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

> *Dari seluruh penilaian dan pendapat tersebut, sebagai pemimpin bangsa, Megawati dianggap sebagai tokoh yang paling populer. Ia menjadi pilihan dari 52 persen responden. Sedangkan Abdurrahman Wahid dan B.J. Habibie masing-masing dipilih oleh 11 persen dan 10 persen responden.*
>
> *Sementara itu, dari keseluruhan tokoh yang muncul, nama Megawati dan Abdurrahman Wahid menjadi dua nama yang dianggap paling mampu mengatasi persoalan bangsa.*

Semakin dekat hari pembukaan SU MPR 1999, semakin meningkat aktivitas yang hendak memengaruhi agar saya terus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan ada pula yang berusaha untuk meyakinkan agar saya tidak meneruskan.

Dari pemberitaan yang saya pantau, tampak dengan jelas bahwa banyak pula yang mengeluarkan pernyataan bahwa apa pun saya laporkan pada SU MPR nanti, mereka tetap akan menolak dan tidak akan menerima Laporan Pertanggungjawaban Presiden. Alasan yang diberikan mulai dari masalah KKN, masalah Timor Timur, masalah Pak Harto dan keluarga sampai masalah legitimasi saya sebagai Presiden ditonjolkan.

Saya menerima beberapa tokoh Islam yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid, Amien Rais dan K.H. Abdurrahman Wahid yang berkunjung ke kediaman saya di Kuningan. Mereka menasihati agar saya mengundurkan diri sebagai Presiden.

Jawaban saya adalah bahwa saya secara konsisten akan membacakan Pidato Pertanggungjawaban saya dan terserah pada penilaian para anggota di SU MPR untuk menilainya.

Jikalau diterima, maka saya akan meneruskan tugas saya dan mendaftarkan sebagai calon Presiden ke-4 RI. Namun jikalau pertanggungjawaban saya sebagai Presiden tidak diterima, maka saya tidak bersedia untuk dicalonkan kembali.

Masalah di Indonesia begitu kompleks sehingga untuk menyelesaikannya, putra ataupun putri terbaik dari bangsa Indonesia, diperlukan untuk memimpin kita keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kita tidak dibenarkan membuat suatu percobaan dengan nasib jutaan rakyat, nasib dan masa depan anak cucu.

Harus kita sadari bahwa banyak kebijakan yang bersifat

irreversible atau tidak dapat diulang lagi. Sebagai contoh, jikalau kita memutuskan seseorang dihukum mati, dan setelah hukuman mati tersebut dilaksanakan ternyata yang bersangkutan tidak bersalah, maka tidak mungkin orang yang sudah mati itu dapat kita hidupkan kembali. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *irreversible* sifatnya.

Demikian pula berlaku untuk perusahaan. Jikalau perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah kita jadikan bangkrut atau kita tutup untuk selama-lamanya, tetapi ternyata kelak perusahaan tersebut sangat dibutuhkan, maka sulit perusahaan tersebut dioperasikan kembali. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *irreversible*.

Oleh karena itu baik manusia yang sakit maupun perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan, harus kita bantu untuk disembuhkan kembali. Dibutuhkan kebijakan yang profesional dan tidak dibenarkan membuat *experiment* dengan mengambil kebijakan yang emosional dan tidak profesional.

Berbicara mengenai legitimasi, memang penting manusia apalagi seorang pimpinan memiliki legitimasi yang tinggi. Legitimasi tersebut diberikan oleh manusia di sekitarnya atau rakyat suatu negara. Namun legitimasi bukan segala-galanya. Artinya, jika legitimasi sudah diberikan, tidaklah berarti secara otomatis semuanya akan beres!

Jikalau demikian halnya, maka tidak ada masyarakat di dunia yang melarat. Berikan saja kepada pimpinan atau Presiden yang memiliki legitimasi tinggi, lalu semuanya akan beres.

Kenyataannya tidak demikian. Legitimasi adalah syarat minimum yang harus dipenuhi namun tidak mencukupi. Yang perlu adalah persyaratan tambahan, bahwa yang dipilih harus membuktikan kemampuannya dengan karya nyata telah menghadapi dan menyelesaikan semua tugas

yang diberikan sesuai jadwal, dengan biaya dan pengorbanan yang minimal. Juga dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan dapat menghindari pengambilan kebijakan yang *irreversible* dengan tepat dan cepat.

Akhirnya sampailah pada hari dilaksanakannya Sidang Umum MPR 1999. Sidang umum dijadwalkan dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 1999 pukul 19.00 WIB dan akan berakhir pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1999 pukul 19.00 WIB.

Ketika saya memasuki Ruang Sidang Paripurna MPR didampingi oleh Ketua dan para Wakil Ketua MPR lainnya, saya disambut dengan sebagian besar tepuk tangan beberapa waktu dan beberapa lagi dengan sorakan dan ucapan yang sangat menyinggung perasaan.

Saya menahan diri dan tiap langkah saya iringi dengan panjatan doa kepada Allah SWT, "Saya memohon ampun atas segala kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja yang pernah saya lakukan. Saya mohon ampun pula atas sikap dan perlakuan mereka yang yang mungkin tidak sadar atas perbuatannya."

"Berilah kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya para wakil rakyat yang hadir di ruangan ini, kekuatan dan petunjuk mengambil jalan yang benar sesuai kehendak-Mu. Berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi semua dengan tenang dan bijaksana."

Sambil tersenyum, doa terus saya panjatkan, juga ketika saya duduk seorang diri di depan para wakil rakyat yang terhormat.

Acara SU MPR 1999 yang terbuka secara umum dan dihadiri juga oleh Kepala Perwakilan negara sahabat dan wakil kelompok masyarakat, media cetak dan elektronik, dimulai dengan acara sebagai berikut:

- Pembukaan Rapat Paripurna ke-7.
- Pidato Pengantar Pimpinan Majelis.
- Pengesahan Jadwal Acara Sidang Umum MPR RI tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

Tepat pada pukul 20.30 WIB, saya dipersilakan untuk menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban saya yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

Pengantar

Perjalanan waktu selama 512 hari, bangsa Indonesia telah bahu-membahu melaksanakan reformasi, mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan semula, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bangsa Indonesia memulai mengawali reformasi bersamaan dengan upaya untuk bangkit kembali dari puing-puing ambruknya bangunan ekonomi bangsa, longsornya landasan sosial kemasyarakatan dan tertutupnya pintu-pintu demokrasi. Keadaan ini merupakan akumulasi kesalahan dan kerusakan yang terjadi di masa-masa lalu, karena sistem yang terbangun di kala itu gagal mengembangkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kesalahan yang terjadi.

Kerusakan yang menumpuk antara lain berupa pemusatan kekuasaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi, tindakan represif yang mengabaikan nilai-nilai kemajemukan, kebebasan dan hak asasi manusia, pendekatan pembangunan yang sentralistis, dan tidak ditegakkannya supremasi hukum serta terjadinya praktik-praktik KKN yang sudah membudaya.

Menghadapi kondisi yang memprihatinkan, Kabinet Reformasi Pembangunan mengambil prakarsa dan memutuskan kebijakan-kebijakan pokok sebagaimana telah saya gariskan pada Sidang Kabinet tanggal 25 Mei 1998

dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat terhadap reformasi.

Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunan segera berupaya mengatasi krisis, terutama menghentikan kenaikan harga-harga, memulihkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, melaksanakan program jaring pengaman sosial, mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukan restrukturisasi perbankan dan utang swasta.

Di bidang politik, Pemerintah mengambil langkah untuk segera memperbaharui perangkat peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menyelenggarakan pemilu yang menjamin terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar membawakan aspirasi masyarakat.

Pemerintah juga segera membebaskan tahanan politik dan mewujudkan kebebasan pers serta mendorong berdirinya partai-partai politik.

Di bidang hukum, Pemerintah segera melakukan peninjauan terhadap peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kehendak reformasi, serta meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan perburuhan.

Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan pokok-pokok reformasi sebagai garis-garis besar haluan negara, serta ketetapan-ketetapan penting lainnya, walaupun ada sekelompok tertentu masyarakat yang berusaha menggagalkannya.

Di bidang ekonomi, MPR telah menetapkan dua arah kebijakan pokok yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi.

Keadaan ekonomi pada awal reformasi demikian jelek, antara lain ditunjukkan dengan nilai rupiah merosot tajam, harga-harga membubung tinggi sehingga membawa kita ke

ambang hiperinflasi. Kerusuhan, kekacauan, perusakan, pembakaran terjadi di mana-mana, sehingga produksi bahan pangan menurun tajam dan distribusi sembilan bahan pokok terganggu. Perbankan mengalami kelangkaan modal, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nyaris hilang. Kegiatan ekspor dan impor menurun tajam karena sistem pembayaran kita tidak dipercayai oleh lembaga keuangan internasional. Secara ekonomi kita nyaris terisolasi dari masyarakat internasional.

EKONOMI
Indikator Ekonomi

Dibanding keadaan perekonomian yang sangat buruk pada saat terjadinya pengalihan pimpinan nasional pada bulan Mei 1998, keadaan perekonomian kita saat ini jauh lebih baik. Nilai rupiah mengalami penguatan, inflasi menurun tajam, dan ketersediaan serta distribusi kebutuhan pokok tidak lagi menjadi permasalahan. Kini inflasi telah terkendali secara meyakinkan. Pada periode Januari sampai September 1999, laju inflasi hanya mencapai 2 persen, pada hal laju inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 75,47 persen. Demikian pula laju inflasi pada periode April 1999 sampai dengan September 1999 mengalami deflasi sebesar -3,9 persen, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun 1998 sebesar 38,04 persen.

Ditinjau dari Indeks Harga Konsumen, harga-harga pada bulan September 1999 dibandingkan dengan harga-harga pada bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik 1,25 persen. Padahal setahun sebelumnya yaitu harga-harga pada bulan September 1998, naik 82,4 persen dibandingkan harga-harga pada bulan September 1997.

Penurunan tingkat inflasi yang sangat berarti ini terjadi bukan karena penurunan daya beli, tetapi terutama disebabkan oleh perbaikan nilai tukar rupiah, dan keseimbangan antara ketersediaan pasokan dengan

kebutuhan pangan, serta lancarnya distribusi sembilan bahan pokok.

Penurunan inflasi ini juga diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi terendah terjadi pada triwulan III 1998. Kenaikan tingkat konsumsi ini memang relatif masih kecil, namun tanda-tanda pemulihannya sudah mulai terlihat.

Beberapa indikator ekonomi lainnya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia telah mulai memasuki proses pemulihan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produk domestik bruto yang secara berturut-turut positif pada triwulan I dan triwulan II tahun 1999 yaitu sebesar 1,31 persen dan 0,46 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 1999 dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 1998 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen. Pada triwulan III tahun 1999 pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan positif lagi.

Dari kecenderungan pertumbuhan PDB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 diperkirakan akan mencapai antara 0 persen sampai 1 persen, padahal tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami penurunan sebesar -13,2 persen.

Nilai tukar rupiah juga terus menguat mencapai sekitar Rp6.700 per satu dolar AS pada bulan Juni 1999. Padahal pada bulan Juni tahun 1998, nilai rupiah masih sekitar Rp15.000 per satu dolar.

Dengan menguatnya rupiah, terkendalinya inflasi, suku bunga juga terus menurun. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia juga terus menurun mencapai sekitar 13 persen. Padahal pada bulan Agustus tahun yang lalu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia masih sekitar 70 persen. Bersamaan dengan penurunan suku bunga maka *negatif spread* yang dialami bank-bank juga dapat diatasi.

Cadangan devisa kotor pada akhir bulan September 1999

mencapai 26,9 miliar dolar atau setara dengan 10,4 bulan impor, dibanding 19 miliar dolar atau setara dengan 6,7 bulan impor pada bulan Mei 1998.

Investor luar negeri juga sudah mulai menanamkan modalnya di pasar modal, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan yang pada bulan September tahun 1998 sekitar 250, pernah meningkat mencapai di atas 600 pada bulan Juni 1999 dan sekarang ini berada pada tingkat di sekitar 570.

Semua indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sudah memasuki tahap pemulihan.

Perbankan

Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistem perbankan.Dengan demikian penyelesaian masalah perbankan dan utang swasta baik domestik maupun luar negeri sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi.

Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial yang beroperasi pada bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bank direkapitalisasi dengan bantuan Pemerintah. Likuidasi, pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dilakukan secara tegas berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan.

Aset-aset bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Jumlah aset perbankan yang sudah dialihkan ke badan tersebut, sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp350 triliun. Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian ditawarkan kepada investor.

Perkembangan restrukturisasi perbankan cukup menggembirakan. Investor asing mulai berminat, bahkan beberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank. Ini berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri.

Restrukturisasi Hutang

Di sektor riil, Pemerintah mendorong restrukturisasi, terutama terhadap utang-utang swasta kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani sekitar 1600 debitur besar yang utangnya macet dan perlu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam proses restrukturisasi yang telah diselesaikan adalah klasifikasi debitur ke dalam empat kelompok yang terkait dengan iktikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola restrukturisasi yang telah digariskan.

Alternatif penyelesaiannya bervariasi dari kemungkinan perpanjangan waktu pinjaman, penurunan tingkat suku bunga pinjaman, penambahan modal, dan konversi utang menjadi modal dan lain sebagainya. Sekitar 70 kesepakatan restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp50 triliun.

Kemajuan restrukturisasi utang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk mewadahi penyelesaian utang-piutang di luar peradilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia *(Indonesian Dept Restructuring Agency, Indra)* untuk melindungi debitur terhadap risiko perubahan nilai tukar rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah terdaftar 284 debitur dengan nilai utang dalam dan luar negeri sebesar Rp201,2 triliun. Dari jumlah ini sudah 27 debitur mencapai tahap persetujuan prinsip penyelesaian utangnya dengan nilai utang total sekitar Rp28,7 triliun.

Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi

Dalam menjalankan amanat TAP MPR No.X dan TAP MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pengembangan ekonomi

rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga. Hal ini diprioritaskan karena kelompok usaha ini merupakan 99 persen dari pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenaga kerja.

Dalam mengatasi krisis dan pemulihan kondisi ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi telah dilibatkan secara nyata. Keberhasilan pemulihan produksi dan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepas dari kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga agar dapat berkembang secara efisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan kerja sama saling menguntungkan dengan perusahaan besar.

Untuk membantu usaha kecil dan menengah Pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapat meringankan beban mereka. Selain itu Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program penyaluran kredit untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha.

Pemberian kredit usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan melalui penyediaan subsidi yang dianggarkan Pemerintah. Subsidi yang disediakan berasal dari dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Namun, karena Bank Indonesia harus mandiri maka tidak dimungkinkan lagi menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Sebagai penggantinya, Pemerintah memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mensubsidi suku bunga pinjaman bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pengelolaan Pertanian, Sumber Daya Alam dan Pariwisata

Dalam masa krisis, ternyata sektor pertanian dan sektor

yang bertumpu pada sumber daya alam tidak banyak mengalami permasalahan. Bahkan produksi pertanian tanaman tumbuh secara meyakinkan. Karena itu kegiatan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan serta sektor pertambangan didorong perkembangannya, antara lain melalui program pengalokasian kredit yang lebih besar dan lebih luas, serta pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dengan perusahaan swasta berskala besar.

Langkah-langkah reformasi di bidang pengelolaan sumber daya alam juga telah dilakukan, misalnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Langkah-langkah nyata yang telah ditempuh dalam pengelolaan hutan adalah redistribusi manfaat melalui restrukturisasi pengusahaan hutan dan kebun, pembatasan luas areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan hutan kemasyarakatan, serta keikutsertaan lembaga ekonomi rakyat dalam mengelola hutan dan kebun.

Begitu pula pengembangan bidang pariwisata mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai kegiatan promosi seperti program pengembangan wisata alam dan wisata budaya. Pada periode Januari 1999 sampai Agustus 1999 telah terjadi peningkatan kunjungan wisata mancanegara sebesar 8,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun 1998.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam jangka menengah kita sedang meletakkan landasan bagi kehidupan perekonomian yang maju, mandiri, serta mengandalkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi, sehingga kesempatan untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan akan lebih merata dan terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak.

Di masa yang akan datang, Pemerintah akan lebih

berkonsentrasi pada penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan, pembudayaan, dan penyediaan lapangan kerja, pengamanan sosial, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Sementara itu, pengembangan ekonomi dipercayakan semaksimal mungkin kepada masyarakat pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar.

Pengelolaan Moneter

Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional dan internasional, perlu ditetapkan kebijakan dan pengelolaan moneter yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu diperlukan Bank Sentral yang mandiri yang dapat menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas dan kualitas nilai tukar rupiah. Untuk menciptakan kemandirian Bank Indonesia, kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini ditujukan agar Bank Indonesia dapat terfokus pada misi utamanya yaitu memelihara kestabilan dan kualitas nilai rupiah, secara mandiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, Bank Indonesia berwenang penuh melaksanakan kebijakan moneter dan menetapkan sasaran-sasaran moneter. Untuk mengawasi implementasi kebijakan di bidang moneter, Bank Indonesia setiap tiga bulan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia. Untuk meletakkan dasar-dasar praktik perbankan yang lebih baik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang

perbankan yang baru ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui bank-bank yang sehat dan yang tidak sehat. Undang-Undang ini juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dapat didirikan di mana saja dan juga memuat pengaturan tentang bank syariah, serta mendorong berdirinya asuransi deposito untuk menjamin simpanan nasabah.

Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-Undang ini mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku ekonomi tertentu dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini, akan dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berupa suatu lembaga mandiri yang terlepas dari pengaruh Pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Anggota Komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, kita telah berhasil mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan produsen mencantumkan informasi yang lengkap tentang produk yang dihasilkannya. Undang-Undang ini juga mendorong dan menjamin berkembangnya lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentingan konsumen, serta menjamin pelaksanaan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak secara langsung dirugikan *(class action)*.

Restrukturisasi BUMN

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan kita pada utang luar negeri, kita perlu melaksanakan program restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara secara konsisten agar diperoleh nilai tambah dari keuntungan dan nilai pasar yang tinggi melalui swastanisasi. Swastanisasi Badan Usaha Milik Negara ini selain menghasilkan dana untuk Pemerintah, juga akan meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan milik negara di pasar domestik maupun di pasar global.

Keikutsertaan mitra luar negeri sebagai pemegang saham baru akan membawa masuk modal, teknologi, manajemen, dan sistem jaringan pemasaran, serta sistem purna jual yang andal.

Jika program swastanisasi BUMN dan optimalisasi penerimaan pajak dapat kita lakukan dengan efisien dan berkesinambungan, maka Indonesia secara bertahap akan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan bahkan mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri.

POLITIK

Pada awal perjalanan Kabinet Reformasi Pembangunan, kita menghadapi krisis politik, sebagai akibat kecenderungan masa lalu, yaitu terjadinya pemusatan kekuasaan, tidak diindahkannya pelaksanaan demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum.

Meskipun menurut hasil Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, pemilihan umum akan diseleggarakan pada tahun 2002 saya telah memberanikan diri mengusulkan kepada MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan Nopember

1998 untuk mempertimbangkan percepatan pelaksanaan pemilu.

Hal ini harus kita lakukan, karena kondisi kehidupan nasional kita secara objektif memang harus kita selesaikan dengan mempercepat pelaksanaan pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, sehingga dapat segera mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat terhadap jalannya Pemerintahan.

Perubahan Undang-Undang bidang Politik

Dengan penuh keyakinan, kita mendorong lahirnya undang-undang politik yang lebih demokratis. Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah melakukan perbaikan dan pembaharuan atas tiga undang-undang di bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum, dan tentang susunan dan kedudukan anggota MPR dan DPR serta DPRD sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999.

Melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999, tentang Partai Politik, pembatasan terhadap jumlah partai politik ditiadakan.

Partisipasi politik dan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat dijabarkan secara tegas dalam Undang-Undang No.3 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Untuk menghilangkan campur tangan Pemerintah dalam proses pemilu, Pemerintah juga mengatur netralitas TNI dan Polri serta Pegawai Negeri Sipil.

Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pemilu, Pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta pemilu. Pelaksanaan pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang sebagian besar anggotanya merupakan wakil-wakil partai politik peserta pemilu sendiri, sedangkan

Pemerintah lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator.

Demikian pula halnya dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu. Bukan hanya lembaga pemantau dalam negeri saja, pemantau dari luar negeri juga diberi keleluasaan. Hasilnya, seperti diakui oleh para pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah terlaksananya pemilu yang jauh lebih jujur, adil dan demokratis dibandingkan dengan enam kali pemilu sebelumnya.

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Kita juga berusaha menumbuhkan Pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan Undang-Undang. Untuk itu, sesuai amanat Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Kita juga telah memperbarui ketentuan mengenai pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita jadikan pegangan dalam menyelenggarakan pemberantasan KKN dan mengembangkan Pemerintahan yang bersih.

Stabilitas dan Keamanan

Agenda penting lainnya adalah mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat bagi reformasi. Meskipun di sana-sini terjadi kerusuhan dan bentuk-bentuk kekerasan massa, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, namun dampaknya terhadap stabilitas nasional masih dapat dikendalikan.

Harus kita sadari bahwa pergolakan yang terjadi di beberapa daerah sesungguhnya merupakan fenomena yang terkait dengan permasalahan yang sudah tercetus di masa lalu, yang tertekan oleh sistem kepemimpinan selama 40

tahun, yang tidak memungkinkan berkembangnya demokrasi.

Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai oleh suasana kebebasan dan demokratisasi, gejolak-gejolak itu dengan bebas tampil kembali ke permukaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan jangka pendek, apalagi dengan upaya yang mengutamakan tindakan represif.

Semuanya memerlukan kemampuan, kesungguhan dan kesabaran kita dalam mengendalikan konflik melalui penyelesaian yang hakiki dan berjangka panjang sesuai kehendak dan keinginan rakyat.

Penyelesaian masalah Aceh

Dalam jangka panjang kunci penyelesaian berbagai konflik terletak pada upaya kita membangun sistem demokrasi berdasarkan hukum yang berkeadilan, sehingga memungkinkan partisipasi politik tumbuh sehat, dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara demokratis, terbuka, dan bermartabat, bukan melalui tindak kekerasan. Saya mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan semua persoalan secara damai, demokratis, transparan, tulus, adil dan beradab, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di Aceh, Pemerintah telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah sesuai saran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah. Komisi ini sudah mulai melaksanakan tugasnya dan hasil temuannya akan segera ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah sangat memerhatikan aspirasi masyarakat Aceh yang berkembang sangat dinamis, sehingga Pemerintah telah menarik semua pasukan nonorganik dari

Daerah Istimewa Aceh. Untuk memulihkan kondisi di Aceh, telah pula diundangkan Undang-Undang No. 44 tentang Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh yang diprakarsai oleh DPR. Dengan undang-undang ini, masyarakat Aceh memperoleh keleluasaan yang luas untuk mengurus sendiri kehidupan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat yang sesungguhnya sudah lama didambakan oleh masyarakat Aceh. Di samping itu dengan adanya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, masyarakat Aceh juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan kehidupan politik secara lebih otonom dan mengelola sumber perekonomiannya secara lebih mandiri.

Kehidupan Pers yang Bebas

Pengembangan demokrasi, di samping harus mengandalkan aturan hukum yang bersifat formal, juga memerlukan komitmen etik bagi terbangunnya budaya politik yang sehat dan bermoral. Karena itu, kita membutuhkan kehidupan pers nasional yang merdeka, bermoral, dan profesional. Kemerdekaan tanpa diimbangi oleh nilai-nilai moral dan profesionalisme yang berkaitan erat dengan aspek-aspek etika profesi dapat merusak makna kemerdekaan itu sendiri.

Kita juga bersyukur bahwa pers nasional telah mulai berperan penting dalam mencerahkan kehidupan masyarakat, melalui skala pemberitaan yang tidak mungkin terjadi pada masa lalu.

Sekarang, kita dengan mudah dapat memperoleh informasi yang lengkap dan cepat melalui media massa. Bahkan perdebatan di DPR mengenai permasalahan tertentu dapat kita saksikan langsung. Sekalipun Pemerintah merupakan pihak yang paling banyak dikritik oleh pers yang bebas, namun saya bersyukur karena hal ini justru menunjukkan bahwa keterbukaan dan demokrasi telah berjalan baik di negara kita.

Bagi saya kritikan melalui media massa merupakan masukan yang sangat berharga dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Pers yang merdeka, bermoral dan profesional diharapkan dapat memelihara dinamika masyarakat yang tecermin pada keseimbangan pemberitaan informasi antara pelaku pembuat kebijakan dengan pembentuk pendapat publik, baik perorangan maupun organisasi.

Kemerdekaan pers yang profesional merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Untuk menjamin kemerdekaan pers, kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 40 tentang Pers, yang selain memberikan jaminan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, termasuk kemerdekaan membentuk organisasi wartawan lebih dari satu.

Dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya Dewan Pers yang mandiri.

Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru kita hanya memiliki 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta, sekarang telah lahir 1.398 media cetak dan 74 stasiun penyiaran swasta baru. Begitu pula di bidang pertelevisian swasta, dalam waktu dekat akan bertambah 5 stasiun baru. Perkembangan perusahaan pers diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, kreativitas dan wawasan masyarakat serta dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif, baik terhadap Pemerintah, masyarakat maupun dunia pers itu sendiri.

Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi

Mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat, juga sangat penting. Peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang lalu, membuktikan bahwa kita telah berupaya

mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin penuh oleh konstitusi. Sekarang rakyat dengan bebas dapat mendirikan organisasi atau asosiasi tanpa menghadapi peraturan yang berliku-liku. Saat ini, untuk satu jenis profesi, kita dapat menyaksikan demikian banyak asosiasi atau organisasi yang telah didirikan. Rakyat juga telah diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum, dan masih dalam rambu-rambu dan batasan-batasan hukum berdasar konstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kita telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang harus ditempuh agar penyampaian pendapat itu dapat terlaksana dengan tertib. Intinya, Undang-Undang ini mengatur dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan terganggunya hak dan kebebasan orang lain.

Memang kita akui tidak mudah mengatur semangat kebebasan yang cenderung tumbuh berlebih-lebihan, seiring dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab dan bermoral, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang berkembang demikian cepat. Namun, secara bertahap dan penuh kesabaran, kita percaya bahwa semua perangkat hukum yang telah kita hasilkan akan dapat menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif, seiring dengan proses pendewasaan budaya demokrasi yang akan terus tumbuh di hari-hari mendatang.

Peningkatan Peran Lembaga Legislatif

Di era reformasi ini, telah kita kembangkan agenda pertemuan berkala antara Presiden dan pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi dengan mengambil tempat secara

bergantian di Istana dan Gedung DPR/MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan Pemerintah ini ditempuh, agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan sebaliknya Pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan maupun pengawasan dari DPR.

Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang dan hak untuk meminta keterangan dari Pemerintah untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Presiden di depan Sidang Paripurna DPR, sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999.

Desakralisasi Lembaga Kepresidenan

Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dan tidak pernah kita saksikan di masa lalu. Seiring dengan itu, kita juga terus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong cara kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral.

Berulang kali saya menegaskan bahwa pada hakikatnya istana-istana kepresidenan merupakan istana rakyat, dan setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden.

Kita berharap semua yang telah kita kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih mendewasakan kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta.

Reformasi TNI dan Polri

Langkah penting lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengembangan pendekatan atau

paradigma Tentara Nasional Indonesia yang baru. Dalam rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka langkah awal yang ditempuh adalah menempatkan untuk sementara sistem penyelenggaraan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Kita tidak menginginkan polisi yang hanya menjadi alat kekuasaan. Kita menginginkan polisi yang disegani dan dicintai masyarakat. Disegani, karena polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegak hukum, dan dicintai karena polisi selalu mengutamakan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat.

Dengan wawasan ini, kita berharap terbangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra dan kualitas pelayanan polisi dalam meningkatkan rasa aman, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu polisi menegakkan ketertiban dan keamanan.

Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian secara rinci dan intensif serta menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut aspek struktural, instrumental dan kultural.

Bersamaan dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, dilakukan pula penggantian istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.

MASALAH TIMOR TIMUR
Latar Belakang Penyelesaian

Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan penyelesaian masalah Timor Timur secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia 24 tahun yang lalu, yang dikukuhkan melalui TAP MPR No.VI/MPR/1978, tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah memiliki klaim terhadap Timor Timur dan tidak pernah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis tersebut. Integrasi Timor Timur terjadi karena suatu situasi terpaksa yang sulit dihindari dan atas kehendak sebagian masyarakat Timor Timur sendiri untuk menyelesaikan perang saudara yang berkecamuk di wilayah tersebut.

Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk pembangunan di Timor Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timor Timur. Namun sungguh disesalkan bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di sementara kalangan rakyat Timor Timur sendiri.

Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah Timor Timur. Sampai saat ini, tidak kurang dari 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Timor Timur telah dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat internasional mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun tidaklah mudah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di Timor Timur yang secara historis memang sering bergolak.

Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahap telah mengembangkan kesadaran kebangsaannya bersama bangsa Indonesia. Namun sebagian lagi tidak bersedia melakukan hal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota, yang dibantu oleh organisasi berskala internasional.

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak semula ingin menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang secara internasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah Timor Timur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa membuahkan hasil. Sejak tahun 1983 pembicaraan tentang Timor Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum Tripartit antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB. Perundingan Tripartit akhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke Timor Timur pada tahun 1986 dan 1991 sebagai dasar pembahasan penyelesaian masalah Timor Timur.

Berakhirnya Perang Dingin dan semakin besarnya perhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan hak asasi manusia, telah mengangkat masalah Timor Timur menjadi salah satu agenda internasional yang sulit dihindari, dan klaim Indonesia bahwa masalah Timor Timur sudah selesai tidak dapat dipertahankan.

Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Otonomi Luas dengan Status Khusus

Bersamaan dengan lahirnya era reformasi, maka terbukalah kesempatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk memecahkan masalah Timor Timur secara komprehensif. Dalam kaitan ini, maka perundingan Tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan segar, yaitu konsep otonomi luas dengan status khusus bagi rakyat Timor Timur.

Untuk itu Pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998 usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

Kendati Pemerintah Indonesia dan Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timor Timur, antara kedua negara tetap terdapat perbedaan prinsipil yang tidak dapat dipertemukan.

Pemerintah Indonesia berharap bahwa tawaran otonomi luas dapat merupakan solusi akhir bagi masalah Timor Timur. Sebaliknya, Portugal melihat tawaran otonomi luas sebagai solusi antara, di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai solusi antara sebagai langkah awal menuju referendum, hal ini dinilai justeru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaian secara tuntas.

Perbedaan visi yang mendasar antara kelompok prointegrasi dan antiintegrasi akan sangat menyulitkan

terbentuknya suatu Pemerintahan daerah Otonomi Khusus Timor Timur yang stabil.

Dalam masa transisi tersebut masalah Timor Timur akan tetap menimbulkan persoalan bagi Indonesia —baik di dalam maupun luar negeri— tanpa adanya kepastian mengenai suatu penyelesaian yang komprehensif dan damai. Adalah lebih baik apabila masalah Timor Timur dapat kita selesaikan secara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama, daripada membiarkannya semakin berlarut-larut.

Sementara itu, pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status khusus tersebut masih dirundingkan di New York, pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi —baik di Timor Timur maupun di luar negeri— terus-menerus melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5–10 tahun dan sesudahnya diadakan referendum untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur menghendaki otonomi atau memilih kemerdekaan.

Tentu saja, pemikiran penyelesaian seperti itu tidak dapat kita terima. Lagi pula jika otonomi luas hanya diterima sebagai penyelesaian antara, maka akan sangat sulit diharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karena masing-masing pihak akan terus memperkuat barisannya untuk memenangkan referendum.

Menghadapi kenyataan tersebut timbul kesadaran bahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatif penyelesaian andaikata tawaran otonomi luas tersebut akhirnya ditolak.

Jajak Pendapat

Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai kemungkinan penyelesaian alternatif bagi masalah Timor Timur secara tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999, Pemerintah mengumumkan alternatif penyelesaian tersebut.

Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan pimpinan

DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR. Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas —setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun terakhir, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama kita— maka adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, jika Pemerintah mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat pada Sidang Umum MPR, kiranya dapat mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan Pemerintah ini dikenal sebagai Opsi Kedua.

Pemberian opsi kedua ini diputuskan berdasarkan keinginan kita yang tulus dan ikhlas untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur yang sejak awal telah menjadi sumber pertikaian pendapat internasional dan telah menyita tenaga dan pikiran kita selama lebih dari dua dasawarsa.

Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertama milenium ketiga.

Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyat Timor Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab.

Dalam suasana keterbukaan dan saling ketergantungan global, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan alasan konvensional bahwa mengingat status Timor Timur secara konstitusional sudah dikukuhkan oleh MPR pada tahun 1978, kita bisa menolak tuntutan masyarakat internasional tanpa risiko dikucilkan dari pergaulan dunia.

Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada TAP MPR No.VI/MPR/1978, Presiden —sebagai penyelenggara Pemerintahan tertinggi

dan pelaksana kebijakan Pemerintah tertinggi, sesuai dengan kewenangannya— menyampaikan usul untuk menyelesaian masalah Timor Timur, yang diharapkan tidak hanya dapat diterima di dalam negeri tetapi juga oleh masyarakat internasional.

Maka sesuai perjanjian Tripartit di New York yang ditandatangani pada 5 Mei 1999, rakyat Timor Timur telah diberi kesempatan melalui jajak pendapat untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran otonomi luas ataupun menolak.

Sebagai pelaksanaan Persetujuan New York, rakyat Timor Timur telah melaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Kemudian, pihak PBB telah mengumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 4 September 1999, yakni 78,5 persen menolak dan 21,5 persen menerima, dan dengan demikian mayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas.

Betapa pun pahitnya kenyataan ini, namun sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan New York, Pemerintah dengan rasa berat telah menyatakan menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut.

Perkembangan Pasca Jajak Pendapat

Sementara itu, pihak yang kalah dalam jajak pendapat ternyata tidak dapat menerima kenyataan itu dan menuduh Unamet telah melakukan kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan jajak pendapat tersebut. Atas desakan Pemerintah Indonesia, keluhan-keluhan mengenai beberapa penyimpangan tersebut telah dibahas oleh Komisi Elektoral —yang anggotanya berasal dari Korea Selatan, Afrika Selatan dan Irlandia— dalam suatu dengar pendapat publik yang berlangsung selama dua hari berturut-turut di Dili, disusul oleh suatu keterangan pers di Jakarta. Sangat disesalkan bahwa berdasarkan dengar pendapat tersebut, Komisi Elektoral menyimpulkan bahwa sebagian besar dari

penyimpangan yang dikeluhkan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tidak dapat diterima.

Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yang menolak tawaran otonomi luas telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timor Timur yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional.

Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur.

Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur —sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus— maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

Penyelesaian Akhir di MPR

Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka pada kesempatan ini saya mengharapkan Majelis yang terhormat berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan berkenan pula menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selanjutnya sesuai ketentuan pada Pasal 6 Persetujuan New York, kiranya ketetapan tersebut dapat pula mengesahkan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan damai.

Jika ini kita laksanakan, kita dapat menunjukkan kepada

dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
67 Undang-Undang dan 1 Perpu

Dalam rangka pembentukan dan pembaruan materi hukum, Pemerintah bersama-sama DPR telah berhasil menyelesaikan pembentukan sebanyak 67 Undang-Undang baru, ditambah 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang belum sempat dimintakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Perpu No.1/1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dengan perundang-undangan yang baru itu, kita telah meletakkan landasan bagi pengembangan sistem dan penataan kelembagaan hukum, sehingga cita-cita demokrasi dan supremasi hukum dapat segera diwujudkan.

Keberhasilan kita menyelesaikan 68 produk perundangan tersebut dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan patut kita syukuri bersama. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 Undang-Undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 UU per tahun (0,34 per bulan).

Saya percaya peran lembaga legislatif di masa-masa yang akan datang akan lebih meningkat lagi sesuai dengan keinginan kita bersama.

Upaya Penegakan Supremasi Hukum

Dalam melaksanakan prinsip supremasi hukum, upaya mempertegas pemisahan fungsi judikatif dari fungsi Pemerintahan, merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum. Karena itu, sesuai amanat Majelis, kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999

tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah Agung.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita kembangkan keberadaannya terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Di waktu-waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kita tingkatkan kedudukannya sebagai aparatur hukum yang makin mandiri.

Semua itu, penting dalam upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai prinsip supremasi sistem hukum.

Perlunya Amandemen UUD 1945

Terkait dengan itu, saya telah pula mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya melakukan penyempurnaan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini penting untuk menjamin agar Pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan.

Dengan makin sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar negara, insya Allah, kita akan memiliki landasan yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.

Pentingnya Elemen Kepemimpinan

Yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat.

Karena itu, dalam kerangka sistem hukum kita, saya berusaha untuk memperkenalkan pentingnya elemen kepemimpinan dalam sistem hukum nasional, di samping elemen-elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, peranan kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum dan menggerakkan bekerjanya sistem hukum itu sangatlah penting.

Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan segala permasalahan menurut aturan hukum yang berlaku. Memang sangat banyak masalah yang harus kita selesaikan dalam rangka penegakan hukum, sehingga ada saja orang yang merasa tidak sabar dan ada pula yang ragu akan kesungguhan Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Namun, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus memperjuangkan pelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegang teguh pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila —khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang telah dirumuskan 3 tahun mendahului Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948.

Tekad Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia.

Untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, yaitu:

Pertama, pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang hak asasi manusia

Kedua, penyebarluasan dan pendidikan tentang hak asasi manusia

Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar

Keempat, pelaksanaan Konvensi Hak Asasi Manusia yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

Ratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki, tentang kebebasan berserikat

dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Di bidang kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kita juga telah membentuk Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad kuat Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia.

Selain itu kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam menegakkan hak asasi manusia Pemerintah juga telah membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa.

Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi —misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia— sama sekali tidak dapat dibenarkan dan ditolerir.

Demokrasi dan kebebasan harus tunduk pada konstitusi, hukum, etika dan moral, yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penanganan Pelanggaran Berat HAM

Tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Timur pada pasca jajak pendapat, perlu dikemukakan bahwa hal itu merupakan komitmen kita untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Untuk itu Pemerintah telah membantu

pembentukan Komisi Penyelidik Khusus oleh Komnas Ham. Untuk mewadahi proses hukumnya, Pemerintah telah membentuk suatu badan peradilan khusus pelanggaran hak-hak asasi manusia pasca jajak pendapat di Timor Timur atas dasar pasal 104 Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Timor Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat, kasus tewasnya mahasiswa Trisakti maupun kasus penculikan yang terjadi menjelang era reformasi —walaupun beberapa pelakunya sudah diadili— kami sependapat dengan masyarakat bahwa penyelesaiannya masih perlu dituntaskan lagi.

Memang tidak mudah untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi tersebut dan pemerintah dengan segala kemampuan yang ada terus berupaya mengungkapkannya.

PENGEMBANGAN BIROKRASI

Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Untuk mewujudkan itu, kita telah meletakkan dasar-dasar pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Perangkat Hukum Birokrasi yang Bersih

Dalam hal penanganan masalah KKN, berbagai kebijakan dan upaya rasional serta sistematis terus dilakukan dan dikembangkan baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Kebijakan preventif dilakukan antara lain dengan memberikan pedoman kepada para penyelenggara negara tentang langkah-langkah menghapuskan KKN. Termasuk juga dalam langkah preventif ini adalah pembuatan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan pembaharuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang dilengkapi dengan sistem pembuktian yang lebih kondusif.

Saat ini sedang disiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pemeriksaaan Keuangan Negara.

Secara struktural diciptakan lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang akan segera berfungsi untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara guna mencegah praktik KKN.

Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

Tindakan represif terhadap praktik KKN terus dilakukan baik melalui proses hukum administratif antara lain melalui penghapusan fasilitas istimewa, hukum perdata, maupun hukum pidana, yang di satu pihak dilakukan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, di lain pihak tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah serta nilai hak asasi manusia.

Langkah hukum administratif yang telah dilakukan meliputi pengenaan sanksi dan restrukturisasi usaha,

penataan ulang pengelolaan aset negara, penertiban penggunaan dana khusus, antara lain dana reboisasi, penghapusan monopoli, penindakan terhadap pejabat pegawai negeri sipil dan pemeriksaan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk meneliti kemungkinan adanya pemborosan dan pemberian perlakuan istimewa oleh akuntan publik.

Sedangkan proses hukum perdata antara lain dilakukan dengan cara pembatalan kontrak atau perjanjian —misalnya di bidang pertambangan dan kehutanan— negosiasi utang dan melalui gugatan pengacara negara untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Tindakan Hukum Kasus KKN

Tindakan hukum pidana dilakukan dengan melimpahkan kasus KKN yang mengandung tindak pidana khusus kepada kejaksaan. Dalam periode 21 Mei 1998 sampai dengan 30 Juni 1999, penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595 persen, penyidikan naik sekitar 349 persen dan penuntutan naik sekitar 321 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan penindakan tindak pidana korupsi yang meningkat cukup tinggi ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari masyarakat.

Kita juga telah berusaha menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto sesuai amanat TAP No.XI/MPR/1998. Berbagai kalangan masyarakat terus berusaha agar mantan Presiden Soeharto dapat segera diadili. Dorongan semangat demikian ini pulalah yang menyebabkan Majelis yang mulia memberikan perlakuan yang sangat khusus kepada mantan Presiden Soeharto, sehingga nama beliau dicantumkan dengan penekanan khusus dalam ketentuan Pasal 4 TAP MPR tersebut. Tanpa adanya perlakuan politis yang bersifat khusus ini, ketetapan MPR jelas merupakan produk hukum

yang berlaku universal bagi setiap warga negara, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan secara murni oleh aparatur penegak hukum.

Penyelesaian Kasus Dugaan KKN mantan Presiden Soeharto

Namun, dengan adanya perlakuan politis yang bersifat khusus tersebut, penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto itu terkait erat dengan tanggung jawab Presiden yang wajib dilaporkan kepada Majelis yang terhormat.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, saya harus pula mempertimbangkan dinamika aspirasi politik yang terus berkembang. Karena itu, penyelesaian kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto, kita tunggu sampai selesainya pemilihan umum. Tujuannya, agar wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umum dapat dilibatkan dalam menilai pelaksanaan amanat Majelis yang terhormat.

Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dugaan KKN mantan Presiden Soeharto. Berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1998 dan Inpres Nomor 20 tahun 1998 Pemerintah telah menghentikan pemasukan dana-dana ke Yayasan dan mencabut semua ketentuan yang dijadikan sebagai dasar perolehan dana bagi semua yayasan, termasuk yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto.

Pemerintah juga telah mencabut fasilitas bebas pajak bunga deposito dan tabungan terhadap 11 yayasan. Pemerintah juga sudah melakukan audit legal dan finansial terhadap yayasan yang menerima dana dan menarik kembali dana yayasan yang digunakan oleh kroni-kroni mantan Presiden Soeharto.

Setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum, saya telah melakukan prakarsa untuk mengadakan tukar pikiran dan konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik yang terbukti benar-benar mendapatkan kepercayaan rakyat. Hasil

pertemuan dengan pimpinan partai politik yang berlangsung di Istana Merdeka menghendaki agar proses penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tidak menutup mata terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto dan pertimbangan jasa-jasa beliau dalam pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar itulah, saya segera memerintahkan kepada aparatur penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dugaan KKN mantan Presiden Soeharto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap mantan Presiden Soeharto — khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Dana Abadi Karya Bhakti (DAKAB) dan Supersemar — maka pada tanggal 27 September 1999, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait.

Namun karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup kuat, maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut.

Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dipersangkakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai sejauh ini berdasarkan Surat Kementerian Kehakiman Austria yang disampaikan pada tanggal 1

September 1999 sebagai jawaban terhadap permohonan Jaksa Agung RI, disampaikan bahwa atas dasar berbagai investigasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait di Austria, tidak terdeteksi adanya arus uang kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarga serta kroninya.

Dengan dikeluarkannya SP3 oleh aparat penegak hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan terhadap kasus-kasus lain untuk diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila ditemukan cukup alat bukti yang kuat dan meyakinkan di masa yang akan datang.

KKN Kroni Mantan Presiden Soeharto

Penindakan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto, merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni mantan Presiden Soeharto menunjukkan adanya ketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangat menguntungkan kelompok usaha tertentu, penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, dan peraturan perundangan yang memberi dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto terjadi hampir di semua sektor seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi, ketenagalisterikan, perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, dan lain-lain.

Penghapusan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto telah, sedang dan akan terus dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan, kontrak dan perizinan yang telah diberikan kepada berbagai usaha kroni tersebut untuk selanjutnya diubah atau dicabut, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan hasilnya telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Proses Hukum sebagai Upaya Penyelesaian Masalah KKN

Dalam menangani masalah KKN mantan Presiden Soeharto, saya senantiasa berpegang teguh pada prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme penegakan hukum, sejalan dengan tekad kita untuk menegakkan supremasi hukum. Atas dasar itulah saya tetap konsisten untuk tidak memengaruhi jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa memperhitungkan pertimbangan dan kepentingan subjektif saya.

Namun, kita perlu memberikan kesempatan agar proses hukum sesuai prosedur yang berlaku dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berhak untuk menikmati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah, sampai pengadilan memutuskannya.

Harus kita sadari bahwa dalam setiap Negara Hukum, salah dan benar adalah persoalan keadilan yang harus ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Siapa pun yang terbukti bersalah harus dikatakan salah. Tetapi siapa pun yang terbukti benar, tidak mungkin kita paksakan menjadi salah.

Keadilan berdasarkan hukum ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk para pejabat tinggi dan pejabat negara. Kita harus berpegang teguh pada penyelesaian melalui proses hukum, karena kalau tidak maka penyelesaiannya berpotensi menjurus pada pola pengadilan oleh media atau oleh masyarakat —yang selain tidak mempunyai kekuatan hukum— juga membingungkan masyarakat serta memberikan pertanda yang negatif terhadap pelaku ekonomi.

Dalam pemberantasan KKN, kita tidak boleh menggunakan jalan pintas melalui pendekatan kekuasaan untuk menyeret dengan cepat orang-orang yang menurut opini masyarakat sudah dianggap bersalah ke pengadilan dan segera menghukum mereka. Sekali cara ini kita tempuh,

berarti kita telah membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan hal yang sentral dalam reformasi. Lebih jauh dari itu, jika cara itu yang kita tempuh, berarti kita kembali menggunakan cara-cara lama — yaitu pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum — dalam menangani masalah KKN.

PENANGGULANGAN KRISIS
Program Jaring Pengaman Sosial

Sesuai TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program Jaring Pengaman Sosial —terutama di bidang kesehatan dan pendidikan— telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping Pemerintah, para anggota masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Penambahan jumlah penduduk miskin dan dampak yang terjadi akibat krisis dapat kita kurangi melalui Program Jaring Pengaman Sosial tersebut.

Melalui program ini, kita telah menyalurkan beras dengan harga murah melalui kegiatan operasi pasar kepada sekitar 10 juta keluarga, menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4 juta anak-anak sekolah yang terancam putus sekolah, dan bantuan operasional bagi sekitar 130 ribu sekolah dan madrasah di seluruh tanah air.

Kita juga telah menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 Puskemas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau 36 ribu desa yang tersebar di seluruh tanah air. Dalam rangka memelihara dan memperbaiki kondisi gizi anak-anak,

Pemerintah juga telah melaksanakan pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi 8,1 juta anak yang tersebar di 52.482 sekolah dasar maupun madrasah.

Program JPS dan keberhasilan kita dalam mengendalikan tingkat inflasi dan meningkatkan produksi serta distribusi pangan telah dirasakan sangat meringankan beban penduduk miskin.

Penurunan Angka Kemiskinan

Dari data survei Sussenas bulan Agustus 1999 dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada bulan Desember 1998, terindikasikan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12 juta jiwa, atau penurunan sebesar 25 persen, sehingga jumlah total penduduk miskin saat ini diperkirakan sebesar 37 juta jiwa atau sebesar 17,6 persen dari total penduduk Indonesia. Data ini memberikan indikasi bahwa Program Jaring Pengaman Sosial dan penekanan laju inflasi sangat membantu meringankan beban penduduk miskin.

Masalah Agenda Reformasi Bangsa

Dalam membentuk visi bersama tentang masa depan Indonesia terutama di bidang sosial budaya, Pemerintah telah memprakarsai penyusunan konsep pemikiran, tinjauan dari berbagai perspektif, dan arah kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam transformasi bangsa menuju masyarakat madani. Konsep pemikiran transformasi bangsa menuju masyarakat madani ini telah disampaikan kepada para anggota Majelis yang terhormat.

Sejauh ini, ada tiga hambatan utama dalam menjalankan agenda reformasi.

Pertama, resistensi dari pihak-pihak yang di masa lalu merupakan pihak yang diuntungkan oleh langkah-langkah dan kebijakan Pemerintah.

Kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan .

Ketiga, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluh tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama.

Ketiga hal ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar tidak menghambat proses reformasi di masa depan.

PENUTUP

Pada kesempatan ini —sebagai kesimpulan— saya kemukakan bahwa dalam menjalankan agenda reformasi sudah banyak yang kita capai, misalnya di bidang ekonomi inflasi sudah dapat dikendalikan, nilai rupiah sudah menguat, suku bunga telah menurun tajam, produksi dan distribusi sembilan bahan pokok sudah kembali normal, demokrasi ekonomi secara bertahap sudah dapat ditegakkan, jumlah penduduk miskin sudah dapat dikurangi, kemandirian Bank Indonesia sudah diwujudkan, pengaturan lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar sudah ditetapkan, cadangan devisa sudah dapat ditingkatkan, pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah mulai dilaksanakan, restrukturisasi perbankan dan utang swasta sedang dijalankan, pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada ekonomi rakyat sudah dikembangkan.

Begitu pula di bidang politik, kita telah berhasil melaksanakan pemilu yang demokratis jujur dan adil, kebebasan pers sudah diwujudkan, kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan sudah menjadi kenyataan, netralitas TNI/Polri dan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilu betul-betul dapat ditegakkan, reformasi TNI telah dan akan terus dilaksanakan, tahanan dan narapidana politik telah dibebaskan, otonomi daerah telah mulai didorong dan secara bertahap akan dilaksanakan, partisipasi politik rakyat telah ditingkatkan yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya banyak partai politik, keistimewaan Aceh juga sudah dapat kita laksanakan.

Di bidang hukum, berbagai peraturan perundangan telah disahkan, peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan agenda reformasi sudah diganti, pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif telah diwujudkan, pemberantasan KKN meningkat tajam, peraturan perundangan tentang pemajuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah disahkan.

Di bidang sosial budaya dan agama, program Jaring Pengaman Sosial telah dilaksanakan khususnya di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, program jaminan penyelamatan sosial terhadap kemiskinan telah dan akan terus dilaksanakan, pengaturan penyelenggaraan haji dan zakat sudah memiliki jaminan hukum, perbaikan sarana dan prasaran ibadah tetap dilaksanakan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang terus ditingkatkan, bahkan program di bidang kependudukan khususnya penduduk berusia lanjut terus ditingkatkan.

Semuanya itu barulah merupakan langkah awal dari perjalanan panjang reformasi bangsa terutama jika diukur dari tingginya harapan dan cita-cita kita bersama. Cita-cita bersama itu adalah terwujudnya transformasi kehidupan bangsa menuju kehidupan yang religius, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara kita, Pancasila.

Kita bisa berencana dan bekerja keras untuk merealisasikannya, tetapi semuanya akhirnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa jualah yang menentukan. Kita telah berikhtiar, kita juga sudah berdoa, kini kita dituntut untuk bertawakkal dan menerima kenyataan yang ada.

Dalam menghadapi akumulasi berbagai permasalahan yang sangat kompleks, saya dan seluruh jajaran Kabinet Reformasi Pembangunan, serta seluruh komponen bangsa yang telah bekerja bahu-membahu telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya.

Sebagai manusia biasa saya menyadari bahwa

keseluruhan krisis – yang merupakan akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi — tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Selesai pidato pertanggungjawaban, saya bersama istri saya Ainun meninggalkan SU MPR didampingi oleh Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang mengantar sampai ke mobil. Ketika berpamitan dengan para pimpinan MPR, khususnya Kwik Kian Gie —tokoh PDI-Perjuangan yang berkawan dengan saya sejak zaman mahasiswa— menyampaikan pesan agar saya besok tidak perlu hadir. Saya sampaikan bahwa saya tetap akan hadir pada tiap diskusi mengenai pertanggungjawaban saya sampai jam berapa pun.

Tanggapan mengenai Pidato Pertanggungjawaban saya beraneka ragam. Ada yang menonjolkan keberhasilan adapula yang tidak sebut keberhasilan namun menonjolkan ketidakberhasilan, termasuk masalah Bank Bali, masalah Presiden Soeharto dan sebagainya. Namun reaksi tersebut adalah wajar dalam konteks demokrasi dan kebebasan Pers.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai berlangsungnya SU MPR, harian *Kompas* terbitan hari Jumat 15 Oktober menurunkan laporan yang menarik untuk dibaca. Selengkapnya saya kutipkan sebagai berikut:

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mempertahankan kebijakannya mengenai masalah Timor Timur, dan bahkan menyatakan yakin bahwa apabila Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) menetapkan pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka permasalahan Timor Timur dapat diselesaikan secara tuntas dan komprehensif. "Langkah penyelesaian ini insya Allah akan memungkinkan Indonesia memasuki percaturan

internasional yang semakin kompetitif dengan kepala tegak dan langkah yang lebih pasti," kata Habibie di depan Sidang Paripurna MPR, Kamis (14/10) malam.

Sewaktu Habibie yang didampingi Ny Hasri Ainun Habibie memasuki Ruang Sidang Paripurna MPR, Gedung Nusantara, sebagian anggota Majelis berdiri dan sebagian lagi tetap duduk. Habibie juga beberapa kali memperoleh tepukan sewaktu membacakan pidatonya.

Pidato Habibie sempat diinterupsi Ketua MPR Amien Rais, yang mengatakan bahwa perwakilan mahasiswa telah hadir di gedung MPR. Langsung seluruh anggota Majelis bertepuk tangan. "Berhubung ini MPR Reformasi, pidato presiden bisa dihentikan. Pimpinan Majelis juga sepakat, besok (Jumat) pagi akan mengundang lebih banyak mahasiswa, 50 sampai 100 orang untuk hadir dalam diskusi yang tulus dan terbuka dengan pimpinan MPR," kata Amien yang juga disambut tepuk tangan.

Sabam Sirait (F-PDIP) kemudian menginterupsi agar Ketua MPR memeriksa kejadian di lapangan, apakah tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa sudah dihentikan atau belum. Amien menjawab, "Kami sudah menyuruh petugas untuk memeriksa situasi di lapangan."

Habibie kemudian melanjutkan pidatonya sambil mengatakan, "Terima kasih ketua... Selamat datang mahasiswa...."

Sekitar sepuluh menit kemudian, pukul 22.30, pidato Habibie diinterupsi lagi, kali ini oleh Zulvan B Lindan (F-PDIP). Ia meminta Ketua MPR untuk menjelaskan bahwa masih terjadi kekerasan terhadap mahasiswa di luar gedung MPR. Ia juga mempertanyakan apakah mahasiswa yang hadir itu merupakan representasi dari mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.

Wakil Ketua MPR Kwik Kian Gie menanggapinya dengan mengatakan bahwa pimpinan Majelis sudah berupaya untuk mengundang sekitar 100 mahasiswa untuk masuk ke Gedung MPR. Tetapi situasi medan yang sangat sulit, tidak memungkinkan hal itu terjadi. Sehingga hanya empat yang bisa masuk ke gedung. "Mereka tidak berpretensi mewakili mahasiswa di luar. Oleh karena itu, besok (hari ini) kita akan memberi kesempatan 100 mahasiswa untuk melakukan dialog," katanya.

Tiga mahasiswa yang mengaku dari STIE Tridaya dan Universitas Nasional (Unas), begitu keluar dari ruang sidang, salah seorang mahasiswa yang bernama Ade langsung berteriak, "Kami tetap menolak Habibie''.

Tidak Pernah Diakui

Dalam uraiannya, Habibie tidak mengemukakan hal-hal baru. Ia misalnya mengemukakan, integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI yang dikukuhkan dengan Ketetapan No VI/MPR/ 1978 tidak pernah mendapat pengakuan internasional.

Bahkan dengan adanya berbagai eksploitasi secara maksimum segala kesalahan atau kekeliruan di lapangan, berbagai kecaman dan sanksi dijatuhkan kepada Indonesia. Namun Habibie tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sanksi itu. Habibie juga tidak menjelaskan apa jenis sanksi-sanksi yang pernah diterima Indonesia gara-gara persoalan Timtim itu.

Habibie mengatakan, penentuan pendapat 30 Agustus 1999 menunjukkan hampir 78,5 persen rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas, yang ditawarkan Pemerintah RI. "Sidang Umum ini dapat kiranya menampung aspirasi rakyat Timor Timur tersebut," kata Habibie.

Tentang berbagai bentuk kekerasan pasca-penentuan pendapat yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional, Habibie mengatakan, hal itu "sungguh disayangkan". Ia menyatakan, karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan itulah akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur.

Yang Belum Tuntas

Soal Timor Timur, hak asasi manusia (HAM), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kasus Bank Bali menempati bagian penting pidato pertanggungjawaban Habibie. Keempat soal itu menghabiskan 15 halaman terakhir dari 53 halaman pidatonya. Keempat soal itu pulalah yang selama ini diperkirakan akan menjadi bahan perdebatan sengit oleh fraksi-fraksi MPR dalam pemandangan umum hari Jumat dan Sabtu ini.

Usai menguraikan rencana aksi nasional HAM 1998-2003, Habibie masuk ke persoalan yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Yakni kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, seperti kasus penembakan mahasiswa Trisakti maupun kasus penculikan dan perkosaan yang terjadi menjelang lahirnya era reformasi. "Walaupun beberapa pelakunya sudah diproses di pengadilan, kami sependapat dengan masyarakat bahwa penyelesaian kasus ini masih perlu dituntaskan lagi," demikian pengakuan Habibie.

Memang tidak mudah, kata Habibie, membuktikan kasus-kasus ini. "Sekalipun demikian, saya sebagai Kepala Negara merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini.

Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati tulus memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu insya Allah akan terungkap," kata Habibie.

Soeharto Telah Diproses

Uraiannya mengenai KKN muncul setelah uraian soal HAM dan Timor Timur. Habibie menguraikan berbagai langkah yang telah diambil dalam upaya memberantas korupsi. Ia juga menyebut angka-angka keberhasilan pengungkapan kerugian negara dan penghematan biaya.

Khusus menyangkut dugaan KKN Soeharto, Habibie mengaku, sesuai dengan mandat Tap No XI/MPR/1998, penyelesaian kasus dugaan KKN mantan presiden itu telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia menjelaskan lagi pengumuman 11 Oktober oleh Jaksa Agung tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan tiga yayasan pimpinan Soeharto, karena temuan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum.

Adapun terhadap keluarga dan kroni Soeharto, Habibie mengatakan bahwa apabila cukup bukti tindak pidana, proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tentang investigasi di Austria, katanya, sampai saat ini tidak terdeteksi adanya arus uang kepada Soeharto dan keluarga serta kroninya.

Mengenai kasus Bank Bali, Habibie mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sistematis. Habibie juga menyebutkan, selanjutnya pemerintah menjamin proses peradilan tentang kasus Bank Bali dapat

dilakukan secara transparan dan adil. Di samping itu juga, pada saat ini pemerintah sedang mengambil langkah-langkah penyempurnaan organisasi dan tata kerja BPPN.

512 Hari

Sebelum menutup pidatonya, Habibie membuat kesimpulan atas pemerintahannya selama 512 hari itu. Di bidang politik, Habibie menyebutkan keberhasilan melaksanakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Kebebasan pers, kata Habibie, sudah diwujudkan. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan juga sudah menjadi kenyataan.

Sebagai manusia biasa, katanya, ia menyadari bahwa keseluruhan krisis - yang merupakan akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi - tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Menutup pidatonya, Habibie mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dan bersatu padu mengatasi persoalan yang masih belum terselesaikan. Sementara dalam jumpa pers tengah malam di kampus Atma Jaya, para mahasiswa menolak mengirim utusan untuk bertemu anggota MPR. Mereka juga tetap menolak B.J. Habibie sebagai calon presiden.

Setelah dibriefing Megawati Soekarnoputri di Hotel Hilton, Ketua Badan Pekerja MPR dari FPDI-P Sabam Sirait menegaskan bahwa PDI-P akan menolak secara total pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Sikap fraksi tersebut diputuskan sebelum Habibie membacakan pidato tersebut. Ditanya apa dasar penolakan PDI-P, Sabam menegaskan jangan disangka penolakan tersebut tanpa alasan yang jelas. Menurutnya,

PDI-P telah mengetahui 'bocoran' pidato pertanggungjawaban tersebut semuanya. ''Dengan dasar itulah kami menutuskan untuk menolak pertanggungjawaban tersebut,'' kata Sabam.

Dia mengatakan sikap PDI-P tersebut pada jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Kamis (14/10) sore. Pada kesempatan itu Sabam didampingi Ketua FPDI-P di MPR Soetjipto, Ketua FPDI-P di DPR Dimyati Hartono, dan dipandu oleh Panda Nababan.Tetapi, kata Sabam, secara formal konstitusional PDI-P akan menghormati Presiden saat membacakan pidato di depan MPR. ''Megawati menginstruksikan agar tidak ada lagi teriakan huu.. dari PDI-P. Juga tidak akan ada interupsi, padahal interupsi merupakan hak dasar setiap wakil rakyat,'' tegas Sabam.

Sementara itu, Dimyati menilai, isi pidato Habibie hanya merupakan sebuah The Success Story of Habibie saja. ''Kesuksesannya saja yang nanti malam akan diungkapkan Habibie,'' tegasnya.

Padahal, kata Dimyati, rakyat Indonesia mengetahui apa dan bagaimana kebijakan yang telah diambil Habibie. ''Mereka [rakyat] sudah dapat menilai. Contoh kecil Program JPS. Habibie mengatakan berhasil, tetapi lihat kenyataan sebenarnya di masyarakat,'' paparnya.

Karena pidato pertanggungjawaban itu ditolak, kata Sabam, PDI-P menolak pencalonan Habibie sebagai presiden. ''PDI-P mengharapkan capres yang memiliki visi kenegarawanan, juga visi pemersatu. Habibie malah melepaskan Timor Timur,'' kata Sabam.

Penolakan juga akan dilakukan oleh PKB. Ketua PKB Matori Abdul Djalil mengatakan, selama Habibie memerintah, rapornya merah semua. ''Jadi kalau laporannya ditolak, bukan hal yang luar biasa,'' tukasnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung,

mengatakan siap untuk merangkul pihak lain agar bisa sama-sama menerima pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie.''Sikap dasar kami adalah bermuara untuk menerima pertanggungjawaban Presiden Habibie meski dengan catatan-catatan. Pokoknya kita lihat dahululah. Dan kami ingin berusaha mengajak fraksi-fraksi lain agar bisa ikut menerima pertanggungjawaban presiden meski dengan catatan-catatan,'' kata Akbar Tandjung, di Jakarta, petang hari, Jumat (15/10).

Akbar mengatakan di dalam melakukan penilaian terhadap pidato tersebut pihak partainya ingin memberikan penilaian secara objektif. Dan tolak ukur dalam memberikan penilaian tersebut itu adalah UUD '45, Pancasila, Tap MPR, dan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan, ketika ditanya mengenai kesiapan Partai Golkar untuk menghadapi voting ketika menilai pidato tersebut, Akbar mengatakan bila itu nanti terjadi pihaknya telah siap untuk melakukannya. Jadi bila nanti tindakan itu akan dilakukan maka jelas bukanlah menjadi persoalan serius.

Sementara itu, harian *Republika* dalam terbitannya tanggal 16 Oktober 1999, menurunkan analisis pakar ekonomi dari Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari Dr. M. Yusuf Abadi MS. Ia berpendapat, anggota MPR dan masyarakat luas hendaknya jujur dan menggunakan hati nurani yang murni dalam menanggapi dan menyikapi pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Selengkapnya saya kutipkan pemberitaan tersebut:

Hindari kepentingan pribadi dan kelompok dalam menanggapi dan menyikapi pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie itu, karena kalau itu yang dipakai,

dampaknya bisa merugikan kepentingan bangsa,'' katanya di Kendari, Jumat.

Dekan Fakultas Ekonomi Unhalu Kendari itu mengatakan meski masih banyak kekurangan, kenyataan di lapangan bahwa selama 512 hari Habibie berkuasa ia telah berhasil memperbaiki keterpurukan ekonomi, seperti terlihat dari menurunnya angka inflasi, bahkan mencapai deflasi. Menurut dia, keberhasilan tersebut memang tidak begitu terasa di masyarakat karena program pemulihan ekonomi Habibie dimulai dari kondisi krisis yang begitu parah.

Untuk inflasi, misalnya, saat Habibie mulai memegang tampuk kepemimpinan bangsa, inflasi bulan Mei 1998 (tahun takwim) mencapai lebih dari 70 persen, namun September 1999 tercatat hanya 0,02 persen. "Saya tidak mengatakan bahwa Presiden Habibie sebaiknya terpilih kembali, tapi apa yang berhasil ditunjukkan Habibie selama 512 hari memimpin bangsa Indonesia merupakan suatu langkah maju," katanya.

Ia mengatakan Indonesia tidak boleh disamakan dengan Thailand dan Korea Selatan yang begitu cepat memulihkan keterpurukan ekonominya, karena kedua negara itu hanya semata-mata mengalami krisis ekonomi. Sementara Indonesia selain mengalami krisis ekonomi juga mengalami krisis kepercayaan, politik dan sosial, sehingga untuk bisa cepat pulih dari krisis seperti yang dicapai Thailand dan Korea Selatan, jelas tidak mungkin, katanya.

Pada tanggal 15 Oktober setelah shalat Jumat saya menerima para ulama dari Jawa Timur yang khusus datang untuk bersilaturahim dengan saya di Istana Merdeka dan bersama memanjatkan doa semoga Allah SWT selalu

melindungi dan memberi petunjuk untuk mengambil jalan yang benar. Mereka khusus datang dari jauh untuk memberi dorongan moral agar tetap dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Saya didampingi oleh Mensesneg Muladi dan Watik Pratiknya.

Sore harinya saya menerima Pengurus Badan Musyawarah Pemangku Adat Seluruh Indonesia BM-PASI di Istana Merdeka untuk mendengarkan saran dan masukan mengenai budaya bangsa pada umumnya dan khususnya mengenai adat. Mereka juga menyampaikan simpati dan dukungan moral.

Tanggal 16 Oktober hari Sabtu pukul 13.30 saya pimpin Sidang Terbatas Kabinet Reformasi Pembangunan Dimisioner, dengan acara khusus untuk membahas jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi MPR.

Di antara rapat dan pertemuan tersebut, saya menerima beberapa anggota MPR yang berasal dari partai-partai politik, dari Utusan Golongan, Utusan Daerah, TNI dan Polri, untuk mendengarkan saran dan masukan.

Beberapa di antaranya menyatakan bahwa diterima atau tidak pertanggungjawaban saya tidak ada kaitannya dengan pencalonan saya sebagai Presiden. Pertanggungjawaban saya tidak berdasarkan "mosi tidak percaya" atau *impeachment* namun berdasarkan "Acara SU MPR". Berarti jikalau tidak diterima saya tetap masih dapat mencalonkan diri sebagai Presiden. Semua masukan saya terima dengan baik dengan keyakinan bahwa iktikad dan niat mereka tidak lain untuk memberi semangat dan simpati.

Ada kejadian menarik pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1999. Forum Komunikasi Aksi Reformasi (Fokar) yang berkedudukan di tempat kelahiran saya di Pare-Pare, melakukan doa bersama yang diikuti unsur partai politik, pemuda, mahasiswa, pemuka masyarakat, serta pemuka

agama Islam, Kristen dan Hindu, di Gedung Pemuda Parepare, sekitar 155 kilometer arah utara Ujungpandang. "*Doa bersama ini bukan bentuk dukungan kepada Bapak Habibie, tetapi semata-mata memanjatkan doa agar ia sebagai putra Parepare tetap diberi ketabahan memperjuangkan prinsip-prinsip hidup yang ia yakini kebenarannya,*" kata Koordinator Fokar Parepare Zainal Azis.

Sebelum pembacaan doa, Fokar menyerukan kepada semua komponen bangsa khususnya elit politik, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang selama ini telah diperjuangkan bersama-sama. Fokar meminta masyarakat Indonesia agar lebih bijak melihat pencalonan Habibie, sehingga hal itu tidak memicu perpecahan hanya demi ambisi kelompok tertentu.

Zainal menambahkan, anggota MPR yang saat ini bersidang jangan hanya melihat apa yang berkembang di Jakarta dalam menerima aspirasi masyarakat. "*Yang berdemo menolak Habibie di Jakarta itu 'kan hanya segelintir orang saja dari ratusan juta rakyat Indonesia.*"

Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1999 hari Minggu pukul 11.00 WIB saya dipersilakan menjawab pertanyaan dan tanggapan yang diajukan oleh tiap Fraksi SU MPR 1999. Jawaban saya adalah sebagai berikut:

Masalah Timor Timur

Dalam pemandangan umum yang diutarakan oleh semua Fraksi mengenai Timor Timur, telah dipertanyakan mengenai diajukannya bentuk penyelesaian masalah Timor Timur melalui Opsi kedua. Juga pertanyaan tentang makna kalimat "karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa" yang dimaksud untuk mengingatkan bahwa kehadiran Indonesia di Timor

Timur adalah untuk memerdekakan mereka dari Portugal.

Seperti kita ketahui bersama, berintegrasinya Timor Timur dengan Republik Indonesia didasarkan atas aspirasi rakyat Timor Timur yang dicetuskan melalui Deklarasi Balibo. Atas dasar aspirasi tersebut maka Indonesia menerima keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi yang dituangkan dalam TAP MPR No.VI/MPR/1978.

Sikap Masyarakat Internasional terhadap Integrasi

Namun integrasi tersebut dianggap sebagai tindakan sepihak yang tidak diakui oleh masyarakat internasional, seperti terlihat dari 8 Resolusi Majelis Umum dan 7 Resolusi Dewan Keamanan PBB. Argumen Indonesia bahwa integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia sebenarnya merupakan wujud kemerdekaan wilayah tersebut dari jajahan Portugal tidak mendapatkan pengakuan internasional, malah Indonesia dituduh telah melakukan sebaliknya.

Seperti telah saya sampaikan dalam pidato pertanggungjawaban yang lalu berbagai tekanan internasional baik dari PBB, pemerintah-pemerintah asing maupun LSM selalu menuntut agar pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang dapat diterima secara internasional, yaitu dengan memberikan rakyat Timor Timur hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pemberian status khusus dengan otonomi luas (opsi I) secara sepihak tanpa memberikan hak pilih kepada rakyat Timor Timur untuk menerima atau menolak tawaran tersebut tetap tidak dapat diterima dunia internasional sebagai penyelesaian yang komprehensif dan final.

Namun sebaliknya pemerintah Indonesia tidak dapat menerima pemberian status khusus dengan otonomi luas yang dijadikan hanya sebagai sasaran antara untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh berbagai pihak termasuk

Portugal, Australia dan kalangan antiintegrasi Timor Timur.

Otonomi luas sebagai sasaran antara akan menimbulkan keruwetan di Timor Timur karena pihak Fretilin akan leluasa melakukan tindakan-tindakan yang justeru akan menimbulkan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Penjelasan tentang "Opsi Kedua" Jajak Pendapat

Seperti telah saya jelaskan dalam pidato pertanggungjawaban yang lalu, kemungkinan penyelesaian alternatif melalui Opsi II diajukan setelah dilakukan kajian di Sidang Kabinet secara mendalam, dan telah dikonsultasikan pula dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Tentunya diharapkan bahwa setelah konsultasi tersebut, pimpinan DPR serta fraksi-fraksi di DPR akan meneruskan pembahasan mengenai masalah yang demikian penting kepada anggota-anggotanya. Berbagai keputusan strategis telah diambil berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden dengan pimpinan DPR/MPR, termasuk kesepakatan untuk memajukan Pemilu dari Tahun 2002 menjadi tahun 1999, padahal jadwal Pemilu tersebut telah ditetapkan melalui TAP MPR No.III/MPR/1998.

Di samping itu, Menteri Luar Negeri — sejak dikemukakannya gagasan penyelesaian masalah Timor Timur berupa pemberian Status Khusus dengan Otonomi Luas kepada Timor Timur pada bulan Juni 1998 — pada setiap kesempatan rapat kerja dengan Komisi I, yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi permasalahan luar negeri telah dilakukan pembahasan permasalahan ini, termasuk pengajuan gagasan yang dikenal sebagai Opsi II pada tanggal 27 Januari 1999.

Dalam rapat kerja pemerintah yang diwakili Menteri luar Negeri dengan DPR R.I c.q Komisi I pada tanggal 5 Februari, pemberian kedua opsi tersebut dapat dipahami dan diterima oleh Komisi I. Bahkan rancangan naskah perjanjian Tripartit sebelum ditandatangai di New York juga telah disampaikan

oleh pemerintah pada kesempatan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR R.I beserta unsur pimpinan fraksi-fraksi. Tidak kalah pentingnya setelah perjanjian Tripartit ditandatangani di New York pada tanggal 5 Mei 1999, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR R.I dengan pemerintah c.q Departemen Luar Negeri untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Komisi I secara khusus meminta penjelasan pemerintah mengenai persetujuan New York. Pada kesempatan tersebut, Komisi I dapat memahami dan menerima perjanjian tersebut.

Patut diperhatikan pula bahwa keseluruhan proses perundingan mengenai Timor Timur telah terjadi dalam suasana keterbukaan, saling ketergantungan global antar negara dan saling keterkaitan antar masalah serta di bawah tekanan waktu yang tak terelakkan.

Hal ini telah menimbulkan pula suatu suasana bagi penyelesaian masalah Timor Timur dengan momentum dan kendala waktunya tersendiri sehingga pada gilirannya mengharuskan Pemerintah bertindak sesuai dengan momentum tersebut dan kita perlu menyesuaikan diri pada laju kecepatan momentum tersebut.

Opsi II Bukan Putusan Akhir, Melainkan Bahan bagi MPR untuk Memutuskan Masalah Timor Timur.

Sementara itu, Pemerintah sepenuhnya menyadari keberadaan TAP MPR No.VI/MPR/1978. Sehubungan dengan itu Pemerintah tidak pernah bermaksud melanggar ketentuan TAP MPR tersebut. Malah sebaliknya, dari semula Pemerintah menekankan bahwa baik Opsi I maupun Opsi II jika diterima pun dalam perundingan Tripartit hal itu hanya berupa usul dari Pemerintah yang masih memerlukan persetujuan ataupun ratifikasinya dari SU MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 yang lalu. Hal ini tecermin pula dengan jelas dalam teks Persetujuan New York dan dipahami sepenuhnya oleh Sekjen PBB, Portugal maupun masyarakat internasional pada umumnya.

Seperti telah saya nyatakan dalam pidato pertanggungjawaban betapa pun pahit dan pedihnya kita menyaksikan kekalahan rakyat Timor Timur yang prointegrasi dalam jajak pendapat tersebut, namun kita sebagai bangsa yang besar yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 — yang dalam era baru sekarang ini berketetapan hati untuk memajukan demokrasi dan pelaksanaan hak asasi manusia — harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu.

Selanjutnya, kita semua mengharapkan bahwa melalui jalan ini permasalahan Timor Timur yang sudah sekian lama berlarut-larut dan yang menjadi beban di atas pundak bangsa Indonesia akhirnya dapat diatasi. Dengan demikian, jelas kiranya bahwa bukanlah Timor Timur atau rakyat Timor Timur yang menjadi beban kita, tetapi permasalahan Timor Timur yang di forum-forum internasional yang tak kunjung terselesaikan.

Integrasi Timor Timur diawali dengan Deklarasi Balibo yang menyatakan keinginan sebagian masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian setelah 23 tahun bergabung, melalui jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 ternyata 78,5 persen masyarakat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas. Sesuai ketentuan pasal 6 Perjanjian New York, antara lain disebutkan bahwa apabila rakyat Timor Timur menolak tawaran status khusus dengan otonomi luas, maka pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konstitusional untuk melepaskan Timor Timur secara damai dan terhormat.

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melaporkan hal ini kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara untuk mengakui hasil jajak pendapat tersebut dengan meminta ketetapan khusus.

Persetujuan Tripartit

Selanjutnya, mengenai pendapat yang menyatakan bahwa pada Persetujuan Tripartit yang ditandatangani di New York tanggal 5 Mei 1999, Pemerintah Republik Indonesia seolah-olah "dituntut untuk mengujicobakan sistem otonomi daerah seluas-luasnya untuk waktu yang cukup panjang, yang bisa menjangkau lima atau bahkan sepuluh tahun." Tuntutan semacam ini sama sekali tidak terdapat dalam Persetujuan New York tanggal 5 Mei 1999 dan rupanya pemikiran ini telah tercampur dengan berbagai keinginan ke arah itu yang dikemukakan sejumlah Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Barat, serta kalangan antiintegrasi rakyat Timor Timur.

Yang menjadi kesepakatan antara Indonesia-Portugal dan Sekjen PBB hanya lah bahwa usulan mengenai otonomi luas seperti tercantum dalam Aneks Persetujuan New York tersebut disampaikan kepada rakyat Timor Timur untuk mendapatkan pandangan mereka, apakah akan menerima atau menolak usulan otonomi tersebut.

Proses Jajak Pendapat

Juga sama sekali tidak benar bahwa Pemerintah "lepas tangan terhadap penduduk di Timor Timur dan menyerahkan nasib mereka kepada Unamet yang bermain curang".

Fakta juga menunjukan bahwa di setiap tempat di mana diadakan proses jajak pendapat mulai dari Tempat pemungutan suara sampai ke penghitungan pada tingkat Provinsi, saksi-saksi Indonesia dan Portugal selalu hadir.

Masalah Pengungsi Pasca Jajak Pendapat

Adapun mengenai pengungsi-pengungsi yang secara besar-besaran mengalir ke berbagai daerah lain di Indonesia

antara lain khususnya ke Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan yang cepat antara lain dengan memberikan dukungan tanggap darurat kepada para pengungsi tersebut melalui penyediaan tempat penampungan sementara, bahan makanan, pengobatan, sanitasi dan akhirnya membantu mereka kembali ke Timor Timur.

Pemerintah juga akan memerhatikan dan membantu para pengungsi Timor Timur yang ingin menetap di wilayah NTT atau pindah ke wilayah lain di Indonesia. Dalam hubungan ini, Pemerintah juga telah mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga PBB seperti Komisi Tinggi Pengungsi, World Food Programme, ICRC, dan UNDP serta LSM-LSM luar negeri dan negara donor.

Semua kejadian-kejadian yang timbul memerlukan penyelesaian mendasar dengan melakukan tindakan berjangka panjang untuk mengatasi akar permasalahannya, yaitu membangun kesadaran setiap warga negara, tentang pentingnya budaya taat hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesadaran hukum dan hak asasi manusia ini perlu ditanamkan dalam diri setiap orang, termasuk di kalangan aparat penegak hukum dan keamanan kita sendiri. Hal ini memerlukan usaha sistematis dan terus-menerus, sehingga akar masalah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat kita atasi bersama.

Masalah SP-3 Kasus Dugaan KKN Mantan Presiden Soeharto

Menanggapi pertanyaan tentang pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap 3 dari 11 yayasan yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto — yaitu Dakab, Dharmais dan Supersemar— ternyata tidak

ditemukan cukup bukti bahwa mantan Presiden Soeharto memperoleh keuntungan secara pribadi. Negara juga tidak dirugikan atau dapat dirugikan karena uang yang dipinjam oleh beberapa orang atau perusahaan atau badan didasarkan atas perjanjian perdata yang dapat ditagih kembali. Kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yayasan tersebut tetap dapat dilayani. SP-3 yang berkaitan dengan 3 yayasan tersebut tidak mutlak, sebab apabila nanti ada alat bukti baru maka kasus tersebut dapat dibuka kembali. Di samping itu penerbitan SP-3 tidak berhubungan dengan kasus-kasus lain yang mungkin terkait dengan mantan Presiden Soeharto.

Masalah Pemekaran atas Wilayah Irian Jaya

Menanggapi kebijakan pemekaran atas wilayah Irian Jaya menjadi tiga provinsi bukanlah semata-mata kehendak pemerintah, apalagi sekedar kehendak pemerintah pusat. Perlu kiranya dipahami bahwa jauh sebelum era reformasi, para pemuka masyarakat di Irian Jaya telah meminta pemerintah untuk pemekaran wilayah yang luasnya lebih dari tiga kali pulau Jawa itu. Sejak pertengahan tahun 1980-an, pemerintah daerah menjajaki kemungkinan pemekaran Irian Jaya namun pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan pada waktu itu masih cenderung menunda realisasinya.

Faktor penduduk yang relatif terbatas serta biaya untuk investasi sarana pemerintahan yang akan cukup besar menyebabkan harapan beberapa pihak di Irian Jaya bagi pemekaran itu belum dapat terpenuhi.

Di awal tahun 1990-an, sebagai respons terhadap aspirasi pemekaran itu, pemerintah memberi isyarat yang jelas bahwa Irian Jaya yang dimekarkan melalui kebijakan menempatkan tiga orang Wakil Gubernur, yang kalau di daerah lain bidang tugasnya dibagi secara teknis, di Irian Jaya bidang tugas itu dibagi secara kewilayahan. Jadi, kebijakan pemekaran itu bukan suatu yang dilakukan secara tergesa-gesa, dan juga

bukan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan kebutuhan objektif untuk mengembangkan wilayah dan kesejahteraan kehidupan masyarakat setempat.

Dengan penjelasan ini, terpulang pada Majelis yang terhormat untuk menilai kebijakan pemekaran itu, yang sekali lagi bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi sebaliknya, bagi mereka yang mengikuti perkembangan masalah ini dari tahun 1980-an, justru dianggap terlambat. Pemekaran ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Irian Jaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah Pemulihan Ekonomi

Dari awal, upaya pemulihan ekonomi yang kita laksanakan didasarkan pada kerangka strategi yang jelas, yaitu:

Hiperinflasi dan spekulasi harus dipatahkan melalui kebijakan moneter yang ketat dan deregulasi di bidang distribusi barang-barang pokok. Kebijakan ini diikuti dengan upaya memperbaiki perbankan kita yang rusak berat agar mulai mampu mengucurkan lagi kredit.

Sementara itu, sebagian besar kegiatan dunia usaha macet dan beban utang yang sangat besar harus diberi jalan keluar untuk merestrukturisasi utang-utangnya agar siap menerima kucuran kredit dan kegiatan usaha mulai bergerak kembali. Mengingat keadaan sektor swasta masih sangat lemah, maka pemerintah harus melaksanakan anggaran yang ekspansif untuk menggerakkan perekonomian. Sementara itu, sambil melaksanakan semua itu kita melaksanakan program-program Program Jaring Pengaman Sosial untuk membantu secara darurat kelompok-kelompok masyarakat yang paling menderita akibat krisis ekonomi.

Kebijaksanaan fiskal yang longgar diupayakan agar sekecil mungkin dampak negatifnya terhadap kurs rupiah dan inflasi. Ini dilaksanakan dengan membiayai defisit

anggaran seluruhnya melalui bantuan luar negeri yang bersifat lunak. Ketersediaan dana untuk membiayai berbagai prioritas pengeluaran pembangunan juga terus diupayakan melalui upaya meningkatkan penerimaan negara, dengan meningkatkan penerimaan pajak dan menegakkan ketentuan mengenai penerimaan bukan pajak, di samping pengurangan pengeluaran negara dengan membatasi pembiayaan hanya pada program-program yang bersifat sangat mendesak.

Pengembalian Kepercayaan Pelaku Ekonomi

Dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangan krisis tersebut di atas, pengembalian kepercayaan adalah kunci utamanya. Langkah awal diarahkan pada pengembalian kepercayaan pelaku ekonomi dalam negeri. Dengan makin nyatanya tanda-tanda pulihnya kepercayaan pelaku-pelaku dalam negeri, kepercayaan para pelaku luar negeri mulai ikut kembali pulih. Untuk mengembalikan kepercayaan para pelaku ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri, pelaksanaan reformasi kelembagaan di berbagai sektor digulirkan.

Dalam kaitan itu diupayakan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan. Di samping meningkatkan kepercayaan, transparansi kebijakan juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan pembangunan.

Dengan pulihnya kepercayaan secara bertahap, maka nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil dan secara bertahap membaik dan akhirnya mencapai tingkat wajar. Karena melemahnya nilai tukar rupiah adalah salah satu penyebab terpenting inflasi saat ini, maka menguatnya dan menjadi stabilnya nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar, akan meredam tekanan inflasi, sehingga laju inflasi terus menurun. Harga barang-barang pokok, serta subsidi yang harus disediakan juga menurun secara bertahap.

Menurunnya inflasi diikuti dengan menurunnya tingkat suku bunga. Bersama-sama dengan mulai berhasilnya pembenahan perbankan dan makin banyaknya para pelaku ekonomi yang mulai merasa aman, tenteram dalam melakukan kegiatan sehari-hari, penurunan tingkat suku bunga akan mendorong bangkitnya kembali kegiatan ekonomi dalam negeri.

Perbandingan Angkatan Kerja dan Pengangguran

Pada tahun 1997 saat krisis ekonomi melanda, jumlah angkatan kerja sebanyak 89,6 juta dan angkatan kerja yang bekerja sebanyak 85,4 juta, sehingga pengangguran terbuka sebesar 4,197 juta (4,68 persen). Pada tahun 1998 jumlah angkatan kerja sebanyak 92,739 juta dan angkatan kerja yang bekerja sebanyak 87,672 juta dan pengangguran terbuka sebanyak 5,062 juta (5,46 persen). Pada tahun 1999 semester pertama diperkirakan angkatan kerja yang tidak terserap baik dari peningkatan angkatan kerja baru maupun menurunnya kesempatan kerja sebanyak 0,95 juta, sehingga secara kumulatif pengangguran terbuka tahun 1999 adalah sebesar 6,12 juta.

Dalam upaya menanggulangi masalah pengangguran, pemerintah telah melakukan program Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Mengurangi Kemiskinan (PDKMK) dan Program Penanggulangan Penganggur Trampil (P3T).

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk program Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Mengurangi Kemiskinan telah dapat menyerap 3.429.000 orang selama ± 3-4 bulan, sedangkan untuk Program Penanggulangan Penganggur Trampil dapat mempekerjakan sebanyak 70.000 orang tenaga kerja terampil pada lembaga ekonomi produktif yaitu koperasi dan perusahaan kecil menengah maupun wirausaha baru.

Upah minimum pada tahun 1997 sebesarRp134.986 dibandingkan Kebutuhan Hidup Minimum Rp205.112 pada

saat itu, ternyata daya beli pekerja hanya 65,81 persen. Pada tahun 1998 sampai saat ini upah minimum naik menjadiRp179.528 dan Kebutuhan Hidup Minimum Rp252.996 sehingga daya beli menjadi 70,96 persen. Berarti dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 terdapat kenaikan daya beli 5,15 persen.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun 1998 sebanyak 922 kasus meliputi 121.686 orang. Pada tahun 1999 turun menjadi 117 kasus meliputi 16.000 orang pekerja. Dengan demikian terdapat penurunan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tahun 1998 sampai dengan 1999 sebesar 805 kasus (87,31 persen). Penurunan kasus PHK tersebut antara lain disebabkan karena mulai membaiknya kondisi perekonomian. Data tersebut adalah resmi yang dipergunakan di Bappenas dan Departemen lainnya bersumber pada Biro Pusat Statistik.

Masalah Ketersediaan Bahan Makanan dan Kebutuhan Pokok

Mencermati situasi krisis ekonomi yang dialami Bangsa, maka tugas yang sangat mendesak untuk segera diatasi oleh Kabinet Reformasi Pembangunan antara lain adalah menjaga ketersediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau serta mempertahankan kelangsungan perputaran roda perekonomian nasional.

Dalam menjaga ketersediaan bahan makanan serta kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, khususnya beras, selain dilakukan melalui impor, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri melalui program Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung (Gema Palagung) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Program Kredit Usaha Tani.

Kredit Usaha Tani (KUT)

Jika pada tahun-tahun sebelumnya jumlah dana KUT yang disediakan pemerintah hanya sekitar Rp200 miliar setiap tahun serta pada Tahun Penyediaan (TP) 1997/1998 jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp400 miliar dan dapat direalisasi Rp374 miliar. Pada TP 1998/1999 dana yang disediakan ditingkatkan lagi jumlahnya menjadi Rp8,87 triliun dan hingga saat ini dapat direaliasikan pencairannya sebesar Rp7 triliun untuk selanjutnya disalurkan kepada 5,13 juta orang petani melalui 189.892 kelompok tani, 9.517 Koperasi dan 450 LSM serta mencakup areal seluas 7,77 juta hektar.

Dari pola mekanisme penyalurannya telah diatur dengan sistem pengendalian, di mana Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan kelompok tani kepada koperasi terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Di samping itu mulai Tahun Anggaran 1998/1999 juga ditempatkan sebanyak 5.120 tenaga pendamping dari 52 Perguruan Tinggi untuk membantu pengamanan program Kredit Usaha Tani (KUT) di lapangan. Pelaksanaan koordinasi berbagai instansi terkait di daerah telah dilakukan guna mengamankan agar program program kredit usaha tani yang dilaksanakan dapat mencapai sasarannya.

Namun demikian, dengan peningkatan jumlah program kredit usaha tani yang luar biasa tersebut, diakui pula adanya berbagai kasus penggunaan dana KUT yang tidak tepat pada sasaran. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan memang ditemukan adanya kasus penyalahgunaaan KUT sebesar Rp41,46 miliar di 15 provinsi. Pemerintah berterima kasih adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap dugaan penyelewengan tersebut. Hal ini merupakan pencerminan dari kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Kita juga bersyukur karena sebagian besar dari penyalahgunaan tersebut telah dapat diselesaikan. Sisa kasus KUT yang

sedang dalam proses penyelesaian sebesar Rp6,52 miliar atau 0,084 persen dari jumlah program kredit usaha tani yang telah tersalur sebesar Rp7,7 triliun sampai dengan 15 Oktober 1999.

Perlu dilaporkan bahwa program kredit usaha tani yang tersalur sampai dengan 4 Juni 1999 (menjelang pemilu) adalah Rp4,96 triliun, sehingga kalau dituduhkan adanya penyelewengan dari kredit program sebesar Rp10,5 triliun, kiranya hal tersebut tidak mempunyai dasar.

Di samping itu perlu kami sampaikan bahwa produksi padi telah meningkat secara drastis, yang tidak mungkin terjadi manakala dana program kredit usaha tani tersebut diselewengkan untuk produksi non pangan.

Koperasi

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berbeda dengan perusahaan swasta yang badan hukumnya dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, maka untuk Koperasi badan hukum Koperasi dikeluarkan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, dalam hal pembinaan koperasi, pemerintah telah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.

Selain itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Berkaitan dengan pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab dalam membina bidang

kelembagaan serta mengoordinasikan dengan intansi terkait dalam pembinaan dibidang usaha, permodalan dan tekonologi.

Dengan demikian kiranya menjadi jelas bahwa pengembangan koperasi sesuai dengan Inpres 18 tahun 1998 justru dimaksudkan untuk mengurangi campur tangan pemerintah pada gerakan koperasi dan hal itu tidak berdasar untuk menyamakan koperasi dengan badan usaha milik negara.

Perlu dicatat bahwa prakarsa masyarakat dalam membentuk koperasi makin meningkat yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah koperasi yaitu dari 59.441 unit pada tahun 1998 meningkat menjadi 76.249 unit pada September 1999, dan jumlah anggota dari 20,1 juta orang pada tahun 1998 naik menjadi 22,4 juta orang pada tahun 1999, demikian pula jumlah asset meningkat dari Rp9,4 triliun pada tahun 1998 menjadi Rp14,6 triliun pada tahun 1999.

Pananggulangan Kemiskinan

Para pengamat secara pesimistik menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin telah mencapai sekitar 80 juta atau bahkan ada yang meramalkan bisa naik menjadi 100 juta lebih. Dari data survei Susenas bulan Agustus 1999 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pada saat ini diperkirakan 37 juta jiwa, atau sekitar 17,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Penurunan jumlah penduduk miskin tentu saja tidak karena program Jaring Pengaman Sosial saja, tetapi juga karena dilaksanakannya beberapa program pengentasan kemiskinan lain yang bersifat sektoral. Di samping adanya penurunan itu, maka sesungguhnya jumlah penduduk miskin secara tidak langsung juga ditahan karena adanya peningkatan batas garis kemiskinan dari sekitar Rp38.246/ kapita/bulan di kota dan Rp27.413/kapita/bulan di desa

pada tahun 1996 menjadi sekitar Rp79.927/kapita/bulan di kota dan Rp61.453/kapita/bulan di desa pada tahun 1999.

Tentu saja keberhasilan ini tidak menjamin penyelesaian secara tuntas kemiskinan yang kita hadapi, oleh karena itu pemerintah sedang melaksanakan berbagai program terpadu pengentasan kemiskinan yang dapat lebih menjamin pendekatan secara komprehensif dan terpadu untuk membantu pemberdayaan keluarga miskin tersebut.

Oleh karena itu Program Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan dan kesehatan sebagai upaya peningkatan mutu sumber daya manusia itu dipadukan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan Perumahan dan Pemukiman untuk mewujudkan pemukiman yang layak, sehat dan terjangkau, khususnya oleh keluarga miskin di perkotaan dan di perdesaan. Keterpaduan yang dilakukan di kawasan kumuh perkotaan adalah pada 6.660 ha di 118 kota untuk 2 juta jiwa, bersama perbaikan kawasan nelayan sebesar 780 ha di 134 kawasan dan bermanfaat untuk 194.400 jiwa.

Program terpadu yang dijamin dengan dana Program Jaring Pengaman Sosial bidang pendidikan dan kesehatan itu dipadukan pula dengan program-program bina usaha keluarga miskin, dengan memberikan pelajaran kepada mereka cara menabung dan mempergunakan kredit yang bunga kreditnya di berikan subsidi. Tidak kurang dari 11,2 juta keluarga telah belajar menabung dengan jumlah tabungan tidak kurang dari Rp159 miliar. Mereka yang mempunyai tabungan itu tidak kurang dari 9,3 juta keluarga telah mendapatkan kredit murah kredit usaha kesejahteraan rakyat (Kukesra) untuk usaha rumah tangga yang memberikan mereka kesempatan untuk terlepas dari lembah kemiskinan.

Dari penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga independen dapat diketahui bahwa dukungan Program Jaring Pengaman Sosial itu telah mencapai

sasarannya dengan baik. Penyimpangan yang dimasa lalu menarik perhatian dengan berita-berita yang mencolok telah ditindaklanjuti. Dengan pengawasan yang lebih ketat oleh masyarakat sendiri dan lembaga-lembaga pedesaan yang dikelola oleh masyarakat sendiri, maka penyimpangan itu menjadi sangat minimal.

Penutup

Mengakhiri penjelasan atas tanggapan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, saya menyampaikan sambutan selaku pribadi —Bacahruddin Jusuf Habibie— yang berisi:

Saya menyadari bahwa saya bukanlah insan luar biasa yang turun dari langit untuk mengubah harapan menjadi kenyataan. Saya juga tidak sedang memasang harapan yang tinggi terhadap penilaian atas tugas yang sudah saya tunaikan.

Saya menyadari betapa soal yang kita hadapi begitu berat dan sarat akan tantangan. Akan tetapi itulah konsekuensi atas pilihan yang kita lakukan. Kita telah memilih untuk melakukan reformasi menyeluruh, maka sekali layar terkembang, pantang surut kita berlayar. Reformasi harus terus berjalan, siapa pun nakhoda di bahtera nusantara jaya, saya berkeyakinan kita punya banyak kandidat nakhoda dari anak-anak terbaik bangsa. Saya hanya sanggup mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawal proses penegakan nilai-nilai demokrasi demi harkat dan martabat bangsa.

Kepada saudara-saudara yang telah menilai saya dalam memimpin pemerintahan tidak mencapai hasil apa pun, maka semuanya itu saya kembalikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Dialah yang Maha Mengetahui apa yang kerjakan di dunia. Kepada saudara-saudara yang memberikan kritik konstruktif dan positif, serta memberikan penilaian objektif, saya mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya. Semua yang saya kerjakan yang mempunyai nilai positif, bukanlah hanya hasil kerja saya sendiri, melainkan merupakan hasil kerja kita semua.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya —Bacharuddin Jusuf Habibie— mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan ketidakterjangkauan saya dalam menggapai kesempurnaan hasil dalam menunaikan tugas-tugas negara dan pemerintahan yang diembankan di pundak saya. Dan saya sampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada segenap lapisan masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga meringankan langkah dan tugas saya.

Biarkanlah semua kekurangan itu menjadi milik saya. Kerja, karya dan hasil yang tercapai seluruhnya terpulang kepada rakyat Indonesia, pemilik sejati negeri ini. Itulah semua yang dapat saya sampaikan ke haribaan rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Amin yaa rabbal 'alamin.

Demikianlah pidato jawaban saya atas tanggapan yang diberikan oleh fraksi-fraksi berkenaan dengan pidato pertanggungjawaban yang saya sampaikan pada tanggal 14 Oktober 1999. Kepada Tim Khusus yang merumuskan pidato, agar di bagian akhir dirumuskan ungkapan saya sebagai pribadi. Dengan ungkapan pribadi tersebut saya ingin menyampaikan keterbatasan saya sebagai manusia, sekaligus juga bagaimana memposisikan secara proporsional tiap manusia Indonesia —apa pun kedudukannya— dalam berbakti dan berbuat untuk bangsa dan negaranya. Oleh saudara Watik dilaporkan bahwa Suharso Monoarfa —yang saya kenal sebagai tokoh angkatan muda yang amat aktif dalam gerakan reformasi— amat membantu Tim dalam perumusan akhir pidato jawaban tersebut.

Sementara itu, keadaan di lapangan sangat membingungkan dan sangat memprihatinkan. Ketegangan

telah terjadi antarkubu dan tokoh politik dapat dirasakan dari masukan laporan yang terus mengalir melalui jaringan formal, informal, media cetak dan elektronik. Melalui internet saya pantau pula perkembangan sekitar permasalahan Indonesia pada umumnya khususnya SU MPR dan pemilihan Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Komentar dari para pakar politik dan para tokoh politik dalam dan luar negeri sangat membingungkan dan memprihatinkan. Banyak dana dan fasilitas yang sudah mengalir ke Indonesia pada umumnya dan khususnya ke Jakarta untuk membiayai gerakan arus massa. Semuanya memiliki rencana dan program masing-masing dan mengatasnamakan kata-kata hak asasi manusia, kebebasan, kerakyatan, demokrasi, rakyat bahkan Tuhan YME.

Saya sangat sadari betapa pentingnya peranan NKRI yang harus dimainkan dalam milenium yang sedang di ambang pintu. Indonesia mempunyai kedudukan yang strategis dipandang dari sudut geopolitik. Penduduk Indonesia yang hampir 220 juta, dan hampir 90 persen beragama Islam, juga mempunyai arti tersendiri dalam menghadapi globalisasi. Demikian pula kebinekaan budaya, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial.

Justru karena kesadaran tersebut, saya menjadi lebih prihatin dengan gerakan dan arus bawah maupun arus elite politik yang hanya berbicara mengenai legitimasi politik dan mengatasnamakan kebijakan dengan kata-kata populistik.

Memang legitimasi sangat penting, namun belum cukup untuk memenuhi syarat memimpin. Keterampilan dan kemampuan yang memimpin itu harus pula diperhatikan dan diberi prioritas yang sama seperti legitimasi. Kemampuan mengambil kebijakan yang tepat dan cepat dalam proses penyelesaian permasalahan dan implementasi wawasan

menjadi kenyataan yang menentukan, di samping legitimasi perlu dimiliki oleh seorang Presiden.

Pada akhirnya Presiden itu yang harus mampu memutuskan seorang diri setelah mendengar, mempelajari dan mengerti permasalahan yang dihadapi. Waktunya pun harus cepat dan tepat. Semua kebijakan mengandung risiko yang perlu diperhitungkan. Pendidikan dalam bidang apa saja dengan tingkat setinggi apa saja menarik, namun tidak pula menentukan. Yang menentukan adalah karya nyata yang pernah dilaksanakan. Pengalaman yang bersangkutan harus dipelajari secara objektif tanpa dipengaruhi oleh analisis yang berdasarkan dasar pemikiran, asumsi dan data yang tidak ada, diada-adakan, atau bahkan yang diputarbalikkan dimanipulasi.

Ternyata yang terjadi di lapangan semua cara dihalalkan, dan banyak pula yang mengatasnamakan Allah SWT atau Tuhan YME. Yang jelas semua cara dan jalan untuk memperoleh kekuasaan dimanfaatkan, baik yang sejalan dengan mekanisme demokrasi maupun tidak.

Di antara gerakan dan ucapan di sini situ tercetus pertanyaan atau kata-kata yang segar dan lebih rinci mengenai masa depan dan nasib bangsa. Namun semuanya itu tenggelam di tengah hiruk-pikuknya euforia kebebasan masyarakat dan para elite politik. Bahkan pemikiran dan pandangan itu disudutkan atau sudah layu bahkan mati sebelum pemikiran dan pertanyaan dapat berkembang dan dijawab.

Tiap tokoh menganggap dirinya paling tepat dan paling menguntungkan rakyat jika dipilih menjadi Presiden. Banyak skenario politik yang saya pantau dan pelajari sebelum saya mengambil sikap yang saya anggap paling menguntungkan perjuangan bangsa yang dimulai oleh sejak nenek moyang kita melalui tahap-tahap pendekatan penyelesaian

permasalahan A_0, B_0, C_0 ... Z_0, AA_0, BB_0, ... dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memelihara dan tercapainya kehidupan yang tenteram, berbudaya, terhormat, dan sejahtera bagi masyarakat yang hidup di bumi ibu pertiwi Indonesia.

Hanya sebagian kecil catatan yang saya dapat berikan, namun diharapkan signifikan untuk dapat mengambil sikap dan kebijakan yang tepat dan benar. Hal ini sebagaimana dalam doa dari para tokoh agama —baik dari Umat Hindu, Umat Buddha, Umat Kristiani dan Umat Islam— yang pernah berkunjung secara resmi dan tidak resmi di Istana Merdeka dan di kediaman saya di Kuningan. Mereka berdoa, *"Berilah kami semua petunjuk mengambil jalan yang benar, kekuatan dan lindungan dalam melaksanakan perjuangan demi kehidupan yang tenteram, sejahtera, dan persatuan dan kesatuan bangsa."*

Kebebasan dan demokrasi telah diberi, euforia dan kenikmatan bebas berbicara dan bebas berperilaku belum dapat diimbangi oleh kesadaran tanggung jawab dalam berperilaku yang bermoral dan beretik, sesuai ajaran agama masing-masing. Nilai-nilai moral dan etik mulai ditinggalkan dan semua cara untuk mencapai sasaran —yaitu memiliki kekuasaan— dihalalkan.

Banyak yang belum atau tidak mau sadar bahwa "kekuasaan" itu hanya dipinjamkan oleh si Pemiliknya yaitu Allah SWT, Tuhan YME.

Pemilik kekuasaan tersebut tiap saat dapat mengambil kembali "kekuasaan" dan meneruskan kepada siapa saja yang dapat dititipkan dengan maksud yang mungkin pada waktu itu kita belum dapat mengerti alasannya, namun kelak menjadi jelas maksud tujuan-Nya.

Bagi mereka yang berpikir duniawi, dapat ditambahkan bahwa pemilik kekuasaan di bumi Indonesia adalah rakyat

Indonesia dan tersirat di Mukadimah UUD '45, dalam pengertian dan ucapan arti "kedaulatan rakyat".

Pantauan semua laporan yang mengalir bahkan membanjiri kedudukan saya sebagai Presiden sangat memprihatinkan. Memutarbalikkan fakta tidak dipersoalkan lagi. Dahulu orang malu jikalau berbohong, maka sekarang rupanya tidak lagi.

Mau ke mana kita? Mau dibawa ke mana bangsa ini? Sering dipakai nama rakyat, namun apakah yang bersangkutan benar peduli pada nasib rakyat kecil? Wawasannya apa? Yang ditonjolkan legitimasi dan secara implisit yang disasari adalah kekuasaan.

Tidak terdengar kesadaran bahwa Presiden yang memiliki kekuasaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Presiden harus siap untuk memberi dan datang tidak untuk menikmati kedudukan dan fasilitas kepresidenan, namun untuk bekerja keras dalam menghadapi segala persoalan yang ada dan akan timbul. Fasilitas kepresidenan itu hanyalah prasarana yang disediakan untuk melaksanakan tugas Presiden sebaik-baiknya. Seperti seorang dokter ahli bedah diberikan fasilitas ruang bedah dengan segala prasarannya.

Demikian beberapa masukan pemberitaan yang saya catat dan perhatikan pada tanggal 18 dan 19 Oktober 1999. Sementara itu, pemberitaan media mulai terpusat pada para tokoh yang mencalonkan diri sebagai Presiden ke-4 RI. Beberapa ulasan yang menarik antara lain:

> *Ketua PB Nahdlatul Ulama, KH Abdurrahman Wahid mengatakan tetap maju menjadi calon presiden, dan pencalonannya sudah mendapat restu dari ulama berpengaruh pengasuh Pondok Pesantren Langitan (Tuban) KH Abdullah Faqih.*
>
> *"Tadi pagi saya menerima utusan KH Abdullah*

Faqih, yaitu KH Hasyim Muzadi (Ketua PW NU Jatim-Red). Sebelum ini, saya sudah bertemu KH Abdullah Faqih. Saya tetap mencalonkan diri karena menurut laporan, saingan saya pakai money politics. *Demi demokrasi, saya jalan terus. Kepada kiai Faqih saya bilang, terserah ulama mau mencalonkan atau tidak. Sampai sekarang saya masih calon," tegasnya kepada wartawan di Kantor PB NU tanggal 18 Oktober 1999 hari Senin.*

Menurut Gus Dur, didukung atau tidak oleh ulama, dirinya tetap akan maju sebagai calon presiden. "Kecintaan saya kepada demokrasi melebihi cinta saya kepada yang lain," kata Gus Dur.

Ditanya hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Gus Dur mengatakan, tetap saling menghormati. Gus Dur menegaskan, telah mempersiapkan susunan kabinet, dan Panglima TNI, serta pembagian keuangan antara pusat dan daerah. "Kalau calon wakil presiden dari Poros Tengah, Pak Akbar Tandjung," ujar Gus Dur.

Bagaimana menempatkan Megawati, yang partainya adalah pemenang pemilu? Gus Dur mengatakan, "Saya katakan pada Mbak Mega, memilih menggantikan Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR, atau menjadi Ketua DPA. Saya minta Mbak Mega tetap menjadi oposisi. Begitu juga, kalau saya tidak terpilih, saya akan jadi oposisi."

Menurut Gus Dur, KH Faqih berharap diusahakan tidak ada saling membalas atau menyalahkan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyangkut pencalonannya, dan tidak terjadi pertentangan antara warga NU dan PDI Perjuangan.

Sebelum memberi keterangan pers, Gus Dur sempat bertemu Nurcholish Madjid (Cak Nur) di Hotel Regent,

Kuningan. "Saya percaya pada Cak Nur, karena dia dan saya punya visi, pikiran dan perasaan yang sama," ujar Gus Dur.

"Cak Nur mengatakan bahwa kalau karena alasan kesehatan mata saya tidak bisa maju jadi calon presiden, Cak Nur siap maju. Tetapi kalau saya jadi calon, maka Cak Nur tetap menganggap saya sebagai imamnya," tegasnya.

Calon presiden yang lain, pakar filsafat peradaban Nurcholish Madjid (Cak Nur) menegaskan, bahwa ia sama sekali tidak mencalonkan diri sebagai presiden. Bahkan, kubu Poros Tengah pun belum menjalin pendekatan dengannya sehubungan pencalonan itu. Cak Nur bersedia menerima pencalonan dalam situasi yang terpaksa dan darurat.

"Saya tidak mencalonkan diri. Posisi saya adalah pasif. Begitu saya mengambil langkah aktif, maka pada diri saya tidak ada legitimasi. Karena saya bukan orang yang sejak semula berkompetisi untuk menjadi calon presiden," kata Cak Nur kepada wartawan seusai diskusi bertema Kepemimpinan Islami.

Rektor Universitas Paramadina Mulya itu menegaskan, bersedia jadi calon Presiden jika hanya dalam keadaan terpaksa sekali. "Terpaksa seperti apa, saya tidak tahu, itu 'kan masalah persepsi. Bagi orang tertentu, suatu situasi dinilai terpaksa. Namun bagi orang lain, belum dinilai situasi terpaksa," tuturnya.

Kalau didukung 70 anggota MPR bagaimana? tanya wartawan. Cak Nur menjawab, "Itu tergantung. Yang jelas saya tidak mau menginjak kaki siapa pun. Kalau Gus Dur mau maju, ya saya tidak mungkin. Kalau toh Gus Dur mundur, dan ia minta saya, saya tetap harus

melihat betul-betul keadaan yang terjadi. Syaratnya jelas, kalau sampai pada suatu keadaan emergensi dan keterpaksaan."

"Terpaksa artinya memang susah, tidak bisa direncanakan. Yang biasa disebut misalnya jalan buntu atau deadlock, atau suatu persimpangan kekhawatiran yang begitu dominan, sehingga memunculkan rasa ketakutan yang besar," katanya.

Cak Nur juga mengutarakan, Megawati tidak boleh ditinggalkan dalam pemerintahan mendatang, karena partainya unggul dalam pemilu. "Dalam proses normal, mestinya Mega menjadi Presiden. Namun, ketika dikemukakan ia berhak mengambil inisiatif, maka tampaknya ini tidak Mega lakukan," katanya.

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI Jenderal Wiranto memilih untuk tidak masuk dalam rivalitas calon Presiden ataupun calon Wakil Presiden.

Ia akan berkonsentrasi penuh dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan di Indonesia. Sampai saat ini ia mengaku belum pernah dihubungi siapa pun, termasuk oleh Partai Golkar untuk menjadi calon Wakil Presiden.

Demikian disampaikan Wiranto dalam pidato di Jakarta yang disiarkan TVRI dan disebarluaskan ke media massa nasional, Senin tanggal 18 Oktober 1999.

Dalam pidato itu, Wiranto didampingi para kepala staf angkatan kecuali Kepala Staf TNI AU Marsekal Hanafie Asnan yang sedang sakit, dan digantikan oleh Wakil KSAU, serta Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf Teritorial TNI.

Wiranto dalam pidatonya juga mengatakan, posisi politik yang terbuka untuk dirinya akan dilaksanakan, jika rakyat benar-benar membutuhkan dirinya. Selaku

Panglima TNI, Jenderal Wiranto menegaskan, "Mengingat situasi politik dan keamanan yang saat ini cenderung bergerak ke arah instabilitas yang berbahaya, saya tidak mungkin berbuat lain kecuali mengkonsentrasikan segenap waktu dan kemampuan saya bersama seluruh prajurit TNI dan rakyat yang mencintai negeri ini, untuk melaksanakan tugas menjaga keselamatan bangsa dan negara kita."

Mencermati SU MPR, Wiranto mengatakan, SU MPR secara kuat diwarnai oleh rivalitas yang semakin tajam di antara berbagai kelompok politik. "Kita melihat adanya dominasi retorika permusuhan yang semakin sengit dan sangat sulit untuk dikompromikan. Situasi ini telah ditimpali oleh mobilisasi massa yang bersifat anarkis, sehingga secara sistematis telah mengurangi makna pemilihan umum, sebagai suatu proses untuk mengukuhkan sistem demokrasi perwakilan," tegasnya.

Demi keutuhan bangsa, TNI menyerukan kepada para pemimpin politik, sosial budaya, dan pemimpin keagamaan untuk mengambil prakarsa optimal untuk bersama mencegah berlanjutnya tindak kekerasan, yang dilakukan sekelompok orang, yang secara sadar atau tidak telah menodai citra sebagai bangsa yang beradab dan memposisikan TNI sebagai pihak yang seolah-olah melawan rakyat.

"Apa yang saat ini nyata kita hadapi adalah ancaman desintegrasi yang sangat serius akibat pengerahan massa dalam jumlah besar dari berbagai pihak yang saling berhadapan," tegas Wiranto.

Demikian rangkuman liputan sejumlah surat kabar yang mengulas seputar pencalonan Presiden ke-4 RI.

Sementara itu, wawancara Dewi Fortuna Anwar dan

Fahmi Idris yang diliput surat kabar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999, antara lain menyatakan:

"Pak Habibie tetap optimis dengan pencalonannya. Beliau juga tetap pada prinsip untuk mengembangkan sikap demokratis yang sehat, sehingga apa pun hasil yang lahir di gedung MPR harus dihormati."

Dalam pemilihan dengan sistem one man one vote, *menurut Dewi Fortuna, tentu saja selalu ada kemungkinan munculnya hasil yang mengejutkan atau tidak terduga. Dengan demikian, pendapat bahwa seharusnya partai pemenang pemilu yang diberi kesempatan pertama, sudah tidak relevan dengan perkembangan yang terjadi di gedung MPR.*

Dewi mengambil contoh, terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR, meski partainya hanya memperoleh tujuh persen suara dalam pemilu, menunjukkan perkembangan yang terjadi tidak selalu merujuk pada besarnya suara yang diraih pada pemilu lalu.

Jika Pak Habibie tidak terpilih dalam pemilihan mendatang, lanjut Dewi Fortuna, tentu akan diterima dengan jiwa besar. "Saya yakin bahwa Pak Habibie tidak akan menggerakkan massa atau melakukan gerakan yang mengarah ke revolusioner bila tidak terpilih."

Menurut Dewi, Habibie tidak akan berkiprah di pemerintahan lagi bila sudah tidak terpilih. Kemungkinan besar Pak Habibie akan mewujudkan ambisinya untuk mendirikan sebuah pusat pengkajian dan pengembangan demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan sumber daya manusia.

"Yang pasti Pak Habibie tidak akan meniru langkah mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yeuw yang masih berkiprah di pemerintahan sebagai senior minister,*" ungkap Dewi.*

"Habibie akan mengembangkan suatu pusat pengkajian demokrasi, seperti yang dibangun mantan Presiden AS, Jimmy Carter dengan Carter Center-nya," tutur Dewi.

Sementara Ketua DPP Partai Golkar Fahmi Idris menyatakan, diterima atau ditolaknya pertanggungjawaban Presiden Habibie tidak akan memengaruhi keputusan Golkar terhadap pencalonan Pak Habibie. Sebab, dari berbagai ketentuan perundang-undangan, tidak satu pun yang menyatakan bahwa bila pertanggungjawaban ditolak maka tidak boleh dicalonkan menjadi presiden.

Menurut Drs. Fahmi, untuk mencari calon alternatif selain Pak Habibie, sangat sulit bagi Golkar. "Sebab, satu-satunya alternatif selain Pak Habibie adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung. Namun, sejak awal Pak Akbar Tandjung telah menyatakan tidak mau dicalonkan," ungkapnya.

Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 1999, saya didampingi oleh Mensesneg Muladi dan Sesdalobang Sintong Panjaitan menerima beberapa pendeta umat Kristiani yang datang bersama Ir. Ciputra untuk bersilaturahim dengan saya. Pada kesempatan tersebut mereka bersama memanjatkan doa agar saya diberi kekuatan dan petunjuk mengambil jalan yang benar dan selalu dilindungi Tuhan YME dalam melaksanakan tugas.

Selepas menerima para agamawan tersebut, kemudian secara khusus saya pergi mengunjungi Pasukan Pengamanan Sidang Umum MPR yang bertugas di sekitar Monumen Nasional (Monas), didampingi Menhankam/Panglima TNI Jenderal Wiranto dan Kapolri Jenderal Roesmanhadi. Kunjungan tersebut saya manfaatkan untuk mengucapkan

rasa terima kasih kepada seluruh prajurit di manapun bertugas. Para prajurit telah meringankan langkah-langkah saya sejak detik awal meneruskan perjuangan sampai ke detik akhir periode memimpin Bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas-tugas, saya harus tahu diri untuk melakukan hal tersebut guna membalas segala perjuangan para prajurit.

Sebagai pejuang saya tidak mau mengatakan kata perpisahan, dengan mengutip pepatah yang artinya "seorang prajurit tak pernah mati" dan jiwa saya seperti seorang prajurit. Oleh karena itu saya tidak mau berpamitan dengan mengatakan selamat tinggal. Tetapi, hanya dengan mengatakan selamat berjuang dalam melaksanakan tugas dan sampai berjumpa lagi.

Para prajurit tersebut telah melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dan selalu harus sabar. Padahal, mereka juga punya hak untuk menikmati nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), memiliki keluarga dan memiliki kehormatan. Namun, mereka juga dituntut harus menjadi panutan untuk bersikap sesuai yang diharapkan rakyat. Saya berharap adanya pengertian dari masyarakat, untuk bekerja sama dengan para prajurit, agar keamanan dan ketenteraman dapat dinikmati semua rakyat Indonesia.

Sementara itu, muncul wacana atau opini yang meminta agar saya mengundurkan diri juga. Ketua Umum Badan Kerja Sama Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (BKS-Ikaptisi) Koesnadi Hardjasoemantri, kepada pers di Jakarta, Senin tanggal 18 Oktober 1999, mengatakan, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak ada alternatif yang lebih baik untuk B.J. Habibie kecuali mundur dari pencalonan dirinya sebagai presiden.

Menurut Koesnadi, apa yang ia lontarkan itu sejalan dengan pernyataan sikap para alumni perguruan tinggi di

Bandung tanggal 1 Oktober 1999 yang lalu. Dalam pernyataan sikap —yang antara lain ditandatangani Selo Soemardjan, Johan S Masjhur, Bagir Manan, Sri Adiningsih dan Rusadi Kantaprawira itu— secara tegas meminta B.J. Habibie mengevaluasi ulang seluruh pertimbangan yang melandasi dirinya untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden.

Dikatakan dalam pernyataan tersebut, kondisi bangsa dan negara sekarang sudah sedemikian rupa memprihatinkan sehingga selain ancaman disintegrasi dan persoalan kesulitan ekonomi yang dihadapi bagian terbesar rakyat, Indonesia juga dalam posisi menanggung aib dan kemalangan akibat kesalahan Habibie menangani masalah Timor Timur.

Tanggal 19 Oktober 1999, pagi hari setelah shalat Subuh saya langsung mandi dan tanpa sarapan memantau perkembangan di tanah air pada umumnya, dan khususnya di kota kota-kota besar dan Jakarta. Keadaan sangat memprihatinkan dan tiap kubu politik dan arus bawahnya sudah kelihatan berhadapan dan memasang kuda kudanya.

Barisan Banser (NU), Pemuda Ka'bah (PPP), Barisan Banteng Merah (PDI-P), Pemuda Pancasila (Golkar), Kelompok Islam dalam naungan Dewan Dakwah dan Kisdi, Barisan-Barisan Masyarakat seperti Perkumpulan Masyarakat Banten dan sebagainya. Semuanya sudah berkeliaran di Jakarta dan berhadapan di tempat tempat strategis seperti di sekitar Gedung DPR/MPR di Senayan, di Bunderan Hotel Indonesia di sekitar Istana Merdeka dan sebagainya.

Semalam hanya tiga jam saya tidur, karena kesibukan membaca melalui internet, mendengar melalui radio dan melihat melalui TV perkembangan dan komentar di lapangan.

Banyak yang menginginkan saya tetap mencalonkan sebagai Presiden. Banyak pula yang menyarankan agar saya tidak mencalonkan diri lagi. Semuanya dengan iktikad baik dan keyakinan atas saran mereka yang paling menguntungkan bangsa Indonesia. Namun saya sangat menyadari bahwa pada akhirnya saya harus memutuskan sendiri.

Di sini kembali saya rasakan apa yang pernah saya alami tahun lalu, ketika Pak Harto baru saja lengser dan menyerahkan kepemimpinan bangsa kepada Wakil Presiden untuk keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Pada waktu itu —dan sekarang juga— setelah shalat Subuh, saya merasakan seorang diri menghadapi semua yang serba kompleks, serba mengerikan dan memprihatinkan.

Salah langkah, dapat mengakibatkan perang saudara. Salah langkah dapat mengakibatkan revolusi atau turun tangannya TNI dan Polri untuk menyelamatkan NKRI, jikalau perlu dengan tindakan kekerasan. Akibatnya justru sebaliknya, bukan menyelamatkan NKRI tetapi mengakhiri NKRI.

Semua kebijakan yang harus saya ambil adalah kebijakan yang *irreversible* dan *redundancy* yang ada dapat total hilang, seperti terjadi di Yugoslavia dan Uni Soviet, terpecah dalam keping-keping bekas wilayahnya menjadi beberapa negara baru. Saya sangat sadari gerakan dan aliran di dunia dengan strateginya, sudah siap menerkam dan turut ikut campur menentukan nasib dan masa depan perjuangan bangsa, seperti halnya 512 hari yang lalu ketika Pak Harto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Saya harus bertindak cepat, tegas, dan jelas. Harus mengambil sikap yang arif. Diterima tidaknya pertanggungjawaban saya harus menjadi kriteria untuk tetap mencalonkan diri sebagai Presiden keempat atau tidak.

Apa akibatnya jika saya meneruskan atau tidak

meneruskan memimpin proses reformasi bangsa sebagai presiden?

Jikalau saya teruskan jabatan saya melalui suatu proses yang demokratis maka akibatnya adalah sebagai berikut:

- Akumulasi pengalaman dalam kabinet selama 21 tahun dan enam bulan dapat dimanfaatkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang multikompleks;
- Putra dan putri bangsa terbaik dan berpengalaman dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, birokrasi dan administrasi, baik dari kalangan teknokrat, teknolog, birokrat, dan politik sebagai suatu *tim manajemen* bangsa baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dalam pimpinan ekonomi nasional dapat segera diformasikan untuk bekerja sama secara profesional;
- Dalam waktu lima tahun Presiden, Wapres, dan pimpinan nasional lainnya secara sistematis dan demokratis dapat dipersiapkan;
- Prasangka KKN dan sebagainya meningkat dan penyelesaiannya dapat dipertanyakan;
- Pembentukan oposisi dapat dipersulit dan dipertanyakan berkaitan dengan Orde Baru;
- Tokoh politik yang sudah tidak sabar untuk menjadi Presiden dan menduduki pimpinan nasional akan meningkatkan polemik dalam segala bidang yang dapat membingungkan rakyat.

Jikalau saya tidak meneruskan tugas memimpin bangsa maka akibatnya adalah sebagai berikut:

- Terjadi *relaxation process* dan kendala serta rambu-rambu menjadi berkurang dan mengecil;
- Konfrontasi akan lebih mudah dihindari dan secara sistematis hilang;

- Pelaku tokoh baru dalam segala bidang lebih cepat akan muncul dan mendapat kesempatan secara objektif dan demokratis dipilih menjadi Presiden, Wakil Presiden dan pimpinan nasional;
- Polemik dan prasangka KKN dan sebagainya, lebih berkurang dan demikian pula kaitan dengan Orde Baru dan sebagainya, tidak lagi dipersoalkan;
- Karena pimpinan nasional datang dari tokoh baru yang belum pernah mendapat kesempatan untuk memimpin proses pelaksanaan pembangunan, maka produktivitas akan menurun, daya saing akan menurun, PHK akan meningkat, masuknya modal asing akan stagnan dan menunggu perkembangan politik;
- Jumlah masyarakat yang hidup dibawa garis kemiskinan akan meningkat akibat meningkatnya PHK.

Sore harinya pukul 20.00 WIB di Kuningan, saya akan menerima para anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) untuk bersilaturahim. Pada kesempatan itu, saya akan menyampaikan bahwa tergantung dari diterima tidaknya pertanggungjawaban Presiden, saya akan bersedia atau tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tepat pukul 20.00 WIB saya menerima 44 Anggota DPA kecuali Ketua DPA Letnan Jenderal (purn) Achmad Tirtosudiro yang pagi harinya saya kunjungi sedang dirawat di Rumah Sakit.

Setelah mendengarkan laporan masa kerja DPA dalam mendampingi Presiden, saya menjelaskan bahwa hari ini nasib saya ditentukan, apakah saya tetap dapat melaksanakan tugas sebagai Presiden keempat atau tidak. Beberapa Anggota DPA menyampaikan besok baru

dilaksanakan pemilihan presiden, jadi bukan malam ini tanggal 19 Oktober 1999.

Saya menyampaikan, malam ini sedang dilaksanakan pemungutan suara, apakah pertanggungjawaban saya diterima atau tidak. Jikalau tidak diterima, maka saya tidak bersedia dicalonkan kembali.

Penjelasan saya langsung dijawab oleh beberapa tokoh DPA bahwa tidak ada peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban Presiden harus diterima jikalau Presiden mau mencalonkan kembali.

Saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang begitu multikompleks dan multidimensi, *the best son and the best daughter of this country is just good enough*. Jikalau pertanggungjawaban saya tidak diterima, maka berarti harus diberikan kepada orang lain untuk menjadi Presiden yang tentunya menurut penilaian para wakil rakyat di SU MPR lebih baik dari saya.

Terjadi suatu perdebatan yang cukup hangat, namun kemudian diakhiri dengan kesimpulan (harapan) bahwa insya Allah pertanggungjawaban Presiden akan diterima. Acara diakhiri sekitar pukul 21.30 dengan memanjatkan doa bersama.

Setelah para Anggota DPA pamit, saya langsung kembali ke ruang tamu di mana Ainun istri saya, kedua anak saya Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie serta kedua menantu saya Insana Habibie dan Widya Leksmanawati Habibie sedang melihat siaran televisi langsung dari ruang SU MPR mengenai perhitungan hasil pemungutan suara tentang diterima tidaknya pertanggungjawaban saya.

Saya menjelaskan apa yang telah saya sampaikan kepada para Anggota DPA bahwa jikalau pertanggungjawaban saya tidak diterima maka saya tidak bersedia dicalonkan kembali.

Demikian laporan melalui TV, radio yang diberitakan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya menolak pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Hasil akhir *voting* diperoleh melalui kejar-mengejar angka yang mendebarkan, antara anggota majelis yang menerima pertanggungjawaban dan anggota majelis yang menolak, dengan selisih akhir hanya 33 (4,78 persen) suara. Mereka yang menolak berjumlah 355 (51,45 persen) orang, sedangkan yang menerima 322 (46,59 persen) suara, 9 (1,3 persen) suara abstain dan 4 (0,66 persen) suara tidak sah, dari seluruh 690 (100 persen) suara.

Penghitungan suara berlangsung dramatis dan mendebarkan karena kejar-mengejar suara berlangsung sangat ketat. Di awal penghitungan, suara yang menerima sempat unggul sampai angka 150-an suara. Namun kemudian jumlah ini berhasil disamai, bahkan disusul oleh suara yang menolak.

Tetapi "kemenangan" sementara ini tidak bertahan lama, karena suara yang menerima kemudian menyusul kembali. Pendukung fanatik Habibie yang duduk di balkon berteriak gembira seraya mengacungkan tangan. Kejar-mengejar ini memancing tepukan dan teriakan riuh dari masing-masing suporter yang memenuhi balkon Gedung Nusantara V.

Setelah mencapai angka 346, yang berarti lebih separuh dari 690 suara, suara yang menolak pertanggungjawaban tidak bisa dikejar lagi, meskipun bedanya hanya berkisar antara 20–30 suara.

Saat petugas penghitung suara menyebut kata "menerima", teriakan "*huuuuu*" pun membahana. Sebaliknya, ketika disebut "menolak", sebagian hadirin pun dengan antusias berteriak "*yesss...*".

Begitu penghitungan suara selesai dilaksanakan, suasana di Gedung Nusantara pun seakan-akan meledak dan menjadi riuh rendah.

Para suporter di balkon semula menyanyikan lagu "Halo-halo Bandung", namun secara serentak lagu ini ditimpali lagu "Indonesia Raya", sehingga pada akhirnya suporter di balkon dan sebagian anggota majelis turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu.

Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, "*Dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak.*"

Di ruang keluarga saya di Patra Kuningan di mana berkumpul istri saya, Ilham dan Insana, serta Thareq dan Widya, suasananya hening. Semuanya terdiam mengikuti pemungutan suara melalui pesawat televisi. Melihat hasil pemungutan suara tersebut di wajah mereka terlihat perasaan kecewa. Namun, keheningan suasana tersebut tidak berlangsung lama, karena istri saya Ainun bertanya, "Selanjutnya bagaimana sikap Bapak?" Saya dengan spontan menjawab, "Saya tidak bersedia untuk dicalonkan atau menerima pencalonan kembali sebagai Presiden!"

Kemudian saya sampaikan alasan saya mengapa saya tidak *available* untuk dicalonkan, sebagaimana telah saya sebutkan di depan. Hal ini "wajib" saya sampaikan, karena merekalah orang-orang terdekat dengan saya dan mempunyai "hak" untuk mengetahui keputusan saya, termasuk alasannya. Dan mereka pulalah yang telah tanpa mengenal lelah dan dengan ikhlas mendampingi suami, ayah dan mertua mereka, yang sering harus "mengorbankan" kepentingan dan urusan mereka sendiri.

Kepada mereka, saya sampaikan pula bahwa siapa pun yang nanti terpilih menjadi Presiden ke-4, maka saya dan kita semua sebagai warga negara yang baik, harus membantu agar sukses melaksanakan tugasnya. Setelah kami mengambil wudhu, saya mengajak mereka semua shalat Isya

berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan shalat Tahajud dan memanjatkan doa kepada Allah SWT,

"Allah, terima kasih atas lindungan yang telah berikan kepada saya, keluarga saya, kawan dan siapa saja di sekitar saya dan seluruh bangsa Indonesia termasuk mereka yang berhadapan dan berseberangan dengan saya, membantu penuh dedikasi, menghindari penyalahgunaan "Kekuasaan" yang Allah titipkan kepada saya untuk memimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi segala percobaan. Lindungilah siapa saja yang mendapat kehormatan melanjutkan 'Tugas' saya sebagai Presiden nanti. Berilah kepada Presiden yang akan datang petunjuk mengambil jalan yang benar sesuai kehendakmu dalam memimpin bangsa Indonesia tercinta. Ampunillah dosa kita semua. Lindungilah seluruh bangsa Indonesia dalam perjalanan ke depan agar proses demokrasi di Indonesia terus berjalan lancar sesuai kehendakmu demi tercapainya kehidupan yang tenteram, sejahtera, dan berbudaya. Ampunilah dosa kita semua. Amin ya Rabbil 'alamin."

Setelah itu masuk saudara Jimly Asshiddiqie yang bersama para asisten dan ADC di ruang lain telah mengikuti perkembangan di SU MPR. Jimly Asshiddiqie bertanya seperti istri saya sebelumnya. Saya memberi jawaban yang sama, dan saya meminta agar semua fraksi atau partai politik yang merasa dekat dengan saya segera datang ke Kuningan untuk bersilaturahim dan menyamakan persepsi.

Sejam kemudian, sekitar pukul 01.30 WIB semua pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik, kecuali dari PDI-P, PKB dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa, telah hadir.

Setelah semua mengambil tempat di pendopo, maka beberapa di antara mereka mengajukan pertanyaan apakah benar bahwa saya tidak bersedia dicalonkan lagi karena

pertanggungjawaban saya tidak diterima. Dengan singkat dan tegas saya membenarkan berita bahwa saya tidak bersedia dicalonkan kembali.

Saya melanjutkan bahwa jikalau ibu Megawati nanti dipilih menjadi Presiden, maka harus ada tandingannya. Kalau secara aklamasi dan tidak ada tandingannya maka demokratisasi Indonesia akan dipertanyakan dan diragukan orang. Oleh karena itu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini harus ada yang mengganti posisi saya untuk dicalonkan sebagai Presiden ke-4 RI mendampingi pencalonan ibu Megawati.

Pertama-tama saya bertanya dan mengusulkan Pak Amien Rais yang kita calonkan karena Pak Amien adalah Ketua MPR. Tapi jawaban Amien tidak menyanggupi dan calon tunggalnya adalah Abdurrahman Wahid.

Saya menimpali bahwa masalah yang akan dihadapi Presiden nanti sangat banyak dan kesehatan Abdurrahman Wahid tidak mengizinkan, karena beliau tidak dapat membaca, sehingga susah untuk kita pertanggungjawabkan. Bagaimana membaca laporan dan membuat catatan di atas laporan jikalau tidak dapat melihat? Tetapi Pak Amin dengan tegas tetap menyatakan calonnya adalah Gus Dur.

Kemudian saya melirik ke Ketua DPR Akbar Tandjung. Bagaimana jikalau Pak Akbar yang dicalonkan untuk menandingi ibu Mega. Jawab Akbar Tandjung, calon Golkar hanya satu, yaitu Bapak B.J. Habibie.

Langsung Marwah Daud yang duduk berseberangan dengan Akbar, berdiri dan menuduh Akbar sebagai "pengkhianat" dan kata-kata yang lain yang diucapkan, memperlihatkan kekecewaan Marwah. Reaksi ini terkait dengan hasil *voting* pertanggungjawaban Presiden, yang menurut Marwah, Akbar-lah yang menjadi penyebab ditolaknya pertanggungjawaban tersebut.

Akbar Tandjung menjadi emosional mendengar kata-kata dan tuduhan Marwah yang menyakiti perasaan itu. Saya langsung berdiri dan memeluk Akbar dan meminta agar Marwah dan kawan-kawan menahan diri. Akbar bersama Ginandjar Kartasasmita, Marzuki Darusman, dan beberapa anggota pimpinan Golkar memohon untuk berkonsultasi antaramereka di ruang sebelah Pendopo.

Sementara itu, saya persilakan para hadirin mengambil kue dan minuman. Di antara mereka kelihatan bahwa sudah beberapa hari mengalami *stress* dan kurang tidur. Namun saya bersyukur bahwa mereka semua tanpa kekecualian memperlihatkan komitmen dan cinta pada bangsa dan rakyat yang hidup di NKRI.

Setelah beberapa menit kemudian, Akbar Tandjung dan kawan-kawan DPP Golkar yang lain kembali ke tempat duduk masing-masing. Akbar menyampaikan bahwa ia bersedia mencalonkan diri sebagai presiden jikalau sudah mendapat izin dari anggota DPP Golkar lain yang tidak hadir saat itu.

Langsung saya ajukan pertanyaan kepada Jenderal Wiranto apakah ia bersedia dicalonkan. Jawabannya tegas dan jelas, "Tidak, kami dari TNI dan Polri akan memberi suara kami kepada siapa saja yang dicalonkan di sini."

Setelah itu saya bertanya kepada Pak Hamzah Haz, apakah bersedia dicalonkan sebagai Presiden. Hamzah Haz menjawab, "Partai PPP hanya memiliki calon tunggal ialah Pak Habibie, namun kami dapat mengerti dan menerima kebijakan Pak Habibie untuk tidak bersedia mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden. Setelah kami bermusyawarah, maka calon kami adalah K.H. Abdurrahman Wahid."

Kepada Hamzah Haz, saya beri komentar yang sama seperti komentar saya kepada Amien Rais.

Sementara itu, waktu sudah berlalu dan jam sudah mendekati waktu shalat Subuh. ADC Presiden datang membawa surat nota mengenai keprihatinan dan kerisauan umat Islam yang sedang berkumpul di Masjid Istiqlal.

Kemudian saya mengambil kesimpulan tentang urutan Calon Presiden yang saya usulkan, yaitu calon pertama adalah Amien Rais (Ketua MPR), calon kedua Akbar Tandjung (Ketua DPR), calon ketiga Wiranto (Pangab), calon keempat Hamzah Haz (Ketua PPP) dan calon kelima dan terakhir adalah Abdurrahman Wahid. Saya meminta agar mereka yang hadir merenungkan kembali saran tersebut, dan agar semuanya melakukan konsultasi dan dikoordinasi.

Setelah itu saya menuju Masjid Istiqlal untuk bersama umat Islam melaksanakan shalat Subuh dan menenangkan mereka. Saya minta agar Adi Sasono yang hadir ikut mendampingi saya ke masjid Istiqlal. Di mobil saya sampaikan kepada Adi Sasono bahwa saya tidak boleh kontak ataupun berdialog dengan massa yang sudah berkumpul di masjid Istiqlal. Namun cukup mereka melihat saya shalat bersama mereka.

Setibanya di Masjid Istiqlal para jamaah bersorak menyambut kedatangan saya seraya mengucapkan, "*Allahu Akbar, Allahu Akbar, ……… Allahu Akbar!*"

Saya menjawab dengan ucapan yang sama sambil tersenyum.

Dari wajah mereka kelihatan kekecewaan dan keprihatinan. Namun, saya harus tetap tersenyum dengan harapan untuk dapat menenangkan mereka.

Setibanya kembali di Kuningan, ternyata Saudara Yusril Ihza Mahendra dan pimpinan partai PBB masih ada, sedangkan yang lain sudah kembali ke tempatnya masing-masing.

Saya bertanya apakah ada masalah? Langsung Yusril

menyampaikan, bahwa andaikata semua nama sampai ke Gus Dur tidak bersedia untuk dicalonkan menjadi Presiden, maka akibatnya ibu Mega menjadi satu-satunya calon. Padahal sebelumnya saya menyampaikan bahwa harus ada dua calon, karena jikalau tidak berarti bukan demokrasi.

Pertanyaan Yusril Ihza Mahendra adalah apakah ia diperbolehkan mendaftarkan diri?

Kemudian saya jawab, boleh dengan catatan bahwa jikalau salah satu dalam urutan yang telah disepakati bersama ada yang menyanggupi untuk mencalonkan diri, maka Yusril harus mundur.

Yusril mengiyakan, dan kemudian pamit untuk segera mempersiapkan pendaftaran sebagai calon Presiden.

Saya langsung mandi dan kembali untuk memberikan wawancara dengan wartawan dalam dan luar negeri mengenai tanggapan hasil voting SU MPR malam sebelumnya.

Harian *Kompas* menurunkan tulisan hasil wawancara tersebut, sepenuhnya saya kutip sebagai berikut:

> *Wajah mantan Presiden B.J. Habibie tampak cerah dan tetap penuh senyum setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari pencalonan presiden, Rabu (20/10) pagi, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ada bayangan kekecewaan.*
>
> *Namun, beberapa ibu atau wanita yang berada di tempat tinggal mantan Presiden itu tampak berlinangan air mata. "Saya terharu dengan ucapan-ucapan Beliau," ujar seorang wanita, yang tidak mau menyebutkan namanya.*
>
> *Habibie mengumumkan, pengunduran dirinya di depan sekitar 77 wartawan dari 45 media massa dalam dan luar negeri.*
>
> *Dalam jumpa pers yang dimulai sekitar pukul 08.30*

di ruang belakang kediamannya di Patra Kuningan, Habibie mula-mula membacakan pernyataannya. Ia mengatakan, penolakan sidang MPR terhadap pidato pertanggungjawabannya telah dilaksanakan secara demokratis.

"Dari hasil pemungutan suara tersebut, jelas wakil-wakil rakyat berkesimpulan Bacharuddin Jusuf Habibie tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan," ujarnya ringan.

"Sehubungan dengan itu, bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya —Bacharuddin Jusuf Habibie— sebagai Presiden masa bakti 1999-2004," katanya.

Ketika ayah dari dua putra dan kakek dari empat cucu ini mengucapkan penarikan pencalonannya, jam dinding yang ada di belakangnya menunjukkan pukul 08.40, tetapi jam bandul besar yang ada di sebelah kanannya menunjukkan pukul 08.45.

Habibie menyatakan keyakinannya bahwa masih banyak putra-putri bangsa yang lebih mampu dari dirinya untuk melaksanakan reformasi menyeluruh.

Kemudian Habibie dengan suara lantang mengatakan, "Melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air —di manapun berada— untuk tetap menjaga ketenteraman dan ketenangan, serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yang dapat mengganggu sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan terselenggaranya berbagai agenda reformasi."

Acara tanya jawab dimulai dengan pertanyaan, apakah mantan presiden berusia 63 tahun ini akan kembali ke Jerman? Langsung Habibie menjawab, "Rumah saya di sini bung, kenapa kembali ke Jerman?"

Ditanya apakah ia kecewa dengan penolakan Jenderal Wiranto untuk jadi calon wapresnya, Habibie menyatakan, tidak kecewa karena telah berusaha dan "Tuhan yang menentukan."

LSM HAM

Lalu ia menyampaikan cita-citanya untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang akan memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. Ketika ia mengucapkan ini salah seorang ajudan Habibie bertepuk tangan keras dan disusul oleh hadirin lainnya.

"Saya punya cita-cita mendirikan LSM di sini yang mengonsentrasikan diri untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, itu 'kan bagus, untuk orang tua seperti saya bagus itu, apalagi saya 20 tahun jadi Menristek, 72 hari menjadi wakil presiden dan 512 hari jadi presiden, dalam itu berkesempatan bereformasi, 'kan lumayan itu," ujar Habibie.

Setelah itu, Habibie melayani pertanyaan dalam bahasa Inggris yang mengulangi lagi apa yang dikatakan dalam teks yang dibacakannya. Katanya dalam menjalankan mission impossible *selama ini ternyata* my mission is not accomplished.

"I'm not available," *ujarnya pula.*

Menjelang akhir jumpa pers, Habibie juga melayani pertanyaan dalam bahasa Jerman.

Ditanya apakah ia akan menulis buku, Habibie dengan penuh tawa berkata, "Tunggu dulu Dik, buku saya sudah bertumpuk, usia saya sudah 63 sebentar lagi 64, memang usia-usia untuk pensiun."

"Saya punya cucu empat dan sehat, ya syukur toh dan selamat melaksanakan tugas. Dan saya tidak berhenti

karena dipukuli atau dipaksa. Saya berhenti normal dan konstitusional serta demokratis. Apa masalahnya," demikian katanya.

Ketika seorang pembantunya berusaha untuk menghentikan tanya-jawab, Habibie langsung mengatakan, "Biar dulu, besok 'kan saya tidak menarik perhatian kalian lagi."

Jumpa pers ini tidak dihadiri para mantan menteri kabinetnya. Yang tampak antara lain penasihatnya, Ahmad Watik Pratiknya, Parni Hadi, Sintong Panjaitan, serta para ajudan dan para pengawal lainnya.

Ny Hasrie Ainun Habibie dan kedua putranya (Tareq dan Ilham) tidak tampak di ruang jumpa pers.

Bagaimana kalau nanti ada pengusutan terhadap pidato pertanggungjawabannya di MPR serta berbagai hal lain, Habibie mengatakan, "Ya terserah, kalau memang begitu... it's ok, apakah hanya saya yang bersalah... jangan berspekulasi".

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) AA Baramuli datang sementara Habibie sedang melayani berbagai pertanyaan wartawan. Dengan wajah tampak serius ia berbincang-bincang dengan Sintong Panjaitan, di ruang tengah kediaman mantan presiden. Begitu jumpa pers selesai pukul 09.25, mantan Asisten Luar Negeri Mensesneg Dewi Fortuna Anwar datang dan langsung disambut oleh Habibie dengan 'tempel pipi'. "I miss you," kata Habibie. Sementara Dewi Fortuna minta maaf atas keterlambatannya sehingga tidak mendengar pengumuman dari Habibie.

Sedangkan Baramuli menyambut Habibie dengan mengatakan, "Bagaimana?" Tetapi lalu mereka masuk ke ruang lain untuk mengadakan pembicaraan tersendiri. Tetapi pertemuan ini tidak lama, sekitar pukul 10.00

Baramuli keluar dari kediaman Habibie.

Dicegat wartawan Baramuli mula-mula tidak mau berkomentar. Tetapi dalam perjalanan mencari kendaraannya, akhirnya beberapa kalimat keluar dari tokoh Golkar ini.

Ditanya apakah sekarang ia baru sakit gigi, Baramuli langsung berkata, "Sakit jantung." Lalu ia berkata pula, "Sekarang ini ramai sekali, Sulawesi Selatan demonstrasi besar-besaran, juga Irian Jaya."

Apakah Bapak tidak menenangkannya, Baramuli berkata lagi, "Mungkin orang pilih yang begini." Lalu wartawan menyampaikan, Habibie melepaskan pencalonannya dengan ikhlas.

Menanggapi ini tokoh kelompok Iramasuka (Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan) ini berkata pula, "Beliau ikhlas. Tetapi orang-orangnya tidak ikhlas....lihat saja."

Sementara Dewi Fortuna berkomentar, yang perlu diteruskan oleh presiden baru antara lain adalah, sikap kedekatan dan keterbukaan Habibie dengan wartawan, karena pers adalah salah satu pilar demokrasi. Selain itu Dewi mengharapkan jangan lagi istana kepresidenan disakralkan, tetapi harus terbuka untuk siapa saja.

Demikian laporan yang diturunkan harian *Kompas* berkenaan dengan pernyataan saya tidak bersedia dicalonkan. Sementara itu harian yang sama juga menurunkan tulisan terkait dengan pencalonan Abdurahman Wahid, yang sepenuhnya saya kutip sebagai berikut:

Pertemuan sejumlah anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar dengan KH Abddurrahman Wahid (Gus Dur) di Ruang Mawar lantai dua Hotel Mulia pada pukul 10.00

pagi, tanggal 20 Oktober 1999 menjadi salah satu kunci kemenangan Gus Dur.

Dalam pertemuan selama lima belas menit ini, anggota MPR Fraksi Golkar pendukung Habibie menyatakan siap memberikan seluruh suara mereka sepenuhnya untuk Gus Dur. Jumlah suara yang diraih Gus Dur, yakni 373 di antaranya merupakan seluruh suara Golkar pendukung Habibie.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung didampingi Ridwan Hasyim, anggota Partai Golkar dari Jatim, juga bertemu Gus Dur pada jam yang hampir sama di Hotel Mulia.

Jadi bisa disimpulkan, seluruh kubu di Golkar akhirnya memberikan suaranya pada deklarator Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Gus Dur yang ditemani Ketua PKB, Alwy Shihab, datang ke pertemuan setelah dihubungi salah seorang utusan daerah.

Gus Dur sendiri berada di lantai 32 hotel yang sama, dan tengah bersiap-siap menghadiri pemilihan presiden.

AA Baramuli yang menjadi juru bicara Golkar dalam pertemuan ini mengatakan, setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk pilihan bersikap abstain, maka seluruh suara diputuskan diserahkan ke Gus Dur.

"Menurut hitungan kami, kesepakatan ini membuat Gus Dur dipastikan memperoleh sekitar 150 suara. Karena waktu yang sangat mepet, mengenai konsesi apa yang akan diperoleh, belum dibicarakan tuntas.

Tetapi Gus Dur telah diberitahu perlunya memberi jatah yang adil bagi tokoh-tokoh luar Jawa," tutur salah seorang anggota MPR yang hadir.

Gus Dur tidak sempat berbicara banyak dalam pertemuan ini. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas

kepercayaan pendukung Habibie dan mengenai aspirasi lainnya, akan dibicarakan dalam pertemuan setelah pengambilan sumpah presiden.

Pertemuan ini awalnya diadakan oleh pendukung Habibie untuk menetapkan sikap mereka, setelah Akbar Tandjung dipastikan tidak menggantikan posisi Habibie sebagai calon presiden.

Posisi Golkar yang tanpa capres membuat pendukung Habibie kebingungan menentukan sikap. Pendukung Habibie yang hadir sekitar 40 orang, yang didominasi anggota MPR dari daerah. Dari DPP Golkar tampak hadir Slamet Effendy Yusuf dan M. Irsyad Sudiro.

Suasana pertemuan masih diwarnai perasaan kekecewaan kelompok pendukung Habibie terhadap ditolaknya pidato pertanggungjawaban Habibie melalui voting dan mundurnya Habibie sebagai capres.

Sebagian besar yang hadir, khususnya yang dari kawasan timur Indonesia awalnya sudah memilih akan bersikap abstain. Sikap abstain ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap suara rakyat yang mengharapkan Habibie terpilih.

"Penolakan pertanggungjawaban dan mundurnya Habibie adalah musibah bagi kami. Ini betul-betul di luar dugaan."

"Kami dikhianati orang Golkar sendiri," tutur Prof Anwar Arifin, anggota MPR dari Sulsel.

Keluarnya instruksi DPD Golkar Sulsel yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris, HM Amin Syam dan Agus Arifin Nu'mang, semakin memperkuat keinginan untuk abstain.

Namun setelah mendengar penjelasan sejumlah anggota mengenai baik buruknya pilihan abstain terhadap setiap capres, maka akhirnya disetujui mengundang Gus

Dur untuk datang ke pertemuan, dan menyerahkan suara mendukung Gus Dur.

Sekitar pukul 14.30, dari salah satu bagian tempat tinggal Habibie terdengar suara riuh rendah. Ternyata para pengawal dan pegawai kediaman mantan presiden ini sedang asyik menyaksikan pemilihan presiden di MPR lewat televisi.

Setelah KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden, salah seorang pengawal jungkir balik dua kali di lantai karena kalah taruhan tentang siapa yang jadi presiden.

Wartawan yang minta waktu bertemu Habibie dijawab pengawal, "Sekarang tidak mungkin, impossible.*"* Demikian laporan harian *Kompas.*

Sementara itu, saya mendapat laporan bahwa Akbar Tandjung tidak mendapat persetujuan DPP Golkar untuk maju sebagai calon presiden. Di lain pihak Abdurrahman Wahid bersedia dicalonkan sebagai Presiden. Oleh karena itu, seperti saya pesankan, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Presiden, sehingga Megawati Soekarnoputri berhadapan dengan Abdurrahman Wahid dalam pemilihan Presiden ke-4 Republik Indonesia di Gedung SU MPR 1999 berlangsung.

Telepon di Kuningan dan *handy* saya terus berbunyi. Telepon itu datang dari lapangan, karena semua sedang mempersiapkan proses pemilihan Presiden, meminta pengarahan saya. Mereka semua bertanya, "*Apakah benar Bapak tidak bersedia dicalonkan lagi? Apakah benar Gus Dur mengganti Bapak menghadapi ibu Mega?*"

Saya jawab, "Semua benar dan agar suara untuk saya dialihkan kepada Gus Dur. Harap dijaga ketenteraman dan agar demokrasi tetap berjalan." Itulah pesan saya.

Setelah Pemilihan Presiden dimenangkan oleh Abdurrahman Wahid, terlihat kekecewaan besar di kubu PDI-P. Keresahan dan tegangan terjadi. Massa Banteng Merah (PDI-P) sudah berhadapan dengan massa Barisan Banser (NU), Pemuda Ka'bah (PPP), Pemuda Pancasila (Golkar), Kelompok Islam dalam naungan Dewan Dakwah serta KISDI, juga barisan-barisan masyarakat, seperti Perkumpulan Masyarakat Banten.

Setelah kemenangan Abdurrahman Wahid, Presiden terpilih Gus Dur langsung berkunjung ke kediaman saya di Kuningan, yang saya menerima di ruang Pendopo.

Setelah mengambil tempat masing-masing pembicaraan empat mata terjadi. Antara lain saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden secara demokratis. Dan saya mendoakan semoga Allah SWT selalu melindungi dalam melaksanakan tugas sebagai Presiden RI keempat.

Presiden Abdurrahman Wahid menyampaikan bahwa ia bermaksud datang bersama ibu Mega, namun pelaksanaan teknis tidak memungkinkan, karena telah terjadi kerusuhan di bunderan Hotel Indonesia. Karenanya dia sampaikan bahwa setelah bersilaturahim dengan saya, Abdurrahman Wahid akan segera menuju ke bunderan HI.

Pada pertemuan tersebut Abdurrahman Wahid menyampaikan tiga hal, yaitu:

- *Atas nama seluruh Bangsa Indonesia saya mengucapkan banyak terima kasih atas keberhasilan Pak Habibie membuka pintu kebebasan dan demokrasi di Bumi Indonesia.*
- *Atas nama umat Islam saya bersyukur dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Habibie yang karena demokrasi tersebut umat Islam yang selalu berada di pinggiran pindah ke tengah.*
- *Atas nama keluarga Abdurrahman Wahid saya mengucapkan terima kasih, karena kepimpinan dan kebijaksanaan Pak*

Habibie saya dipilih menjadi Presiden ke-4 RI.

Saya harapkan Bapak tetap bersedia menasihati saya dalam melaksanakan tugas."

Saya menyampaikan bahwa dengan sendirinya sebagai warga negara yang baik, sebagai pejuang dan sebagai orang tua, tiap saat saya akan menasihati Presiden Abdurrahman Wahid. Saya juga mengucapkan, "Selamat berjuang. selamat bertugas. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan memberi petunjuk mengambil jalan yang benar."

Demikian pertemuan empat mata yang singkat namun sangat mendalam artinya diakhiri.

Segera setelah itu Presiden Abdurrahman Wahid meminta diri untuk selanjutnya menuju ke bundaran Hotel Indonesia. Ketika mengantar Gus Dur ke mobil kepresidenannya yang baru, saya bercanda mengatakan, "Gus Dur ini mobil antipeluru *lho*."

Lalu saya masuk kembali ke rumah, untuk bertemu dengan beberapa sahabat, antara lain Baramuli, Agung Laksono, Muladi, Abdul Gafur, Ahmad Watik Pratiknya, Jimly Asshiddiqie, Marwah Daud, dan Fadel Mohammad yang sudah menunggu. Saya mendengarkan pandangan dan informasi keadaan di lapangan yang sangat memprihatinkan. Laporannya sama seperti masukan yang telah saya peroleh dari Gus Dur.

Saya sampaikan bahwa kita harus memberi komentar dan berperilaku yang menenangkan. Harus mencegah penyalahgunaan komentar dan perilaku oleh orang lain yang memiliki "program sendiri" dan tidak sejalan dengan reformasi dalam bingkai NKRI dan UUD '45.

Saya dapat mengerti kekecewaan mereka yang menghendaki kepemimpinan saya dilanjutkan. Namun, seperti yang sering saya sampaikan, "Manusia

merencanakan tetapi Allah jualah yang menentukan. Semua itu jelas ada maksud dan artinya. Yang menjadi tujuan kita adalah bukan kemenangan diri, melainkan kemenangan rakyat. Dan kemenangan itu terjadi bila ada demokrasi. Dengan demikian proses '*demokrasi tidak boleh henti*'."

Sekneg.

Panen Tebu pada Hari Bakti TNI AU, 1998 di Yogjakarta

Hr. Republika

Membacakan Pidato Pertanggungjawaban pada Sidang Umum MPR,
14 Oktober 1999

Sekneg.

Memberikan Keterangan Pers, Pernyataan menolak dicalonkan menjadi presiden, 20 Oktober 1999 di Jalan Patra Kuningan

Sekneg.

Menyampaikan Ucapan Selamat kepada Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 RI, 20 Oktober 1999, di Gedung DPR/MPR

Koleksi THC

Karikatur suasana Reformasi karya kartunis Sam, Desember 1998

Koleksi Pribadi

Bersama Isteri, anak, menantu dan cucu di Istana Bogor, 1999

Epilog

Tujuh belas bulan B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia ke-3, menjadi masa bersejarah yang akan selalu dikenang sebagai masa bangkitnya demokrasi di Indonesia masa mulai bergulirnya reformasi yang akan membawa Indonesia sebagai bangsa yang lebih demokratis.

Selama masa jabatannya sebagai presiden, B.J. Habibie telah menunjukkan kepeduliannya kepada kebutuhan bangsa yang menginginkan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi secara menyeluruh. Hal ini semua terjadi berlandaskan pada pengamatannya terhadap masa pemerintahan Orde Lama dan pengalamannya dalam pemerintahan Orde Baru. Masa-masa itu telah memberinya pelajaran dalam menganalisis situasi. Karena itu, melalui proses yang sistematis, menyeluruh, dan integral, ia membuat sebuah agenda nyata selama pemerintahannya.

Memang berkembang pendapat umum dan diberitakan pada sejumlah media di Indonesia bahwa semua kebijakan populis pemerintahan B.J. Habibie yang menyangkut kebijakan dalam bidang politik, kebebasan pers, penegakan HAM, demokratisasi pada umumnya, bukanlah gagasan atau keputusan yang datang dari B.J. Habibie secara murni, tetapi lahir karena tekanan dan desakan sejumlah kelompok

masyarakat dan pendapat umum. Opini masyarakat dan media mengenai hal tersebut ternyata tidak benar.

Selama B.J. Habibie memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan, ia tidaklah reaktif. Ia tidak bekerja secara acak atau hanya bekerja berdasarkan kemauan sesaat, apalagi hanya karena desakan yang gencar dari berbagai kelompok kepentingan atau pendapat umum. B.J. Habibie selama memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan atau seperti perumpamaannya, sebagai "pilot" dalam pesawat yang sedang *super stall,* ia memiliki sikap dan konsep yang jelas.

Tiga hari setelah dilantik menjadi Presiden ke-3 Republik Indonesia, di sela-sela munculnya berbagai opini publik yang bernada "merendahkan" atas kemampuan B.J. Habibie memimpin bangsa Indonesia, B.J. Habibie menyampaikan pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman kerja para anggota kabinet.

Prioritas utama kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi sesegera mungkin krisis ekonomi, selain berisi kebijakan dengan spektrum yang luas, menyangkut bidang politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia, kesejahteraan dan berbagai persoalan lain yang harus segera diatasi pemerintah. Kebijakan tersebut, menurut beberapa anggota Kabinet Reformasi Pembangunan ketika itu, benar-benar telah memberikan inspirasi dan pedoman kerja bagi mereka melaksanakan agenda reformasi dalam 17 bulan masa kepresidenan B.J. Habibie.

Tidak ada yang bisa menerka, apa yang terjadi apabila B.J. Habibie tidak secara kebetulan adalah Wakil Presiden yang mengambil alih tanggung jawab sebagai Presiden RI karena Presiden Soeharto "lengser". Bagaimana Presiden yang baru dilantik mendadak itu harus menghadapi situasi dari detik ke detik yang tidak menentu, euforia rakyat yang

tidak terbendung memanfaatkan kegalauan yang berkembang, konflik horizontal yang terjadi di mana-mana, dan wibawa aparat keamanan yang mulai menipis.

Negara cenderung mendekati *chaos*, tiba-tiba semua berubah. Krisis politik, ekonomi dan sosial sudah di depan mata. Tekanan pengujuk rasa dari berbagai kelompok mahasiswa dan unsur masyarakat yang makin menjadi-jadi. Kegagalan mencari solusi dari masalah ini bisa mengancam eksistensi bangsa.

Seperti pengakuan B.J. Habibie, "Kalau saya tidak mengambil kebijakan yang sesuai dengan kriteria yang saya tentukan, kondisi di Indonesia bisa lebih tidak rasional. Bisa muncul sesuatu yang tidak kita kehendaki. Bangsa Indonesia dapat terpecah-pecah mengalami 'Balkanisasi'. Indonesia bisa menjadi beberapa negara kecil. Bisa terjadi perang saudara, seperti terjadi pada beberapa negara di dunia, di Rusia, Yugoslavia dan Cekoslovakia. Negara-negara tersebut membayarnya dengan sebuah 'Balkanisasi'. Negara yang besar terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil. Di Afghanistan dan Irak dibayar dengan darah. Jika ini terjadi, maka yang menderita adalah rakyat."

Itulah yang berkecamuk dalam pikiran B.J. Habibie, pada detik-detik pertama ia menerima amanah dari rakyat. Karena itu, ia mulai mengambil langkah yang hati-hati, tetapi tegas dengan sebuah determinasi yang tepat.

Dengan akumulasi pengalaman dalam pemerintahan dan ilmu yang yang telah diserapnya, B.J. Habibie mulai mengadakan analisis, mengoreksi sistem yang telah ada, mengadakan perhitungan strategis di tengah kritikan bertubi-tubi kelompok kepentingan dari berbagai penjuru.

B.J. Habibie ternyata bisa membawa bangsa ini lolos pada saat-saat kritis. Kinerja ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya konsep, kesadaran bekerja dengan sebuah sistem,

dan orang yang seluruh hidupnya memang telah didedikasikan untuk bangsanya.

Desakan sejumlah tokoh nasional kepada B.J. Habibie agar dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu dalam tiga bulan, melaksanakan pemilihan umum, walaupun dinilainya konstruktif dan bermaksud baik, tetap ditolaknya. Menurut B.J. Habibie, tidak adil untuk melaksanakan pemilu segera dalam tiga bulan, sebelum rakyat diberi kesempatan membentuk partai-partai yang akan membawa aspirasi dan wawasan yang baru. Jikapun partai-partai baru bisa dibentuk, partai tersebut masih memerlukan waktu untuk memasyarakatkan aspirasi dan wawasan mereka kepada masyarakat.

Pemilu, menurut B.J. Habibie, baru bisa dilaksanakan satu tahun kemudian, karena diperlukan persiapan landasan hukum agar pemerintahan yang terpilih akan memiliki legitimasi tinggi. Sesudah itu, lahirlah UU Politik baru yang memunculkan 48 partai peserta Pemilu l999.

Dengan demikian, Sidang Istimewa MPR tahun l999, tidak lagi diikuti oleh partai politik pemenang Pemilu l997, tetapi partai politik baru hasil Pemilu 1999 yang benar-benar diselenggarakan demokratis. Para anggota MPR baru ini pula yang kemudian menolak pertanggungjawaban B.J. Habibie dalam Sidang Istimewa MPR l999. Tetapi bagi B.J. Habibie, tidak membuatnya kecewa. "Menjadi presiden, bukan segalanya bagi saya, tetapi yang penting apa yang terbaik bagi bangsa ini," katanya.

Dari sini pulalah reformasi politik bergulir di Indonesia sampai sekarang ini. Apa yang terjadi dalam sejarah politik di Indonesia, andaikan B.J. Habibie serta-merta mengikuti desakan sejumlah tokoh nasional itu?.

Banyak yang menyalahkan B.J. Habibie, karena Timtim yang sebelumnya menjadi sebuah provinsi di Indonesia, lepas

dan berdiri sebagai sebuah negara baru melalui sebuah jajak pendapat. Peristiwa yang terjadi di masa akhir pemerintahan B.J. Habibie itu, memang mengecewakan banyak rakyat Indonesia, termasuk B.J. Habibie.

Lama B.J. Habibie merenung, setelah ia mendengar keputusan hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh kelompok rakyat Timtim yang menolak integrasi. Tetapi itulah kenyataan yang harus diterima, keputusan akhir ada pada mayoritas rakyat di Timor Timur.

Namun demikian, B.J. Habibie tetap berpegang pada prinsip bahwa persoalan Timor Timur, tidak bisa terlepas dari koridor demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan, tanpa tolok ukur ganda atau mendua. Bagi B.J. Habibie jelas, rakyat dan bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dan bertentangan dengan falsafah negara dan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip universal, atau prinsip yang harus konsisten dianut oleh rakyat dan pemerintah Indonesia, sesuai Mukadimah UUD 1945.

Kalau kita berbicara mengenai demokrasi, bagi B.J. Habibie, maka kita pun harus berpihak kepada kehendak dan kemauan rakyat. Jika rakyat, dalam hal ini penduduk yang berada di Timor Timur, secara demokratis sudah menentukan keinginannya tanpa tekanan dan rekayasa, maka tidak ada jalan lain, kecuali mematuhi keinginan dan pilihan mereka.

Sikap B.J. Habibie menghadapi persoalan Timtim, begitu pula dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, tidak terlepas dari sikap hidup dan pemahaman B.J. Habibie mengenai demokrasi. Sikap ini pula yang sangat kental berbekas dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan B.J. Habibie, selama mendapat amanah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3.

Banyak gagasan dan keputusan yang sangat fundamental lahir atas inisiatif B.J. Habibie. Sadar atau tidak, apa yang ditinggalkan B.J. Habibie dalam masa singkat pemerintahannya, telah membuka jalan bergulirnya reformasi dan berpengaruh dalam sendi-sendi kehidupan kita di masa datang sebagai rakyat, bangsa dan negara.

Memahami Langkah-langkah Habibie Menghadapi Krisis

Mencoba memahami langkah-langkah B.J. Habibie dalam menghadapi krisis, dapat dijelaskan dengan dua hal: *pertama*, landasan perilaku kepemimpinannya; dan *kedua,* pendekatan yang dilakukannya dalam menghadapi saat krisis.

Landasan Perilaku

Jika kita bertanya, apa yang menjadi landasan perilaku Kepemimpinan B.J. Habibie selama memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan dalam masa tujuh belas bulan menjabat sebagai Presiden ke-3 RI, maka ada tiga hal yang patut disimak.

Sandaran Kekuatan Rohani. Satu hal yang menonjol dalam pribadi B.J. Habibie adalah sifat keberagamaannya yang kental. B.J. Habibie sering mengaku bukan seorang ahli agama (Islam), namun ia selalu berusaha menjadi penganut Islam yang baik. B.J. Habibie meyakini, apa pun yang terjadi adalah kehendak Tuhan semata, walaupun berbeda atau kadang-kadang bertentangan dengan kehendak manusia, dan manusia pun sering tidak memahami arti atau hikmahnya.

Sandaran B.J. Habibie atas kekuatan rohani ini tecermin,

misalnya, pada saat B.J. Habibie meninggalkan kediaman Presiden Soeharto tanggal 20 Mei 1998, setelah mengetahui bahwa Pak Harto akan mengundurkan diri, namun tidak jelas apa alasannya, dan bagaimana "penyelesaian" pengunduran diri tersebut terkait dengan kedudukan Wakil Presiden. Membaca catatannya saat itu, bisa dibayangkan betapa dalam "kepala" seorang Habibie sedang berkecamuk berbagai persoalan dan pertanyaan yang amat kompleks dan mendasar tentang masa depan Indonesia terkait dengan situasi negara yang penuh dengan ketidakmenentuan. Dalam situasi tersebut, muncul sifat keberagamaan B.J. Habibie, yaitu ia langsung bersandar pada kehendak Tuhan dengan berdoa dan menunaikan shalat.

Bahkan dalam situasi yang digambarkan seolah-olah *trance* tersebut, B.J. Habibie berdoa bukan saja untuk dirinya, tetapi juga untuk Pak Harto, figur yang amat dihormati namun sekaligus figur yang penuh "tanda tanya" dan mengecewakannya dengan pernyataannya yang tak menentu mengenai posisi Wapres setelah pengunduran diri Presiden.

Sandaran kekuatan rohani B.J. Habibie tersebut juga terlihat pada saat dia bersama seluruh keluarganya "diungsikan" ke Wisma Negara, karena adanya informasi konsentrasi kekuatan militer yang tidak semestinya di sekitar kediaman Patra Kuningan dan Istana. Walau dalam hati B.J. Habibie berkecamuk pemikiran yang "mengerikan", termasuk apakah dirinya akan senasib dengan keluarga Tsar Romanov dari Rusia, yang semuanya dibunuh di satu tempat dalam revolusi kaum Bolshevik. Namun dengan sandaran kekuatan rohani yang kuat, kemudian B.J. Habibie pasrahkan semua itu pada Allah SWT karena dalam keyakinannya Allahlah yang mengatur semuanya, termasuk masa-masa kritis yang sedang dihadapinya.

Gambaran yang sama juga tecermin pada saat B.J. Habibie bersama keluarga selesai mengikuti siaran televisi mengenai hasil pemungutan suara di SU MPR mengenai pertanggungjawabannya, yang ternyata ditolak oleh MPR. Ia langsung mengajak seluruh keluarganya untuk ambil wudhu dan bersama melaksanakan shalat, serta berdoa,

> Allah, terima kasih atas lindungan yang telah Engkau berikan kepada saya, keluarga saya, kawan dan siapa saja di sekitar saya dan seluruh bangsa Indonesia termasuk mereka yang berhadapan dan berseberangan dengan saya, membantu penuh dedikasi, menghindari penyalahgunaan 'kekuasaan' yang Allah titipkan kepada saya untuk memimpin bangsa Indonesia dalam menghadapi segala cobaan. Lindungilah siapa saja yang mendapat kehormatan melanjutkan 'tugas' saya sebagai presiden nanti. Berilah kepada presiden yang akan datang petunjuk mengambil jalan yang benar sesuai kehendak-Mu dalam memimpin bangsa Indonesia tercinta. Ampunilah dosa kita semua. Lindungilah seluruh Bangsa Indonesia dalam perjalanan ke depan agar proses demokrasi di Indonesia terus berjalan lancar sesuai kehendak-Mu demi tercapainya kehidupan yang tenteram, sejahtera, dan berbudaya. Ampunilah dosa kita semua. Amin ya Rabbal'alamin.

Perhatikanlah pula ungkapan B.J. Habibie,

> Tiap orang yang beragama dan percaya pada eksistensi Tuhan YME percaya bahwa hidup dan mati seseorang ditentukan oleh Allah SWT. Yang dikehendaki Tuhan YME adalah yang terbaik dan pasti akan terjadi. Saya pasrah terima apa adanya dan dengan tenang menghadapi semuanya tanpa bertanya: Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Karena semua saya laksanakan dengan iktikad dan niat membantu memperbaiki nasib dan masa depan bangsa Indonesia yang saya sangat cintai.

Eksistensi Tuhan bagi B.J. Habibie bukan sekedar simbolik atau hanya dalam makna ritual saja, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan nyata B.J. Habibie. Tuhan hadir dalam pemikiran dan perilaku B.J. Habibie dalam menghadapi berbagai hal, apalagi dalam keadaan yang "gawat" sebagaimana dilukiskan di atas.

Kekuasaan adalah Amanah. Salah satu yang mendasari perilaku kepemimpinan B.J. Habibie adalah pemahamannya tentang "kekuasaan" atau *power*. Kekuasaan, menurut B.J. Habibie, bukanlah tujuan, melainkan sarana perjuangan atau pengabdian kepada bangsa dan negara. Kekuasaan adalah amanah, yang mesti ditunaikan dengan baik demi kepentingan rakyat dalam arti yang sebenarnya. "Baik" di sini tecermin dari nilai-nilai moral dan etik, yang bagi B.J. Habibie amat kuat bersumber pada nilai-nilai agama yang diyakininya, yaitu Islam.

Dalam pemahaman B.J. Habibie, kekuasaan atau *power* harus dijalankan sebagai "fungsi" dari kehendak Allah dan "fungsí" dari kehendak rakyat. Artinya, kekuasaan harus dilaksanakan sesuai ajaran Allah, dan dilaksanakan untuk memenuhi kehendak dan kedaulatan rakyat.

Dalam pemahaman yang demikian, maka seorang pemimpin tidak akan "haus" terhadap kekuasaan atau suatu keadaan di mana kekuasaan atau kedudukan akan diperjuangkan untuk diperoleh dengan cara apa pun, dan manakala kekuasaan sudah diperoleh akan berusaha "ditingkatkan" dan kalau dapat "diabadikan".

Pemahaman kekuasaan sebagai amanah tersebut juga menghindarkan pemimpin untuk *legowo* berpisah dengan kekuasaan, kalau memang rakyat menghendaki, atau kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Dengan kalimat yang sederhana, B.J. Habibie menyatakan,

> Bagi saya, menjadi Presiden bukan segalanya dalam kehidupan. Yang penting, bagaimana rakyat Indonesia yang sudah lama berjuang dan rela menderita, bisa mencapai masa depan yang cerah, tenteram, dan sejahtera bagi anak cucu kita semua.

Pandangan B.J. Habibie tentang kekuasaan sebagai amanah tersebut tecermin misalnya pada pendapat B.J. Habibie yang menganggap bahwa pemusatan kekuasaan politik pada institusi presiden pada saat itu (sebagai presiden tanpa wapres, sebagai koordinator harian Keluarga Besar Golkar, serta warisan budaya institusi kepresidenan yang feodal dan otoriter) —yang memungkinkan B.J. Habibie mengendalikan sekaligus eksekutif, sebagian besar legislatif dan yudikatif— sebagai tidak sehat dan salah dalam kehidupan demokrasi, dan karenanya perlu segera dikoreksi.

Demikian juga ketentuan konstitusional yang memungkinkan B.J. Habibie menjadi Presiden sampai tahun 2003 tidak "dimanfaatkan", melainkan dilakukan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 untuk memungkinkan dipercepatnya pelaksanaan Pemilu 1999, dengan risiko B.J. Habibie harus mengakhiri masa kepresidenannya pada SU MPR tahun 1999 apabila tidak terpilih lagi.

Cerminan yang lain mengenai pemahaman B.J. Habibie terhadap kekuasaan adalah pernyataannya tidak *available* untuk dicalonkan sebagai Presiden pada SU MPR Oktober 1999, walaupun secara konstitusional dimungkinkan (pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak MPR dengan selisih suara tipis).

B.J. Habibie dengan mudah melakukan "perpisahan" dengan kekuasaan, yang bagi orang lain mungkin terasa amat berat. Sikap *legowo*, ikhlas dan tanpa dendam tersebut tecermin pula dengan tetap terjalinnya hubungan baik serta

kesediaan B.J. Habibie memberi masukan konstruktif untuk presiden-presiden yang kemudian menggantikannya. Hal yang sama rupanya tidak terjadi pada presiden-presiden sebelum dan sesudahnya.

Pandangan B.J. Habibie tentang kekuasaan ini terlihat jelas melalui ungkapannya pada saat ia merenungkan situasi euforistik pasca penyampaian Jawaban Pidato Pertanggungjawaban Presiden di SU MPR.

B.J. Habibie menegaskan,

> Banyak yang belum atau tidak mau sadar bahwa 'kekuasaan' itu hanya dipinjamkan oleh si Pemiliknya yaitu Allah SWT, Tuhan YME. Pemilik kekuasaan tersebut tiap saat dapat mengambil kembali 'kekuasaan' dan meneruskan kepada siapa saja yang dapat dititipkan dengan maksud yang mungkin pada waktu itu kita belum dapat mengerti alasannya, namun kelak menjadi jelas maksud tujuan-Nya.

Inner Dialog. Mungkin terbawa dari kebiasaannya sebagai seorang *engineer*, yang harus memperhitungkan segala sesuatunya sampai rinci, maka langkah-langkah B.J. Habibie untuk mengambil kebijakan sebagai presiden selalu didahului dengan suatu proses *inner dialog*.

B.J. Habibie melontarkan pertanyaan kepada dirinya sendiri mengenai hal-hal mendasar yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian dengan menggunakan referensi informasi yang dimiliki serta logika nilai yang dipunyainya, B.J. Habibie menjawab sendiri berbagai persoalan tersebut dalam menentukan langkah, kebijakan atau keputusan yang akan diambil.

Sebagai ilustrasi misalnya, bagaimana *inner dialog* tersebut terjadi secara intensif pada saat-saat B.J. Habibie akan menerima amanah kepresidenan. Bagaimana B.J. Habibie memersepsikan dan menganalisis apa yang ia sebut

sebagai “budaya feodal” yang “otoriter” dalam kepemimpinan nasional dua presiden pendahulunya. Yang menarik adalah B.J. Habibie kemudian mencoba “menjelaskan” mengapa hal itu diperlukan pada masa lalu, namun hal itu pula yang harus diubah dan dikoreksi pada masa kepemimpinannya.

Bahkan laiknya sebuah “kajian”, *inner dialog* tersebut berakhir pada “kesimpulan-kesimpulan” mendasar, sebagai dasar pijakan dari keputusan, kebijakan, atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Ini terlihat misalnya pada sebelas “kesimpulan” yang dibuatnya pada tanggal 21 Mei dini hari, setelah B.J. Habibie mencoba mempertanyakan dan menjawab sejumlah persoalan dan krisis yang dihadapi bangsa pada saat awal reformasi tersebut.

Hal yang sama juga terlihat pada saat-saat menjelang B.J. Habibie harus mengambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden ke-4 RI atau tidak. Setelah melakukan *inner dialog*, sampailah B.J. Habibie pada enam kesimpulan kalau ia mencalonkan diri dan enam kesimpulan juga kalau ia tidak mencalonkan diri.

Ada dua penjelasan, mengapa proses *inner dialog* B.J. Habibie lakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden.

Pertama, rupanya kebiasaan ini telah terbentuk sejak masa muda B.J. Habibie, terutama pada saat menempuh pendidikan di Jerman. Sebagai mahasiswa asing yang biaya kuliah dan hidupnya sepenuhnya ditanggung oleh ibundanya, B.J. Habibie tidak menerima beasiswa pemerintah sebagaimana umumnya teman-teman kuliahnya, sehingga sering menghadapi persoalan dan kesulitan manakala kiriman dari ibundanya terlambat datang. Keadaan dan kesulitan jauh di rantau tersebut, menyebabkan B.J. Habibie muda sering melakukan perenungan, yang kemudian

menjadi kebiasaan dalam bentuk *dialog*.

Kedua, dengan melakukan *inner dialog* tersebut sebenarnya B.J. Habibie melaksanakan dialog batin dengan "guru" utamanya, yaitu kemampuan berfikirnya, "otaknya" sendiri. Seperti disebutkan sendiri oleh B.J. Habibie, memang dia mempunyai beberapa orang guru (orang tuanya, Soekarno, Soeharto, Soemitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro), namun guru yang paling utama adalah kemampuan otaknya sendiri.

Pendekatan dalam Kepemimpinan B.J. Habibie

Ada hal lain yang bisa dikatakan "unik" terkait dengan pendekatan yang dilakukan B.J. Habibie dalam melaksanakan kepemimpinannya menghadapi masalah-masalah krisis. Disebut unik karena sifatnya khas dan berbeda dengan manajemen kepemimpinan siapa pun. Setidaknya ada lima pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Dialog. Salah satu pendekatan yang dilakukan B.J. Habibie dalam melaksanakan tugasnya sebagai Presiden adalah melakukan dialog, baik dalam rangka pengambilan keputusan maupun dalam rangka penyelelesaian masalah.

Kebiasaan "berdialog" ini amat nyata terlihat pada rapat-rapat kabinet yang diadakan tiap minggu, terbatas maupun paripurna. Sehingga tidak heran, suatu sidang kabinet kadang-kadang dapat berlangsung sampai enam jam atau lebih. Kebiasaan yang terjadi dalam sidang adalah setelah laporan disampaikan oleh menteri terkait, maka sebelum B.J. Habibie mengambil keputusan selalu didahului dengan diskusi antar para anggota kabinet dan Presiden.

Seperti pengakuan B.J. Habibie mengenai sidang-sidang Kabinet Reformasi Pembangunan:

> Suasananya benar-benar menggambarkan suatu kebebasan mimbar. Hal ini merupakan gambaran proses demokratisasi yang luar biasa. Pada umumnya, menteri membawa pesan dari masyarakat. Mereka menyerap aspirasi dan disampaikan di dalam Sidang Kabinet. Keputusan yang berhasil diambil Sidang Kabinet menunjukkan kualitas intelektual yang tidak hanya berpikir Ad Hoc tetapi sekaligus berpikir sistemik.

Mengelola Kabinet Reformasi Pembangunan, menurut pengakuan B.J. Habibie memang pekerjaan yang melelahkan. Tetapi B.J. Habibie mengakui bahwa ia sangat puas, karena ada hasilnya. Para menteri solid sekali. Menteri-menteri berpikir konseptual dan berpikir sesuai bidangnya masing-masing. Tidak ada kepentingan partai. Yang ingin dipecahkan adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dalam tekanan oleh demo-demo tiap hari dan konflik horisontal.

Diskusi sebagai perwujudan pendekatan dialog ini mungkin terbawa dalam perilaku kepemimpinan B.J. Habibie sebagai seorang ilmuwan maupun sebagai pakar teknologi, yang selalu melakukan cek dan ricek serta konfirmasi, sebelum suatu kesimpulan saintifik atau keputusan teknologi diambil. Sidang kabinet yang keputusannya diperkaya dengan diskusi ini, tidak pernah terjadi pada masa-masa presiden sebelumnya.

Pendekatan dialog juga dilakukan oleh B.J. Habibie dengan pihak-pihak yang tidak sejalan atau para "penentangnya". Belum genap tiga hari menjabat Presiden, pada tanggal 23 Mei 1998, B.J. Habibie sudah menerima para tokoh nasional, Emil Salim, Rudini, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Amien Rais, dan John Sapi'ie.

Mereka menyarankan beberapa masukan kepada Presiden untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang

dialami bangsa, antara lain untuk segera melaksanakan pemilihan umum dalam waktu tiga bulan. Dapat dibayangkan bagaimana "serunya" dialog yang terjadi pada pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Walaupun saran para tokoh reformasi tentang percepatan pelaksanaan pemilu tersebut ditolak oleh B.J. Habibie, namun karena alasannya disampaikan dalam bentuk dialog, maka terlepas memuaskan atau tidak, mereka setidaknya memahami mengapa B.J. Habibie tidak menerima saran tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan oleh B.J. Habibie dengan mendatangi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di Gedung DPR/MPR Senayan. Dalam forum dialog dengan pimpinan DPR dan fraksi tersebut dibicarakan berbagai masalah mendasar yang terkait dengan kehidupan politik yang tidak menentu. Dengan kejadian ini B.J. Habibie sebenarnya membuat "tradisi" baru, yaitu "forum konsultasi" antara pimpinan eksekutif dengan pimpinan legislatif dalam situasi dan format kesetaraan.

Perhatikanlah catatan B.J. Habibie,

> Sebenarnya pimpinan DPR/MPR, tiap saat siap untuk dipanggil dan berkonsultasi dengan Presiden baik di Kantor Bina Graha, Istana Merdeka maupun di kediaman Presiden di Kuningan. Tetapi saya memutuskan untuk datang berkonsultasi dengan pimpinan DPR/MPR ke Gedung DPR/MPR, tempat para wakil-wakil rakyat berkantor.

Forum dialog yang kemudian dilanjutkan berkala, dengan pelaksanaan berganti-ganti tempat di Gedung DPR/MPR dan Istana tersebut, juga sekaligus "mengoreksi" tradisi lama yang biasa dilakukan, yaitu pimpinan eksekutif "memanggil" pimpinan legislatif dan pimpinan yudikatif untuk "menghadap" ke Istana atau Bina Graha. Dengan

demikian B.J. Habibie telah memulai proses desakralisasi Presiden dan institusi kepresidenan.

Pendekatan dialog juga dilakukan B.J. Habibie dalam menghadapi masalah Timor Timur, dengan menerima dan berdialog secara langsung dengan Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dari Dili. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari rencana B.J. Habibie untuk bertemu dan bersilaturahim secara terbuka dengan tokoh-tokoh yang mewakili kepentingan masyarakat di daerah yang bermasalah, guna mencari jalan keluar yang menguntungkan Bangsa Indonesia.

Hal yang menarik dari dialog tersebut ialah bahwa dari daftar catatan yang diinginkan Belo sebanyak dua halaman tersebut hampir semuanya (90 persen) segera dapat dipenuhi, karena B.J. Habibie menganggap, semua itu merupakan standar normal yang pelaksanaannya wajar untuk diperhatikan.

Hal yang melatarbelakangi digunakannya pendekatan dialog tersebut adalah karena B.J. Habibie meyakini, bahwa hanya dengan dialog yang mendalam disertai iktikad yang baik dan tanpa rasa curiga, maka dapat diperoleh saling pengertian. Pengertian ini amat penting artinya untuk terjadinya toleransi, sementara toleransi ini merupakan elemen yang penting bagi terjadinya perdamaian dan ketenteraman.

Proses Relaksasi (relaxation process). Pendekatan lain yang sering dilakukan B.J. Habibie dalam menghadapi situasi krisis adalah pendekatan yang menurut B.J. Habibie disebut sebagai "proses relaksasi". Proses ini bagi B.J. Habibie merupakan bagian dari pengelolaan krisis (*crisis management*), yang bertujuan untuk mengelola perubahan dari situasi yang tidak menentu menjadi keadaan yang

terkendali. Ibarat sebuah balon atau pipa yang *over distended*, yang diperlukan adalah mengurangi tekanan secara berarti dan terkendali sehingga balon tidak meletus atau pipa dapat berfungsi normal kembali.

Beberapa prinsip proses relaksasi ini antara lain: *pertama*, perlu dilakukan sesegera mungkin (untuk menghindari perkembangan dampak negatif berlanjut); *kedua*, tindakan tersebut diketahui atau dirasakan secara nyata oleh rakyat; dan *ketiga*, tindakan tersebut mengarah pada tujuan atau idealitas yang menjadi tuntutan rakyat.

Sebagai ilustrasi misalnya, proses relaksasi ini dilakukan B.J. Habibie pada hari kedua masa kepresidenannya dalam bentuk:

- Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dalam waktu 24 jam setelah Presiden mengundurkan diri. (*Untuk menghindarkan spekulasi negatif tentang inkompetensi B.J. Habibie dalam menyusun kabinet*)
- Menjadikan Gubernur Bank Indonesia mandiri dan tidak dipengaruhi oleh Presiden. (*Untuk menunjukkan keseriusan B.J. Habibie dalam mengelola masalah ekonomi, dan menunjukkan bahwa B.J. Habibie tidak cenderung mengonsentrasikan kekuasaan atau power sebagai Presiden*)
- Melepaskan semua tahanan politik, memberi kebebasan pers, kebebasan berbicara dan berdemonstrasi, termasuk meninjau kembali eksistensi Undang-Undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang menurut B.J. Habibie telah mengalami distorsi dalam pelaksanaannya dan kalau perlu dicabut. (*Untuk menunjukkan keseriusannya menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia*)
- Berkunjung ke DPR/MPR untuk berkonsultasi mengenai jadwal pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dan pemilu. (*Untuk menunjukkan keseriusannya melaksanakan agenda*

reformasi yang terkait dengan kehidupan politik dan sekaligus menunjukkan penghormatannya kepada kedaulatan rakyat yang tecermin pada lembaga legislatif)

Dalam benak B.J. Habibie, semua kebijakan tersebut dapat mengakibatkan bergulirnya proses perubahan dari keadaan yang tidak menentu menjadi keadaan menentu, proses perubahan dari keadaan *unpredictable* menjadi *predictable*.

Dengan langkah *relaxation process* tersebut, B.J. Habibie mengharapkan permasalahan yang multikompleks, dengan cepat dan tepat waktu, dapat teratasi. B.J. Habibie berupaya untuk lebih cepat mengambil keputusan dibandingkan dengan kecepatan masalah yang terus berkembang ke arah yang lebih merugikan. Masalah harus segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi lebih kompleks.

Aproksimasi (Approximation). Salah satu pendekatan B.J. Habibie dalam menghadapi memecahkan masalah adalah dengan pendekatan yang ia sebut sebagai "aproksimasi". Pendekatan ini berasumsi bahwa dalam kehidupan tidak ada (dan tidak mungkin) dilakukan pemecahan masalah secara sempurna. Yang bisa diusahakan manusia adalah "mendekati" kesempurnaan. Oleh karenanya, masalah harus diselesaikan melalui pendekatan perkiraan yang berjenjang atau *approximation*.

Dimulai dengan aproksimasi awal atau "nol" (A_0) yang mengandung pemikiran dan sistem dasar penyelesaian permasalahan tersebut, dilanjutkan dengan aproksimasi kesatu (A_1), kedua (A_2), ketiga (A_3) dan seterusnya. Menurut B.J. Habibie, masalah yang dapat dipecahkan pada A_0 mungkin hanya mencapai 50 persen sempurna atau kurang, tergantung pada pendidikan, keterampilan, budaya,

pengalaman serta keunggulan seseorang. Baru aproksimasi yang kesekian kalinya akan dapat mendekati penyelesaian di atas 90 persen.

Apabila sudah mencapai tingkat ini, untuk memperoleh tambahan persentase kesempurnaan dibutuhkan pengorbanan yang lebih besar atau biaya yang tinggi. Pada saat itulah, seorang pimpinan atau manajer perlu memutuskan, apakah upaya "penyempurnaan" perlu dilanjutkan atau tidak, karena biayanya akan sangat tinggi.

Salah satu ilustrasi pemanfaatan pendekatan aproksimasi ialah pada waktu B.J. Habibie harus menyelesaikan masalah perbankan yang ambruk. B.J. Habibie menganggap penyelesaian masalah perbankan dimulai dengan P_0 (kebijakan pertama menghadapi krisis moneter dan perbankan); kemudian P_1 (pendekatan penyelesaian krisis moneter dan perbankan pada tahun 1997); selanjutnya P_2 (pendekatan penyelesaian krisis moneter perbankan pada tahun 1998); dan P_3 (pendekatan penyelesaian krisis moneter dan perbankan pada tahun 1999).

Masalah perbankan saat itu belum selesai secara tuntas, karena masih memerlukan pendekatan aproksimasi berikutnya P_4, P_5 dan seterusnya, sampai P_n.

Ilustrasi lain tentang pendekatan aproksimasi ini antara lain terlihat pada catatan B.J. Habibie terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yang masing-masing melakukan aproksimasi A_0 sampai dengan A_{23} (untuk Bung Karno) dan B_0 sampai dengan B_{30} (untuk Pak Harto).

Dengan pendekatan aproksimasi yang diasumsikan terjadi tiap tahun tersebut, kedua presiden menghasilkan capaian penting dari masing-masing presiden dalam estafet menuju tujuan nasional (lihat uraian B.J. Habibie dalam Bab III-D).

Hal terpenting dari pendekatan aproksimasi ini adalah adanya konsistensi dan kesinambungan serta koreksi dan kemajuan (*progress*) dari tiap aproksimasi yang dikembangkan terhadap aproksimasi terdahulu.

Dengan menggunakan pendekatan ini, sesungguhnya secara makro, antarkepemimpinan para Presiden Republik Indonesia juga dapat dijelaskan dengan pendekatan aproksimasi, yaitu aproksimasi terhadap tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Presiden Soekarno melakukan aproksimasi awal atau A_0 (yaitu memproklamasikan kemerdekaan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesadaran nasional sebagai suatu bangsa, dan mulai mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berbahasa Indonesia).

Kemudian, Presiden Soeharto melakukan aproksimasi B_0 (yakni melakukan pembangunan dan menata kehidupan kenegaraan dalam siklus periodik lima tahunan, yaitu: penyelenggaraan pemilu dan sidang MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden dan penyusunan rencana pembangunan yang semuanya dilaksanakan tiap lima tahun; serta melanjutkan pengembangan sumber daya manusia).

Setelah itu, B.J. Habibie sendiri melakukan C_0 (yaitu memberikan "kebebasan" dalam format reformasi bangsa menuju Indonesia yang maju dan demokratis, memberikan kebebasan pers dan kebebasan berpolitik, penyelenggaraan pemilu yang benar-benar jujur dan adil, dan sebagainya).

Sebagaimana diungkapkan oleh B.J. Habibie:

> Presiden pertama memimpin tahap 'proses kemerdekaan'; Presiden kedua memimpin tahap 'proses pembangunan' dan Presiden ketiga memimpin tahap 'proses kebebasan dan demokrasi'.

Demikianlah seterusnya presiden ke-4, ke-5, ke-6 RI dan selanjutnya, mereka masing-masing melakukan aproksimasi terhadap tujuan nasional bangsa Indonesia, berdasar atas kondisi dan permasalahan objektif yang dihadapi serta perkembangan lingkungan strategis masing-masing periode.

Ciri konsistensi dan kesinambungan semua presiden tetap sama, yaitu menjadikan UUD 1945 dan NKRI sebagai pijakan utama dalam melaksanakan tugas, walaupun bentuk aproksimasinya berlainan, mengingat perkembangan masyarakat dengan berbagai permasalahannya serta lingkungan strategis yang telah berubah.

Ciri koreksi dan *progress* juga terlihat. Antara Presiden kedua dengan pertama terlihat *progress* dalam hal pembangunan dan perbaikan dalam tata kehidupan bernegara yang lebih teratur dalam siklus lima tahunan. Antara Presiden ketiga dengan kedua juga terdapat *progress*, antara lain dalam hal dilengkapinya kemerdekaan yang diperoleh sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan "kebebasan", sementara koreksi dilakukan dari kepemimpinan yang cenderung feodal dan otoriter menjadi kepemimpinan yang demokratis.

Redundansi. Pendekatan redundansi adalah suatu upaya mengoptimalkan keberhasilan suatu langkah atau kebijakan dengan memanfaatkan "cadangan" pengaman seefisien mungkin, namun dapat menjamin stabilitas dan keamanannya (*stability and safety*). Menurut B.J. Habibie, dikenal dua jenis pendekatan redundansi, yaitu *fail-safe* dan *safe-life*.

Pendekatan redundansi *fail-safe* diumpamakan oleh B.J. Habibie dengan banyaknya jumlah kaki dari suatu meja. Meja menjadi tidak stabil dan tidak aman kalau hanya mempunyai dua kaki, dan batas minimal aman kalau

memiliki tiga kaki. Meja dengan kaki yang lebih banyak akan menjadi lebih aman dan stabil, namun tidak ekonomis.

Namun, sering kita dihadapkan pada keadaan di mana kita hanya dapat memanfaatkan "satu kaki" saja. Maka kita harus berusaha merancang kaki meja tersebut dapat stabil dan tahan terhadap kerusakan. Pendekatan redundansi ini disebut B.J. Habibie sebagai redundansi *safe-life*. B.J. Habibie mengemukakan contoh redundansi "satu kaki" ini ialah keberadaan NKRI dan jiwa UUD '45 harus dipertahankan *at all cost* sepanjang masa.

Suatu kebijakan atau langkah perlu direncanakan dan diperhitungkan oleh pemimpin untuk mengupayakan stabilitas dan keamanan yang tinggi namun dengan cadangan pengaman seekonomis mungkin.

Pendekatan redundansi ini digunakan oleh B.J. Habibie untuk menjelaskan kebijakan otonomi daerah, khususnya yang terkait dengan aliran masuk modal asing (*foreign direct investment*, FDI) yang langsung ke daerah yang kondusif untuk investasi.

Prinsip redundansi ini juga dilakukan B.J. Habibie dalam rangka memperoleh informasi yang berkualitas untuk menetapkan langkah atau kebijakan yang diputuskan. B.J. Habibie tidak pernah "puas" dengan satu sumber informasi, namun ia selalu berusaha memperoleh informasi yang sama dari sumber yang lain.

B.J. Habibie mempelajari dengan teliti semua laporan para menteri atau pembantunya yang lain, termasuk informasi intelijen, tetapi B.J. Habibie masih saja melakukan pengecekan dengan sumber informasi lain, baik dari pers, internet, serta jaringan informasi global yang sudah lama ia miliki. "Percaya sih boleh, tapi melakukan pengecekan kembali (ricek) jauh lebih baik", ungkap B.J. Habibie.

Menghindari Polemik dan Memanfaatkan Underestimate sebagai Peluang. Suatu sifat yang khas B.J. Habibie dalam menghadapi persoalan yang terkait dengan masalah masyarakat luas, khususnya masalah politik, ia selalu menghindari polemik. Dalam pandangan B.J. Habibie polemik cenderung tidak sehat dan bukannya memecahkan masalah, melainkan justru memperberat masalah atau menimbulkan masalah baru.

Dalam menghadapi berbagai kritik, cemoohan atau bahkan penghinaan dari kelompok yang tidak sejalan, B.J. Habibie berusaha untuk menahan diri dan tidak terpancing untuk berpolemik. Seperti yang terungkap pada catatannya, B.J. Habibie justru berusaha menganalisis mengapa lawan-lawan politiknya melemparkan kritik seperti itu. Kemudian yang dilakukan B.J. Habibie adalah "menjawab" kritik dan cemooh tadi dengan perbuatan nyata, sebagai jawaban atas kritik yang dilontarkan.

Dalam kaitan tersebut, B.J. Habibie selalu berusaha untuk "membuka mata dan telinga selebar-lebarnya" untuk memperoleh informasi apa pun, termasuk kritikan dan cemoohan. Kemudian ia lakukan analisis melalui proses *inner dialog*-nya, sehingga ia menjadi "kaya" akan informasi, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, kebijakan atau langkah yang akan diambil. Namun, tidak semua informasi yang ia peroleh dan hasil analisis itu akan diberitahukan kepada para pembantunya, termasuk keluarganya. B.J. Habibie hanya memberi tahu orang lain sebatas yang ia anggap orang lain perlu mengetahui saja, secara proporsional. Alasan B.J. Habibie adalah untuk tidak membebani yang bersangkutan, atau agar informasi tersebut tidak meluas dan kemudian berdampak kontra-produktif.

Hal lain yang menjadi semacam pendekatan B.J. Habibie ialah ia selalu "membiarkan" saja prasangka orang yang merendahkan dirinya. Ia justru membiarkan orang *underestimate* terhadap dirinya sebagai peluang bagi dirinya untuk berbuat

tanpa harus menghadapi risiko gangguan dari orang tersebut.

Sebagai ilustrasi misalnya anggapan B.J. Habibie hanya tahu teknologi tapi "buta politik", atau B.J. Habibie "naif" dalam masalah-masalah bangsa, dan semacamnya; ia sama sekali tidak marah atau "dimasukkan ke hati".

Menurut B.J. Habibie, hal tersebut justru menguntungkan karena orang tidak akan melakukan "ancang-ancang" untuk mengganggu langkah-langkah yang akan dilakukan. Dengan ungkapan lain, B.J. Habibie memanfaatkan *underestimate* orang sebagai peluang.

Kinerja Pemerintahan B.J. Habibie

Politik. Dalam jangka relatif singkat, 512 hari, serangkaian kebijakan pemerintahan B.J. Habibie telah menjangkau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat baik di sektor politik maupun sosial ekonomi. Bagi lawan-lawan politiknya, semua ini adalah semata-mata langkah reaktif, acak-acakan dan tanpa rencana yang jelas. Namun, jika ditelaah secara tenang dan jernih, B.J. Habibie telah merencanakan semua ini secara sistematis dan gradual.

Pokok-pokok pemikiran ini sesungguhnya secara jelas dapat ditelusuri ketika B.J. Habibie menyampaikan pidato akhir tahun pada 1 Januari 1999. Pada kesempatan itu, di tengah situasi perekonomian yang memburuk dan tekanan politik begitu tinggi, B.J. Habibie menekankan pentingnya bangsa Indonesia memasuki masa transisi untuk menjadi sebuah masyarakat yang demokratis.

B.J. Habibie berpendapat, kebebasan politik harus benar-benar dijamin pemerintah melalui serangkaian perundang-undangan. Dengan demikian, reformasi politik yang telah dilaksanakan dapat mencegah bangsa Indonesia kembali jatuh kepada kekuatan otoriter. "Insya Allah, pemilu akan dilaksanakan pada awal Juni 1999 seperti yang telah

direncanakan. Dengan munculnya berbagai partai politik sehingga memungkinkan dijalankannya sistem multipartai. Ini adalah tanggung jawab kita untuk menjawab tuntutan kuat rakyat akan adanya kebebasan politik," katanya.

Di masa pemerintahan B.J. Habibie, pembangunan konsep demokratisasi di era Kabinet Reformasi Pembangunan, lebih dahulu dirumuskan melalui inventarisasi nilai-nilai dasar demokrasi, yang dikenal sebagai *core values of democracy.* Proses demokratisasi inilah yang menjadi fokus sepanjang masa pemerintahan B.J. Habibie di mana prosesnya kerap diistilahkan dengan proses evolusi yang dipercepat atau *accelerated evolution.* Mempercepat penerapan nilai-nilai demokrasi sekaligus otomatis berpijak pada hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, produk hukum yang diciptakan adalah produk hukum yang dapat mem-*back up* dari *core values* dari demokrasi itu. Memang, ide-ide dasar demokrasi yang dicoba dibangun ada yang belum selesai pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Ada agenda demokrasi yang berhasil diselesaikan. Ada sejumlah agenda demokrasi lainnya yang dituntaskan di masa kepresidenan penggantinya.

Salah satu contoh, agenda amandemen UUD 1945 berkali-kali telah diwacanakan di era pemerintahan B.J. Habibie. Namun, ada kendala utama berkaitan dengan masalah konstitusi yang memang terlalu singkat dan memungkinkan pelimpahan kekuasaan presiden terlalu besar. Kondisi ini menyebabkan proses *check and balances* pemerintahan tidak berfungsi.

Proses amandemen UUD 1945 sampai amandemen keempat, pada akhirnya baru selesai pada pemerintahan selanjutnya. Pada masa pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan, proses amandemen belum sampai ke situ. Amandemen konstitusi tersebut kemudian juga diikuti

dengan pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Ada undang-undang yang berhasil diselesaikan pada era B.J. Habibie. Ada undang-undang yang diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya seperti masalah pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung.

Di bidang politik, pemerintahan B.J. Habibie telah menghasilkan serangkaian kebijakan secara sistematis yang dapat menjadikan fondasi kuat bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang lebih demokratis kelak. Sejumlah kebijakan politik fundamental tersebut antara lain:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun l999 tentang Partai Politik. Berdasarkan undang-undang inilah berdiri 181 partai politik baru. Dari jumlah itu, sebanyak 48 parpol di antaranya diperkenankan mengikuti pemilihan umum. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan di era sebelumnya, yang hanya tiga organisasi politik;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun l999 tentang pemilihan umum sebagai landasan untuk menciptakan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil serta transparan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun l999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR dan DPRD. Melalui undang-undang tersebut usaha pemberdayaan DPR/MPR dan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan haknya dan mengembangkan kemitraan dan kesetaraan dengan lembaga eksekutif dan legislatif.

Pemilu 1999 merupakan pemilihan umum demokratis pertama setelah Pemilu 1955. Untuk melaksanakan Pemilu 1999, lebih dahulu dipersiapkan sejumlah UU sebagai landasan baru proses pemilu. UU tersebut antara lain memunculkan ratusan partai-partai politik sebagai wujud demokrasi.

Setelah diseleksi dengan persyaratan ketat, jumlah parpol yang awalnya ratusan tinggal menjadi 48 buah. Banyak kalangan baik dari dalam dan luar negeri menilai bahwa Pemilu 1999 merupakan pemilu yang paling demokratis pertama setelah tahun 1955. KPU sebagai penyelenggara pemilu diisi wakil-wakil semua parpol dan diketuai Rudini. Bahkan, ketika KPU *dead lock* karena belum berhasil mengumumkan hasil pemilu, B.J. Habibie mengambil alih dan mengumumkan hasil pemilu. B.J. Habibie menandatangani suara pemenang pemilu sebagai kepala negara.

Nilai-nilai dasar demokrasi yang telah dibangun di era Kabinet Reformasi Pembangunan telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Ide dasar pertama adalah gagasan bagaimana dapat menciptakan sebuah sistem kepemerintahan yang baik atau *good governance*, salah satunya adalah bagaimana dapat membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Untuk itulah dibentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 31/ 1999, yang diselesaikan melalui bantuan Menteri Kehakiman. UU ini merombak total UU No. 3/1971, melihat munculnya perkembangan-perkembangan yang terjadi.

Gagasan pembuatan UU untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari pesan Tap MPR tahun 1998 tentang pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Tap MPR itu dijabarkan dalam UU No. 28/1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Itu adalah semacam *code of conduct.* Dan, selanjutnya disusul UU No. 31/1999 tentang pembentukan dan pelaporan harta kekayaan pejabat negara, sekaligus sebagai dasar

pembentukan Komisi Pelaporan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

Setelah memikirkan bagaimana dapat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan lalu berpikir dan membahas persoalan-persoalan yang menyangkut masalah sosial politik yang lain, yaitu UU Politik sebagai dasar penyelenggaraan pemilu.

Berkali-kali di depan sidang kabinet, B.J. Habibie menekankan perlunya relaksasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Rangkaian *relaxation process* itu antara lain berupa kebijakan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dalam waktu 24 jam setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, kebijakan menjadikan Gubernur Bank Indonesia mandiri dan tidak dipengaruhi oleh Presiden, kebijakan tetap memperbolehkan mata uang rupiah bebas gerak sesuai ekonomi pasar, kebijakan melepaskan semua tahanan politik yang tidak melanggar UUD dan Ketetapan MPR, kebijakan membuka keran kebebasan pers, kebebasan berbicara dan berdemonstrasi, dan langkah politik berkunjung ke DPR/MPR untuk mengonsultasikan mengenai jadwal pelaksanaan Sidang Istimewa MPR dan pemilu.

Semua kebijakan di atas, akhirnya terbukti dapat menggulirkan proses perubahan dari keadaan yang tidak menentu menjadi menentu. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap proses perubahan keadaan dari *unpredictable* atau tidak menentu menjadi *predictable* atau menentu. Dengan bergulirnya *relaxation process,* masalah-masalah multidimensional dan multikompleks, dapat dengan cepat dan tepat waktu teratasi.

Berkaitan dengan *relaxation process* itulah, B.J. Habibie membuka keran kebebasan lebih lebar. Tidak heran, saat itu

demonstrasi bebas sekali dan terjadi di mana-mana. Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum juga dibuka bebas oleh B.J. Habibie dengan tetap mengacu pada pengamanan seperti yang terjadi di negara-negara lain. Bahkan, di negara liberal pun ada batasannya, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, yang tetap berlaku sampai sekarang.

Lahirnya Undang-Undang tentang Kebebasan Pers juga menjadi fenomena yang sangat luar biasa di era pemerintahan B.J. Habibie. Banyak kritik ditujukan ke pemerintahan masa Orde Baru yang dinilai mengekang pers dengan aturan-aturan yang sangat ketat sehingga kebebasan pers dirasakan tidak ada sama sekali. Waktu itu, pers dikendalikan oleh beberapa aturan. Pertama, *code of publication* yang mengatur isi media. Kedua, *code of enterprise* yang mengatur masalah penerbitan. Terakhir, *code of ethics* yang mengatur tata cara kerja di bidang media.

Dari ketiga aturan tersebut, yang dirasakan sangat mengekang khususnya *code of publication* dan *code of enterprise*, antara lain, mengatur suatu penerbitan di Indonesia membutuhkan surat izin yang dikenal dengan SIUPP. Aturan yang dirasakan mengekang bagi kebebasan pers tersebut, semuanya telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers yang baru.

Di era Kabinet Reformasi, kebebasan pers sangat luar biasa. Media cetak tumbuh sampai ribuan. Tetapi secara alamiah, mereka runtuh satu per satu sehingga terjadi kristalisasi seperti sekarang ini. Tidak ada lagi sensor preventif sebelum penerbitan atau sensor preventif di luar yang telah diatur oleh hukum. SIUPP tidak ada lagi.

Freedom of the press juga merupakan salah satu *core*

demokrasi yang luar biasa tumbuh pesat di era B.J. Habibie. Selain itu, juga dihasilkan UU tentang kebebasan membentuk organisasi masyarakat dan berkumpul yang tidak lain untuk menghormati *civil society.* Tidak ada batasan-batasan lagi untuk membentuk suatu organisasi. Beda dengan zaman Orde Baru. Rangkaian UU di atas tidak lain dimaksudkan untuk membangun sebuah *good governance.*

Hukum dan HAM. Agenda kedua untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi adalah membangun sejumlah UU yang dapat menjamin kebebasan sosial, budaya, dan politik seluruh rakyat Indonesia. Atau dengan kata lain, ini berkaitan dengan usaha B.J. Habibie mengangkat masalah HAM. Dasarnya juga berupa Tap MPR sehingga muncullah UU tentang HAM yang juga melatarbelakangi peningkatan bobot hukum Komnas HAM, yang dulu didasari Keppres ditingkatkan menjadi UU.

Di era pemerintahan B.J. Habibie juga diratifikasi perjanjian-perjanjian dan konvensi internasional tentang penyiksaan, tentang masalah hak-hak politik wanita dan sebagainya. Ratifikasi masalah internasional yang lain juga disusul oleh pemerintah setelah B.J. Habibie. Bagi B.J. Habibie semua itu menjadi salah satu *core* nilai-nilai demokrasi suatu masyarakat.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga berhasil dilahirkan menyusul disahkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini juga merupakan salah satu *core* demokrasi. Kekuasaan kehakiman di era Orde Baru tidak merdeka karena Menteri Kehakiman turut campur administrasi peradilan. Peradilan di-*back up* dua hal. Satu adalah *code administration* dan kedua *judicial power.* Sebuah sistem yang demokratis maka kedua hal tersebut dua-duanya ada di tangan Mahkamah Agung.

Di era Orde Baru, Menteri Kehakiman menguasai *code of administration.* Sedangkan kewenangan *judicial power* ada di Mahkamah Agung. Kepalanya dua, sehingga Menteri Kehakiman bisa turut campur tangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, yaitu melalui kewenangan birokrasi, finansial dan sebagainya. Itu tidak sehat dan dipatahkan UU No. 35/1999 yang lahir di era B.J. Habibie. UU No. 35/1999 tersebut secara gradual diselesaikan oleh pemerintah pasca B.J. Habibie. Bahwa, administrasi peradilan dan *judicial power* digabungkan ke dalam Mahkamah Agung.

B.J. Habibie, secara konsisten juga mendorong tumbuhnya ekonomi pasar *(market economy)* yang sehat. Itu antara lain terjadi dengan diubahnya UU mengenai Bank Indonesia yang menjadi independen dan tidak menjadi anggota kabinet. Ini langkah luar biasa sehingga Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat berperan seperti Federal Reserve di Amerika Serikat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tanpa dipengaruhi oleh Pemerintah. Perubahan ini sangat dihormati di dunia internasional.

Perundang-undangan yang lahir di era Kabinet Reformasi Pembangun sampai 68 buah UU. Hal ini, merupakan satu proses demokratisasi yang direncanakan secara sistematis oleh B.J. Habibie. Klasifikasi UU tersebut menjadi tiga hal penting. Pertama, rangkaian UU yang dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah *good governance.* Kedua, rangkaian UU untuk pembangunan sosial, politik, budaya, dan HAM. Terakhir, rangkaian UU sebagai persiapan Indonesia untuk masuk dalam *market economy.*

Sepanjang pemerintahan B.J. Habibie, Mei 1998—15 September l999, bersama DPR, telah berhasil menetapkan: 68 Undang-Undang baru, 3 Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang, 109 Peraturan Pemerintah, 249 Keputusan Presiden, 31 Instruksi Presiden, dan 17 Rancangan UU yang diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Nilai-nilai hak asasi manusia atau populer disingkat HAM adalah nilai-nilai universal. Bangsa Indonesia telah memilikinya, tecermin melalui nilai-nilai adat istiadat, budaya dan agama yang dianut bangsa Indonesia. Dalam tataran berbangsa dan bernegara, nilai-nilai HAM merupakan unsur penting sesuai diatur dalam sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Bahkan, perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan selama ratusan tahun merupakan bukti perjuangan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini jelas merupakan nilai HAM paling mendasar bagi sebuah bangsa.

Dalam konteks penegakan nilai-nilai HAM tersebut, sekaligus untuk mengimplementasikan kebijakan untuk membuat rileks kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah menerima tongkat kepemimpinan dari Pak Harto, B.J. Habibie memutuskan untuk menyetujui pembebasan para tahanan dan narapidana politik.

B.J. Habibie tidak sepakat dengan kebijakan penahanan sejumlah tokoh politik yang disebabkan semata-mata karena adanya perbedaan sikap politik mereka terhadap penguasa. B.J. Habibie tidak dapat memahami adanya alasan yang digunakan hanya berdasarkan penilaian penguasa masa lalu terhadap sejumlah tokoh yang dipandang kritis terhadap Presiden Soeharto. Maka Sri Bintang Pamungkas bebas. Begitu juga Mochtar Pakpahan dan lain-lain.

Karena itu, sekitar bulan Juni 1998, pemerintah mencanangkan Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia. Rencana ini berlangsung selama lima tahun dari 1998 sampai 2003. Kendati B.J. Habibie tidak bersedia dicalonkan kembali

menjadi Presiden pada 1999, adanya rencana aksi lima tahun tersebut paling tidak, B.J. Habibie telah memberikan sumbangan untuk memantapkan penghargaan atas nilai-nilai HAM di Indonesia. Ini diharapkan dapat memberikan landasan kuat ke arah pemantapan budaya penghormatan nilai-nilai HAM, sehingga memperkokoh sendi-sendi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

B.J. Habibie, berpendapat ada beberapa prinsip yang harus dipegang untuk meningkatkan dan mewujudkan perlindungan HAM di Indonesia. Prinsip pertama, hak-hak sipil rakyat baik hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya tidak dapat dipisah-pisahkan. Hak-hak tersebut merupakan satu kesatuan.

B.J. Habibie tidak bisa hanya memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat tetapi di sisi lain membungkam hak-hak politik dan kebebasan mereka. Tidak bisa rakyat cukup sandang dan pangan tetapi mereka tidak bebas ke mana-mana dan tidak bebas menyuarakan kepentingan dan aspirasi politik mereka.

Prinsip kedua, kendati manusia memiliki nilai-nilai HAM yang melekat secara perseorangan, tetapi manusia tidak dapat menghindar dari kodrat sebagai makhluk sosial. Karena itu, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, maka harus dijaga keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Prinsip lainnya yang harus dipegang adalah keseimbangan antara nilai-nilai HAM universal dan pengakuan atas kondisi nasional. Itu artinya masyarakat internasional harus juga mengakui dan menyepakati bahwa pelaksanaan nilai-nilai HAM merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah atau negara bersangkutan. Ini disebabkan pemerintah harus

memperhitungkan keanekaragaman tata nilai, agama, sejarah, kebudayaan, sistem politik dan tingkat pertumbuhan sosial dan ekonomi negara tertentu.

HAM memang telah menjadi isu global. Bagi bangsa Indonesia, tidak ada masalah dengan HAM karena bangsa ini sudah lama memahami arti penting nilai-nilai tersebut yang harus diimbangi oleh kesadaran kewajiban asasi manusia (KAM). Karena itu B.J. Habibie menyambut baik upaya dan kerja sama internasional untuk memajukan nilai-nilai HAM yang diimbangi nilai-nilai KAM. Hanya saja, kerja sama tersebut harus tetap mengacu pada prinsip dan tujuan Piagam PBB serta berdasarkan sikap saling menghormati persamaan derajat dalam melaksanakan hubungan baik antar bangsa, tetap memerhatikan hukum internasional yang berlaku, begitu pula ketentuan hukum nasional.

B.J. Habibie sadar internalisasi nilai-nilai HAM di dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Ini memerlukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi secara rapi di seluruh sektor kehidupan bermasyarakat. B.J. Habibie melihat perlu adanya pendidikan tentang HAM dan KAM, baik secara formal seperti melalui pendidikan jalur sekolah —sejak sekolah dasar sampai universitas— maupun melalui pendidikan jalur luar sekolah, pendidikan jalur keluarga dan masyarakat, serta media massa.

Mengingat luasnya cakupan nilai-nilai HAM dan KAM, maka dalam memajukan dan melindungi nilai-nilai HAM dan KAM perlu ditetapkan sejumlah skala prioritas untuk beberapa jenis nilai HAM dan KAM yang sifatnya mutlak dan tidak bisa dikurangi, karena mudah digolongkan sebagai pelanggaran berat HAM dan KAM yang dapat mencoreng citra bangsa. Prioritas juga diberikan untuk perlindungan HAM dan KAM kaum rentan yaitu kelompok wanita dan anak-anak.

Satu hal yang perlu dicermati adalah perlunya mengembangkan dan meningkatkan budaya HAM dan KAM di Indonesia. Ini penting, karena B.J. Habibie melihat upaya penegakan HAM dan KAM oleh aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan tidak diterima baik oleh masyarakat.

Pengalaman membuktikan bahwa upaya penegakan HAM dan KAM tidaklah mudah, khususnya jika penegakan itu ditujukan ke anggota masyarakat sendiri atau ada kaitannya dengan kelompok tertentu. Begitu juga bagi penegak hukum. Mereka harus dibekali nilai-nilai HAM dan KAM selama pendidikan termasuk bagaimana melindungi kelompok rentan serta memberikan pelatihan pengendalian huru-hara, demonstrasi dan sebagainya.

Masalah HAM dan KAM berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hak sipil dan politik rakyat serta bagaimana memenuhi kebutuhan hak sosial, ekonomi, dan budaya rakyat agar hak-hak mereka dapat berkembang. Dari nilai-nilai HAM dan KAM tersebut, yang sangat menonjol di era pemerintahan B.J. Habibie adalah perbaikan hak sipil dan politik. Rakyat bebas dari rasa takut, mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, orang bebas dari penyiksaan dan sebagainya.

Sedangkan hak sosial, ekonomi, dan budaya adalah suatu *second line*. Misalnya berkaitan dengan bagaimana memperbaiki nasib buruh, atau bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal seperti itu pun diperhatikan.

Selama era Orde Baru, pelanggaran hak-hak sipil dan politik sangat menonjol. Itu berkaitan dengan bagaimana rakyat menghadapi kekuasaan yang kerap kali bertentangan dengan hakekat sebagai manusia, misalnya akibat adanya

penyiksaan, pengekangan, tidak adanya kesetaraan prinsip di depan hukum dan lain-lain.

B.J. Habibie sadar, pengekangan terhadap hak sipil dan politik inilah yang menonjol selama Orde Baru. Sementara itu, kondisi ekonomi relatif bagus, tetapi kondisi ini harus ditebus dengan adanya pengorbanan hak sipil dan politik demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan sesuai dengan prinsip Trilogi Pembangunan. Namun, pemerintah mengabaikan unsur trilogi lainnya, yaitu pemerataan.

Demi stabilitas makro, dalam kondisi perekonomian bagus, maka pengekangan hak sipil dan politik bukan masalah besar. Namun, setelah Indonesia dihantam krisis ekonomi begitu hebat, maka akan terjadi sinergi akibat kerusakan ekonomi dan politik yang menyebabkan pemerintah jatuh.

Strategi yang B.J. Habibie jalankan adalah bagaimana membangun hak sipil dan politik. Misalnya, dengan melakukan ratifikasi internasional anti penyiksaan, membangun Komnas HAM yang lebih kuat lagi dan sebagainya. Itu sangat signifikan.

B.J. Habibie berpendapat, suatu negara yang memiliki banyak tahanan politik dan narapidana politik, itu menunjukkan negara tersebut negara represif dan otoriter. Tapol dan napol banyak terjadi pada jaman Orde Baru. Mungkin eranya memang membutuhkan langkah-langkah seperti itu untuk menjamin stabilitas yang penting demi kelancaran pembangunan.

Tetapi, setelah terjadi gerakan reformasi yang merupakan upaya untuk mereaktualisasikan nilai-nilai dasar proses demokratisasi, kita harus mengevaluasi bahwa adanya tapol dan napol adalah kebijakan yang tidak benar. Apalagi, pada zaman Orde Baru, ada undang-undang yang sangat menonjol yaitu UU tentang Subversi yang sebenarnya

dibuat tahun 1963, zaman Bung Karno. UU tersebut sangat represif karena eranya memang membutuhkan hal seperti itu.

Kemudian, Orde Baru mengambil alih pemerintahan. UU Subversi yang sebelumnya banyak ditentang, ternyata justru dilanggengkan oleh pemerintah Orde Baru. UU ini dijalankan dan dipakai sebagai alat untuk menjaga stabilitas.

Pada zaman Presiden Soekarno, dulu bernama Pempres No 11 tahun 1963. Pada zaman Orde Baru, menjadi UU No. II Pempres Tahun 1963. Itu berarti ditingkatkan statusnya menjadi UU dan posisinya lebih kuat sehingga ada lembaga Kopkamtib dan lain-lain.

Kemudian, setelah reformasi, B.J. Habibie melihat UU tersebut tidak betul jika dipertahankan, UU itu sangat represif, perumusannya samar-samar, karet, gampang menangkap orang tanpa proses dan dapat ditahan selama satu tahun. UU ini seperti *internal security act* di Malaysia dan Singapura. Maka B.J. Habibie memutuskan UU yang sudah membawa korban banyak ini harus diakhiri dan dicabut. Hanya napol yang terkait dengan komunisme sesuai Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 masih dimasukkan di dalam KUHP. Hal ini, merupakan langkah yang sangat signifikan.

Ini semua artinya orang-orang yang menjadi korban UU Subversi harus dibebaskan semuanya. Itu prinsip hukum. Kalau terjadi perubahan UU, maka mereka harus dibebaskan. Berdasarkan hasil Sidang Kabinet, diputuskan membebaskan semua tapol dan napol yang terkait dengan UU Subversi tahun 1963. Termasuk, mereka yang terlibat G-30-S PKI, walaupun ada referensi untuk tidak dibebaskan. Keputusan ini lebih didasarkan atas ukuran kemanusiaan, karena usia mereka sudah tua-tua. Mereka akhirnya juga dibebaskan kecuali yang terlibat kekerasan. Tahanan GAM

juga banyak yang dibebaskan, jumlahnya kira-kira sekitar 200 orang.

Pembebasan tapol ternyata mendapat apresiasi luar biasa di dunia internasional. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dibebaskan dengan amnesti. Kebijakan B.J. Habibie ini, sekaligus membangun fondasi politik yang demokratis, misalnya orang dapat melakukan protes kepada pemerintah tetapi mereka harus tetap mengikuti aturan.

Kebijakan pembebasan tapol/napol juga termasuk penegakan HAM dalam penegakan hak sipil dan politik. Ratifikasi konvensi internasional juga banyak dilakukan dan terus berlanjut sampai sekarang.

Melihat langkah-langkah di atas, maka B.J. Habibie (dalam buku ini) menilai *pattern* atau *platform* yang telah dikembangkan di era Kabinet Reformasi Pembangunan, merupakan dasar-dasar proses demokratisasi dan dasar-dasar pembangunan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie berharap semua ini diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya.

Otonomi Daerah. B.J. Habibie menyadari pemerintahan Orde Baru memang memiliki jargon Trilogi Pembangunan. Artinya, proses pembangunan selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diharapkan dapat dinikmati merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat dalam wilayah tertentu, tetapi sekaligus menyebar merata ke seluruh pelosok Indonesia. Namun, B.J. Habibie juga tidak bisa menutup mata bahwa jargon tersebut tidak terjadi di lapangan. Kesenjangan pendapatan dan kualitas kehidupan antarlapisan masyarakat dan antarwilayah justru terjadi. Kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kesenjangan

antargolongan masyarakat. Kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa. Jakarta masih menjadi pusat segala-galanya. Sebagai ibukota negara dan sebagai pusat pemerintahan. Pembangunan daerah berlangsung di dalam pengaruh pemerintahan pusat.

Setelah krisis moneter yang mengakibatkan krisis kepemimpinan dan ekonomi yang serius, ada kesadaran untuk merevisi kebijakan pembangunan yang sangat sentralistis Jakarta tersebut. Ketika sumber daya yang dimiliki pemerintah pusat kian berkurang dan tuntutan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan semakin meningkat. Mau tidak mau, pemerintah pusat harus bersedia melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan. Apalagi terungkap bahwa sejumlah daerah yang menjadi pemasok sumber daya pembangunan di Indonesia ternyata masyarakatnya tetap dalam kondisi kekurangan. Gugatan ke Pemerintah Pusat pun semakin kuat. Mereka mempertanyakan pembagian porsi kue pembangunan yang dinilai tidak adil.

Untuk memperbaiki ketimpangan pemerataan hasil-hasil pembangunan, B.J. Habibie selalu mendukung adanya perbaikan sejumlah peraturan yang dapat lebih memberdayakan pembangunan di daerah, sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah terhadap proses perubahan yang diusulkan oleh para pemimpinnya.

Keinginan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah secara sistematis diwujudkan dalam bentuk serangkaian undang-undang, seperti Undang-Undang No.22 Tahun l999, tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.25 Tahun l999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam melaksanakan agenda reformasi, B.J. Habibie memiliki komitmen untuk memberikan otonomi daerah yang

sama bagi tiap daerah. Hal itu dengan keyakinan Negara Republik Indonesia adalah negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bahwa kebebasan harus diterima dan diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia tidak identik dengan hanya kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan sebagainya.

Gagasan Pilkada langsung, awalnya adalah ide dasar di era B.J. Habibie yang ia telah wacanakan dan ucapkan pada berbagai kesempatan. Pemilihan langsung itu tidak hanya ditujukan untuk pemilihan Presiden dan anggota legislatif baik di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga untuk pemilihan kepala daerah, wali kota, maupun gubernur. Ide dasar ini sejalan dengan proses desentralisasi yang juga diangkat lebih vokal di era pemerintahan B.J. Habibie.

B.J. Habibie menganggap desentralisasi semakin penting diperhatikan karena dapat mendekatkan rakyat kepada pengambil keputusan, mencegah gerakan separatisme, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah akibat peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Wacana itu terus muncul dan diselesaikan oleh pemerintah setelah B.J. Habibie. Tetapi ide dasarnya sesungguhnya sudah dimulai di era Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung memang belum terwujud pada masa pemerintahan B.J. Habibie, tetapi B.J. Habibie sudah bepikir dan memprediksikan ke depan bahwa hal tersebut harus dilakukan, tetapi harus didahului dengan sebuah undang-undang yang baru, dan ini akan bisa dilaksanakan lima tahun kemudian, yakni tahun 2004. Sebelumnya, menurut B.J. Habibie, kita perlu membuka peluang untuk diadakan diskusi antara partai-partai baru, tokoh-tokoh baru dan aliran baru yang akan muncul.

Kalau dalam implementasinya pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan wali kota dapat dilaksanakan di Indonesia secepat ini, hal itu di luar perkiraan B.J. Habibie. Pemilihan langsung, merupakan salah satu konsep dasar dari demokrasi.

Reformasi ABRI. Untuk mengakomodasi agenda reformasi di tubuh ABRI, Presiden B.J. Habibie mendorong jajaran militer agar lebih peka menanggapi aspirasi reformasi rakyat, termasuk memperkecil peran sosial politik militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oktober 1998, resmi diumumkan pemisahan institusi Polri dari ABRI. ABRI pun selanjutnya berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia.

Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie memisahkan Polri dari ABRI bertujuan agar Polri dapat lebih profesional dalam melayani masyarakat. Kebijakan ini memiliki arti penting dalam hal peninjauan kembali peranan militer dalam percaturan sosial politik di Indonesia. ABRI netral terhadap proses politik terutama pada Pemilu 1999, ABRI tidak lagi hanya mendukung Partai Golkar. Selain itu, juga sudah dilakukan pengurangan kursi ABRI di DPR. Penghapusan doktrin kekaryaan bagi ABRI yang masih berdinas aktif. Dengan demikian, di masa pemerintahan B.J. Habibie telah mengukuhkan pembaruan dalam tubuh Angkatan Bersenjata searah proses demokratisasi.

Ekonomi. Perubahan banyak terjadi di Indonesia sejak 1997. Rakyat sudah memiliki lebih banyak kebebasan, transparansi lebih besar, keberanian lebih besar, tetapi sekaligus juga semakin kebingungan, lebih pesimistis tentang masa depan mereka dan bahkan juga lebih abai. Masyarakat juga dilingkupi atmosfir ketidakpastian yang semakin pekat

akibat perubahan-perubahan cepat seperti itu. Ketidakpastian itu pulalah yang mengubah kredibilitas politik maupun ekonomi.

Dampak perubahan-perubahan yang serba tak teramalkan di atas menyebabkan penanaman modal langsung dari luar negeri terjadi perubahan arah, dari arus masuk, lalu stagnasi, dan disusul arus modal keluar. Akibatnya, GNP per kapita sebesar 1135 dolar AS yang tercapai pada 1996, hanya jangka satu tahun, melorot menjadi 458 dolar AS pada 1998.

Kondisi ini jelas suatu "kemunduran hasil kerja keras sejauh dua belas tahun". Akibat selanjutnya adalah meroketnya hiperinflasi sampai mencapai 78 persen serta terjun bebasnya nilai mata uang Indonesia hanya tinggal menjadi 20 persen dari nilai sebelum krisis.

Kondisi di atas selanjutnya mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran di tengah masyarakat, yang tingkat pertumbuhan populasinya tinggi. Sehingga, kondisi ini memperbesar jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semua itu juga menimbulkan ketegangan serta kecemburuan sosial.

Pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan mampu —dalam waktu hanya 17 bulan— menghentikan terjun bebasnya nilai mata uang dan meningkatkannya ke posisi 60 persen dari nilainya sebelum krisis. Pemerintahan juga berhasil melambatkan laju hiperinflasi menjadi 2 persen saja. GNP per kapita menjadi 636 dolar AS untuk tahun 1999. Ini suatu kenaikan sebesar 38 persen dibanding GNP per kapita setahun sebelumnya. Kemunduran dua belas tahun diperpendek menjadi tujuh tahun. Arus keluar modal asing berhenti. Keadaan mulai berubah dari stagnasi menjadi arus masuk kembali modal asing.

Apa yang menjadi dasar B.J. Habibie dalam mengelola

pemulihan makroekonomi, sesungguhnya dapat ditengok ketika ia menyampaikan pidato akhir tahun 1999. Sebelum menguraikan prospek ekonomi pada 1999, B.J. Habibie kembali menguraikan masa-masa sulit pada pertengahan 1998, ketika ia harus mengambil alih kendali pemerintahan. Pada saat itu, prospek ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk dan seolah-olah tidak memiliki arah yang jelas. Ia mengingatkan betapa waktu itu masyarakat beramai-ramai menarik uangnya dari bank-bank karena mereka takut kehilangan kekayaan mereka. Dalam situasi krisis demikian, betapa pun sehat bank tersebut, akan mengalami kesulitan jika tiap hari mengalami *rush.*

Sementara itu, arus barang dan jasa mengalami hambatan dan kemandekan distribusi. Ini tidak lepas dari adanya penjarahan, perusakan dan berbagai aksi anarkis lainnya akibat kekerasan sosial di tengah masyarakat. Distribusi bahan pokok, khususnya beras mengalami hambatan semakin berat mengingat adanya bencana kekeringan sehingga memperbesar gagal panen. Kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana. Kondisi ini semakin memperparah tekanan sosial. Harga-harga komoditas melambung tinggi sehingga memunculkan adanya ketakutan terjadinya kelaparan yang masif.

Karena itu, dalam pidato akhir tahunnya, ketika memasuki tahun 1999, B.J. Habibie menguraikan komposisi anggaran merefleksikan kondisi perekonomian nasional yang tidak menguntungkan tersebut. Ia tidak berjanji muluk-muluk. Ia hanya memprediksikan adanya pertumbuhan ekonomi nol persen dengan anggaran defisit. Kendati demikian, ia tetap berjanji untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang semakin parah pasca krisis ekonomi. "Kita kemungkinan dapat mencapai taraf kehidupan lebih baik tahun ini jika kita dapat mengembalikan stabilitas dan

melalui tahun yang berat ini dengan kerja keras," begitu pesannya.

Untuk membuktikan keseriusannya dalam menangani masalah ekonomi, B.J. Habibie menginstruksikan tiga hal mendasar agar bangsa Indonesia dapat memulai proses pemulihan ekonomi. Langkah pertama, Presiden berpesan agar anggaran pembangunan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Semua penyimpangan yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian target harus dicegah.

Langkah kedua, hendaknya dicegah adanya kebocoran dan pemborosan penggunaan anggaran. B.J. Habibie juga berpesan agar dihindari pengeluaran dana yang hanya menghasilkan sedikit keuntungan, seperti digunakan untuk macam-macam kegiatan protokoler dan seremonial. Karena itu, ia berpesan agar upacara seremoni dihilangkan atau disederhanakan. Sedangkan untuk menghindari pemborosan dalam pembelanjaan mata uang asing, B.J. Habibie berpesan agar perjalanan pegawai ke luar negeri diminimalisasi.

Langkah ketiga, penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya secara penuh. Biaya pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan. B.J. Habibie berpendapat, jika pemerintah dapat mendayagunakan anggaran yang ada secara tepat, ia yakin bangsa Indonesia dapat mencegah kondisi perekonomian bergerak ke arah yang lebih buruk. Itu berarti, bangsa Indonesia dapat memulai proses pemulihan ekonomi.

Ketika memulai masa jabatannya, Presiden B.J. Habibie disambut ketidakpercayaan berbagai kalangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bahkan sewaktu masih menjabat, Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei 1998, secara terbuka menyatakan ragu-ragu apakah Wakil

Presiden B.J. Habibie mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara.

Seseorang tokoh dunia di Singapura merasa yakin bahwa apabila B.J. Habibie menjadi Presiden, nilai rupiah terhadap dolar AS akan merosot hingga Rp20.000. Baik negara pemberi pinjaman lunak luar negeri maupun lembaga-lembaga multilateral IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia menyangka bahwa B.J. Habibie akan melanjutkan sikap pendahulunya. Akibatnya, aliran pinjaman lunak resmi kepada Indonesia telah dihentikan sejak berbulan-bulan.

Dengan cepat sekali Presiden B.J. Habibie membuktikan bahwa pemerintah Indonesia telah berubah. Dalam pidatonya, malam hari tanggal 21 Mei 1998, ia menegaskan bahwa "pemerintah akan melaksanakan semua komitmen dengan pihak luar negeri, khususnya dalam rangka reformasi ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan IMF."

Kabinet Reformasi Pembangunan yang dilantiknya hari berikutnya, ternyata bukan sekedar kelanjutan Kabinet Pembangunan VII Presiden Soeharto. Menteri-menteri ekonomi ternyata orang-orang profesional.

Pada tanggal 24 Juni 1998, pemerintah menandatangani kesepakatan baru dengan IMF sehingga IMF berbalik sikap. Pada bulan Juli, pinjaman IMF yang tadinya terhenti, kembali mengalir. Dalam pertemuan tahunannya di Paris akhir bulan Juli, Konsorsium IGGI memutuskan meningkatkan pinjamannya pada Indonesia.

Perkumpulan Paris Negara-Negara Peminjam pada Indonesia ("*Paris Club*") memutuskan untuk menangguhkan pembayaran cicilan utang Indonesia. Kepercayaan kalangan pemberi pinjaman lunak sedunia telah pulih kembali. Dan, meskipun seperti banyak pengamat dan pelaku lainnya, ia tidak menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu dalam kesepakatan antara Pemerintah dan IMF, ternyata Presiden

B.J. Habibie dengan konsisten melaksanakan pernyataannya akan menghormati kesepakatan tersebut.

Mulai bulan Juli 1998, nilai rupiah terhadap dolar AS berangsur-angsur menurun dari sekitar Rp15.000 menjadi Rp7.000 pada bulan Oktober dan kemudian stabil hingga akhir tahun 1998.

Karena inflasi sangat dipengaruhi oleh nilai mata uang, maka meningkatnya nilai rupiah sejak bulan Juli 1998 itu membantu menurunkan laju inflasi. Menurunnya laju inflasi didukung pula oleh langkah-langkah lain seperti dilanjutkannya penjaminan pemerintah pada penyimpan uang di bank, kebijakan bunga pinjaman tinggi Bank Indonesia, dan program penyehatan perbankan. Selama berbulan-bulan masyarakat melihat Bank Indonesia mempertahankan kebijakan bunga (sangat) tinggi. Sementara itu, barang-barang kebutuhan pokok cukup tersedia.

Secara berangsur-angsur sekali, masyarakat mulai tidak lagi cepat-cepat menukarkan uang dengan barang atau dengan valuta asing. Perlahan-lahan, semakin banyak uang rupiah kembali masuk ke bank. Dengan demikian, laju inflasi bulan ke bulan menurun mendekati nol persen pada bulan Oktober 1998 dan kemudian menjadi negatif, sehingga laju inflasi tahunan meskipun tetap tinggi sebesar 77,5 persen namun mulai menurun.

Sementara itu, meskipun sedikit memanas menjelang Sidang Istimewa MPR pada akhir tahun, dalam tahun 1998 dan berlanjut ke tahun 1999, kehidupan politik menjadi stabil berkat berbagai kebebasan yang oleh Presiden B.J. Habibie dikembalikan kepada rakyat, seperti kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan mendirikan media pers, kebebasan berpartai politik, kebebasan berkampanye menjelang pemilihan umum, dan terutama

langkah-langkah nyata menuju ke pemilihan umum yang benar-benar luas, umum, bebas dan rahasia.

Masyarakat melihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak berniat mengendalikan Komisi Pemilihan Umum. Seperti diduga oleh Presiden B.J. Habibie secara naluriah, rakyat ternyata dewasa dan menyambut berbagai kebebasan politik ini dengan kampanye-kampanye dalam rangka pemilihan umum yang berlangsung tanpa gejolak-gejolak yang mengganggu kestabilan sosial dan politik.

Kestabilan politik ini, mendukung upaya pemulihan ekonomi karena menambah kepercayaan luar negeri. Secara kebetulan atau tidak, bulan Mei 1999 Bank Dunia menyatakan akan melanjutkan pencairan pinjamannya. Tepat sehari sebelum pemilihan umum diselenggarakan tanggal 7 Juni 1999, IMF mengumumkan pemberian utang baru pada Indonesia. Terjadilah dampak perkalian.

Laju inflasi bulanan yang sebagaimana lazimnya meningkat pada awal tahun 1999 bertepatan dengan hari-hari raya, mulai bulan Maret hingga bulan September terus-menerus negatif. Laju inflasi tahun ke tahun pada bulan Maret 1999 menjadi 45 persen dan pada bulan Juni 1999 menurun lagi menjadi 25 persen. Akhirnya, laju inflasi tahunan yang selama tahun 1998 masih sebesar 77,5 persen, pada tahun 1999 menjadi 2,01 persen.

Sementara itu, penyusutan ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1998, mulai tahun 1999 berhenti. Meskipun dengan laju yang sangat kecil, pertumbuhan ekonomi kembali menjadi positif. Dapat dikatakan bahwa semenjak pertengahan tahun 1999, masyarakat Indonesia telah melewati titik-titik terparah krisis ekonominya.

Suku bunga Bank Indonesia juga mengalami penurunan sangat signifikan. Jika pada Agustus l998, nilai suku bunga BI mencapai sekitar 70 persen maka pada Agustus l999,

nilainya turun drastis menjadi sekitar 13 persen. Cadangan devisa naik dalam jumlah berarti, dari l9 miliar dolar AS pada Mei l998 menjadi 26,9 miliar dolar AS pada September l999.

Kemandirian Bank Indonesia dijamin setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia selanjutnya menjadi lembaga negara yang independen. Ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat menjalankan fungsi utamanya dalam menjalankan kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta menjalankan peran untuk mengatur dan lebih mengawasi bank.

Indeks Saham Gabungan juga naik, nilainya mendekati 600 poin pada Juni l999, jauh dibandingkan September l998 yang nilainya baru 250 poin. Hal lain yang patut dicatat tentang kinerja sektor ekonomi Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mendorong bergulirnya perekonomian rakyat dengan berbagai kebijakan yang dapat menumbuhkan perusahaan kecil dan menengah, koperasi dan industri rumah tangga.

Semua yang diungkapkan di atas adalah kinerja pemerintahan B.J. Habibie yang dipersembahkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Memang tidak seluruhnya kisah sukses, sebagai manusia biasa, B.J. Habibie mengakui bahwa yang sempurna hanya Tuhan. Tetapi sebuah neraca diberikan secara terbuka untuk dinilai, mana yang berhasil dan mana yang belum.

Karena itu, ia merasa berkepentingan untuk menunjukkan kepada wakil-wakil rakyat yang berhak menilai. Ia ingin wakil-wakil rakyat menilainya secara objektif dan jujur. Presiden B.J. Habibie merasa penting sekali untuk mengetahui apakah anggota-anggota DPR, para wakil rakyat yang terhormat tersebut dapat berpikir rasional atau tidak. Kenapa ia ingin menanyakan itu?

Karena B.J. Habibie tahu bahwa belum apa-apa, wakil-wakil rakyat itu sudah mengatakan akan menolak pidato pertanggungjawaban Presiden. Apa pun yang akan dipertangungjawabkan oleh Habibie, tidak akan mereka terima. Dan memang, B.J. Habibie telah meminta adanya pertanggungjawaban dari presiden. Ada yang mengatakan kepadanya bahwa di dalam UUD 1945, tidak ada aturan yang mengharuskan Presiden mempertanggungjawabkan apa yang telah ia laksanakan di depan DPR/MPR, kecuali ada *impeachment* atau mosi tidak percaya.

B.J. Habibie memang tidak di-*impeach*. Tidak ada mosi tidak percaya. Tetapi, ia menuntut supaya dilaksanakan pertanggungjawaban. Karena ia mau menilai apakah wakil-wakil rakyat yang terhormat, yang ada di dalam DPR/MPR itu, yang mewakili rakyat Indonesia, ketika berhadapan dengan Presiden, rasional dan *fair* atau tidak. Karena itu, B.J. Habibie justru bersikeras minta diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan.

Ia sadar dan tahu bahwa ia tidak akan mampu melaksanakan tugas sesuai janji-janji sebagai presiden, sesuai amanat yang diberikan oleh MPR, jikalau ia harus bekerja sama dengan *mitra* yang sangat emosional.

Bayangkan, kata B.J. Habibie, ia belum lagi mengemukakan pidato pertanggungjawaban, orang-orang itu telah berkata, "Apapun yang akan dikemukakan oleh Habibie, saya anti. Pidatonya akan saya tolak."

Itulah yang terjadi ketika itu. Dan B.J. Habibie ingin tahu, apakah wakil-wakil rakyat itu memang objektif. Apakah orang-orang yang belum apa-apa sudah menyatakan anti, jumlahnya sebagian besar dari anggota MPR. Kalau sebagian besar bersifat demikian, ia tidak mau untuk dicalonkan kembali. Untuk itu, B.J. Habibie memberikan pertanggungjawaban *apple to apple.* Ia hanya mau mengambil

sikap yang *fair,* realistis dengan angka yang nyata.

Kalau 51 persen dari wakil rakyat tidak mau menerima pertanggungjawaban ini, kendati ia telah memberikan perbandingan yang jelas, *apple to apple,* dengan angka-angka eksak, tetapi masih juga dianggap tidak wajar. Namun pertanggungjawabannya tidak diterima, maka ia tidak bersedia dicalonkan menjadi Presiden.

Bagaimana ia akan memimpin bangsa Indonesia, jikalau wakil-wakil rakyat itu mengatakan hitam yang tidak hitam. Hitam mereka katakan putih. Merah mereka katakan hijau.

Tetapi, kalau 51 persen wakil-wakil rakyat di DPR/MPR itu ternyata menerima, maka ia akan mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim, ia menerima dan akan kembali memimpin bangsa ini."

Ternyata, 55 persen anggota DPR/MPR tidak menerima pertanggungjawabannya. Maka B.J. Habibie akhirnya berkata, "Silahkan mencari pemimpin yang lain."

Tidak Bersedia Dicalonkan

Hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999 pagi, B.J. Habibie tampak cerah dan tetap penuh senyum mengumumkan tidak bersedia dicalonkan menjadi Presiden keempat, di kediamannya jalan Patra Kuningan. Tidak ada sebersit bayangan kekecewaan di wajahnya, semua berlangsung seperti biasa-biasa saja.

B.J. Habibie mengumumkan ketidakbersediaannya di depan puluhan wartawan dari berbagai media massa dalam dan luar negeri. Dalam jumpa pers yang dimulai sekitar pukul 08.30 di ruang pendopo kediamannya, B.J. Habibie memulai acara itu dengan membacakan pernyataannya. Ia mengatakan, penolakan sidang MPR terhadap pidato pertanggungjawabannya telah dilaksanakan secara

demokratis. "Dari hasil pemungutan suara tersebut, jelas wakil-wakil rakyat berkesimpulan Bacharuddin Jusuf Habibie tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan," ujarnya ringan.

"Sehubungan dengan itu, bersama ini saya menyatakan bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya —Bacharuddin Jusuf Habibie— sebagai Presiden masa bakti 1999-2004."

Pernyataan itu disampaikan tepat pukul 08.40.

Habibie juga menyatakan keyakinannya bahwa masih banyak putra-putri bangsa yang lebih mampu dari dirinya untuk melaksanakan reformasi menyeluruh. Kemudian B.J. Habibie dengan suara lantang mengatakan, "Melalui kesempatan ini, saya menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air —di manapun berada— untuk tetap menjaga ketenteraman dan ketenangan, serta menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yang dapat mengganggu sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan terselenggaranya berbagai agenda reformasi."

Berbagai reaksi tokoh dari dalam dan luar negeri muncul setelah pernyataan pengunduran diri B.J. Habibie dari pencalonan presiden. Demikian pula dari media massa.

Harian *Kompas* pada tanggal 21 Oktober 1999, dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "Presiden Habibie Mundur Secara Terhormat", menulis antara lain:

> *Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menarik diri dari pencalonan capres, setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dengan selisih tipis, 355 menolak, 322 menerima. Langkah Presiden ketiga itu bukan saja mundur dengan santun,* graciously *—dan terhormat. Langkah itu menempatkan Prof Dr Habibie sebagai negarawan yang meninggalkan warisan bersejarah. Dengan mengundurkan diri dari pencalonan, setelah*

pertanggungjawabannya ditolak, Pak Habibie membuktikan ucapannya, baginya kepresidenan bukanlah segalanya.

Tajuk Harian *Kompas* juga menulis,

"Presiden Habibie dipilih lagi atau tidak dipilih, ia telah meninggalkan legacy, warisan bersejarah. Artinya suatu karya dan kinerja, yang dampak pengaruhnya mendasar dan akan terus berlanjut.

Warisan itu, di antaranya yang disepakati hampir semua pihak adalah bahwa kepresidenannya, telah meletakkan dasar dan langkah demokrasi yakni dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara bebas, jujur, adil, dan karena itu demokratis.

Sebagai orang yang pandangannya tidaklah tajam-radikal hitam-putih, tetapi lebih memiliki visi dan rasa perasaan kompleksitas, kita sering bertanya apakah Presiden Habibie sepenuhnya sadar serta memahami implikasi dari keputusan dan kebijakannya.

Kemerdekaan pers merupakan tonggak sejarah dan warisan pemerintahan Presiden Habibie. Tetapi sekaligus, hadirnya kemerdekaan pers, merugikan kepresidenan dan pemerintahannya. Komitmennya terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi, merupakan peninggalannya yang lain. Memang baik dalam hal demokrasi, kemerdekaan pers maupun dalam hal hak-hak asasi manusia, perubahan dunia dengan dampak globalisasinya yang efektif, ikut merupakan faktor kuat. Namun, hal itu tidak meniadakan peranan hadirnya kemauan politik yang cukup tangguh dari Presiden Habibie. "

Setelah menyatakan berbagai hal yang dianggap menjadi kendala semasa B.J. Habibie, Harian *Kompas* menambahkan:

"...sosok kepribadian Presiden Habibie yang hangat, ramah, demokratis. Sikap dan perilakunya sebagai Presiden yang demokratis lagi apa adanya, dinilai ikut memberikan sumbangan dalam terjadinya proses desakralasisasi kepresidenan yang selama ini bukan saja khidmat dan jauh berjarak, tetapi juga angker."

"Langkahnya yang mundur dari pemilihan presiden setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR merupakan kontribusi konkret terhadap makna pertanggungjawaban kekuasaan dalam prinsip, budaya dan semangat demokrasi. Langkah mundur yang disertai sikap legowo, tulus, juga berkontribusi terhadap redanya ketegangan dan polarisasi dalam masyarakat. Presiden Habibie mundur, tetapi justru dengan langkah itu, ia meninggalkan jejak dan warisan sejarah yang bermakna bagi bangsa Indonesia."

Goenawan Mohamad pada Majalah Mingguan *Tempo* edisi 34/XXVIII/25-31 Oktober l999, menulis dalam rubrik "Catatan Pinggir" yang berjudul "Habibie", antara lain sebagai berikut:

"Habibie tetap di sana. Mukanya tetap meriah dan matanya bundar berpendar, senyumnya lebar. Ia duduk di samping presiden yang baru. Wajah itu wajah orang yang tak kehilangan apa-apa. Terlalu sulit untuk menduga apa yang ada di lubuk hati orang, tapi sikap ceria presiden yang dikalahkan itu —di antara kursi-kursi di Senayan itu— merupakan cerita baru tentang politik Indonesia."

"Saya ingat, ia pernah berkata (waktu saya berjumpa singkat dengan dia, pertama dan terakhir kali sebagai kepala negara) bahwa pendahulunya —ia tak menyebut nama Soeharto— tak pernah mempersiapkannya untuk jadi pemimpin Republik. Bahkan juga ketika teknokrat

itu masih jadi wakil presiden. Soeharto memang tak ingin dia, atau siapa pun, menggantikannya pada tahun menjelang 1998 itu. Tetapi insiden sejarah menyebabkan Habibie naik ke kokpit. Ia jadi kapten. Ketika ia turun, ketika ia menerima kekalahan dengan muka tetap meriah dan mata berpendar dan senyum lebar, ia telah membuktikan: ia tak kalah dari Soeharto. Sebuah proses yang sulit telah mempersiapkannya untuk jadi sebuah bagian penting politik baru di Indonesia —politik dengan sepercik 'peradaban'."

Dalam "Catatan Pinggir" itu, Goenawan Mohamad juga menulis:

"Kalah, menang akhirnya tak selamanya ditentukan oleh siapa yang kehilangan. Di sinilah Habibie, justru dalam kekalahannya, meneguhkan respublica, 'kemaslahatan publik'."

"Tak lama Habibie menjadi presiden. Hanya 512 hari. Tetapi, selama 512 hari itu politik di Indonesia mengalami transfromasi dari arche-politik ke para-politik: perubahan dari suatu era ketika hidup bermasyarakat dianggap tak punya konflik dan tak perlu kompetisi, memasuki suatu era ketika sengketa dan persaingan dilangsungkan dalam lembaga yang beraturan, bukan di barikade."

Pada bagian akhir "Catatan Pinggir" itu, Goenawan menulis:

"Soeharto, komandan tertinggi Indonesia-sebagai-markas-tentara, berhenti pada bulan Mei 1998. Habibie jadi presiden. Cukup cepat, meskipun tak cukup gampang, mengubah politik di Indonesia dari militerisasi itu. Para mahasiswa dan semua gerakan prodemokrasi telah

menetak satu simpul yang mengukuhkan ultra-politik itu: rasa takut. Khususnya rasa takut pada tentara. Habibie tak memulai pembebasan dari rasa takut itu, tapi ia memberikan sumbangannya sendiri."

"Ia jadi presiden dan para-politik pun dimulai. Pemilihan yang bebas untuk membentuk parlemen yang bebas berlangsung. Kekuasaan presiden tak lagi angker. 'Saya ingin membuat presiden sebagai seorang tetangga,' katanya. Tapi sumbangannya yang terbesar ialah ketika orang ramai merayakan kekalahannya, ia hadir di Senayan, duduk di antara orang-orang yang mengalahkannya. Mukanya tetap ceriah dan senyumnya lebar. Ah, akal sehat menang. Demokrasi menang. Dan dalam arti tertentu, Habibie pun menang —dalam 'perang yang lebih besar' di dalam dirinya sendiri. Dia eksit dengan bagus. Kita perlu bertepuk tangan."

Harian *Suara Karya*, media milik Golkar, edisi 25 Oktober l999, menulis antara lain mengenai terjadinya polarisasi antar pendukung calon presiden yang mengkhawatirkan banyak orang. Tetapi kearifan dan kebesaran jiwa Habibie, menurut *Suara Karya*:

"Telah terbukti mampu menepis pecahnya polarisasi antarpendukung presiden. Habibie rela mundur, sekalipun itu mengecewakan pendukungnya yang menginginkan dia tampil kembali memimpin negeri ini. Habibie yang pada mulanya diidentikkan dengan Soeharto, penguasa otoriter zaman Orde Baru, ternyata bisa menunjukkan dirinya tidak otoriter. Kritikan, hujatan, cacian atau apa pun yang namanya 'penyerangan', dihadapi Habibie dengan sikap egaliter."

"Selama 512 hari memerintah, Habibie konsisten membuktikan tekadnya untuk mengantarkan bangsa ini

menuju alam demokrasi. Kebebasan pers adalah berkat pemerintahan Habibie. Pembebasan tapol/napol, Pemilihan umum l999 yang diikuti 48 parpol,atau penyelenggaraan SU MPR yang demokratis dan terbuka, juga berkat pemerintahan Habibie. Ini patut dicatat, sebab bagaimanapun bangsa Indonesia tidak akan mampu hidup sedemokratis seperti sekarang, jika tidak diiktikadi oleh pemerintahan Habibie. Itu semua adalah prestasi yang luar biasa dan sulit dibayangkan bisa terjadi pada masa Soeharto."

Wartawan media elektronik SCTV, pernah bertanya kepada B.J. Habibie, apa *achievement* terbesarnya hingga saat ini. Habibie, menjawab bahwa yang paling berharga, *".... dalam kedudukan apa pun, tugas kita sebenarnya datang untuk memberi tidak untuk mengambil."*

Tanggapan juga berdatangan dari berbagai tokoh dari dalam dan luar negeri. Termasuk para tokoh dan organisasi masyarakat, partai politik yang selama ini menyikapi semua kinerja B.J. Habibie dengan negatif. Mereka memberikan penghargaan atas sikap B.J. Habibie yang menolak pencalonan dirinya untuk maju dalam pemilihan presiden.

William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik dari Ohio State University, yang juga pengamat politik Indonesia, memberikan komentar sebagai berikut:

"Terus terang saja yang menyelamatkan Demokrasi Indonesia adalah mantan B.J. Habibie. Beliaulah yang pertama melaksanakan pemilu secara adil di Indonesia, paska rezim Soeharto. Habibie seharusnya mendapatkan kredit poin tersendiri dari bangsa Indonesia, karena setelah Soeharto jatuh, Habibie bisa melaksanakan pemilu

1999 secara jujur dan adil dengan melibatkan banyak partai politik."

Bahkan menurut Liddle, Habibie bersedia tidak dipilih kembali sebagai calon presiden karena dia mengetahui banyak yang menghendaki agar dia tidak menjadi presiden untuk kedua kalinya.

"Apa yang dilakukan Habibie, menurut Liddle sama dengan pemimpin lain di negara-negara demokrasi besar di dunia. Seharusnya, pemerintah sekarang ini memberikan penghargaan kepada putra Parepare itu sebagai peletak demokrasi pertama paska kejatuhan Soeharto.Karena sejarah mencatat,apa yang dilakukan Habibie untuk memulai sebuah proses demokrasi di Indonesia." (*Bisnis Indonesia*, 28 Maret 2002).

Malik Fadjar, Menteri Agama dalam Kabinet Reformasi Pembangunan menilai, sepanjang perjalanan bangsa Indonesia, sebanyak enam Presiden telah memerintah negeri ini. Masing-masing Presiden dihadapkan dengan liku-liku persoalan kebangsaan yang harus mereka selesaikan.

Presiden pertama —Presiden Soekarno— memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa ini, yaitu memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, masa pemerintahan Bung Karno mengalami pasang surut yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 1959 sebelum terjadinya peristiwa G 30 S PKI.

Presiden kedua —Presiden Soeharto— juga berperan penting dalam pembangunan kebangsaan di Indonesia setelah mampu mengakomodasi tiga tuntutan rakyat. Presiden Soeharto berperan penting dalam proses pembubaran PKI secara resmi. Ini merupakan awal Orde Baru dengan serangkaian program pembangunannya.

Berdasarkan penilaian Malik Fadjar, peran Presiden ketiga — Presiden B.J. Habibie— dalam proses kebangsaan juga strategis. B.J. Habibie, memegang tampuk pemerintahan sebagai akibat memenuhi tuntutan dan visi reformasi agar dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh. Pemerintahan B.J. Habibie, menjawab tuntutan visi reformasi dengan serangkaian kebijakan nyata seperti terselenggaranya Pemilu 1999, dibuatnya UU tentang kepartaian, menyelesaikan masalah Timor Timur, dan sebagainya. Langkah penting lainnya yang telah dilakukan B.J. Habibie termasuk dalam hal kesediannya dalam memberikan pidato pertanggungjawaban sebagai komitmen untuk memenuhi kehendak rakyat.

Posisi Presiden B.J. Habibie, ketika mengambil alih tongkat kepemimpinan dari Presiden Soeharto, memiliki posisi baik secara objektif maupun secara subjektif sama ketika Presiden Soeharto mengambil alih pemerintahan dari Bung Karno.

Berdasarkan sejumlah fakta ini, pengambilalihan kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie harus dilihat secara proporsional dan dilakukan pendalamanan dalam konteks sama dengan ketika terjadi pengambilalihan pemerintahan dari Bung Karno ke Presiden Soeharto.

Jika Presiden Soeharto memenuhi agenda tuntutan Tritura maka B.J. Habibie adalah dalam konteks memenuhi agenda tuntutan reformasi. Maka, ketika B.J. Habibie bekerja, maka yang dilakukan pertama kali kepada Kabinet Reformasi Pembangunan adalah memberikan *guide line* yang jelas untuk memenuhi lima tuntutan reformasi tersebut. *Guide line* yang jelas seperti itulah yang saat ini justru tidak dimiliki oleh Presiden pasca B.J. Habibie.

Semua penilaian dan pujian itu diterima oleh B.J. Habibie dengan biasa saja. Ia berterima kasih atas semua pujian itu.

Tetapi ia merasa keputusan yang telah diambilnya tidak memerlukan penghargaan dan pujian. Keputusan yang dipilihnya memang seharusnya demikian. Ia tetap berdiri tegak, ikhlas dan tanpa beban sama sekali. "Saya tidak berhenti karena dipukuli atau dipaksa. Saya berhenti normal dan konstitusional serta demokratis," demikian katanya pada konferensi pers di kediamannya.

Menurut B.J. Habibie, manusia hanya merencanakan, tetapi Allah juga yang menentukan. Sebagai manusia yang amat mendambakan berkembangnya demokrasi di tanah air dan andalan bagi masa depan bangsa, ia menyatakan, ia telah menerima sepenuhnya hasil penilaian wakil-wakil rakyat tersebut dengan tulus dan ikhlas. Ia menyatakan bahwa kepada presiden yang terpilih, seluruh bangsa Indonesia harus memberikan dukungannya, demi pembangunan dan proses demokratisasi sesuai yang direncanakan dan dijadwalkan di Indonesia.

Dalam jumpa pers yang diadakan di kediamannya pada tanggal 20 Oktober l999, B.J. Habibie ditanya oleh wartawan, apa cita-citanya setelah berhenti jadi presiden.

B.J. Habibie menjawab bahwa ia bercita-cita untuk mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang akan memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi. "Saya punya cita-cita mendirikan LSM di sini yang mengkonsentrasikan diri untuk memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia," katanya.

B.J. Habibie menyadari bahwa demokrasi itu adalah konsep yang perlu secara berkesinambungan dikembangkan untuk mencapai Indonesia modern.

Rakyat Indonesia untuk waktu yang lama berada dalam kekuasaan yang sentralistis. Hari ini, rakyat Indonesia telah berada dalam sebuah sistem di mana kekuasaan akan makin terdesentralisasi. Kekuasaan telah kembali ke tangan wakil-

wakil rakyat dan transformasi kekuasaan memerlukan penyesuaian. Karena itu, kebutuhan untuk mendirikan sebuah lembaga demi memajukan dan mengembangkan konsep demokrasi di Indonesia sangatlah penting.

Pada tanggal 10 November l999, sebuah lembaga yang bernama "*The Habibie Center* (THC)" didirikan oleh B.J. Habibie dan keluarga di Jakarta. The Habibie Center merupakan sebuah lembaga swasta nirlaba, independen di bidang advokasi hak-hak asasi manusia (HAM) dan pengembangan demokrasi. Lembaga ini bertujuan memajukan masyarakat agar lebih modern dan demokratis dengan berlandaskan moralitas dan integritas dengan nilai-nilai kebudayaan dan religius. The Habibie Center dipimpin langsung oleh B.J. Habibie sebagai Ketua Dewan Pendiri.

Peresmian THC dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 22 Mei 2000, bertempat di Jakarta Convention Center Jakarta, ditandai antara lain dengan penekanan tombol. Hadir undangan khusus, mantan Presiden Filipina, Corazon Aquino. Upacara peresmian ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan "*Colloquium*" selama tiga hari dengan mengundang sejumlah pakar ilmu politik terkemuka dari luar dan dalam negeri.

Pada pidato pembukaan, B.J. Habibie mengatakan bahwa pengalaman selama 512 hari memimpin negara dan bangsa Indonesia membuat ia menyadari bahwa perkembangan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, haruslah dikedepankan jika bangsa ini berniat untuk tumbuh dan bersaing dalam kompetisi global.

Demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia harus diperjuangkan, karena hal tersebut tidak muncul atau terjadi dengan sendirinya. Perjuangan dan usaha itu harus dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan oleh semua anggota masyarakat, termasuk pemerintah. The

Habibie Center didirikan agar menjadi kendaraan bagi rakyat Indonesia untuk memulai kelanjutan proses demokratisasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Mengenai hak asasi manusia, B.J. Habibie mengatakan, isu seputar HAM akan senantiasa ada karena menyangkut eksistensi manusia. Namun, hingga kini belum banyak dipikirkan mengapa orang lebih suka berkutat hanya pada soal apa itu HAM dan bukannya pada persoalan mempertanyakan tanggung jawab kita melaksanakan HAM. Isu ini diangkat, karena, kata B.J. Habibie, "dunia ini senantiasa mengalami proses perubahan tanpa henti. Dunia terus berubah."

Ini pula yang membuat B.J. Habibie lalu mengutarakan perlunya diadakan banyak perubahan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk kemungkinan mengadakan pemilihan presiden secara langsung.

Kalau ada yang berubah sejak RI merdeka 55 tahun lalu, tambahnya, itu adalah perkembangan mutu sumber daya manusia Indonesia yang semakin maju. "Itu bukan hasil kerja individual, katakanlah karya Soekarno, Soeharto, Habibie, atau bahkan Abdurrahman Wahid. Itu adalah hasil karya kita semua, yakni seluruh bangsa Indonesia," tandasnya mengundang tepuk tangan meriah.

Di tengah *colloquium* tiga hari menyambut peresmian The Habibie Center, ia juga berbicara mengenai garis-garis besar kebijakan politiknya saat menjabat presiden. "Bak seorang co-pilot yang tiba-tiba harus menggantikan fungsi, peran, dan tanggung jawab pilot yakni menyelamatkan pesawat dari kemungkinan jatuh terjerembab ke bumi, itulah situasi saya saat itu ketika menerima suksesi kekuasaan dari tangan Pak Harto," tuturnya

"Selama 512 hari berkuasa, saya terus diguncang demo yang jumlahnya tak kurang dari 3.200-an kali dengan satu

tema besar yakni menghujat Habibie. Namun, saya tetap bersiteguh dalam keyakinan saya, meski sejumlah pakar meramalkan paling-paling saya hanya akan mampu bertahan paling lama tiga bulan saja," kata pakar desain pesawat terbang itu.

Di tengah euforia massa berdemo inilah, lanjut Habibie, kepadanya tiba-tiba datang usulan apakah tidak lebih baik ia segera memberlakukan negara dalam situasi darurat perang atau SOB (*staat van oorlog en beleg*). Dan kini, setelah masa-masa kritis itu dan tak lagi duduk di Istana Negara, Habibie mengaku sangat bersyukur tak pernah sampai menyatakan Indonesia dalam keadaan SOB yang katanya pernah diusulkan oleh sejumlah orang kepadanya. "Sejak awal saya sudah yakin, pemberlakuan SOB itu malah akan kontraproduktif dengan arus demokratisasi yang tengah ingin saya gulirkan," katanya.

Kini apa yang telah dilakukannya selama memimpin pemerintahan sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia, terbuka sudah. Dalam situasi seperti ini, mengingatkan kita pada kalimat-kalimat yang dibacakannya ketika memberikan pertanggungjawaban kepada wakil-wakil rakyat 14 Oktober 1999. Ketika ia dengan rendah hati mengatakan bahwa ia bukanlah insan luar biasa yang turun dari langit untuk mengubah harapan menjadi kenyataan.

B.J. Habibie juga mengatakan bahwa ia menyadari betapa soal yang dihadapi bangsa Indonesia ini berat dan sarat dengan tantangan. Tetapi itulah konsekuensi atas pilihan yang kita lakukan. Kita telah memilih untuk melakukan reformasi menyeluruh, maka sekali layar terkembang, pantang surut kita berlayar.

Kepada mereka yang menilainya tidak mencapai hasil apa pun selama ia memimpin pemerintahan, maka semuanya itu ia kembalikan kepada Allah SWT, karena

Dialah yang Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan di dunia ini. B.J. Habibie menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan sumbangsihnya sehingga meringankan langkah dan tugasnya. "Biarkanlah semua kekurangan ini menjadi milik saya. Kerja, karya, dan hasil yang tercapai seluruhnya terpulang kepada rakyat Indonesia, pemilik sejati negeri ini. Itulah semua yang dapat saya sampaikan ke haribaan rakyat Indonesia."

Lampiran

Lampiran 1.

Susunan Pengurus KPU 1999

Ketua Merangkap Anggota	:	Rudini (WakilPartai)
Wakil Ketua Merangkap Anggota	:	Adnan Buyung Nasution (Wakil Pemerintah)
Wakit Ketua Merangkap Anggota	:	Harun Alrasid (Wakil Partai)

Anggota KPU Wakil Pemerintah

1 Adnan Buyung Nasution
2 Andi A.Mallarangeng
3 Afan Gaffar
4 Anak Agung Oka Mahendra

Anggota KPU Wakil Partai Politik Peserta Pemilu

5	H. Djuhad Mahja. SH, Cn.	Partai Persatuan Pembangunan
6	Drs. Mahadi Sinambela	Partai Golkar
7	HR Bambang Mintoko MP	Partai Demokrasi Indonesia
8	Lukman Syamra	Partai Republik
9	Drs. Jacob Tobing, MPA	PDI Perjuangan
10	Ir .H. Amaruddin Djajasubita	Partai Syarikat Islam Indonesia

11	Mustafa Kamal, SS.	Partai Keadilan
12	Yahya C. Staquf	Partai Kebangkitan Bangsa
13	Edwin Henawan Soekowati	Partai Nasional Demokrat
14	Dr. Sutradara Gintings	Partai Keadilan dan Persatuan
15	H Sjafuddinsyah Nasution	Partai Cinta Damai
16	Jenderal TNI (Purn.) Rudini	Partai MKGR
17	Abdul Rahman Saleh, SH. MH.	Partai Bulan Bintang
18	Hasballah M Saad	Partai Amanat Nasional
19	K.H. Agus Miftach	Partai Rakyat Indonesia
20	Drs. H Nursyirwan Noer Datuk	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
21	H.M. Thohir Humaydi	Partai Nadhlatul Umat
22	Prof. Dr. H. Harun Alrasid	Partai Umat Islam
23	KH M Amin Abdullah	Partai Umat Muslimin Indonesia
24	Dr. Hadidjojo Nitimihardjo, Msc.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak
25	C.M.L. Sitompul	Partai Kristen Nasional Indonesia
26	Drs. M Hassan Potabuga, MM., Phd.	Partai PNI - Massa Marhaen
27	H. Abdy S. Kusumanegara, MBA.	Partai Kebangkitan Umat
28	Bennie Akbar Fatah	Partai Buruh Nasional
29	H. Rusly Dahlan, SH.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
30	R.O. Tambunan	Partai Pilihan Rakyat
31	Bambang Suroso	PNI - Front Marhaenis
32	Prof. Dr. Midian Sirait	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
33	I.M. Sunarkha	PNI-Supeni
34	Drs. Soegito	Partai Nasional Bangsa Indonesia
35	Saut H. Aritonang	Partai Pekerja Indonesia
36	Drs. H Syamsahril SH, MM.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

37	Drs. H. Mardiansyah	Partai Persatuan
38	Dr. H. Rasyidi	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
39	Drs. Syarkawi Tjes	Partai Masyumi Baru
40	Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas	Partai Uni Demokrasi Indonesia
41	Askodar, SH.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
42	Nurdin Purnomo	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
43	H. Masiga Bugis, SH.	Partai Islam Demokrat
44	H. St. Sukarnotomo, MBA.	Partai Indonesia Baru
45	Dr. H Rusli Bintang	Partai Abul Yatama
46	Kornelis Kopong Saran, SH.	Partai Katolik Demokrat
47	Drs. L. Heru Khuthami	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
48	Pardjaman B.SC.	Partai Solidaritas Pekerja
49	H. Moh. Bambang SIP	Partai Aliansi Demokrat Indonesia
50	Hendri Kuok, SH.	Partai Rakyat Demoratik
51	Shirato Syafei Sth	Partai Kebangsaan Merdeka
52	Umar Husein	Partai Daulat Rakyat

Keterangan:

Wakil Partai : 48 orang
Wakil Pemerintah : 4 orang

Lampiran 2.

Pidato Pengumuman Hasil Pemilu 1999 di TVRI dan RRI.

"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air;

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat melaksanakan salah satu tahap penting di dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu tahap pemungutan, dan penghitungan serta pengesahan suara.

Walaupun hingga batas waktu yang disepakati oleh KPU, masih terdapat sejumlah wakil parpol di KPU yang belum berkenan menandatangani hasil akhir tersebut, hal ini tidak mengurangi keabsahan penyelenggaraan Pemilu 1999.

Karena, secara statistik, parpol yang telah membubuhkan tanda tangan untuk menerima hasil perhitungan tersebut sesungguhnya telah mewakili 93,03 persen atau 98.348.208 dari seluruh pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999.

Dengan kenyataan tersebut, saya percaya bahwa sebagai patriot bangsa mereka yang belum membubuhkan tanda tangan pada hasil pemilu tersebut pada hari ini, insya Allah, akan mempertimbangkan kembali posisinya sejalan dengan semangat demokrasi dan kehendak masyarakat luas.

Berkenaan dengan masih adanya anggota KPU yang belum menandatangani hasil perhitungan tersebut, Panwaslu Pusat akan melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya melalui PP No. 33 tahun 1999,

khususnya pasal 33, yaitu melakukan penyelidikan atas alasan-alasan yang diajukan oleh Partai Politik yang belum menandatangani berita acara hasil Pemilu 1999.

Saya telah meminta kepada Panwaslu Pusat untuk melaksanakan tugas itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya —paling lama 7 hari— agar masyarakat dapat segera mendapatkan kepastian, dan tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan.

Di balik itu semua, kita bersyukur bahwa pelaksanaan pemungutan suara yang berjalan dengan jujur dan adil tersebut adalah produk dari kerja sama yang harmonis antara lembaga-lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu, partisipasi partai-partai politik peserta pemilu, kerja keras seluruh jajaran pemerintahan serta aparat keamanan, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, kepada para pimpinan partai politik, KPU, PPI, Panwaslu, para pemantau asing dan domestik, serta seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya, saya —yang mendapat amanah MPR sebagai penanggungjawab penyelenggaraan Pemilu 1999— menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Kerja keras tanpa pamrih yang telah dilakukan semua pihak telah membuahkan hasil yang amat penting bagi perjalanan bangsa di masa depan, yaitu semakin bersemi dan berkembangnya demokrasi di tanah air.

Seperti kita ketahui bersama, Pemilu 1999 merupakan suatu langkah strategis yang kita tempuh untuk memberi makna amanah reformasi politik yang diberikan oleh rakyat melalui Ketetapan-ketetapan MPR 1998.

Inilah pemilihan umum pertama sejak 1955 yang benar-benar demokratis, jujur, dan adil. Kenyataan tentang tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu kali ini —yang

sebelumnya diduga oleh sejumlah pengamat sebagai sesuatu yang sulit— merupakan bukti tingginya kepercayaan rakyat pada sistem yang sedang kita bangun.

Rakyat menaruh harapan besar kepada wakil-wakil mereka yang kelak akan menentukan perjalanan nasibnya. Nasib anak cucu kita akan sangat tergantung pada apa yang kita perbuat sekarang.

Sehubungan dengan itu, terlepas dari komposisi perolehan suara oleh partai-partai, harus kita akui bahwa pihak yang mutlak menang dalam Pemilu 1999 ini adalah rakyat Indonesia seluruhnya.

Mereka menang melawan semua kekhawatiran: bahwa Pemilu 1999 akan berdarah, bahwa tingkat partisipasi akan rendah, dan bahwa Pemilu jurdil adalah sebuah ilusi.

Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas keberhasilan dan kemenangan tersebut.

Di sisi lain, kemenangan dan kepercayaan rakyat itu hendaknya menjadi acuan moral yang membimbing setiap wakil rakyat dalam melaksanakan tugasnya.

Walaupun secara formal yang diumumkan hari ini belum bersifat final, pada kesempatan ini saya tetap ingin mengungkapkan kesyukuran saya dalam bentuk ucapan selamat kepada partai-partai politik yang telah berhasil meraih kursi di DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Secara khusus ucapan selamat itu saya sampaikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan —sebagai peraih suara terbanyak— demikian juga kepada Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, sebagai partai yang berhasil meraih 6 besar Pemilu 1999.

Kepada partai-partai lain yang berhasil meraih kursi di

DPR, namun tidak termasuk dalam kategori 6 besar, saya juga mengucapkan selamat.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Dengan selesainya perhitungan dan pengumuman hasil pemungutan suara ini, saya ingin mengajak segenap lapisan masyarakat untuk meninggalkan di belakang kita semua ekses-ekses yang terjadi dari dinamika perbedaan yang ada selama masa kampanye maupun masa pasca pemilu yang lalu.

Setelah itu saya juga ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengayunkan langkah menatap masa depan secara bersama-sama.

Persatuan dan kebersamaan ini sangat kita perlukan untuk dapat keluar dan pulih dari berbagai krisis yang kita hadapi, dan untuk menempuh masa depan dengan penuh optimisme.

Kekurangan yang masih terjadi pada penyelenggaraan pemilu yang lalu kiranya bisa dipahami mengingat waktu persiapan yang terbatas, baik dari sudut administrasi pelaksana, organisasi kepartaian, maupun sosialisasinya kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, jika kita melihatnya secara jernih, keberhasilan melewati tahapan-tahapan penting dari Pemilu 1999 ini sungguh merupakan rahmat besar yang dilimpahkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada seluruh rakyat Indonesia.

Belajar dari kekurangan-kekurangan maupun kesalahan serta ekses-ekses yang tidak kita inginkan tersebut, saya berharap dari sekarang kita sudah mulai memikirkan upaya-upaya penyempurnaannya, sehingga penyelenggaraan pemilu-pemilu di masa yang akan datang dapat berlangsung lebih baik dan lebih demokratis.

Sebagaimana yang telah saya kemukakan dalam pidato sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 7 Juni 1999, pemilu kali ini merupakan ujian tentang kedewasaan berdemokrasi bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dan, alhamdulillah, dari pemantauan kita semua terhadap proses pemungutan suara itu, kita bersyukur bahwa bangsa kita telah dinyatakan lulus oleh hampir semua pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri.

Di sana-sini memang masih ada kasus atau protes, namun secara umum Pemilu 1999 jauh lebih tinggi kualitas demokratiknya dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Namun demikian, apa yang kita capai hingga saat ini belumlah merupakan hasil yang bersifat final.

Pengumuman hasil perolehan suara partai-partai, akan disusul dengan pengumuman daftar calon terpilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. Selanjutnya akan dilakukan seleksi dan penetapan wakil-wakil utusan golongan dan utusan daerah untuk keanggotaan MPR, yang akan disusul pelantikan para wakil rakyat tersebut.

Kemudian, bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi berikutnya, yaitu Sidang Umum MPR, yang akan menetapkan GBHN dan ketetapan-ketetapan lain, serta pemilihan, penetapan dan pelantikan Presiden serta Wakil Presiden.

Dengan ungkapan lain, masih ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilalui, sebelum terbentuknya pemerintahan baru yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai pemerintahan yang akan membawa mereka mengawali era milenium ketiga.

Demikianlah mekanisme konstitusional yang ada, sebagai tahapan proses demokratisasi yang kita kembangkan, yang kesemuanya berlandaskan pada UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, dan produk peraturan

perundangan yang lain.

Hendaknya jangan sampai ada anggapan yang mempertentangkan antara kehidupan demokrasi di satu pihak dengan kehidupan konstitusional di pihak lain.

Bagi bangsa Indonesia, proses demokratisasi yang dikembangkan adalah demokrasi yang konstitusional.

Sebaliknya, kehidupan konstitusional yang kita pegang adalah dalam rangka proses demokratisasi.

Dalam dinamika kehidupan yang demikian, terbuka pula kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai penyempurnaan konstitusi dan perundangan yang ada, sesuai dengan aspirasi dan derap demokratisasi yang ada.

Namun, sekali lagi, penyempurnaan itu pun dilakukan sesuai konstitusi.

Apabila semua pihak memahami proses dan tahapan tersebut, maka kita menyadari bahwa tidak diperlukan lagi adanya pengerahan massa sebagai cara untuk memengaruhi pengambilan keputusan.

Secara normal-demokratik, pengerahan massa hanya wajar dilakukan dalam masa kampanye, sebagai wahana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Setelah terpilihnya para wakil rakyat dan terbentuknya lembaga perwakilan dan permusyawaratan, tidak ada lagi alasan untuk kembali melibatkan massa dalam proses pengambilan keputusan di forum-forum permusyawaratan dan perwakilan.

Di forum tersebut, hanya diperlukan wacana, diskusi dan adu argumentasi, sebelum sebuah keputusan diambil, baik berdasarkan kesepakatan bulat (mufakat), maupun kesepakatan mayoritas (voting).

Dalam konteks ini, perlu kiranya dipahami bahwa keputusan berdasarkan pemungutan suara (voting) adalah cara yang diterima secara universal untuk mengambil

keputusan. Menurut tradisi demokrasi, hasil yang diperoleh lewat voting tidak mengurangi legitimasi dari keputusan itu. Walaupun ada pihak yang tidak setuju, mereka mempunyai kewajiban etik untuk menerima dan taat.

Prinsip kesetaraan telah mencegah terjadinya pemaksaan kehendak, menghindarkan pengingkaran terhadap keputusan yang telah disepakati, dan menjunjung tinggi kebijaksanaan menerima mereka yang berbeda pandangan, sebagai kawan seperjuangan untuk mengejar kebahagiaan bersama.

Demikianlah indahnya kehidupan demokrasi. Demokrasi memang merupakan tahap dewasa dari sebuah kehidupan masyarakat beradab. Dalam kedewasaan itu, keputusan diambil secara bebas, sehingga kebenaran lahir sebagai hasil dari proses wacana yang menjadikan kesetaraan sebagai landasannya. Demokrasi memang memiliki nilai etika dan normanya sendiri, yang membedakannya dari tatanan otoritarianisme —yang menempatkan pemerintah dan negara sebagai patron terhadap rakyatnya— dan karena itu cenderung mendefinisikan kebenaran secara sepihak.

Bertolak dari pemikiran tersebut, kiranya semakin jelas bahwa jalan demokratisasi yang kita tempuh saat ini sudah benar. Kita telah sepakat untuk memberi makna reformasi politik sebagai demokratisasi. Proses ini harus terus digulirkan. Demokratisasi harus menjadi arus besar yang akan mampu menerjang dan menjebol benteng-benteng otoritarianisme yang mungkin di sana sini masih tersisa. Benteng-benteng itu tidak terbatas pada tingkah laku kekuasaan, tetapi juga pada sikap mental sebagian tertentu warga masyarakat yang masih cenderung menggunakan cara-cara lama, dalam bentuk pemaksaan kehendak dan intimidasi dengan mengatasnamakan rakyat. Secara sadar

atau tidak sadar, sebenarnya mereka telah melecehkan aspirasi rakyat, yang tecermin dalam hasil pemilihan umum yang transparan, jujur dan adil.

Pengerahan massa untuk unjuk rasa —apalagi dengan memprovokasi lahirnya tindak kekerasan— setelah terpilihnya wakil-wakil rakyat, adalah suatu langkah mundur yang harus kita hindari dan cegah bersama.

Oleh karena itu, berilah kesempatan yang luas bagi bangkitnya kembali nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik kita.

Jadikanlah segala tindak kekerasan, pemaksaan kehendak, dan ketidakadilan sebagai musuh bersama yang harus kita singkirkan.

Kita semua bertanggung jawab membangun Indonesia baru, Indonesia yang demokratik, untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air;

Hasil pemilu kali ini menunjukkan kepada kita bahwa rakyat telah menyuarakan hati nuraninya dengan bebas dan dengan pilihan yang beragam.

Kebebasan dalam memilih dan banyaknya pilihan itulah yang merupakan hakikat dari demokrasi. Hal ini telah ditunjukkan pada Pemilu tahun ini, yang ternyata tidak menghasilkan mayoritas tunggal.

Ini berarti rakyat tidak mau lagi berorientasi atau memercayakan masa depannya kepada satu orang atau satu kelompok atau satu partai saja. Hal ini juga berarti bahwa di masa yang akan datang rakyat kita tidak menginginkan terjadinya dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.

Harapan rakyat yang tecermin dari hasil pemilu ini hendaknya secara cerdas dapat dipahami dan ditransformasikan ke dalam suatu proses kehidupan politik

yang sehat, aspiratif dan demokratis.

Kita juga mencatat adanya dinamika kehidupan demokrasi yang positif yang terjadi setelah pemilu berlangsung. Dengan tidak adanya mayoritas tunggal, maka keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan penting di masa yang akan datang memerlukan suatu proses bersama, antara lain melalui kerja sama antar partai politik.

Hal itu tecermin dari berkembangnya pemikiran tentang berbagai kemungkinan aliansi-aliansi politik yang menjadi wacana publik akhir-akhir ini. Hal itu juga berarti bahwa besar kecilnya perolehan suara suatu partai secara individual, belum sepenuhnya memberi gambaran yang final tentang peta politik yang sesungguhnya.

Ruang hidup demokrasi Indonesia terbuka bagi lahirnya kelompok-kelompok partai yang bersepakat untuk saling mendukung.

Membangun kerja sama memerlukan dialog dan komunikasi yang intensif serta bertumpu pada rasa saling menghormati, memercayai dan saling memberi dan menerima satu sama lain. Jika jembatan dialog dan komunikasi politik ini dapat kita bangun dan kita budayakan maka saya yakin kehidupan demokrasi yang sehat akan dapat terwujud.

Dengan menumbuhkan demokrasi dan kehidupan politik yang sehat melalui dialog dan komunikasi itulah kehidupan berbangsa dan bernegara kita dapat berlangsung secara wajar, proporsional, dan diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

Jalannya dialog dan komunikasi di dalam kehidupan politik bangsa kita sangat diperlukan terutama untuk menyempurnakan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi yang makin sempurna akan memiliki kemampuan untuk setiap saat mengoreksi dan memperbaiki sistem dari dalam.

Perbaikan atau pembaharuan kehidupan berbangsa dan bernegara —yang berlangsung secara konsisten dari dalam dan berkesinambungan— itulah yang kita kehendaki, sehingga kita dapat terhindar dari perubahan yang random (acak-acakan) yang bersifat drastis dan mendadak, yang pada akhirnya akan mengorbankan rakyat sendiri.

Hasil pemilu ini juga mencerminkan pluralitas bangsa kita yang memerlukan penyaluran aspirasinya melalui sistem yang dapat mengakomodasikan keberagaman itu. Hal ini memberikan makna bahwa rakyat tidak mau lagi dijadikan eksperimen dari suatu kebijakan yang tidak demokratis. Rakyat menginginkan pengakuan terhadap kebhinnekaannya. Para pendiri bangsa kita menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan bangsa kita justeru terletak pada keberagaman itu. Keberagaman itu adalah rahmat Tuhan yang harus kita jaga dan pelihara.

Saudara-saudara sekalian,

Demikianlah yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan telah selesainya dan telah diumumkannya perhitungan hasil pemungutan suara pada Pemilu yang lalu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita."

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Presiden Republik Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie

Akronim

ABRI	:	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
AD	:	Angkatan Darat.
AD	:	Anggaran Dasar.
ADB	:	*Asian Development Bank* (Bank Pembangunan Asia).
AL	:	Angkatan Laut.
APBN	:	Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
ART	:	Anggaran Rumah Tangga.
ASEAN	:	*Association of Southeast Asian Nations.*
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri.
AU	:	Angkatan Udara.
Bakornas	:	Badan Koordinasi Nasional.
Bank Exim	:	Bank Ekspor – Impor.
BAP	:	Berita Acara Pemeriksaan.
Bapindo	:	Bank Pembangunan Indonesia.
Barelang	:	Batam – Rempang – Galang.
Barelangbin	:	Batam – Rempang – Galang – Bintang.
Barnas	:	Barisan Nasional.
BBD	:	Bank Bumi Daya.
BBM	:	Bahan Bakar Minyak.
BBO	:	Bank Beku Operasi.
BCA	:	Bank Central Asia.
BI	:	Bank Indonesia.
BII	:	Bank Industri Indonesia.
BIN	:	Badan Intelejen Negara.
BKSPTIS	:	Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta.
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
BM PASI	:	Badan Musyawarah Pemangku Adat Seluruh Indonesia.
BNN	:	Badan Narkotika Nasional.
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah.
BPIS	:	Badan Pengelola Industri Strategis.
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
BTO	:	Bank *Take Over*.
Bulog	:	Badan Urusan Logistik.
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah.
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara.
BUMS	:	Badan Usaha Milik Swasta.
DAKAB	:	Dana Abadi Karya Bhakti.
CAR	:	*Capital Adequacy Ratio.*
CGI	:	*Consultative Groups on Indonesia.*
DG	:	Dewan Gubernur.
DHARMAIS	:	Dharma Bhakti Sosial.
DK PBB	:	Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota.
DPA	:	Dewan Pertimbangan Agung.
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah.
DPD	:	Dewan Pimpinan Daerah.
DPKEK	:	Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.
DPP	:	Dewan Pimpinan Pusat.
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
DPR–GR	:	Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong.
Dubes	:	Duta Besar.
ECOSOC	:	*Economic and Social Council* .
Ekuin	:	Ekonomi, Keuangan dan Industri.
FAA	:	*Federal Aviation Agency.*
FABRI	:	Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
FCHI	:	Forum Cendekiawan Hindu Indonesia.
FDAI	:	*Flight Director Attitude Indicator.*
FDI	:	*Foreign Direct Investment.*
FKP	:	Fraksi Karya Pembangunan.
FOKAR	:	Forum Komunikasi Aksi Reformasi.
FPDI	:	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.
FPP	:	Fraksi Persatuan Pembangunan.
GAM	:	Gerakan Aceh Merdeka.
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara.
GKPB	:	Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa.

Golkar	:	Golongan Karya.
GNP	:	*Gross National Product.*
G-30-S	:	Gerakan 30 September.
HAM	:	Hak Asasi Manusia.
HI	:	Hotel Indonesia
HMI	:	Himpunan Mahasiswa Islam.
HUT	:	Hari Ulang Tahun.
ICMI	:	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia.
IDB	:	*Islamic Development Bank.*
IGGI	:	*Inter-Govermental Group on Indonesia*
ILO	:	*International Labour Organization.*
IMF	:	*International Monetary Fund* (Dana Moneter Internasional).
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency* (Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia).
INPRES	:	Instruksi Preseden.
Iptek	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
IPTN	:	Industri Pesawat Terbang Nusantara.
Iramasuka	:	Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.
ISKA	:	Ikatan Sarjana Katolik Indonesia.
ITB	:	Institut Teknologi Bandung.
ITS	:	Institut Teknologi Surabaya.
JAA	:	*Joint Airworthness Agency.*
Jas Merah	:	Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah.
JPS	:	Jaring Pengaman Sosial.
Jurdil	:	Jujur & Adil.
KAM	:	Kewajiban Asasi Manusia.
KAMI	:	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.
Kapolri	:	Kepala Kepolisian RI.
KAPPI	:	Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia.
Kapuspen	:	Kepala Pusat Penerangan.
Kadispenad	:	Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat.
Kadispenau	:	Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara.
Kadispenal	:	Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut.
Kadispenpolri	:	Kepala Dinas Penerangan Polri.
Kapet	:	Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu.
KBG	:	Keluarga Besar Golkar.
KCBI	:	Kesatuan Cendekiawan Buddha Indonesia.
Kesra	:	Kesejahteraan Rakyat.
KISDI	:	Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam.

KKN : Korupsi, Kolusi & Nepotisme.
KLBI : Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat.
KNPI : Komite Nasional Pemuda Indonesia.
Komnas HAM : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kostrad : Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
KPU : Komisi Pemilihan Umum.
KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah.
KSAD : Kepala Staf Angkatan Darat.
KSAL : Kepala Staf Angkatan Laut.
KSAU : Kepala Staf Angkatan Udara.
KTT : Konferensi Tingkat Tinggi.
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
LPKK : Liga Penegak Kebenaran dan Keadilan.
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat.
Manipol-Usdek : Manifesto Politik – UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, dan Kepribadian.
Menko : Menteri Koordinator.
Migas : Minyak dan Gas.
MKGR : Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong.
MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat.
MPRS : Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
MUI : Majelis Ulama Indonesia.
Munas : Musyawarah Nasional.
Munaslub : Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Musda : Musyawarah Daerah.
Nasakom : Nasionalisme–Agama–Komunis.
Nawaksara : "Nawa Aksara" : Sembilan Ucapan.
NGO : *Non Government Organisation.*
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia.
OKI : Organisasi Konferensi Islam.
PAD : Pendapatan Asli Daerah.
PM : Perdana Menteri.
PAN : Partai Amanat Nasional.
Pangdam : Panglima Kodam.
Pangab : Panglima Angkatan Bersenjata.
Pangkostrad : Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB : Partai Bulan Bintang.
PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
PD : Percaya Diri.
PD : Partai Demokrat.
PDB : Produk Domestik Bruto.
PDI : Partai Demokrasi Indonesia.
PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
PDKMK : Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan.
Pemilu : Pemilihan Umum.
Perpu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Pertamina : Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja.
PIKI : Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia.
Pjs. : Pejabat Sementara.
PKB : Partai Kebangkitan Bangsa.
PKI : Partai Komunis Indonesia.
PLN : Perusahaan Listrik Negara.
PMII : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
PNM : Permodalan Nasional Madani.
PNPS : Penetapan Presiden.
PNS : Pegawai Negeri Sipil.
Polkam : Politik dan Keamanan.
Polri : Polisi Republik Indonesia.
POUD : Pemerintahan, Otomoni Umum dan Daerah.
PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
PPP : Partai Persatuan Pembangunan.
Prolegnas : Program Legitimasi Nasional.
Puspiptek : Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Rapim : Rapat Pimpinan.
RDKK : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
Repelita : Rencana Pembangunan Lima Tahun.
RI : Republik Indonesia.
RKM : Rasio Kecukupan Modal.
RS : Rumah Sakit.
RUU : Rancangan Undang-Undang.
RUU PKB : Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya.

SDM	:	Sumberdaya Manusia.
Sembako	:	Sembilan Bahan Pokok.
Sesdalobang	:	Sekretaris Pengendalian Operasionil Pembangunan.
SI	:	Sidang Istimewa.
SIUPP	:	Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
SMA	:	Sekolah Menengah Atas.
SP3	:	Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
STIE	:	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
SU	:	Sidang Umum.
Super Semar	:	Surat Perintah Sebelas Maret.
Susenas	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional.
TAP MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Timtim	:	Timor Timor.
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia.
TP	:	Tahun Penyediaan.
Tritura	:	Tiga Tuntutan Rakyat.
TVRI	:	Televisi Republik Indonesia.
Unas	:	Universitas Nasional (Jakarta).
Uhalu	:	Universitas Haluoleo (Kendari).
UI	:	Universitas Indonesia.
Unamet	:	*United Nations Mission in East Timor.*
UU	:	Undang-Undang.
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945.
Wapres	:	Wakil Presiden.

Glosari

AA Baramuli, Dr.: Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI/ Dewan Penasihat Golkar.
Abikusno Tjokrosoejoso, Dr.: Ketua Panitia Pembelaan Tanah Air BPUPKI.
Abdul Gafur: Wakil Ketua DPR/MPR/Ketua DPP Golkar.
Abdul Gani : Direktur Utama Garuda Indonesia.
Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar: Mantan Menhankan Pangab.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), K.H.: Presiden RI Keempat/Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa/ Ketua PB Nahdlatul Ulama.
Adi Sasono: Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabinet Reformasi Pembangunan.
Adnan Buyung Nasution, Dr.: Pengacara Senior/ Wakil Ketua KPU dari Unsur Pemerintah.
Ahmad Tirtosudiro, Letnan Jenderal (purn): Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Bidang Politik/Ketua Pelaksana Harian ICMI.
Ahmad Watik Pratiknya, Dr.: Asisten Wapres/Sekretaris Wapres/Asisten LPND Menteri Sekretaris Negara/Pj. Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara.
Akbar Tandjung: Sekretaris Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar / Mensesneg Kabinet Reformasi Pembangunan/Ketua Umum Partai Golkar.
Ali Alatas: Menteri Luar Negeri.
Ali Yafie, K.H.: Ketua Majelis Ulama Indonesia.
A.M. Hendropriyono, Letnan Jenderal: Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan.
Amien Rais, Prof. Dr. H.M.: Ketua PP Muhammadiyah/Ketua Dewan Pakar ICMI/Ketua MPR/ Ketua Partai Amanat Nasional.

Andi Hamzah, SH; Prof. Dr.: Pakar hukum yang memberi masukan dan saran penyelesaian masalah Pak Harto.
Andi Makmur Makka: Pemimpin Redaksi Harian Republika
Andi Mattalatta: Anggota MPR yang datang menyampaikan informasi tentang Sidang Istimewa 1998.
Andi Muhammad Ghalib: Jaksa Agung.
Anwar Haryono: Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia.
Ary Mardjono: Sekjen Golkar/Ketua Panitia Pengarah, Munaslub Golkar.
A. Sulasikin Murpratomo,Ny. : Anggota Dewan Penasihat Golkar/Anggota DPA.
Aulia Rahman : Ketua Pelaksana Munaslub Golkar.
Bambang Purnomo, SH; Prof. Dr.: Pakar ilmu hukum.
Bambang Subianto: Menteri Keuangan/Kabinet Reformasi Pembangunan.
Bambang Trihatmodjo: Bendahara Golkar/Tim Munaslub Golkar 1998.
Barda Nawawi Arif, SH; Prof. Dr.: Pakar ilmu hukum.
Basilio do Nascimento : Uskup Baucau.
Benny Murdani, Jenderal: Mantan Menghankam /Pangab.
Boediono: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan/ Ketua Tim Ahli DPKEK.
Carlos Filipe Ximenes Belo : Uskup Dili.
Cipto Mangunkusumo, Dokter : Bersama Multatuli dan Suwardi Suryoningrat berperan dalam pemikiran tentang Indonesia.
Ciputra, Ir: Pengusaha Nasional.
Corry Aquino: Presiden Filipina.
Daniel S. Lev, Prof: Guru besar Ilmu Politik di Washington University, Amerika Serikat.
Darmansyah, Laksamana Muda: Anggota DPR/MPR RI.
David Napitupulu: Mantan Dubes RI di Meksiko.
Dewi Fortuna Anwar,Dr. : Pakar politik LIPI/Asisten Urusan Luar Negeri Menteri Sekretaris Negara.
Djamari Chaniago, Letnan Jenderal :Panglima Divisi Siliwangi.
Jamsheed Marker: Sekretaris Jenderal Unamet.
Djuhana, Kolonel (AL): ADC Presiden B.J.Habibie.
Edie Sudradjat, Jenderal : Mantan Menhankan/Pangab.
Edward Douwes Dekker (Multatuli): Bersama dokter Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryoningrat berperan dalam pemikiran tentang Indonesia.
Emil Salim, Prof.Dr.: Ekonom, Mantan Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup di era Presiden Soeharto.
Fadel Mohammad: Ketua DPP Golkar.

Fahmi Idris: Menteri Tenaga Kerja, Kabinet Reformasi Pembangunan/ Ketua DPP Partai Golkar.
Fatimah Achmad: Wakil Ketua DPR/MPR.
Feisal Tanjung, Jenderal: Menko Bidang Politik dan Keamaman Kabinet Pembangunan VII/Kabinet Reformasi Pembangunan.
Firman Gani, Kolonel (Pol): ADC Presiden B.J.Habibie .
Fuad Bawazier, Dr. : Menteri Keungan Kabinet Pembangunan VII.
Fuadi Rasyid, Dr. : Asisten Wapres/Irjenbang.
George Windsor Earl: Pakar dari Inggeris yang berpendapat, bahwa sebaiknya Ras yang kulitnya sawo matang diberi nama Melayunesia.
Ginandjar Kartasasmita, Prof. Dr. Ir.: Menko Ekuin Kabinet Pembangunan VII/Kabinet Reformasi Pembagunan/Wakil Ketua MPR.
Giri Suseno : Menteri Perhubungan Kabinet Pembagunan VII/Kabinet Reformasi Pembangunan.
Gunawan Hadisusilo, Ir. : Asisten Wapres.
Goenawan Mohamad: Budayawan/Pendiri Majalah *Tempo*.
Hamzah Haz: Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Kabinet Reformasi Pembangunan/Ketua UmumPartai Persatuan Pembangunan.
Haryanto Dhanutirto : Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan, Kabinet Pembangunan VII.
Hari Sabarno: Wakil Ketua DPR/MPR.
Hariman Siregar : Mantan aktivis mahasiswa.
Harmoko: Ketua DPR/MPR, Ketua Umum Golkar.
Harjono Djojodihardjo, Prof.Dr.Ir. : Asisten Khusus Wapres.
Hartarto Sastrosoenarto: Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Kabinet Pembangunan VII, Kabinet Reformasi Pembangunan.
Haryono Suyono: Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kabinet Pembangunan VII, Kabinet Reformasi Pembangunan.
Harun Alrasid, Prof.: Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia/ Wakil Ketua KPU.
Hasri Ainun Habibie, dr.: Istri Presiden B.J.Habibie.
Helmut Kohl: Kanselir Jerman.
Helmut Schlesinger, Prof. Dr. : Pakar Perbankan/Mantan anggota pimpinan Deutsche Bundesbank.
Hermawan K. Dipojono: Guru Besar ITB.
H.R. Agung Laksono,: Wakil Ketua Golkar/ Menpora Kabinet Reformasi Pembangunan.
Ilham Akbar Habibie: Putra Pertama Presiden B.J. Habibie.

Insana: Istri Ilham Akbar Habibie.
Ismail Hasan Metareum: Wakil Ketua DPR/MPR.
Ismujoko, SH: Pjs. Jaksa Agung.
Iwan Prawiranata: Ketua BPPN/ Direktur (Anggota Direksi) Bank Indonesia.
Iwan Sidi, Kolonel Udara: ADC Presiden B.J.Habibie.
Jimly Asshiddiqie, Dr. : Asisten Wapres.
Jimmy Carter: Mantan Presiden Amerika Serikat.
John Howard : Perdana Menteri Australia .
Johny Lumintang, Letnan Jenderal: Asisten Operasi Pangab/Pejabat Pangkostrad
John Sapi'ie, Dr.: Guru Besar ITB.
Josef Ackermann, Dr. : Direktur Deutsche Bank Frankfurt .
Jose Ramos Horta: : Tokoh Timor Timur.
Junus Effendy Habibie (Fanny Habibie): Adik Presiden B.J.Habibie/mantan Duta Besar Indonesia di Inggris.
Junus Yosfiah, Letnan Jenderal : Menteri Penerangan Kabinet Reformasi Pembangunan.
Justika Syarifudin Baharsjah: Menteri Sosial Kabinet Reformasi Pembangunan.
Kemal Idris, Letjen (purn): Ketua Barisan Nasional (Barnas).
Kivlan Zein, Mayor Jenderal : Kepala Staf Kostrad.
Kofi Annan: Sekjen PBB.
Kuningan: Rumah Presiden B.J. Habibie
Kuntoro Mangkusubroto: Menteri Pertambangan dan Energi Kabinet Reformasi Pembangunan.
Kwik Kian Gie, Drs.: Wakil Ketua MPR/ Tokoh PDI-Perjuangan.
Lee Kuan Yew : Senior Minister Republic of Singapore.
Lobby Loqman SH. MH , Prof. Dr.: Pakar ilmu hukum.
Mahfud MD, Dr. : Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Malik Fajar, Prof. Drs. A., MSc.: Menteri Agama Kabinet Reformasi Pembangunan.
Marwah Daud Ibrahim, Dr.: Ketua DPP Golkar/Anggota DPR-MPR Fraksi Golkar.
Marzuki Darusman: Ketua DPP Golkar/Anggota DPR-MPR Fraksi Golkar.
Mbak Tutut (Siti Hardiyanti Rukmana): Putra Presiden Soeharto/Menteri Sosial Kabinet Pembangunan VII/Ketua DPP Golkar.
Megawati Soekarnoputri: Ketua Umum PDI-Perjuangan/Wakil Presiden Ke-8.

Moestahid Astari : Tim Munaslub Golkar 1998.
Moh. Aryad Anwar: Staf ahli bidang pengkajian ekonomi dan keuangan Menko Ekuin.
Mohammad Hatta, Dr.: Proklamator/Wakil Presiden Pertama RI/Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan BPUPKI.
Mohammad Yamin, Mr.: Pimpinan Panitia Kecil yang merumuskan "Piagam Djakarta".
M Yusuf Abadi, MS; Dr: Pakar ekonomi dari Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari.4
Muladi, SH; Prof. Dr.: Menteri Kehakiman/Sekretaris Negara Kabinet Reformasi Pembangunan.
Muchdi P.R. , Mayor Jenderal: Danjen Kopassus.
Muchtar Pakpahan: Aktivis buruh.
Nadia: Cucu Presiden B.J. Habibie
Nelson Mandela: Presiden Afrika Selatan
Nurcholish Madjid, Dr.: Intelektual Islam/Rektor Universitas Paramadina Mulya.
Parni Hadi: Pimpinan LKBN Antara/Pimpinan Umum Harian Republika.
Pasha: Cucu Presiden B.J. Habibie
Pontjo Sutowo: Wakil Bendahara Golkar.
Prabowo Subianto, Letnan Jenderal: Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Quraish Shihab: Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII/Duta Besar di Mesir.
Rachmadi Bambang Sumadhijo: Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Pembangunan VII dan Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Reformasi Pembangunan.
Rachmat Witoelar: Sekjen Barnas/Sekjen DPP Golkar 1983-1988.
Ramelan, SH: Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.
Rahardi Ramelan : Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kabinet Pembangunan VII/Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Reformasi Pembangunan.
Robby Djohan: Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia dan Direktur Utama Bank Mandiri.
Roesmanhadi, Jenderal: Kapolri.
Rudini, Jenderal : Mantan Menteri Dalam Negeri/Ketua KPU.
Ryaas Rasyid, Prof. Dr.: Pimpinan Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk memberikan masukan dan saran mengenai Otonomi Daerah.
Saadillah Mursjid MPA, Drs. : Menteri Sekretaris Negara Kabinet

Pembangunan VII.

Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi: Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.

Sarwata SH: Ketua Mahkamah Agung.

Sintong Panjaitan, Letnan Jenderal: Asisten Wapres/Sesdalobang Kab. Reformasi Pembangunan.

Siti Hediyati Prabowo: Putri Presiden Soeharto.

Soebagio, Jenderal: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sofian Effendi, Dr.: Asisten Wapres/Asisten Menteri Sekretaris Negara.

Soedjono C. Atmanegara : Jaksa Agung.

Soeharto, Jenderal Besar: Presiden Republik Indonesia Kedua/ Pemegang Surat Perintah 11 Maret.

Soekarno: Proklamator/Presiden Republik Indonesia Pertama.

Soepomo, Dr.: Ketua Panitia Hukum Dasar BPUPKI.

Soewoto, Prof.: Ahli Hukum Tata Negara.

Sri Bintang Pamungkas, Dr.: Ketua PUDI/Anggota KPU.

Sri Sultan Hamengkobuwono X: Gubernur DI Yogjakarta/ Pengurus Golkar.

Subiakto Tjakrawerdaya: Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabinet Pembangunan VII.

Sumitro Djojohadikusumo, Prof.Dr. : Ekonom/Mantan Menteri Reset & Teknologi.

Susilo Bambang Yudoyono,Letnan Jenderal: Kepala Sosial Politik ABRI.

Suwardi Suryoningrat: Bersama Multatuli dan Dokter Cipto Mangunkusumo berperan dalam pemikiran tentang Indonesia.

Suyatim A. Habibie (Timmy Habibie): Pengusaha/Adik Presiden B.J. Habibie.

Syahril Sabirin : Gubernur Bank Indonesia.

Syarwan Hamid, Letnan Jenderal: Menteri Dalam Negeri Kabinet Reformasi Pembangunan.

Tanri Abeng : Menteri Negara BUMN Kabinet Pembangunan VII/Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kabinet Reformasi Pembangunan.

Thareq Kemal Habibie: Putra kedua Presiden B.J.Habibie.

Theo Sambuaga : Wakil Sekjen Golkar.

Tony Blair: Perdana Menteri Inggris.

Trulyanti Soetrasno: Deputi di BPPT/Pengurus ICMI.

Try Sutrisno, Jenderal: Mantan Wakil Presiden.

Tubagus Hasanuddin, Kolonel (AD): ADC Presiden B.J.Habibie.

Wahidin Sudirohusodo, Dokter: Melanjutkan pemikiran-pemikiran yang dirintis oleh Douwes Dekker, Dokter Cipto Mangunkusumo dan

Suwardi.

Waskito Reksosoedirdjo:Tim Munaslub Golkar 1998.

Widia: Istri Thareq Kemal Habibie.

Widjojo Nitisastro, Prof.Dr.: Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Ketua Bappenas Kabinet Pembangunan III/ Penasihat Presiden B.J. Habibie/ Wakil Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK).

Wiranto, Jenderal : Menhankam/Pangab Kabinet Pembangunan VII/ Menhan/Pangab Kabinet Reformasi Pembangunan.

Wolfgang Kartte, Prof. Dr.: Pakar Anti-Monopoli/Ekonomi Kerakyatan.

Xanana Gusmao: tokoh rakyat Timor Timur.

Yasril A. Baharuddin: anggota DPR RI Komisi I.

Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr.: Asisten Khusus Menteri Sekretaris Negara/ Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Yusuf Muhammad, KH: Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI.

Indeks

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Biodata

Bacharuddin Jusuf Habibie

Prof.Dr.Ing.-Dr.Sc.H.C.Mult.Bacharuddin Jusuf Habibie, lahir di Parepare (Sulawesi Selatan) Indonesia, pada tanggal 25 Juni 1936.Anak ke-4 dari sembilan putra-putri keluarga Alwi Abdul Djalil Habibie dan R.A.Tuti Marini Puspowardoyo. Ia hanya kuliah selama satu tahun di Institut Teknologi Bandung (ITB), karena pada tahun l955, ia dikirim oleh ibunya untuk belajar di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule,Aachen, Jerman. B.J.Habibie menikah dengan dr.Hasri Ainun Habibie, anak ke-4 dari delapan bersaudara, keluarga Haji Mohammad Besari, pada bulan tanggal 12 Mei l962 dan dikarunia dua putra dan lima cucu.

Setelah belajar di Jerman selama lima tahun, B.J.Habibie memperoleh Diplom-Ingenieur dengan prestasi cum laude dari Fakultas Teknik Mesin jurusan Desain dan Konstruksi pesawat terbang. B.J. Habibie muda, seorang muslim taat yang sering berpuasa sunnah Senin dan Kamis, memperoleh gelar Doctor Ingenieur di fakultas teknik mesin, jurusan Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang dengan predikat summa cum laude.

B.J. Habibie mengawali karir di Jerman dengan menjadi Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur di Hamburger Flugzeugbau Gmbh, Hamburg (1965-1969) kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB Gmbh, Hamburg dan Munchen (1969-1973). Menjadi Wakil

Presiden sekaligus Direktur Teknologi MBB Gmbh, Hamburg dan Munchen (1973-1978), Penasihat Senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB (1978). Sebelumnya, tahun 1977, B.J. Habibie menerima gelar Profesor dari Institut Teknlogi Bandung (ITB) dengan orasi ilmiah mengenai Konstruksi Pesawat Terbang.

Dalam rangka memenuhi panggilan tanah airnya, pada tahun 1974 B.J. Habibie kembali ke Indonesia. Dia memulai karirnya sebagai penasihat pemerintah bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas ini diembannya sampai tahun 1978. Setelah itu, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ia mengemban tugas ini selama lima periode Kabinet Pembangunan yang berakhir pada tahun 1998. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Riset Nasional.

Sebelum Pemilu 1997, B.J. Habibie menyampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, bahwa ia berencana mengundurkan diri setelah masa bhakti di Kabinet Pembangunan VI berakhir. Namun, manusia merencanakan Tuhan yang menentukan. Pada tanggal 11 Maret 1998, melalui Sidang Umum MPR, ia diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7.

Pada waktu yang bersamaan, krisis ekonomi melanda kawasan Asia termasuk Indonesia. Krisis ini pula mengakibatkan munculnya krisis politik dan kepercayaan di Indonesia. Krisis berlanjut yang lebih parah itu mendorong rakyat Indonesia menuntut reformasi total. Akhirnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, pada hari yang sama B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-3, di depan Ketua Mahkamah Agung dan

seluruh jajarannya.

Presiden B.J. Habibie memangku jabatan presiden selama 512 hari. Di bawah kepemimpinannya, Bangsa Indonesia bukan hanya sukses melaksanakan Pemilu multi partai yang bebas dan adil pada 7 Juni 1999, tetapi juga sukses membawa perubahan signifikan pada stabilitas, demokratisasi dan reformasi di Indonesia.

B.J. Habibie menerima 17 medali penghargaan dari dalam negeri dan 16 dari dunia internasional. Termasuk yang diterimanya adalah *Grand Officer De la Legion D'honneur,* penghargaan tertinggi pemerintah Prancis atas jasa-jasa dan kontribusinya pada pengembangan teknologi di Indonesia, 1997; *Das Grosskreuz*, penghargaan tertinggi pemerintah Jerman atas jasa-jasanya dalam membina hubungan antara Indonesia dan Jerman; Penghargaan *Edward Warner Award* yang dipersembahkan oleh Dewan Eksekutif organisasi internasional penerbangan sipil (ICAO) pada tahun 1994; Bintang Kehormataan , *La Gran Crus de la Orden del Merito Civil*, dari pemerintah kerajaan Spanyol pada tahun 1987. Ia juga menerima sejumlah doktor penghargaan (*Doctor of Honoris Causa*) dari beberapa universitas ternama dunia, antara lain: Cranfield Institute of Technology, Inggris; Chungbuk University, Korea dan beberapa universitas lainnya.

Selama kariernya, ia memegang 47 jabatan penting seperti : Direktur Utama PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),Direktur Utama Industri Perkapalan PT.PAL, Direktur Utama Industri Senjata Ringan (PINDAD), Kepala Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Kepala Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Sejak l997, ia memangku jabatan sebagai Presiden Forum Internasional Islam untuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia (IIFTIHAR), sampai saat ini B.J.

Habibie Pendiri dan Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, sejak 1999.

Sejak 2000, B.J. Habibie juga menjadi anggota sejumlah organisasi internasional non pemerintah, antara lain: *The Inter-Action Council*, sebuah organisasi yang beranggotakan kurang lebih 40 mantan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dari berbagai negara. Ia juga anggota Liga Muslim Dunia (*Rabhitah 'Alam Islami*) sejak 2001, organisasi ini berkantor pusat di Mekkah, Arab Saudi. Anggota *The National Academic of Engineering*, Amerika Serikat. Yang terbaru, ia menjadi salah satu pendiri Asosiasi Internasional Bidang Kolegium pakar Etika dan Politik yang didirikan di Bled,Slovenia. Organisasi ini beranggotakan sejumlah pakar dari berbagai negara.

B.J.Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang antara lain: Fokker F 28, Transall C-130 (transport militer), Hansa Jet 320 (jet eksekutif), Air Bus A-300, pesawat transport DO-31 (pesawat dengan teknologi mendarat dan lepas landas vertikal), CN-235, N-250 (pesawat dengan teknologi *Fly-By-Wire)*. Ia secara tidak langsung terlibat dalam proyek perhitungan dan desain Helikopter jenis BO-105, Pesawat Tempur dengan multi peran, beberapa peluru kendali dan satelit.

B.J. Habibie telah mempublikasikan sejumlah karya ilmiah dalam bidang thermodinamika, konstruksi, instatasi aerodinamika, dan mekanika fraktur pesawat terbang.